RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN 2026

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2026;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
6. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Renja-PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan dibidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 dimaksudkan untuk:

a. sebagai pedoman dalam menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.
b. sebagai pedoman penyempurnaan rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota.
c. sebagai pedoman dalam menyusun KUA PPAS APBD Tahun 2026.
   Digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB II
PENYUSUNAN
Pasal 3

RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika meliputi:
a. Bab I : Pendahuluan;
b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. Bab V : Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
f. Bab VI : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
g. Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
h. Bab VIII: Penutup.

(2) Rincian lebih lanjut mengenai RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Juli 2025
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

RADIAH BT. YOLOHIO, S.H., M.AP
NIP 197310022006042012

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Juli 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

BUSTAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025 NOMOR 19

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar xi

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-8
1.4 Maksud dan Tujuan I-9
1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Kondisi Umum Daerah II-1
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-183
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-278
2.4 Isu Strategis Daerah II-334

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-8

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2026 IV-19

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Indikator Makro Kabupaten/Kota V-1

5.2 Arah Pengembangan Kewilayahan V-4

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 VI-1

6.2 Dukungan Terhadap Prioritas Nasional VI-53

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) VII-1

7.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) VII-3

BAB VIII PENUTUP

8.1 Kaidah Pelaksanaan VIII-1

8.2 Perubahan RKPD VIII-2

LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026

Lampiran 2 Dukungan Sub Kegiatan untuk Penghapusan Kemiskinan Kaltara Tahun 2026

Lampiran 3 Dukungan Sub Kegiatan untuk Penghapusan Stunting Kaltara Tahun 2026

Lampiran 4 Dukungan Sub Kegiatan untuk Pengendalian Inflasi Kaltara Tahun 2026

Lampiran 5 Dukungan Sub Kegiatan untuk Penerapan SPM Kaltara Tahun 2026

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ibukota, Luas, Jumlah Kecamatan, dan Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kota	II-1
Tabel 2.2	Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah di Provinsi Kalimantan Utara (Ha)	II-3
Tabel 2.3	Luas tutupan lahan menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara (Ha)	II-4
Tabel 2.4	Luas Potensi Habitat Mangrove Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021	II-6
Tabel 2.5	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara	II-7
Tabel 2.6	Hasil Hutan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024	II-8
Tabel 2.7	Luas Jasa Lingkungan berdasarkan Status Jasa di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019	II-9
Tabel 2.8	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Penangkapan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-11
Tabel 2.9	Area Tambak dan Status Lahan Tiap Kota/Kabupaten Provinsi Kalimantan Utara	II-13
Tabel 2.10	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penangkapan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-15
Tabel 2.11	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Utara (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024	II-16
Tabel 2.12	Produksi Komoditas Pertambangan Kalimantan Utara 2019-2023	II-16
Tabel 2.13	Tenaga Kerja Sektor Pertambangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022	II-17
Tabel 2.14	Indeks Ketahanan Energi Nasional tahun 2020-2024	II-17
Tabel 2.15	Penilaian Indeks Ketahanan Daerah per Aspek	II-17
Tabel 2.16	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-19

Tabel 2.17	Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara	II-20
Tabel 2.18	Perwilayahan Pariwisata di Provinsi Kalimantan Utara	II-21
Tabel 2.19	Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-22
Tabel 2.20	Indeks Risiko per Ancaman Bencana Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	II-23
Tabel 2.21	Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2019-2023	II-24
Tabel 2.22	Luas Areal dengan Jasa Ekosistem Pencegahan Bencana Banjir di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota	II-26
Tabel 2.23	Luas Areal dengan Jasa Ekosistem Pencegahan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota	II-28
Tabel 2.24	Luas Areal dengan Jasa Ekosistem Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota	II-29
Tabel 2.25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-30
Tabel 2.26	Hasil Pengukuran Indeks Kalitas Air di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-30
Tabel 2.27	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-31
Tabel 2.28	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-32
Tabel 2.29	Indeks Kualitas Air Laut di Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024	II-33
Tabel 2.30	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024	II-33
Tabel 2.31	Status Daya Dukung Penyediaan Air Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023	II-36
Tabel 2.32	Status Daya Dukung Daya Penyediaan Air Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023	II-36
Tabel 2.33	Status Daya Dukung Daya Penyediaan Pangan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021	II-37
Tabel 2.34	Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-39
Tabel 2.35	Skor Tiga Pilar Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara 2022 & 2023	II-39

Tabel 2.36	Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Utara 2020-2025	II-41
Tabel 2.37	Persebaran dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025	II-41
Tabel 2.38	Rasio Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025	II-42
Tabel 2.39	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-46
Tabel 2.40	Perbandingan Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-49
Tabel 2.41	Kondisi Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-52
Tabel 2.42	Kondisi Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-57
Tabel 2.43	Perbandingan Laju Inflasi Kota Tarakan, Kota Tanjung Selor, Gabungan Kota Tarakan dan Tanjung Selor, serta Nasional Tahun 2020-2024	II-59
Tabel 2.44	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-62
Tabel 2.45	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-63
Tabel 2.46	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-69
Tabel 2.47	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-70
Tabel 2.48	Dimensi Penyusun Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Utara 2020-2023	II-76
Tabel 2.49	Domain dan Indikator Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2019-2023	II-80
Tabel 2.50	Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-84
Tabel 2.51	Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2010 Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-85
Tabel 2.52	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2020-2024	II-91

Tabel 2.53	Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-92
Tabel 2.54	Indeks Ekonomi Inklusif Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2021	II-93
Tabel 2.55	Indikator Indeks Pendidikan	II-101
Tabel 2.56	Indikator Angka Literasi	II-103
Tabel 2.57	Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat	II-104
Tabel 2.58	Pilar Indeks Literasi Digital Nasional 2020-2022	II-105
Tabel 2.59	Panjang Kondisi Jalan Kewenangan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024	II-108
Tabel 2.60	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	II-109
Tabel 2.61	Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024	II-109
Tabel 2.62	Indeks Rasa Aman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023	II-111
Tabel 2.63	Indeks Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Dimensi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-113
Tabel 2.64	Indeks Daya Saing Daerah Kalimantan Utara Tahun 2022-2024	II-113
Tabel 2.65	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-116
Tabel 2.66	Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-117
Tabel 2.67	Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023	II-118
Tabel 2.68	Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-118
Tabel 2.69	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-119
Tabel 2.70	Indikator Urusan Pendidikan Tahun 2019-2023	II-120
Tabel 2.71	Indikator SPM Pendidikan	II-120
Tabel 2.72	Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024	II-124
Tabel 2.73	Indikator Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2019-2023	II-129
Tabel 2.74	Indikator Urusan Penataan Ruang Tahun 2019-2023	II-132
Tabel 2.75	Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2023	II-133

Tabel 2.76	Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023	II-134
Tabel 2.77	Indikator Urusan Sosial Tahun 2019-2023	II-136
Tabel 2.78	Indikator Urusan Tenaga Kerja	II-138
Tabel 2.79	Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-140
Tabel 2.80	Indikator Urusan Pangan	II-143
Tabel 2.81	Indikator Urusan Lingkungan Hidup	II-145
Tabel 2.82	Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-149
Tabel 2.83	Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-151
Tabel 2.84	Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-152
Tabel 2.85	Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2019-2023	II-155
Tabel 2.86	Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika	II-157
Tabel 2.87	Kondisi Ketersediaan dan Layanan Telekomunikasi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023	II-157
Tabel 2.88	Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2020-2024	II-159
Tabel 2.89	Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga	II-159
Tabel 2.90	Indikator Urusan Statistik	II-161
Tabel 2.91	Indikator Urusan Kebudayaan	II-162
Tabel 2.92	Indikator Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024	II-162
Tabel 2.93	Indikator Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024	II-164
Tabel 2.94	Indikator Urusan Pariwisata	II-165
Tabel 2.95	Indikator Urusan Pertanian	II-167
Tabel 2.96	Indikator Urusan Lapangan Usaha Milik Sendiri/Bersama Kab/Kota Sektor Pertanian Tahun 2022	II-168
Tabel 2.97	Indikator Urusan Kehutanan	II-169
Tabel 2.98	Indikator Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	II-170
Tabel 2.99	Indikator Urusan Perdagangan	II-170
Tabel 2.100	Indikator Sebaran Tenaga Kerja Urusan Perdagangan Menurut Gender Tahun 2022	II-171
Tabel 2.101	Indikator Urusan Perindustrian	II-172
Tabel 2.102	Indikator Urusan Transmigrasi	II-173

Tabel 2.103	Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan	II-174
Tabel 2.104	Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan	II-175
Tabel 2.105	Indikator Urusan Keuangan Daerah	II-176
Tabel 2.106	Indikator Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	II-180
Tabel 2.107	Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan	II-181
Tabel 2.108	Indikator Urusan Pengawasan	II-182
Tabel 2.109	Indikator Urusan Sekretariat Dewan	II-182
Tabel 2.110	Capaian Indikator Makro Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 sampai dengan Triwulan I 2025	II-184
Tabel 2.111	Realisasi dan Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	II-191
Tabel 2.112	Rata-Rata Tingkat Capaian Program Berdasarkan Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	II-198
Tabel 2.113	Tingkat Capaian Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	II-200
Tabel 2.114	Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	II-236
Tabel 2.115	Rata-Rata Tingkat Capaian Sub Kegiatan Berdasarkan Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Utara pada Triwulan I Tahun 2025	II-243
Tabel 2.116	Rata-Rata Tingkat Capaian Sub Kegiatan pada Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Triwulan I Tahun 2025	II-244
Tabel 2.117	Isu Strategis Daerah Provinsi Kalimantan Utara	II-341
Tabel 3.1	PDRB ADHK Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	III-3
Tabel 3.2	PDRB ADHB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	III-6
Tabel 3.3	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	III-10
Tabel 3.4	Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	III-12
Tabel 3.5	Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	III-14
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2026	III-20

Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2026	III-26
Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2026	III-29
Tabel 3.9	Realisasi dan Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Pada Tahun 2023-2026	III-32
Tabel 4.1	Keterkaitan Asta Cita RPJMN dan Misi RPJMD	IV-12
Tabel 4.2	Sasaran Pembangunan Nasional	IV-14
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalinantan Utara Tahun 2026	IV-18
Tabel 4.4	Arah Kebijakan Setiap Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara	IV-25
Tabel 5.1	Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026	V-2
Tabel 5.2	*Highlight* Indikasi Intervensi di Provinsi Kalimantan Utara	V-5
Tabel 5.3	Arah Kebijakan Kewilayahan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026	V-15
Tabel 6.1	Rancangan Alokasi Pagu Anggaran Berdasarkan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026	VI-3
Tabel 6.2	Program Prioritas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026	VI-28
Tabel 6.3	Keterkaitan Kinerja dengan Program Unggulan Daerah	VI-49
Tabel 6.4	Outcome Prioritas, Program, dan Subkegiatan dalam Mendukung Asta Cita (PN) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026	VI-54
Tabel 7.1	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026	VII-2
Tabel 7.2	Target Indikator Kinerja Makro Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026	VII-3
Tabel 7.3	Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026	VII-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kalimantan Utara	II-2
Gambar 2.2	Produksi Perikanan Budidaya (ton) Menurut Kabupaten dan Kota, Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-12
Gambar 2.3	Produksi Ikan dan Udang di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023	II-14
Gambar 2.4	Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024	II-23
Gambar 2.5	Luas Areal dengan Tingkat Bahaya Banjir di Provinsi Kalimantan Utara (Ha)	II-26
Gambar 2.6	Luas Areal dengan Tingkat Bahaya Tanah Longsor	II-27
Gambar 2.7	Proporsi Bencana di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2023	II-29
Gambar 2.8	Peta Sebaran Tingkat Kerusakan Ekosistem Gambut di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024	II-34
Gambar 2.9	Jumlah Penduduk Kalimantan Utara 2020-2025	II-40
Gambar 2.10	Piramida Penduduk Kalimantan Utara Tahun 2024	II-43
Gambar 2.11	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2020-2024	II-44
Gambar 2.12	Posisi Relatif Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Kalimantan Tahun 2020-Triwulan III 2024	II-45
Gambar 2.13	Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2020-2024	II-47
Gambar 2.14	Posisi Capaian Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara terhadap Provinsi Lainnya Pada September 2024	II-48
Gambar 2.15	Grafik Perkembangan Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023	II-51
Gambar 2.16	Perbandingan Tingkat Kemiskinan (Persen) Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2020-2024	II-52
Gambar 2.17	Posisi Capaian Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara terhadap Provinsi Lainnya Tahun 2024	II-54
Gambar 2.18	Grafik Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-60
Gambar 2.19	Posisi Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	II-61

Gambar 2.20	Grafik Perbandingan TPAK Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-63
Gambar 2.21	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-65
Gambar 2.22	Posisi Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	II-67
Gambar 2.23	Angka Kematian Bayi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-72
Gambar 2.24	Angka Kematian Ibu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-73
Gambar 2.25	Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-73
Gambar 2.26	Cakupan Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023	II-74
Gambar 2.27	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA 2019-2023	II-74
Gambar 2.28	Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2023	II-75
Gambar 2.29	Indeks Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023	II-77
Gambar 2.30	Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2020-2024	II-78
Gambar 2.31	Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2020-2024	II-79
Gambar 2.32	Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-79
Gambar 2.33	Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2019-2023	II-80
Gambar 2.34	Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2019-2023	II-82
Gambar 2.35	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Tanaman Pangan terhadap PDRB Tahun 2020-2024	II-86
Gambar 2.36	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Tahun 2020-2024	II-87
Gambar 2.37	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2020-2024	II-88
Gambar 2.38	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB Tahun 2020-2024	II-89
Gambar 2.39	Grafik Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2020-2024	II-89
Gambar 2.40	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2020-2024	II-90

Gambar 2.41	Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023	II-94
Gambar 2.42	Rasio Kewirausahaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024	II-95
Gambar 2.43	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Tahun 2020-2024	II-95
Gambar 2.44	Persentase dan Nilai Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan per Kapita Tahun 2019-2022	II-97
Gambar 2.45	Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024	II-98
Gambar 2.46	Produktivitas Total Daerah Tahun 2019-2022	II-98
Gambar 2.47	Indikator Keterbukaan Ekonomi Tahun 2019-2022	II-99
Gambar 2.48	Grafik Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2019-2023	II-100
Gambar 2.49	Indeks Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2019-2022	II-101
Gambar 2.50	Angka Literasi Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2019-2022	II-102
Gambar 2.51	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2020-2023	II-103
Gambar 2.52	Perbandingan Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2020-2022	II-105
Gambar 2.53	Angka Ketergantungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2025	II-106
Gambar 2.54	Indeks Layanan Infrastruktur Tahun 2020-2023	II-107
Gambar 2.55	Persentase Kondisi Jalan Kewenangan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024	II-107
Gambar 2.56	Peta Eksisting Jaringan Jalan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018	II-108
Gambar 2.57	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2020-2024	II-110
Gambar 2.58	Grafik Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2019-2023	II-110
Gambar 2.59	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2019-2023	II-112
Gambar 2.60	Grafik Pertumbuhan Investasi Tahun 2020-2024	II-115
Gambar 2.61	Grafik Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN Tahun 2020-2024	II-116
Gambar 2.62	Rata-Rata Tingkat Capaian Tujuan RKPD 2024 Berdasarkan Misi (%)	II-188
Gambar 2.63	Rata-Rata Tingkat Capaian Sasaran RKPD 2024 Berdasarkan Misi (%)	II-189
Gambar 2.64	Predikat Tingkat Capaian Program Provinsi Kalimantan Utara Triwulan I Tahun 2025	II-241
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024 (%)	III-4

Gambar 3.2	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024 (%)	III-5
Gambar 3.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024	III-7
Gambar 3.4	Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024	III-7
Gambar 3.5	Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara	III-8
Gambar 4.1	Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029	IV-1
Gambar 4.2	Cascading Kinerja Visi, Tujuan, dan Sasaran	IV-16
Gambar 4.3	8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*)	IV-22
Gambar 4.4	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026	IV-23
Gambar 5.1	Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Utara	V-3
Gambar 6.1	Delapan Program Unggulan Daerah	VI-48

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 dengan tema **Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Optimalisasi Potensi Daerah**, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta peraturan pelaksananya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. RKPD ini menjadi sangat strategis sebab merupakan pedoman bagi kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota Tahun 2026, untuk mewujudkan sinergi perencanaan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan sesuai rencana, maka perlu adanya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Tanjung Selor, 3 Juli 2025

Gubernur Kalimantan Utara,

TTD

Dr. H. Zainal Paliwang, SH., M.Hum

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan dokumen ini dilakukan pada masa transisi antara pemerintahan kepala daerah periode Tahun 2021-2026 dan periode Tahun 2025-2029.

Mengingat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 dilakukan pada 20 Februari 2025 yang menandai dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 sampai dengan penetapan dengan Perda paling lambat 6 (enam) bulan kedepan, maka penyusunan RKPD Tahun 2026 memedomani visi, misi dan program prioritas kepala daerah terpilih. RKPD memuat rencana pelaksanaan RPJMD secara lebih rinci dan selaras dengan prioritas nasional.

Dokumen RKPD Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Utara memiliki peran strategis sebab merupakan pelaksanaan tahun pertama dari RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029. Dengan demikian, penyusunan RKPD Tahun 2026 selain berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, juga pada RKP Tahun 2026 dan program strategis nasional. Selain itu, rencana pembangunan tahun 2026 juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dan isu-isu terkini.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam pembangunan daerah, sebab:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 menerapkan pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif dan pendekatan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Sedangkan pendekatan politis dilaksanakan melalui pelibatan DPRD pada saat konsultasi publik, musrenbang RKPD maupun melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Selain itu, substansi penyusunan RKPD Tahun 2026 juga menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1) Pendekatan Holistik-Tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2) Pendekatan Integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3) Pendekatan Spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan melalui beberapa tahapan, sesuai dengan aturan yang belaku. Pelaksaan RKPD dimulai dari Desember Tahun 2024 dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lambat minggu keempat Juni tahun 2025. Tahapan penyusunan yang akan dilalui meliputi: a. Persiapan Penyusunan; b. Penyusunan Rancangan Awal; c. Penyusunan Rancangan; d. Musrenbang RKPD; e. Perumusan Rancangan Akhir; dan f. Penetapan. Pelaksanaan penyusunan RKPD bersamaan dengan penyusun RPJMD, dilakukan dengan selaras sehingga rencana tahun 2026 sepenuhnya menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 disusun berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).

16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 435);
26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017–2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12); dan

31. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor 1).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, RKPD disusun berpedoman pada RPJMD, RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Mengingat Provinsi Kalimantan Utara sedang melakukan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, maka penyusunan RKPD Tahun 2026 mengacu pada: a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP; b. peraturan daerah mengenai Perangkat Daerah; dan c. visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

Mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 dengan prioritas pembangunan daerah (program unggulan kepala daerah) Tahun 2026. Lebih lanjut, pada Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa penyusunan RKPD berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yaitu dengan penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya.

Selanjutnya, RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026, serta Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

Selain itu, RKPD Provinsi Kalimantan Utara akan menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Penyelarasan perencanaan antara pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) diharapkan akan menghasilkan pelaksanaan pembangunan yang mendukung pencapaian target-targte pembangunan di masing-masing tingkatan pemerintahan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026, yang disusun selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih serta prioritas nasional.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026, yaitu:

1. Teridentifikasinya kinerja pembangunan daerah dan permasalahan daerah.
2. Teridentifikasinya sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 dan dukungannya terhadap pencapaian prioritas nasional tahun 2026.
3. Tersedianya pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026.
4. Tersedianya pedoman dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026.

5. Tersedianya tolok ukur untuk menilai kinerja pembangunan daerah serta penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Tersedianya pedoman pembangunan tahun 2026 untuk kabupaten/kota.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 terdiri atas 8 (delapan) bab, meliputi:

Bab I. Pendahuluan

Memuat gambaran umum tentang penyusunan RKPD agar substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat kondisi geografi dan demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerha, dan aspek pelayanan umum. Selanjutnya, disajikan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu sampai dengan tahun berjalan. Berdasarkan capaian pembangunan beberapa tahun terakhir, diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah.

Bab III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Memuat kondisi ekonomi makro nasional dan Kalimantan Utara, sebagai pertimbangan dalam menyusun kerangka ekonomi makro dan keuangan daerah tahun 2026. Proyeksi keuangan daerah tahun 2026 meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan beberapa tahun terakhir, dan kebijakan keuangan untuk tahun 2026.

Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026, dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Dalam mencapaian sasaran pembangunan, ditetapkan prioritas dan tema pembangunan tahun 2026 yang akan menjadi arahan bagi penentuan program pembangunan daerah.

Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Memuat arah kebijakan pembangunan untuk kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Arah kebijakan ini memuat antara lain target indikator kinerja makro pembangunan kabupaten/kota yang menunjang pencapaian target provinsi tahun 2026, dan arah pengembangan kewilayahan bupaten/kota.

Bab VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator, target capaian kinerja, dan pagu anggaran tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027. Selain itu, bab ini juga memuat dukungan program perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara terhadap prioritas nasional (PN), penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan beberapa dukungan terhadap kebijakan nasional.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memuat Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator makro, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut juga Indikator Kinerja Daerah (IKD) tahun 2026.

Bab VIII. Penutup

Memuat hal-hal yang dipandang penting dan perlu dilakukan untuk terlaksananya perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026, antara lain kaidah pelaksaanan dan perubahan RKPD.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan gambaran kondisi eksisting daerah secara fisik maupun dinamika sosial budaya Provinsi Kalimantan Utara. Aspek geografi mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan. Sementara aspek demografi menggambarkan struktur penduduk, sebarannya, dan dinamika sosial kependudukan lainnya.

2.1.1.1. Aspek Geografi

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas wilayah ± 70.101 km2, dengan luas lautan seluas 11.579 km2 (13 persen dari luas wilayah total). Provinsi Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan negara Malaysia yaitu negara bagian Sabah di sebelah utara dan Sarawak di sebelah barat. Sementara sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Berau, Kutai Timur dan Kutai Barat (Provinsi Kalimantan Timur).

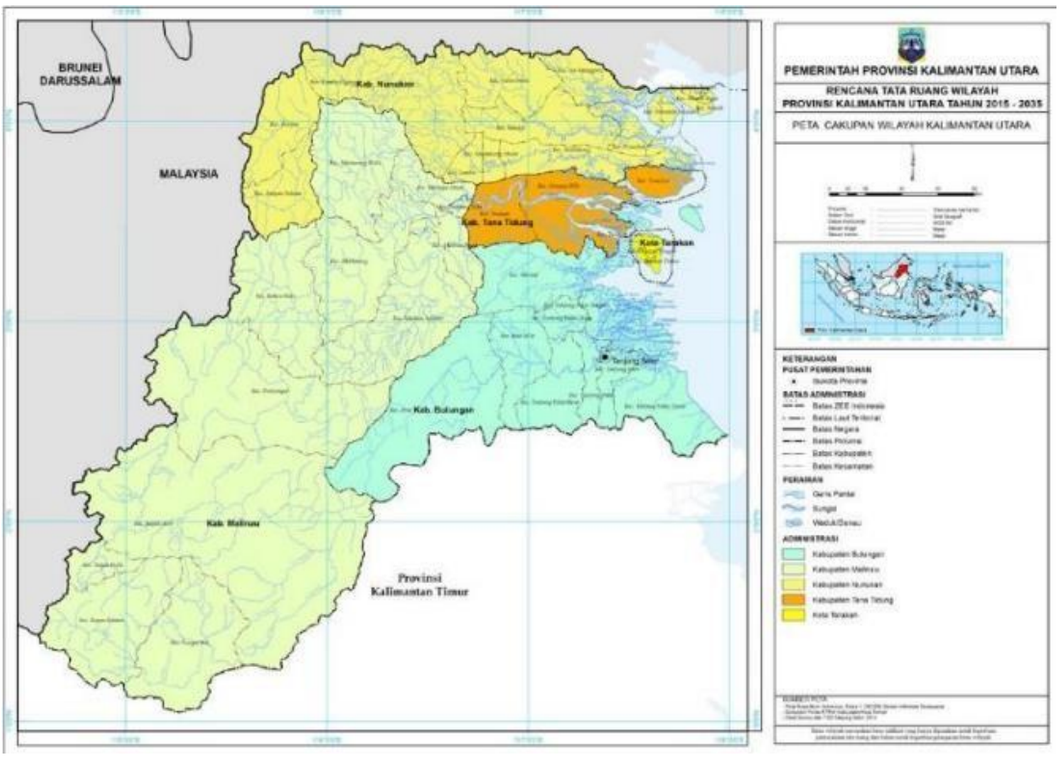
Tabel 2.1
Ibukota, Luas, Jumlah Kecamatan, dan Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas (km²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
Malinau	Malinau Kota	38.902	15	109
Bulungan	Tanjung Selor	13.880	10	81
Tana Tidung	Tideng Pale	3.504	5	32
Nunukan	Nunukan	13.564	21	240
Tarakan	Tarakan	251	4	20
Kalimantan Utara	Bulungan	70.101	55	482

Sumber: BPS Kalimantan Utara, 2023 Jumlah kecamatan, desa/kelurahan menurut Kota/Kabupaten 2022, BPS Kaltara

Secara administrasi wilayah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 kabupaten/kota dengan luas daratan masing-masing

kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Malinau 38.902 km2, Kabupaten Bulungan 13.880 km2, Kabupaten Tana Tidung 3.504 km2, Kabupaten Nunukan 13.564 km2, dan Kota Tarakan 251 km2. Selain itu terdapat 196 pulau yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, 58,67 persen pulau diantaranya terdapat di Kabupaten Bulungan.



Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Kalimantan Utara
Sumber: Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 2023-2042

2. Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Kalimantan Utara terletak di bagian utara Pulau Kalimantan dengan posisi antara 114035'22" - 118003'00" Bujur Timur dan antara 1021'36" – 4024'55" Lintang Utara. Secara geostrategi provinsi ini berada di perbatasan negara menjadikan memiliki posisi cukup strategis dalam pertahanan dan keamanan negara. Selain itu provinsi ini berada di jalur pelayaran internasional (Alur Laut Kepulauan Indonesia/*Archipelagic Sea Lane Passage*) dan merupakan pintu keluar/outlet ke Asia Pasifik.

Kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara selain berupa pegunungan juga merupakan daerah kepulauan. Pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Utara terletak di Kabupaten Nunukan, Bulungan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Jumlah pulau-pulau kecil di Provinsi

Kalimantan Utara adalah 161 pulau dengan luas total mencapai 3.597 m2. Pulau-pulau terbesar diantaranya yaitu Pulau Tarakan (249 m2), Pulau Sebatik (245 m2), Pulau Nunukan (233 m2), dan Pulau Tanah Merah (352 m2). Sementara, panjang garis pantai provinsi ini adalah 3.955 km, 908 km (23%) merupakan garis pantai daratan, dan 3.047 Km (77%) merupakan garis pantai kepulauan.

3. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh hutan, dengan luasan mencapai 6.440.254 ha atau sekitar 90,06 persen dari luasan total wilayah. Luasan pertanian tersebar sekitar 1,55 persen atau 110.751 ha dari total luas wilayah. Penggunaan lahan hutan negara mendominasi di seluruh kabupaten, namun terbanyak terdapat di Kabupaten Malinau. Kondisi geografis provinsi ini yang didominasi oleh pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan lereng yang curam, sebagian besar dimanfaatkan sebagai hutan lindung. Penggunaan lahan permukiman hanya 19.090 ha atau 0,27% dari total luasan wilayah provinsi ini, dengan sebaran lahan permukiman paling tinggi berada di Kabupaten Nunukan.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah di Provinsi Kalimantan Utara (Ha)

No	Kabupaten	Jenis Penggunaan Tanah				
		Permukiman	Hutan	Pertanian	Pertambangan	Lainnya
1	Bulungan	4.925	1.086.969	12.040	-	237.497
2	Malinau	2.687	3.927.395	2.301	1.550	42.808
3	Nunukan	6.609	1.167.764	87.254	-	166.952
4	Tana Tidung	1.867	250.506	3.786	1.415	77.563
5	Kota Tarakan	3.002	7.620	5.370	5.914	47.363
Kalimantan Utara		19.090	6.440.254	110.751	8.879	572.183
Persentase (%)		0,27	90,06	1,55	0,12	8

Sumber: Kalimantan Utara Dalam Angka Tahun 2014

Sedangkan berdasarkan Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 2023-2042, penggunaan lahan didominasi oleh penggunaan lahan hutan, baik lahan hutan kering, hutan mangrove, maupun hutan rawa. Secara lebih jelas, luas tutupan lahan menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagaimana berikut.

Tabel 2.3
Luas tutupan lahan menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara (Ha)

Jenis Penggunaan Lahan	Luas per Kabupaten (Ha)					
	Bulungan	Kota Tarakan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung	Total Luas
Badan Air	29.801,65	78,96	16.281,99	17.384,75	14.089,44	77.636,79
Bandara/ Pelabuhan	25,26	152,7	64,27	116,26	-	358,49
Hutan Lahan Kering Primer	272.351,70	-	3.029.400,13	523.454,76	-	3.825.206,59
Hutan Lahan Kering Sekunder	598.971,86	4.054,83	683.714,94	278.114,39	54.820,61	1.619.676,63
Hutan Mangrove Primer	1.029,53	-	-	24.373,26	774,84	26.177,63
Hutan Mangrove Sekunder	80.127,97	3.619,95	1.747,63	103.156,81	59.716,16	248.368,52
Hutan Rawa Primer	-	-	-	1.839,30	4.287,46	6.126,76
Hutan Rawa Sekunder	7.994,31	155,72	2.259,05	117.232,24	57.030,19	184.671,51
Hutan Tanaman Industri (HTI)	17.008,15	-	-	35.377,77	26.333,72	78.719,64
Perkebunan	99.916,55	87,56	2.241,17	148.229,30	41.011,36	291.485,94
Permukiman	9.244,68	3.797,48	3.952,78	6.513,38	1.460,21	24.968,53
Pertambangan	3.317,39	33,24	3.152,67	1.497,44	4.434,61	12.435,35
Pertanian Lahan Kering	8.491,83	2.311,42	11.123,46	6.779,53	155,8	28.862,04
Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak	70.988,19	925,75	62.373,69	36.874,30	6.419,92	177.581,85
Rawa	493,51	147,65	5,4	175,73	-	822,29
Sawah	237,38	-	335	3.910,03	85,39	4.567,80
Semak/Belukar	88.953,51	8.010,43	70.372,84	27.658,24	23.603,32	218.598,34
Tambak	82.839,62	1.314,72		12.220,43	52.208,61	149.957,88
Tanah Terbuka	11.734,79	381,81	3.158,26	11.993,56	4.422,25	31.690,67
Transmigrasi	4.510,69	-	-	452,48	-	4.963,17
Jumlah	1.388.038,57	25.072,22	3.890.183,28	1.357.353,96	350.853,89	7.011.501,92

Sumber: Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 2023-2042

Selain itu, Provinsi Kalimantan Utara memiliki terdiri dari berbagai karakteristik ekosistem mulai dari ekosistem pantai, hutan daratan rendah hingga hutan daratan tinggi. Salah satu ekosistem yang berada di Provinsi Kalimantan Utara adalah ekosistem gambut yang memiliki peran penting dalam menopang beberapa fungsi ekosistem dengan keunikan karakteristik tanah, air, dan emisi gas rumah kaca dan menjaga stok karbon. Oleh karena itu, ekosistem gambut yang berada di Provinsi Kalimantan Utara menyimpan potensi besar dalam cadangan stok karbon yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim.

Terdapat 13 satuan hidrologis gambut nasional yang berada di Provinsi Kalimantan yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 129/MENLHK/Sekjen/PKL.0/2/2017 tentang Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional.

Karakteristik gambut berbeda pada setiap lokasi bergantung pada sifat fisik, kimia, biologi, hidrotopografi dan jenis sedimen yang berada di bawah gambut. Gambut merupakan tanah yang terbentuk dari sisa tumbuhan dengan ketebalan lebih dari 50 cm sehingga memiliki kandungan organik yang tinggi. Berdasarkan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG Provinsi Kalimantan Utara 2024-2053), kondisi ekosistem gambut di Kalimantan Utara merupakan rawa lebak yang sistem pembentukannya dalam sistem rawa danau, sistem rawa belakang tanggul besar (backswamp) dan sedikit rawa pantai. Gambut di KHG Sungai Mentarang – Sungai Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara banyak terdapat danau tapal kuda (oxbow lake) dan berada di dalam daratan. Ekosistem gambut di Kalimantan Utara memiliki lanskap yang kontinum dengan ekosistem mangrove yang dikenal dengan Delta Kayan Sembakung.

Berdasarkan analisis tumpang susun KHG dengan penutupan lahan KLHK tahun 2022, dapat diidentifikasi 16 kelas penutupan lahan pada ekosistem gambut Kalimantan Utara yang terbagi dalam fungsi lindung dan budidaya.

Pada fungsi lindung, penutupan lahan terbesar merupakan hutan rawa sekunder seluas 84.117 ha (24%), yang diikuti oleh perkebunan seluas 37.572 ha (11%). Penutupan lahan selanjutnya adalah hutan tanaman seluas 13.968 ha (4%) dan belukar rawa seluas 8.900 ha (3%). Pada fungsi lindung ekosistem gambut ini juga terdapat penutupan lahan tambak dan pertambangan seluas 156 ha dan 323 ha. Hutan rawa primer pada fungsi lindung ekosistem gambut hanya seluas 2.873 ha atau hanya 1% dari luas total KHG Kalimantan Utara yang tersebar di KHG Sungai Mentarang - Sungai Belayu (348 ha) dan KHG Sungai Mentarang – Sungai Sembakung (2.525 ha).

Pada fungsi budidaya, penutupan lahan terbesar adalah hutan rawa sekunder seluas 63.795 ha (18%) diikuti oleh penutupan lahan belukar rawa seluas 39.847 ha (11%). Penutupan lahan perkebunan menempati urutan ketiga dengan luas 26.627 ha (8%). Juga terdapat penutupan lahan tambak seluas 16.069 ha (4%), hutan tanaman seluas 7.505 ha (2%), dan pertambangan seluas 2.532 ha (1%). Sementara hutan rawa primer hanya seluas 2.304 ha atau hanya 1% dari luas total

KHG di Kalimantan Utara yang hanya berada di KHG Sungai Mentarang – Sungai Sembakung.

Pada fungsi budidaya ekosistem gambut dan fungsi lindung ekosistem gambut terdapat penutupan lahan mangrove. Pada fungsi budidaya penutupan lahan mangrove sekunder seluas 23.314 ha (7%) dan mangrove primer seluas 906 ha (1%). Pada fungsi lindung Ekosistem gambut, penutupan lahan mangrove sekunder seluas 238 ha dan tidak terdapat penutupan lahan mangrove primer. Penutupan magrove sekunder ini menunjukkan adanya ekosistem gambut mangrove di KHG Kalimantan Utara. Ekosistem ini merupakan ekosistem yang unik dimana vegetasi yang tumbuh adalah tumbuhan mangrove dengan jenis tanahnya adalah tanah gambut.

Pada kawasan habitat mangrove, baik dalam maupun luar area ekosistem gambut, terdapat penggunaan lahan sebagai lahan terbuka, mangrove terabrasi, tambak, dan tanah timbul. Luasan tambak dalam habitat mangrove terutama pada area kawasan hutan produksi memiliki persentase terbesar yaitu seluas 96,61 persen dari total area habitat mangrove.

Tabel 2.4
Luas Potensi Habitat Mangrove Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2024

Potensi Habitat Mangrove	Dalam Kawasan Hutan			Luar Kawasan Hutan	Total	Persentase
	HL	HP	HK	APL		
	(hektar)			(hektar)		
Lahan Terbuka	-	1.417	-	2.251	3.668	3,0
Mangrove Terabrasi	-	244	-	206	450	0,3
Tambak	-	55.049	-	62.863	117.912	96,61
Tanah Timbul	-	14	-	5	19	0,015
Total	-	56.724	-	65.325	122.049	

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Mangrove memiliki banyak jasa lingkungan dan fungsi ekologis yang penting karena kaya akan karbon yang disebabkan kemampuannya dalam menyimpan dan menyerap karbon lebih besar sehingga mampu berperan dalam pengaturan iklim. Berdasarkan Dokumen Renja Folue NetSink Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 menyatakan bahwa terdapat 2.246,3 ton $CO2$/ha atau 8.243,9 ton $CO2$/ha stok karbon aboveground dan stok karbon tanah pada hutan mangrove primer di Delta Kayan Sembakung dan 1.703,3 ton C/ha atau 6.251,1 ton CO2/ha pada hutan mangrove sekunder. Hal ini

menunjukan sangat tingginya stok karbon yang terkandung dalam kawasan mangrove.

B. Potensi Sumber Daya Alam

1. Hutan

Kalimantan utara memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 6631/MenLHK-PKTL/KUH/PIA.2/10/ 2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara, luas kawasan hutan yaitu sekitar 5.657.120,14 ha. Luasnya kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara merupakan potensi yang sangat besar bagi pemerintah Kalimantan Utara dalam pengelolaan hutan.

Tabel 2.5
Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

No	Kabupaten/ Kota	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan						
		Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi dapat dikonversi	Areal Penggunaan Lain	Jumlah Luas Hutan dan Perairan
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	Malinau	696.642,58	988.017,02	1.545.892,31	375.548,72	30.174,11	324.691,48	3.636.274,74
2	Bulungan	205.594,03	-	465.097,91	272.791,71	5.596,71	429.203,18	949.080,36
3	Tana Tidung	-	-	9.084,28	153.005,90	9.678,05	169.530,96	171.768,23
4	Nunukan	150.459,78	284.073,98	169.713,70	274.082,76	14.598,87	461.421,55	892.929,09
5	Tarakan	7.067,72	-	-	-	-	17.282,89	7.067,72
Provinsi Kalimantan Utara		1.059.764,11	1.272.092,00	2.189.788,20	1.075.429,09	60.047,74	1.402.131,06	5.657.120,14

Sumber: Rancangan RPJPD Kalimantan Utara 2025-2045

Pemerintah menetapkan HL, HK, HP, dan HPT sebagai hutan tetap yang hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan kehutanan atau lewat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). HPK dan Area Penggunaan Lain (APL) dapat dicadangkan untuk kegiatan pemanfaatan lain, misalnya pertanian dan perkebunan yang kewenangan pelepasan kawasan ada di menteri untuk HPK dan bupati untuk APL. Hal tersebut terkait dengan rencana pengelolaan kawasan perbatasan, pengelolaan kawasan lindung, dan pengelolaan kawasan budidaya yang termasuk ke dalam ruang lingkup program-program kegiatan Heart of Borneo (HoB) atau Kawasan Jantung Borneo.

Kabupaten Malinau merupakan kabupaten terluas baik dilihat dari wilayah maupun kawasan hutan. Hutan Produksi Terbatas merupakan kawasan hutan yang paling luas di antara bentuk kawasan hutan lainnya yaitu 1.545.892,31 ha. Wilayah dengan kawasan hutan

paling kecil yaitu Kota Tarakan dengan hutan lindung seluas 7.067,72 ha. Hutan Suaka Alam dan Pelestarian Alam yang dimaksud merupakan Kawasan Konservasi Taman Nasional Kayan Mentarang seluas 1.272.092,00 ha yang terdapat di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Kawasan konservasi tersebut merupakan wilayah pemangkuan pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Dengan kondisi hutan yang mendominasi wilayah Provinsi Kalimantan Utara, hal tersebut menjadikan hutan memiliki banyak potensi dan fungsi secara ekonomis melalui hasil hutan dan ekologis melalui jasa ekosistem. Secara ekonomis, hasil pemanfaatan hutan di Provinsi Kalimantan Utara dapat berupa produksi hutan kayu dan non kayu. Produksi hasil hutan kayu menunjukan adanya jumlah yang fluktuatif dengan tren yang menurun. Berdasarkan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (2024), pada tahun 2024, terdapat 7 perizinan berusaha pengelolaan hasil hutan (PBPHH) yang aktif dari 31 PBPHH yang tersedia. Sedangkan, produksi hutan non kayu dapat berupa stok cadangan karbon, jasa ekosistem, dan produk kehutanan berupa tanaman obat, madu, ekstrak tanaman dan lain-lain yang secara keseluruhan belum dapat diidentifikasi secara kuantitatif. Hasil non kayu terus dikembangkan guna mengurangi pemanfaatan hasil kayu mengingat besarnya potensi hutan Kalimantan Utara yang sangat luas untuk menghasilkan karbon sebagai penyerap CO2 dan dapat menstabilkan iklim dunia. Hal ini diharapkan dapat selaras dengan upaya dan peran sektor kehutanan di Indonesia dalam menghadapi perkembangan tantangan kehutanan dan dampak perubahan iklim. Hal ini juga selaras dengan prinsip multi usaha kehutanan yang meliputi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan.

Tabel 2.6
Hasil Hutan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024

Keterangan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi hasil hutan non kayu	-	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.
Produksi hasil hutan kayu	m3	1.366.047,26	1.484.807,43	1.453.642,666	1.636.055,003	1.546.911,62
Produksi kayu bulat	m3	1.294.479,12	1.369.565,00	1.341.107,60	1.516.176,41	1.426.411,52
Produksi kayu olahan	m3	71.568,14	115.242,43	112.535,07	119.878,59	120.500,10

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dalam Sidara Cantik, 2023 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Kemudian secara ekologis, hutan provinsi turut memiliki kontribusi terhadap lingkungan melalui jasa lingkungan dan wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan. Potensi jasa lingkungan tersebut meliputi penyerap dan penyimpang karbon, penyedia pangan, penyedia air, pengatur air, pengatur iklim, mitigasi bencana banjir, mitigasi bencana longsor, dan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Kontribusi jasa lingkungan dan wisata pada Provinsi Kalimantan Utara dapat dirincikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Luas Jasa Lingkungan berdasarkan Status Jasa di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

Jasa Lingkungan	Luas Status Jasa Lingkungan (Ha)				
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Penyediaan pangan	156.444	4.409.511	2.199.845	225.795	3.126
Penyediaan air	13.820	2.410.609	3.274.129	895.208	400.954
Pengatur pemurnian air	3.986.374	1.709.005	540.191	723.686	35.466
Pengatur iklim	4.921.367	1.476.279	222.609	353.060	21.405
Mitigasi bencana banjir	5.391.297	1.164.455	324.638	97.488	16.844
Mitigasi bencana longsor	5.440.652	716.859	513.971	310.410	12.828
Mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan	3.953.559	2.132.002	692.890	185.839	30.432

Sumber: Dokumen Renja Folu NetSink Provinsi Kalimantan Utara, 2022

Pemanfaatan sumber daya hutan pada hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi diharapkan dapat dirasakan bagi masyarakat dalam maupun sekitar kawasan hutan. Pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung, legalitas pemanfaatan akses oleh masyarakat setempat dapat didorong dengan percepatan legalitas Perhutanan Sosial. Pengelolaan Perhutanan Sosial, sebagai Program Prioritas Nasional, dilakukan dalam skema kelola kawasan, kelola lembaga, dan kelola sosial ekonomi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari. Kinerja kelola kawasan ditunjukkan dengan areal indikatif Persetujuan Perhutanan Sosial baru mencapai luasan 162.185 ha dari luasan PS Kalimantan Utara yaitu 522.418 Ha. Kinerja kelola lembaga ditunjukkan oleh masih terdapat 7 KTH yang belum diberikan akses legal dari total 97 KTH yang teregistrasi. Kelola sosial ekonomi masyarakat ditunjukkan dengan kurangnya sarana prasarana peningkatan ekonomi produktif masyarakat serta kurangnya

pendampingan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pemanfaatan hutan sesuai peraturan yang berlaku menjadi hambatan utama bagi masyarakat tersebut untuk dapat mengelola hasil sumber daya hutan secara optimal.

2. Kelautan dan Perikanan

Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Utara merupakan laut sehingga mempunyai sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpahnya. Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sementara ini masih didominasi dengan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap dan budidaya setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Pendapatan dari sektor perikanan di Provinsi Kalimantan Utara cukup besar karena hasil produksi perikanan seperti kepiting, udang, dan ikan diekspor keluar negeri. Provinsi Kalimantan Utara dikenal sebagai salah satu daerah penghasil udang organik yang menjadi komoditas ekspor penting di Indonesia.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki wilayah pesisir yang panjang, dengan panjang garis pantai mencapai 3.995 km. Panjang garis pantai tersebut kurang lebih 0,5% dari panjang garis pantai Indonesia, yaitu sepanjang 81.000 km. Selain memiliki pesisir yang cukup panjang, Provinsi Kalimantan Utara juga memiliki wilayah perairan laut dengan potensi sumber daya perikanan yang cukup besar. Provinsi Kalimantan Utara bersama dengan Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara berhadapan langsung dengan WPP 716 (Wilayah Pengelolaan Perikanan). Kawasan WPP 716 mempunyai potensi lestari sebesar 476.432,00 ton/tahun dan Provinsi Kalimantan Utara sementara ini baru dapat memanfaatkan sekitar 6% saja. Potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah utama yang menjadi hambatan peningkatan produksi perikanan laut adalah armada perikanan tangkap masih sangat terbatas (mayoritas berukuran <10 GT) dan pada tahun 2023 hanya ada satu kapal ikan dengan tonase 30 GT. Hal ini disebabkan belum adanya pelabuhan perikanan yang memadai, karena saat ini hanya ada pelabuhan perikanan pantai (PPP) sehingga tidak layak untuk pendaratan kapal ikan dengan tonase >30 GT.

Sedangkan armada yang berukuran <10 GT hanya mampu menjangkau perairan laut tidak lebih dari 4 mil laut, sehingga potensi perikanan yang besar belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Selain perikanan tangkap laut, juga memiliki perairan umum (perikanan tangkap di perairan umum), yaitu sungai dan danau yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menangkap ikan. Namun demikian, hasil tangkapan dari perairan umum memang tidak sebesar hasil perikanan tangkap laut. Meskipun demikian, perairan umum masih potensial untuk dikembangkan secara proporsional, sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi perikanan terutama perikanan tangkap.

Produksi perikanan tangkap pada tahun 2021 mencapai 34.187 ton dengan nilai produksi mencapai Rp911.946.729,00. Produksi perikanan tangkap terbesar berada di Kota Tarakan yang mencapai 62,93 persen (21.513 ton) dengan nilai produksi mencapai Rp417.794.147,00. Produksi tangkap budidaya mendominasi produksi perikanan dengan capaian 873.197,12 ton dan nilai produksi sebesar Rp2.288.860.480 di tahun 2024. Kemudian produksi perikanan tangkap laut tahun 2024 mencapai 20.163,40 ton dengan nilai produksi Rp694.997.500. Perikanan perairan umum daratan tahun 2024 berkontribusi sebesar 882,48 ton dengan nilai produksi adalah Rp38.663.450.

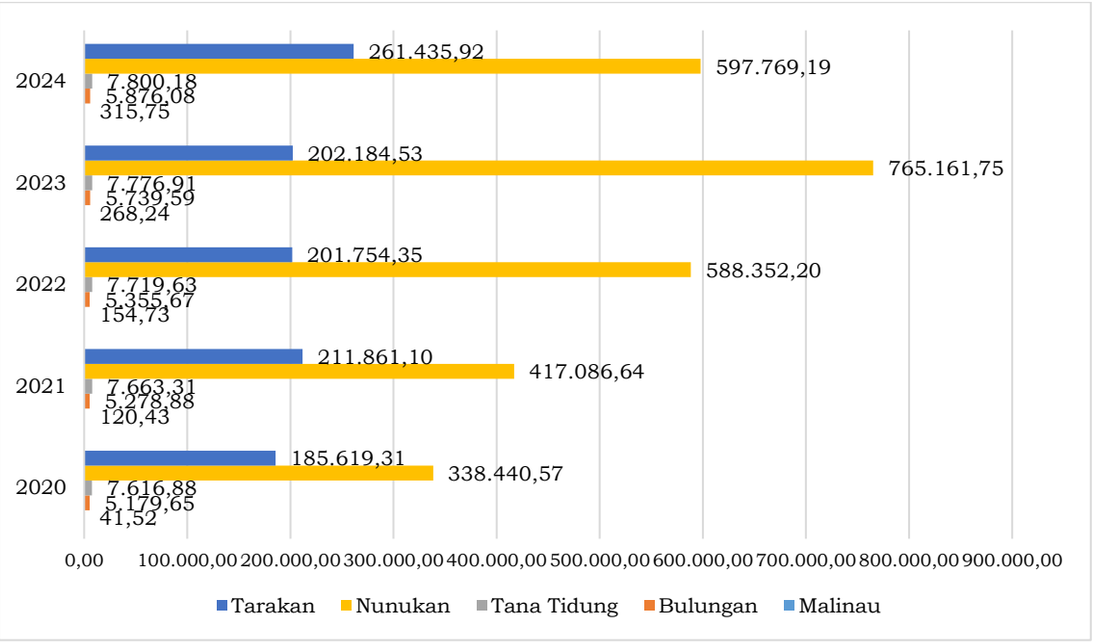
Tabel 2.8
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Penangkapan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Tahun	Perikanan Tangkap Laut		Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan		Perikanan Budidaya	
	Volume (Ton)	Nilai (Juta Rp)	Volume (Ton)	Nilai (Juta Rp)	Volume (Ton)	Nilai (Juta Rp)
2020	25.230,04	775.771,13	574,3	21.892	536.897,93	1.890.136,36
2021	33.151,95	890.698,08	546,59	20.558,44	642.010,36	2.052.148,37
2022	29.709,68	807.578,65	587,3	24.032,75	803.336,59	3.236.732,17
2023	31.789,24	1.030.027,85	745,87	31.156,96	981.131,02	2.874.364,32
2024	20.163,40	694.997,50	882,48	38.663,45	873.197,12	2.288.860,48

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2023 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Produksi perikanan budidaya terbesar pada tahun 2021 adalah produksi rumput laut yang mencapai 627.876 ton dan total nilai produksi perikanan budidaya mencapai Rp1.034.678.500,00. Produksi rumput laut berada di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Produksi rumput laut di Kabupaten Nunukan pada tahun 2023 mencapai 416.230

ton dengan nilai produksi Rp531.607.783,00 dan produksi rumput laut di Kota Tarakan mencapai 211.646 ton dengan nilai produksi Rp503.070.717,00. Namun demikian, rumput laut yang dihasilkan belum menciptakan nilai tambah dan peluang kerja baru akibat belum adanya industri pengolahannya meskipun kuantitas produksi cukup besar dan tersedia secara kontinyu. Belum adanya industri terkait pengolahan rumput laut tersebut diantara disebabkan karena pasokan air bersih dan listrik masih terbatas serta adanya isu lingkungan akibat penggunaan botol plastik untuk pelampung dalam budidaya rumput laut.



Gambar 2.2.
Produksi Perikanan Budidaya (ton) Menurut Kabupaten dan Kota, Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024
Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2023 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Pada tahun 2020-2024 produksi perikanan budidaya secara umum didominasi oleh Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Produksi perikanan budidaya di Kalimantan Utara masih didominasi oleh komoditas rumput laut (Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan), udang dan ikan bandeng yang tersebar di Kabupaten Nunukan, Tana Tidung, Bulungan dan Kota Tarakan. Sedang jenis komoditas yang lain, seperti ikan karper, patin, lele, nila dan sebagainya masih dalam jumlah yang relatif kecil. Permasalahan utama dalam pengembangan perikanan budidaya di Provinsi Kalimantan adalah seperti keterbatasan bibit baik untuk bibit rumput laut, ikan, maupun benur udang. Sedangkan, untuk budidaya ikan dan udang masalah lainnya ada pakan ikan/udang dan

status lahan budidaya khususnya untuk tambak yang mayoritas berada pada kawasan hutan, baik HK (hutan produksi), APL (area penggunaan Lain), maupun HPK (Hutan Produksi Konversi).

3. Pesisir

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, garis pantai dan wilayah laut 12 mil dengan panjang garis pantai 3.519,19 km dan batas wilayah laut 12 mil dengan luas 7.316,43 km2 atau setara dengan 731.642,77 ha. Area tambak dengan luas 1.499,58 km2 atau 149.957,88 ha, yang di bagi dalam 3 area tambak dalam status kawasan hutan terdiri dari tambak dalam APL (Area Penggunaan Lain) dengan luas 78.591,74 ha, tambak dalam HP (Hutan Produksi) dengan luas 70.706,76 ha, dan tambak dalam HPK (Hutan Produksi Konversi) dengan luas 659,39 ha. Area tambak di Provinsi Kalimantan Utara tersebar di Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung. Luasan area tambak terluas di Provinsi Kalimantan Utara berada di Kabupaten Bulungan ditujukkan pada tabel berikut ini.

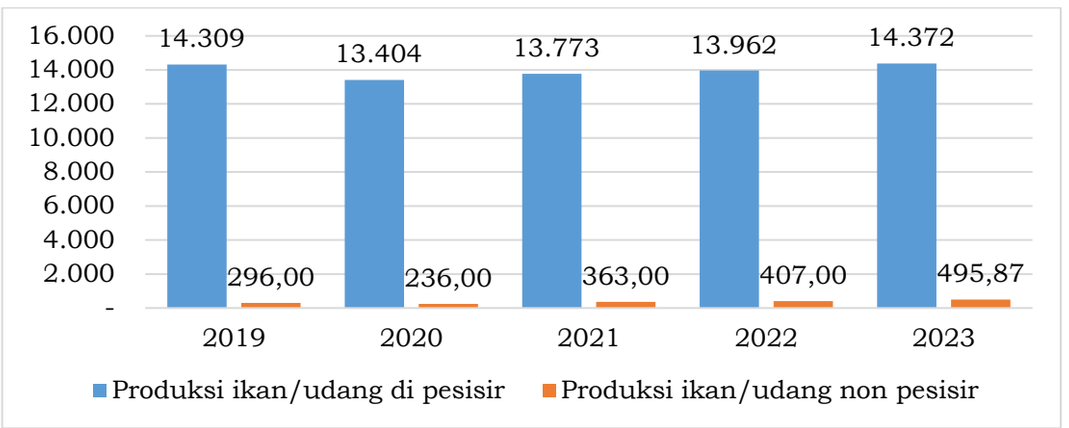
Tabel 2.9
Area Tambak dan Status Lahan Tiap Kota/Kabupaten Provinsi Kalimantan Utara

No	Kabupaten/Kota	Uraian	Luas (Ha)
1	Tarakan	Luas tambak	1.624,57
		Tambak dalam APL (area penggunaan Lain)	1.624,57
2	Bulungan	Luas tambak	94.030,64
		Tambak dalam APL (area penggunaan Lain)	51.758,78
		Tambak dalam HP (Hutan Produksi)	42.271,86
3	Nunukan	Luas tambak	18.627,80
		Tambak dalam APL (area penggunaan Lain)	10.643,13
		Tambak dalam HP (Hutan Produksi)	7.984,67
4	Tana Tidung	Luas tambak	35.674,87
		Tambak dalam APL (area penggunaan Lain)	14.565,26
		Tambak dalam HP (Hutan Produksi)	20.450,22
		Tambak dalam HPK (Hutan Produksi Konversi)	659,39

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026

Kawasan pesisir di Provinsi Kalimantan Utara Area dengan luasan tambak sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah merupakan kawasan penyumbang produksi perikanan yang cukup besar. Produksi perikanan budidaya khususnya ikan bandeng dan udang yang dibudidayakan di kawasan pesisir mencapai 14.372,33 ton pada tahun 2023. Berdasarkan data dari BPS, menunjukkan bahwa produksi perikanan budidaya di Provinsi Kalimantan Utara sebagaian besar merupakan hasil budidaya di tambak (kawasan pesisir) yaitu mencapai

96-99% dari total produksi ikan/udang budidaya atau 32-34% dari total produksi ikan/udang diluar dari rumput laut. Dengan demikian kawasan pesisir dapat dikatakan sebagai kawasan utama atau tulang punggung dalam peroduksi perikanan budidaya khususnya ikan bersirip dan udang. Namun demikian, produktivitas budidaya ikan/udang di tambak di Provinsi Kalimantan Utara masih rendah (rata-rata 95,84 kg/ha/tahun). Peningkatan produktivitas tambak di Provinsi Kalimantan Utara akan dapat digunakan untuk meningkatan ekonomi masyarakat pesisir, mengingat hasil produksinya mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan sudah dikenal di pasar internasional sebagai produk udang organik.



Gambar 2.3.
Produksi Ikan dan Udang di Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2019-2023
Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2023

4. Pertanian

Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan luas lahan pertanian yang cukup besar. Ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor penunjang dalam mengembangkan pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peran vital dalam ekonomi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Luas wilayah yang sampai saat ini digunakan untuk kegiatan pertanian dalam arti luas mencapai 110.751 ha. Atas dasar itu, kegiatan pertanian di provinsi ini harus didorong untuk berkembang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep pengembangan dan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumber daya alam daerah secara berkelanjutan, yaitu dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial secara seimbang.

Dalam pembangunan pertanian sebagai pilar ekonomi masyarakat, maka harus memperhatikan atau menetapkan komoditas unggulan yang ramah lingkungan dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pertanian tanaman pangan yang potensial untuk dikembangkan meliputi padi dan palawija (jagung, kacang-kacangan), ubi-ubian, dan hortikultura (sayuran dan buah- buahan). Beras merupakan bahan makanan pokok masyarakat, sehingga untuk dapat mencukupi kebutuhan beras secara aman, maka tanaman padi mendapat skala prioritas dalam pengembangan dan peningkatan produksi untuk dapat mengimbangi pertambahan penduduk agar tidak terjadi bahaya kelaparan. Namun demikian, Provinsi Kalimantan Utara sampai saat ini belum mampu swasembada beras dan masih harus mendatangkan beras dari luar wilayah terutama dari Pulau Jawa untuk mencukupi kebutuhan beras penduduk.

Luas panen padi hingga tahun 2024 sebesar 8.282,00 hektar. Adapun Produktivitas padi hingga 2024 mencapai 3,63 Ton/Ha dengan produksi padi sebesar 30.080 ton. Kualitas produksi padi ini adalah kualitas produksi gabah kering giling.

Tabel 2.10
Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penangkapan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Komponen	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Kalimantan Utara	Luas Panen Padi (Ha)	9.883,00	8.881,00	8.604,00	6.500,00	8.282,00
	Produksi Padi (Ton)	33.574,00	29.967,00	30.533,00	23.602,00	30.080,00
	Produktivitas (Ton/Ha)	3,4	3,37	3,55	3,63	3,63

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2025

5. Pertambangan

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi yang baik dalam bidang pertambangan, menurut nilai bruto hasil tambang, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini tentunya akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pertambangan. Kalimantan utara juga memiliki lahan yang cukup luas, yang dapat dilakukannya kegiatan pertambangan.

Tabel 2.11
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Utara (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertambangan minyak, gas dan panas bumi	3.132,38	3.396,76	4.222,09	3.842,24	3.481,03
2	Pertambangan batubara dan lignit	16.369,45	20.174,15	38.752,99	38.985,20	30.668,72
3	Pertambangan bijih logam	1.799,49	2.057,67	2.300,66	2.231,18	2.139,53
4	Pertambangan dan penggalian lainnya	4.270,31	4.769,18	4.924,66	5.279,19	5.874,81
Pertambangan dan Penggalian		25.571,62	30.397,76	50.200,40	50.337,80	42.164,09

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2023 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Aktivitas pertambangan yang dilakukan antara lain pertambangan minyak gas dan panas bumi, pertambangan batubara dan lignit, pertambangan biji logam, pertambangan dan penggalian lainnya. Potensi terbesar berada pada lapangan usaha untuk pertambangan batubara dan lignit. Produksi komoditas pertambangan batubara mengalami tren kenaikan pada tahun 2019-2023, sedangkan komoditas emas serta mineral bukan logam dan batuan mengalami tren penurunan.

Tabel 2.12
Produksi Komoditas Pertambangan Kalimantan Utara 2019-2023

Komoditas	2019	2020	2021	2022	2023
Batubara (Ton)	21.419.859	15.318.230	-	22.918.664	24.842.495
Emas (Kg)	1.474	1.540	-	-	-
Mineral Bukan Logam dan Batuan (M^3)	367.252	314.636	260.604	357.413	202.896

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Kalimantan Utara, 2024

Kemudian, dari segi ketenagakerjaan, sektor pertambangan menyerap sebanyak 323 warga Provinsi Kalimantan Utara dengan persebaran sebagaimana pada tabel di bawah. Pada tabel tersebut menunjukan jumlah pekerja laki-laki mendominasi, sebanyak 90,4 persen atau 292 pekerja adalah pekerja lelaki, sedangkan pekerja wanita hanya 9,6 persen atau sebanyak 31 pekerja.

Tabel 2.13
Tenaga Kerja Sektor Pertambangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022

Kabupaten	Laki-laki	Perempuan	Total
Malinau	14	1	15
Bulungan	135	6	141
Tana Tidung	11	0	11
Nunukan	19	2	21
Kota Tarakan	113	22	135
Provinsi Kalimantan Utara	292	31	323

Sumber: Regsosek, 2022

6. Energi

Energi memiliki peran penting dan strategis dalam mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Kenaikan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi juga berimplikasi pada peningkatan kebutuhan energi sehingga pentingnya pengelolaan energi yang optimal dan efisien secara berkelanjutan dan bertanggungjawab.

Pada skala nasional, kondisi ketersediaan energi digambarkan dalam indeks ketahanan energi yang diukur melalui indikator 4A yaitu: *availability* (ketersediaan secara fisik), *accessibility* (kemudahan dalam mendapatkannya), *affordability* (keterjangkauan terhadap harganya), dan *acceptability* (bagaimana kualitas yang dapat diterima) yang juga secara umum digambarkan melalui elemen bauran energi serta keberlanjutan sistem penyediaan-permintaan energi yang ada. Pada tahun 2024, indeks ketahanan energi nasional sesuai dengan aspek penilaian dapat ditunjukkan sebagaimana berikut.

Tabel 2.14
Indeks Ketahanan Energi Nasional tahun 2020-2024

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks	69,10	79,83	78,58	88,99	80,96

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian ESDM, 2025

Tabel 2.15
Penilaian Indeks Ketahanan Daerah per Aspek

Aspek	Ketersediaan	Aksesibilitas	Pengembangan Teknologi dan Efisiensi (Keterjangakauan)	Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial (Penerimaan)
Bobot (persen)	40,65	26,12	19,1	14,13

Aspek	Ketersediaan	Aksesibilitas	Pengembangan Teknologi dan Efisiensi (Keterjangakauan)	Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial (Penerimaan)
Parameter	• Diversifikasi energi • Potensi energi baru dan terbarukan	• Kehandalan infrastruktur BBM • Kehandalan infrastruktur Gas • Kehandalan infrastruktur LPG Kehandalan infrastruktur listrik • Optimalisasi pemanfaatan batu bara • Penyiapan infrastruktur EBT	• Efiesiensi penggunaan energi • Produktivitas energi sektoral • Harga BBM • Tarif listrik • Harga LPG	• Emisi Gas Rumah Kaca

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian ESDM, 2023

Kondisi penyediaan energi di Provinsi Kalimantan Utara dapat digambarkan melalui kondisi kelistrikan dan kondisi potensi air dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara. Berikut adalah data energi listrik dan air yang tersedia:

a. Listrik

Listrik merupakan barang kebutuhan utama manusia yang berbahan dasar dari barang tambang. Aktivitas manusia sangatlah bergantung pada ketersediaan listrik, khususnya di zaman serba modern ini. Biasanya pembangkit listrik menggunakan energi alternatif seperti angin, air dan cahaya matahari. Namun, ada pula barang tambang yang berfungsi sebagai pembangkit listrik, yaitu batu bara.

Ketersediaan tenaga listrik akan memicu tumbuhnya industri turunan dan pendukung dari industri pengolahan mineral. Misalnya nikel, akan memicu industri baja tahan karat (stainless steel) dan industri pendukungnya seperti industri gas, industri pengolahan air, industri listrik dan industri konstruksi lainnya. Efek berantai akan membuat konsumsi dalam wilayah tersebut meningkat sehingga rencana investasi lainnya akan lebih fleksibel. Efek berantai ini akan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto (PDRB).

Tabel 2.16
Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Nama Data	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (PLN) Menurut Kabupaten / Kota	KK	157.776	168.936	182.069	210.791,00	234.896,00
Bulungan	KK	33.462	36.283	41.151	47.642,00	51.333,00
Malinau	KK	14.575	16.268	17.210	19.410,00	21.546,00
Nunukan	KK	37.758	42.377	45.581	60.267,00	72.252,00
Tana Tidung	KK	5.129	5.778	6.342	7.238,00	8.395,00
Tarakan	KK	66.852	68.230	71.785	76.234,00	81.370,00

Sumber: BPS, Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2025

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, Kota Tarakan memiliki jumlah pelanggan listrik terbesar di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu 34,64 persen dari total jumlah pelanggan di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Nunukan memiliki jumlah pelanggan listrik terbesar kedua, yaitu sebesar 30,75 persen. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Bulungan yang memiliki jumlah pelanggan listrik sebesar 21,85 persen.

b. Air

Di Provinsi Kalimantan Utara, air menjadi bagian dari kekayaan alam dan sebagai sumber mata pencaharian yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Air memiliki banyak manfaat atau kegunaan bagi kelangsungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan dan tentunya semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini.

Energi air adalah satu dari lima sumber terbesar energi terbarukan. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik dan pembangkit listrik tenaga air tanpa meninggalkan emisi gas rumah kaca seperti yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Berbeda dengan sumber energi terbarukan lainnya air akan terus menghasilkan tenaga non-stop dan ketersediaannya terus dihasilkan oleh adanya siklus hidrologi. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dihasilkan dari energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik oleh turbin dan energi tersebut yang selanjutnya diubah menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan air.

Meskipun mendatangkan banyak manfaat, pemanfaatan air dengan membangun bendungan memiliki dampak lain seperti dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sungai atau danau, pembangunan yang memakan biaya dan waktu yang cukup lama dan kerusakan pada bendungan yang dapat menyebabkan risiko kecelakaan dan kerugian lain yang besar. Oleh karena itu, perlu diperhatikan aspek-aspek kelingkungan serta keselamatan agar pemanfaatan bendungan dapat dilakukan secara maksimal.

Tabel 2.17
Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota	Pelanggan	Air Disalurkan (m^3)	Nilai (Rp)
Malinau	166.471	4.430.103	22.669.804.549
Bulungan	17.529	5.275.331	29.116.372.000
Tana Tidung	2.177	821.016	3.360.842.672
Nunukan	212.661	5.919.205	29.679.176.264
Tarakan	45.034	17.761.382	86.456.436.600
Provinsi Kalimantan Utara	443.872	34.207.037	171.282.632.085

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2025

Penggunaan tenaga air pada umumnya merupakan pemanfaatan multiguna, karena biasanya dikaitkan dengan irigasi, pengendalian banjir, perikanan, rekreasi, dan navigasi. Bahkan sering terjadi bahwa pembangkitan tenaga listrik hanya merupakan manfaat sampingan, dengan misalnya irigasi, atau pengendalian banjir, sebagai penggunaan utama.

Volume air bersih yang disalurkan adalah banyaknya air bersih yang disalurkan oleh perusahaan air bersih (dalam satuan m3). Semakin besar volume air bersih yang disalurkan maka akan semakin terpenuhi kebutuhan konsumen akan air bersih. Volume air bersih tersalurkan paling banyak terdapat di Kota Tarakan.

Demikian penting peranan air untuk kehidupan, sehingga masyarakat dunia sepakat menjadikan air wajib dilestarikan. Air hujan yang jatuh di permukaan bumi berkumpul dan mengalir melalui sungai-sungai. Air juga dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA). PLTA dihasilkan dari energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik oleh turbin.

7. Pariwisata

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi perekonomian wilayah. Eksistensinya mampu menjadi generator sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan penyedia akomodasi. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sektor pariwisata turut berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian wilayah adalah melalui besar jumlah kunjungan maupun jumlah wisatawan, serta kontribusinya terhadap PDRB. Masing-masing kabupaten/kota memiliki obyek wisata andalan dan yang potensial berkembang di masa depan. Berikut merupakan tabel perwilayahan destinasi pariwisata, kawasan pengembangan pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Tabel 2.18
Perwilayahan Pariwisata di Provinsi Kalimantan Utara

DESTINASI PARIWISATA PROVINSI (DPP)	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI (KPPP)	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)
DPP 1 Bulungan, Tana Tidung, dan Tarakan DPP 2 Nunukan dan Malinau	KPPP 1 Pantai Tana Kuning dan sekitarnya KPPP 2 Bebatu dan sekitarnya; KPPP 3 Binusan dan sekitarnya; KPPP 4 Sei Menggaris dan sekitarnya; KPPP 5 Lumbis Pansiangan dan sekitarnya;dan KPPP 6 Long Alango-Long Pujungan dan sekitarnya;	KSPP 1 Tanjung Selor dan sekitarnya KSPP 2 Gunung Rian dan sekitarnya; KSPP 3 Kota Tarakan dan sekitarnya; KSPP 4 Pulau Sebatik dan sekitarnya; KSPP 5 Long Bawan dan sekitarnya; dan KSPP 6 Setulang-Pulau Sapi dan sekitarnya

Sumber: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Utara

Sementara itu, jumlah kunjungan wisatawan sepanjang tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan. Kondisi tersebut didorong dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara yang juga mengalami kenaikan hingga tahun 2024. Kunjungan wisatawan di Provinsi Kalimantan Utara dipengaruhi oleh pengembangan daya tarik destinasi, promosi pariwisata, kualitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif secara berkesinambungan. Peningkatan

kunjungan wisatawan sangat penting untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata.

Tabel 2.19
Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2020-2024

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Wisatawan Mancanegara (Wisman)	263.443	408.371	592.888	520.906	988.946
Wisatawan Nusantara (Wisnus)	255.516	401.668	570.619	493.257	962.342
Jumlah Kunjungan Wisatawan	7.927	6.703	22.269	27.649	26.604

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

C. Kebencanaan dan Ancaman Perubahan Iklim

1. Kebencanaan

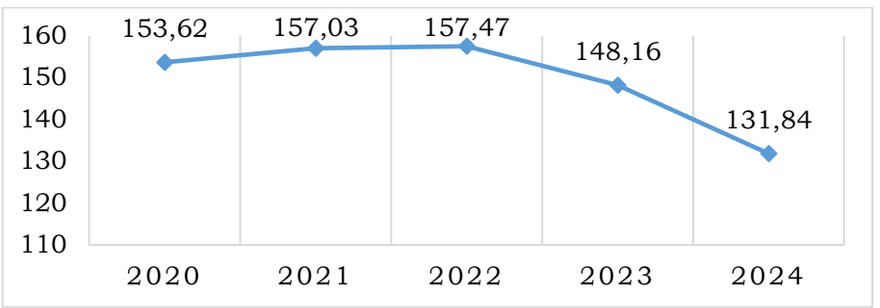
Dari segi fisiografis hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara berada pada Cekungan Tarakan yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) cekungan tersier utama yang terdapat di bagian Timur kontinental margin Kalimantan yang dicirikan oleh hadirnya batuan sedimen klastik sebagai penyusunnya yang dominan.

Kondisi geologi pada Provinsi Kalimantan Utara terdapat 5 (lima) lipatan utama di wilayah ini, termasuk lipatan Sebatik dan Tarakan, yang terbentuk akibat kompresi berarah timur laut-barat daya dan sesar-sesar seperti Sesar Sampoerna dan Sesar Mangkalihat. Topografi pada Provinsi Kalimantan Utara didominasi dataran rendah, di bagian tengah dan selatan provinsi, terdapat beberapa perbukitan dan pegunungan yaitu Pegunungan Muller. Provinsi Kalimantan Utara mempunyai curah hujan tahunan pada tahun 2023 sebesar 2.406,20 mm/tahun dan jumlah hari hujan sebanyak 219 pada tahun 2023.

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tahun 2024, bencana yang paling banyak terjadi di Provinsi Kalimantan Utara adalah bencana banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor dan kebakaran hutan dan lahan. Ancaman bencana di Kalimantan Utata meliputi tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi dan cuaca ekstrim.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan informasi bahwa Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Provinsi Kalimantan Utara selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, kecuali pada tahun 2022. Status risiko bencana

provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 berada pada kelas risiko Sedang dengan nilai 131,84. Kondisi ini menurun signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar 2.4.
Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024
Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Tahun 2024, BNPB

Berdasarkan nilai Indeks Risiko Bencana kabupaten/kota tahun 2024, diketahui bahwa Kota Tarakan memiliki nilai paling rendah dibanding daerah lain yakni 90,60 dengan kelas risiko Sedang. Daerah lain yang termasuk kategori Sedang adalah Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Sementara Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung berada pada kelas risiko Tinggi.

Tabel 2.20
Indeks Risiko per Ancaman Bencana Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Kelas Risiko 2024
Bulungan	184,40	173,85	173,85	172,57	157,35	Tinggi
Tana Tidung	174,80	169,79	169,76	166,33	146,77	Tinggi
Nunukan	169,32	170,49	170,49	154,56	138,29	Sedang
Malinau	124,40	155,85	155,85	144,18	126,17	Sedang
Kota Tarakan	115,18	115,18	117,42	108,14	90,60	Sedang

Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Tahun 2024, BNPB

Berdasarkan Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 2023-2042 menunjukan bahwa seluruh kabupaten dan kota memiliki kawasan rawan bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi yang tinggi. Kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi pada Kabupaten Bulungan, Nunukan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan serta kawasan rawan bencana kebakaran hutan tingkat tinggi pada Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung.

Pengukuran terhadap indeks ketahanan daerah bertujuan untuk menilai kapasitas penanggulangan bencana pada suatu wilayah administrasi dengan asumsi bahwa bahaya dan ancaman bencana serta kerentanan di wilayah tersebut bernilai tetap. Indeks ketahanan daerah dilakukan untuk memonitoring adanya penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah dalam mengurangi indeks risiko bencana. Penguatan kapasitas kelembagaan dilaksanakan secara lintas sektor di bawah koordinasi BPBD.

Tabel 2.21
Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketahanan Daerah	0,2	0,2	0,2739	0,2657	0,4276

Sumber: Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Utara, 2018-2023

Berdasarkan tabel tersebut, Indeks Ketahanan Daerah menunjukan kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2022 dari 0,2657 menjadi 0,4276 di tahun 2023. Sehingga, sebagai hasilnya indeks risiko bencana juga turut menurun dari tahun 2022-2023 yang disebabkan adanya penguatan terhadap kondisi ketahanan daerah dalam menghadapi risiko bencana.

2. Ancaman Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan ancaman yang telah nyata dirasakan Indonesia, bahkan telah menyebabkan kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana hidrometeorologi ini. Salah satu tujuan nasional 13 TPB adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim melalui penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan iklim. Ancaman perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Utara antara lain meningkatkan kerentanan terhadap bencana banjir, kekeringan, tanah longsor dan kebakaran hutan.

Indeks jasa ekosistem mitigasi bencana adalah salah satu hal yang dapat digunakan untuk menilai kapasitas adaptasi suatu wilayah dalam menghadapi bencana. Kapasitas adaptasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk berubah, dalam hal ini kemampuan atau potensi suatu sistem untuk menyesuaikan dengan kerusakan, mengambil

keuntungan dari suatu kesempatan, dan merespon suatu konsekuensi. Jasa ekosistem mitigasi bencana mengindikasikan adanya infrastruktur dari alam untuk melindungi dan mencegah terjadinya bencana seperti kebakaran lahan, erosi, abrasi, dan longsor. Nilai IJE yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kondisi alam pada wilayah tersebut mampu menjadi pelindung alami dari suatu bencana, dan sebaliknya.

Indonesia sangat berkepentingan dalam menangani penanggulangan pemanasan global dan perubahan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi 31 – 43 % pada tahun 2030, dengan sektor kehutanan dan lahan gambut sebagai target utama reduksi emisi. Hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam dokumen Enhanced NDC tahun 2022. Kebijakan nasional terkait perubahan juga iklim telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan GRK dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional. Provinsi Kalimantan Utara juga berkomitmen untuk mendukung target nasional dengan dikeluarkannya SK Gubernur Tahun 2015 tentang POKJA RAD GRK dalam rangka melaksanakan tugas Rencana Aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Kalimantan Utara dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Dalam Dokumen RAD GRK, emisi terbesar di Provinsi Kalimantan Utara adalah bidang penggunaan lahan, kehutanan dan lahan gambut. Lima kegiatan utama dari Provinsi Kalimantan Utara yang akan menjadi prioritas utama aksi mitigasi bidang berbasis lahan. Aksi–aksi mitigasi prioritas Provinsi Kalimantan Utara adalah: 1. Patroli pengamanan hutan 2. Rebosisasi/rehabilitasi lahan di lima kabupaten/kota 3. Penanaman pohon mangrove 4. Pengembangan hutan tanaman rakyat 5. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan terbuka. Relevansi muatan RPPEG dengan RAD GRK Provinsi Kalimantan Utara sangat kuat dan relevan, dimana RPPEG akan mendukung dan memperkuat implementasi penurunan emisi gas rumah kaca khususnya pada lahan gambut.

a. Kerentanan Bencana Banjir

Banjir besar terjadi pada periode tahunan, lima tahunan atau sepuluh tahunan dengan jumlah debit air melebihi kapasitas daya

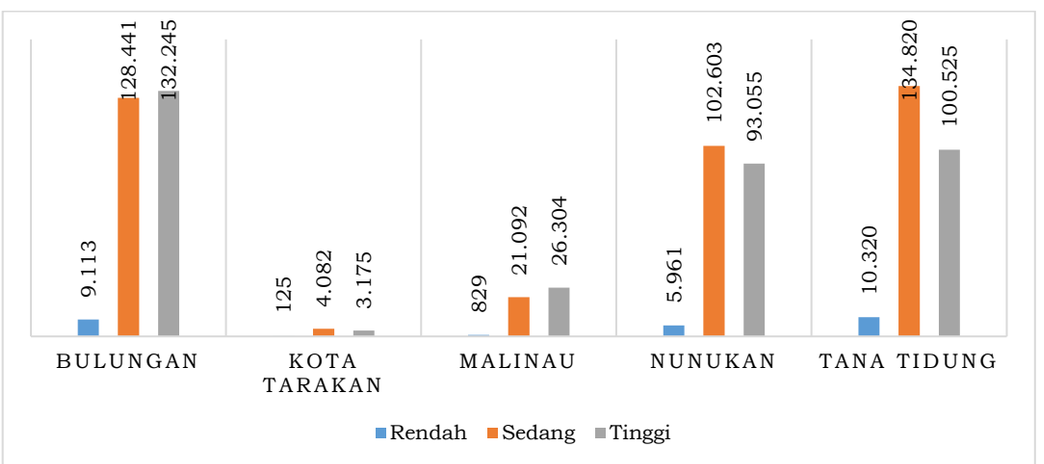
tampung sungai. Di samping faktor curah hujan, banjir juga disebabkan oleh berkurangnya daya tampung sungai akibat erosi maupun longsoran sedimen yang masuk ke badan sungai, sedangkan di daerah perkotaan sedimentasi juga disebabkan oleh pembuangan sampah yang sembarangan. Selama periode tahun 2015 hingga Juni 2023, tercatat sebanyak 128 kejadian bencana banjir, dengan kejadian terbanyak di Kabupaten Nunukan dengan jumlah 48 kejadian.

Tabel 2.22
Luas Areal dengan Jasa Ekosistem Pencegahan Bencana Banjir di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Luas Menurut Kategori (ha)					Luas Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bulungan	12.677	51.829	110.347	266.739	937.078	1.378.669
Malinau	1.921	7.168	10.277	407.936	3.476.314	3.903.611
Nunukan	1.721	23.557	90.147	372.184	872.766	1.360.374
Tana Tidung	1.214	12.159	115.949	121.722	92.015	343.059
Kota Tarakan	-	3.653	2.622	11.138	6.992	24.405
Luas	17.533	98.361	329.342	1.179.718	5.385.164	7.010.118
Persentase	0,25	1,40	4,70	16,83	76,82	100,00

Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045

Jasa ekosistem pencegahan terhadap bencana banjir di Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh kategori sangat tinggi dengan persentase 76,82% atau seluas 5.385.164 ha, dan yang terluas berada di Kabupaten Malinau.



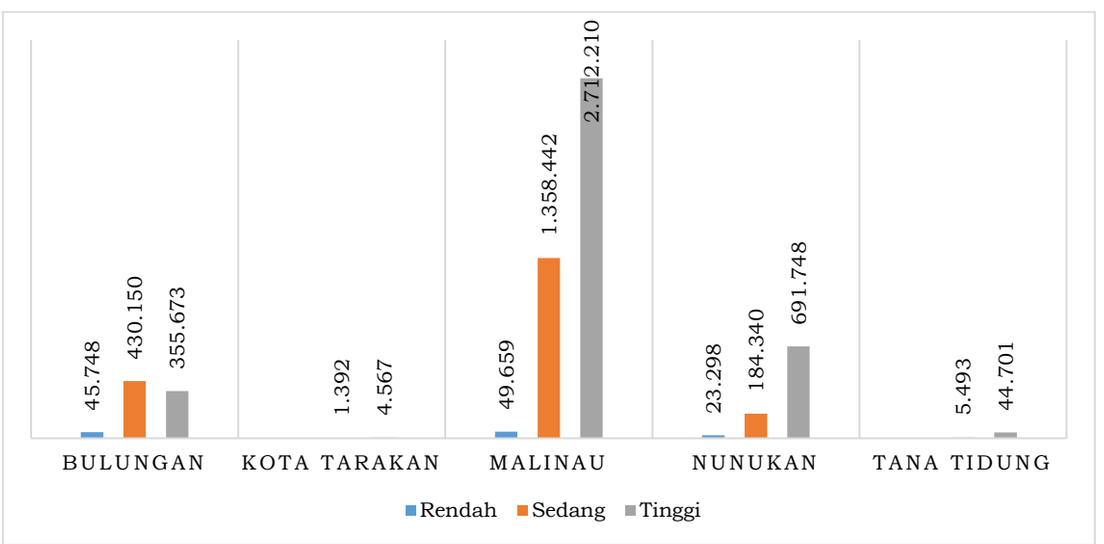
Gambar 2.5.
Luas Areal dengan Tingkat Bahaya Banjir di Provinsi Kalimantan Utara (Ha)
Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045

Wilayah Kabupaten Bulungan seluas 132.245 ha teridentifikasi merupakan areal yang tingkat bahaya banjirnya berada dalam kategori

tinggi. Demikian halnya di Kabupaten Nunukan seluas 93.055 ha dan Kabupaten Tana Tidung seluas 100.525 ha juga teridentifikasi tinggi bahaya banjir. Sementara di Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan, luas areal dengan bahaya banjir yang tinggi masih berada di bawah tiga kabupaten lainnya.

b. Kerentanan Bencana Tanah Longsor

Provinsi Kalimantan Utara mempunyai potensi atau kerawanan terhadap gerakan tanah. Gerakan tanah sangat dipengaruhi kestabilan lereng yang sangat bergantung oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lereng antara lain besarnya lereng, komponen penyusun lereng, struktur geologi yang ada pada lereng tersebut, sedangkan faktor eksternal antara lain tutupan lereng (vegetasi), intensitas dan besarnya curah hujan, kondisi muka air tanah, getaran atau gempabumi. Getaran tanah terjadi jika gaya pendorong melebihi gaya penahan pada suatu lereng. Selama periode tahun 2015 hingga bulan Juni 2023, tercatat sebanyak 252 kejadian bencana tanah longsor, dan yang terbanyak berada di Kota Tarakan dengan jumlah 210 kejadian.



Gambar 2.6.
Luas Areal dengan Tingkat Bahaya Tanah Longsor
Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045

Areal dengan tingkat bahaya tanah longsor kategori tinggi tidak teridentifikasi di Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung. Paling luas berada di Kabupaten Malinau seluas 2.712.210 ha dan di Kabupaten

Nunukan seluas 691.746 ha. Kabupaten Malinau menjadi wilayah yang paling rawan akan bahaya tanah longsor.

Tabel 2.23
Luas Areal dengan Jasa Ekosistem Pencegahan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota

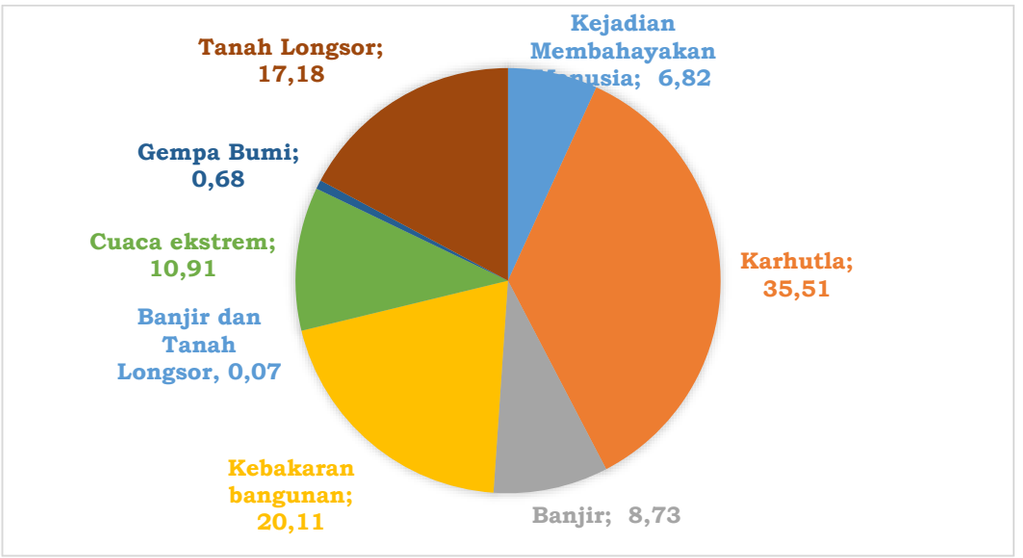
Kabupaten/Kota	Luas Menurut Kategori (ha)					Luas Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bulungan	-	147.419	108.379	261.642	861.229	1.378.669
Malinau	507	9.147	26.724	170.262	3.696.971	3.696.971
Nunukan	5.499	47.096	309.229	191.064	807.485	1.360.374
Tana Tidung	6.904	107.342	87.540	89.827	51.445	343.059
Kota Tarakan	-	5.046	4,665	10.422	4.272	24.405
Luas	12.911	316.051	536.538	723.217	5.421.402	7.010.118
Persentase	0,18	4,51	7,65	10,32	77,34	100,00

Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045

Luas areal dengan jasa ekosistem pencegahan bencana tanah longsor memiliki luas terbesar pada kategori sangat tinggi dengan persentase 77,34%. Sedangkan pada kategori sangat rendah memiliki persentase 0,18%. Wilayah paling luas dengan kategori sangat tinggi yaitu Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan memiliki luasan paling kecil untuk kategori sangat tinggi. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Malinau, sebagian wilayah Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan mempunyai risiko sangat tinggi.

c. Kerentanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Selama periode tahun 2015-2023, sebesar 35% bencana yang terjadi berupa kebakaran hutan dan lahan. Penyebabnya beragam, mulai dari musim kemarau, siklus El Nino, pembukaan lahan dengan cara dibakar, sampai pada pembakaran hutan yang disengaja untuk kepentingan pemanfaatan sumber daya alam.



Gambar 2.7.
Proporsi Bencana di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2023
Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045

Jasa ekosistem pencegahan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan didominasi oleh kategori sangat tinggi dengan persentase 56,28% atau seluas 3.945.254 ha, dan yang terluas berada di Kabupaten Malinau. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Luas Areal dengan Jasa Ekosistem Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Luas Menurut Kategori (ha)					Luas Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bulungan	12.677	57.517	182.788	695.829	429.857	1.378.669
Malinau	2.191	8.986	91.731	942.695	2.858.007	3.903.611
Nunukan	12.000	52.474	308.117	397.608	590.175	1.360.374
Tana Tidung	4.302	64.439	104.363	104.822	65.134	343.059
Kota Tarakan	-	3.653	9.685	8.986	2.080	24.405
Luas	31.170	187.069	696.684	2.149.941	3.945.254	7.010.118
Persentase	0,44	2,67	9.94	30,67	56,28	100,00

Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045

Kabupaten Malinau memiliki kerawanan paling tinggi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan juga sering terjadi. Selain karena kegiatan illegal logging, kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi karena perubahan iklim yang cukup signifikan. Mitigasi bencana hutan dan lahan perlu menjadi prioritas utama di wilayah Kalimantan Utara.

D. Kondisi Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan indikator yang menggambarkan kondisi pengelolaan lingkungan yang menjadi bahan informasi pendukung proses pengambilan kebijakan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks lingkungan hidup mencakup akumulasi dari tiga komponen yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas air laut, dan indeks kualitas tutupan lahan yang memiliki bobot nilai untuk setiap komponennya.

Tabel 2.25
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,8	80,95	80,67	80,77	79,95

Sumber: Rancangan RPJPD Kalimantan Utara 2025-2045 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Utara menunjukan tren peningkatan dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 nilai indeks lingkungan hidup yaitu sebesar 78,8 dan terus mengalami peningkatan menjadi 80,77 pada tahun 2023. Namun di Tahun 2024 sedikit menurun menjadi 79,95. Hal ini menunjukan kondisi lingkungan di Provinsi Kalimantan Utara mengalami perbaikan setiap tahunnya.

a. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air merupakan tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu. Semakin tinggi suatu indeks kualitas air, semakin baik status mutu air tersebut.

Tabel 2.26
Hasil Pengukuran Indeks Kalitas Air di Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kalitas Air	60,47	57,34	54,46	55,93	54,31

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara diakses melalui sidaracantik.kaltaraprov.go.id dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air pada tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Indeks Kualitas Air mengalami penurunan hingga tahun 2022. Namun pada tahun 2023 hingga 2024, Indeks Kualitas Air mengalami kondisi yang fluktuatif. Dalam menjaga kualitas air diperlukan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha yang berada di sekitar aliran sungai untuk tidak membuang limbah secara langsung ke badan sungai, namun melakukan pengolahan terlebih dahulu.

b. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah hasil pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pencemaran udara di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara dihitung menggunakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP 45/MENLH/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara. Parameter ISPU adalah diameter partikulat (PM10), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), dan ozon (O3). Semakin tinggi hasil pengukurannya, semakin berbahaya kualitas udara tersebut. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kalimantan Utara tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.27
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Udara	94,23	93,43	94,52	93,91	92,99

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimanatan Utara diakses melalui sidaracantik.kaltaraprov.go.id dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Pengukuran Indeks Kualitas Udara tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa kualitas udara cenderung mengalami kondisi yang fluktuatif. Capaian terakhir di tahun 2024, kondisi kualitas udara mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun nilai tersebut termasuk masih dalam kategori sangat baik. Menurunnya nilai kualitas udara ini dapat disebabkan oleh peningkatan tingkat pencemaran udara yang berasal dari kebakaran hutan, aktivitas industri, dan penggunaan kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Utara.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah indeks yang mengukur kualitas beberapa aspek seperti aspek konservasi dan aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial. Indeks ini dihitung dengan mengakumulasi nilai beberapa indeks penyusun yang diberikan bobot, yaitu indeks tutupan hutan, indeks performance hutan, indeks kondisi tutupan tanah, indeks konservasi badan air, dan indeks kondisi habitat. Nilai yang dihasilkan dari pengukuran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pembukaan lahan, kebakaran hutan dan lahan, penebangan liar, rehabilitasi hutan dan lahan, rehabilitasi kawasan pesisir, pemulihan lahan bekas tambang, dan pemulihan lahan terkontaminasi B3. Semakin tinggi nilai terukur, semakin baik kualitas tutupan lahannya.

Tabel 2.28
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	79,03	99,96	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara diakses melalui sidaracantik.kaltaraprov.go.id dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2020 menjadi 79,03, lalu meningkat tajam di tahun 2021 menjadi 99,96 dan kemudian meningkat kembali hingga tahun 2024 menjadi 100. Kategori capaian tersebut tergolong pada kategori sangat baik. Dengan demikian tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Utara perlu untuk diperhatikan melalui upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti pemanfaatan lahan sesuai tata ruang, mempertahankan cakupan kawasan hutan primer untuk dilindungi, serta mempertahankan luasan ruang terbuka hijau.

d. Indeks Kualitas Air Laut

Indeks kualitas air laut atau IKAL merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Baku mutu yang digunakan dalam mengukur kualitas air laut dapat dibagi menjadi dua peruntukan yaitu untuk wisata bahari dan biota laut. Indeks kualitas air laut memiliki peranan penting dalam menggambarkan kondisi pencemaran pada ekosistem pesisir dan laut.

Tabel 2.29
Indeks Kualitas Air Laut di Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air Laut	74,74	81,52	84,85	83,4	84,65

Sumber: BPS Indonesia dan Dinas Lingkungan Hidup diakses melalui sidaracantik.kaltaraprov.go.id dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kondisi kualitas air laut di Provinsi Kalimantan Utara menunjukan fluktuasi dengan tren peningkatan. Pada tahun 2022- 2023 terjadi penurunan indeks dari nilai 84,85 menjadi 83,4. Dalam hal ini kondisi ekosistem pesisir dan laut perlu menjadi perhatian khusus mengingat adanya ekosistem pesisir dan laut ini berperan penting dalam jasa lingkungan dan kondisi ekonomi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang juga akan berpengaruh pada kondisi kualitas air laut. Namun di tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan menjadi 84,65.

e. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut

Indeks kualitas ekosistem gambut atau IKEG merupakan nilai yang menggambarkan kondisi ekosistem gambut dihitung melalui nilai komposit dari beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks tersebut dihitung menggunakan pendekatan perhitungan dari parameter luas terdampak kanal, luas areal bekas kebakaran, dan luas tutupan lahan baik pada fungsi lindung dan fungsi budidaya.

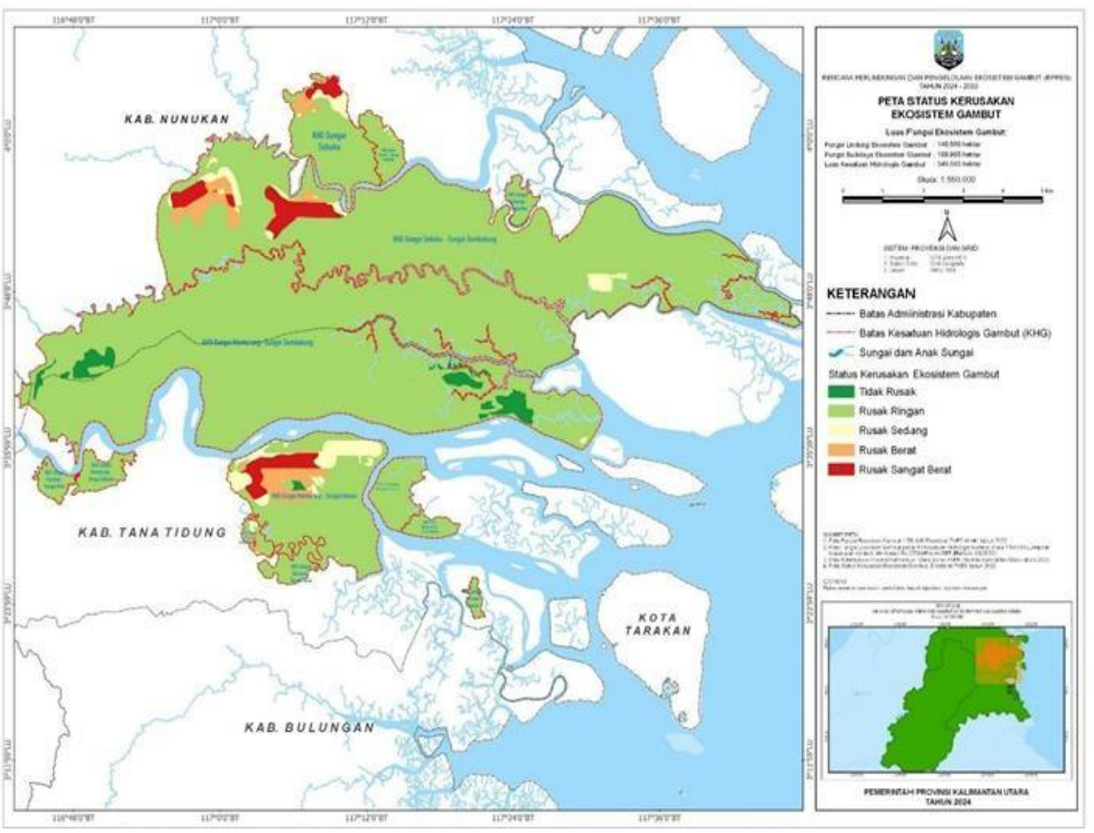
Tabel 2.30
Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	84,04	84,9	79,49	79,20	79,61

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kondisi kualitas ekosistem gambut di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Kemudian terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021-2023 dengan nilai 84,9 menjadi 79,2, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan perlu menjadi perhatian khusus.

Penurunan kualitas ekosistem gambut disebabkan adanya indikasi perubahan penutupan lahan, adanya perizinan di atas lahan hutan gambut, dan adanya area perhutanan sosial pada ekosistem gambut. Dengan adanya kegiatan tersebut, kondisi ekosistem gambut dapat terganggu dan menimbulkan kerusakan. Berdasarkan analisis data kerusakan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut (PKEG) – KLHK tahun 2022, terdapat 5 (lima) kategori kerusakan mulai dari kategori tidak rusak sampai kategori rusak sangat berat, yang memiliki persebaran di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana berikut.



Gambar 2.8.
Peta Sebaran Tingkat Kerusakan Ekosistem Gambut di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024
Sumber: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Utara 2024-2053

Dalam peta tersebut, terdapat kerusakan ekosistem gambut dengan didominasi dengan kategori rusak ringan dan terdapat beberapa kawasan dengan kategori rusak sedang, berat, dan sangat berat. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) juga akan menjadi salah satu faktor dalam penentuan indeks kualitas lahan. Pemulihan ekosistem gambut erat kaitannya denga tata air gambut agar gambut tetap basah, tidak mengalami kekeringan dengan menjaga tinggi muka ait tanah < 0,4 m. Penurunan tinggi muka air tanah akan menyebabkan gambut mudah terbakar dan berpotensi kehiilangan air yang pada musim kemarau dapat menyebabkan kekeringan.

Ekosistem gambut memiliki peranan penting secara ekologis yang sangat rentan apabila terjadi gangguan dan salah kelola. Oleh karena itu, melihat dari kondisi kualitas ekosistem gambut yang menurun tersebut, perlunya perhatian khusus dalam perlindungan dan pemanfaatannya termasuk perlindungan dari dampak suatu pembangunan termasuk di dalamnya adalah peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah. Pejabat pengawas perlu menjadi perhatian terutama dalam pengawasan terkait penaatan kewajiban perusahaan yang terdapat di ekosistem gambut.

Terkait dengan pelaku usaha yang memiliki konsesi di ekosistem gambut, terdapat kewajiban pelaku usaha yaitu kewajiban dalam penyusunan dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut sesuai PP 71/2014 jo PP 57/2016 tentang perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut. Berdasarkan Dokumen RPPEG Provinsi Kalimantan Utara (2023), fungsi lindung pada ekosistem gambut telah dibebani izin pemanfaatan perkebunan sawit dan kehutanan seluar 81.589,42 ha atau sekitar 54 persen. Sedangkan fungsi budidaya ekosistem gambut telah dibebani izin sebanyak 30 persen atau seluas 71.252,72 ha.

E. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a. Ambang Batas Daya Dukung dan Daya Tampung Penyediaan Air

Analisis ambang batas dan status DDLH penyedia air secara kuantitatif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: perhitungan ketersediaan air, perhitungan kebutuhan air untuk lahan dan domestik, perhitungan ambang batas penduduk, serta penentuan status DDLH penyedia air di setiap grid. Daya dukung dan daya tampung air di Provinsi Kalimantan Utara merupakan agregasi nilai DDDTLH seluruh

grid-grid pada wilayah yang telah dikaji jasa ekosistemnya/jasa lingkungannya, dan teridentifikasi bahwa untuk daya dukung dan daya tampung penyedia air "Belum Terlampaui".

Berdasarlan Lampiran I Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.146/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2023 17 Februari 2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, Provinsi Kalimantan Utara berada pada indikasi status belum terlampaui. Adapun luas areal yang status penyediaan airnya sudah terlampaui terhitung seluas 170.463,14 ha atau hanya sebesar 2,4 % dari total luas wilayah provinsi.

Tabel 2.31
Status Daya Dukung Penyediaan Air Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Ketersediaan (m^3/tahun)	Kebutuhan Air Total (m^3/tahun)	Indikasi Status	Belum Terlampaui		Terlampaui	
			(ha)	(%)	(ha)	%
91.170.199.901,80	5.024.576.396,36	Belum Terlampaui	6.839.654,86	97,6%	170.463,14	2,4%

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029

Hasil analisis spasial dengan penutupan lahan tahun 2021, luas areal penyedia air yang terlampaui bertambah menjadi 249.643 ha atau sebesar 3,56%. Daerah dengan luas penyedia air belum terlampaui yang paling besar terdapat di Kabupaten Malinau.

Tabel 2.32
Status Daya Dukung Daya Penyediaan Air Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Luas Menurut Status (Ha)		Luas (Ha)
		Belum Terlampaui	Terlampaui	
1	Bulungan	1.256.705	31.505	1.288.210
2	Kota Tarakan	3.954.814	1.132	3.955.946
3	Malinau	1.347.571	96.102	1.443.673
4	Nunukan	255.342	42.207	297.549
5	Tana Tidung	24.655	86	24.741
Luas Total		6.839.087	171.031	7.010.118
Persentase (%)		97.6%	2.4%	

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029

b. Ambang Batas Daya Dukung dan Daya Tampung Penyediaan Pangan

Penentuan status DDLH indikatif jasa lingkungan penyedia pangan dilakukan melalui perhitungan ambang batas penduduk. Ambang batas penduduk adalah jumlah penduduk maksimal yang dapat dilayani oleh ketersediaan jasa lingkungan, dan status DDLH indikatif

dapat diketahui dengan membandingkan antara ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk pada waktu tertentu.

Perhitungan DDLH penyedia pangan dengan pendekatan kuantitatif dilakukan melalui perhitungan selisih dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing jasa ekosistem. Perhitungan DDLH penyedia pangan dilakukan pada peta dengan resolusi 30”x30” (±0.9 km x 0.9 km) dalam bentuk grid, sehingga pada setiap luasan area tersebut, dapat diketahui jumlah kebutuhan pangan, ketersediaan pangan, ambang batas penduduk, dan status DDLH-nya.

Ambang batas penduduk diperoleh melalui pembagian ketersediaan bahan pangan atau energi pangan dengan kebutuhan energi pangan per kapita. Hasil perhitungan DDDTLH penyedia pangan menunjukkan bahwa jika nilai Daya Dukung Daya Tampung pada grid ke-I bernilai positif, maka menunjukan bahwa Daya Dukung Daya Tampung pada grid yang dihitung masih mampu mendukung kebutuhan pangan pada wilayah grid tersebut. Namun, jika nilai Daya Dukung Daya Tampung pada grid ke-I bernilai negatif, maka daya dukung dan daya tampung penyedia pangan pada wilayah grid telah melampaui ambang batasnya. Daya dukung dan daya tampung penyedia pangan di Provinsi Kalimantan Utara merupakan agregasi nilai DDDTLH seluruh grid-grid pada wilayah yang telah dikaji jasa ekosistemnya/jasa lingkungannya, dan teridentifikasi bahwa untuk daya dukung dan daya tampung penyedia pangan “Belum Terlampaui”.

Tabel 2.33
Status Daya Dukung Daya Penyediaan Pangan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Luas Menurut Status (Ha)		Luas (Ha)
		Belum Terlampaui	Terlampaui	
1	Bulungan	1.370.995	-	1.370.995
2	Kota Tarakan	4.765	19.718	24.483
3	Malinau	3.902.853	-	3.902.853
4	Nunukan	1.421.956	647	1.422.602
5	Tana Tidung	289.186	-	289.186
Luas Total		6.989.753	20.364	7.010.118
Persentase (%)		99,71	0,29	

Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045

Status daya dukung penyediaan pangan di Kota Tarakan sebagian besar sudah terlampaui. Namun secara keseluruhan, pada tahun 2021 hanya 0,29% dari wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang

daya dukung penyediaan pangannya sudah terlampaui dan lokasinya sebagian besar berada di Kota Tarakan seluas 19.718 ha dan di Kabupaten Tana Tidung seluas 647 ha.

2. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks ketahanan pangan yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan.

Indeks ketahanan pangan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan intervensi dan lokus program penguatan ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian merupakan penyesuaian dari indeks yang telah ada berdasarkan ketersediaan data tingkat kabupaten/kota. Sembilan Indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Pilar pertama yaitu ketersediaan yang perlu dipenuhi adalah ketersediaan pangan domestik, cadangan pangan, dan kegiatan ekspor-impor terkait pangan. Pada pilar kedua yaitu keterjangkauan, indikator yang perlu dipenuhi yaitu terkait distribusi, stabilitas harga, distribusi logistik, daya beli masyarakat, dan manajemen stok. Terakhir yaitu pilar pemanfaatan pangan yang perlu dipenuhi adalah perbaikan pola konsumsi, gizi, dan keamanan mutu pangan.

Hasil perhitungan IKP berdasarkan pada 9 indikator untuk wilayah kabupaten dan 8 indikator untuk wilayah kota dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar

wilayah. IKP mencerminkan pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten kota. Indeks Ketahanan Pangan di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.34
Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Pangan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bulungan	77,63	77,19	77,00	77,11	76,61
Malinau	70,78	73,66	67,25	73,08	74,67
Nunukan	77,45	76,25	75,87	76,17	78,8
Tana Tidung	53,76	56,00	57,17	60,54	61,25
Kota Tarakan	79,91	82,02	77,90	86,06	87,53
Provinsi Kalimantan Utara	71,90	73,02	71,04	74,59	75,77

Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2018-2022 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan nilai IKP dari 73,02 di tahun 2021 menjadi 71,04 pada tahun 2022, namun kembali meningkat sampai tahun 2024 menjadi 75,77. Secara umum, Kota Tarakan memiliki nilai IKP yang lebih baik bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan wilayah dengan nilai IKP paling rendah berada di Kabupaten Tana Tidung. Nilai IKP kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan. Wilayah ini bergantung pada suplai pangan dari wilayah lain yang merupakan daerah sentra untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, secara keseluruhan dari nilai IKP yang diperoleh selama lima tahun berturut-turut menunjukkan bahwa Kalimantan Utara termasuk kedalam kategori IKP sangat tahan.

Tabel 2.35
Skor Tiga Pilar Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara 2022 & 2023

Kabupaten /Kota	2022			2023		
	Ketersediaan	Keterjangkauan	Pemanfaatan	Ketersediaan	Keterjangkauan	Pemanfaatan
Bulungan	65,52	88,12	77,26	59,18	88,08	82,33
Malinau	41,09	90,57	69,38	55,65	91,15	72,60
Nunukan	67,39	92,11	70,05	69,38	91,09	70,06
Tana Tidung	0,00	93,72	72,63	0,00	94,64	60,54
Kota Tarakan	-	85,43	71,73	-	90,93	82,08
Provinsi Kalimantan Utara	43,50	89,99	72,21	46,05	91,18	77,49

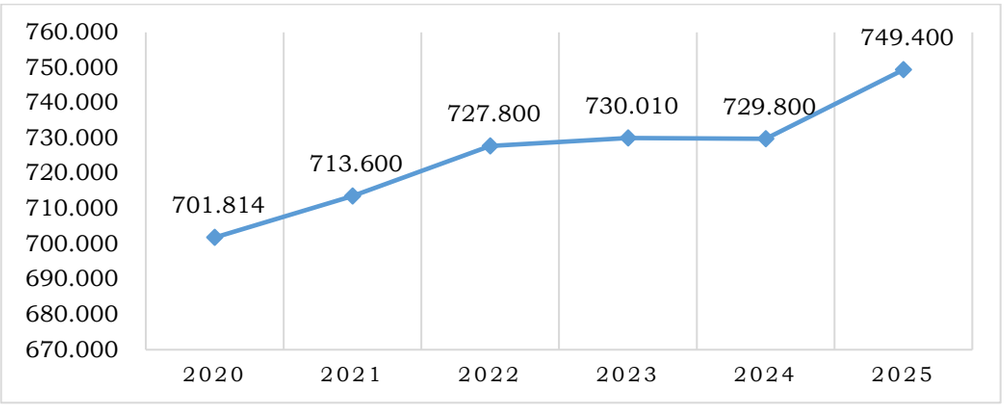
Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2023

Pada tabel di atas terlihat bahwa pilar ketersediaan tingkat provinsi mengalami pertumbuhan dari tahun 2022 hingga 2023 menjadi 46,05 poin. Walaupun pada tingkat kabupaten/kota, khususnya Kabupaten Bulungan mengalami penurunan dari 65,52 poin menjadi 59,18 poin di tahun 2023. Pilar lainnya mengenai keterjangkauan ketahanan pangan mengalami peningkatan sebesar 1,19 poin menjadi 91,18 poin pada tingkat provinsi tahun 2023. Tetapi pada Kabupaten Bulungan dan Malinau terjadi sedikit penurunan. Pilar terakhir yaitu pemanfaatan mengalami peningkatan sebesar 5,28 poin menjadi 77,49 poin di tingkat provinsi tahun 2023. Selain itu, rata-rata capaian di tingkat kabupaten/kota mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Data pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang menjadi pilar ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren kenaikan yang positif.

2.1.1.2. Aspek Demografi

A. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2020 sampai 2025 terus mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2024 yang sempat menurun menjadi 729.800 jiwa. Adapun jumlah penduduk pada tahun 2020 yaitu sebesar 701.814 jiwa dan pada tahun 2025 jumlah nya meningkat menjadi 749.400 jiwa. Atau terjadi peningkatan sebesar 47.586 jiwa selama kurun waktu enam tahun terakhir.



Gambar 2.9.
Jumlah Penduduk Kalimantan Utara 2020-2025
Sumber: BPS, 2025

Laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,39% per tahun. Perhitungan laju pertumbuhan penduduk per tahun tersebut dari tahun 2020-2025. Penggunaan tahun 2020 sebagai tahun awal perhitungan laju pertumbuhan penduduk per tahun karena terdapat perbedaan basis data antara tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya. Kabupaten Nunukan menjadi kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi dengan nilai 2,53% per tahun. Sedangkan, Kota Tarakan menjadi kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan penduduk paling lambat dengan nilai 1,18% per tahun.

Tabel 2.36
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Utara 2020-2025

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)						Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Malinau	82.500	83.800	85.300	85.530	86.500	87.500	1,24
Bulungan	151.800	154.500	157.600	158.050	160.200	162.400	1,43
Tana Tidung	25.600	26.400	27.600	27.470	28.200	28.800	2,53
Nunukan	133.100	203.200	208.300	207.870	210.900	214.000	1,53
Tarakan	242.800	245.700	249.000	251.090	253.900	256.700	1,18
Provinsi Kalimantan Utara	701.800	713.600	727.800	730.010	739.800	749.400	1,39

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara dalam Angka, 2025 diolah

B. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 yaitu sebesar 749.400 jiwa tersebar ke dalam lima kabupaten/kota yang ada. Kota Tarakan menjadi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 256.700 jiwa. Sedangkan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kabupaten Tana Tidung dengan jumlah penduduknya 28.800 jiwa.

Tabel 2.37
Persebaran dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa per km2)
Malinau	87.500	2
Bulungan	162.400	12
Tana Tidung	28.800	8
Nunukan	214.000	16
Tarakan	256.700	1.023
Provinsi Kalimantan Utara	749.400	11

Sumber: Kalimantan Utara Dalam Angka 2025, diolah

Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 memiliki kepadatan penduduk sebesar 11 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk tertinggi yaitu berada pada Kota Tarakan dengan angka 1.023 jiwa/km^2. Adapun Kabupaten dengan kepadatan terendah yaitu Kabupaten Malinau dengan angka 2 jiwa/km^2.

C. Struktur Penduduk

1. Menurut Jenis Kelamin

Perhitungan struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat menjadi pertimbangan dalam pembuatan peraturan atau kebijakan berbasis gender. Selain itu, dengan mengetahui struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin juga dapat menyokong pelayanan umum seperti pada bidang kesehatan atau pendidikan.

Tabel 2.38
Rasio Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

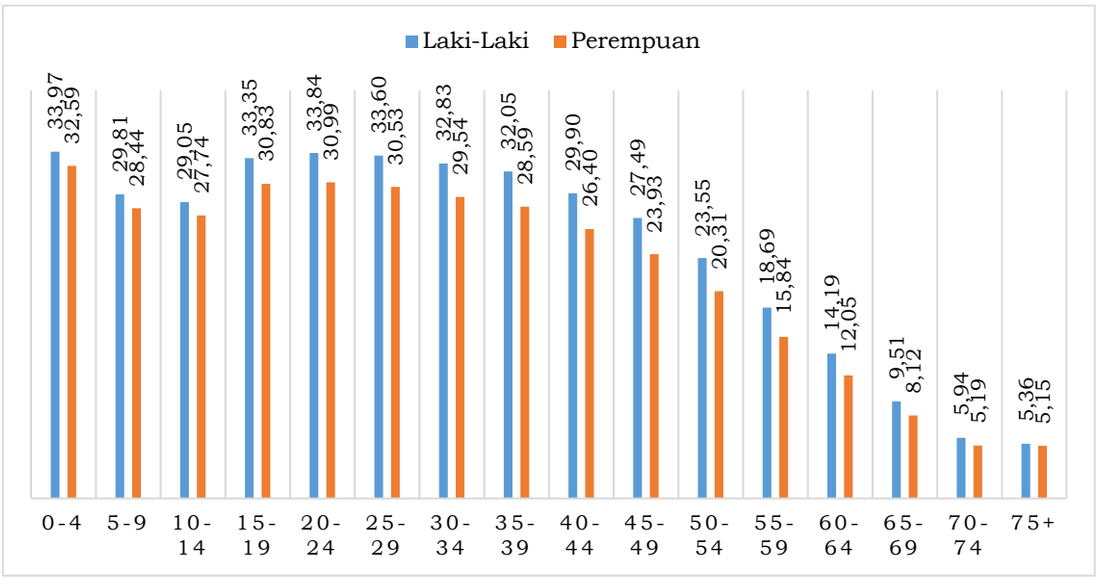
Kabupaten/Kota	Rasio Jenis Kelamin
Malinau	112,8
Bulungan	113,1
Tana Tidung	112,0
Nunukan	111,9
Tarakan	106,5
Provinsi Kalimantan Utara	110,4

Sumber: Kalimantan Utara Dalam Angka 2025

Penduduk Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Rasio Jenis Kelamin pada tahun 2025 yaitu sebesar 110,4 dengan rasio jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin Perempuan. Adapun Rasio Jenis Kelamin tertinggi yaitu berada pada Kabupaten Bulungan dengan nilai 113,1 dan terendah pada Kota Tarakan dengan nilai 106,5.

2. Menurut Umur Penduduk

Perhitungan struktur penduduk berdasarkan umur dapat menjadi perhitungan untuk angka ketergantungan. Selain itu, dengan mengetahui struktur tersebut dapat diketahui juga umur penduduk yang masih bersekolah sehingga kebijakan dalam bidang pendidikan dapat disesuaikan. Dengan mengetahui struktur penduduk berdasarkan umur penduduk banyak kebijakan dalam berbagai bidang yang dapat disesuaikan sehingga lebih relevan dengan masyarakat.



Gambar 2.10.
Piramida Penduduk Kalimantan Utara Tahun 2024
Sumber: Kalimantan Utara Dalam Angka 2025, diolah

Penduduk Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 didominasi penduduk usia produktif atau berumur 15-64 tahun dengan jumlah 528.480 jiwa. Sedangkan penduduk usia tidak produktif sebesar 220.890 jiwa dengan rincian untuk 0-14 tahun sebesar 181.610 jiwa dan penduduk usia 65 ke atas sebesar 39.280 jiwa.

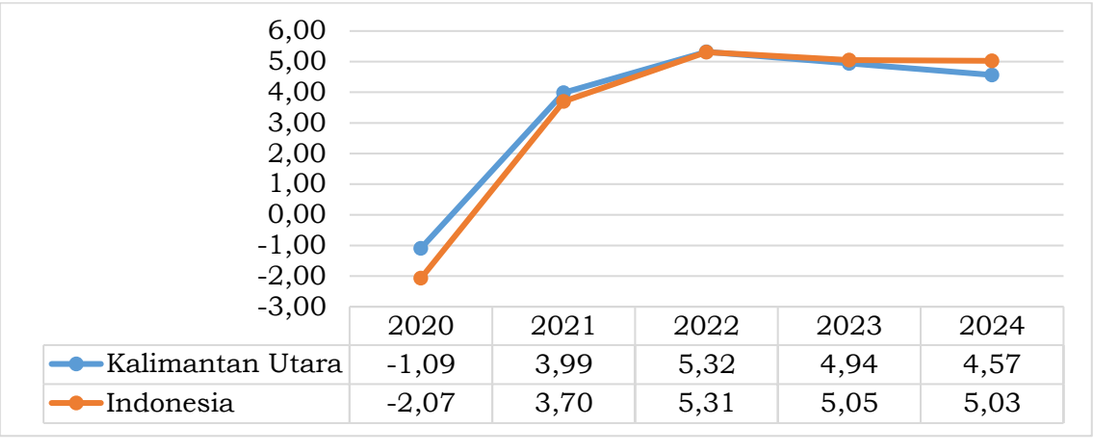
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah, dimana besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode waktu tertentu. Indikator pertumbuhan PDRB menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB ADHK. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n dengan nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, yang dinyatakan dalam persen. Laju pertumbuhan PDRB ADHK ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menjadikan barang dan jasa yang

diproduksi dalam masyarakat meningkat atau bertambah dan berimbas pada meningkatnya kemakmuran masyarakat, dimana meningkatnya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.



	2020	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Utara	-1,09	3,99	5,32	4,94	4,57
Indonesia	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03

Gambar 2.11.
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

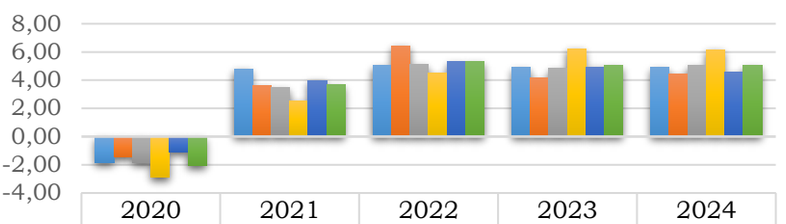
Secara umum, dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2023, capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional menunjukkan pola capaian yang hampir sama, dengan tren capaian yang lebih baik dibandingkan dengan nasional, kecuali tahun 2023. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian nasional, salah satunya adalah perlambatan ekonomi daerah. Provinsi Kalimantan Utara sendiri mengalami kontraksi ekonomi sebesar -1,09 persen, di mana capaian tersebut tercatat lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional yang mengalami kontraksi ekonomi sebesar -2,07 persen. Pada tahun tersebut, setidaknya terdapat lima sektor yang terkontraksi dalam struktur ekonomi di provinsi ini, di mana sektor pertambangan dan penggalian tercatat mengalami kontraksi yang terdalam, yakni mencapai -6,77 persen, yang diikuti oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (-4,33 persen), industri pengolahan (-3,84 persen), tranportasi dan pergudangan (-3,60 persen), serta sektor jasa perusahaan (-0,78 persen).

Seiring dengan pemulihan ekonomi nasional yang terindikasi membaik, berdampak pula pada peningkatan laju pertumbuhan

ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2021, capaian laju pertumbuhan ekonomi di provinsi ini tercatat sebesar 3,99 persen, sementara nasional tercatat sebesar 3,70 persen. Capaian tersebut selanjutnya menunjukkan kecenderungan meningkat sampai dengan tahun 2023, pada tahun tersebut capaian Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 4,94 persen, sementara itu capaian nasional berada pada capaian yang lebih tinggi dengan besaran 5,05 persen.

Selanjutnya Ekonomi Kalimantan Utara pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,57 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Konstruksi sebesar 11,95 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,87 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,80 persen. Sementara itu, Pertambangan dan Penggalian yang memiliki peran dominan tumbuh 0,28 persen. Sedangkan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 1,75 persen.

Apabila dibandingkan dengan capaian provinsi lain di Pulau Kalimantan, capaian laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 tercatat pada posisi terendah kedua setelah Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun pertumbuhan ekonomi tertinggi di pulau Kalimantan yaitu Provinsi Kalimantan Timur dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,17 persen pada tahun 2024.



	2020	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Barat	-1,82	4,80	5,07	4,90	4,90
Kalimantan Tengah	-1,41	3,59	6,45	4,14	4,43
Kalimantan Selatan	-1,82	3,48	5,11	4,84	5,05
Kalimantan Timur	-2,90	2,55	4,48	6,22	6,17
Kalimantan Utara	-1,09	3,99	5,32	4,94	4,57
Nasional	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03

Gambar 2.12.
Posisi Relatif Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Kalimantan Tahun 2020-Triwulan III 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Laju pertumbuhan ekonomi di lima kabupaten/kota lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Utara juga memiliki pola pertumbuhan yang hampir sama dengan provinsi. Dalam rentang lima tahun terakhir, capaian laju pertumbuhan ekonomi di Kota Tarakan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya, sekaligus telah mampu melampaui capaian provinsi dengan besaran 5,71 persen di tahun 2024. Kabupaten Malinau merupakan wilayah dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi terendah di provinsi ini dengan besaran 3,55 persen.

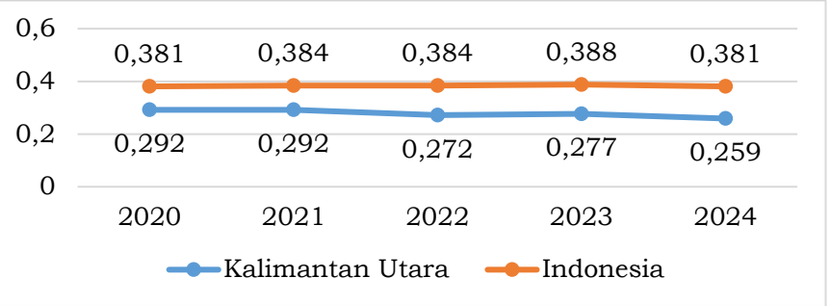
Tabel 2.39
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

No	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
1	Malinau	-0,53	4,50	5,00	4,22	3,55
2	Bulungan	-0,70	3,75	5,10	4,60	3,92
3	Tana Tidung	-0,97	4,21	5,31	4,50	3,57
4	Nunukan	-0,97	4,04	5,24	4,26	4,03
5	Tarakan	-0,75	3,95	5,59	5,90	5,71
	Provinsi Kalimantan Utara	**-1,09**	**3,99**	**5,32**	**4,94**	**4,57**

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2025

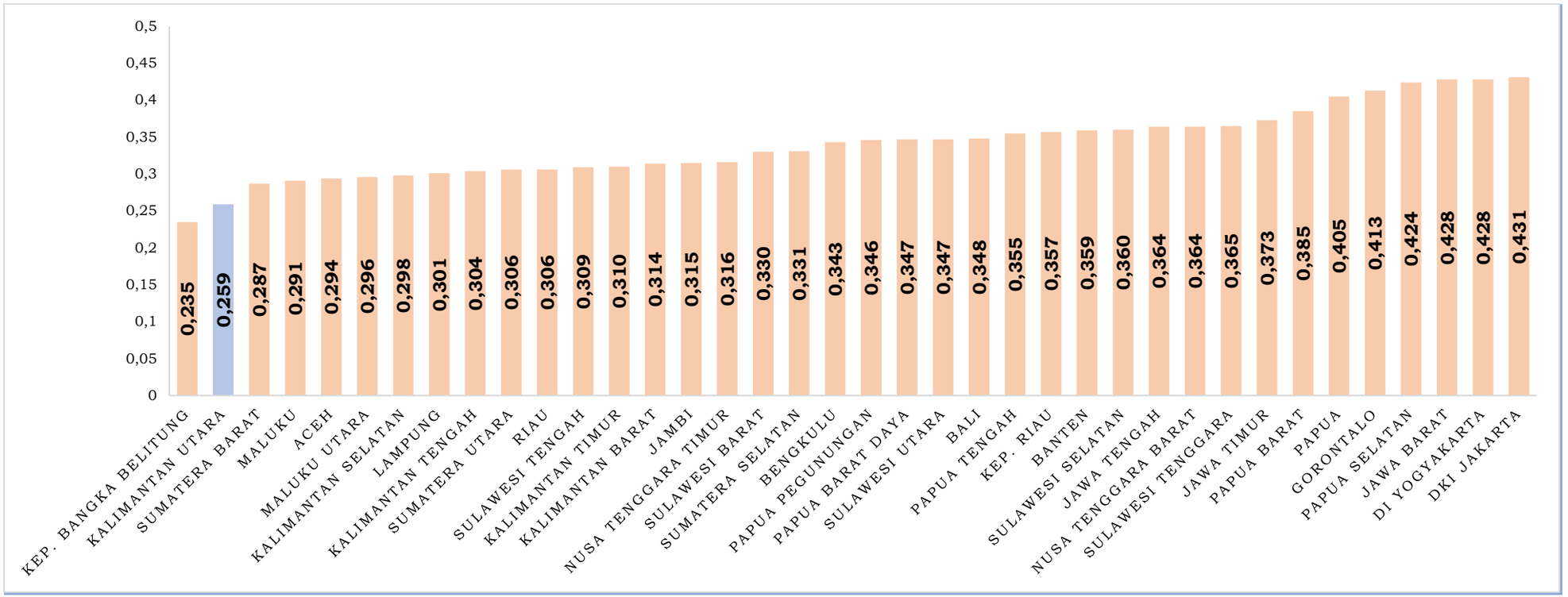
2. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan masyarakat, yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing—masing kelompok penduduk. Capaian Indeks Gini yang semakin mendekati nol dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik, sebaliknya apabila angka koefisien semakin mendekati satu, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar. Kategori ketimpangan rendah terjadi jika capaian Indeks Gini berada di antara nol hingga 0,3. Sementara kategori ketimpangan moderat terjadi jika capaian Indeks Gini berada di antara 0,3 hingga 0,5, dan kategori ketimpangan tinggi terjadi apabila capaian Indeks Gini berada di atas 0,5.



Gambar 2.13.
Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: Tabel Dinamis Provinsi Kalimantan Utara; Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024, capaian Indeks Gini baik di Provinsi Kalimantan Utara maupun nasional menunjukkan kondisi yang semakin membaik, yang ditunjukkan dengan menurunnya capaian Indeks Gini. Pada tahun 2020, Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 0,292 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 hingga besarannya menjadi 0,277. Pada September 2024, Gini Ratio tercatat sebesar 0,259. Angka ini menurun sebesar 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio pada tahun 2023. Dalam rentang waktu yang sama, capaian Indeks Gini di provinsi ini menunjukkan kondisi yang lebih baik apabila dibandingkan dengan capaian nasional, di mana dalam kurun waktu tersebut kondisi ketimpangan di provinsi ini berada dalam kategori ketimpangan rendah atau di bawah 0,3.



Gambar 2.14.
Posisi Capaian Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara terhadap Provinsi Lainnya Pada September 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Dalam kurun waktu yang sama capaian Indeks Gini nasional berada pada ketimpangan moderat atau memiliki capaian pada kisaran 0,3. Pada tahun 2020, capaian Indeks Gini Nasional tercatat sebesar 0,381 dan menunjukkan kondisi yang stabil pada besaran 0,38 sampai dengan tahun 2024, hingga besarannya menjadi 0,381 pada tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan 37 provinsi lain di Indonesia, capaian Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara berada pada urutan kedua setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tercatat memiliki capaian Indeks Gini sebesar 0,235 di tahun 2024. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan empat provinsi lain di Pulau Kalimantan, maka capaian Provinsi Kalimantan Utara menempati pada urutan pertama terbaik, di mana capaian provinsi tersebut seluruhnya berada pada ketimpangan moderat kecuali Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya sebesar 0,298.

Selanjutnya, capaian Indeks Gini menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara cukup beragam, di mana dalam rentang waktu lima tahun terakhir terdapat tiga wilayah menunjukkan kondisi yang semakin membaik dan terdapat dua wilayah dengan kondisi yang menunjukkan kecenderungan memburuk. Ketiga wilayah yang menunjukkan kecenderungan membaik adalah Kabupaten Malinau, Bulungan, dan Kota Tarakan. Sementara itu, dua wilayah dengan kecenderungan memburuk adalah Kabupaten Nunukan dan Tana Tidung. Pada tahun 2024, capaian Indeks Gini tertinggi berada di Kabupaten Malinau sebesar 0,283, walaupun capaian pada lima wilayah berada pada kriteria ketimpangan rendah.

Tabel 2.40
Perbandingan Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

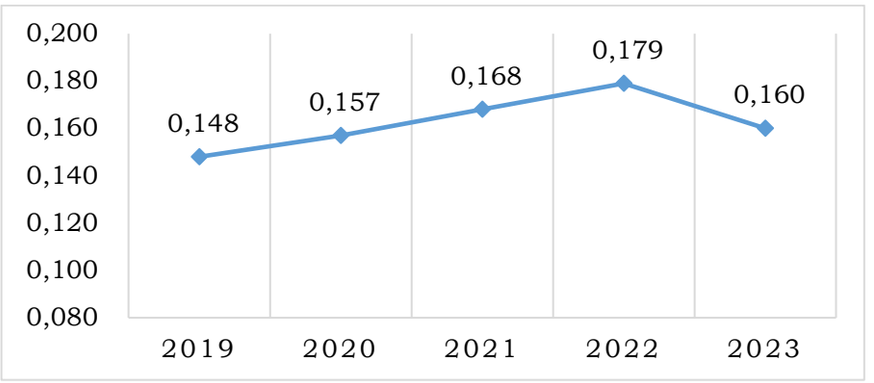
No	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
1	Malinau	0,295	0,304	0,260	0,285	0,283
2	Bulungan	0,290	0,338	0,287	0,305	0,274
3	Tana Tidung	0,259	0,312	0,279	0,281	0,280
4	Nunukan	0,262	0,261	0,265	0,262	0,270
5	Kota Tarakan	0,295	0,261	0,267	0,253	0,232
	Provinsi Kalimantan Utara	**0,292**	**0,292**	**0,272**	**0,277**	**0,264**

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan, Tahun 2025

3. Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Indeks ketimpangan Williamson adalah salah satu pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan wilayah dalam suatu wilayah. Indeks ketimpangan Williamson membantu dalam mengidentifikasi ketimpangan ekonomi antar wilayah dalam suatu daerah. Indeks ini dapat menjadi alat penting bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi wilayah—wilayah yang mungkin memerlukan perhatian khusus dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong perkembangan wilayah secara merata. Indeks ketimpangan Williamson menggunakan dua variabel utama dalam perhitungannya, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan jumlah penduduk suatu wilayah. Hasil penghitungan Indeks Ketimpangan Williamson mengindikasikan bahwa semakin mendekati angka nol, maka semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi. Sebaliknya, apabila hasil penghitungan Indeks Ketimpangan Williamson tercatat semakin mendekati angka satu, maka semakin besar ketimpangan pembangunan ekonomi.

Secara umum, dalam rentang waktu tahun 2019 hingga 2023, capaian Indeks Ketimpangan Williamson atau indeks ketimpangan regional di Provinsi Kalimantan Utara menunjukan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan memburuk, yang ditandai dengan besaran rata-rata pertumbuhan yang tumbuh positif (meningkat) atau sebesar 0,39 persen per tahun. Meskipun demikian, capaian indikator ini masih berada pada tingkat ketimpangan rendah, di mana pada tahun 2019 capaian indeks ini tercatat sebesar 0,148 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 hingga besarannya menjadi 0,160. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih harus terus berupaya untuk menjaga agar capaian indikator ini tetap pada kriteria ketimpangan rendah, sehingga ketimpangan yang terjadi di provinsi ini dapat ditekan. Adapun yang dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi diantaranya dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara, yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah.



Gambar 2.15.
Grafik Perkembangan Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2024

4. Angka Kemiskinan

Secara umum, Kemiskinan didefinisikan sebagai sebuah kondisi di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup tertentu atau kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan, yang secara ekonomi diukur dari pendapatan atau pengeluaran. BPS mengukur kemiskinan menggunakan konsep kebutuhan dasar, dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Garis kemiskinan didefinisikan sebagai representasi dari rupiah yang diperlukan atau harga yang dibayarkan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum makanan (setara dengan 2.100 kkal per kapita per hari) dan kebutuhan paling mendasar kelompok bukan makanan.

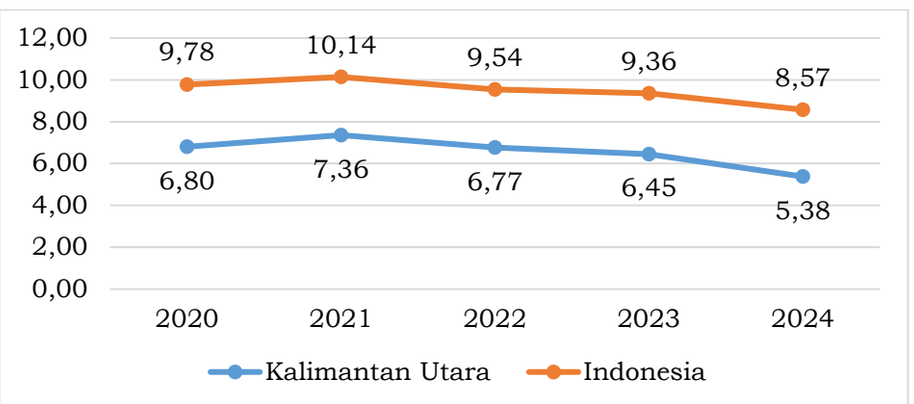
Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu indikator ini selalu menjadi fokus yang bisa diintervensi oleh pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang. Penanggulangan kemiskinan juga merupakan salah satu prioritas pembangunan di Indonesia, di mana hal ini sejalan dengan salah satu agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), yakni tanpa kemiskinan–mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.

Tabel 2.41
Kondisi Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Garis Kemiskinan	Rupiah/Kapita/ Bulan	681.035	710.994	772.914	817.876	876.375
2	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	51,79	52,86	49,46	47,97	41,11
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	6,80	7,36	6,77	6,45	5,38
4	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	Persen	93,20	92,64	93,23	93,55	
5	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	0,84	0,87	0,89	0,64	0,49
6	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,17	0,18	0,19	0,11	0,08

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

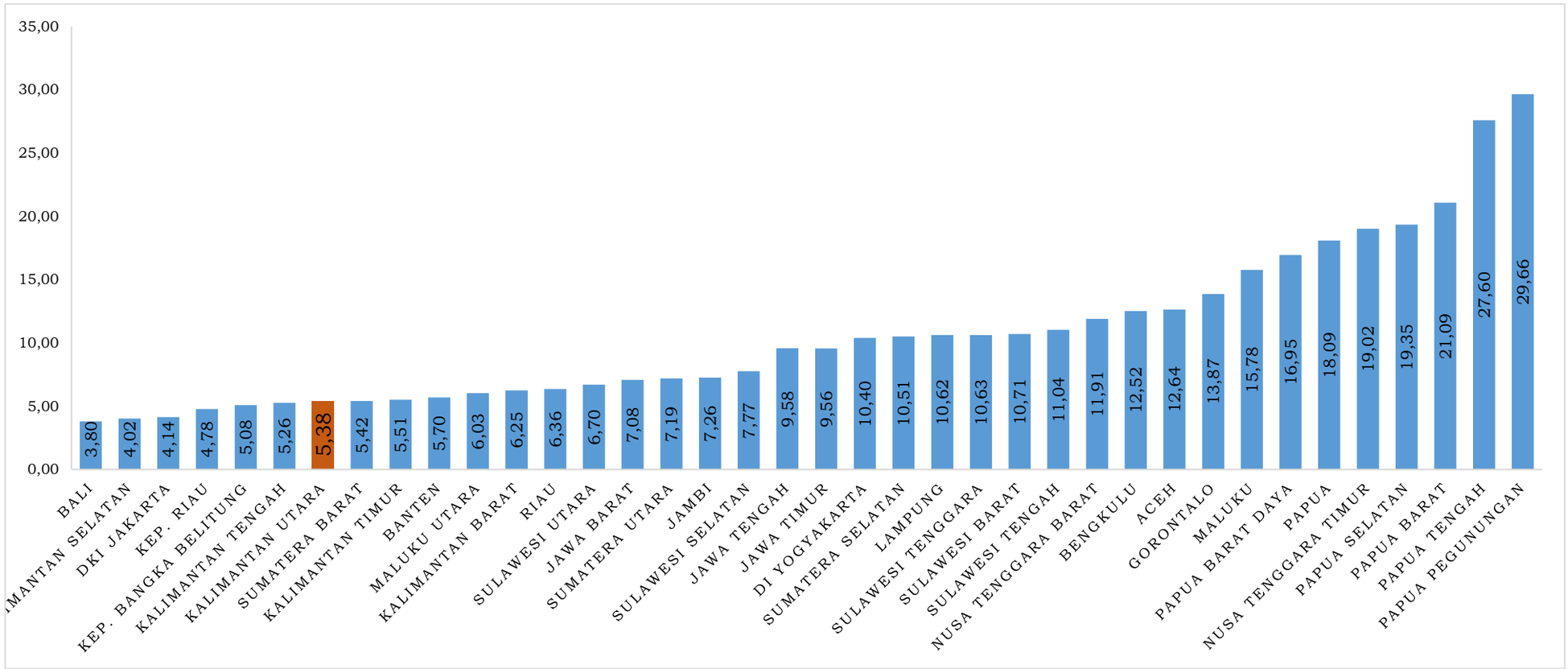
Secara garis besar, kondisi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara dalam enam tahun terkahir menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya garis kemiskinan dan persentase penduduk di atas garis kemiskinan, serta menurunnya jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, serta indeks keparahan kemiskinan. Secara lebih detail, garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar Rp 681.035,00 per kapita per bulan di tahun 2020 dan menunjukkan peningkatan menjadi Rp 876.375,00 per kapita per bulan di tahun 2024. Garis kemiskinan di provinsi ini merupakan yang tertinggi apabila dibandingkan dengan garis kemiskinan empat provinsi lainnya di Pulau Kalimantan.



Gambar 2.16.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan (Persen) Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan jumlah yang fluktuatif dengan kecenderungan membaik, yang ditandai dengan

menurunnya jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di provinsi ini tercatat sebanyak 51,79 ribu jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 52,86 ribu jiwa, namun pada tahun berikutnya terus menurun hingga menjadi 41,11 ribu jiwa pada tahun 2024. Selanjutnya, menurunnya jumlah penduduk miskin tersebut berbanding lurus dengan menurunnya persentase penduduk miskin, di mana besaran persentase penduduk miskin di provinsi ini tercatat sebesar 6,80 persen di tahun 2020 dan dalam perkembangannya menunjukkan kecenderungan membaik menjadi 5,38 persen di tahun 2024. Hal tersebut menjadikan capaian indikator penduduk di atas garis kemiskinan di provinsi ini menunjukkan peningkatan, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,14 per tahun. Pada tahun 2020, capaian indikator persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 93,20 persen dan bertumbuh menjadi 93,55 persen di tahun 2023.



Gambar 2.17.
Posisi Capaian Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara terhadap Provinsi Lainnya Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Dalam kurun waktu yang sama, capaian tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara berada dalam posisi yang lebih baik dibandingkan dengan capaian Indonesia yang tercatat sebesar 8,57 persen di tahun 2024. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, posisi Provinsi Kalimantan Utara berada pada urutan ketujuh. Provinsi Bali merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia, yakni dengan capaian 3,80 persen di tahun 2024. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, posisi Provinsi Kalimantan Utara berada pada urutan ketiga setelah Provinsi Kalimantan Selatan (4,02 persen) dan Kalimantan Tengah (5,26 persen).

Relatif tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara disebabkan oleh belum optimalnya akses pada sumber-sumber ekonomi dan belum optimalnya akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Pertama, belum optimalnya akses pada sumber ekonomi disebabkan karena belum optimalnya penyerapan tenaga kerja. Masih relatif tingginya jumlah pengangguran di provinsi ini juga disebabkan karena belum optimalnya kualitas tenaga kerja itu sendiri, karena tidak dibekali dengan peningkatan ketrampilan dan keahlian yang dapat meningkatkan produktivitas kinerja.

Kedua, belum optimalnya akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar disebabkan karena belum optimalnya akses terhadap jaminan dan perlindungan sosial, serta belum optimalnya penyediaan layanan infrastruktur dasar dan wilayah. Belum optimalnya akses terhadap jaminan dan perlindungan sosial tersebut setidaknya disebabkan oleh tiga faktor, yakni belum optimalnya penyediaan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua, belum optimalnya akses pada layanan kesehatan, dan belum optimalnya pemberdayaan ekonomi. Adapun pemberdayaan ekonomi yang dimaksud meliputi pelatihan ketrampilan, bantuan modal usaha, pembentukan koperasi, akses ke pasar dan peluang kerja, serta dukungan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selanjutnya, belum optimalnya penyediaan layanan infrastruktur dasar dan wilayah terkait dengan belum optimalnya penyediaan layanan jalan, air bersih, sanitasi, energi, serta akses telekomunikasi.

Selanjutnya, untuk mengukur kondisi kemiskinan di daerah tidak hanya dilihat dari jumlah penduduk miskin dan persentase

penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan saja. Namun perlu juga dilihat dari perspektif yang lain, seperti tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai agregat dari indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan biaya mengetaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengetasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karateristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengidikasikan bahwa rata–rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, capaian indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kondisi yang semakin membaik, yang ditandai dengan besaran rata-rata pertumbuhan yang bertumbuh negatif (menurun). Capaian indikator tersebut menunjukkan rata-rata penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 0,84 dan berfluktuatif sampai dengan tahun 2024 hingga capaiannya menjadi 0,49.

Selanjutnya, indeks keparahan kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator ini memiliki interpretasi bahwa semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Dalam rentang waktu yang sama, capaian indikator indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 0,17 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga capaiannya menjadi 0,08 persen per tahun.

Tabel 2.42
Kondisi Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

No	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
1	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)					
	Malinau	616.161	650.444	692.605	749.933	791.037
	Bulungan	472.569	486.524	514.320	551.925	572.546
	Tana Tidung	425.348	440.599	462.898	490.400	518.696
	Nunukan	450.718	479.712	519.231	556.342	597.431
	Kota Tarakan	696.585	711.268	773.446	819.621	854.967
2	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)					
	Malinau	6,16	6,39	5,93	5,95	6,45
	Bulungan	13,08	13,48	12,58	12,19	11,95
	Tana Tidung	1,46	1,49	1,35	1,47	1,50
	Nunukan	13,76	13,94	12,86	11,88	12,61
	Kota Tarakan	17,33	17,57	16,75	16,49	15,32
3	Persentase Penduduk Miskin (P0)					
	Malinau	6,63	7,30	6,64	6,54	6,94
	Bulungan	9,06	10,03	9,32	8,99	8,76
	Tana Tidung	4,81	5,15	4,45	4,62	4,47
	Nunukan	6,36	6,79	6,13	5,53	5,73
	Kota Tarakan	6,24	6,71	6,30	6,10	5,56

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Berdasarkan garis kemiskinan menurut kabupaten/kota, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, besaran garis kemiskinan di lima kabupaten/kota seluruhnya menunjukkan peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar lima hingga enam persen per tahun. Capaian indikator tertinggi di provinsi ini tercatat di Kota Tarakan, yakni sebesar Rp 696.585,00 per kapita per bulan di tahun 2020 dan bertumbuh menjadi Rp 854.967,00 per kapita per bulan di tahun 2024. Sementara itu, Kabupaten Tana Tidung tercatat memiliki capaian terendah untuk indikator ini, di mana pada tahu 2020 capaian indikator ini tercatat sebesar Rp 425.348,00 per kapita per bulan dan meningkat menjadi Rp 518.696,00 per kapita per bulan di tahun 2024.

Selanjutnya, jumlah penduduk miskin di lima kabupaten/kota tidak seluruhnya menunjukkan kondisi yang membaik. Terdapat dua wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang memiliki kecenderungan meningkat dalam lima tahun terakhir. Kedua wilayah tersebut adalah Kabupaten Malinau dan Tana Tidung. Kota Tarakan sendiri merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di provinsi ini, sementara itu Kabupaten Tana Tidung merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin terendah di provinsi ini. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kota Tarakan tercatat sebanyak 17,33 ribu jiwa, dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga jumlahnya menjadi 15,32 ribu jiwa. Selanjutnya, urutan kedua wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di provinsi ini tercatat di Kabupaten

Bulungan dengan jumlah 13,08 ribu jiwa di tahun 2020 dan menunjukkan kecenderungan membaik menjadi 11,95 ribu jiwa di tahun 2024. Sementara itu, Kabupaten Tana Tidung sebagai wilayah dengan jumlah penduduk miskin terendah di kabupaten ini, memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 1,46 ribu jiwa dan berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat menjadi sebanyak 1,50 ribu jiwa di tahun 2024.

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, capaian indikator persentase penduduk miskin di lima kabupaten/kota tidak seluruhnya menunjukkan kecenderungan membaik, terdapat Kabupaten yang persentase penduduk miskinnya cenderung meningkat yaitu Kabupaten Malinau dan Nunukan. Sampai dengan tahun 2024, Kabupaten Tana Tidung merupakan wilayah dengan capaian indikator persentase penduduk miskin terendah di provinsi ini, yakni dengan capaian sebesar 4,47 persen, sementara capaian persentase penduduk miskin tertinggi tercatat di Kabupaten Bulungan dengan besaran 8,76 persen.

5. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro daerah yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus. Indikator yang digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah ini diukur secara periodik dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan maksud agar stabilitas harga sebagai cermin dari stabilitas ekonomi dapat dipantau secara terus menerus. Inflasi dapat mengindikasikan ketidakseimbangan perekonomian di suatu wilayah. Inflasi dapat memberikan dampak buruk dalam hal pemerataan kesejahteraan dan pendapatan. Inflasi yang tinggi akan memberikan dampak yang negatif kepada masyarakat, di mana akan mengakibatkan pada menurunnya daya beli masyarakat karena terus meningkatnya harga barang/jasa, serta menurunnya nilai mata uang. Dampak dari tingginya tingkat inflasi akan sangat dirasakan oleh masyarakat dengan pendapatan tetap, terutama bagi yang berpendapatan menengah ke bawah. Menurunnya daya beli masyarakat berakibat pada semakin menurunnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang kemudian akan berimbas pada meningkatnya tingkat kemiskinan di daerah.

Tabel 2.43
Perbandingan Laju Inflasi Kota Tarakan, Kota Tanjung Selor, Gabungan Kota Tarakan dan Tanjung Selor, serta Nasional Tahun 2020-2024

No	Kota Inflasi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Tarakan	1,15	2,83	3,93	2,46	1,60
2	Tanjung Selor	1,96	2,33	7,98	2,38	0,40
3	Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

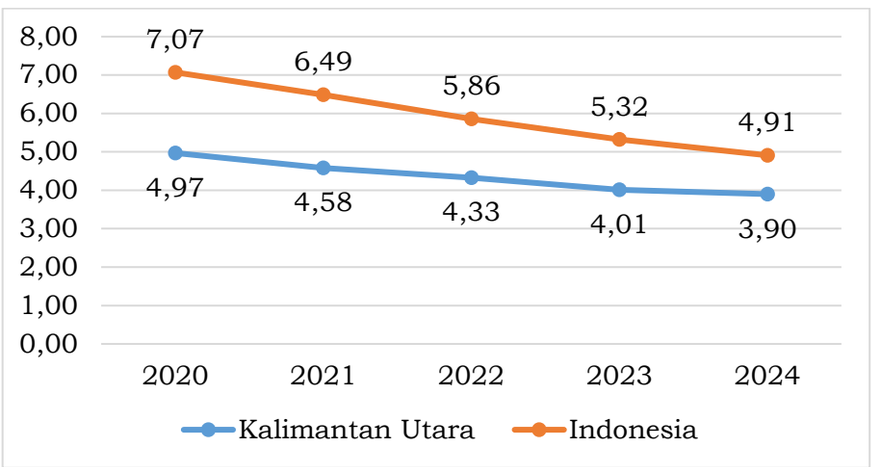
Tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Utara merupakan agregat dari inflasi Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor. Secara umum, dalam lima tahun terakhir, capaian inflasi di Kota Tarakan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan membaik. Pada tahun 2020, laju inflasi di kota ini tercatat sebesar 1,15 persen dan berfluktuatif sampai dengan tahun 2024 menjadi 1,60 persen. Sementara itu, inflasi di Kota Tanjung Selor pada tahun 2020 tercatat sebesar 1,96 persen. Capaian indikator di kota tersebut menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kondisi inflasi tertinggi (memburuk) di tahun 2022 yang mencapai 7,98. Namun pada tahun-tahun berikutnya terkendali, dan tahun 2024 inflasi di Tanjung Sekor mencapai 0,40 persen.

Pada dua tahun terakhir, capaian inflasi di Provinsi Kalimantan Utara tercatat lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional yang tercatat sebesar 1,57 persen. Secara garis besar, capaian inflasi di provinsi ini menunjukkan capaian yang baik, karena mampu mempertahankan capaian di bawah tiga persen sebagai ambang batas normal bagi suatu daerah.

6. Tingkat Pengangguran Terbuka

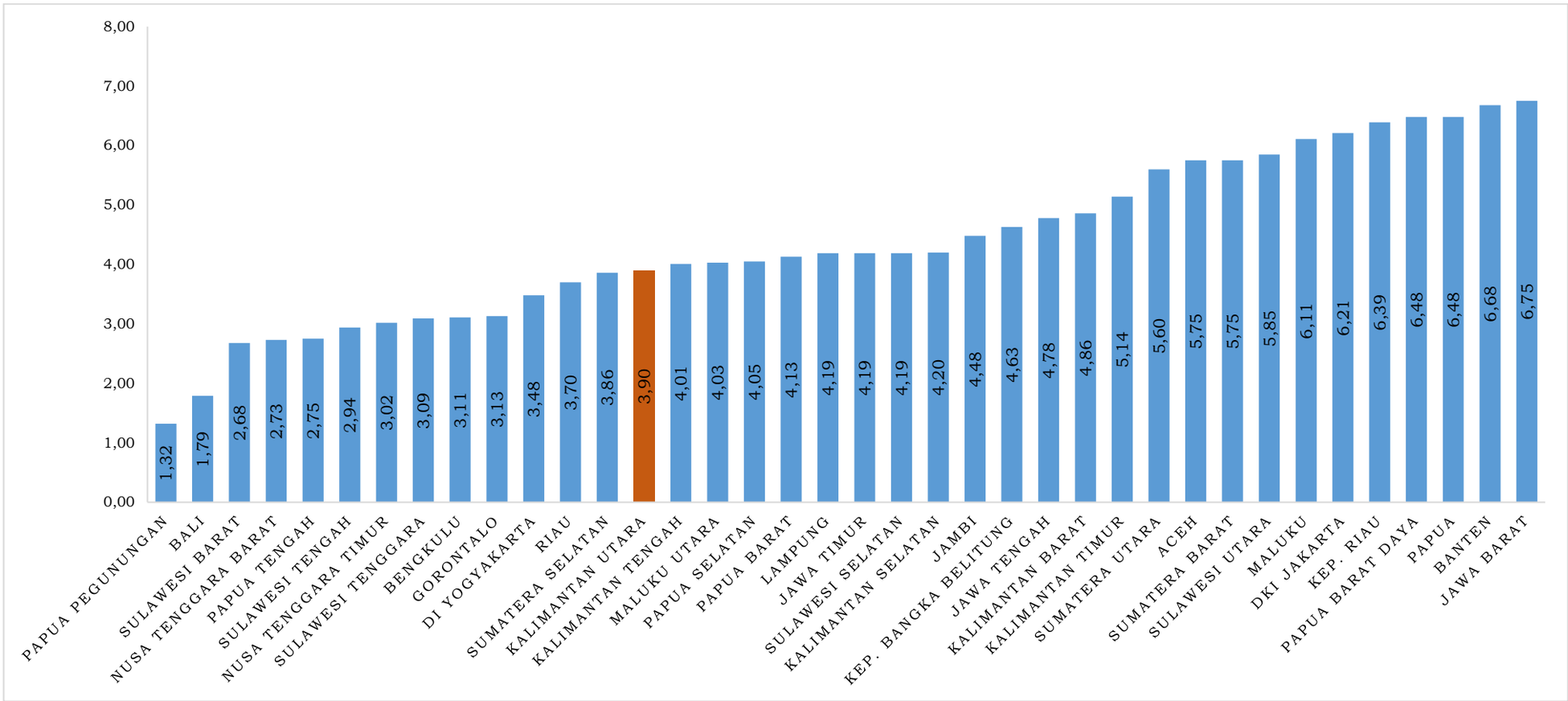
Pembangunan ekonomi ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sisi ekonomi maupun sisi sosial. Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri yaitu menciptakan kesempatan dan lapangan kerja semaksimal mungkin agar angkatan kerja yang ada dapat terserap dalam proses kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Namun hingga saat ini, proses tersebut belum berjalan dengan baik, sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya permasalahan pengangguran. Pengangguran didefiniskan sebagai seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang

diinginkan. Banyaknya pengangguran di suatu wilayah merupakan masalah yang tidak hanya mencakup bidang perekonomian saja, di mana pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi, misalnya bidang sosial dan pendidikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan angka pengangguran, karena indikator tersebut merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT adalah persentase jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja.



Gambar 2.18.
Grafik Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024, capaian TPT Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik. Hal tersebut terlihat dari rata-rata pertumbuhan capaian TPT yang bertumbuh negatif. Pada tahun 2020, capaian TPT di provinsi ini tercatat sebesar 4,97 persen dan menurun sampai dengan tahun 2024 hingga besarannya menjadi 3,90 persen.



Gambar 2.19.
Posisi Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Selanjutnya, dalam rentang waktu yang sama, capaian TPT di Provinsi Kalimantan Utara tercatat lebih baik apabila dibandingkan dengan capaian nasional. Capaian TPT nasional sendiri tercatat sebesar 7,07 persen di tahun 2020 dan menurun hingga tahun 2024 menjadi sebesar 4,91 persen di tahun 2024. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan 37 provinsi lainnya di Indonesia, capaian TPT Provinsi Kalimantan Utara tercatat berada pada urutan ke-14, namun menempati urutan pertama terbaik apabila dibandingkan dengan empat provinsi lain di Pulau Kalimantan.

Tabel 2.44
Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

No	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
1	Malinau	5,08	4,14	3,30	3,19	3,1
2	Bulungan	4,45	4,54	5,03	4,54	4,33
3	Tana Tidung	4,83	5,26	3,33	3,24	3,67
4	Nunukan	4,14	4,24	2,74	2,69	2,71
5	Kota Tarakan	5,86	4,94	5,76	5,25	5,11
	KALTARA	4,97	4,58	4,33	4,01	3,90

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Dalam rentang 5 (lima) tahun terakhir, capaian TPT di kabupaten/kota lingkup Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kondisi yang relatif membaik, walaupun pada tahun 2024 terdapat peningkatan TPT di KTT dan Nuukan. Sampai dengan tahun 2024, Kabupaten Nunukan merupakan wilayah dengan capaian TPT paling rendah, yakni sebesar 2,71 persen, walaupun sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 2,69. Sementara itu, wilayah dengan capaian TPT tertinggi tahun 2024 tercatat di Kota Tarakan, yakni dengan capaian 5,11 persen. Walau demikian, capaian tersebut lebih baik bila dibandingkan dengan TPT tahun sebelumnya.

7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah salah satu indikator penting untuk mengukur keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi selain angka partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang seberapa besar potensi penduduk yang bekerja, di mana potensi penduduk untuk bekerja akan tinggi jika jumlah angkatan kerja yang ada juga tinggi. Indikator ini mencerminkan persentase dari keseluruhan penduduk usia

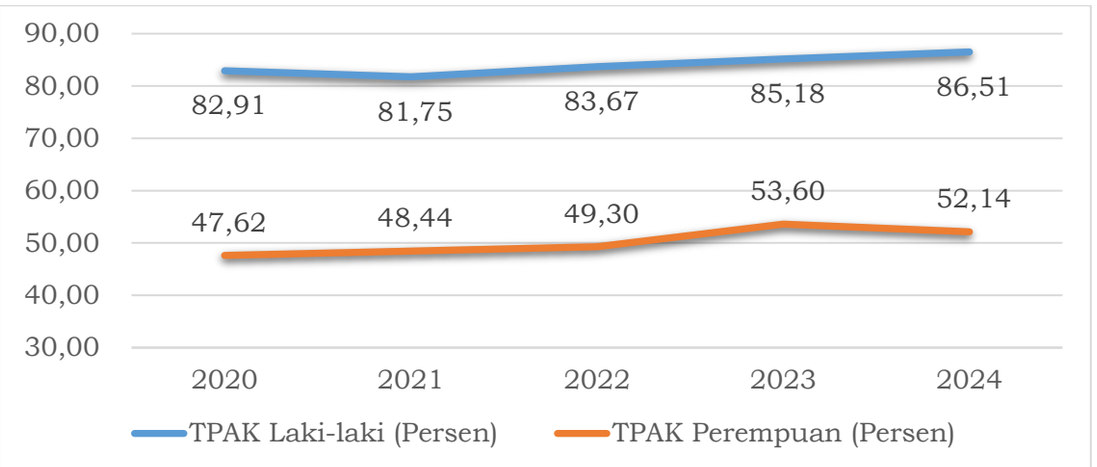
kerja (biasanya diukur untuk kelompok usia 15 hingga 64 tahun) yang aktif dalam pasar kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi biasanya dianggap sebagai indikator positif karena menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi dalam kegiatan ekonomi.

Tabel 2.45
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

No	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
1	Malinau	66,44	71,49	73,55	74,26	73,23
2	Bulungan	67,38	68,62	64,24	71,86	71,89
3	Tana Tidung	67,81	67,35	74,49	75,88	74,01
4	Nunukan	66,91	66,11	69,10	71,93	75,53
5	Kota Tarakan	65,65	63,34	65,49	66,14	63,64
	Provinsi Kalimantan Utara	66,51	66,24	67,62	70,35	70,35

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2025

Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024, TPAK di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, TPAK provinsi ini tercatat sebesar 66,51 persen dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarannya meningkat menjadi 70,35 persen. Selanjutnya, berdasarkan capaian TPAK di lima kabupaten/kota, dalam kurun waktu yang sama Kabupaten Malinau, Tana Tidung dan Tarakan menunjukkan capaian yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sementara itu wilayah lainnya menunjukkan kecenderungan meningkat yang ditandai dengan besaran rata-rata pertumbuhan yang bertumbuh positif.



Gambar 2.20.
Grafik Perbandingan TPAK Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

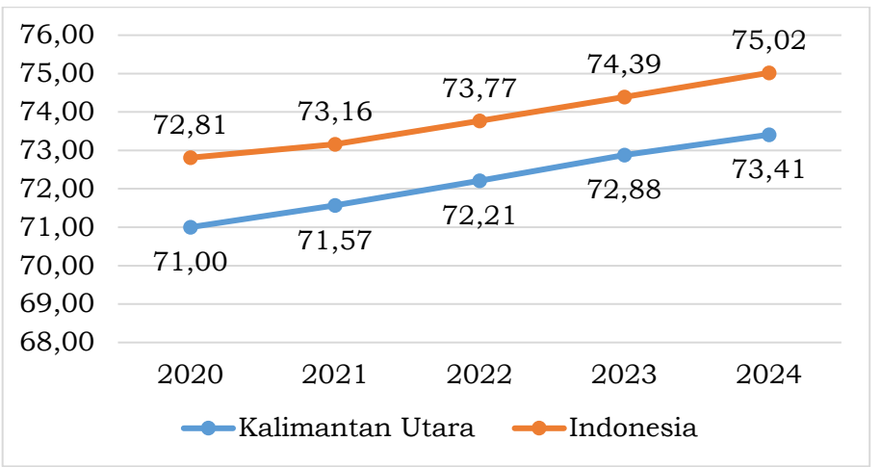
Sampai dengan tahun 2024, capaian TPAK tertinggi tercatat di Kabupaten Nunukan sebesar 75,53 perse, disusul oleh Kabupaten Tana Tidung sebesar 74,01. Sementara itu, capaian TPAK terendah di provinsi ini tercatat di Kota Tarakan sebesar 63,64 persen.

Selanjutnya, terdapat beberapa hal yang berpengaruh pada capaian tingkat partisipasi angkatan kerja, salah satunya adalah jenis kelamin, di mana perempuan lebih diutamakan untuk mengurus rumah tangga, sehingga tingkat pasrtisipasi kerja pada perempuan lebih rendah daripada laki-laki. TPAK perempuan tercatat selalu lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki, di mana perberdaan tersebut terlihat sangat jauh dan tidak pernah mengerucut. Pada tahun 2020, TPAK laki-laki tercatat sebesar 81,75 persen, sementara TPAK perempuan tercatat sebesar 48,44 persen. Capaian tersebut terus menunjukkan kecenderungan meningkat sampai dengan tahun 2024. Meskipun rata-rata pertumbuhan pada TPAK perempuan (1,63 persen per tahun) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan pada TPAK laki-laki (0,81 persen per tahun), namun sampai dengan tahun 2024, capaian TPAK laki-laki masih berada jauh di atas TPAK perempuan, di mana capaian TPAK laki-laki tercatat sebesar 86,51 persen, sementara TPAK perempuan tercatat sebesar 52,14 persen.

Tingginya capaian TPAK laki-laki tersebut diduga erat kaitannya dengan stigma yang menganggap bahwa laki-laki merupakan tulang punggung keluarga atau pencari nafkah utama, sehingga sebagian besar akan masuk ke dalam angkatan kerja. Sementara di sisi lainnya, masih terdapat budaya yang menganggap perempuan lebih bertanggungjawab untuk mengurus kegiatan rumah tangga. Stigma tersebut sudah saatnya untuk dikesampingkan, karena masuknya perempuan dalam angkatan kerja merupakan salah satu sumber daya yang dapat menjadi penggerak dan pendorong pembangunan di suatu wilayah. Hal tersebut berkaitan dengan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu untuk mencapai kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak.

8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan jangka menengah hingga panjang. Indikator tersebut mampu menggambarkan keberhasilan pembangunan dari sisi sosial dan kesejahteraan manusia, dimana tingkat pembangunan manusia yang tinggi berkorelasi dengan meningkatnya kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, yang diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara ke arah yang lebih baik. Pencapaian pembangunan manusia ini diukur melalui tiga dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

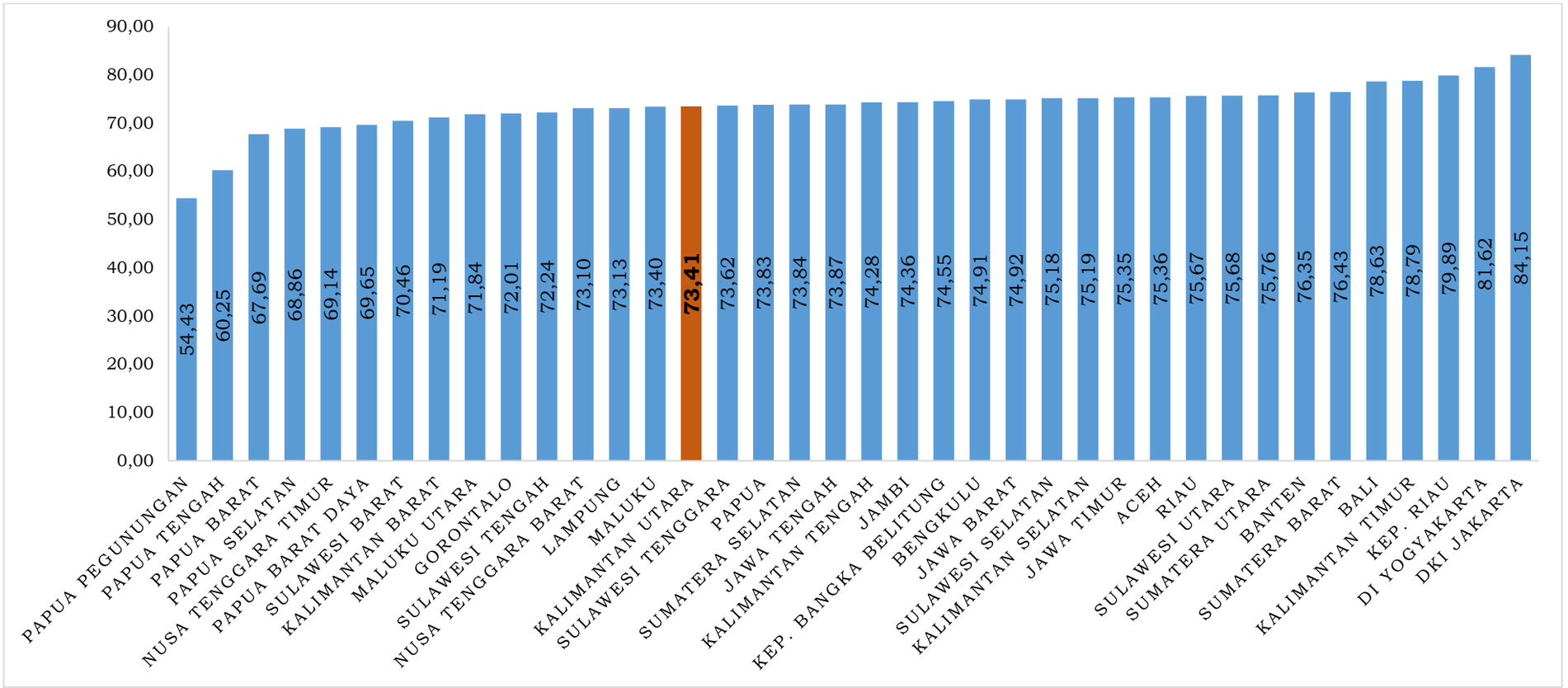


Gambar 2.21.
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Pembangunan manusia menurut standar United Natios Development Program (UNDP) terdiri dari empat kriteria, yakni Sangat Tinggi (IPM ≥ 80), Tinggi (70 ≤ IPM ≥ 80), Sedang (60 ≤ IPM ≥ 70), dan Rendah (IPM ≤ 60). Secara umum, dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024, capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 71,00 dan bertumbuh menjadi 73,41 di tahun 2024, di mana capaian tersebut telah mencapai kriteria tinggi.

Dalam rentang waktu yang sama, capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara memiliki pola perkembangan yang hampir sama dengan capaian nasional. Meskipun demikian, capaian provinsi ini masih berada di bawah capaian nasional, di mana capaian IPM Nasional

tercatat sebesar 72,81 di tahun 2020 dan bertumbuh menjadi 75,02 di tahun 2024. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan 37 provinsi lain di Indonesia, capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara menempati urutan ke-24. Sementara itu, jika dibandingkan dengan empat provinsi lain di Pulau Kalimantan, provinsi ini menempati urutan keempat setelah Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 78,79, Kalimantan Selatan dengan capaian sebesar 75,19 dan Kalimantan Tengah dengan capaian 74,28. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus terus bekerja keras untuk mengupayakan peningkatan capaian IPM di provinsi ini, misalnya dengan mengoptimalkan program perlindungan sosial yang diantaranya meliputi kegiatan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.



Gambar 2.22.
Posisi Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, komponen-komponen pembentuk IPM di Provinsi Kalimantan Utara yang meliputi komponen dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik. Dalam rentang waktu tersebut, dimensi umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan oleh indikator angka usia harapan hidup menunjukkan besaran yang semakin meningkat. Pada tahun 2020, capaian angka usia harapan hidup di provinsi ini tercatat sebesar 73,42 tahun dan meningkat menjadi 73,57 tahun pada tahun 2024. Capaian tersebut telah melampaui capaian nasional yang tercatat sebesar 72,39 tahun di tahun 2024.

Dalam rentang waktu yang sama, dimensi pengetahuan yang direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah menunjukkan kecenderungan meningkat. Capaian indikator harapan lama sekolah di Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 12,93 tahun di tahun 2020 dan meningkat menjai 13,21 tahun di tahun 2024. Dari dimensi pengetahuan tersebut, pada tahun 2024 anak-anak berusia tujuh tahun di provinsi ini memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,21 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setara dengan jenjang Diploma I. Sama halnya dengan indikator angka usia harapan hidup, indikator harapan lama sekolah di provinsi ini telah mampu menyamai capaian nasional yang tercatat sebesar 13,21 tahun pada tahun 2024, sekaligus menempati urutan kedua apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan setelah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki capaian sebesar 14,03 tahun yang mengindikasikan bahwa anak-anak di provinsi tersebut memiliki harapan dapat menikmati pendidikan yang setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setara dengan jenjang Diploma II.

Selanjutnya, pada tahun 2020, indikator rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 9,00 tahun dan meningkat sampai dengan tahun 2024 hingga capaiannya menjadi 9,35 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di provinsi ini mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas sembilan atau setara dengan kelas tiga pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hingga tahun 2024, capaian indikator rata-rata lama sekolah di

provinsi ini telah mampu melampaui capaian nasional yang tercatat sebesar 8,85 tahun. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan empat provinsi lain di Pulau Kalimantan, maka capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara berada pada urutan kedua setelah Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat sebesar 10,02 tahun, yang mana capaian tersebut mengindikasikan bahwa penduduk usia 25 tahun di provinsi tersebut telah mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas sepuluh atau setara dengan kelas satu pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan dengan indikator pengeluaran per kapita di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan besaran pertumbuhan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dua dimensi lainnya. Pada tahun 2020, besaran pengeluaran per kapita di provinsi ini tercatat sebesar 8.756 ribu rupiah per orang per tahun dan bertumbuh menjadi 10.197 ribu rupiah per orang per tahun pada tahun 2024. Besaran indikator pengeluaran per kapita di provinsi ini tercatat berada di bawah capaian nasional yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 12.341 ribu rupiah per orang per tahun, sekaligus berada pada urutan paling akhir atau kelima apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan.

Tabel 2.46
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2020-2024

No	Komponen	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,42	73,49	73,51	73,54	73,57
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,93	12,94	13,06	13,20	13,21
3	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,00	9,11	9,27	9,34	9,35
4	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/ Orang/Tahun	8.756	9.075	9.350	9.734	10.197
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	**Indeks**	**71,00**	**71,57**	**72,21**	**72,88**	**73,41**

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Selanjutnya, capaian IPM di lima kabupaten/kota menunjukkan kecenderungan membaik dalam lima tahun terakhir, meskipun demikian masih terdapat dua wilayah dengan capaian IPM pada kriteria sedang, yakni Kabupaten Tana Tidung yang tercatat memiliki capaian sebesar 70,95 dan Kabupaten Nunukan dengan capaian sebesar 69,27.

Sementara itu, dalam lima tahun terakhir, tiga wilayah lainnya telah mampu mencapai kriteria IPM tinggi, sekaligus memiliki capaian yang telah melampaui capaian IPM provinsi. Kota Tarakan merupakan wilayah dengan capaian IPM tertinggi di provinsi ini dengan capaian 78,03, dan diikuti oleh Kabupaten Malinau (74,72) dan Bulungan (73,83).

Tabel 2.47
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

No	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)**					
	Malinau	73,17	73,22	73,23	73,25	73,27
	Bulungan	73,68	73,78	73,8	73,83	73,87
	Tana Tidung	73,33	73,42	73,44	73,47	73,51
	Nunukan	73	73,08	73,09	73,11	73,13
	Kota Tarakan	74,1	74,18	74,21	74,24	74,27
2	**Harapan Lama Sekolah (Tahun)**					
	Malinau	13,30	13,31	13,33	13,34	13,35
	Bulungan	13,00	13,01	13,03	13,04	13,25
	Tana Tidung	12,21	12,22	12,38	12,39	12,61
	Nunukan	12,64	12,65	12,67	12,68	12,69
	Kota Tarakan	14,02	14,03	14,04	14,21	14,22
3	**Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)**					
	Malinau	9,39	9,40	9,41	9,43	9,63
	Bulungan	8,94	9,19	9,20	9,21	9,23
	Tana Tidung	8,54	8,80	8,97	9,04	9,24
	Nunukan	8,00	8,17	8,24	8,26	8,39
	Kota Tarakan	9,97	9,98	10,08	10,36	10,37
4	**Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/orang/tahun)**					
	Malinau	9.611	9.928	10.304	10.708	11.190
	Bulungan	9.121	9.423	9.641	10.205	10.581
	Tana Tidung	7.381	7.676	8.012	8.386	8.707
	Nunukan	6.804	7.064	7.446	7.787	8.265
	Kota Tarakan	10.894	11.261	11.596	11.992	12.451
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
	Malinau	72,73	73,12	73,55	74,00	74,72
	Bulungan	71,56	72,27	72,56	73,20	73,83
	Tana Tidung	67,79	68,59	69,45	70,06	70,95
	Nunukan	66,50	67,18	67,88	68,43	69,27
	Kota Tarakan	75,89	76,30	76,75	77,61	78,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Berdasarkan komponennya, baik angka usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata- rata lama sekolah, maupun pengeluaran per kapita disesuaikan di kelima kabupaten/kota menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Hal tersebut ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan di masing-masing komponen yang bertumbuh positif. Secara umum, Kota Tarakan merupakan wilayah dengan capaian tertinggi di provinsi ini pada pencapaian empat komponen pembentuk IPM. Pertama, Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan merupakan dua wilayah dengan angka usia harapan hidup tertinggi di provinsi ini, di mana masing-masing memiliki capaian sebesar 74,11 tahun dan 72,81 tahun. Sementara tiga

wilayah lainnya memiliki besaran angka usia harapan hidup pada kisaran usia 71 tahun.

Selanjutnya, pada dimensi pengetahuan, Kota Tarakan memiliki capaian indikator harapan lama sekolah sebesar 14,22 tahun, di mana pada tahun 2024 anak-anak berusia tujuh tahun di wilayah ini memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 14,22 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setara dengan jenjang Diploma II. Sementara itu, anak-anak berusia tujuh tahun di Kabupaten Malinau dan Bulungan memiliki harapan dapat menikmati pendidikan yang hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setara dengan jenjang Diploma I. Selain itu, anak-anak berusia tujuh tahun di Kabupaten Nunukan dan Tana Tidung memiliki harapan dapat menikmati pendidikan yang hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setara dengan kelas tiga pada jenjang Sekolah Menengah Atas.

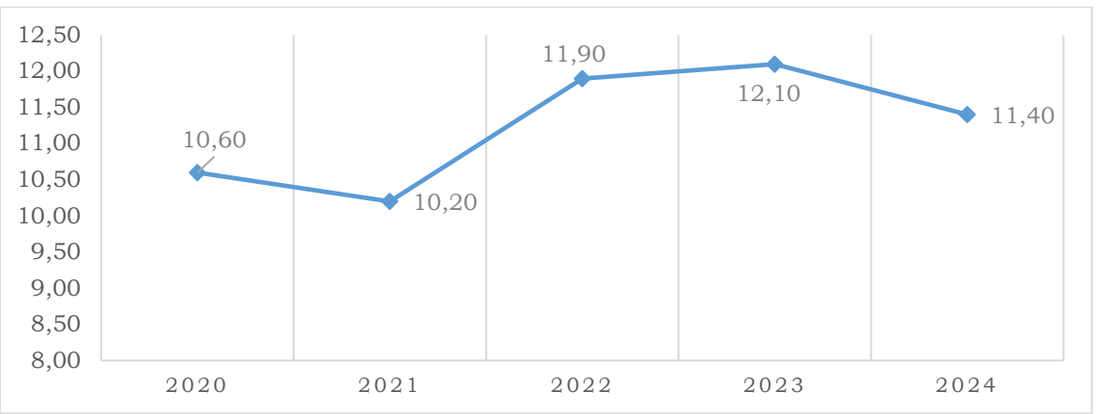
Di tahun yang sama, capaian indikator rata-rata lama sekolah di Kota Tarakan tercatat sebesar 10,37 tahun, di mana hal tersebut mengindikasikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di wilayah ini telah mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas sepuluh atau setara dengan kelas satu pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Malinau, Bulungan, dan Tana Tidung mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas sembilan atau setara dengan kelas tiga pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selanjutnya, capaian terendah pada indikator ini tercatat di Kabupaten Nunukan dengan capaian sebesar 8,39 tahun, di mana hal tersebut mengindikasikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di kabupaten ini mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas delapan atau setara dengan kelas dua pada jenjang SMP.

Terakhir, terdapat tiga wilayah dengan capaian indikator pengeluaran per kapita yang tercatat telah mampu melampaui capaian Provinsi Kalimantan Utara. Ketiga wilayah tersebut adalah Kota Tarakan dengan besaran pengeluaran per kapita sebesar 12.451 ribu rupiah per orang per tahun, yang diikuti oleh Kabupaten Malinau (11.190 ribu rupiah per orang per tahun) dan Bulungan (10.581 ribu rupiah per orang per tahun). Sementara itu, Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan tercatat memiliki besaran pengeluaran per kapita masing-masing sebesar 8.707 ribu rupiah per orang per tahun dan 8.265 ribu rupiah per orang per tahun.

2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Keluarga Sehat

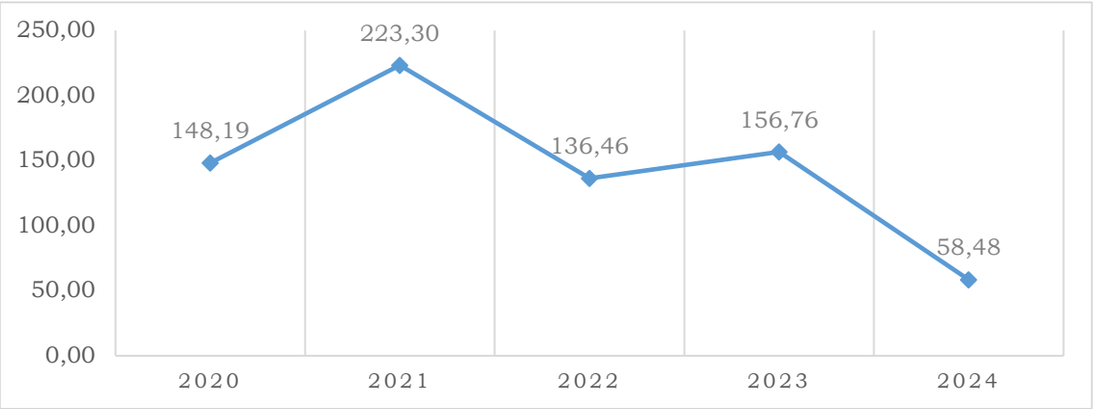
Indeks keluarga sehat merupakan bentuk dari program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga. Menurut Permenkes No 39 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga, dalam program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga terdapat 4 area prioritas yang meliputi penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan prevalensi stunting, penanggulangan penyakit menular, dan penanggulangan penyakit tidak menular. Selain empat area prioritas, terdapat 12 indikator yang digunakan sebagai penanda status keluarga sehat yaitu keluarga mengikuti program keluarga berencana (KB), ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif, penderita TB paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga tidak merokok, keluarga sudah menjadi anggota jaminan kesehatan nasional (JKN), keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.



Gambar 2.23.
Angka Kematian Bayi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2024 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

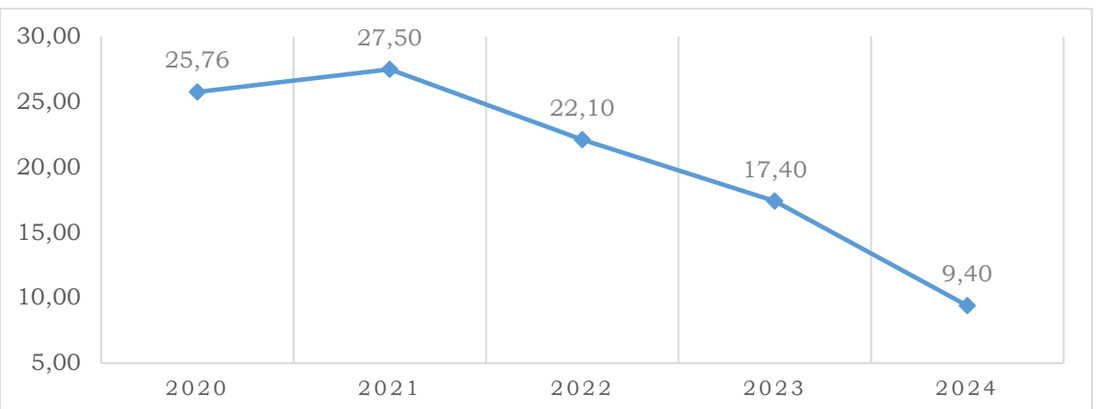
Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2024-2023. Pada tahun 2020 nilai AKB sebesar 10,60 kematian per 1.000 kelahiran hidup menurun pada tahun 2021. Lalu, Kembali meningkat pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 11,9 dan 12,10 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Namun

menurun Kembali di Tahun 2024 menjadi 11,40 kematian per 1.000 kelahiran hidup.



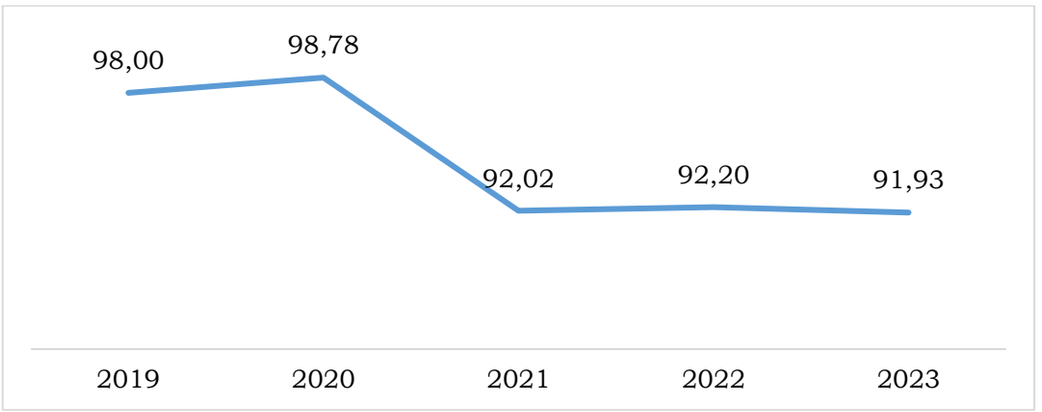
Gambar 2.24.
Angka Kematian Ibu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Utara, Tahun 2024 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

AKI mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024 dengan kecenderungan menurun. Nilai AKI tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan nilai 223,3 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Nilai tersebut turun pada tahun 2022 dan naik kembali pada tahun 2023 menjadi 156,76 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dan menurun kembali di Tahun 2024 menjadi 58,48 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup



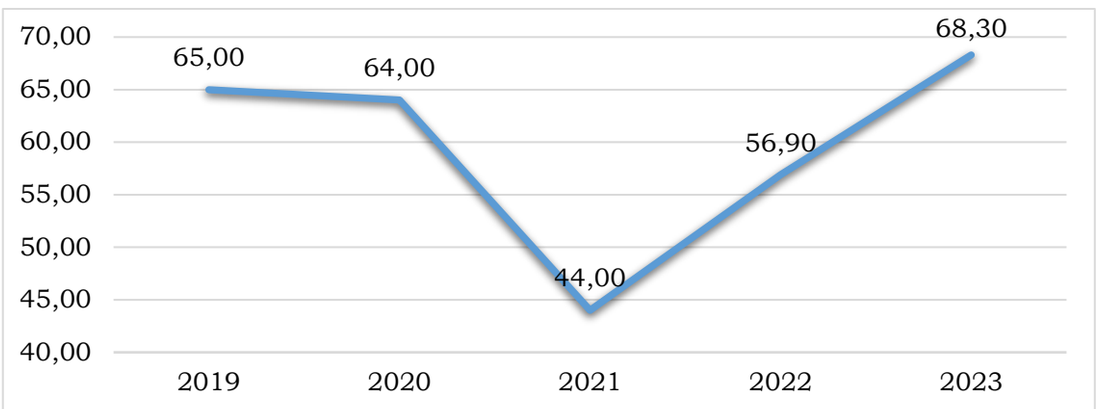
Gambar 2.25.
Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024
Sumber: Rancangan RPJPD Kalimantan Utara 2025-2045 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Tingkat prevalensi stunting mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dari tahun 2020-2024. Prevalensi stunting paling tinggi berada pada tahun 2021 dengan besaran 27,5%. Nilai tersebut turun menjadi 9,40 % pada tahun 2024.



Gambar 2.26.
Cakupan Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2024

Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dari tahun 2019-2023. Tahun 2019-2020 mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2020 cakupan pertolongan sebesar 98,78% turun menjadi 92,02% pada tahun 2021. Berikutnya tahun 2022, terjadi sedikit kenaikan menjadi 92,2% dan pada tahun 2023 turun menjadi 91,93%.



Gambar 2.27.
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA 2019-2023
Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Utara, Tahun 2024

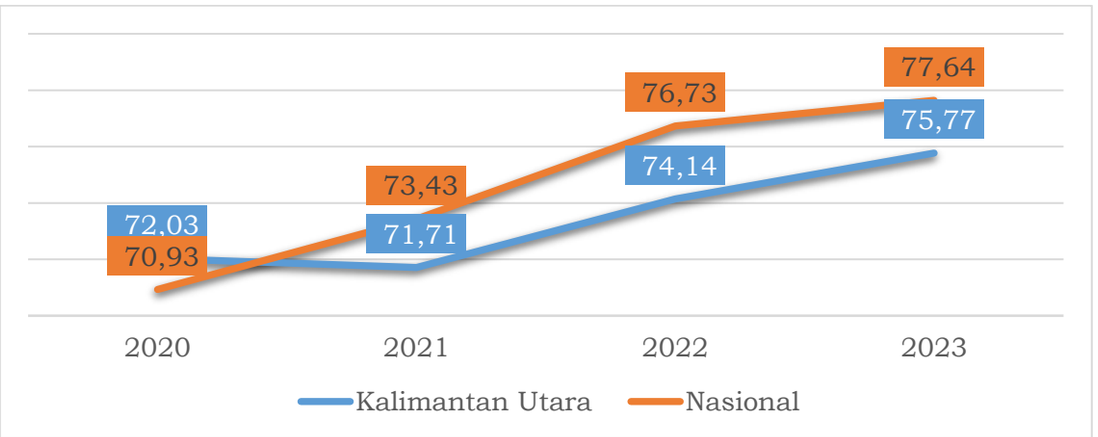
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2019-2023. Penurunan pada tahun 2021 terjadi karena adanya COVID sehingga penelusuran TB terhambat. Berikutnya, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB mengalami peningkatan sampai tahun 2023 dengan nilai 68,3%.

2. Indeks Kualitas Keluarga

Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan YME (UU No 52 Tahun 2009). Kualitas keluarga merupakan agregat dari ketahanan keluarga, perlindungan anak, kesetaraan, dan keadilan gender serta partisipasi keluarga dalam masyarakat. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dihitung berdasarkan 5 dimensi dan 25 indikator. Kelima dimensi tersebut adalah dimensi Kualitas Legalitas Struktur (KLS), dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF), Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE), kualitas Ketahanan Sosial Psikologi (KKSP), dan Kualitas Ketahanan Sosial Budaya (KKSB). Adapun berdasarkan peraturan yang baru maka ditetapkan IKK terdiri dari 5 dimensi yang masih sama dengan sebelumnya dan tersusun dari 29 indikator.

Rentang nilai IKK berada antara 0-100 dengan kategori:

a. IKK yang “kurang responsif gender dan hak anak” apabila bernilai kurang dari 50
b. IKK yang “cukup responsif gender dan hak anak” apabila bernilai di antara 50-75; dan
c. IKK yang “responsif gender dan hak anak” apabila bernilai di atas 75.



Gambar 2.28.
Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2020-2023
Sumber: Rancangan RPJPD Kalimantan Utara 2025-2045 dan Buku Indeks Kualitas Keluarga 2024

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa, nilai IKK baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru di Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan sebesar 1,91 poin untuk metadata lama (dari 74,03 persen di tahun 2022 menjadi 75,94 persen di tahun 2023) dan peningkatan sebesar 1,63 poin untuk metadata baru (dari 74,14 persen di tahun 2022 menjadi 75,77 persen di tahun 2023). Pada tahun 2023, baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru diperoleh nilai IKK Provinsi Kalimantan Utara lebih rendah jika dibandingkan nilai IKK nasional. Berdasarkan Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2022, nilai IKK Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 menunjukkan kualitas keluarga pada kategori 'Responsif Gender dan Hak Anak'.

Dimensi penyusunan IKK terdiri dari 5 (lima) dimensi. Pada tahun 2023, dari lima dimensi penyusun IKK, baik menggunakan metadata lama maupun metadata baru, empat dimensi mengalami peningkatan nilai jika dibandingkan tahun 2022, sedangkan satu dimensi mengalami penurunan nilai jika dibandingkan tahun 2022. Nilai dimensi pada metadata lama maupun metadata baru yang mengalami peningkatan tertinggi adalah dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF) dimana menggunakan metadata lama mengalami peningkatan sebesar 3,96 poin (dari 75,71 persen di tahun 2022 menjadi 79,67 persen di tahun 2023). Sedangkan pada metadata baru mengalami peningkatan sebesar 4,16 poin (dari 75,04 persen di tahun 2022 menjadi 79,20 persen di tahun 2023).

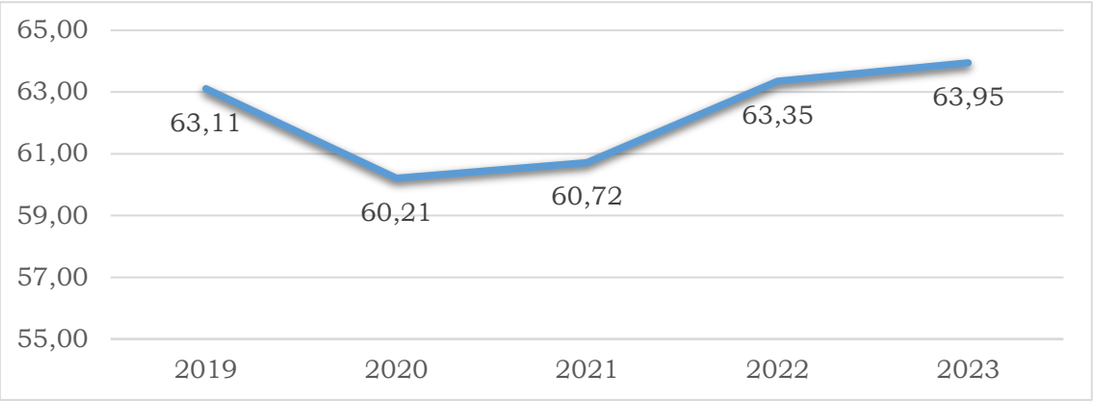
Tabel 2.48
Dimensi Penyusun Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Utara 2020-2023

No	Dimensi	2020	2021	2022	2023
1.	Kualitas Legalitas Struktur	85,26	81,96	89,73	90,55
2.	Kualitas Ketahanan Fisik	70,88	80,07	75,04	79,20
3.	Kualitas Ketahanan Ekonomi	76,16	73,65	74,83	77,52
4.	Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi	61,35	58,55	66,30	64,52
5.	Kualitas Ketahanan Sosial Budaya	59,22	48,22	51,96	52,39
6.	Indeks Kualitas Keluarga	72,03	71,71	74,14	75,77

Sumber: Laporan Indeks Kualitas Keluarga 2020-2024

3. Indeks Perlindungan Anak

Indeks perlindungan anak dapat didefinisikan sebagai indikator yang digunakan untuk mengukut capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, indeks perlindungan anak ini disusun berdasarkan komitmen konvensi hak-hak anak yang dapat dijadikan landasan dalam membuat kebijakan yang efektif dan efisien dalam rangka untuk menanganai permasalahan mengenei perlindungan anak, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak. Indeks perlindungan anak disusun berdasarkan lima kluster diantaranya adalah kluster 1 mengenai hak sipil dan kebebasan, kluster 2 mengenai lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster 3 mengenai kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan kluster 4 mengenai pendidikan, pemanfaatatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

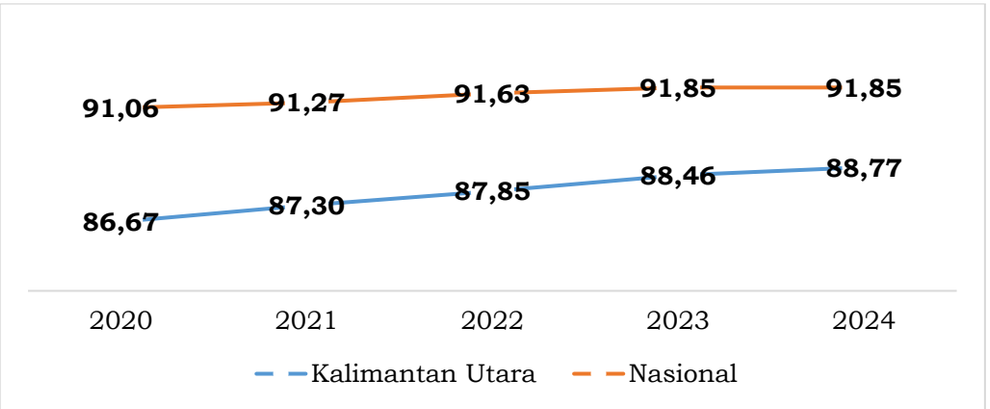


Gambar 2.29.
Indeks Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2019-2023
Sumber: Rancangan RPJPD Kaltara, 2025-2045 dan Indeks Perlindungan Anak 2023

Grafik indeks perlindungan anak, menunjukkan tren fluaktuatif dengan kecenderungan meningkat, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 60,21 persen serta tahun 2021 mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan yaitu menjadi 60,72 persen. Sementara itu, pada tahun 2022 indeks perlindungan anak mengalami kenaikan menjadi 63,35 persen dan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 63,95 persen. Tren fluaktuatif ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti masih tingginya angka stunting, belum semua balita mendapat imunisasi dasar lengkap, belum optimalnya penggunaan waktu luang anak, masih adanya pernikahan dini, dan pengasuhan anak yang kurang optimal.

4. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

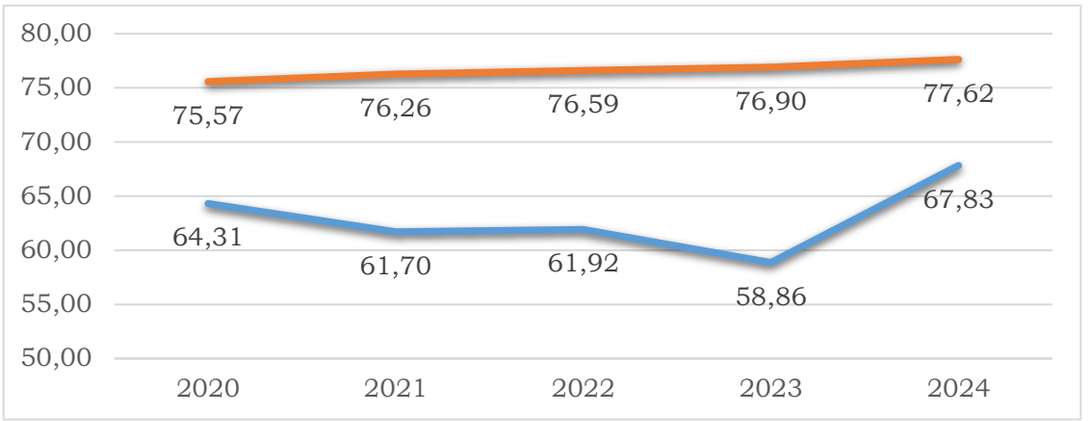
Indikator IPG digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia. IPG dapat diperoleh melalui perbandingan antara capaian IPM Perempuan dengan IPM laki-laki. Data IPG Kalimantan Utara pada periode tahun 2020-2024 konsistensi meningkat setiap tahun. Pada tahun 2020 IPG Kalimantan Utara sebesar 86,67 dan pada tahun 2024 berhasil mencapai 88,77. Peningkatan ini didukung capaian kinerja pembangunan lintas sektor seperti pendidikan dan kesehatan. Tren positif IPG berbanding lurus dengan perkembangan IPM Kalimantan Utara. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan IPG nasional, maka posisi IPG Kalimantan Utara selalu lebih rendah.



Gambar 2.30.
Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: BPS RI, 2025

5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

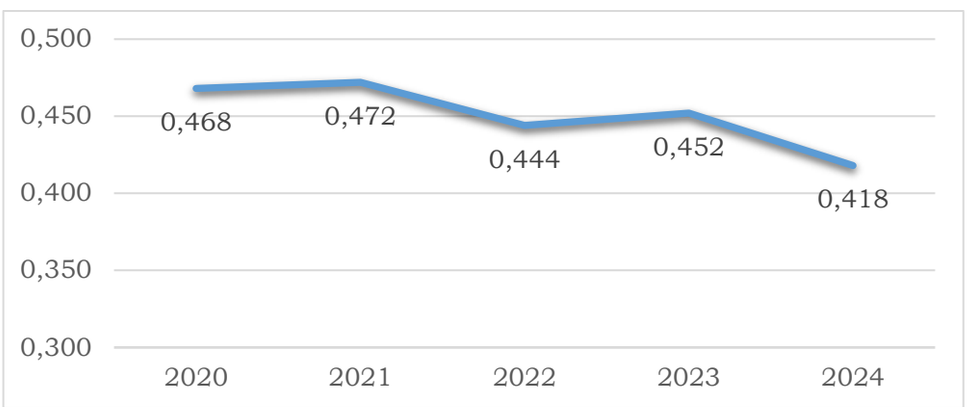
Indikator IDG digunakan untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehiduapan ekonomi dan politik serta menjadi bagian dalam pengambilan keputusan. Data IDG di Kalimantan Utara pada periode tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan tren yang fluaktiatif. Pada tahun 2020 yaitu sebesar 64,31 persen. Akan tetapi tahun 2021 menurun menjadi 61,7 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 61,92 persen. Namun, di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 58,86 persen dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 67,83 persen. Hal ini, dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti serta adanya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, posisi IDG Kalimantan Utara selalu berada di bawah IDG nasional.



Gambar 2.31.
Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: BPS RI, 2025

6. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks ketimpangan gender merupakan indikator yang digunakan untuk kesetaraan gender yang berpengaruh positif terhadap pembangunan. Ketimpangan gender di Provinsi Kalimantan Utara selama lima tahun terakhir masih mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Sejak tahun 2020 hingga 2024, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berkurang sebesar 0,050 poin, rata-rata turun 0,01 poin per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender semakin menyempit atau kesetaraan yang semakin membaik.

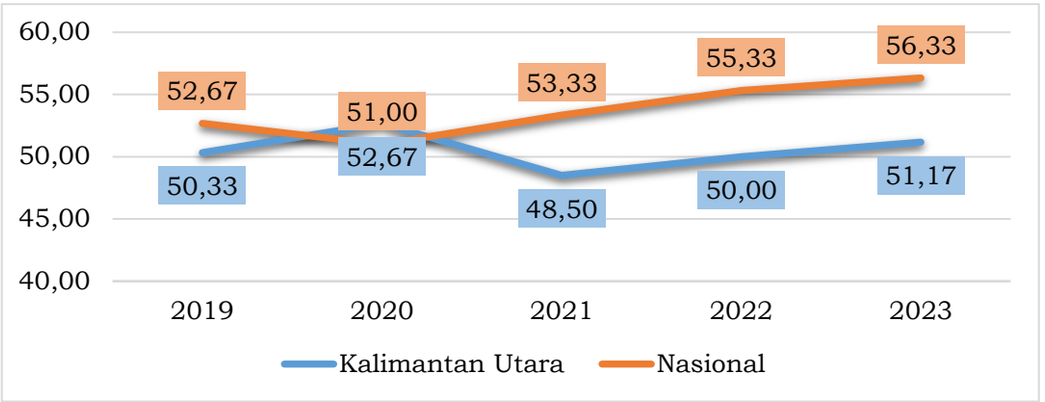


Gambar 2.32.
Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Provinsi Kaltara, 2025

7. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indeks yang digunakan untuk melihat Gambaran kemajuan pembangunan pemuda di suatu wilayah. Pembangunan yang diharapkan adalah berupa

kemampuan pengembangan hardskill, softskill, maupun kegiatan-kegiatan penyaluran minat dan bakat. Terdapat 5 domain dengan 15 indikator untuk mengukur IPP. Kelima domain tersebut yaitu domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, dan gender dan diskriminasi.



Gambar 2.33.
Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2019-2023
Sumber: Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia tahun 2019 sampai 2023

IPP Provinsi Kalimantan Utara berfluktuasi dengan kecenderungan menurun dari tahun 2019-2023. Hal ini berkebalikan dengan IPP nasional yang cenderung meningkat. Dari kelima domain yang ada, domain partisipasi dan kepemimpinan yang paling rendah kontribusinya dilanjut dengan lapangan dan kesempatan kerja. Indikator yang perlu diperhatikan adalah persentase pemuda wirausaha kerah putih yang rendah serta persentase remaja perempuan yang sedang hamil yang menunjukkan persentase cukup banyak.

Tabel 2.49
Domain dan Indikator Indeks Pembangunan Pemuda
Tahun 2019-2023

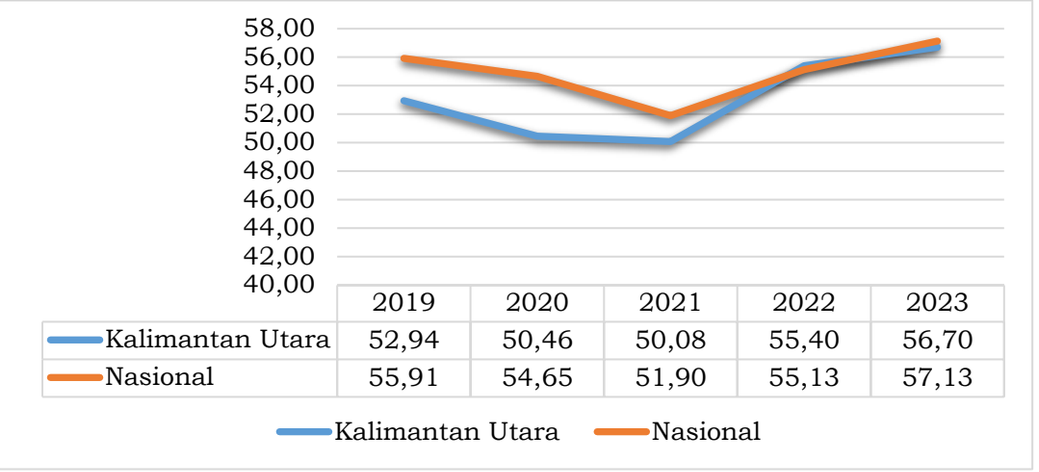
Domain dan Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Domain Pendidikan	70	70	70	70	70
Rata-rata lama sekolah pemuda	10,8	11,06	11,08	10,89	11,01
APK sekolah menengah	98,09	99,89	98,81	98,71	97,69
APK perguruan tinggi	23,43	22,71	25,23	25,66	27,07
Domain Kesehatan dan Kesejahteraan	55	65	52,5	55	57,50
Angka kesakitan pemuda	6,07	6,51	7,48	13,99	6,40
Persentase pemuda korban kejahatan	2,08	1,55	1,26	0,38	0,63
Persentase pemuda yang merokok	24,41	20,4	22,16	19,25	20,00

Domain dan Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	17,91	6,58	28,77	28,77	35,77
Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja	40	45	40	45	45
Persentase pemuda wirausaha kerah putih	0,07	0,33	0,36	0,36	0,21
Tingkat pengangguran terbuka pemuda	10,83	9,59	11,21	10,2	9,96
Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	40	40	30	30	26,67
Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	68,33	68,33	43,23	43,23	43,88
Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	4,63	4,63	3,28	3,28	3,78
Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	5,59	5,59	5,22	5,22	3,75
Domain Gender dan Diskriminasi	46,67	43,33	50	50	56,67
Angka perkawinan usia anak	12,94	12,7	10,16	10,16	8,01
Persentase pemuda perempuan berusia 16-24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas	38,94	39,56	40,46	40,46	47,98
Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	27,51	21,96	24,42	26,42	24,51
Indeks Pembangunan Pemuda	50,33	52,67	48,50	50,00	51,17

Sumber: https://ipp.sarikata.com , 2024

8. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) memberikan gambaran terkait capaian pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Terdapat 6 dimensi dalam pengukuran IPK yaitu dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender.



	2019	2020	2021	2022	2023
Kalimantan Utara	52,94	50,46	50,08	55,40	56,70
Nasional	55,91	54,65	51,90	55,13	57,13

Gambar 2.34.
Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2019-2023
Sumber: Rancangan RPJPD Kalimantan Utara 2025-2045

Nilai IPK Provinsi Kalimantan Utara mengalami fluktuasi pada periode tahun 2019-2023. Hal yang sama juga terlihat pada IPK nasional pada rentang tahun yang sama. Capaian IPK Provinsi Kalimantan Utara masih berada di bawah capaian IPK nasional kecuali pada tahun 2022.

2.1.3. Aspek Daya Saing

2.1.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan perekonomian wilayah secara makro dapat dilihat melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah satu indikator penting dalam analisis perkembangan wilayah, karena indikator ini digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha merupakan indikator yang menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah, dimana setiap kategori tersebut memiliki peran besar yang menunjukkan basis perekonomian di suatu wilayah.

Indikator distribusi PDRB dihitung dengan menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Harga berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan pada harga tahun yang sedang berjalan, sedangkan harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (2010). Kontribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah, yakni berupa sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, besaran PDRB ADHB maupun ADHK pada masing-masing lapangan usaha di Provinsi Kalimantan Utara memiliki besaran nilai dan kontribusi yang fluktuatif. Baik dilihat dari PDRB ADHB maupun ADHK, terdapat tiga sektor dengan rata- rata kontribusi terbesar di provinsi ini. Ketiga sektor tersebut adalah sektor pertambangan dan penggalian yang tercatat memiliki rata-rata kontribusi sebesar 26,82 persen; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan rata-rata kontribusi sebesar 17,56 persen; serta sektor konstruksi dengan rata-rata kontribusi sebesar 12,34 persen. Terhitung sejak tahun 2022, kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tercatat memiliki kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor konstruksi. Hal tersebut terlihat dari besaran pergeseran sektor konstruksi yang bernilai negatif atau menunjukkan kecenderungan menurun, dengan pergeseran sebesar -0,31 persen, sementara itu sektor perdagangan menunjukkan pergeseran yang positif hingga mencapai 1,32 persen. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian sebagai kontributor terbesar dalam struktur ekonomi provinsi ini juga menunjukkan pergeseran negatif, yakni mencapai -1,24 persen.

Tabel 2.50
Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Nilai dan Kontribusi PDRB Provinsi Kalimantan Utara ADHK									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.925,64	17,99	11.300,51	17,89	11.723,33	17,62	12.229,93	17,52	12.444,2	17,04
B. Pertambangan dan Penggalian	15.664,22	25,79	16.725,77	26,48	17.898,47	26,9	18.561,42	26,59	18.613,8	25,50
C. Industri Pengolahan	5.413,47	8,91	5.555,37	8,79	5.768,31	8,67	5.864,74	8,4	6.062,1	8,30
D. Pengadaan Listrik dan Gas	44,35	0,07	46,7	0,07	50,13	0,08	59,44	0,09	59,4	0,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	42,94	0,07	43,86	0,07	45,96	0,07	48,7	0,07	52,3	0,07
F. Konstruksi	7.905,16	13,01	7.839,10	12,41	7.700,74	11,58	8.335,57	11,94	9.349,8	12,81
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.799,64	11,19	7.286,83	11,54	7.934,28	11,93	8.471,70	12,13	9.282,2	12,71
H. Transportasi dan Pergudangan	3.820,95	6,29	3.826,14	6,06	4.223,34	6,35	4.455,13	6,38	4.702,9	6,44
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	858,32	1,41	881,96	1,4	978,42	1,47	1.059,04	1,52	1.184,8	1,62
J. Informasi dan Komunikasi	1.937,71	3,19	2.090,22	3,31	2.267,20	3,41	2.414,32	3,46	2.538,0	3,48
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	696,33	1,15	746,25	1,18	814,49	1,22	915,36	1,31	974,0	1,33
L. Real Estat	575,23	0,95	587,53	0,93	615,49	0,93	637,72	0,91	666,0	0,91
M,N. Jasa Perusahaan	145,89	0,24	149,04	0,24	158,57	0,24	164,13	0,24	169,2	0,23
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.163,83	5,21	3.171,73	5,02	3.268,51	4,91	3.370,89	4,83	3.518,1	4,82
P. Jasa Pendidikan	1.597,21	2,63	1.670,88	2,65	1.782,71	2,68	1.875,54	2,69	1.978,0	2,71
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	753,5	1,24	817,9	1,29	828,81	1,25	848,77	1,22	874,5	1,20
R,S,T,U. Jasa lainnya	401,82	0,66	428,66	0,68	469,62	0,71	504,39	0,72	538,7	0,74
PDRB Provinsi Kalimantan Utara ADHK	60.746,21	100	63.168,43	100	66.528,39	100	69.816,76	100	73.008,0	100

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2024

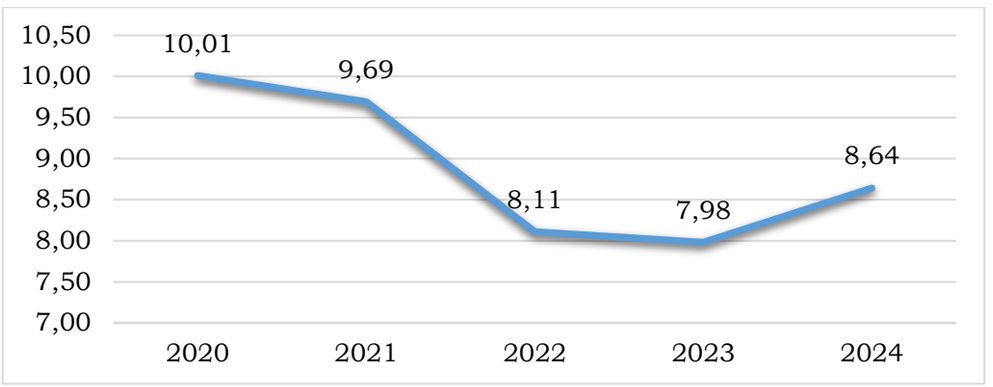
Tabel 2.51
Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2010 Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Nilai dan Kontribusi PDRB Provinsi Kalimantan Utara ADHB									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.535,73	16,47	18.084,95	16,22	19.554,49	14,1	20.956,73	14,23	21.698,8	14,78
B. Pertambangan dan Penggalian	25.571,63	25,46	30.397,76	27,26	50.181,21	36,19	50.337,15	34,18	42.164,1	28,72
C. Industri Pengolahan	9.209,37	9,17	9.929,87	8,9	10.781,15	7,77	11.298,11	7,67	11.970,1	8,15
D. Pengadaan Listrik dan Gas	58,72	0,06	61,45	0,06	69,19	0,05	86,1	0,06	86,6	0,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	62,97	0,06	68,07	0,06	73,3	0,05	78,14	0,05	86,2	0,06
F. Konstruksi	14.329,25	14,27	15.135,25	13,57	15.179,94	10,95	16.859,88	11,45	18.994,0	12,94
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.232,13	12,18	13.857,59	12,42	15.481,73	11,16	17.088,97	11,6	19.062,3	12,99
H. Transportasi dan Pergudangan	6.782,29	6,75	6.986,81	6,26	8.714,53	6,28	10.362,92	7,04	11.066,3	7,54
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.537,52	1,53	1.667,88	1,5	1.913,63	1,38	2.132,80	1,45	2.444,8	1,67
J. Informasi dan Komunikasi	2.559,51	2,55	2.940,89	2,64	3.333,65	2,4	3.627,35	2,46	3.856,5	2,63
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.120,28	1,12	1.248,10	1,12	1.408,83	1,02	1.607,95	1,09	1.731,2	1,18
L. Real Estat	766,28	0,76	820,52	0,74	868,92	0,63	905,38	0,61	958,5	0,65
M,N. Jasa Perusahaan	226,88	0,23	245,05	0,22	267,8	0,19	281,43	0,19	296,5	0,20
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.977,64	4,96	5.192,66	4,66	5.530,71	3,99	5.926,34	4,02	6.239,0	4,25
P. Jasa Pendidikan	2.590,24	2,58	2.823,48	2,53	3.114,38	2,25	3.363,21	2,28	3.625,6	2,47
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.139,35	1,13	1.261,85	1,13	1.303,59	0,94	1.379,80	0,94	1.443,2	0,98
R,S,T,U. Jasa lainnya	723,42	0,72	808,05	0,72	897,91	0,65	986,37	0,67	1.069,8	0,73
PDRB Provinsi Kalimantan Utara ADHB	100.423,21	100	111.530,22	100	138.674,96	100	147.278,62	100	146.793,5	100

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2024

a. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Tanaman Pangan terhadap PDRB

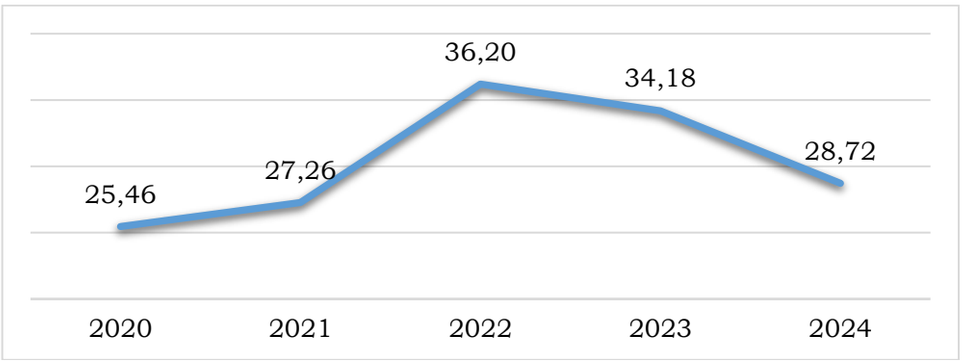
Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan tanaman pangan terhadap PDRB merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian pada sektor tersebut di Provinsi Kalimantan Utara. Berikut merupakan grafik kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Utara. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang berfluktuatif dan cenderung turun. Pada tahun 2020, capaian kontribusi pertanian, kehutanan, dan tanaman pangan sebesar 10,01 persen dan mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi 7,98 persen, namun pada tahun 2024 kembali meningkat hingga menjadi 8,64 persen. Faktor yang menyebabkan penurunan kontribusi pada grafik tersebut salah satunya adalah produksi pertanian yang tiap tahun mengalami penurunan akibat beberapa daerah yang mengalami alih fungsi lahan menjadi perkebunan, khususnya adalah perkebunan kelapa sawit.



Gambar 2.35.
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Tanaman Pangan terhadap PDRB Tahun 2020-2024
Sumber: Kalimantan Utara dalam Angka Tahun 2025 Diolah

b. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB menunjukkan gambaran proporsi sektor pertambangan dalam struktur perekonomian wilayah. Sektor pertambangan memiliki kontribusi paling besar di antara sektor-sektor lainnya dengan kontribusi hampir menyentuh 40 persen. Sektor pertambangan dibagi menjadi empat subsektor, yakni subsektor pertambangan minyak, gas, dan panas bumi; subsektor pertambangan batu bara dan lignit; subsektor pertambangan bijih logam; dan subsektor pertambangan dan penggalian lainnya.



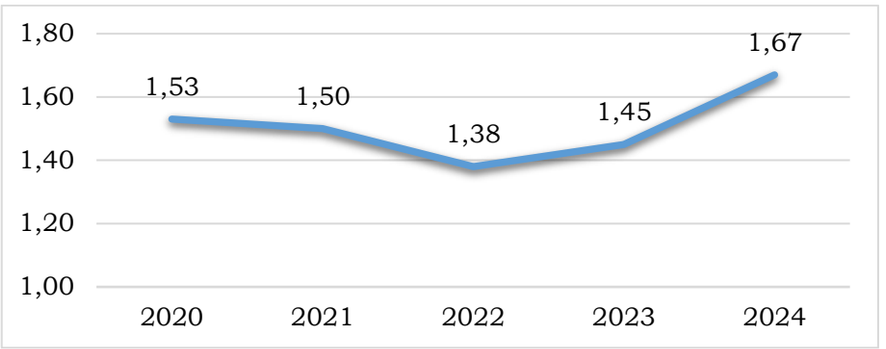
Gambar 2.36.
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Tahun 2020-2024
Sumber: Kalimantan Utara dalam Angka Tahun 2025 Diolah

Sepanjang lima tahun terakhir, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara memiliki tren berfluktuatif. Pada tahun 2020 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB yaitu sebesar 25,46 persen dan mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 36,20, namun menurun kembali hingga tahun 2024 menjadi 28,72 persen.

c. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan posisi sektor pariwisata dalam struktur perekonomian wilayah di Provinsi Kalimantan Utara. Sektor pariwisata dalam PDRB diwakili dengan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terdiri dari dua subsektor, yakni subsektor penyediaan akomodasi dan subsektor penyediaan makan minum. Subsektor penyedia akomodasi mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek seperti hotel dan penginapan. Sementara itu, subsektor penyediaan makan minum meliputi pelayanan makan minum untuk dikonsumsi segera seperti rumah makan dan restoran.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Pada tahun 2020 kontribusi sektor pariwisata sebesar 1,53 persen dan menurun hingga tahun 2022 menjadi 1,38 persen, namun pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan hingga menjadi 1,67 persen di tahun 2024. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.



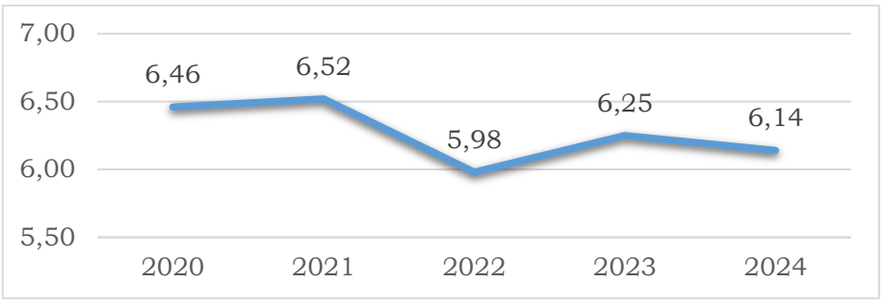
Gambar 2.37.
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2020-2024
Sumber: Kalimantan Utara dalam Angka Tahun 2025 Diolah

d. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB

Sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor potensial untuk dikembangkan mengingat Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki panjang garis pantai sebesar 3.995 km dan batas wilayah laut 12 mil dengan luas 7.316,43 km2 atau setara dengan 731.642,77 hektare. Selain itu, Provinsi Kalimantan Utara memiliki posisi strategis yaitu Arus Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang berlokasi di Kabupaten Nunukan dan berbatasan langsung dengan Malaysia. ALKI merupakan alur laut yang telah ditetapkan oleh hukum laut internasional untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan. Hal ini menambah potensi produksi perikanan utamanya perikanan tangkap di perairan umum dan meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB.

Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB menggambarkan besaran yang disumbangkan oleh sektor kelautan dan perikanan ke dalam PDRB secara umum. Dalam lima tahun terakhir, sektor kelautan dan perikanan merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah terbesar pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan di Provinsi Kalimantan Utara dengan rata-rata kontribusi sebesar 6,27 persen secara keseluruhan. Namun berdasarkan grafik terlihat kecenderungan kontribusi sektor kelautan dan perikanan mengalami penurunan setiap tahunnya.

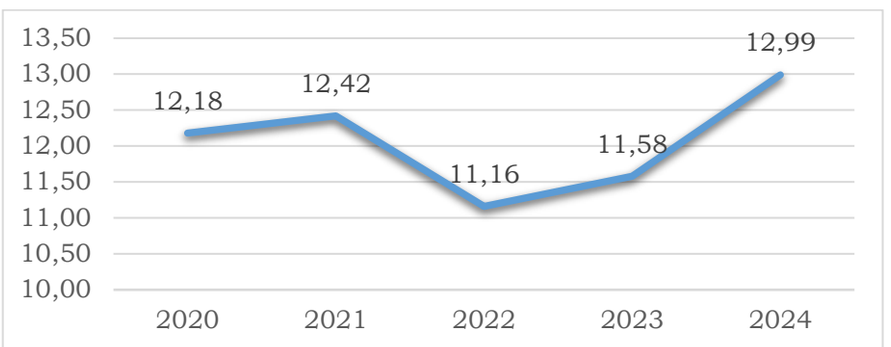
Pada tahun 2020 Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB yaitu sebesar 6,46 persen dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 6,52 persen, namun mangalami penurunan serta peningkatan pada tahun berikutnya menjadi 6,14 persen pada tahun 2024.



Gambar 2.38.
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB
Tahun 2020-2024
Sumber: Kalimantan Utara dalam Angka Tahun 2025, Diolah

e. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menunjukkan posisi sektor perdagangan dalam struktur perekonomian wilayah terutama di Provinsi Kalimantan Utara. Sektor perdagangan diwakili dengan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terdiri dari sub sektor, yakni subsektor perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya, dan subsektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Utara sepanjang tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2020 yaitu sebesar 12,18 dan meningkat mencapai 12,42 di tahun 2021. Walaupun terdapat penurunan drastis pada tahun 2022 sebesar 1,26 persen dari tahun sebelumnya atau menjadi 11,16 persen. Namun pada berikutnya kembali mengalami peningkatan menjadi 12,99 persen di tahun 2024.

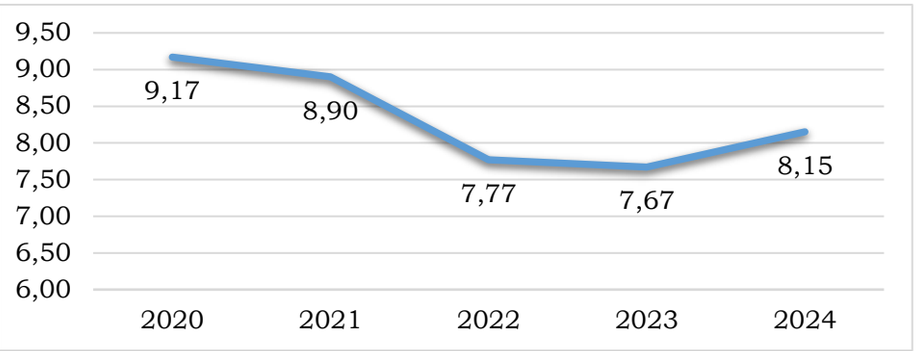


Gambar 2.39.
Grafik Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Tahun 2020-2024
Sumber: Kalimantan Utara dalam Angka Tahun 2025, Diolah

f. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB menunjukkan posisi sektor industri dalam struktur perekonomian wilayah yang ada di

Provinsi Kalimantan Utara. Sektor industri pengolahan terdiri dari 16 subektor, yaitu industri batu bara dan pengilangan migas; industri makanan dan minuman; industri pengolahan tembakau; industri tekstil dan pakaian jadi; industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki; industri kayu, barang dari kayu, dan gabus; industri kertas dan barang dari kertas; industri kimia, farmasi, dan obat tradisional; industri karet, barang dari karet, dan plastik; industri barang galian bukan logam; industri logam dasar; industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik; industri mesin dan perlengkapan; industri alat angkutan; industri furnitur; industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.



Gambar 2.40.
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2020-2024
Sumber: Kalimantan Utara dalam Angka Tahun 2025, Diolah

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Utara cenderung menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2020, pencapaian sektor industri yaitu 9,17 persen dari keseluruhan PDRB umumnya. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,12 persen dari tahun sebelumnya menjadi 7,77 persen dan pada tahun 2023 kembali menurun menjadi hanya 7,67 persen, namun sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 8,15 persen.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang menggambarkan rata-rata produktivitas yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Selain itu dalam batas tertentu dapat pula digunakan sebagai indikator dalam menentukan pencapaian tingkat kemakmuran di wilayah tersebut. Besaran PDRB per kapita dipengaruhi

oleh potensi sumber daya dan faktor-faktor produksi yang terangkum dalam nilai PDRB (ADHB), serta banyak sedikitnya jumlah penduduk. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk, sementara PDRB per kapita ADHK berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Tabel 2.52
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB ADHB Per Kapita (Juta Rupiah)					
	Provinsi Kalimanta Utara	143,53	157,09	192,59	201,75	198,43
	Nasional	57,29	62,26	71,04	74,96	78,6
2	PDRB ADHK Per Kapita (Juta Rupiah)					
	Provinsi Kalimantan Utara	86,82	99,97	92,39	95,64	98,689
	Nasional	39,78	40,78	42,47	44,14	

Sumber: BPS RI, 2025

Secara umum, dalam rentang tahun 2020 hingga 2024 besaran PDRB per kapita baik ADHB maupun ADHK di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kecenderungan yang meningkat kecuali pada tahun 2024 terjadi penurunan untuk PDRB per kapita ADHB. Pada tahun 2020, PDRB per kapita ADHB di provinsi ini tercatat sebesar 143,53 juta rupiah dan bertumbuh setiap tahunnya menjadi sebesar 198,43 juta rupiah di tahun 2024. Besaran tersebut menunjukkan capaian yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian nasional yang tercatat sebesar 57,29 juta rupiah di tahun 2020 dan bertumbuh menjadi 78,6 juta rupiah di tahun 2024.

Sama halnya dengan besaran PDRB per kapita ADHB yang bertumbuh positif, besaran PDRB per kapita ADHK di provinsi ini juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, besaran indikator ini tercatat sebesar 86,82 juta rupiah dan dalam perkembangannya bertumbuh menjadi 98,689 juta rupiah di tahun 2024. Besaran tersebut juga menunjukkan besaran yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian nasional di periode yang sama.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan 37 provinsi lain di Indonesia, besaran PDRB per kapita ADHB di Provinsi Kalimantan Utara berada pada urutan ketiga setelah Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Timur yang masing-masing tercatat sebesar 322,62 juta rupiah dan

215,76 juta rupiah. Sementara itu, dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan, posisi capaian Provinsi Kalimantan Utara berada pada urutan kedua setelah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan rata-rata pertumbuhannya dalam rentang enam tahun terakhir, PDRB per kapita ADHB di Provinsi Kalimantan Utara tumbuh paling cepat (11,06 persen per tahun) dibandingkan dengan empat provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, yang kemudian diikuti oleh Provinsi Kalimantan Selatan (9,21 persen per tahun) dan Kalimantan Tengah (7,64 persen per tahun). Sementara itu, Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan rata-rata pertumbuhan terendah di pulau ini dengan besaran 4,38 persen per tahun.

Berdasarkan capaian kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, besaran PDRB per kapita ADHB tertinggi di wilayah ini tercatat di Kabupaten Tana Tidung, yang pada tahun 2020 tercatat sebesar 231,64 juta rupiah dan bertumbuh menjadi 330,14 juta rupiah di tahun 2024. Sementara itu, capaian indikator terendah di provinsi ini tercatat di Kabupaten Bulungan dengan besaran 160,71 juta rupiah di tahun 2024. Selain itu, Kabupaten Bulungan juga tercatat sebagai wilayah dengan rata-rata pertumbuhan terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni sebesar 6,00 persen per tahun, di mana empat kabupaten/kota lainnya tercatat memiliki rata-rata pertumbuhan pada kisaran 11 hingga 14 persen per tahun. Kabupaten Malinau merupakan wilayah dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi, yakni mencapai 14,91 persen per tahun.

Tabel 2.53
Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	**PDRB ADHB Per Kapita (Juta Rupiah)**					
	Malinau	135,56	154,01	211,91	218,89	210,43
	Bulungan	123,79	131,80	156,18	162,24	160,71
	Tana Tidung	231,64	258,11	330,50	337,02	330,14
	Nunukan	132,69	147,67	195,65	204,63	192,20
	Kota Tarakan	156,95	170,70	190,20	208,18	221,38
2	**PDRB ADHK Per Kapita (Juta Rupiah)**					
	Malinau	94,87	97,72	101,37	104,38	106,85
	Bulungan	76,29	78,01	80,80	83,32	85,41
	Tana Tidung	144,35	146,18	149,95	152,78	154,34
	Nunukan	79,25	81,05	83,99	86,26	88,43
	Kota Tarakan	91,01	93,53	97,58	102,14	106,77

Sumber: Kalimantan Utara dalam Angka Tahun 2025, Diolah

3. Indeks Ekonomi Inklusif

Indeks Ekonomi Inklusif adalah pengukuran tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik dari level nasional maupun level daerah. Indeks Ekonomi Inklusif menghitung melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan yang merupakan pilar utama tingkat inklusivitas. Pilar pertama mengenai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi berfokus pada penciptaan landasan fundamental baik dari perekonomian, lapangan pekerjaan, dan infrastruktur ekonomi. Selanjutnya, pilar kedua berfokus pada pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Terakhir, pilar ketiga yaitu berfokus pada kapabilitas manusia, infrastruktur pasar, dan keuangan inklusif.

Tabel 2.54
Indeks Ekonomi Inklusif Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2019-2021

Uraian	2019	2020	2021
Pilar 1: Pertumbuhan dan Perkembangan Kemiskinan	5,05	4,05	4,96
Pilar 2: Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan	7,71	7,68	7,67
Pilar 3: Perluasan Akses dan Kesempatan	7,38	7,38	7,95

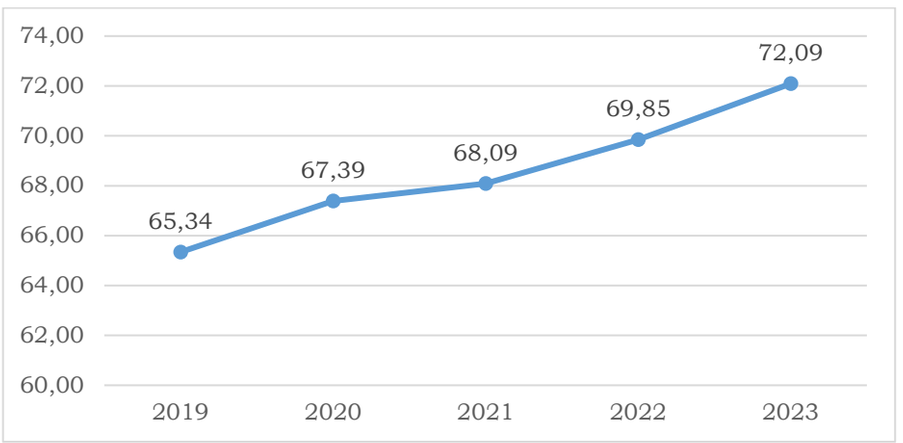
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2020, Diolah

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan capaian Indeks Ekonomi Inklusif Provinsi Kalimantan Utara sepanjang tahun 2018 hingga 2021. Pada pilar pertama mengenai pertumbuhan dan perkembangan kemiskinan terjadi tren kecenderungan berfluktuatif. Pada tahun 2018, capaian pilar pertama sebesar 4,95 dan meningkat sebesar 5,05 pada tahun 2019. Capaian tersebut kembali menurun di tahun 2020 mencapai 4,05 dan kembali tumbuh di tahun 2021 sebesar 4,96. Selanjutnya, pada pilar kedua mengenai pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan menunjukkan tren yang menurun. Tahun 2018 capaian pilar kedua adalah 7,52 dan meningkat sedikit di tahun 2019 menjadi 7,71. Pada tahun 2020 dan 2021 capaian pilar mengenai ketimpangan dan kemiskinan mengalami penurunan berturut-turut sebesar 7,68 dan 7,67. Terakhir, capaian pilar ketiga tentang perluasan akses dan kesempatan mengalami peningkatan sepanjang tahun. Pada tahun 2018 capaian pilar ketiga adalah 7,20 dan meningkat di tahun 2019 sebesar 7,38. Peningkatan kembali terjadi di tahun 2021 dengan capaian sebesar 7,95.

4. Indeks Ekonomi Hijau

Pembangunan ekonomi saat ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan yang tinggi tetapi juga memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mengukur sejauh mana pembangunan ekonomi menggunakan prinsip yang berkelanjutan, maka digunakan indikator Indeks Ekonomi Hijau. Indeks Ekonomi Hijau merupakan indikator yang terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan.

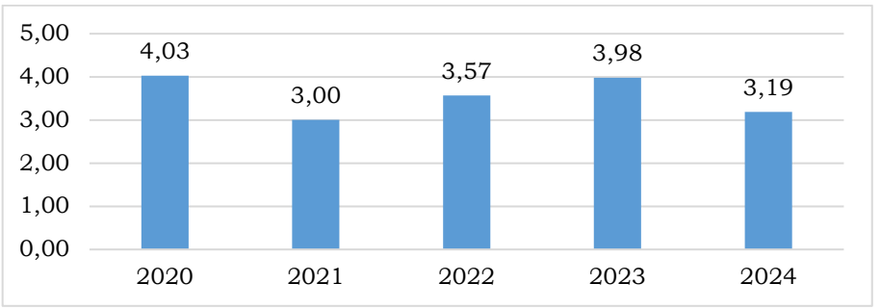
Indeks Ekonomi Hijau di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019 yaitu sebesar 65,34 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 72,09. Hal tersebut sebagaimana disajikan pada grafik berikut ini.



Gambar 2.41.
Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023
Sumber: Bappenas, 2024

5. Rasio Kewirausahaan

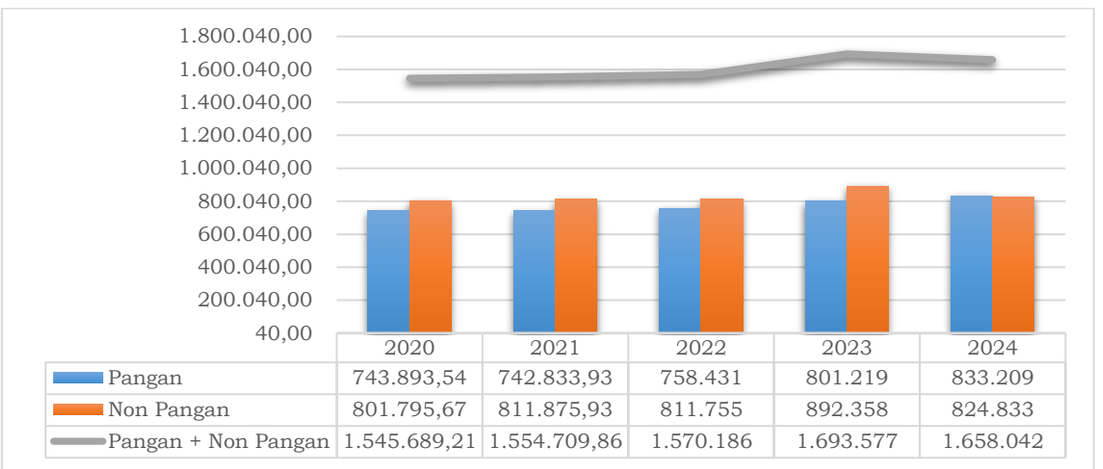
Rasio kewirausahaan adalah perbandingan jumlah wirausaha dengan penduduk angkatan kerja di suatu wilayah. Wirausaha dibagi menjadi wirausaha pemula dengan wirausaha mapan. Wirausaha pemula merupakan wirausaha yang merintis usahanya menuju wirausaha mapan. Sedangkan wirausaha mapan berdasarkan Perpres No. 2 Tahun 2022 merupakan usaha yang dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Data yang tersedia saat ini masih data capaian nasional. Rasio kewirausahaan Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar 4,03 dan mengalami penurunan serta peningkatan pada tahun berikutnya menjadi 3,19 pada tahun 2024.



Gambar 2.42.
Rasio Kewirausahaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024
Sumber: Kalimantan Utara Dalam Angka 2021-2025, Diolah

6. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan indikator untuk mengukur kemampuan perekonomian daerah, terutama dari segi kemampuan pengeluaran masyarakat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita merupakan tolak ukur kemampuan ekonomi suatu daerah yang terkait dengan daya saing. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan. Semakin besar angka pengeluaran konsumsi rumah tangga mengindikasikan kemampuan perekonomian yang semakin atraktif.



	2020	2021	2022	2023	2024
Pangan	743.893,54	742.833,93	758.431	801.219	833.209
Non Pangan	801.795,67	811.875,93	811.755	892.358	824.833
Pangan + Non Pangan	1.545.689,21	1.554.709,86	1.570.186	1.693.577	1.658.042

Gambar 2.43.
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara 2025, Diolah

Grafik tersebut menunjukkan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang terbagi menjadi jumlah pengeluaran, pengeluaran makanan, dan pengeluaran non-makanan. Tren menunjukkan kecenderungan meningkat sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, baik makanan maupun non-makanan, tahun 2020 adalah Rp1.545.689,21 per bulan dan terus

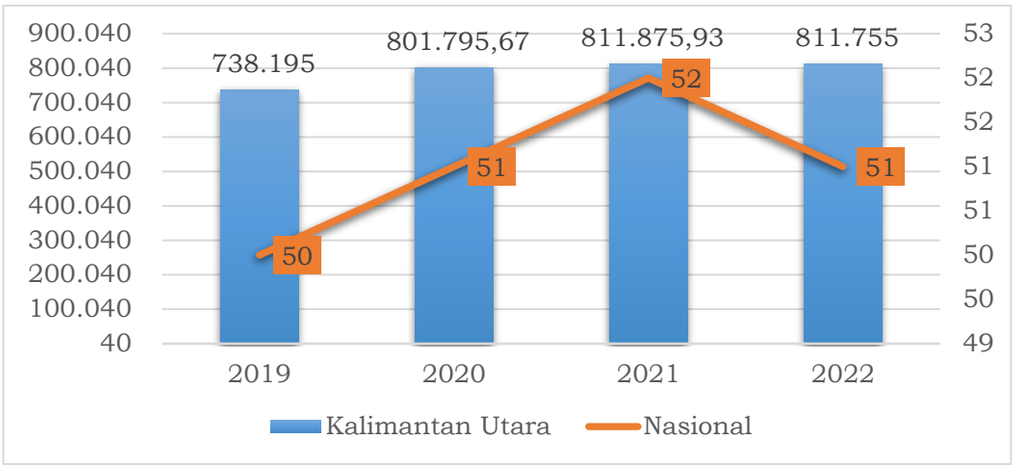
tumbuh mencapai Rp1.658.042,- per bulan tahun 2024. Provinsi Kalimantan Utara masih didominasi pengeluaran konsumsi non-makanan di Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023. Sedangkan di Tahun 2024 didominasi pengeluaran konsumsi makanan. Pada tahun 2020, sektor konsumsi non-makanan berfluktuasi cenderung meningkat dari Rp 801.795,67 menjadi Rp824.833 per bulan di Tahun 2024. Sedangkan pengeluaran konsumsi makanan tahun 2020 Rp743.893,54 menjadi Rp833.209 per bulan di Tahun 2024.

Kenaikan setiap tahun pada konsumsi rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya adalah kompleksitas kebutuhan dan inflasi. Jenis kebutuhan per kapita yang semakin kompleks dapat langsung mempengaruhi kenaikan pengeluaran. Di samping itu, inflasi tinggi yang merupakan dampak dari kenaikan harga barang-barang juga menjadi penyebab semakin tingginya angka pengeluaran rumah tangga per kapita.

7. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan per Kapita

Pengeluaran konsumsi nonpangan per kapita digunakan untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar kebutuhan pangan. Perhitungan pengeluaran konsumsi nonpangan per kapita berdasarkan biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan barang yang dikonsumsi di luar kebutuhan pangan. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat kemampuan membeli kebutuhan nonpangan, atau pola konsumsi masyarakat untuk kebutuhan sekunder-tersier.

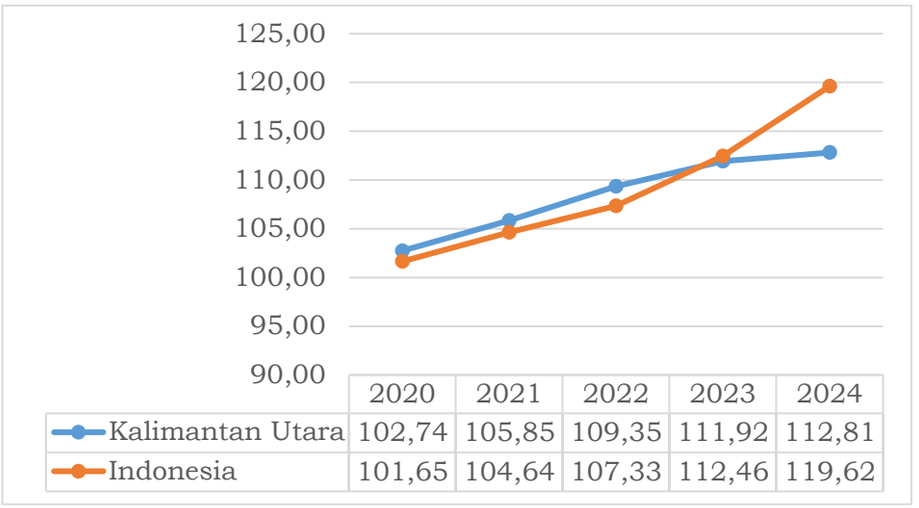
Dalam empat tahun terakhir, persentase pengeluaran konsumsi nonpangan per kapita menunjukkan tren yang berfluktuasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2019 yaitu 50 persen dengan nilai Rp738.195 per bulan dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 yaitu berturut-turut sebesar 51 persen dan 52 persen. Pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu kembali pada angka 51 persen atau menjadi Rp811.755 per bulan.



Gambar 2.44.
Persentase dan Nilai Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan per Kapita Tahun 2019-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara 2023, Diolah

8. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) merupakan indikator untuk melihat kesejahteraan petani suatu wilayah berupa perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Data NTP Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren yang meningkat sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada Tahun 2020 NTP di Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebesar 102,74 dan terus meningkat menjadi 112,81 pada tahun 2024. Nilai NTP Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 hingga tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai NTP Nasional, namun pada tahun 2023 dan 2024 nilai NTP Provinsi Kalimantan Utara lebih rendah dibandingkan dengan nilai NTP Nasional yang sebesar 112,46 pada tahun 2022 dan 119,62 di tahun 2024.

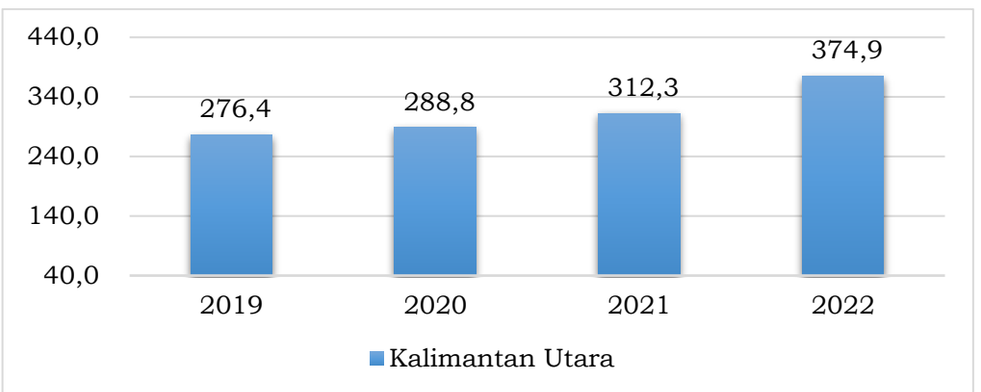


	2020	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Utara	102,74	105,85	109,35	111,92	112,81
Indonesia	101,65	104,64	107,33	112,46	119,62

Gambar 2.45.
Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2025, Diolah

9. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah digunakan untuk melihat produktivitas tiap sektor dengan melihat produktivitas tenaga kerja di sektor tersebut. Besarnya produktivitas tiap sektor dapat menjadi salah satu indikator daya saing antar daerah. Data produktivitas total daerah Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren positif sejak tahun 2019 hingga 2022.



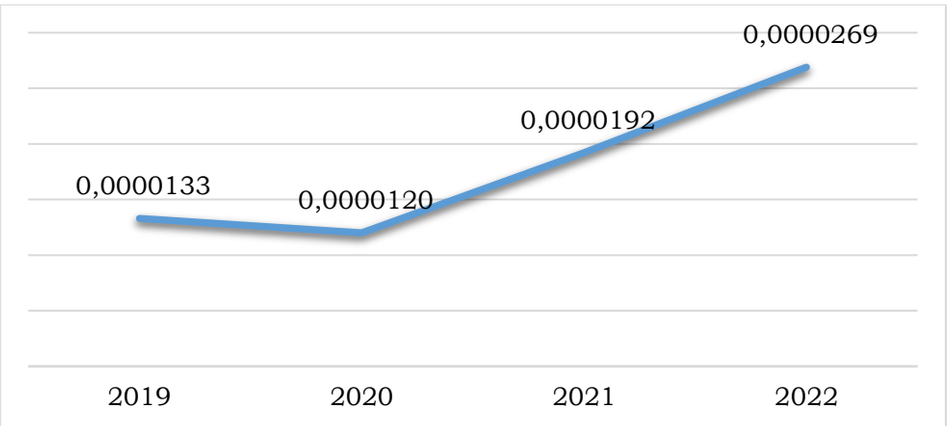
Gambar 2.46.
Produktivitas Total Daerah Tahun 2019-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara 2023, Diolah

Grafik tersebut menunjukkan pertumbuhan seiring dengan tumbuhnya jumlah tenaga kerja dan PDRB total daerah. Pada tahun produktivitas total daerah terjadi peningkatan pada tahun 2019 hingga 2021 berturut-turut sebesar 276 juta rupiah per orang; 288,8 juta rupiah per orang; dan 312,3 juta rupiah per orang. Pada tahun 2022

menunjukkan lonjakan peningkatan sebesar 16 persen atau menjadi 374,9 juta rupiah per orang.

10. Indeks Keterbukaan Ekonomi

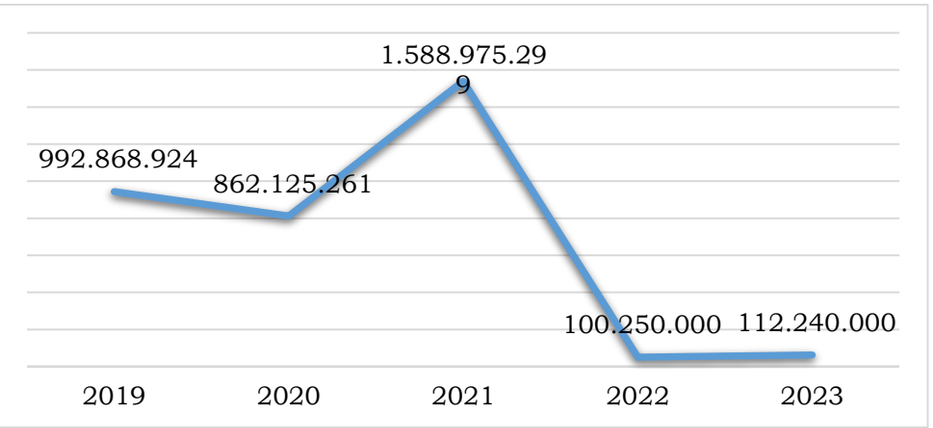
Keterbukaan ekonomi adalah sebuah indikator kebijakan yang mengatur arus perdagangan internasional (kegiatan ekspor-impor) baik dalam bentuk membatasi atau memperlonggar hubungan internasional negara. Indikator ini menunjukkan derajat keterbukaan suatu wilayah terhadap perdagangan internasional. Semakin besar indeks keterbukaan ekonomi suatu wilayah maka semakin terbuka perekonomian wilayah tersebut dan mudahnya terkena guncangan faktor eksternal. Sementara, indeks yang mendekati nilai 0 maka semakin tertutup perekonomian wilayah tersebut. Grafik di bawah ini menunjukkan indikator keterbukaan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 2.47.
Indikator Keterbukaan Ekonomi Tahun 2019-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara 2023, Diolah

Indikator keterbukaan ekonomi menunjukkan peningkatan tahun 2021-2022, meskipun mengalami sedikit penurunan di tahun 2020. Indikator keterbukaan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan nilai mendekati nol atau tertutupnya perekonomian wilayah tersebut. Pada tahun 2019, indikator keterbukaan keuangan sebesar 0,0000133 dan menurun sedikit di tahun 2020 menjadi 0,0000120. Kemudian keterbukaan ekonomi mengalami kenaikan hingga tahun 2023 yang mencapai 0,0000269. Tertutupnya keterbukaan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara disebabkan oleh kurangnya pemahaman manajerial dinas yang bersangkutan mengenai kerjasama bilateral dan multilateral.

Keterbukaan ekonomi yang mendekati nol didukung oleh kegiatan ekspor-impor di Provinsi Kalimantan Utara. Ekspor bersih perdagangan menunjukkan selisih nilai ekspor dengan nilai impor. Berdasarkan grafik tersebut, ekspor bersih perdagangan mengalami fluktuasi dan cenderung turun. Pada tahun 2019 dan 2020, ekspor bersih perdagangan berturut-turut sebesar 992.868.924 US$ dan 862.125.261 US$. Peningkatan drastis sebesar 84 persen atau menjadi 1.588.975.299 US$ di tahun 2020. Sebaliknya, tahun 2022 mengalami penurunan tajam sebesar 93 persen atau menjadi 100.250.000 US$. Adanya perbaikan pertumbuhan di tahun 2023 dengan nilai 112.240.000 US$.



Gambar 2.48.
Grafik Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara 2023, Diolah

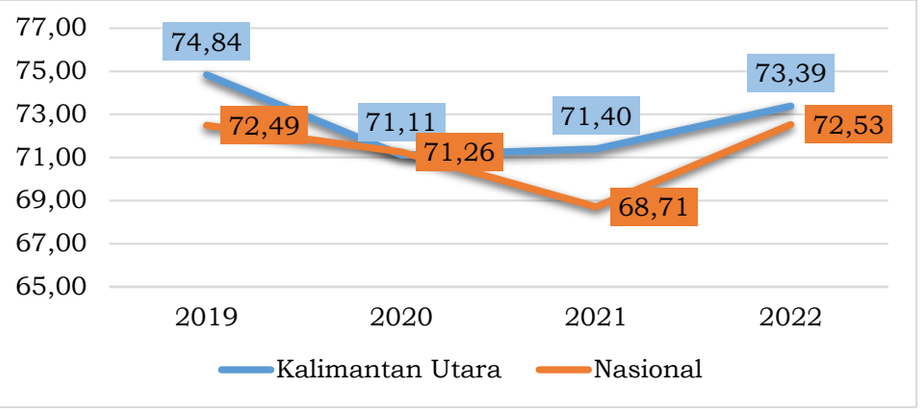
2.1.3.2. Daya Saing SDM

Sumber daya manusia merupakan pondasi dalam kemajuan seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Keberadaan SDM yang unggul akan mengakselerasi kemajuan wilayah. Untuk mendukung terwujudnya kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing diperlukan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata.

1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan indikator akumulatif untuk melihat kualitas pembangunan pendidikan pada suatu wilayah. Nilai indeks pendidikan didekati dengan mengambil aspek pendidikan pada indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan. Perhitungannya dilakukan berdasarkan beberapa komponen penyusun di antaranya rata- rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka kesiapan sekolah, persentase

satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian, persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah, dan persentase penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40% terbawah yang bersekolah.



Gambar 2.49.
Indeks Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional
Tahun 2019-2022
Sumber: Rancangan RPJPD Kalimantan Utara 2025-2045

Capaian Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2019-2022 berada di atas capaian nasional kecuali tahun 2020. Dari enam komponen penyusun indeks pendidikan, terdapat 3 indikator yang patut diperhatikan karena berada di bawah capaian nasional pada tahun 2022, yaitu harapan lama sekolah, angka kesiapan sekolah, dan persentase penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah.

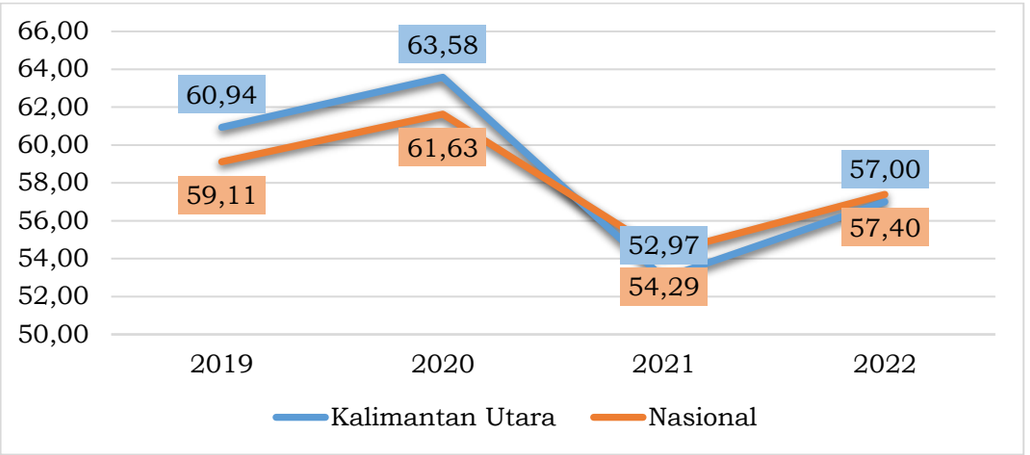
Tabel 2.55
Indikator Indeks Pendidikan

No	Indikator Indeks Pendidikan	Satuan	2019	2020	2021	2022
1.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas	Tahun	8,94	9,00	9,11	9,27
2.	Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas	Tahun	12,84	12,93	12,94	13,06
3.	Angka kesiapan sekolah	Persen	76,51	75,59	74,82	73,83
4.	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian	Persen	33,41	25,99	17,13	32,58
5.	Persentase penduduk penyandang disabilitas 7-18 tahun yang bersekolah	Persen	74,77	69,94	90,88	68,35
6.	Persentase penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang bersekolah	Persen	92,61	91,54	92,03	91,42
7.	Indeks Pendidikan	Indeks	74,84	71,11	71,4	73,39

Sumber: https://ipk.kemdikbud.go.id/provinsi/ 2024

2. Angka Literasi

Literasi secara bahasa memiliki arti kemampuan menulis dan membaca; pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu; dan kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Perhitungan angka literasi untuk indikator ini didekati dengan nilai aspek budaya literasi yang menjadi komponen dalam indeks pembangunan kebudayaan. Adapun indikator penyusun dalam aspek budaya literasi antara lain persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam seminggu terakhir, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir, dan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam tiga bulan terakhir.



Gambar 2.50.
Angka Literasi Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional
Tahun 2019-2022
Sumber: Rancangan RPJPD Kalimantan Utara 2025-2045

Angka literasi Provinsi Kalimantan Utara mengalami fluktuasi dari 2019-2022. Tahun 2019-2020 mengalami kenaikan dari 60,94 menjadi 63,58. Capaian tersebut juga lebih tinggi dari capaian nasional pada tahun yang sama. Lalu, turun menjadi 52,97 pada tahun 2021, hal yang sama juga terjadi pada capaian nasional. Berikutnya, nilai angka literasi kembali meningkat menjadi 57 pada tahun 2022. Namun, nilai tersebut masih berada di bawah capaian nasional yang sebesar 57,4. Untuk meningkatkan nilai angka literasi diperlukan upaya peningkatan minat baca dan berkunjung ke perpustakaan pada masyarakat.

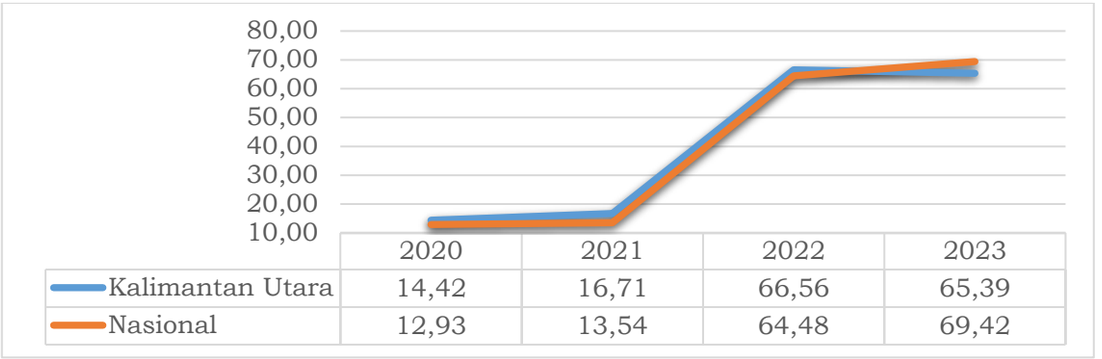
Tabel 2.56
Indikator Angka Literasi

No	Indikator Angka Literasi	Satuan	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam seminggu terakhir	Persen	45,89	46,06	45,04	48,9
2.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	Persen	58,38	64,57	71,59	79,49
3.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam 3 bulan terakhir	Persen	12,15	12,24	2,45	1,91
4.	Angka literasi	Indeks	60,94	63,58	52,97	57

Sumber: https://ipk.kemdikbud.go.id/provinsi/

3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah konsep yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi atau kemampuan membaca dan menulis masyarakat dalam suatu wilayah. IPLM diukur dengan menggunakan tujuh Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP), keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, dan anggota perpustakaan. Skor IPLM diklasifikasikan menjadi 4 tingkat yaitu 0-29,9 termasuk sangat rendah, 30-49,9 termasuk rendah, 50-79,9 termasuk sedang, 80- 89,9 termasuk tinggi, dan 90-100 termasuk sangat tinggi.



Gambar 2.51.
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2020-2023
Sumber: Laporan IPLM, 2024

IPLM Provinsi Kalimantan Utara mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2020-2023. Ketika dibandingkan

dengan IPLM nasional, IPLM Provinsi Kalimantan Utara berada di atas capaian nasional kecuali pada tahun 2023. Pada tahun 2023, IPLM menunjukkan skor 65,39 dan termasuk kategori sedang. Dari ketujuh UPLM, empat di antaranya sudah mencapai standar yaitu ketercukupan tenaga perpustakaan, perpustakaan yang dibina sesuai SNP, keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan, dan anggota perpustakaan. Sedangkan, UPLM yang masih belum sesuai standar yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi perustakaan, dan tingkat kunjungan masyarakat per hari.

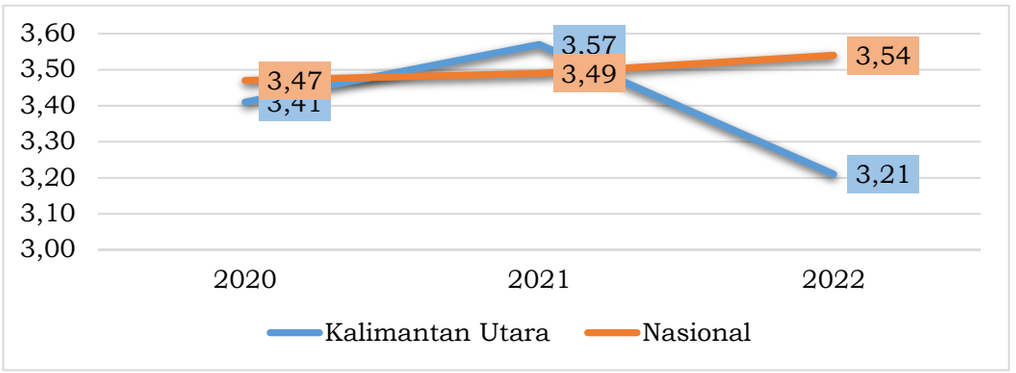
Tabel 2.57
Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat

No	Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat	2020	2021	2022	2023
1.	Pemerataan layanan Perpustakaan	0,00100	0,00077	0,0026	0,2829
2.	Ketercukupan koleksi perpustakaan	0,09736	0,11960	1,9547	0,2322
3.	Ketercukupan tenaga perpustakaan	0,00009	0,00006	0,0011	1,0000
4.	Tingkat kunjungan masyarakat per hari	0,00026	0,00069	0,4122	0,0621
5.	Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	0,00008	0,00006	1,4705	1,0000
6.	Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan	0,00396	0,00417	0,3301	1,0000
7.	Anggota perpustakaan	0,04145	0,04178	0,4882	1,0000
8.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	14,42	16,71	66,56	65,39

Sumber: Laporan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 2020-2023

4. Indeks Literasi Digital

Literasi bermakna kemampuan mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Dengan berkembangnya teknologi, maka kemampuan literasi bukan hanya diasah melalui buku dan media tulis tetapi juga dari pengetahuan digital. Kemampuan mengolah data dan informasi yang didapat dari media digital utamanya internet menjadi pengetahuan yang berguna sangat penting dimiliki saat ini. Untuk mengetahui kemampuan literasi tersebut dapat diukur dengan indeks literasi digital. Indeks literasi digital tersusun dari 4 pilar yaitu digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture.



Gambar 2.52.
Perbandingan Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2020-2022
Sumber: Rancangan RPJPD Kalimantan Utara 2025-2045 dan Kemkomifo 2024

Indeks literasi digital Provinsi Kalimantan Utara mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2022. Dalam grafik terlihat indeks literasi digital Provinsi Kalimantan Utara di bawah capaian nasional kecuali pada tahun 2021. Pada tahun 2022, nilai indeks literasi digital Provinsi Kalimantan Utara menurun jauh tidak terlepas dari nilai-nilai pilar penyusunnya yang turun secara keseluruhan. Pilar yang memiliki nilai paling rendah adalah digital safety, yang mengindikasikan kesadaran terhadap keamanan data digital masih rendah. Terdapat perbedaan penamaan indikator dalam penghitungan indeks literasi digital tahun 2020 dan tahun setelahnya sehingga tahun 2020 tidak dimasukkan.

Tabel 2.58
Pilar Indeks Literasi Digital Nasional 2020-2022

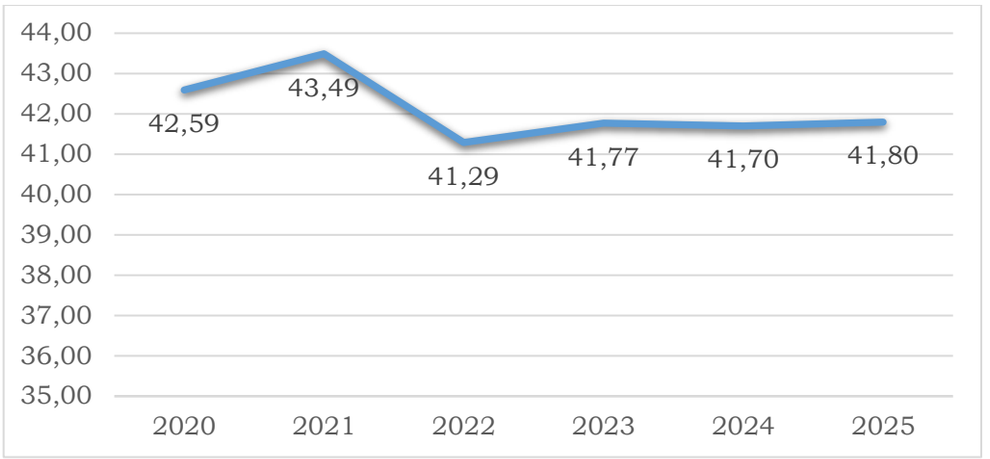
No	Pilar	2020	2021	2022
1.	Digital skills	-	3,63	3,14
2.	Digital ethics	-	3,44	3,6
3.	Digital safety	-	3,13	2,75
4.	Digital culture	-	4,7	3,38
5.	Indeks Literasi Digital	3,41	3,57	3,21

Sumber: https://survei.literasidigital.id, 2024

5. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan indikator untuk mengetahui beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Perhitungan angka ketergantungan dengan membandingkan penduduk berusia tidak produktif (penduduk usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (penduduk 15-64 tahun). Semakin besar nilai angka ketergantungan maka menunjukkan semakin banyak jumlah penduduk yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Angka ketergantungan Provinsi Kalimantan Utara mengalami fluktuasi dari

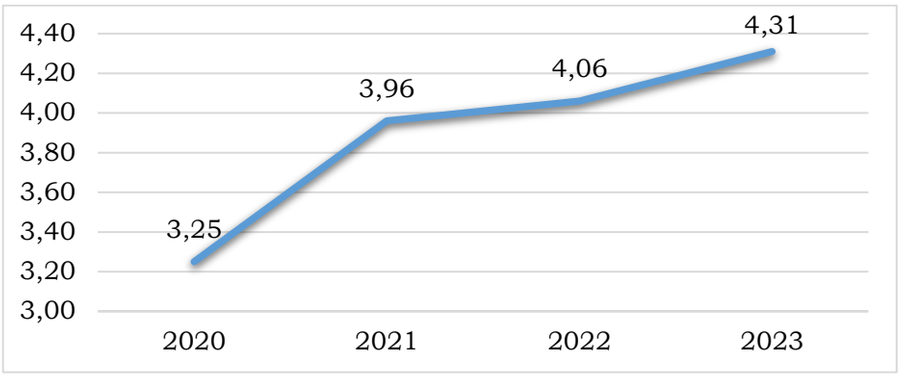
tahun 2020-2025. Pada tahun 2020 angka ketergantungan sebesar 42,59% lalu naik menjadi 43,49% pada tahun 2021. Pada tahun 2022, angka ketergantungan turun menjadi 41,29% dan kembali naik menjadi 41,80% di tahun 2025. Artinya, pada tahun 2025 100 penduduk usia produktif menanggung 41 penduduk usia tidak produktif.



Gambar 2.53.
Angka Ketergantungan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2020-2025
Sumber: Kalimantan Utara Dalam Angka, Diolah

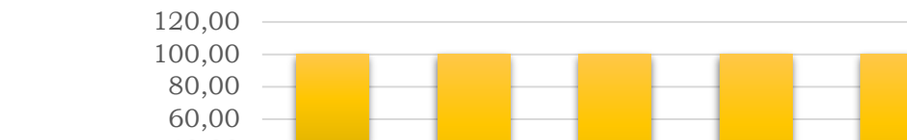
2.1.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Daerah

Kondisi infrastruktur wilayah menjadi salah satu pengukur daya saing daerah yang dapat mencerminkan tingkat produktivitas berdasarkan kondisi ketersediaan dan layanan infrastruktur yang tersedia untuk mendukung layanan dasar masyarakat terhadap aktivitas ekonomi dalam pembangunan suatu wilayah. Kondisi infrastruktur yang memadai akan medukung dan memudahkan aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien. Dalam hal ini, kondisi daya saing fasilitas atau infrastruktur daerah dapat dilihat melalui indeks layanan infrastruktur. Indeks layanan infrastruktur mengambarkan kinerja penyediaan dan pembangunan infrastruktur yang mencakup ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, infrastruktur layanan dasar permukiman, dan kelistrikan.



Gambar 2.54.
Indeks Layanan Infrastruktur Tahun 2020-2023
Sumber: Dinas PUPR-Perkim Provinsi Kalimantan Utara, 2024, diolah

Indeks layanan infrastruktur menunjukan tren kenaikan selama tahun 2020-2023 dengan nilai 4,31 pada tahun 2023 yang tergolong kategori sangat tinggi. Komponen perhitungan indeks layanan infrastruktur antara lain persentase jalan kondisi baik, persentase panjang jalan per jumlah kendaraan, persentase layanan air minum, dan rasio elektrifikasi.



	2020	2021	2022	2023	2024
Kondisi Jalan Rusak Berat	53,90	84,41	85,12	84,15	83,17
Kondisi Jalan Rusak	30,79	0,62	0,74	0,79	0,79
Kondisi Jalan Sedang	4,69	0,90	1,21	1,37	1,37
Kondisi Jalan Baik	10,63	14,07	12,94	13,69	14,67

Gambar 2.55.
Persentase Kondisi Jalan Kewenangan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024
Sumber: Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Utara 2024 dan Kalimantan Utara Dalam Angka 2025, diolah

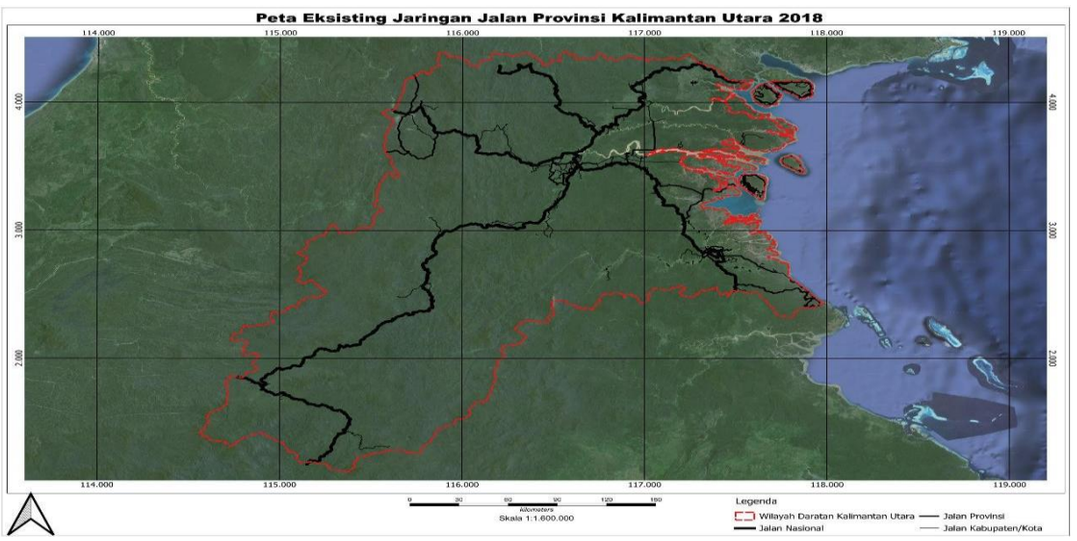
Infrastruktur transportasi menggambarkan kondisi konektivitas wilayah yang terdiri dari ketersediaan jaringan jalan, jembatan, dan prasarana transportasi. Jaringan jalan merupakan fondasi vital dalam mendukung pertumbuhan dan penguatan ekonomi daerah. Kondisi jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara No 188.44/K. 145 pada tahun 2018 dapat dilihat pada grafik di atas.

Tabel 2.59
Panjang Kondisi Jalan Kewenangan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024

Kualitas Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
Kondisi jalan baik	90,54	119,86	110,27	116,65	124,99
Kondisi jalan sedang	39,91	7,63	10,26	11,66	11,66
Kondisi jalan rusak	262,31	5,30	6,28	6,69	6,69
Kondisi jalan rusak berat	459,12	719,08	725,07	716,89	708,54
Panjang jalan seluruhnya	851,88	851,88	851,88	851,88	851,88

Sumber: Olah Data Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Utara 2024

Total panjang jalan kewenangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 sebesar 851,88 km dan tidak mengalami penambahan selama 2020-2024. Selain itu, kondisi jalan di Provinsi Kalimantan Utara masih perlu mendapatkan perhatian besar karena jumlah jalan kondisi baik dan sedang berada jauh di bawah jumlah kondisi jalan rusak dan rusak berat. Peta jaringan jalan eksisting yang ada di Provinsi Kalimantan Utara disajikan pada Gambar 2.65 berikut.



Gambar 2.56.
Peta Eksisting Jaringan Jalan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018
Sumber: Olah data, 2024

Selain ketersediaan jalan, transportasi darat juga perlu dilihat rasio panjang jalan per kendaraan di suatu wilayah. Perbandingan antara jumlah panjang jalan dan jumlah kendaraan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukan adanya peningkatan pada periode tahun 2020 hingga tahun 2023 pada tabel 2.63. Hal ini terjadi karena panjang jalan tetap sedangkan jumlah kendaraan yang terus meningkat. Apabila

tidak dilakukan intervensi, maka lalu lintas kendaraan akan semakin padat dan menimbulkan masalah kelancaran arus mobilitas penduduk.

Tabel 2.60
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Unit/KM	t.a.d	81	84	86	91

Sumber: Olah Data Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara 2024

Ketersediaan jaringan jalan juga berpengaruh terhadap kondisi kelistrikan. Jaringan jalan tersebut menjadi akses utama terhadap distribusi jaringan kelistrikan terutama dari PLN dalam menyalurkan listrik ke setiap rumah di seluruh wilayah. Kondisi kelistrikan ini dapat digambarkan melalui rasio elektrifikasi yang menunjukan jumlah rumah tangga yang terjangkau jaringan kelistrikan.

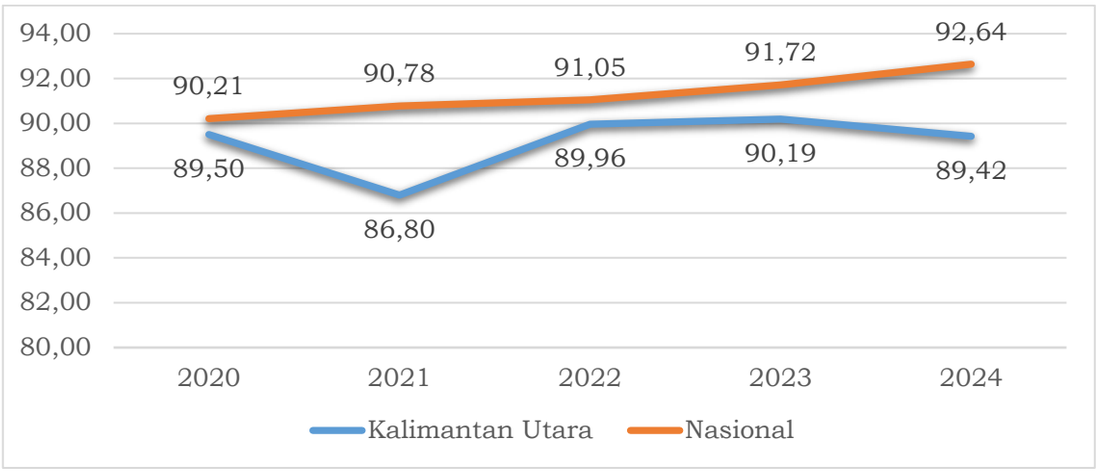
Tabel 2.61
Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Elektrifikasi	Persen	78,96	80,71	86,44	91,19	95,08

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Kalimantan Utara 2024 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Rasio elektrifikasi Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan angka 95,08 persen tahun 2024. Hal tersebut menunjukan adanya rumah tangga yang belum terjangkau jaringan kelistrikan karena adanya keterbatasan dalam jaringan distribusi yang melalui jaringan jalan dalam menjangkau wilayah pedalaman.

Kemudian, dalam pemenuhan layanan infrastruktur dasar permukiman sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat terdiri atas pemenuhan akses air minum. Jangkauan pemenuhan akses air minum pada suatu daerah dapat dilihat melalui persentase akses penduduk yang berakses air minum. Kondisi akses air minum menunjukan kondisi yang fluktuatif tetapi cenderung sedikit menurun dari sebesar 89,50 persen pada tahun 2020 menjadi 89,42 persen di tahun 2024. Nilai tersebut juga masih berada di bawah rata- rata nasional yaitu sebesar 92,64 persen di tahun 2024. Berikut grafik persentase penduduk berakses air minum.

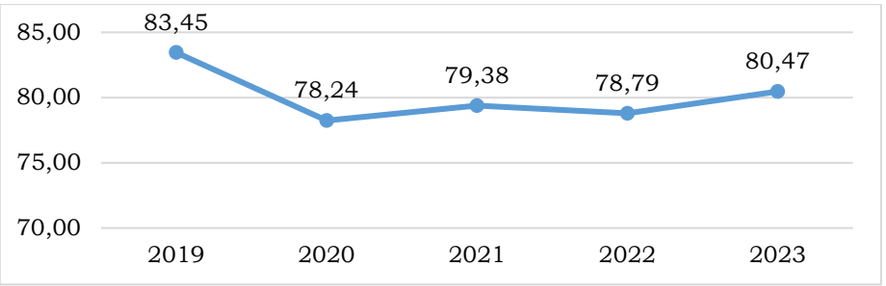


Gambar 2.57.
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2020-2024
Sumber: Tabel Dinamis BPS Indonesia, 2024

2.1.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

1. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI merupakan pengukuran pembangunan politik dari dua sisi yaitu sisi pemerintah dan sisi masyarakat. IDI bersifat pengukuran perkembangan demokrasi di Indonesia dan provinsi. Perhitungan IDI menggunakan metode terbaru mencakup tiga ranah, yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Tiga aspek IDI memiliki perwakilan indikator berkaitan dengan aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi. Semenjak tahun 2021, perhitungan IDI menggunakan metode baru dengan mengkombinasikan perhitungan kuantitatif dan kualitatif. Berikut merupakan grafik Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Utara sepanjang tahun 2019 hingga 2023.



Gambar 2.58.
Grafik Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara 2024, Diolah

Grafik di atas menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi. Pada tahun 2019 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Utara mencapai 83.45 dan mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar

78,29 dan kembali meningkat di tahun 2021 dengan capaian 79,38. Pada tahun 2022 menunjukkan tren yang menurun kembali menjadi 78,79 dan mengalami perbaikan pertumbuhan di tahun 2023 mencapai 80,47.

2. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman atau IRA merupakan indikator rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Rasa Aman menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 30 Ayat 1 mendefinisikan rasa aman sebagai suatu hak yang diterima secara pribadi oleh manusia atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Indeks rasa aman digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dirasakan masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks rasa aman Provinsi Kalimantan Utara bersifat fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 62 hingga tahun 2023 mencapai 73,43.

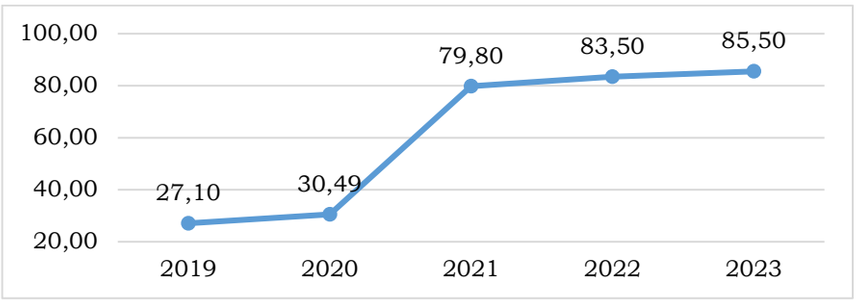
Tabel 2.62
Indeks Rasa Aman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Rasa Aman	Indeks	62,00	67,50	59,25	69,79	73,43

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara, 2024

3. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum atau IKKU merupakan instrumen dari implementasi penegakan Perda dan Perkada dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (tibumtranmas). Pada IKKU Provinsi Kalimantan Utara menggunakan tindak kejahatan yang dilaporkan bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi. Data tersebut menggambarkan situasi keamanan daerah/wilayah tersebut melalui pencatatan kejadian kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat. Data indeks ketentraman dan ketertiban menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2019 hingga 2023, indeks ketentraman dan ketertiban mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan nilai indeks tertinggi dengan nilai akhir 79,8.



Gambar 2.59.
Indeks Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2019-2023
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara, 2024

4. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks kerukunan umat beragama yang diatur berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 yaitu instrument atau alat pengukuran bagi capaian program kerukunan yang berlandaskan pada toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Dimensi pertanyaan dalam menciptakan indeks kerukunan umat beragama diperoleh dari 4 indikator dimensi toleransi, 7 indikator dimensi kesetaraan, dan 5 indikator dimensi kerjasama. Data indeks kerukunan umat beragama dilakukan melalui survei oleh Puslitbang Bimas, Diklat Kementrian Agama, dan instansi terkait. Skor indeks kerukunan umat beragama berada pada rentang 0 hingga 100, dimana nilai tertinggi menunjukkan kerukunan umat beragama pada wilayah yang diteliti sangat tinggi.

Perlu diketahui bahwa sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Utara adalah penduduk beragama Islam sebesar 73,35 persen pada tahun 2021. Diikuti oleh penduduk beragama protestan sebesar 19,87 persen; penduduk beragama Katolik sebesar 6,10 persen; penduduk beragama Buddha sebesar 0,61 persen; penduduk beragama Hindu sebesar 0,05 persen; dan penduduk beragama lain sebesar 0,01 persen. Keberagaman tersebut tentunya mendorong pembentukan kehidupan beragama yang maslahat dan kebudayaan maju sesuai dengan sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045.

Berdasarkan data indeks kerukunan umat beragama sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2023, terlihat bahwa tahun 2020 tidak terdapat data indeks KUB dikarenakan COVID-19. Indeks KUB pada tahun 2021 sebesar 78,28. Sementara itu, tahun 2022-2023, indeks KUB mengalami peningkatan menjadi 81,18. Peningkatan ini

disebabkan adanya peningkatan dimensi tolerasi. Namun ditahun 2024 menurun Kembali menjadi 78,94.

Tabel 2.63
Indeks Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Dimensi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	t.a.d	78,28	80,95	81,18	78,94

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kaltara, 2024

5. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah atau IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing yang merepresentasikan tingkat produktivitas pada provinsi dan kabupaten/kota. Konsep IDSD menggabungkan level makro pada institusi publik dengan level mikro pada perusahaan/industri. Penggabungan perspektif makro-mikro memiliki tiga faktor daya saing, yaitu faktor ketersediaan kebutuhan fundamental (basic requirement factors), faktor penguat efisiensi (*efficiency enhancers*), dan faktor inovasi dan kecanggihan (innovation and shopistication factors). Faktor daya saing tersebut dimasukkan pada 12 pilar Indeks Daya Saing Daerah. 12 pilar tersebut dielaborasikan oleh pengukuran IDSD, yaitu lingkungan pendukung (institusi, infrastruktur, adopsi TK, dan stabilitas ekonomi makro), sumber daya manusia (kesehatan dan keterampilan), pasar (pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar), dan ekosistem inovasi (dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi). Pengukuran IDSD distandarisasi dengan ukuran min-max dengan rentang skor 0 hingga 5 pada seluruh indikator.

Tabel 2.64
Indeks Daya Saing Daerah Kalimantan Utara Tahun 2022-2024

Provinsi	Lingkungan Pendukung				SDM				Pasar		Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Tahun 2022													
Nasional	4,14	2,91	3,57	3,05	3,76	3,73	2,68	3,73	2,66	1,31	5,00	2,61	3,26
Kalimantan Utara	4,46	2,95	3,89	3,22	4,00	3,90	1,81	4,71	2,74	0,30	5,00	1,25	3,19
Tahun 2023													
Nasional	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,01	3,44
Kalimantan Utara	4,55	1,94	3,98	3,79	3,97	3,92	1,81	4,53	1,54	4,06	3,30	1,81	3,26
Tahun 2024													
Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
Kalimantan Utara	4,36	2,53	3,58	4,32	3,98	4,10	1,65	3,51	2,65	4,13	2,18	2,15	3,26

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional 2024, Diolah

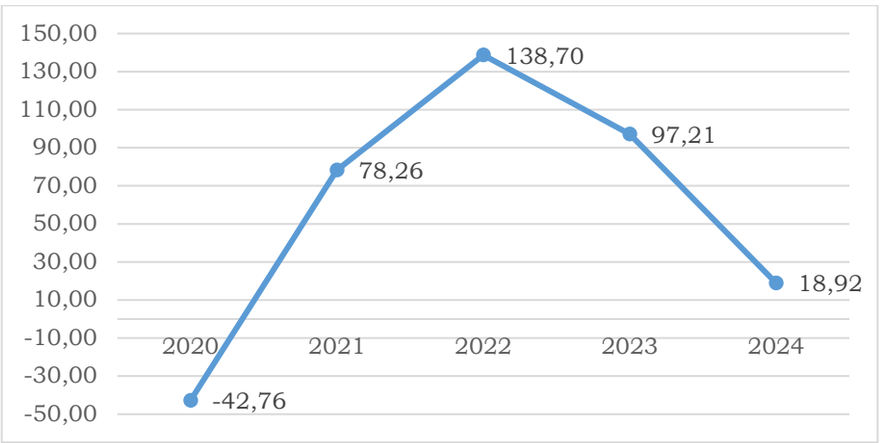
Capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu 3,19 poin menjadi 3,26 poin di tahun 2024. Capaian tersebut masih dikatakan cukup rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 3,43 poin di tahun 2024. Sebagian besar terdapat peningkatan capaian pilar IDSD di tahun 2024; pilar 4 (stabilitas ekonomi makro) sebesar 4,32 poin; pilar 6 (keterampilan) sebesar 4,10 poin; pilar 10 (ukuran pasar) sebesar 4,13 poin; dan pilar 12 (inovasi) sebesar 2,15 poin. Selain itu, masih banyak pilar yang berada dibawah capaian nasional seperti pilar 2 (infrastruktur), pilar 7 (pasar produk), pilar 9 (sistem keuangan), pilar 10 (ukuran pasar), pilar 11 dan 12 (kapabilitas inovasi).

Beberapa pilar terjadi penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya. Pilar 2 atau pilar infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas sarana dan prasana pendukung kegiatan ekonomi wilayah. IDSD pilar tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun lalu dan capaian yang rendah dibandingkan capaian nasional sebesar 2,53 poin. Selain itu, capaian pilar 2 dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan lainnya, Kalimantan Utara menempatkan posisi terakhir. Pilar selanjutnya adalah mengenai kesehatan berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat memiliki penurunan poin dibandingkan capaian tahun lalu menjadi 3,98 poin. Pilar 8 atau pilar mengenai pasar tenaga kerja yang menggambarkan kepentingan bisnis dan tenaga kerja mengalami penurunan poin dibandingkan tahun lalu menjadi 3,51 poin. Pilar 9 atau pilar mengenai sistem keuangan yang menggambarkan infrastruktur, institusi, dan pasar keuangan secara baik pada suatu daerah. Pilar 9 dengan capaian 2,65 poin menggambarkan sumber daya keuangan secara efisiensi dan mitigasi risiko atas krisis keuangan. Pilar terakhir yang mengalami penurunan yaitu dinamisme bisnis atau pilar 11 mengenai kemudahan kegiatan pasar sebesar 2,18 poin.

6. Pertumbuhan Investasi

Jumlah investasi di suatu daerah seringkali menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian secara makro. Pertumbuhan investasi diharapkan meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan industri pengolahan di wilayah tersebut. Pada grafik di bawah ini menunjukkan pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Utara yang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat selama

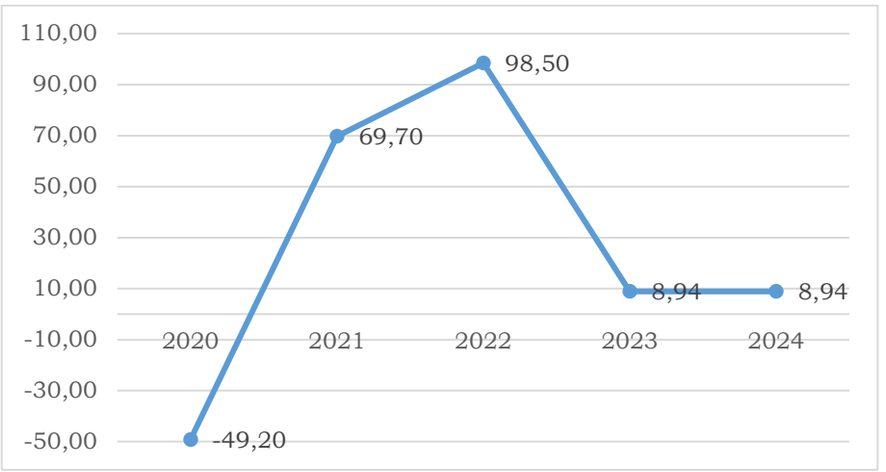
tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan sebesar -42,76 persen pertumbuhan minus ini diakibatkan guncangan pandemi Covid-19. Setelah tahun tersebut, terjadi perbaikan di tahun 2021 hingga 2022 berturut-turut sebesar 78,26 persen dan 138,7 persen. Namun, penurunan terjadi kembali di tahun 2024 menjadi 18,92 persen.



Gambar 2.60.
Grafik Pertumbuhan Investasi Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara 2024, Diolah

7. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN merupakan indikator yang menunjukkan besaran pertumbuhan nilai realisasi proyek di suatu daerah. Indikator ini dapat menjadi salah dari aspek yang menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah mampu mempertahankan tren investasi dan daya tarik atau potensi daerahnya. Kenaikan/penurunan nilai investasi tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah perusahaan PMDN saja yang berinvestasi pada tahun tertentu, melainkan skala perusahaan atau proyek kegiatan yang dilakukan juga sangat mempengaruhi besaran nilai investasi yang ditanamkan. Berikut grafik yang menunjukkan kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN di Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 2.61.
Grafik Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN
Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara 2024, Diolah

Kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN mengalami fluktuasi selama tahun 2020-2024 dengan kecederungan meningkat. Pada tahun 2020, nilai realisasi PMDN mencapai -49,20 persen. Capaian nilai realisasi di tahun 2020 merupakan capaian terendah sepanjang tahun 2020 hingga 2024 yang diakibatkan kondisi global yang mengalami pandemi Covid-19. Perbaikan kembali terjadi di tahun 2021 hingga 2022 tetapi mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 8,94 persen.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks reformasi birokrasi dapat didefisinikan sebagai indikator yang memberikan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja suatu birokrasi di instansi pemerintah. Indikator ini juga merupakan upaya untuk mewujudukan good governance, yang mana suatu pemerintah daerah dapat mencapai tingkat integritas dan kinerja yang tinggi. Oleh karena itu, apabila indeks reformasi birokrasi semakin tinggi, maka kinerja pemerintah juga semakin efektif, efisien, dan bebas KKN.

Tabel 2.65
Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	B	B	BB	A

Sumber: Rancangan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045

Berdasarkan tabel di atas indeks reformasi birokrasi pada tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 tidak mengalami perubahan yaitu memiliki nilai "B". Sementara itu, pada tahun 2023 nilai indeks reformasi birokrasi memiliki nilai "BB" dan Tahun 2024 nilai "A". Adanya hal tersebut, indeks reformasi birokrasi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa penerapan reformasi birokrasi sudah berjalan dengan optimal.

2. SAKIP

SAKIP merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat akuntabilitas suatu pemerintah. SAKIP juga digunakan untuk mengukur dan meninjau empat aspek utama tata kelola pemerintahan, antara lain perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi. Berdasarkan indeks nilai SAKIP, dari tahun 2020-2023, nilai SAKIP mengalami peningkatan terus menerus setiap tahunnya, nilai SAKIP di tahun 2023 sebesar 73,41 (BB), hal tersebut didukung adanya peningkatakan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Namun demikian terjadi sedikit penurunan nilai SAKIP pada tahun 2024 menjadi hanya 71,05 (BB).

Tabel 2.66
Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP	Nilai	71,07	72,13	73,08	73,41	71,05
Predikat	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB

Sumber: Rancangan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045

3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks pelayanan publik merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pelayanan publik di pemerintahan dan lembaga daerah. Indeks pelayanan publik memiliki beberapa aspek diantaranya adalah aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Berdasarkan tabel indeks pelayanan publik, tahun 2019-2022 mengalami kenaikan setiap tahunnya, tetapi di tahun 2023 indeks pelayanan publik mengalami penurunan yang signifikan menjadi 3,41. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal seperti belum optimalnya profesionalisme SDM dan keterbatasan sarana prasarana. Pelayanan publik Provinsi Kalimantan Utara belum sudah berjalan dengan optimal. Akan tetapi, perlu

melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan yang prima.

Tabel 2.67
Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,27	3,54	3,44	3,80	3,41
Predikat	Predikat	B-	B	B	B	B

Sumber: Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Utara, 2024

4. Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah dapat didefinisikan sebagai himpunan beberapa inovasi yang telah diciptakan suatu daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan. Indeks inovasi daerah digunakan untuk mengukur tingkat inovasi suatu daerah, indeks ini didasarkan pada dua aspek yaitu aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dan inovasi daerah. Pengukuran nilai indeks inovasi daerah terbagi menjadi empat kategorisasi dengan rentang skor yang telah ditentukan, kategorinya antara lain dengan rentang skor 0 termasuk dalam kategori tidak dapat dinilai, rentang skor 0,01-34,99 termasuk kategori kurang inovatif, rentang skor 35,00-60,00 termasuk kategori inovatif, dan rentang skor 60,01-100,00 termasuk kategori sangat inovatif.

Tabel 2.68
Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	Nilai	3.110	39,36	46,37	45,86	53,35

Sumber: Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Utara, 2024 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Pada tahun 2020 skala indeks inovasi daerah berbeda dengan tahun 2021-2024, tahun 2020 menggunakan skala 1-10.000. Pada tahun 2021-2022 nilai indeks inovasi daerah mengalami kenaikan yang signifikan yaitu dari 39,36 menjadi 46,37, nilai tersebut termasuk kategori inovatif, tetapi tahun 2023 nilai indeks inovasi daerah mengalami penurunan menjadi 45,86, masih termasuk kategori inovatif. Sedangkan di Tahun 2024 meningkat Kembali menjadi 53,35. Oleh karena itu, Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sebagai bagian dari strategi percepatan transformasi digital, Provinsi Kalimantan Utara juga telah menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berhasil meraih predikat Baik dengan skor indeks 2,83. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan sistem informasi, memperkuat tata kelola digital, serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Evaluasi ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara telah berada pada tingkat kematangan yang cukup hingga baik dalam pelaksanaan SPBE, meskipun masih terdapat ruang perbaikan, khususnya di aspek interoperabilitas dan arsitektur sistem. Hasil penilaian SPBE tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan Indeks Maturitas SPBE dengan predikat yang sangat baik. Secara rinci, Indeks Maturitas SPBE di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	Nilai	-	2,38	1,98	2,83	3,79
Predikat	Predikat	-	Cukup	Cukup	Baik	Sangat Baik

Sumber: Rancangan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045

2.1.5. Layanan Urusan Wajib

A. Pendidikan

Urusan pendidikan memiliki 14 indikator yang menjadi wewenang wilayah provinsi. Indikator tersebut meliputi partisipasi pendidikan menengah, rasio guru, angka melek huruf, dan kualifikasi guru. Berikut indikator kinerja pembangunan urusan pendidikan.

Tabel 2.70
Indikator Urusan Pendidikan Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka partisipasi kasar SMA Sederajat	Persen	98,31	96,55	97,57	97,78	95,36
2.	Angka pendidikan yang ditamatkan	Persen	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	
3.	Angka partisipasi murni SMA sederajat	Persen	64,75	65,37	65,65	66,7	67,9
4.	Angka partisipasi sekolah SMA sederajat	Persen	76,08	76,5	76,5	77,03	77,73
5.	Angka putus sekolah SMA dan smk	Persen	t.a.d	19,3	11,2	20,1	
6.	Angka kelulusan SMA sederajat	Persen	99,848	99,794	99,87	99,83	99,856
7.	Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	
8.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persen	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	
9.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Pendidikan menengah	Per 10.000 penduduk (16-19 tahun)	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	
10.	Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan menengah	Per 10.000 siswa	865,86	921,04	844.08	863,85	
11.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata sekolah Pendidikan menengah	Per 10.000 Siswa	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	
12.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	99,6	99,6	99,6	99,6	98,78
13.	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	96,7	96,5	97,7	97,8	
14.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	t.a.d	94,45	97,25	97,52	

Sumber: Kalimantan Utara dalam Angka 2019-2024 diolah; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara diolah; Kanwil Kemenag Kalimantan Utara diolah dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Selain 14 indikator yang telah disebutkan di atas terdapat juga Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk mengukur kualitas Pendidikan. Indikator SPM didasarkan pada Permendikbudristek yang mengatur tentang SPM Pendidikan.

Tabel 2.71
Indikator SPM Pendidikan

No.	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
1.	Kemampuan Literasi SMA	Persen	62,54	63,38	70,44	
2.	Kemampuan Literasi SMK	Persen	60,33	60,52	67,08	
3.	Kemampuan Literasi SDLB	Persen	63,44	t.a.d	75,51	80,39
4.	Kemampuan Literasi SMPLB	Persen	54,61	62,48	57,07	80,98
5.	Kemampuan Literasi SMALB	Persen	62,53	60,77	57,03	

No.	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
6.	Kemampuan Numerasi SMA	Persen	49,98	51,89	58,33	
7.	Kemampuan Numerasi SMK	Persen	49,40	50,26	56,38	
8.	Kemampuan Numerasi SDLB	Persen	42,47	t.a.d	75,26	74,17
9.	Kemampuan Numerasi SMPLB	Persen	53,27	62,80	61,26	78,95
10.	Kemampuan Numerasi SMALB	Persen	50,27	58,71	61,08	
11.	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Persen	49,00	88,87	88,82	86,65
12.	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Persen	75,00	75,00	61,66	70,34
13.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18	Persen	76,53	76,55	77,03	77,73
14.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas	Persen	37,23	19,31	73,92	73,93
15.	Iklim Inklusivitas SMA	Persen	66,69	56,21	58,83	59,09
16.	Iklim Inklusivitas SMK	Persen	64,94	55,81	57,09	57,17
17.	Iklim Inklusivitas SDLB	Persen	68,00	t.a.d	59,95	67,33
18.	Iklim Inklusivitas SMPLB	Persen	86,40	65,09	61,66	82,5
19.	Iklim Inklusivitas SMALB	Persen	71,40	71,06	68,66	80,5
20.	Iklim Keamanan SMA	Persen	80,96	70,31	73,14	71,7
21.	Iklim Keamanan SMK	Persen	78,71	68,73	71,31	70,37
22.	Iklim Keamanan SDLB	Persen	76,80	t.a.d	82,2	71,67
23.	Iklim Keamanan SMPLB	Persen	76,40	75,12	70,5	82
24.	Iklim Keamanan SMALB	Persen	76,90	81,29	78,6	78,50
25.	Iklim Kebinekaan SMA	Persen	74,12	68,98	75,46	72,65
26.	Iklim Kebinekaan SMK	Persen	69,57	68,12	75,24	72,15
27.	Iklim Kebinekaan SDLB	Persen	62,67	t.a.d	72,63	73,67
28.	Iklim Kebinekaan SMPLB	Persen	60,40	69,65	68,39	81
29.	Iklim Kebinekaan SMALB	Persen	79,10	72,68	71,64	77,5

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, 2024 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/Paket C selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan selama tahun 2021-2023. Namun, nilai APM tersebut masih di bawah 80% yang termasuk ke dalam kelompok pratama. Artinya, perlu ada intervensi untuk meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat terutama bersekolah tepat waktu sesuai usia.

Angka partisipasi sekolah tingkat SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah. Meskipun hampir selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, nilai angka partisipasi sekolah tersebut masih berada pada kelompok pratama karena di bawah 80%. Partisipasi yang masih tergolong rendah tersebut salah satunya karena minat sekolah yang rendah di masyarakat akibat pemikiran lebih baik bekerja daripada bersekolah terutama laki-laki.

Angka putus sekolah SMA/SMK dihitung berdasarkan jumlah siswa yang putus sekolah pada SMA dan SMK baik swasta maupun negeri. Angka putus sekolah mengalami fluktuasi dengan nilai akhir angka putus sekolah sebesar 20,8%. Kenaikan angka putus sekolah disinyalir akibat susahnya akses ke sekolah menengah dengan ditambah kemampuan ekonomi yang terbatas.

Rasio guru terhadap murid mengalami fluktuasi dengan nilai terbesar pada tahun 2021 sebesar 921,04 guru per 10.000 murid. Nilai tersebut turun pada tahun 2022 dan naik lagi menjadi 863,85 guru per 10.000 murid. Permasalahan ketersediaan guru disebabkan karena adanya mutasi guru yang belum seharusnya mutasi. Penyebab mutasi tersebut salah satunya karena infrstruktur yang terbatas.

Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun menunjukkan nilai yang stagnan terutama tah un 2020-2023 dengan nilai 99,6%. Capaian tersebut masih berada di bawah capaian nasional dari tahun 2020-2023. Jika dilihat secara makro angka melek huruf mengalami peningkatan dari tahun 2020-2023 dengan nilai dari 96,4% menjadi 97,8%. Akan tetapi, niilai tersebut masih berada di bawah capaian nasional yang berada di kisaran 98%.

Pada tahun 2021-2023 guru yang bersertifikasi D-IV atau S1 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari anjuran dan himbauan kepada pihak sekolah supaya segera merestrukturisasi guru yang ada.

Berdasarkan data SPM di tabel diketahui untuk kualitas pendidikan yang ditinjau dari kemampuan literasi dan numerasi khususnya untuk pendidikan menengah dan sekolah luar biasa (SLB) cenderung meningkat pada tahun 2021-2024 kecuali kemampuan literasi SMALB yang mengalami penurunan. Namun, nilai tersebut masih berada di bawah nilai 75% kecuali kemampuan literasi dan

numerasi SDLB. Artinya, masih perlu upaya peningkatan untuk meningkatkan kecakapan siswa dalam hal literasi dan numerasi.

APS untuk penyandang disabilitas umur 4-18 tahun mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Meskipun secara nilai meningkat, jika dilihat kategorinya nilai tersebut masih termasuk pratama karena di bawah 80%. Artinya, perlu ada upaya untuk meningkatkan partisipasi sekolah bagi penduduk penyandang disabilitas.

Indikator tingkat penyerapan lulusan SMK mengalami peningkatan selama tahun 2021-2023. Indikator tersebut sudah termasuk ke dalam golongan tinggi artinya tingkat penyerapan lulusan SMK di Kalimantan Utara sudah sangat baik. Akan tetapi, jika disandingkan dengan indikator berikutnya yaitu tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK mengalami penurunan pada rentang waktu yang sama. Tingkat kepuasannya berada di tingkat cukup pada tahun 2023 padahal tahun-tahun sebelumnya telah di tingkat memadai.

Dalam rentang 2021-2024, iklim inklusivitas pendidikan menengah dan SLB mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024, hanya iklim inklusivitas SMALB yang termasuk ke dalam membudaya. Sedangkan untuk iklim inklusivitas yang lain masih merintis. Sedangkan, untuk iklim kemanan pendidikan menengah dan SLB pada tahun 2021-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024, iklim keamanan untuk pendidikan menengah dan SLB sudah termasuk kategori aman. Iklim kebinekaan pendidikan menengah dan SLB pada tahun 2021-2024 cenderung meningkat untuk semua indikator kecuali iklim kebinekaan SMALB yang mengalami penurunan. Pada tahun 2024, iklim kebinekaan pendidikan menengah dan SLB sudah termasuk membudaya.

Berdasarkan data di atas, urusan pendidikan masih menghadapi permasalahan di antaranya masih rendahnya partisipasi sekolah pada pendidikan tingkat menengah, meningkatnya angka putus sekolah, menurunnya rasio guru per satuan murid, serta masih adanya penduduk yang buta aksara. Ditinjau dari SPM pendidikan, beberapa yang menjadi masalah adalah belum tercapainya inklusifitas pendidikan, tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK yang masih rendah, dan kemampuan literasi serta numerasi yang belum optimal.

B. Kesehatan

Urusan kesehatan memiliki 50 indikator yang meliputi fasilitas kesehatan, kesehatan ibu dan anak, penyakit menular. Berikut indikator kinerja pembangunan urusan kesehatan.

Tabel 2.72
Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup	Per 1.000 Kelahiran Hidup	10,60	10,20	11,90	12,10	11,403
2.	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	Per 1.000 Kelahiran Hidup	12,02	10,85	0,75	1,21	12,35
3.	Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	Per 1.000 Kelahiran Hidup	7,4	7,3	9,02	9,6	8,91
4.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	148,19	223,2	136,46	156,76	58,475
5.	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Unit per Satuan Balita	10,57	11,73	12,75	12,24	
6.	Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk	Per 1.000 Penduduk	0,081	0,082	0,082	0,079	
7.	Rasio Poliklinik per Satuan Penduduk	Per 1.000 Penduduk	t.a.d	0,065	0,064	0,071	
8.	Rasio Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk	Per 1.000 Penduduk	0,021	0,235	0,231	0,227	
9.	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	Per 1.000 Penduduk	1,45	1,6	1,5	2,19	2,15
10.	Rasio Dokter Umum per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	41	50	53	54	
11.	Rasio Dokter Spesialis per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	16,1	20	21	21	
12.	Rasio Dokter Gigi per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	8	9,9	10,3	11,6	
13.	Rasio Perawat per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	232,6	340,5	342,5	337,1	
14.	Rasio Bidan per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	134,9	162	166,9	156,8	
15.	Rasio Kesehatan Lingkungan per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	15,2	16,8	16	16,	
16.	Rasio ATLM per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	18	22,48	26,5	28,2	
17.	Rasio Apoteker per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	25,07	25,93	35,1	34,2	
18.	Rasio Kesehatan Masyarakat per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	34,5	37,7	34,4	36,9	
19.	Rasio Sanitarian/Gizi per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	14,9	15,8	16,1	18,06	
20.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	Persen	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	
21.	Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Persen	98,78	92,02	92,2	91,93	

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
22.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	72,53	67,4	83,89	76,33	
23.	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	0,3	0,23	0,34	0,24	0,19
24.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	Persen	88,32	95,87	97,67	99,36	97,74
25.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	75,9	68,5	88,5	76,4	59,7
26.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Per 100.000 Peenduduk	1,03	1,4	3,68	4,47	7,13
27.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	12,09	16,25	67,27	61	72,01
28.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	64	44	56,91	68,26	
29.	Tingkar prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	
30.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	13	7	12	14	
31.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	64	44	56,9	68,26	
32.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	60	75,08 (TBC SO) 18,18 (TBC RO)	79,8 (TBC SO) 20 (TBC RO)	77,81 (TBC SO) 41,18 (TBC RO)	
33.	Insindent Rate DBD	Per 100.000 Penduduk	73,38	24,57	183,11	138	98,98
34.	Penderita diare yang ditangani	Persen	88,2	44,03	65,69	62,56	13.889
35.	Angka kejadian malaria	Per 100.000 penduduk	0,09	0,09	0,1	0,2	0,19
36.	Tingkat kematian akibat malaria	Kasus	0	0	1	1	0,73
37.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total pupulasi	Per 100 dari total populasi	0,022	0,018	0,024	0,025	
38.	Insidensi HIV	Per 1.000 Penduduk yang tidak terinfeksi HIV	0,22	0,18	0,24	0,25	0,29
39.	Cakupan kunjungan bayi	Persen	110,22	86,02	100,19	97,05	
40.	Cakupan Puskesmas	Persen	114	116	116	116	116
41.	Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	217	214	223	223	223
42.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Persen	93,69	87,7	88,24	84,6	85,08
43.	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang	Persen	t.a.d	2,62	7,87	8,34	6,14

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Ditangani						
44.	Cakupan Pelayanan Anak Balita	Persen	51,2	51,5	77,05	74,86	87,75
45.	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	Persen	72,45	100	95,69	100	67,65
46.	Cakupan pelayanan gawat darurat evel 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Rumah sakit kelas D	7	7	9	11	
47.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epiemiologi < 24 jam	Persen	85	85	90	93	
48.	Cakupan puskesmas yang memiliki ketersediaan minimal 80% dari obat indikator yang ditetapkan oleh Kemenkes pada saat dilakukan pemantauan.	Persen	100	98.2	96.55	100	
49.	Cakupan distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan ke fasilitas kesehatan	Persen	100	100	100	100	
50.	Cakupan kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	89	93,5	102,4	t.a.d	

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2024; Profil Kesehatan Indonesia 2018-2022 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025.

Angka kematian bayi, balita, neonatal, dan ibu berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2020-2024. Beberapa tren yang berbeda terjadi pada tahun 2020- 2021 karena adanya Covid-19 sehingga akses ke fasilitas kesehatan lebih sulit. Sedangkan pada tahun 2024. Peningkatan tersebut diakibatkan karena terbatasnya akses ke fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan yang terbatas, serta faktor ekonomi. Permasalahan lain yang menyangkut kesehatan ibu dan anak adalah masih minimnya kunjungan ke failitas kesehatan oleh ibu dan anak. Permasalahan ini dapat dilihat dari cakupan kunjungan ibu hamil K4 dan cakupan kunjugan bayi (KN1) yang mengalami penurunan pada tahun 2020-2024.

Rasio posyandu cenderung meningkat dari tahun 2020-2023. Meskipun pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 12,75 menjadi 12,24. Sedangkan, untuk rasio puskesmas dan puskesmas pembantu befluktuasi pada tahun 2020-

2023. Penurunan terjadi pada tahun 2023 baik untuk puskemas maupun puskesmas pembantu. Rasio poliklinik mengalami cenderung meningkat dari tahun 2020 sampai 2023. Pada tahun 2023, rasio poliklinik sebesar 0,071 per 1.000 penduduk. Untuk rasio rumah sakit mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2024 rasio rumah sakit Kalimantan Utara adalah sebesar 2,15 per 1.000 penduduk.

Rasio dokter baik untuk dokter umum, spesialis, maupun gigi mengalami kecenderungan meningkat dari tahun 2020-2023. Peningkatan rasio dokter ini akan berdampak baik bagi pelayanan kesehatan di Kalimantan Utara meskipun jika dilihat nilainya masih sangat minim sehingga masih perlu peningkatan jumlah dokter. Pada tahun 2023, rasio dokter umum adalah 54 dokter per 100.000 penduduk, rasio dokter spesialis sebesar 21 dokter per 100.000 penduduk dan rasio dokter gigi sebesar 11,6 dokter per 100.00 penduduk.

Persalinan di fasilitas kesehatan mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun pada tahun 2020-2023. Penurunan persalinan di fasilitas kesehatan ini karena masyarakat lebih memilih untuk melahirkan di rumah masing-masing dibantu bidan atau dukun beranak. Persentase balita gizi buruk mengalami kecenderungan menurun pada tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan upaya pemenuhan gizi yang baik untuk balita di Kalimantan Utara. Pemenuhan gizi juga menjadi bagian penting dalam upaya penurunan stunting di Kalimantan Utara.

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2020-2022. Pada tahun 2020 sebesar 75,9% anak usia 1 tahun telah diimunisasi campak, nilai tersebut meningkat sampai pada tahun 2020. Pada tahun 2021, persentase tersebut sempat menurun menjadi 68,5% dan naik lagi pada tahun berikutnya. Pada tahun 2024, persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Kalimantan Utara sebesar 59,7%. Non polio AFP rate mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2020 nilainya sebesar 1,03 dan pada tahun 2024 sebesar 7,13

Cakupan penemuan kasus TB mengalami peningkatan pada tahun 2020-2023. Hal tersebut sejalan dengan proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi dalam program DOTS. Upaya pengobatan melalui

program DOTS juga dilakukan dan menghasilkan peningkatan proporsi kasus TB yang diobati dan sembuh pada tahun 2020-2023. Terdapat perbedaan perhitungan untuk proporsi kasus TB diobati dan sembuh antara tahun 2020 dan 2021-2023. Sayangnya, peningkatan juga terjadi pada kasus kematian akibat TB yang sebesar 14 kasus kematian per 100.000 pada tahun 2023 dari yang bernilai 12 kasus kematian per 100.000 penduduk pada tahun 2022.

Jumlah kasus malaria mengalami peningkatan. Hal tersebut dilihat dari angka kejadian malaria yang mengalami peningkatan dari tahun 2020-2023. Bersamaan dengan meningkatnya angka kejadian malaria, jumlah kematian yang ditimbulkan juga mengalami peningkatan pada rentang tahun yang sama. Kalimantan Utara saat ini masih belum mendapatkan status eliminasi malaria karena masih ada dua kabupaten yang belum berstatus eliminasi malaria.

Cakupan kepersertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) mengalami peningkatan dari tahun 2020-2022. Pada tahun 2020 yaitu sebesar 89% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 102,4 %.

Data SPM kesehatan hanya ada pada tahun 2022 yang bersumber dari rencana aksi penerapan SPM tahun 2023-2027. Indikator pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi sebesar 1.700 orang terlayani serta pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi sebesar 1.000 orang terlayani.

Berdasarkan data di atas, dua masalah utama urusan kesehatan yakni menurunnya kualitas kesehatan ibu dan anak serta meningkatnya kasus penyakit menular.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pekerjaan Umum

Pada urusan pekerjaan umum terdapat 12 indikator yang menjadi kewenangan provinsi. Urusan pekerjaan umum antara lain mencakup aksesibilitas wilayah, ketersediaan dan pemerataan kondisi infrastruktur jalan, irigasi, drainase, sanitasi, air bersih, listrik, serta telekomunikasi.

Tabel 2.73
Indikator Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Aksesibilitas	Indeks	0,0113	0,0113	0,0113	0,0113	0,0113
2.	Proporsi panjang jalan dalam kondisi Baik	Persen	9,26	10,63	14,07	12,94	13,69
3.	Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	Persen	14,30	15,31	14,97	14,15	15,06
5.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	(Km/jiwa)	1,148	1,214	1,194	1,171	1,167
6.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	77,2	82,09	79,8	82,22	84,22
7.	Persentase irigasi dalam kondisi baik	Persen	t.a.d.	t.a.d.	42,59	17,89	15,39
8.	Rasio jaringan irigasi	Persen	t.a.d.	t.a.d.	14,94	61,39	80,00
9.	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	87,9	89,5	86,8	89,96	90,19
10.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan, dan perdesaan	Persen	82,35	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	90,19
11.	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	t.a.d.	t.a.d.	19,54	21,04	21,04
12.	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persen	t.a.d.	55,29	63,50	74,65	85,62

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara, 2024, diolah

Berdasarkan tabel di atas, terdapat empat indikator terkait kondisi infrastruktur jaringan jalan. Panjang jalan dalam kondisi baik meningkat dari 9,26 persen pada tahun 2019 hingga menjadi 14,07 persen pada tahun 2021, tetapi kemudian menurun 12,94 persen pada tahun 2022 karena meningkatnya anggaran yang berfokus pada pemeliharaan jalan provinsi dan pada tahun 2023 sedikit mengalami peningkatan menjadi 13,69 persen.

Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap menunjukan keadaan yang fluktuatif dengan tren cenderung meningkat. Pada tahun 2019-2020, terjadi kenaikan proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap dari 14,30 persen menjadi 15,31 persen karena meningkatnya jumlah panjang jalan dengan kondisi baik. Kemudian terjadi penurunan proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap dari nilai 15,31 persen

pada tahun 2020 menjadi 14,15 persen pada tahun 2022 karena alokasi dana perbaikan jalan akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2023 terjadi kenaikan proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap menjadi 15,06 persen yang disebabkan adanya peningkatan anggaran terhadap pemeliharaan jalan provinsi.

Proporsi panjang jalan terhadap jumlah penduduk menunjukan adanya sedikit penurunan pada tahun 2019-2023 dari nilai indeks 1,14 pada tahun 2019 menjadi 1,17 di tahun 2023. Hal tersebut menunjukan meningkatnya jumlah penduduk belum diimbangi dengan peningkatan kuantitas panjang jalan sehingga rasio tersebut mengalami penurunan.

Belum adanya peningkatan kuantitas panjang jalan dikarenakan belum adanya pembaruan terhadap Surat Keputusan (SK) terkait jaringan jalan sehingga jumlah jalan yang digunakan pada tahun 2019-2023 berjumlah tetap setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2019-2020 proporsi panjang jalan terhadap jumlah penduduk mengalami kenaikan karena adanya perbedaan baseline penggunaan proyeksi kependudukan.

Kemudian terdapat 5 indikator terkait ketersediaan pelayanan dasar yaitu persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio jaringan irigasi, persentase irigasi dalam kondisi baik, persentase penduduk berakses air minum, dan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan, dan perdesaan. Indikator persentase rumah tinggal bersanitasi di Provinsi Kalimantan Utara menunjukan tren yang meningkat pada tahun 2019-2023 dengan nilai akhir sebesar 84,22 persen. Nilai tersebut berada di atas rata-rata nasional yaitu 82,36 persen.

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 42,59 persen pada tahun 2021 menjadi 15,39 persen pada tahun 2023. Hal tersebut disebabkan terbatasnya anggaran operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi. Sedangkan, rasio jaringan irigasi menunjukan adanya peningkatan yang signifikan dari 14,94 persen pada tahun 2021 menjadi 80 persen pada tahun 2023. Hal tersebut disebabkan menurunnya luasan lahan fungsional yang menjadi variabel pembagi dalam perhitungan. Penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan tata guna lahan menjadi perkebunan sawit dan berkurangnya jumlah petani aktif.

Kondisi penduduk berakses air minum menunjukan kondisi fluktuatif dengan kecenderungan tren meningkat dari 82,35 persen pada tahun 2019 menjadi 90,19 persen pada tahun 2023. Meskipun tren menunjukan adanya peningkatan, kondisi akses air minum masih berada di bawah rata-rata nilai nasional selama 6 tahun terakhir. Selain itu, kondisi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak pada perkotaan maupun perdesaan pada tahun 2019 yaitu hanya sebesar 82,35 persen dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 90,19 persen.

Pada tahun 2021-2023, persentase area kawasan kumuh mengalami peningkatan dari 19,54 di tahun 2021 menjadi 21,04 di tahun 2023. Data persentase area kawasan kumuh pada periode tahun 2019-2020 tidak tersedia karena belum terdapat SK penetapan kawasan kumuh sehingga belum dilakukan pendataan mengenai luasan area kawasan kumuh di Provinsi Kalimantan Utara.

Kondisi pengurangan sampah di perkotaan menunjukan tren meningkat dari 55,29 persen di tahun 2020 menjadi sebesar 85,62 persen di tahun 2023. Hal ini menunjukan pengelolaan sampah di perkotaan mengalami perbaikan setiap tahun dengan tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.

Dengan demikian, masih terdapat beberapa permasalahan. Pertama, terdapat tren penurunan persentase panjang jalan mantap dan belum tercapainya target 90% jalan mantap kewenangan provinsi yang ditetapkan pemerintah pusat. Selain itu, terjadi peningkatan persentase area kawasan kumuh dan kondisi akses air minum dan sanitasi yang belum optimal karena belum memenuhi target nasional yaitu 100 persen. Kondisi jaringan irigasi juga belum memadai karena menurunnya jaringan irigasi akibat pemeliharaan yang tidak terlaksana. Jaringan irigasi di Kalimantan Utara didominasi oleh irigasi rawa sehingga terdapat sedimentasi yang memerlukan pengelolaan lebih oleh petani. Kurangnya pembinaan terhadap petani aktif menyebabkan berkurangnya jumlah petani aktif karena beralih menjadi petani sawit.

Dari segi pemenuhan SPM terhadap urusan pekerjaan umum, terdapat dua indikator yang perlu dipenuhi. Untuk indikator pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota pada tahun 2022 telah tercapai sebanyak 403.058 orang dan untuk penyediaan

pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota telah tercapai 128.003 orang pada tahun 2022.

2. Penataan Ruang

Pada urusan penataan ruang terdapat enam indikator yang menjadi kewenangan provinsi. Urusan penataan ruang mencakup pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dan ketaatan terhadap RTRW.

Tabel 2.74
Indikator Urusan Penataan Ruang Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Rasio	t.a.d.	0,876	t.a.d.	0,878	t.a.d

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara, 2024, diolah

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat indikator yang tidak memiliki data yang disebabkan tidak adanya data pada level provinsi yaitu pada indikator rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB dan ruang publik yang berubah peruntukannya. Kemudian terdapat indikator yang belum tersedia karena sedang disusun. Terdapat dua indikator yang mengalami kenaikan terkait lahan tutupan hijau yaitu luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotan yang dihitung dari data Kota Tarakan dan rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman terdapat 8 indikator yang menjadi kewenangan provinsi. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman terkait dengan ketersediaan dan kondisi prasarana sarana dan utilitas (PSU), rumah tidak layak huni, backlog perumahan, dan penyediaan perumahan untuk MBR.

Tabel 2.75
Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio rumah layak huni	Rasio	t.a.d	0,612	0,614	0,615	0,616
2.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	t.a.d	t.a.d	0,011	0,012	0,013
3.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	t.a.d	t.a.d	2,30	2,71	4,67

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara, 2024, diolah

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat empat indikator yang belum tersedia data. Kemudian, terdapat empat data indikator yang memiliki tren kenaikan yaitu rasio rumah layak huni, cakupan ketersediaan rumah layak huni, persentasi lingkungan permukiman kumuh, dan persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Dari indikator tersebut, menunjukan masih adanya permasalahan terkait permukiman kumuh di Provinsi Kalimantan Utara terutama pada kawasan perkotaan.

Kemudian, dari segi pemenuhan SPM terhadap urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, terdapat dua indikator yang perlu dipenuhi. Untuk indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layah huni bagi korban bencana daerah kota pada tahun 2022 telah tercapai sebanyak 0 orang dan untuk fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi telah tercapai 5 orang pada tahun 2022.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menggambarkan mengenai kondisi pelayanan ketertiban, ketentraman, wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat terhadap bencana. Urusan tersebut antara lain indikator cakupan petugas linmas, penyelesaian pelanggaran K3, pelayanan bencana kebakaran, kegiatan pembinaan politik, dan kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan. Berikut indikator kinerja pembangunan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat selama tahun 2019 hingga 2023.

Tabel 2.76
Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	Persen	4,6	4,55	4,55	4,55	4,55
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Kentetraman, Keindahan)	Persen	100	100	100	100	100/100
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	100	100	100	100
5	Persentase penegakan PERDA	Persen	8,30	12,50	25	75	100
6	Cakupan ketentraman dan ketertiban Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100
7	Rasio jumlah polisi pamong praja	Per10000 penduduk	164	186	183	184	184
8	Cakupan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100
9	Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	Persen	85,42	87,51	89,58	91,67	93,75
10	Persentase pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat	Persen	82	84	86	88	90
11	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	4	5	2	5	3
12	Persentase pembinaan partai politik dan koordinasi kelembagaan pemerinta	Persen	46,15	46,15	46,15	46,15	46,15
13	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	Kegiatan	1	1	1	1	1
14	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	Persen	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	84.732
15	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat	Persen	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	98

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	pelayanan tanggap darurat						
16	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persen	t.a.d	100	100	100	t.a.d

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2024

Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) mengalami penurunan di tahun 2020. Penurunan ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia, yang mana idealnya linmas di satu desa yaitu berjumlah 10 orang, sedangkan saat ini satu desa hanya berjumlah lima linmas. Selain itu, penurunan tren cakupan linmas juga disebabkan beberapa kendala seperti regulasi dan anggaran, saat ini ada beberapa daerah yang anggarannya dibebankan oleh dana desa, hal ini telah disesuaikan dengan kebijakan daerah. Salah satu daerah yang anggarannya sudah dibebankan dana desa adalah Kabupaten Malinau. Meskipun, indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 100 persen dari tahun 2019-2023, penyelesaian pelayanan K3 belum berjalan dengan optimal dikarenakan kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan K3. Selain itu, indikator persentase penegakan perda dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 100 persen, tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal karena belum optimalnya sumber daya manusia secara kuantitas maupun kualitas dalam penegakan perda.

Rasio jumlah pamong praja bersifat fluaktuatif, yang mana pada tahun 2021 mengalami penurunan dan tahun 2022 hingga 2023 mengalami peningkatan lagi menjadi 184. Penurunan tahun 2021 dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti kendala regulasi yang tidak boleh melakukan pengangkatan tenaga honorer. Saat ini jumlah Polisi Pamong praja berjumlah 185 orang, dimana 40 orang sebagai pegawai tetap, 145 orang sebagai honorer. Selanjutnya, indikator mengenai cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat dan persentase pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, yang mana cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat tahun 2023 sebesar 93,75 persen, sedangkan persentase pemahaman

wawasan kebangsaan masyarakat tahun 2023 sebesar 90 persen. Akan tetapi, indikator pembinaan partai politik dan koordinasi kelembagaan cenderung menurun, hal ini disebabkan karena masih belum optimalnya pembinaan partai politik dan koordinasi kelembagaan serta masih masih rendahnya masyarakat yang berpartisipasi dalam politik.

Dengan demikian pada urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan mengenai belum optimalnya cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas), belum optimalnya sumber daya manusia dalam memberikan layanan K3 dan penegakan perda, dinamika regulasi terkait pengangkatan tenaga honorer, dan belum optimalnya pembinaan partai politik dan koordinasi kelembagaan serta masih masih rendahnya masyarakat yang berpartisipasi dalam politik.

Dari segi pemenuhan SPM terhadap ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, terdapat satu indikator yang perlu dipenuhi. Untuk indikator jumlah orang yang terlayani pada tahun 2022 telah tercapai sebanyak 62 orang.

F. Sosial

Urusan sosial memiliki 12 indikator yang meliputi bantuan untuk PPKS, panti sosial, serta bantuan untuk kebencanaan. Berikut indikator kinerja pembangunan urusan sosial.

Tabel 2.77
Indikator Urusan Sosial Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	Persen	t.a.d	29,08	43,60	84,25	68,26
2.	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	t.a.d	t.a.d	100	100	100
3.	Persentase penurunan PPKS	Persen	t.a.d	t.a.d	71,78	20,52	-8,86
4.	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	t.a.d	29,08	43,60	84,25	68,26
5.	Persentase PPKS lainnya diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	t.a.d	29,08	43,60	84,25	68,26

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
6.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	0	0	0	0	0
7.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	100	100	100	100	100
8.	Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Unit	0	0	0	15	16
9.	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi	Unit	1	31	31	31	32

Sumber: Dinas Sosial Provnsi Kalimantan Utara 2024

Terdapat dua klasifikasi dalam membicarakan PPKS yaitu di dalam panti dan di luar panti. Data untuk PPKS yang dibantu di luar panti sama dengan PPKS yang mendapatkan bantuan sosial. Kedua indikator tersebut menunjukkan peningkatan yang mengindikasikan semakin meningkatnya penerimaan bantuan sosial. Sedangkan, PPKS yang tertangani merupakan PPKS yang ada di dalam panti yan nilainya selalu 100%.

Semua panti di Provinsi Kalimantan Utara telah menyediakan sarana pelayanan kesehatan sosial dari tahun 2019-2023. WKSBM menunjukkan pertumbuhan pada tahun 2022 dan 2023. Idealnya WKSBM ada di setiap desa/kelurahan sehingga jumlah 16 unit di tahun 2023 masih jauh dari kata ideal untuk jumlah WKSBM. Begitu juga untuk jumlah panti, terjadi kenaikan jumlah panti sosial. Peningkatan tersebut dinilai masih kurang lantaran saat ini belum ada rumah singgah untuk penanganan gelandangan, pengemis, pengamen, dll. Selain itu, jumlah panti jompo untuk saat ini yang hanya ada satu unit dinilai kurang bisa menangani naiknya jumlah penghuni panti. Saat ini belum ada panti terpadu yang dilengkapi balai pelatihan. Hal ini dimaksudkan supaya penghuni panti mendapatkan keterampilan sehingga bisa melakukan kegiatan yang produktif.

Berdasarkan data dari tabel, permasalahan sosial di antaranya adalah belum sepenuhnya PPKS yang mendapatkan bantuan sosial terutama di luar panti, jumlah WKSBM belum ideal, dan masih sedikitnya panti untuk mengakomodasi luasnya Provinsi Kalimantan Utara.

Dari segi pemenuhan SPM terhadap urusan sosial, terdapat empat indikator yang perlu dipenuhi. Namun, hanya terdapat data pada tahun 2022 untuk indikator tersebut. Untuk indikator rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti telah tercapai sebanyak 9 orang, indikator rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti telah tercapai sebanyak 351 orang, indikator rehabilitasi sosial dasar lansia terlantar di dalam panti telah tercapai sebanyak 38 orang, dan indikator rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti telah tercapai sebanyak 1.148 orang.

2.1.6. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

A. Tenaga Kerja

Urusan ketenagakerjaan menggambarkan kondisi tenaga kerja dan pelayanan ketenagakerjaan dari sisi perusahaan. Indikator urusan ketenagakerjaan ini adalah angka sengketa yang dialami, penyelesaian kasus dengan Perjanjian Bersama (PB), besaran pencari kerja, perusahaan yang menerapkan norma K3, banyaknya tenaga kerja terdaftar jamsostek, perselisihan buruh terhadap kebijakan daerah, pemeriksaan perusahaan, pengujian peralatan di perusahaan, pelatihan kompetensi, masyarakat, dan kewirausahaan yang didapatkan oleh tenaga kerja, serta rasio lulusan. Berikut indikator kinerja pembangunan urusan ketenagakerjaan selama tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2.78
Indikator Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kasus	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.
2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	127	114	154	62	
3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	730	1.658	2.013	1.669	2.135

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Keselamatan dan perlindungan	Perusahaan	72	28	90	60	133
5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	33,97	34,93	49,35	61,40	
6.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	
7.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Persen	39,93	38,96	27,58	10,41	
8.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Unit	74	668	1.131	1.051	
9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan berbasis pelatihan kompetensi	Tenaga Kerja	634	1.222	2.832	2.431	4.467
10.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan berbasis pelatihan masyarakat	Tenaga Kerja	100	100	100	100	
11.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Tenaga Kerja	300	591	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.
12.	Rasio lulusan S1/S2/S3	Rasio	481,43	491,17	498,54	510,83	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara, 2024

Kondisi ketenagakerjaan digambarkan pada sisi tenaga kerja dan pelayanan ketenagakerjaan. Pada konteks sisi tenaga kerja, sebagian besar memiliki tren yang positif sepanjang tahun. Indikator besaran pekerja terdaftar peserta program Jamsostek mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 61,40 persen di tahun 2023. Selain itu, besaran pekerja yang mengikuti program kewirausahaan juga mengalami peningkatan 557 persen atau sebesar 591 partisipasi pada tahun 2021. Indikator rasio lulusan S1/S2/S3 juga meningkatkan kenaikan sepanjang tahun meskipun rasio lulusan perguruan tinggi terhadap jumlah penduduk masih sangat rendah. Namun, indikator besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun di tahun 2020 sampai dengan 2024 berturut-turut sebesar 730 orang, 1.658 orang, 2.013 orang, 1.669 orang, dan 2.135 orang.

Pada konteks sisi pelayanan ketenagakerjaan, sebagian besar mengalami tren yang beragam. Indikator keselamatan dan perlindungan

mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun di tahun 2021 dan 2024 berturut-turut 28 perusahaan dan 133 perusahaan. Di sisi lain, indikator besaran pemeriksaan perusahaan mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, besaran pemeriksaan mencapai 39,93 perusahaan menjadi 10,41 perusahaan di tahun 2023. Penurunan tersebut diiringi oleh jumlah pengawasan ketenagakerjaan di provinsi hanya 4 dan tidak sebanding dengan jumlah badan usaha yang mencapai 10 ribu.

Berdasarkan data pada tabel tersebut, permasalahan terkait penurunan indikator disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang tidak mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan regulasi mengenai upah. Selain itu, penurunan pada pencari kerja disebabkan oleh belum memadainya kapasitas dan ketrampilan tenaga kerja untuk memenuhi persyaratan industri besar, pendidikan formal pekerja 50% masih didominasi lulusan pendidikan dasar, dan keterbatasan BLK untuk memenuhi kebutuhan pelatihan tenaga kerja dalam mengisi kesempatan yang ada.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membahas mengenai perlindungan perempuan dan anak, gender, dan rasio APM di tingkat SD hingga perguruan tinggi. Berikut indikator kinerja pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tabel 2.79
Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah	Persen	9,41	9,01	5,66	7,37	
2	Jumlah kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Orang	5	4	4	4	3
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	8,85	8,07	7,01	4,86	
4	Rasio KDRT	Kasus/pengaduan	0,32	0,45	0,5	0,16	0,41
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Persen	100	100	100	100	100
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	47,62	48,44	49	51,77	47,32
7	Cakupan Perempuan						

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh ptugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100	100
8	Cakupan permpuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesman mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah Sakit	Persen	100	100	100	100	100
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang dibrikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen	100	100	100	100	100
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap prempuan dan anak	Persen	100	100	100	100	
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan Hukum	Persen	100	100	100	100	100
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	100	100	100	
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	100	100	100	
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persen	93,46	93,38	93,69	100,51	
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persen	79,09	79,21	79,38	98,13	
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persen	64,75	65,37	65,65	112,33	
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	Persen	t.a.d	90,5	147,16	175,06	
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Persen	0,981	0,99	0,988	0,988	

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian	Persen	0,302	0,258	1,041	0,606	
20	Persentase angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas	Persen	95,71	96,04	97,09	97,17	
21	Indeks Pembangunan Gender	Persen	86,67	87,3	87,85	88,46	88,77
22	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	61,48	64,31	61,7	61,92	58,86

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Utara, 2024 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan partisipasi perempuan di lembaga swasta bersifat fluktuatif dan cenderung menurun Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan pengarustamaan gender belum optimal. Selain itu, jumlah kursi yang diduduki perempuan di DPRD mengalami penurunan, hal ini disebabkan partisipasi perempuan di politik masih rendah karena kurangnya pembinaan partai politik ke masyarakat dalam melakukan perekrutan perempuan di politik serta belum optimalnya kaderisasi partai politik kepada perempuan. Selanjutnya, rasio KDRT bersifat fluktuatif dan cenderung meningkat di tahun 2024 sebesar 0,41 kasus, maka dari itu penyelesaian kasus KDRT dapat ditangani dengan maksimal.

Indikator yang memiliki nilai sebesar 100 persen setiap tahun yaitu cakupan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak, nilai tersebut merupakan hasil dari laporan korban yang masuk ke unit pelayanan dan mendapatkan pelayanan terpadu yang baik. Selanjutnya, rasio APM perempuan/laki-laki di tingkat SD hingga perguruan tinggi mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Hal ini berarti, tingkat partisipasi pendidikan dari tingkat dasar hingga tinggi sudah berjalan dengan optimal. Indikator kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan sektor non-pertanian bersifat fluaktuatif dan cenderung meningkat. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender bersifat fluktuatif dan cenderung menurun, penurunan paling signifikan tahun 2022-2023 dari 61,92 persen menjadi 58,86 persen, penurunan ini disebabkan karena masih adanya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, masih terdapat beberapa kendala atau

permasalahan seperti belum optimalnya kebijakan pengarustamaan gender, belum optimalnya partisipasi perempuan di politik, kaderisasi partai politik kepada perempuan belum berjalan dengan optimal, dan masih adanya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

C. Pangan

Urusan pangan menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan penyediaan pangan sesuai dengan potensi sumber daya lokal di Provinsi Kalimantan Utara. Urusan tersebut memiliki 4 indikator, yaitu ketersediaan pangan utama, ketersediaan pangan dan protein, serta pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Berikut indikator kinerja pembangunan urusan pangan.

Tabel 2.80
Indikator Urusan Pangan

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ketersediaan pangan utama	Kg/Kap/Tahun	3081	2613	2480	3018	3141
2.	Ketersediaan energi per kapita	Kkal	105,77	61,17	69,23	82,52	74,90
3.	Ketersediaan protein per kapita	Gram	3081	2613	2480	3157	3141
4.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	100	100	100	100	62
5.	Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	80,5	80,6	81,5	82,9	82,4
6.	Penguatan cadangan pangan	Kilogram	198.843	198.843	198.843	198.843	
7.	Penanganan daerah rawan pangan	Persen	18,87	3,77	7,27	3,64	

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, 2024 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Pada urusan pangan, ketersediaan pangan utama menggambarkan ketersediaan bahan/stok pangan untuk dikonsumsi dan dibagi dengan jumlah penduduk tengah tahun. Badan Pangan Nasional mengelompokkan bahan pangan menjadi 12 jenis, termasuk pada padi-padian, daging, ikan, dan lain-lain. Indikator ketersediaan pangan utama sepanjang tahun mengalami penurunan, kecuali tahun

2024 yang mencapai 3.141 Kg/kapita/tahun. Begitu pula dengan indikator ketersediaan energid an protein per kapita yang mengalami penurunan kecuali tahun 2023.

Indikator lainnya adalah pencapaian skor PPH Provinsi Kalimantan Utara dalam lima tahun terakhir mengalami tren cenderung meningkat. Pada tahun 2020 skor PPH mencapai 80,5 persen, tahun berikutnya menunjukkan perbaikan dan peningkatan capaian skor PPH menjadi 82,4 persen di tahun 2024. Selanjutnya adalah indikator mengenai penguatan cadangan pangan yang menunjukkan peningkatan. Peningkatan terjadi pada tahun 2019 menjadi 50.000 kilogram dan meningkat sebesar 200 persen atau menjadi 198.843 kilogram di tahun 2020. Dalam tiga tahun terakhir, penguatan cadangan pangan tidak menunjukkan perubahan yaitu 198.843 kilogram. Terakhir, pada indikator penanganan daerah rawan pangan menunjukkan tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2020, penanganan daerah rawan pangan mencapai 18,87 persen atau angka tertinggi dibandingkan dari tahun 2020 hingga 2024. Penurunan drastis di tahun 2021 sebesar 15,10 persen atau menjadi 3,77 persen. Tahun 2022 menunjukkan perbaikan pertumbuhan sebesar 7,27 persen dan tahun 2023 kembali menunjukkan penurunan sebesar 3,64 persen.

Berdasarkan data pada tabel tersebut, penurunan ketersediaan pangan termasuk pada ketersediaan protein mengalami penurunan sepanjang tahun yang disebabkan oleh populasi komoditas ternak yang rendah akibat sebagian besar belum bebas rabies dan penyakit zoonosis serta penyakit hewan menular strategis (PHMS) lainnya. Selain itu, untuk penyediaan tanaman pangan khususnya produksi domestik mengalami permasalahan akibat penurunan luas areal tanam, sarana dan prasarana pertanian yang belum optimal, penerapan inovasi dan teknologi yang belum optimal, kapasitas dan kualitas SDM pertanian yang belum memadai dan sehingga perlu adanya upaya optimalisasi lahan dan teknologi tepat guna yang sesuai dengan karakteristik wilayah yang tidak hanya digunakan untuk memenuhi ketersediaan pangan utama tetapi juga untuk meningkatkan diversifikasi pangan.

D. Lingkungan Hidup

Pada urusan lingkungan hidup terdapat 25 indikator yang menjadi kewenangan provinsi yang ditampilkan secara time series dari

tahun 2020 hingga 2024. Urusan terkait lingkungan hidup mencakup penanganan dan pengelolaan sampah, kualitas lingkungan hidup, kasus lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan.

Tabel 2.81
Indikator Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2023
1.	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Dokumen	0	0	0	t.a.d.	
2.	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Dokumen	0	0	0	t.a.d.	
3.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Dokumen	0	0	0	t.a.d.	
4.	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Dokumen	2	0	1	t.a.d.	
5.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Dokumen	0	0	0	t.a.d.	
6.	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks	60,47	57,34	54,46	55,93	54,31
7.	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	94,23	93,43	94,52	93,91	92,99
8	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	79,03	99,96	100	100	100
9	Laporan Inventarisasi GRK	Dokumen	t.a.d	1	1	t.a.d	1
10	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Ton	4.117	5.166	8.782	6.244	6.915
11	Dokumen izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi yang ditandatangani gubernur	Izin	1	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	
	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	91,67	81,25	100	t.a.d.	
12	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Kelompok	1	1	0	0	
13	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Kelompok	1	1	0	0	
14	Terverifikasi hak kearifan local atau hak pengetahuan tradisional	Kelompok	1	1	0	0	
15	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kelompok/ Masyarakat/ Perorangan	Ada	t.a.d.	t.a.d.	Ada	
16	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah	Aduan	8	4	2	3	6

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2023
	kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota						
17	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi	Ada/Tidak Ada	ada	ada	ada	t.a.d.	

Sumber: Olah Data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, 2018-2023 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Dokumen RPPLH Provinsi Kalimantan Utara mulai tersusun pada tahun 2019 dengan naskah akademik yang kemudian disusun pada tahun 2020. Kemudian dokumen tersebut menghasilkan satu dokumen perda RPPH yang disahkan pada tahun 2022. Ketersediaan dokumen RPPLH pada tahun 2022 dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tanggal 22 Desember 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2022-2052.

Tersedianya dokumen KLHS Provinsi hanya pada tahun 2018, 2020, dan 2022. Pada tahun 2018, disusun dokumen KLHS RZWP3K oleh DKP, tahun 2020 disusun dokumen KLHS RPJMD 2021-2026 oleh Bappeda Litbang dan KLHS Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Tahun 2020 oleh DLH Provinsi sampai dengan tahap pra-validasi, serta pada tahun 2022 disusun KLHS Revisi RTRW oleh DLH Provinsi yang belum diintegrasikan dengan Materi Teknis Darat dengan Perairan. Kemudian, untuk terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi dilakukan pada tahun 2018-2019. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya alokasi anggaran pelaksanaan penyelenggaraan KLHS K/R/P tingkat provinsi serta tidak adanya pengajuan untuk penyusunan dari organisasi perangkat daerah pengusul KLHS.

Dalam mencerminkan kualitas lingkungan hidup, terdapat tiga indikator yang menunjukan kondisi lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu terkait indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Indeks kualitas air memiliki tren fluktuatif, dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar 60,47 dan mengalami kenaikan serta penurunan di tahun berikutnya menjadi 54,31 pada tahun 2024, nilai indeks kualitas air di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 menunjukan angka yang lebih tinggi dari rata- rata nasional. Hal ini menunjukan adanya penurunan kualitas air salah satunya dapat disebabkan oleh

pencemaran akibat aktivitas pembuangan sampah/limbah rumah tangga di sungai pada Kota Tarakan.

Indeks kualitas udara menunjukan kondisi tren peningkatan pada tahun 2022 dengan nilai 94,52 dari tahun 2020 dengan nilai 94,23. Nilai indeks kualitas udara pada tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Utara berada diatas rata-rata nilai indeks nasional. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan indeks kualitas udara hingga menjadi 92,99. Kemudian, indeks kualitas tutupan lahan menunjukan kondisi tren meningkat pada tahun 2022 dan 2023 dengan nilai 100 dari tahun 2020 yang hanya 79,03. Nilai indeks kualitas penutupan lahan pada tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Utara berada diatas rata-rata nilai indeks nasional.

Dalam kontribusi terhadap mitigasi terhadap risiko dan ancaman perubahan iklim, laporan inventarisasi GRK (Gas Rumah Kaca) Provinsi Kalimantan Utara dilakukan secara rutin berkala dari tahun 2019-2022.

Kemudian terkait kondisi limbah, persampahan, dan perizinan lingkungan, jumlah limbah B3 yang dikelola mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 8.782 ton dari tahun 2020 sebesar 4.117 ton. Kemudian jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan jumlah 6.915 ton.

Persentase jumlah sampah tertanggani pada kondisi khusus di provinsi memiliki nilai 0 pada setiap tahunnya karena belum dilakukannya pendataan terkait sampah dalam kondisi khusus. Hal tersebut disebabkan perhitungan kondisi khusus tersebut terdata kedalam perhitungan sampah/limbah medis.

Kemudian, pembinaan dan pengawasan terkait izin lingkungan, izin PPLH, dan izin PUU LH pelaku usaha dalam pengelolaan SDA memiliki tren kenaikan pada tahun 2020-2022 dengan nilai 100 persen pada tahun 2022 yang disebabkan karena mulai timbulnya kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, upaya pemerintah dalam melibatkan pelaku usaha dalam program penilaian peringkat kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup tingkat provinsi yang mana didalamnya juga dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Terkait pendampingan pengakuan Masyarakat Hutan Adat (MHA), terverifikasinya MHA dan kearifan atau pengetahuan tradisional, serta terverifikasinya hak kearifan atau pengetahuan tradisional

dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021 sebanyak 1 kelompok dari 5 kelompok MHA.

Pemberian penghargaan lingkungan hidup memiliki kondisi yang berbeda-beda di setiap tahunnya. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup pada tahun 2019, 2020, 2023, dan 2024 meliputi kegiatan sebagaimana berikut:

a. Penghargaan Kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan tahun 2023 Perkumpulan Pengelola Hutan Adat Dayak Abay Sembuak, Kalimantan Utara
b. Masyarakat Adat Punan Adiu (Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara) sebagai penerima penghargaan Kalpatatu Kategori Penyelamat Lingkungan Hidup tahun 2020
c. Bapak Nurbit sebagai penerima penghargaan kalpataru kategori perintis lingkungan tahun 2019
d. SMAN 1 Kota Tarakan Kalimantan Utara Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2024
e. SMPN 7 Kota Tarakan Kalimantan Utara Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2024

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, PPLH, PUU LH yang diterbitkan mengalami kondisi fluktuatif. Terjadi tren penurunan pada tahun 2020-2022 sebanyak 8 aduan di tahun 2020 menjadi 2 aduan di tahun 2022. Kemudian kondisi tersebut mengalami kenaikan menjadi 3 aduan di tahun 2023. Jumlah aduan yang dilaporkan merupakan jumlah aduan yang masuk dan diselesaikan yang termasuk dalam kewenangan provinsi, kabupaten/kota, dan KLHK/Gakkum.

Berdasarkan data yang telah disebutkan di atas terdapat permasalahan terkait lingkungan hidup yaitu masih adanya pencemaran air yang ditunjukan dari menurunnya kualitas air yang disebabkan pembuangan limbah oleh masyarakat ke sungai sehingga mempengaruhi kualitas air dan belum optimalnya pengelolaan sampah karena belum adanya pengelolaan sampah secara terpadu.

E. Pertanahan

Pada urusan pertanahan terdapat tiga indikator yang menjadi kewenangan provinsi yakni persentase luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara dan penyelesaian ijin lokasi. Namun data yang dapat menggambarkan kinerja pembangunan urusan

pertanahan tersebut tidak tersedia sejak tahun 2020-2024, hanya tersedia data penyelesaian kasus tanah negara tahun 2021 sebesar 39,7 persen. Dengan demikian tidak dapat dianalisis capaian kinerja pembangunan urusan pertanahan.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil membahas mengenai kondisi cakupan penerbitan KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta kematian. Berikut indikator kinerja pembangunan urusan administasi kependudukan dan catatan sipil.

Tabel 2.82
Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	Persen	97,97	98,29	98,96	98,57	99,87
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	92,86	95,79	90,94	91,22	
3	Rasio pasangan berakte nikah	Persen	63,4	65,85	67,93	68,64	
4	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	97,97	98,29	98,96	98,57	99,87
5	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	59,16	60,88	64,47	65,93	
6	Persentase kepemilikan KTP	Persen	97,97	98,29	98,96	98,57	99,87
7	Kepemilikan akta kelahiran per 100 penduduk	Persen	59,16	60,88	64,47	65,93	
8	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	angka (0-100)	83,29	84,89	86,7	88,29	
9	Rasio pengelolaan informasi dan pemanfaatan data	angka (0-100)	100	100	100	100	100
10	Rasio Perekaman KTP-elektronik dan keluarga yang Ber KK	angka (0-100)	78,81	95,35	99,24	99,17	
11	Rasio perekaman KTP-elektronik, keluarga yang ber-KK dan penerbitan KIA	angka (0-100)	67,09	83,19	83,91	85	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara,2024 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Cakupan perekaman KTP elektronik dan kartu keluarga bersifat fluktuatif dan mengalami penurunan tahun 2020 menjadi 78,81 persen, lalu mengalami kenaikan dari tahun 2021-2022 dari 95,35 persen menjadi 99,24 persen. Namun, tahun 2023 mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan menjadi 99,17 persen. Penurunan cakupan perekaman KTP elektronik dan kartu keluarga dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti belum optimalnya sumber daya manusia yang menguasai IT dan jaringan serta belum optimalnya peralatan perekamanan.

Persentase kepemilikan KTP dan rasio bayi berakta kelahiran bersifat fluktuatif, tetapi cenderung menurun, yang mana indikator kepemilikan KTP mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 99,87 persen, sedangkan rasio bayi berakta mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2022 dengan nilai 90,94 persen. Penurunan kedua indikator tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti masih adanya jaringan blank spot di daerah perbatasan dan terpencil, belum optimalnya pelayanan jemput bola, keterbatasan sarana prasarana dalam melakukan pelayanan jemput bola, yang mana dalam melakukan pelayanan jemput bola menggunakan mobil, sedangkan jumlah mobil yang tersedia hanya satu, belum optimalnya sumber daya manusia dalam penginputan data, dan pemahaman masyarakat masih minim.

Dalam mendorong peningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terdapat beberapa faktor pendorong antara lain melakukan pelayanan jemput bola di daerah perbatasan dan terpencil dengan inovasi sipelandukilat, melakukan pelayanan jemput bola di sekolah bagi siswa yang berusia 17 tahun dengan inovasi D'Beslah, melakukan pelayanan jemput bola pemutakhiran data di rumah warga dengan inovasi Pada Bekesah, melakukan pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) setiap melakukan pelayanan adminduk, dan perlu adanya dukungan dari OPD mengenai pemutakhiran elemen data golongan darah dan pekerjaan.

Dengan demikian pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan

seperti belum optimalnya sumber daya manusia yang menguasai IT dan jaringan serta belum optimalnya peralatan perekamanan, masih adanya jaringan blank spot di daerah perbatasan dan terpencil, belum optimalnya pelayanan jemput bola, keterbatasan sarana prasarana dalam melakukan pelayanan jemput bola, belum optimalnya sumber daya manusia dalam penginputan data, dan pemahaman masyarakat masih terbatas.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa membahas mengenai kondisi LPM, PKK, dan posyandu di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Berikut indikator kinerja pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Tabel 2.83
Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	t.a.d	t.a.d	70,92	70,92	70,92
2	Persentase LPM berprestasi	Persen	31,73	32,57	t.a.d	t.a.d	t.a.d
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	100	100	100	100	100
4	Cakupan kelompok binaan PKK	Persen	100	100	100	100	100
5	Persentase LSM aktif	Persen	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.
6	Jumlah LSM	Persen	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.
7	Persentase PKK aktif	Persen	68	75	80	87	95
8	Persentase posyandu aktif	Persen	98,22	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.
9	Persentase status desa maju, mandiri dan berkembang	Persen	39,60	47,65	55,26	68,28	78,52

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara, 2024

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik bersifat stagnan dari tahun 2021 hingga 2023 yaitu dengan nilai 70,92 persen, jumlah kantor desa yang sudah dalam kondisi baik sebanyak 317 desa dari total keseluruhan 447 desa. Selanjutnya, persentase LPM berprestasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2020 dengan nilai 32,57 persen. Akan tetapi, dalam melakukan pembinaan untuk LPM masih terkendala oleh anggaran karena masing-masing kabupaten memiliki prioritas masing-masing. Sementara itu,

rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dan cakupan kelompok binaan PKK memiliki angka 100 persen dari tahun 2019 hingga 2023, hal itu berarti kelompok binaan PKK sudah berjalan dengan optimal dan sudah mencapai angka maksimal. Kedua indikator ini juga dipengaruhi adanya persentase PKK aktif yang mengalami peningkatan setiap tahunnya karena semua desa harus mengaktifkan kelompok PKK.

Persentase posyandu aktif pada tahun 2019 yaitu dengan nilai 98,22. Namun, dalam pelaksanaan monitoring dan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas posyandu dalam rangka mempercepat penurunan stunting masing mengalami kendala mengenai keterbatasan anggaran dan belum adanya desain monitoring untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya, pada indikator persentase status desa maju, mandiri, dan berkembang mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan nilai 78,52 persen di tahun 2023.

Dengan demikian dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan diantaranya yaitu masih terkendalanya anggaran untuk pembinaan terhadap LPM dikarenakan masing-masing kabupaten memiliki prioritas masing-masing serta belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan pembinaan terhadap posyandu.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga bencana memiliki 34 indikator yang meliputi pertumbuhan penduduk, kebijakan terkait kependudukan, dinamika KB, dll. Berikut merupakan data indikator kinerja pembangunan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Tabel 2.84
Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	3,84	2,86	2,25	2,1	1,44
2	Total Fertility Rate (TFR)	Anak per wanita usia reproduktif	2,73	2,87	2,9	2,66	2,27
3	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas	Kebijakan	1	2	2	2	2

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	dan kualitas penduduk						
4	Ratio Akseptor KB	Persen	64,2	67	68,9	47,8	65,8
5	Jumlah Peserta KB Aktif	Peserta	59.400	66.297	66.285	68.849	74.159
6	Persentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR)	Persen	51,00	64,20	67,00	68,90	56,80
7	Tingkat Prevalensi Kesertaan KB Pria	Persen	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d
8	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Persen	67	68,9	47,8	65,8	
9	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun)	16,00		40,70	27,10	26,10
10	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	10,40	21,20	20,10	14,10	14,60
11	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	20,8	44,7	15,90	20,30	26,30
12	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	20,5	21,2	20,20	21,20	22,20

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kalimantan Utara 2024 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, LPP sebesar 3,84% dan turun menjadi 1,44% pada tahun 2024. Penurunan laju pertumbuhan menunjukkan penambahan penduduk yang semakin lama semakin sedikit. Hal ini bisa mengindikasikan terwujudnya program KB secara baik. Apalagi ditambah dengan nilai TFR yang cenderung menurun. RPJMN 2020-2024 menargetkan tahun 2024 diharapkan TFR secara nasional berada di angka 2,1 anak per perempuan. Nilai TFR pada tahun 2024 sebesar 2,27 anak per perempuan. Penurunan nilai TFR dapat berimplikasi pada peningkatan kualitas keluarga karena orang tua bisa lebih fokus dalam mendidik anaknya. Selain itu, diharapkan dengan target yang telah disusun terjadi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) sehingga dapat memperpanjang bonus demografi.

Provinsi Kalimantan Utara telah memiliki perda atau perkada yang mengakomodasi tentang pengendalian kuantitas dan kualitas

penduduk. Peraturan tersebut sudah diterbitkan sejak 2020 sebanyak 2 kebijakan. Kedua kebijakan tersebut tetap berlaku sampai dengan tahun 2024 tanpa ada penambahan kebijakan baru.

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49 tahun menunjukkan peningkatan dari tahun 2020-2023 tapi menurun pada tahun 2024. Kenaikan tertinggi terjadi dari tahun 2020 ke 2021 yaitu dari 51% menjadi 64,2%. Sedangkan, penurunan paling besar terjadi dari tahun 2023 ke 2024 yaitu dari 68,9% menjadi 56,80%.

ASFR 15-19 tahun pada tahun 2020 sebesar 16. Pada tahun 2021, tidak diketahui nilai dari ASFR 15-19 tahun. Namun, diketahui pada tahun 2022 angka tersebut menjadi 40,7 dan setelahnya berfluktuasi dan pada tahun 2024 menjadi 26,10. Artinya, pada tahun 2024 terdapat 26,10 kelahiran dari 1.000 remaja perempuan. Nilai tersebut mengindikasikan masih banyaknya pernikahan dini di kalangan masyarakat. Pernikahan dini dapat berefek buruk pada kualitas pendidikan masyarakat secara umum dan kesehatan ibu dan anak seperti kematian ibu dan anak, serta stunting.

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi menunjukkan grafik yang fluktuatif. Kenaikan terjadi pada tahun 2021, Nilai tersebut turun dari 21,20% menjadi 14,60% pada tahun 2024. Masih tingginya nilai unmet need mengindikasikan pelayanan KB terhadap PUS masih belum maksimal sehingga perlu diupayakan lebih untuk meningkatkan pelayanan tersebut.

Persentase penggunaan MKJP menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2020- 2021. Data tahun 2020 menunjukkan persentase penggunaan MKJP sebesar 20,8% lalu naik menjadi 44,7% pada tahun 2021. Namun Kembali menurun di Tahun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi hanya 26,30%.

Rata-rata usia kawin pertama wanita menunjukkan peningkatan dari tahun 2020- 2024 dari yang awalnya 20,5 tahun menjadi 22,20 tahun. Semakin meningkatnya usia kawin pertama wanita akan memberikan kesiapan yang lebih matang ketika menjadi ibu baik secara biologis maupun psikologis sehingga angka kematian ibu maupun anak dapat berkurang serta risiko stunting dapat menurun.

Dengan demikian permasalahan pengendalian penduduk dan KB di Kalimantan Utara antara lain masih tingginya pernikahan dini

ditandai ASFR 15-19 tahun yang masih tinggi dan angka unmeet need yang masih cukup tinggi.

I. Perhubungan

Pada urusan perhubungan terdapat 6 indikator yang menjadi kewenangan provinsi yang ditampilkan secara timeseries dari tahun 2019 hingga 2023. Urusan perhubungan antara lain mencakup penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan darat dan laut, transportasi publik, perizinan transportasi, perhubungan laut, maupun perhubungan udara terutama untuk wilayah pedalaman.

Tabel 2.85
Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	t.a.d	32.635	29.988	39.094	39.686
2.	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	Unit	t.a.d	38	38	38	38
3.	Rasio ijin trayek	rasio	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d
4.	Pemasangan rambu-rambu	Persen	21,24	21,24	23,36	23,36	23,36
5.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Unit/KM	t.a.d	81	84	86	91
6.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang	t.a.d	32.635	29.988	39.094	39.686
7.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun*	Orang	t.a.d	975.853	1.507.892	2.037.210	2.187.326
	Dermaga		t.a.d	906.514	1.273.343	1.719.814	2.103.551
	Bandara		t.a.d	36.704	204.561	278.302	44.089
	Terminal		t.a.d	32.635	29.988	39.094	39.686

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, 2018-2023

**total jumlah orang yang melalui dermaga, bandara, terminal*

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 1 dari 7 data yang belum dapat terisi. Terkait transportasi umum, jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami kondisi fluktuatif pada tahun 2020-2023. Pada tahun 2020-2021 mengalami kondisi penurunan dari 32.635 penumpang/jiwa di tahun 2020 menjadi 29.988 penumpang/jiwa di tahun 2021. Hal tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mengubah kecenderungan pemilihan transportasi masyarakat umum

yang dominan beralih menjadi kendaraan pribadi. Kemudian, kondisi tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2023 dengan jumlah penumpang sebesar 39.686 jiwa.

Kondisi sarana prasarana transportasi dalam jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis yang tersedia mengalami kondisi stagnan pada tahun 2020-2023 dengan total 38 unit tanpa adanya penambahan maupun pengurangan jumlah fasilitas transportasi tersebut. Terdapat 20 unit pelabuhan laut, 14 unit transportasi udara berupa bandara dan lapangan terbang, serta 4 terminal bis.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 dengan nilai 81 unit per km menjadi 91 unit per km pada tahun 2023. Peningkatan tersebut disebabkan jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya dan jumlah jalan yang berjumlah tetap pada setiap tahunnya.

Secara keseluruhan berdasarkan data tersebut, masih adanya data yang belum terisi terkait pelayanan dan pengujian angkutan umum yaitu rasio ijin trayek yang disebabkan belum adanya pengajuan terkait ijin trayek oleh supir angkutan umum. Karena permintaan penumpang angkutan umum yang menurun, supir angkutan umum cenderung melakukan pelayanan door-to-door yang menyebabkan angkutan tidak berjalan sesuai trayek. Hal ini membuat supir angkutan umum tidak mengajukan ijin trayek. Selain itu, uji kendaraan juga hanya dilakukan pada Kota Tarakan dan Bulungan, sehingga dalam pengurusan izin hanya terbit dari Kota Tarakan dan Bulungan, yang menyebabkan sulitnya mendapat uji kendaraan.

J. Komunikasi dan Informatika

Pada urusan komunikasi dan informatik terdapat 5 indikator yang menjadi kewenangan provinsi yang ditampilkan secara time series dari tahun 2019 hingga 2023. Urusan komunikasi dan informatika antara lain yaitu cakupan layanan telekomunikasi, pengembangan aplikasi dan sistem informasi pemerintah daerah, pemanfaatan portal informasi daerah beserta sub-domain perangkat daerah hingga desa atau kelurahan.

Tabel 2.86
Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	92,32	93,36	93,36	93,98	97,51
2	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	84,28	88,96	90,05	89,23	88,57
3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen	54,3	60,52	69,26	77,43	77,03
4	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	18,02	17,19	14,51	15,84	15,37

Sumber: Dinas Kominfo dan BPS Kalimantan Utara, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, cakupan layanan telekomunikasi mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 92,32 persen menjadi 97,51 persen di tahun 2023. Hal ini menunjukan masih adanya wilayah di Provinsi Kalimantan Utara yang belum terlayani jaringan telekomunikasi terutama pada jaringan 3G/4G. Berdasarkan Tabel 2.96, dari segi ketersediaan prasarana layanan telekomunikasi, menunjukan bahwa jumlah ketersediaan stasiun pemancar (Tower BTS) sudah hampir menjangkau separuh jumlah desa di Provinsi Kalimantan Utara. Radius lokasi stasiun pemancar tersebut juga berpengaruh terhadap kualitas sinyal, dengan hal ini pada kondisi di Provinsi Kalimantan Utara terutama pada kawasan pegunungan mengalami kendala terhadap kualitas sinyal. Masih adanya desa yang tidak terjangkau stasiun pemancar menyebabkan tidak adanya sinyal pada telepon seluler. Kemudian dari keterjangkauan akses internet, masih terdapat 109 desa yang belum memiliki akses internet.

Tabel 2.87
Kondisi Ketersediaan dan Layanan Telekomunikasi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Kualitas Sinyal Telepon Seluler	Jumlah Desa
Sinyal Kuat	234
Sinyal Lemah	187
Tidak Ada Sinyal	26
Total	447
Warga Desa Memiliki Akses Internet	Jumlah Desa
Ada	338
Tidak Ada	109
Total	447
Tersedia Tower BTS di Desa	Jumlah Desa
Ada	261
Tidak Ada	186
Total	447

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, 2023

Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon memiliki kondisi fluktuatif dengan tren yang naik pada tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari nilai 84,28 menjadi 90,05. Kemudian pada tahun 2021-2023 mengalami penurunan menjadi 88,57 persen di tahun 2023. Kemudian, persentase rumah tangga dengan akses internet memiliki kecenderungan tren yang meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Pada tahun 2022, terjadi kenaikan menjadi 77,43 persen dari 46,87 persen di tahun 2018. Kemudian pada tahun 2023, persentase tersebut mengalami penurunan menjadi 77,03 persen. Terjadinya tren kenaikan tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang meningkatkan intensitas aktivitas internet serta didukung dengan upaya pemerataan jaringan telekomunikasi.

Persentase rumah tangga yang memiliki komputer pribadi memiliki kecenderungan tren yang menurun dari tahun 2019 dengan nilai 18,02 persen menjadi 15,37 persen di tahun 2023.

Dari data di atas, masih ada permasalahan terkait cakupan layanan telekomunikasi yang belum merata. Hal ini ditunjukan oleh cakupan layanan telekomunikasi yang belum 100 persen menggambarkan masih adanya area blankspot yang belum terjangkau layanan internet terutama jaringan internet 2G.

K. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah menggambarkan pengembangan sosial dan ekonomi pada masyarakat sekitar. Urusan tersebut memiliki 4 indikator, yaitu persentase koperasi aktif, persentase UKM non BPR (Bank Perkreditan Rakyat), presentase BPR aktif, dan persentase usaha mikro dan kecil. Berikut indikator kinerja pembangunan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Tabel 2.88
Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase koperasi aktif	Persen	67,81	70,37	70,26	72,59	88,64
2.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen	100	100	100	100	100
3.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	88,73	95,42	97,97	98,62	98,35

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Unit Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Utara, 2024 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Pada urusan koperasi dan UKM sebagian besar telah menunjukkan tren yang membaik dan positif. Berdasarkan tabel tersebut, sekitar 95 persen usaha didominasi oleh usaha mikro dan kecil di bidang usaha makanan dan hiburan. Indikator lainnya juga menunjukkan persentase UKM non BPR (Bank Perkreditan Rakyat) menunjukkan nilai yang sempurna atau 100 persen. Gambaran koperasi dinyatakan pada indikator persentase koperasi aktif yang sepanjang tahun mengalami kenaikan. Persentase koperasi aktif pada mencapai 67,81 persen di tahun 2020 dan terus meningkat menjadi 88,64 persen di tahun 2024. Koperasi didominasi oleh koperasi sektor riil sedangkan koperasi simpan pinjam hanya 2 koperasi.

Penurunan yang tejadi persentase koperasi aktif di tahun 2022 adalah usaha koperasi masih berbasis pada manajemen konvensional yang didukung oleh belum berkembangnya koperasi yang melayani skala provinsi. Selain itu dari sisi Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro masih terjadi kendala bisnis dan layanan penunjang UMKM masih belum berkembang.

L. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga memiliki tujuh indikator yang meliputi kegiatan kepemudaan dan prestasi serta pembinaan olahraga. Berikut indikator kinerja pembangunan urusan kepemudaan olahraga.

Tabel 2.89
Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	t.a.d.	t.a.d.	9,68	14,95	15,52
2.	Persentase wirausaha muda	Persen	t.a.d.	t.a.d.	13,28	0,65	1,1
3.	Jumlah cabor yang dibina	Cabor	1	2	2	2	3
4.	Jumlah pelatih bersertifikasi	Orang	t.a.d.	140	140	140	140

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
5.	Jumlah atlet muda yang dibina	Orang	10	10	10	10	10
6.	Jumlah atlet berprestasi	Orang	14	4	181	10	9
7.	Jumlah prestasi olahraga	Medali	14	4	9	12	16

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Utara 2024

Persentase organisasi pemuda yang aktif mengalami peningkatan dari tahun 2021- 2023. Peningkatan organisasi pemuda yang aktif menunjukkan meningkatnya minat pemuda dalam berorganisasi. Namun, nilai tersebut termasuk kecil padahal organisasi pemuda bisa menjadi sarana penumbuhan jiwa kepemimpinan.

Persentase wirausaha muda menunjukkan peningkatan dari tahun 2022-2023 (terdapat perbedaan formula perhitungan pada tahun 2021). Namun, jika dilihat dari nilainya angka tersebut masih termasuk kecil. Hal ini disebabkan minat pemuda dalam berwirausaha masih rendah karena wirausaha masih dipandang tidak menarik. Selain itu, dari sisi pembinaan saat ini pembinaan dan pemberian bantuan seperti pemodalan untuk para wirausahawan muda masih belum optimal.

Jumlah cabor yang dibina mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023. Namun, ini tidak selaras dengan jumlah atlet muda yang dibina dan pelatih bersertifikasi yang ada. Atlet muda dan pelatih bersertifikasi stagnan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan masih belum optimalnya pembinaan olahraga. Penyebab belum optimalnya pembinaan olahraga salah satunya yang peling mendasar adalah belum adanya grand design tentang pengembangan olahraga. Penyebab lainnya adalah pelatih yang bersertifikasi masih minim.

Jumlah atlet berprestasi mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2023. Tahun dengan jumlah atlet berprestasi paling banyak adalah tahun 2021 dengan jumlah atlet berprestasi sebanya 181 atlet. Sedangkan, untuk prestasi olahraga berupa perolehan medali tahun 2023 menjadi tahun paling berprestasi dengan 16 medali. Meskipun perolehan prestasi olahraga mengalami peningkatan, upaya pembinaan atlet terutama atlet muda saat ini belum berjalan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah atlet muda yang dibina yang jumlahnya selalu sama dari tahun 2019-2023. Selain pembinaan untuk atlet muda, aspek lain yang dapat membantu dalam pembinaan atlet adalah keberadaan sarana keolahragaan yang berstandar internsional dan ramah disabilitas. Pembinaan olahraga yang sering luput dari pengamatan

adalah pembinaan untuk paraatlet atau atlet penyandang disabilitas. Sampai saat ini belum ada pembinaan yang serius untuk atlet penyandang disabilitas.

Dengan demikian permasalahan kepemudaan dan olahraga antara lain masih rendahnya organisasi pemuda yang aktif, masih sedikitnya jumlah cabor yang dibina, dan jumlah atlet muda dan pelatih bersertifikasi yang masih minim.

M. Statistik

Urusan statistik membahas mengenai ketersediaan sistem data statistik, buku kabupaten dalam angka, dan PDRB. Berdasarkan ketiga indikator tersebut, ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi, buku “Kabupaten Dalam Angka”, dan buku “PDRB” telah tesedia semua dari tahun 2019 hingga 2023. Oleh karena itu, penyediaan data dan publikasi statistik Provinsi Kalimantan Utara sudah berjalan dengan optimal.

Tabel 2.90
Indikator Urusan Statistik

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi, Statistika, dan Persandian Kalimantan Utara 2024

N. Persandian

Urusan persandian membahas penggunaan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. Data terkait kinerja pembangunan urusan persandian berupa persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah tidak tersedia data sejak tahun 2020 hingga 2024.

O. Kebudayaan

Urusan Kebudayaan memiliki empat indikator yang meliputi penyelenggaraan festival seni dan budaya serta pengelolaan cagar budaya dan karya budaya.

Tabel 2.91
Indikator Urusan Kebudayaan

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah festival seni dan budaya yang diselenggarakan	Kegiatan	2	0	1	4	4
2.	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Unit	22	22	22	22	34
3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	3	5	1	4	1
4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	22	22	22	22	34

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara 2024

Jumlah festival seni dan budaya yang diselenggarakan mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2020, tidak diselenggarakan festival karena adanya Covind- 19 sehingga kegiatan yang bersifat ramai atau publik sangat dibatasi. Setelah Covid-19 selesai, festival seni dan budaya kembali diadakan sebanyak 4 acara pada tahun 2022 dan 2023.

Benda, situs, dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan mengalami peningkatan berikut juga dengan cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Sedangkan, karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi berfluktuasi karena dalam pengelolaan karya budaya dan cagar budaya saat ini belum ada tim ahli di tiap kabupaten/kota. Selain itu, balai cagar budaya yang saat ini masih tergabung antara Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Timur juga menjadikan pengelolaan cagar budaya dan karya budaya terbatas.

Berdasarkan data yang telah diuraikan, permasalahan kebudayaan antara lain masih minimnya cagar budaya dan karya budaya yang dilestarikan, direvitalisasi, dan dikelola secara terpadu.

P. Perpustakaan

Urusan perpustakaan membahas mengenai jumlah pengunjung perpustakaan, jumlah perpustakaan, koleksi buku, dan kompetensi pustakawan. Berikut indikator kinerja pembangunan urusan perpustakaan.

Tabel 2.92
Indikator Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	25.336	25.420	18.125	14.270	1.695
2	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	106	106	76	59	

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
3	Rasio jumlah pengunjung Perpustakaan	Persen	3,61	3,62	2,49	1,91	
4	Jumlah perpustakaan	Unit	139	142	369	478	
5	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Perpustakaan/ Orang	0,020	0,020	0,051	0,064	
6	Jumlah koleksi judul Buku perpustakaan daerah	Judul	5.449	8.776	12.810	13.224	
7	Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	1,81	2,79	3,32	3,33	
8	Rasio pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten	Persen	2,46	0,00005	0,00015	0,133	
9	Jumlah koleksi eksemplar buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	12.714	19.573	24.139	24.926	
10	Persentase pustakawaan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Persen	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d	t.a.d

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara, 2024 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024. Puncak penurunan jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2024 dengan total pengunjung sebanyak 1.695 orang, sebelum tahun tersebut jumlah pengunjung perpustakaan sudah menyentuh di angka 25.000 ke atas. Penurunan ini disebabkan karena kondisi gedung perpustakaan belum representatif dan lokasi perpustakaan yang kurang strategis. Sehingga, masih banyak orang yang belum mengetahui lokasi perpustakaan tersebut. Indikator jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun dan rasio jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan signifikan. Puncak penurunan juga pada tahun 2023, penurunan ini juga sama halnya dengan penyebab penurunan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun.

Indikator mengenai jumlah koleksi judul buku perpustakaan daerah, rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, dan jumlah koleksi eksemplar buku yang tersedia di perpustakaan daerah mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023 karena setiap tahun harus ada penambahan koleksi buku di

perpustakaan. Sehingga koleksi buku mengalami peningkatan setiap tahun. Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat pada tahun 2019 hanya sebesar 11,11 persen, hal ini disebabkan karena belum optimalnya sumber daya manusia secara teknis perpustakaan.

Dengan demikian pada urusan perpustakaan, masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan diantaranya yaitu kondisi gedung perpustakaan belum representatif dan lokasi perpustakaan yang kurang strategiss serta belum optimalnya sumber daya manusia secara teknis perpustakaan.

Q. Kearsipan

Urusan kearsipan membahas mengenai kondisi pengelolaan arsip dan perangkat daerah sudah mengelola arsip secara baku. Berikut indikator kinerja pembangunan urusan kearsipan.

Tabel 2.93
Indikator Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	39	28,26	15,22	23,91	40,47
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Orang	t.a.d	t.a.d	2	3	3
3	Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan	Kegiatan (realisasi) - Lokasi (target)	t.a.d	t.a.d	7	12	
4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	Perangkat Daerah	16	13	7	12	17

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara, 2024 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku bersifat fluaktuatif dan cenderung menurun. Tahun 2020-2022 terjadi penurunan dari 73,9 persen menjadi 15,22 persen, tetapi tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 40,47 persen. Penurunan ini disebabkan karena belum optimalnya perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, belum optimalnya tupoksi pengelolaan arisp, belum tersedianya arsiparis di semua daerah, dan belum semua OPD menggunakan menggunakan alat pengelola arsip. Selanjutnya, indikator peningkatkan SDM pengelola arsip bersifat fluaktuatif dan cenderung menurun,

puncak penurunan indikator ini tahun 2021, yang mana SDM pengelola arsip hanya berjumlah dua orang. Penurunan ini disebabkan adanya keterbatasan sumber daya arsiparis dan belum optimalnya kompetensi sumber daya manusia pengelola arsip.

Pada indikator jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelolaa arsip mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2022 hingga 2023, dari 7 kegiatan menjadi 12 kegiatan. Sedangkan, indikator jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku mengalami penurunan yang signifikan, yang mana puncak penurunan berada di tahun 2020-2022, yang awalnya berjumlah 34 perangkat daerah menjadi 7 perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku. Penurunan ini juga disebabkan beberapa hal seperti belum optimalnya pelatihan bimtek, belum optimalnya kompetensi sumber daya manusia, dan belum tersedianya arsiparis di semua daerah serta belum optimalnya perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku.

Berdasarkan paparan data indikator urusan kearsiapan, masih terdapat kendala atau permasalahan seperti belum optimalnya perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, belum optimalnya tupoksi pengelolaan arisp, belum tersedianya arsiparis di semua daerah, dan belum semua OPD menggunakan menggunakan alat pengelola arsip, adanya keterbatasan sumber daya arsiparis dan belum optimalnya kompetensi sumber daya manusia pengelola arsip.

2.1.7. Layanan Urusan Pilihan

A. Pariwisata

Urusan pariwisata merupakan fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang melibatkan perpindahan orang ke negara atau tempat di luar lingkungan biasanya untuk tujuan pribadi, bisnis, atau profesional. Sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kenaikan indeks daya saing pariwisata daerah. Berikut indikator kinerja pembangunan urusan pariwisata selama tahun 2019 hingga 2023.

Tabel 2.94
Indikator Urusan Pariwisata

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kunjungan wisata	Orang	653.594	735.750	1.091.204	993.245	988.946

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Lama kunjungan Wisata	Hari	1,45	1,39	1,34	1,62	1,47
3.	Destinasi Wisata	Objek	235	237	357	353	338

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, 2024 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Indikator kunjungan wisatawan yang terbagi menjadi wisatawan mancanegara (asing) maupun wisatawan nusantara (lokal). Kunjungan wisata menggambarkan aktivitas berpergian wisatawan untuk mencari daya tarik wisata daerah. Kunjungan wisata secara umum mengalami fluktuatif sejak tahun 2020-20234 Pada tahun 2020, kunjungan wisatawan sebesar 653.594 dan mengalami penurunan serta peningkatan pada tahun berikutnya menjadi 988.946 di tahun 2024. Selain itu, destinasi wisata di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan sepanjang tahun, kecuali tahun 2023 dan 2024 yang mengalami penurunan. Pada tahun 2020, destinasi wisata mencapai 235 objek dan mencapai 357 objek di tahun 2022.

Indikator lainnya yang menunjukkan aktivitas pariwisata daerah adalah lama kunjungan wisata yang berfluktuasi. Sepanjang tahun 2020 hingga 2022 mengalami penurunan dari 1,45 hari menjadi 1,34 hari. Lama kunjungan wisatawan di Provinsi Kalimantan Utara termasuk rendah dengan rata-rata sebesar 1,4 hari dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh destinasi wisata (pembangunan, akomodasi, dan sarpras) belum sesuai tata kelola dan pemasaran yang kurang.

Berdasarkan data pada tabel tersebut, fluktuasi pada kunjungan wisata dan lama kunjungan disebabkan oleh pemasaran destinasi pariwisata belum optimal, kualitas SDM pariwisata masih belum memadai, dan pelaku usaha pariwisata belum memenuhi sesuai peraturan berlaku. Meskipun data menunjukkan adanya peningkatan pada destinasi wisata, nyatanya masih belum diikuti oleh kemampuan pengelolaan berkelanjutan.

B. Pertanian

Urusan pertanian menggambarkan aktivitas pertanian daerah sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan pangan. Urusan tersebut memiliki 8 indikator yaitu produktivitas padi atau bahan pangan lainnya

dan cakupan bina kelompok tani. Berikut indikator kinerja pembangunan urusan pertanian.

Tabel 2.95
Indikator Urusan Pertanian

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	9,36	10,01	9,69	8,12	7,98
2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persen	2,28	2,61	2,41	2,3	2,18
3.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	2,89	3,26	3,17	2,81	2,84
4.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kuartal/Ha	32,4	33,97	33,74	35,49	36,71
5.	Balai Penyuluhan Pertanian	Balai	23	23	23	23	t.a.d.
8.	Nilai Tukar Petani	Nilai	100,81	102,74	105,85	109,35	111,92

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, 2024

Indikator kontribusi sektor pertanian maupun perkebunan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) mengalami penurunan sepanjang tahun. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB tahun 2019 mencapai 9,63 persen dan menurun hingga mencapai 7,98 persen di tahun 2023. Indikator lainnya adalah kontribusi sektor pertanian (palawija) mengalami penurunan mencapai 2,18 persen di tahun 2023. Selain itu, kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) mengalami penurunan meskipun terjadi peningkatan di tahun 2020 sebesar 3,26 persen. Pada indikator produktivitas padi yang menggambarkan nilai yang menunjukkan rata-rata hasil produksi per satuan luas per komoditas tanaman padi. Berdasarkan tabel tersebut, capaian produktivitas padi sepanjang tahun memiliki kecenderungan meningkat. Produktivitas padi tahun 2019 sebesar 32,4 kuartal per hektar dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 mencapai 36,71 kuartal per hektar. Berdasarkan data pada tabel tersebut, permasalahan yang terjadi pada urusan pertanian adalah banyaknya alih fungsi lahan ke perkebunan sawit dan alih fungsi profesi ke rumput laut dan luas komoditas perkebunan rakyat menurun, kecuali sawit dan karet. Hal tersebut juga didukung oleh kurangnya

kompetensi dan penerapan penyuluh pertanian. Pada indikator jumlah balai penyuluhan adalah tetap sepanjang tahun yaitu 23 balai. Pencapaian ideal penyuluhan pertanian adalah satu kecamatan satu balai tetapi kondisi Provinsi Kalimantan Utara tidak memenuhi hal tersebut.

Indikator lainnya berkaitan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan tren yang meningkat sepanjang tahun. Pada tahun 2019, NTP Provinsi Kalimantan Utara sebesar 100,81. Semenjak tahun 2019 hingga 2022, NTP Provinsi Kalimantan Utara memiliki nilai yang lebih unggul dibandingkan NTP Nasional. NTP Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2020 sebesar 102,74 dan meningkat sebesar 6,61 atau menjadi 109,35 di tahun 2022. Tahun 2023 nilai NTP menunjukkan peningkatan menjadi 111,92 yang dapat disimpulkan adanya perbaikan kesejahteraan petani sepanjang tahun 2019 hingga 2023.

Tabel 2.96
Indikator Urusan Lapangan Usaha Milik Sendiri/Bersama Kab/Kota Sektor Pertanian Tahun 2022

No	Kab/Kota	Satuan	Perempuan	Laki-Laki
1.	Malinau	Orang	1.492	6.576
2.	Bulungan	Orang	1.214	9.045
3.	Tana Tidung	Orang	169	1.630
4.	Nunukan	Orang	1.500	12.337
5.	Kota Tarakan	Orang	485	6.714
Total		Orang	4.860	36.302

Sumber: Regsosek dalam Sepakat, 2022

Berdasarkan tabel tersebut yang menunjukkan sebaran tenaga kerja sektor pertanian menurut gender berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh laki-laki sebanyak 36.302 orang. Tenaga kerja perempuan hanya sekitar 11 persen dari total tenaga kerja atau sebanyak 4.860 orang. Selain itu, Kabupaten Nunukan memiliki sebaran tenaga kerja terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara untuk sektor pertanian yaitu perempuan sebesar 1.500 orang dan laki-laki sebesar 12.337 orang.

C. Kehutanan

Pada urusan kehutanan terdapat 3 indikator yang menjadi kewenangan provinsi yang ditampilkan secara timeseries dari tahun 2019 hingga 2023. Urusan kehutanan antara lain yaitu kawasan

lindung, kerusakan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta pengelolaan sumber daya hutan.

Tabel 2.97
Indikator Urusan Kehutanan

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Persen	2,623	1,36	1,93	3,06	0,92
2.	Kerusakan kawasan hutan	Persen	t.a.d	t.a.d	t.a.d	0,007	0,0139
3.	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Persen	33,64	33,64	41,22	t.a.d	t.a.d

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, 2018-2023

Berdasarkan data diatas, luasan kawasan lindung mengalami kondisi dengan tren meningkat pada tahun tersedia yaitu 2019-2021. Hal tersebut disebabkan meningkatnya luasan Kawasan lindung berdasarkan Surat Keputusan 6631/MenLHK[PKTL/KUH/PLA.2/10/ 2021.

Kemudian, indikator rehabilitasi hutan dan lahan kritis mengalami kondisi fluktuatif dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Kecenderungan tren menunjukan jumlah rehabilitasi hutan kritis mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 0,92 persen dari tahun 2019 sebesar 2,623 persen. Selain itu, kerusakan kawasan hutan mengalami kenaikan pada tahun 2022 dengan nilai 0,007 persen menjadi 0,0139 persen di tahun 2023. Hal tersebut disebabkan karena adanya kebakaran hutan dan penebangan liar yang masih terjadi. Dengan data tersebut, adanya kerusakan hutan serta rendahnya upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis dapat menyebabkan permasalahan terkait deforestasi hutan.

D. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada urusan energi dan sumber daya mineral terdapat 3 indikator yang menjadi kewenangan provinsi yang ditampilkan secara timeseries dari tahun 2019 hingga 2023. Urusan energi dan sumber daya mineral antara lain yaitu kawasan pertambangan, ketahanan energi, perizinan tambang, kerusakan akibat pertambangan, ketersediaan daya listrik, serta masyarakat pengguna listrik.

Tabel 2.98
Indikator Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio elektrifikasi	Persen	78,96	80,71	86,44	91,19	95,08
2.	Rasio desa berlistrik	Persen	68,88	71,16	76,97	80,08	81,95

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara, 2018-2023 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Tabel tersebut menunjukkan, tidak tersedia data terkait pertambangan tanpa ijin karena adanya perbedaan perihal data yang dihitung oleh dinas terkait yaitu data pertambangan dengan ijin. Kemudian dari ketenagalistrikan, digambarkan melalui rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik. Rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik memiliki tren meningkat di tahun 2024 dari tahun 2020 dengan nilai 78,96 persen menjadi 95,08 persen untuk rasio elektrifikasi dan 68,88 persen menjadi 81,95 persen untuk rasio desa berlistrik. Berdasarkan target rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik nasional sebesar 100 persen pada tahun 2024, di Kalimantan Utara belum seluruhnya rumah tangga dapat teraliri jaringan listrik akibat adanya permasalahan terkait terbatasnya distribusi sumber listrik bagi wilayah-wilayah terpencil yang memiliki akses jaringan konektivitas terbatas. Hal ini menunjukan belum terpenuhinya penyediaan akses jaringan kelistrikan.

E. Perdagangan

Urusan perdagangan menggambarkan kegiatan transaksi barang dan/atau jasa baik di dalam negeri maupun ke luar negeri yang bertujuan memperluas pasar dan pendapatan pelaku usaha maupun daerah. Urusan tersebut memiliki 2 indikator yaitu ekspor bersih dan cakupan bina kelompok pedagang usaha. Berikut indikator kinerja pembangunan urusan perdagangan.

Tabel 2.99
Indikator Urusan Perdagangan

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ekspor bersih perdagangan	Ribu US$	862.125	1.588.975	100.250	112.240	
2.	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	Persen	0,188	0,065	0,008	0,033	

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Jumlah pasar permanen	Pasar	52	52	54	54	53
4.	Jumlah pasar semi permanen	Pasar	47	47	47	47	48

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Unit Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Utara, 2024 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Indikator ekspor bersih perdagangan didapatkan melalui perhitungan nilai ekspor daerah dikurangi oleh nilai impor daerah. Berdasarkan tabel tersebut, ekspor bersih perdagangan mengalami peningkatan sepanjang tahun 2019 hingga 2021, tetapi menurun secara drastis di tahun 2022 dan 2023. Penurunan pada tahun 2022 mencapai 94 persen atau menjadi 100.250 ribu US$ dari nilai sebelumnya yang mencapai 1.588.975 ribu US$ di tahun 2021. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan ekspor dagang nasional yang diikuti oleh perlambatan ekonomi global. Selain itu, indikator cakupan bina kelompok dagang menunjukkan tren penurunan sepanjang tahun. Pada tahun 2019, bina kelompok dagang mencapai 0,094 persen menurun drastis di tahun 2022 dengan capaian 0,008 persen. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya pelatihan pengelolaan pasar dan pelaku usaha. Indikator lainnya yang menggambarkan kegiatan perdagangan di Provinsi Kalimantan Utara adalah jumlah pasar.

Jumlah pasar pada tahun 2020 mencapai 99 pasar dengan di dominasi oleh bangunan permanen sebanyak 52 pasar. Jumlah pasar terus bertumbuh hingga mencapai total 101 pasar di tahun 2024 dengan jumlah pasar permanen sebesar 53 pasar dan jumlah pasar permanen semi permanen sebesar 48 pasar. Berdasarkan data pada tabel tersebut, permasalahan yang dihadapi adalah iklim perekonomian global yang menghambat perdagangan internasional.

Tabel 2.100
Indikator Sebaran Tenaga Kerja Urusan Perdagangan Menurut Gender Tahun 2022

Indikator	Satuan	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Jumlah
Perempuan	Orang	177	337	480	517	587	871	1073	1291	1442	1470	8245
Laki-Laki	Orang	365	628	760	809	756	1017	1220	1223	1327	1085	9190

Sumber: Sepakat dalam Regsosek, 2022

Sementara itu, sebaran tenaga kerja urusan perdagangan berdasarkan gender yang dibagi menurut desil satu hingga sepuluh

(pendapatan). Secara keseluruhan, perdagangan baik besar, eceran, serta reparasi dan perawatan motor dan mobil didominasi oleh tenaga kerja laki-laki dengan total 9.190 tenaga kerja di tahun 2022. Sementara, tenaga kerja menurut perempuan memiliki total sebesar 8.245 tenaga kerja di tahun 2022. Sebaran tenaga kerja menurut gender yang dibagi per desil (pendapatan) memiliki tren yang cukup unik. Dari D8 hingga D10 yang menunjukkan golongan rata-rata pendapatan tinggi didominasi oleh perempuan dengan total 4.203 tenaga kerja dibandingkan laki-laki yang hanya 3.635 tenaga kerja.

F. Perindustrian

Urusan perindustrian menggambarkan pembinaan dan pengembangan produksi industri dan pengembangan usaha industri, khususnya pada pelaku usaha. Urusan tersebut hanya memiliki satu indikator yaitu cakupan bina kelompok pengarajin. Berikut indikator kinerja pembangunan urusan perindustrian.

Tabel 2.101
Indikator Urusan Perindustrian

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	10,12	8,48	2,35	2,82	4,68
2.	Jumlah industri besar dan sedang	Industri	29	32	32	40	45,48
3.	Jumlah industri mikro dan kecil	Industri	7.194	3.704	4.262	4.262	4.706

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Unit Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Utara, 2024

Indikator cakupan bina kelompok pengrajin menjelaskan banyaknya jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda terhadap total pengrajin. Berdasarkan tabel tersebut, cakupan bina kelompok pengrajin mengalami kecenderungan berfluktuasi sepanjang tahun. Pada tahun 2019, bina kelompok pengrajin sebesar 10,12 persen dan mengalami penurunan serta peningkatan pada tahun berikutnya menjadi 4,68 persen di tahun 2023. Indikator lainnya adalah terjadinya peningkatan pada jumlah industri besar dan sedang menjadi 45 industri di tahun 2023. Sementara jumlah industri mikro dan kecil mengalami penurunan sepanjang tahun 2019

hingga 2020. Mulai tahun 2021 terjadi peningkatan hingga mencapai 4.706 industri di tahun 2023.

Berdasarkan data pada tabel tersebut, permasalahan yang terjadi terkait cakupan bina kelompok pengrajin menjadi 2,35 persen disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan terkait produk, manajamenen, dan pemasaran. Selain itu, fluktuasi yang terjadi pada jumlah industri disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan rencana pembangunan industri di kabupaten/kota.

G. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan program nasional dengan tujuan pemerataan pembangunan daerah. Urusan transmigrasi diwakilkan dengan dua indikator yaitu persentase transmigrasi swakarsa dan jumlah transmigran umum. Berikut indikator kinerja pembangunan urusan transmigrasi.

Tabel 2.102
Indikator Urusan Transmigrasi

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Transmigrasi Swakarsa	Persen	0	0	0	0	0
2	Jumlah Transmigran Umum	Orang	12.505	12.505	12.525	12.529	12.529

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara, 2024 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Pada indikator persentase transmigrasi swakarsa menunjukkan nilai nol persen sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Indikator lainnya yang menunjukkan aktivitas transmigrasi adalah jumlah transmigran umum yang meningkat sepanjang tahun menjadi 12.529 orang di tahun 2024. Permasalahan yang terjadi pada transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara adalah aksesbilitas sarana dan prasana, khususnya infrastruktur jaringan internet, terkait kegiatan ekonomi warga transmigran belum optimal secara baik.

Berdasarkan data pada tabel tersebut, program transmigrsi swakarsa tidak tersedia pada sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bidang Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara bahwa tidak ada program transmigrasi swakarsa selama periode tersebut. Program

transmigrasi swakarsa terakhir kali dilakukan pada tahun 2012 hingga 2014 di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Menjelutung dan Linuang Kayam, Kabupaten Tana Tidung sebanyak 65 kepala keluarga.

H. Kelautan dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan menggambarkan aktivitas kelautan yang mendukung penyediaan bahan pangan protein, pendapatan nelayan daerah, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Urusan tersebut memiliki 7 indikator yang terdiri dari produksi ikan, konsumsi ikan, cakupan bina kelompok ikan, proporsi tangkapan nelayan, kawasan lindung perairan, dan nilai tukar nelayan. Berikut indikator kinerja pembangunan urusan kelautan dan perikanan.

Tabel 2.103
Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Produksi Ikan	Ton	540.150	562.702	676.197	833.633	1.013.666
2.	Konsumsi Ikan	Indeks	69,70	73,00	71,97	72,75	72,75*
3.	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	6,83	1,61	57,03	4,819	t.a.d.
4.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam Batasan biologis yang aman	Persen	49,99	55,70	50,94	55,54	t.a.d.
5.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	Rasio	t.a.d.	4,58	4,58	4,75	4,14
6.	Nilai tukar nelayan	Nilai	100,81	102,74	105,85	109,35	111,92

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, 2024

Pada indikator produksi perikanan menunjukkan peningkatan sepanjang tahun. Pada tahun 2019, produksi perikanan sejumlah 540.150 ton dan bertambah menjadi 1.013.666 ton pada tahun 2023. sebagian besar kontribusi produksi perikanan adalah produksi ikan budidaya, termasuk rumput laut dan udang, yang mencapai 981.131 ton. Indikator lainnya adalah konsumsi ikan yang menunjukkan angka konsumsi ikan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara semakin membaik setiap tahunnya. Angka Konsumsi Ikan (AKI) Provinsi Kalimantan Utara juga menunjukkan capaian di atas rata-rata nasional.

Indikator cakupan bina kelompok nelayan menjelaskan banyaknya jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan binaan pemda terhadap total nelayan. Data tersedia hanya pada tahun 2019 hingga 2022

yang menunjukkan adanya peningkatan drastis di tahun 2021 menjadi 57,03 persen. Indikator lainnya adalah proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman menunjukkan fluktuasi sedangkan rasio kawasan lindung perairan menunjukkan penurunan sepanjang tahun 2020 hingga 2023. Selain itu, nilai tukar nelayan menunjukkan perbaikan sepanjang tahun 2019 hingga 2023. Meskipun terdapat pertumbuhan setiap tahunnya, nilai tukar nelayan masih menunjukkan dibawah rata-rata nasional yaitu 122,01 di tahun 2023.

Berdasarkan paparan data pada tabel tersebut, produksi perikanan telah menunjukkan peningkatan tetapi optimalisasi produksi tangkapan masih kurang dibandingkan dengan potensi sesuai WPP176 di Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, permasalahan yang terjadi adalah kurangnya optimalisasi produk unggulan kelautan dan perikanan, termasuk rumput laut akibat sarana dan prasarana penunjang kegiatan kelautan dan perikanan seperti pelabuhan perikanan dan industri pengolahan.

2.1.8. Penunjang Urusan

A. Perencanaan Pembangunan

Urusan perencanaan pembangunan membahas mengenai ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RTRW, dan penjabaran program yang tersedia di dokumen tersebut. Selama tahun 2018-2023 dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA telah tersedia. Sementara data kinerja pembangunan urusan perencanaan pembangunan tentang penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD, penjabaran konsistensi RKPD ke dalam APBD dan kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW belum tersedia data.

Tabel 2.104
Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021

B. Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Berikut merupakan indikator kinerja pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan keuangan.

Tabel 2.105
Indikator Urusan Keuangan Daerah

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	14,65	3,62	11,09	16,02	4,62
3	Persentase belanja pendidikan terhadap total APBD	Persen	11,89	13,59	26,85	22,41	18,14
4	Persentase belanja kesehatan terhadap total APBD	Persen	12,72	13,53	15,95	16,42	12,89
5	Persentase belanja operasi terhadap total APBD	Persen	64,74	64,45	69,43	63,81	62,99
6	Persentase belanja modal terhadap total APBD	Persen	23,48	24,82	16,48	19,45	20,1
7	Persentase bagi hasil kabupaten/kota dan desa terhadap APBD	Persen	8,82	8,35	10,57	9,57	11,37
8	Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
9	Persentase peningkatan PAD	Persen	14,24	-14,97	21,55	20,34	20,16

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2023, Diolah

Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaporan keuangan yang dilakukan telah sesuai dan mencapai predikat yang baik. Selanjutnya, capaian indikator persentase SILPA terhadap APBD di Provinsi Kalimantan Utara tercatat

fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2019, capaian indikator di provinsi ini tercatat sebesar 14,65 persen dan berfluktuasi menjadi 4,62 persen di tahun 2023. Pertumbuhan SILPA dapat digunakan untuk menilai kinerja anggaran, dimana pada SILPA positif memberikan indikasi kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal daerah yang baik. Tingginya besaran SILPA tersebut diinterpretasikan menjadi dua hal, yakni dari sisi positif dan negatif. Pada sisi positif adalah adanya imbal balik yang diterima oleh pemerintah daerah dari SILPA yang diperoleh yang kemudian disimpan di lembaga keuangan berupa pendapatan bunga yang masuk dalam pos lain-lain PAD yang sah dan dapat digunakan untuk penambahan pada alokasi belanja khususnya belanja modal pada tahun anggaran berikutnya. Sementara itu dampak negatifnya adalah adanya belanja daerah yang tertunda di tahun berkenaan.

Belanja pendidikan merupakan satu dari empat mandatory spending yang ditetapkan oleh pemerintah. Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran daerah yang sudah diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Adapun alokasi belanja pendidikan sebesar 20 persen dari APBD didasarkan pada amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan alokasi belanja urusan pendidikan, maka dapat diketahui bahwa dalam rentang waktu tahun 2018 hingga 2020, capaian persentase pendidikan terhadap APBD Provinsi Kalimantan Utara masih berada di bawah 20 persen sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, sementara itu capaian tersebut kemudian menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021 hingga capaiannya telah mampu melampaui 20 persen dari APBD Provinsi Kalimantan Utara, dan capaian tersebut tetap dipertahankan hingga tahun 2022. Selanjutnya, capaian tersebut kembali menunjukkan kecenderungan menurun di tahun 2023, hingga besarannya menjadi 18,14 persen dari total APBD. Sementara itu, dalam rentang enam tahun terakhir capaian persentase belanja urusan kesehatan di provinsi ini telah mampu melampaui 10 persen dari total APBD Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2019, capaian indikator ini tercatat sebesar 12,72 persen dan mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 16,42

persen, namun menunjukkan sedikit penurunan kembali menjadi 12,89 persen di tahun 2023.

Capaian persentase belanja operasi terhadap APBD di provinsi ini merupakan yang tertinggi apabila dibandingkan dengan komponen belanja lainnya, di mana pada tahun 2019 capaiannya tercatat sebesar 64,74 persen dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 hingga besarannya menjadi 62,99 persen. Selanjutnya untuk Persentase belanja modal terhadap total APBD pada tahun 2019, capaian indikator tersebut tercatat sebesar 23,48 persen dan berflukuasi hingga menjadi 20,10 persen di tahun 2023.

Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa indikator bagi hasil kabupaten/kota dan desa merupakan indikator yang dihitung dengan membandingkan besaran jumlah belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa dengan total APBD. Dalam rentang waktu tahun 2019 hingga 2023, komponen bagi hasil pendapatan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,44 persen per tahun. Pada tahun 2018, komponen tersebut tercatat sebesar Rp 145.529.883.605,39 dan bertumbuh menjadi Rp 368.800.299.772,00 di tahun 2023. Selanjutnya, peningkatan nominal pada komponen transfer bagi hasil pendapatan tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya capaian indikator persentase transfer bagi hasil pendapatan terhadap APBD. Capaian indikator tersebut tercatat sebesar 8,82 persen di tahun 2019 dan bertumbuh menjadi 11,37 persen.

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) suatu daerah dinilai dari segi ketepatan waktu penetapannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa apabila APBD mengalami keterlambatan atau tidak menetapkan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD maka kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya, di mana pengeluaran tersebut diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan wajib. Keterlambatan waktu dalam menetapkan APBD dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, penetapan

APBD di Provinsi Kalimantan Utara tercatat tepat waktu, dengan persentase penetapan APBD tepat waktu sebesar 100 persen atau sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Terakhir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Secara umum, dalam rentang waktu tahun 2019 hingga 2023, PAD Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,29 persen per tahun. Pada tahun 2018, jumlah PAD provinsi ini tercatat sebesar Rp 574.088.357.593,08 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 hingga besarannya menjadi sebesar Rp 980.136.675.968,05. Namun apabila dilihat secara lebih detail, persentase peningkatan PAD di provinsi ini terlihat sangat fluktuatif. Pada tahun 2019, capaian indikator ini tercatat sebesar 14,24 persen. Namun pada tahun 2020, besaran PAD di provinsi ini tercatat menurun yang berpengaruh pada turunnya capaian indikator persentase peningkatan PAD yang turut tumbuh negatif, yakni sebesar -14,97 persen. Penurunan yang terjadi pada tahun tersebut merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang pada saat itu mengakibatkan terkontraksinya berbagai sektor ekonomi. Selanjutnya, seiring dengan pulihnya pandemi dan kondisi perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara, berpengaruh positif pula pada capaian persentase peningkatan PAD di provinsi ini yang tercatat sebesar 21,55 persen di tahun 2021 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 menjadi sebesar 10,16 persen.

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan membahas mengenai kompetensi ASN, pelatihan yang diberikan ASN, serta jumlah jabatan di instansi pemerintah. Berikut indikator kinerja pembangunan urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

Tabel 2.106
Indikator Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	32	30	44	39	
2	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	2.413	2.388	2.295	1.775	
3	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	1.414	1.691	2.107	3.050	
4	Indeks profesionalitas ASN	Angka (1-100)	t.a.d	49,97	54,04	66,61	80,09

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 2024 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah dari tahun 2019-2023 bersifat fluktuatif, yang mana pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan dari 32 jabatan menjadi 30 jabatan, tetapi di tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 44 jabatan, namun tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 39 jabatan. Kemudian, jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah bersifat fluktuatif dan cenderung menurun di tahun 2020 hingga tahun 2023, yang mana pada tahun 2020 jumlah jabatan administrasi sebanyak 2.413 jabatan, tetapi menurun di tahun 2023 menjadi 1.775 jabatan. Selanjutnya, jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah bersifat fluaktuatif dan cenderung mengalami kenaikan, puncak kenaikan berada pada tahun 2021 hingga 2023, sebanyak 1.691 orang (2021), naik pada tahun 2023 menjadi 3.050 orang. Akan tetapi, dengan banyaknya jumlah jabatan fungsional ini, masih terdapat permasalahan atau kendala seperti belum optimalnya manajemen talenta serta analisis kebutuhan pegawai jabatan fungsional.

Indeks profesionalitas ASN mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024 yakni 80,09 persen, nilai tersebut masih optimal terkait indeks profesionalitas ASN. Hal ini dikarenakan belum optimalnya manajemen talenta, masih banyak jabatan yang belum sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK), dan kualifikasi pendidikan tidak diukur berdasarkan standar kualifikan jabatan, tetapi dikukur berdasarkan jenjang pendidikan. Berdasarkan data indikator urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, masih terdapat

permasalahan atau kendala seperti belum optimalnya manajemen talenta dan analisis kebutuhan pegawai jabatan fungsional.

D. Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan membahas mengenai kondisi kelitbangan, kebijakan penyelenggaran pemerintahan, dan fasilitasi layanan pemerintahan. Dalam Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017 untuk urusan penelitian dan pengembangan terdapat 9 indikator yang dapat digunakan melihat capaian kinerja pembangunan, yakni persentase implementasi rencana kelitbangan, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, penerapan SIDa, persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah, persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah, persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah, capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah, cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan. Namun demikian indikator-indikator tersebut belum tersedia data, sehingga tidak dapat melihat perkembangan kinerja urusan penelitian dan pengembangan.

Tabel 2.107
Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penelitian yang dihasilkan oleh Bappeda dan Litbang	Dokumen	3	3	2	4	8
2	Jumlah inovasi daerah yang dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan Utara	Inovasi	159	50	54	57	79

Sumber: Data sektoral OPD Provinsi Kalimantan Utara Bidang Perencanaan, 2024 dan Satu Data Indonesia (SDI) Kaltara, 2025

Jumlah penelitian yang dihasilkan oleh Bappeda dan Litbang bersifat fluktuatif, mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga tahun 2024, peningkatan tersebut dari dua dokumen menjadi delapan dokumen di tahun 2024. Sementara itu, jumlah inovasi daerah yang dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2020 hingga tahun 2024, dimana jumlah inovasi

daerah di tahun 2020 sebesar 159 inovasi daerah, tetapi mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2024 menjadi 79 inovasi daerah.

E. Pengawasan

Urusan pengawasan membahas mengenai temuan pelanggaran pegawai dan temuan BPK. Jumlah temuan BPK berisfat fluaktuatif dan cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga 2022. Temuan BPK terbanyak berada pada tahun 2021 yaitu 73 temuan. Hal ini mengisyaratkan masih banyak tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Provinsi Kalimantan Utara. Sementara data persentase tindak lanjut temuan dan persentase pelanggaran pegawai tidak tersedia data. Berikut indikator kinerja pembangunan yang terkait urusan pengawasan.

Tabel 2.108
Indikator Urusan Pengawasan

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah temuan BPK	Temuan	33	33	73	57	t.a.d

Sumber: Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara, 2024

F. Sekretariat Dewan

Urusan sekretariat dewan membahas mengenai ketersediaan program kerja, rencana kerja, dan dokumen dalam melakukan fungsi pengawasan serta pembentukan perda. Berikut indikator kinerja pembangunan daerah yang terkait dengan urusan sekretariat dewan.

Tabel 2.109
Indikator Urusan Sekretariat Dewan

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Laporan	7	7	7	7	7
2	Tersusun dan terintegrasinya program- program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Program	2	2	1	1	1
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen	Program	2	2	1	1	1

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	Anggaran Sekretariat DPRD						

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara, 2024

Indikator tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tidak mengalami perubahan sejak tahun 2019 hingga 2023 yaitu tersedia 7 laporan. Selanjutnya, indikator tersusun dan terintegrasinya program- program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) dan terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan serta dokumen anggaran sekretariat DPRD tidak banyak mengalai perubahan. Terjadi penurunan dari 2 program tahun 2020 menjadi 1 program tahun 2021 hingga tahun 2023.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Subbab ini memuat gambaran Realisasi RPJMD melalui capaian RKPD, dan capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

a. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan pembangunan dilakukan untuk menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi pembangunan dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD tahun 2024. Hasil evaluasi RKPD tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1) Capaian Indikator Makro Daerah

Indikator makro daerah merupakan tolok ukur yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Indikator kinerja makro meliputi: Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Gini.

Perkembangan indikator makro daerah Provinsi Kalimantan Utara selama periode tahun 2022 sampai dengan 2024 pada umumnya menunjukkan tren positif, kecuali pada indikator pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 2023 sampai dengan 2024, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara menunjukkan perlambatan.

Tabel 2.110
Capaian Indikator Makro Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2022 sampai dengan Triwulan I 2025

No	Indikator	Satuan	Realisasi		
			2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,21	72,88	73,41
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,34	4,94	4,57
3	Angka Kemiskinan	Persen	6,86	6,45	5,38
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,33	4,01	3,90
5	Indeks Gini	Poin	0,27	0,277	0,259

Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024, 2025

Adapun penjelasan capaian masing-masing indikator makro, diuraikan sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Utara selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan tren positif. Pada 2022, IPM Kalimantan Utara mencapai 72,21. Sedangkan IPM Kalimantan Utara tahun 2024 dengan penghitungan UHH hasil LF SP2020 mengcapai angka 73,41. IPM Kalimantan Utara mulai kembali membaik dan tumbuh lebih cepat pasca pandemi COVID-19 mulai 2021 hingga saat ini.

Pada tahun 2024, penghitungan IPM masih menghasilkan 2 angka dengan penghitungan berdasarkan indikator UHH hasil SP2010 dan UHH hasil LF SP2020. IPM Kalimantan Utara dengan UHH hasil SP2010 tahun 2024 tercatat sebesar 73,02, meningkat 0,53 poin dari tahun sebelumnya. Sedangkan IPM dengan penghitungan UHH hasil LF SP2020 menghasilkan angka 73,41. Capaian ini didukung adanya peningkatan dari semua komponen penyusun IPM. Dengan capaian ini, status pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Utara masih berstatus “tinggi”.

Rincian masing-masing komponen pembentuk IPM Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan capaian tahun 2024, dijelaskan sebagai berikut:

1) Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir dengan penghitungan hasil SP2010 tercatat 72,73 tahun. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 72,73 tahun, lebih lama 0,04 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya. Sedangkan untuk UHH dengan penghitungan hasil LF SP2020 tercatat 73,57 tahun. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk hidup hingga 73,57 tahun, lebih lama 0,03 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya.
2) Harapan Lama Sekolah (HLS) tercatat 13,21 tahun yang berarti anak-anak yang pada tahun 2024 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,21 tahun atau hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang Diploma I. HLS tahun 2024 tercatat lebih lama 0,01 tahun dibandingkan dengan tahun 2023.
3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tercatat 9,35 tahun yang berarti penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9 tahun atau setara dengan lulus SMP. Angka ini juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 9,34 tahun.
4) Pengeluaran per kapita disesuaikan tercatat sebesar 10,197 juta rupiah/orang/tahun yang berarti secara riil, pada tahun 2024 masyarakat Kalimantan Utara memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 10,197 juta rupiah/orang/tahun.

Secara nasional, IPM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 dengan penghitungan UHH hasil SP2010 berada pada urutan ke-21, sedangkan IPM dengan UHH hasil LF SP2020 berada di urutan ke-24. Sementara itu, jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di pulau Kalimantan, dengan IPM hasil penghitungan UHH SP2010 Kalimantan Utara menempati urutan ketiga, setelah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Sedangkan IPM dengan UHH hasil LF SP2020, Kalimantan Utara menempati urutan keempat,

setelah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Setelah lebih dari dua tahun menghadapi pandemi COVID-19, perekonomian Provinsi Kalimantan Utara semakin membaik. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kalimantan Utara pada tahun 2024 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kalimantan Utara atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2024, mencapai 73,01 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 69,82 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,57 persen, sedikit mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 4,94 persen.

Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Sembilan lapangan usaha mengalami pertumbuhan diatas 5 persen; Lima lapangan usaha mengalami pertumbuhan antara 2 s.d. 5 persen, sedangkan sisanya tumbuh kurang dari 2 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan diatas 5 persen antara lain; Konstruksi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,95 persen; dikuti oleh Penyedia Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,87 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,80 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 7,36 persen; Jasa Lainnnya sebesar 6,81 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,41 persen; Transporatsi dan Pergudangan sebesar 5,51 persen; Jasa Pendidikam sebesar 5,46 persen dan Informasi dan Komunikasi tumbuh 5,12 persen.

c. Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada September 2024 sebesar 41,11 ribu (5,38 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 47,83 ribu (6,32 persen), jumlah penduduk miskin secara absolut berkurang 6,72 ribu jiwa dan secara persentase menurun 0,94 persen poin.

Jumlah penduduk miskin daerah perkotaan mengalami kenaikan baik secara absolut maupun persentase sedangkan penduduk miskin daerah pedesaan mengalami penurunan secara absolut maupun persentase. Selama periode Maret-September 2024, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sebanyak 1,88 ribu jiwa dari 23,18 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 25,06 ribu orang pada September 2024 atau secara persentase naik sebesar 0,34 persen poin dari 4,73 persen menjadi 5,07 persen. Penduduk Miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan sebanyak 8,6 ribu jiwa dari 24,65 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 16,05 ribu orang pada September 2024 atau secara persentase turun 3,27 persen poin dari 9,23 persen menjadi 5,96 persen.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Utara selama periode Tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan tren penurunan, sama dengan yang terjadi di nasional. Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 berjumlah 559.623 orang, yang terdiri dari 393.704 orang angkatan kerja dan 165.919 orang bukan angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 mencapai angka 70,35 persen dan tingkat pengangguran pada tahun 2024 adalah 3,90 persen. Sementara TPT nasional pada tahun 2024 mencapai 4,91 persen, diatas dari Kalimantan Utara.

e. Indeks Gini

Angka Indeks Gini di Provinsi Kalimantan Utara pada periode 2022-2024 berfluktuatif namun cenderung menurun. Indeks Gini Kalimantan Utara pada September 2024 tercatat sebesar 0,259. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan Indeks Gini Maret 2024 yang sebesar 0,264.

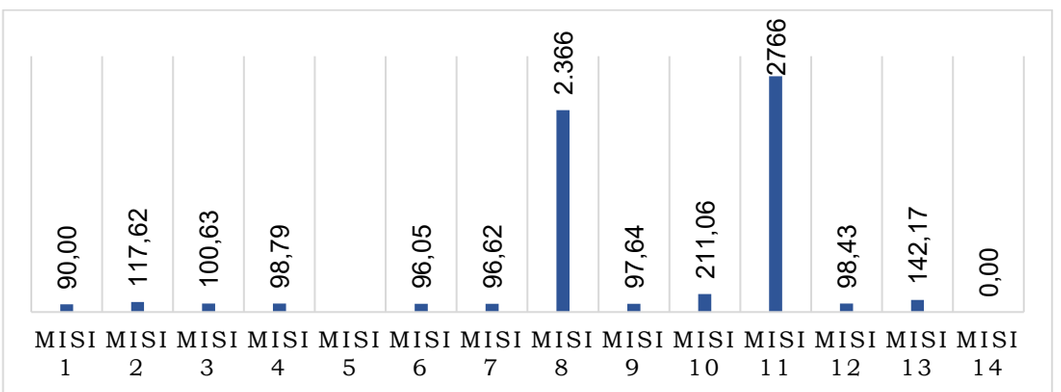
Berdasarkan daerah tempat tinggal, Indeks Gini di daerah perkotaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,245 menurun dibanding Indeks Gini Maret 2024 yang sebesar 0,258, sedangkan Indeks Gini di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,265 turun dibandingkan Indeks Gini Maret 2024 yang sebesar 0,273.

Secara nasional, Kalimantan Utara menempati peringkat kedua dengan Gini Ratio terendah, menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan, Gini Ratio Kalimantan Selatan sebesar 0,298, diikuti oleh Kalimantan Tengah sebesar 0,304, Kalimantan Timur sebesar 0,310, dan Kalimantan Barat sebesar 0,314.

2) Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD

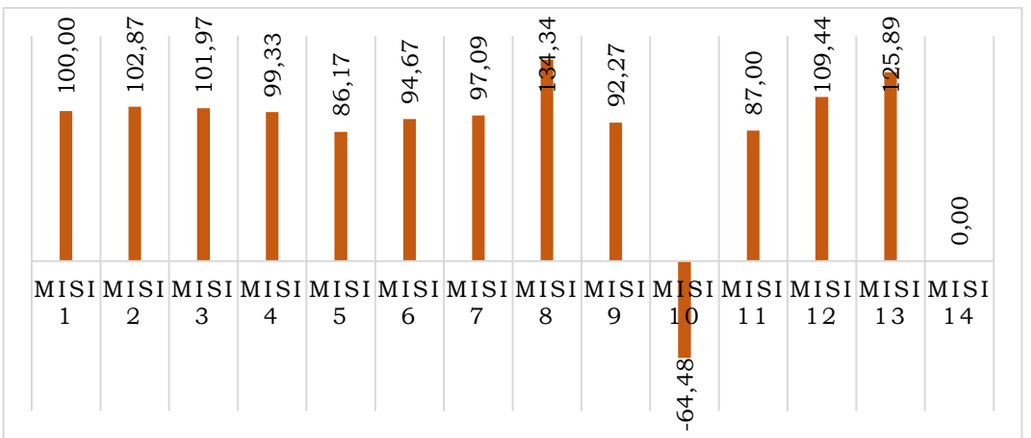
Indikator Tujuan dan Sasran RKPD Tahun 2025 merupakan indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Pemerintah Kalimanatan Utara menetapkan seluruh indikator tujuan dan sasaran RPJMD menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja tujuan dan sasaran sekaligus menjadi gambaran capaian IKU. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan serangkaian indikator untuk mengukur keberhasilan perwujudan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara.

Tingkat capaian indikator tujuan RKPD tahun 2024 di misi 8 dan 11 melampaui 100 persen sebab realisasi indikator Nilai Intensitas Energi dan Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMA+PMDN) yang melampuai target. Sementara indikator lain umumnya mencapai diatas 90 persen kecuali misi 5 dan misi 14. Indikator di misi 5 yakni Indeks Layanan Infrastruktur belum ada data realisasi, sementara Misi 14 memiliki nilai 0 sebab indikator wilayah administrasi pemerintahan yang dikembangkan (kecamatan) tidak mencapai target.



Gambar 2.62.
Rata-Rata Tingkat Capaian Tujuan RKPD 2024 Berdasarkan Misi (%)
Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024, 2025

Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran RKPD tahun 2024 berdasarkan Misi RPJMD, sebagian besar mencapai diatas 90 persen. Hanya tingkat capaian sasaran pada Misi 11 yang mencapai 87 persen dan Misi 10 yang minus 64,48. Penyebab tingkat capaian sasaran di Misi 10 mencapai minus yakni tidak tercapainya indikator Pertumbuhan Koperasi Sehat. Sementara sasaran di misi 14 mencapai 0% sebab indikator Jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang dikembangkan (kecamatan) tidak tercapai.



Gambar 2.63.
Rata-Rata Tingkat Capaian Sasaran RKPD 2024 Berdasarkan Misi (%)

Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024, 2025

Pencapaian indikator tujuan dan sasaran RKPD tahun 2024 yang membandingkan target dengan realisasi disajikan pada tabel di bawah. Terdapat 1 indikator tujuan dan 5 indikator sasaran yang belum ada data, sehingga tidak dapat diukur tingkat capaiannya. Berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

a. Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan:
   1) Indikator kinerja tujuan yang melampaui target yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Proporsi Desa Tertinggal.
   2) Terdapat beberapa indikator tujuan RKPD yang belum mencapai target 100%, walaupun sudah mencapai predikat Sangat Tinggi (<91-100%).
   3) Indikator tujuan yang belum mencapai target 100%, meliputi: Indeks Ketahanan Nasional, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai PDRB (ADHK), Nilai PDRB (ADHB), Indeks Kerukunan Umat Beragama, dan Proporsi Desa Tertinggal

b. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran:

1) Indikator kinerja sasaran yang mencapai dan melampaui target yaitu: Angka Kriminalitas Tertangani, Indeks Risiko Bencana, Predikat SAKIP, Indeks Maturitas SPBE, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Air Laut, Indeks Ketahanan Pangan, Nilai Tukar Petani, Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, Pengeluaran Per Kapita, Jumlah Kunjungan Wisatawan, Cakupan Rumah Tangga Teraliri Listrik, Rasio Elektrifikasi, Rasio Angka Harapan Hidup Perempuan : Laki-/laki, Rasio Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan : Laki-/laki, Jumlah Desa Mandiri, dan Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal.
2) Terdapat beberapa beberapa indikator sasaran RKPD yang belum mencapai target 100%, walaupun sudah mencapai predikat Sangat Tinggi (<91-100%).
3) Indikator sasaran yang belum mencapai target 100%, meliputi: Maturitas SPIP, Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Nilai Tukar Nelayan, Skor Dimensi Toleransi, Skor Dimensi Kesetaraan, Skor Dimensi Kerjasama, dan Rasio Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan:Laki-/laki
4) Indikator yang masih berstatus Tinggi, Sedang dan Rendah serta Sangat Rendah yaitu: Cakupan Layanan Transportasi Antar Pusat Kegiatan, Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri, Rasio Pengeluaran Perkapita Perempuan:Laki-/laki, dan Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Investasi.

Tabel 2.111
Realisasi dan Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

No	Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target RPJMD 2024	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi RKPD 2024	Tingkat Capaian RKPD 2024	Predikat Kinerja
1.	Misi 1: Mewujudkan Kalimantan Utara, Yang Aman, Nyaman Dan Damai Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik	**Tujuan 1: Terjaganya Kondusifitas Wilayah**		**Indeks Ketahanan Nasional (indeks)**	**2,80**	**2,8**	**2,8**	**2,52**	**90,00**	**Sangat Tinggi**
		1.1	Meningkatnya Keamanan Dan Ketertiban Wilayah	Angka Kriminalitas Tertangani	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
				Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)	85,25	83,7	83,7	Belum Rilis	-	Tidak Ada Data
		1.2	Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana	Indeks Risiko Bencana (indeks)	153,62	153.62	147	131,84	110,31	Sangat Tinggi
2.	Misi 2: Mewujudkan Sistem Pemerintahan Provinsi Yang Di Topang Oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Pilar Utama Secara Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasiskan Kinerja.	**Tujuan 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel Dan Inovatif**		**Indeks RB (indeks)**	**BB**	**BB**	**BB**	**A**	**117,62**	Sangat Tinggi
		2.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasiskan Kinerja.	1. Predikat SAKIP	BB	BB	BB	BB	100	Sangat Tinggi
				2. Maturitas SPIP	3,3	3,3	3,38	3,048	90,18	Sangat Tinggi
				3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (indeks)	Baik	Baik	Baik	Belum rilis	-	Tidak Ada Data
				4.Indeks Maturitas SPBE (indeks)	3,2	3,2	3,2	3,79	118,44	Sangat Tinggi
3.	Misi 3: Mewujudkan Pembangunan SumberDaya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Inovatif, Berakhlak Mulia, Produktif Dan Berdaya Saing	**Tujuan 3: Mewujudkan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing.**		**Indeks Pembangunan Manusia (indeks)**	**71,58**	**72,1**	**72,95**	**73,41**	**100,63**	**Sangat Tinggi**
		3.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Angka Harapan Hidup (tahun)	72,73	72,73	73,61	73,57	99,95	Sangat Tinggi
		3.2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,45	13,45	13,45	13,21	98,22	Sangat Tinggi

No	Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target RPJMD 2024	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi RKPD 2024	Tingkat Capaian RKPD 2024	Predikat Kinerja
	Dengan Berbasiskan Pendidikan WajibBelajar 16 Tahun Dan Berwawasan Kebangsaan		Dan Kebudayaan Masyarakat	2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,53	9,53	9,53	9,35	98,11	Sangat Tinggi
		3.3	Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Masyarakat	1. Angka Kemiskinan (%)	6,10-5,90	5,90-6,10	5,90-6,10	5,38	111,80	Sangat Tinggi
				2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,33	4,11	3,97	3,90	101,76	Sangat Tinggi
4.	Misi 4. Mewujudkan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dengan Nilai Tambah, Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan, Secara Efisien, Terencana, Menyeluruh, Terarah, Terpadu, Dan Bertahap Dengan Berbasiskan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	**Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)**	**78,62**	**78,62**	**80,93**	**79,95**	**98,79**	**Sangat Tinggi**
		4.1	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	Tingkat Penurunan Emisi GRK	7,774,605	7,774,605	7,774,605		-	Tidak Ada Data
		4.2	Meningkatnya Kualitas Air, Udara Dan Lahan	Indeks Kualitas Air (indeks)	55,12	55,12	55,99	54,31	97,00	Sangat Tinggi
				Indeks Kualitas Udara (indeks)	91.54	91.54	94	92,99	98,93	Sangat Tinggi
				Indeks Tutupan Lahan (indeks)	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
				Indeks Kualitas Air Laut (indeks)	74.74	74.74	83,48	84,65	101,40	Sangat Tinggi
5.	Misi 5: Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Pedalaman, Perkotaan, Pesisir Dan Perbatasan Untuk Meningkatkan	**Tujuan 5: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar**		**Indeks Layanan Infrastruktur (indeks)**	**3,85**	**3,85**	**4,32**	**Belum rilis**	**-**	**Tidak Ada Data**
		5.1	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Konektivitas Antar Pusat-Pusat Kegiatan	Cakupan Layanan Transportasi Antar Pusat Kegiatan (%)	80	80	80	67	83,75	Tinggi
		5.2		1. Cakupan Layanan Air Bersih (%)	66,11	66,11	66,11	49,00	74,12	Sedang

No	Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target RPJMD 2024	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi RKPD 2024	Tingkat Capaian RKPD 2024	Predikat Kinerja
	Mobilisasi Dan Produktifitas Daerah Dalam Rangka Pemerataan Pembangunan		Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	2. Cakupan Akses dan Layanan Telekomunikasi (%)	91	91	97,71	98,34	100,64	Sangat Tinggi
6.	Misi 6: Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Yang Berdaya Saing, Pertumbuhan Ekonomi Dan Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah Serta Meningkatkan Ketahanan Pangan Dengan Berorientasi Pada Kepentingan Rakyat MelaluiSektor Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata, Dan Pertanian Dalam Arti Luas Dengan Pengembangan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata Serta Meningkatkan Konektivitas Antar Kabupaten/Kota	**Tujuan 6: Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing**		**1. Pertumbuhan Ekonomi (%)**	**6,01**	**5,05-5,95**	**5,05-5,95**	**4,57**	**90,50**	**Sangat Tinggi**
				2. Nilai PDRB (ADHK) (miliar rupiah)	**74.201,94**	**74.201,94**	**74.201,94**	**73.008,00**	**98,39**	**Sangat Tinggi**
				3. Nilai PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	**136.635,64**	**136.635,64**	**147.867,73**	**146.793,50**	**99,27**	**Sangat Tinggi**
		6.1	Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata	1. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%)	17,35	17,35	6,48	1,75	27,01	Sangat Rendah
				2. Indeks Ketahanan Pangan (indeks)	73,10	73,1	74,96	75,77	101,08	Sangat Tinggi
				3. Nilai Tukar Petani	103,65	110,45	111,79	112,81	100,91	Sangat Tinggi
				4. Nilai Tukar Nelayan	104,93	105,98	108,47	105,59	97,34	Sangat Tinggi
				5. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri (%)	6,32	6,32	6,32	3,37	53,32	Rendah
				6. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%)	2	2	6,8	9,80	144,12	Sangat Tinggi
				7. Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)	7.985	7.985	9.772,94	10.197,00	104,34	Sangat Tinggi
				8. Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	670,260	670,26	995.231	1.285.834	129,20	Sangat Tinggi
7.	Misi 7: Mewujudkan KualitasKerukunan Dan Kehidupan	**Tujuan 7: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis**		**Indeks Kerukunan Umat Beragama (indeks)**	**81,70**	**81,7**	**81,7**	**78,94**	**96,62**	**Sangat Tinggi**

No	Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target RPJMD 2024	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi RKPD 2024	Tingkat Capaian RKPD 2024	Predikat Kinerja
	Beragama, Etnis Dan Latar Belakang Budaya Dalam Kerangka Semangat Kebhinnekaan di Provinsi Kalimantan Utara	7.1	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama	1. Skor Dimensi Toleransi	80,08	80,08	80,83	79,30	98,11	Sangat Tinggi
				2. Skor Dimensi Kesetaraan	79,80	79,8	83,04	79,38	95,59	Sangat Tinggi
				3. Skor Dimensi Kerjasama	79,94	79,94	80,09	78,15	97,58	Sangat Tinggi
8.	Misi 8: Mewujudkan Ketahanan Energi Dan Pengembangan PLTA Serta Mengembangkan Energi Terbarukan Dengan Pemanfaatan Potensi Daerah	**Tujuan 8: Mewujudkan Ketahanan Energi Daerah**		**Nilai Intensitas Energi (TOE/ Miliyar Rupiah)**	**0.27**	**0,27**	**0,27**	**6,389**	**2.366**	**Sangat Tinggi**
		8.1	Meningkatnya Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Listrik Dan Energi Baru Terbarukan	1. Cakupan Rumah Tangga Teraliri Listrik (KK)	198.045	198.045	216.015	239.045	110,66	Sangat Tinggi
				2. Rasio Elektrifikasi (%)	95,08	95,08	95,08	95,08	100,00	Sangat Tinggi
				3. Nilai Bauran Energi	5,43	5,43	12,41	23,87	192,34	Sangat Tinggi
9.	Misi 9: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kesetaraan Gender Dan Milenial Dalam Pembangunan	**Tujuan 9: Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Milenial Dalam Pembangunan**		**Indeks Pembangunan Gender (indeks)**	**90,60**	**90,6**	**90,6**	**88,46**	**97,64**	**Sangat Tinggi**
		9.1	Meningkatnya Pengarus- Utamaan Gender	Rasio Angka Harapan Hidup Perempuan : Laki-/laki	1,020	1,02	1,06	1,06	99,72	Sangat Tinggi
				Rasio Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan : Laki-/laki	0,970	0,97	0,97	0,94	96,66	Sangat Tinggi
				Rasio Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan : Laki-/laki	1,006	1,006	1,04	1,05	101,05	Sangat Tinggi
				Rasio Pengeluaran Perkapita Perempuan : Laki-/laki	0,65	0,65	0,65	0,47	71,67	Sedang

No	Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target RPJMD 2024	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi RKPD 2024	Tingkat Capaian RKPD 2024	Predikat Kinerja
		9.2	Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda (indeks)	57,60	57,6	57,6	Belum rilis	-	Tidak Ada Data
10.	Misi 10: Mewujudkan Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM	**Tujuan 10: Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Kerakyatan**		**Laju Pertumbuhan Koperasi dan UMKM (%)**	**7.41**	**30,54**	**30,54**	**64,46**	**211,06**	**Sangat Tinggi**
		10.1	Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Koperasi Dan UMKM	1. Pertumbuhan Koperasi Sehat (%)	5	18,6	5	-8,26	-165,14	Sangat Rendah
				2. Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan Kepada UMKM (%)	6,69	17	6,5	2,35	36,17	Sangat Rendah
11.	Misi 11. Meningkatkan Kinerja Pembangunan Dan Investasi Daerah Dengan Melibatkan Pengusaha Dan Investor Lokal Serta Nasional	**Tujuan 11: Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif**		**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMA+PMDN) (%)**	**3**	**3**	**3**	**83**	**2766**	Sangat Tinggi
		11.1	Meningkatnya Kepastian Hukum Berinvestasi	Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Investasi (%)	85	85	85	74	87	Tinggi
12.	Misi 12: Memberi Bantuan Pengembangan Sektor Produktif Dan Potensi Strategis Di Setiap Desa Dan Kelurahan Melalui Pengembangan Produk Lokal Masing-Masing Kabupaten/Kota	**Tujuan 12: Mewujudkan Pemerataan Pendapatan Antar Wilayah Yang Berkeadilan**		**Indeks Williamson (indeks)**	**0,16**	**0,16**	**0,1595**	**0,162**	**98,43**	**Sangat Tinggi**
		12.1	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini (indeks)	0,282	0,265 – 0,286	0,265 – 0,286	0,259	109,44	Sangat Tinggi

No	Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target RPJMD 2024	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Realisasi RKPD 2024	Tingkat Capaian RKPD 2024	Predikat Kinerja
13.	Misi 13: Mewujudkan Pembangunan Yang Berbasiskan RT/Komunitas Dalam Upaya Gerakan Membangun Desa Menata Kota Serta Memberi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Sebagai Pilar ProvinsiSesuai Kemampuan APBD Setiap Tahun	**Tujuan 13: Mewujudkan Pembangunan Desa Yang Berkualitas**		**Proporsi Desa Tertinggal (%)**	**31,32**	**31,32**	**21,27**	**12,30**	**142,17**	**Sangat Tinggi**
		13.1	Meningkatnya Kemandirian Desa	1. Jumlah Desa Mandiri (desa)	40	40	63	72	114,29	Sangat Tinggi
				2. Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal (desa)	140	140	88	55	137,50	Sangat Tinggi
14.	Misi 14: Mewujudkan Tanjung Selor Menjadi DOB Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara Serta Beberapa DOB Yang Telah Diusulkan Yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan	**Tujuan 14: Mewujudkan Percepatan Pembentukan DOB**		**Tahapan Pembentukan DOB yang Terpenuhi (kecamatan)**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0,00**	**Sangat Rendah**
		14.1	Meningkatnya Pengembangan Wilayah Administrasi Kecamatan Untuk Pemenuhan Syarat Pembentukan Dob Yang Diusulkan	Jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang dikembangkan (kecamatan)	1	1	1	0	0,00	Sangat Rendah

Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024, 2025

3) Capaian Kinerja dan Anggaran Program

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 telah dilakukan oleh seluruh perangkat daerah.

Berdasarkan rata-rata tingkat capaian program berdasarkan perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Rata-rata tingkat capaian kinerja sub kegiatan seluruh perangkat daerah mencapai 103,84 persen, dan tingkat capaian anggaran sebesar 125,25 persen.
b. Lima perangkat daerah dengan tingkat capaian kinerja tertinggi yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar 258,13 persen, Dinas Sosial sebesar 132,99 persen, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar 118,76 persen, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar 114,02 persen, dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar 110,04 persen.
c. Lima perangkat dengan tingkat capaian kinerja terendah meliputi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar 91,16 persen, Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebesar 82,64 persen, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 80,81 persen, Dinas Lingkungan Hidup sebesar 80,02 persen, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar 78,28 persen.
d. Lima perangkat daerah dengan tingkat capaian realisasi anggaran tertinggi yaitu Dinas Sosial sebesar 367,57 persen, Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar 298,43 persen, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar 251,73 persen, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 214,76 persen, dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 163,58 persen.
e. Lima perangkat dengan tingkat capaian anggaran terendah meliputi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar 79,93 persen, Dinas Lingkungan Hidup sebesar 74,03 persen, Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 69,48 persen, Sekretariat Daerah

sebesar 55,97 persen, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan sebesar 48,89 persen.

Rekapitulasi rata-rata tingkat capaian program yang menyajikan capaian kinerja dan anggaran pada tahun 2024 pada masing-masing perangkat daerah dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.112
Rata-Rata Tingkat Capaian Program Berdasarkan Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN (%)	
	KINERJA	ANGGARAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	96,69	101,55
Dinas Kesehatan	99,87	109,74
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	80,81	163,58
Kantor Satuan Polisi Pamongpraja	103,70	95,20
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	91,61	106,47
Dinas Sosial	132,99	367,57
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	91,16	90,79
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	114,02	92,06
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	118,76	157,90
Dinas Lingkungan Hidup	80,02	74,03
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	109,69	98,50
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100,00	153,09
Dinas Perhubungan	98,50	91,36
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	110,04	89,04
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	93,97	129,48
Dinas Pemuda dan Olahraga	94,34	298,43
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	258,13	251,73
Dinas Kelautan dan Perikanan	96,96	103,89
Dinas Pariwisata	92,00	88,71
Dinas Kehutanan	95,18	114,33
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	103,81	214,76
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	78,28	79,93
Sekretariat Daerah	101,61	55,97
Sekretariat DPRD	100,00	118,45
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	100,68	48,89
Badan Keuangan dan Aset Daerah	97,65	69,48
Badan Pendapatan Daerah	98,92	92,00
Badan Kepegawaian Daerah	96,55	156,69
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100,00	89,28
Badan Penghubung	108,31	137,03
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	82,64	95,68
Inspektorat	100,00	106,21
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100,00	90,39
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN PROGRAM SE-KABUPATEN	**103,84**	**125,25**

Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024, 2025

Informasi lebih rinci yang memuat tingkat capaian indikator kinerja dan anggaran masing-masing program yang disajikan berdasarkan perangkat daerah, dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.113
Tingkat Capaian Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
1	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**							**596.600.060.503,00**
	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	100 %	99,54	Sangat Tinggi	103,38	UNK	214.125.768.143,00
		Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	59,2 %	99,30	Sangat Tinggi			
		Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	65,2 %	68,17	Sedang			
		Persentase lulusan SMK yang besertifikasi DUDI	57 %	83,44	Tinggi			
		Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	100 %	72,60	Sedang			
		Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten	43,38 %	127,03	UNK			
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %	81,00	Tinggi			
		Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus	100 %	57,13	Rendah			
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus	100 %	115,23	UNK			
	- PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah dan khusus	20,17 %	59,94	Rendah	77,51	Tinggi	584.765.558,00
	- PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kekayaan dan Keragaman Budaya Daerah yang Direvitalisasi	61,76 %	100,00	Sangat Tinggi	90,60	Sangat Tinggi	1.308.615.283,00

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Direvitalisasi	44 %	100,00	Sangat Tinggi	142,05	UNK	843.562.483,00
	- PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal Provinsi yang direvitalisasi	45 %	100,00	Sangat Tinggi	94,77	Sangat Tinggi	371.576.996,00
	- PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi	47 %	100,00	Sangat Tinggi	61,25	Rendah	353.117.184,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum yang direvitalisasi	33,5 %	89,55	Tinggi	69,71	Sedang	5.215.167.441,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100,00	Sangat Tinggi	94,42	Sangat Tinggi	373.797.487.415,00
	Cabang Dinas Nunukan							881.773.528,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional	45 %	201,02	UNK	301,03	UNK	225.775.000,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Nunukan)	100 persen	100,00	Sangat Tinggi	87,73	Tinggi	655.998.528,00
	Cabang Dinas Tarakan							1.003.321.079,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Pasrtisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	100 Persen	99,54	Sangat Tinggi	93,88	Sangat Tinggi	264.359.531,00
		Angka Pasrtisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 Persen	70,46	Sedang			
		Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus	100 Persen	57,13	Rendah			
		Angka Pasrtisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus	100 Persen	66,69	Sedang			
		Persentse Lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI	57 Persen	83,44	Tinggi			
		Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	65,2 Persen	68,17	Sedang			

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
		Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	100 Persen	72,60	Sedang			
		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	43,38 Persen	126,88	UNK			
		Persentase Sekolah yang Mengaplikasikan Kebijakan Nasional	59,2 Persen	100,00	Sangat Tinggi			
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	96,17	Sangat Tinggi	738.961.548,00
	Cabang Dinas KTT-Malinau							599.200.563,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 Persen	85,00	Tinggi	57,79	Rendah	137.851.353,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (KTT-MLN)	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	58,29	Rendah	461.349.210,00
	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan							1.268.034.914,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	42,49 %	215,37	UNK	53,59	Rendah	391.625.739,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	88,35	Tinggi	154,02	UNK	876.409.175,00
	UPT Taman Budaya							1.416.922.045,00
	- PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kekayaan dan Keragaman Budaya Daerah yang Direvitalisasi	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	99,48	Sangat Tinggi	458.226.542,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan Fungsi	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	92,24	Sangat Tinggi	958.695.503,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**96,69**		**101,55**		

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
2	**Dinas Kesehatan**							**57.121.420.852,00**
	- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	25,88	Sangat Rendah	38.749.772.897,00
		Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi			
		Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	96 Persen	104,17	UNK			
		Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi			
		Rasio Daya Tampung RS Rujukan	0,24 Persen	100,00	Sangat Tinggi			
		Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	87 Persen	100,00	Sangat Tinggi			
		Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	0,24 Persen	100,00	Sangat Tinggi			
		Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	4 Unit	100,00	Sangat Tinggi			
	- PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas di kab kota yang 9 jenis tenaga kesehatannya sesuai standar	80 persen	93,75	Sangat Tinggi	0,84	Sangat Rendah	104.537.670,00
	- PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah PBF Vabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memperoleh pengakuan	8 unit	100,00	Sangat Tinggi	164,29	UNK	98.576.600,00
		Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perijinan Berusaha	100 Persen			49,29	Sangat Rendah	

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase lembaga/kelompok masyarakat yang mendapatkan advokasi kesehatan pemberdayaan dan penggalangan komitmen	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	24,73	Sangat Rendah	259.647.656,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Administrasi dan Operasional Perkantoran yang terpenuhi	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	326,63	UNK	17.908.886.029,00
		Persentase Sarana dan Prasaranan Aparatur yang memadai	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi			
		Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang tersusun	100 persen	100,00	Sangat Tinggi			
	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK							427.386.540.583,00
	- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	85 Persen	100,00	Sangat Tinggi	181,88	UNK	65.637.146.815,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai dan Predikat SAKIP	100 Indeks	100,00	Sangat Tinggi	104,35	UNK	361.749.393.768,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**99,87**		**109,74**		
3	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**							**652.354.851.576,00**
	- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	20 Persen	28,75	Sangat Rendah	752,58	UNK	63.025.993.826,00
		Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	23 Persen	143,96	UNK	218,80	UNK	

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	25 Persen			92,62	Sangat Tinggi	11.321.958.034,00
	- PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang memerlukan pelayanan persampahan	0 Persen					0,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rasio Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Domestik Regional	22 Persen			156,38	UNK	6.268.095.449,00
	- PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Jumlah Bangunan Gedung yang refresentatif untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	22 Persen	100,00	Sangat Tinggi	118,93	UNK	180.212.094.978,00
	- PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik	15,08 Persen	97,35	Sangat Tinggi	102,75	UNK	241.352.596.153,00
		Persentase jalan dalam kondisi sedang	5,04 Persen	26,98	Sangat Rendah			
	- PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang telah dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	130 Orang	100,00	Sangat Tinggi	85,28	Tinggi	3.958.042.559,00
	- PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kegiatan penataan ruang yang dilaksanakan	18 Persen	77,78	Tinggi	67,38	Sedang	3.779.754.878,00
	- PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi atau warga negara korban bencana yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	20 Persen	100,00	Sangat Tinggi	82,89	Tinggi	965.353.906,00

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	5,75 Persen	41,57	Sangat Rendah	94,29	Sangat Tinggi	6.370.978.145,00
	- PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	20 Persen	86,65	Tinggi	178,97	UNK	73.068.428.787,00
	- PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase keberhasilan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	100 Persen					0,00
	- PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase program penyelesian sengketa tanah garapan yang di kab/kota 1 daerah provinsi	100 Persen					0,00
	- PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Meningkatnya kualitas penataan akses dalam pemanfataan tanah	30 Persen	66,67	Sedang	81,81	Tinggi	35.324.575.930,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	93,83	Sangat Tinggi	26.706.978.931,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**80,81**		**163,58**		
4	**Kantor Satuan Polisi Pamongpraja**							**28.880.416.984,00**
	- PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti	90 Skala	111,11	UNK	94,13	Sangat Tinggi	14.607.304.976,00
	- PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	93,75	Sangat Tinggi	628.062.803,00

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	97,71	Sangat Tinggi	13.645.049.205,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**103,70**		**95,20**		
5	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**							**10.434.038.140,00**
	- PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Pra Bencana	50 Persen	100,00	Sangat Tinggi	117,84	UNK	1.771.024.086,00
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi			
		Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	65 Persen	66,66	Sedang			
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	99,77	Sangat Tinggi	95,10	Sangat Tinggi	8.663.014.054,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**91,61**		**106,47**		
6	**Dinas Sosial**							**18.293.488.976,00**
	- PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang mengikuti pelatihan kompetensinya	100 Orang	76,00	Tinggi	94,18	Sangat Tinggi	1.321.143.159,00
	- PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi kepulangannya ke daerah asal	20 Orang	15,00	Sangat Rendah	263,20	UNK	5.264.000,00
	- PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	65 Orang	69,23	Sedang	86,54	Tinggi	1.038.275.815,00

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	15 Orang					
		Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	500 Orang					
		Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	20 Orang					
	- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah keluarga miskin yang terlayani	1300 KPM	63,69	Rendah	1.764,83	UNK	2.823.732.248,00
	- PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang ditangani	100 KPM	560,00	UNK	419,49	UNK	901.907.390,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	117,60	UNK	12.203.166.364,00
	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu							3.514.138.011,00
	- PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	96,98	Sangat Tinggi	1.765.002.930,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dan Rehabilitas Sosial	50 Orang	80,00	Tinggi	97,72	Sangat Tinggi	1.749.135.081,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**132,99**		**367,57**		
7	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**							**18.714.157.550,00**
	- PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	98,18	Sangat Tinggi	11.172.400,00

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2,25 Persen	144,89	UNK	74,20	Sedang	159.843.600,00
	- PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	49,73 Persen	101,87	UNK	89,17	Tinggi	159.079.179,00
	- PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	81 Persen					10.776.451.168,00
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	19,57 Persen	20,08	Sangat Rendah	91,68	Sangat Tinggi	
	- PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online	53 Persen	148,45	UNK			137.441.068,00
		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	16,54 Persen	13,97	Sangat Rendah	90,86	Sangat Tinggi	
	- PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Telah Dipetakan	0 Persen					0,00
	- PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Dibangun Sarana dan Prasarana Dasar	0 Persen					0,00
	- PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Satuan Permukiman yang dikembangkan sosial ekonominya	50 Persen	100,00	Sangat Tinggi	99,81	Sangat Tinggi	311.195.276,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	91,62	Sangat Tinggi	7.158.974.859,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**91,16**		**90,79**		

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
8	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							**13.579.432.443,00**
	- PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	2,7 Persen	118,89	UNK	83,09	Tinggi	1.231.190.000,00
	- PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per Seratus Ribu penduduk Perempuan)	43 Indeks	134,60	UNK	93,32	Sangat Tinggi	329.651.079,00
	- PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK Perempuan	47,7 Persen	99,20	Sangat Tinggi	96,70	Sangat Tinggi	574.602.139,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang dimutakhirkan (jumlah data gender dan anak yang dimutakhirkan dibagi jumlah data gender dan anak keseluruhan X 100%)	80 Persen	100,00	Sangat Tinggi	99,91	Sangat Tinggi	109.986.369,00
	- PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kab/Kota Layak Anak (KLA)	40 Persen	100,00	Sangat Tinggi	99,35	Sangat Tinggi	569.003.738,00
	- PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	4,07 Indeks	182,06	UNK	90,94	Sangat Tinggi	475.367.036,00
	- PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,12 Indeks					0,00
	- PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentse pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	58,13 Persen					0,00
	-	Indeks Kebahagiaan	63,31 Indeks	115,15	UNK	85,76	Tinggi	721.898.862,00

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Kemandirian	61,61 Indeks	93,33	Sangat Tinggi	85,76	Tinggi	
		Indeks Ketentraman	69,31 Indeks	95,08	Sangat Tinggi	85,76	Tinggi	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			101,89	UNK	100,00	Sangat Tinggi	9.567.733.220,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**114,02**		**92,06**		
9	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**							**49.486.310.155,01**
-	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	cakupan kelompok tani penerima manfaat	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	502,24	UNK	413.196.800,00
-	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan skor pph	84,7 Point	97,87	Sangat Tinggi	93,61	Sangat Tinggi	1.317.981.219,00
-	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan	9 Persen			98,42	Sangat Tinggi	203.604.500,00
-	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan kemanan pangan	100 Persen					
-	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Hortikultura	137763 Ton	172,91	UNK	247,19	UNK	25.622.966.419,00
		Jumlah Produksi Perkebunan	564858 Ton	110,98	UNK	247,19	UNK	
		Jumlah Produksi Peternakan	10360 Ton					
		Jumlah Produksi Tanaman Pangan	72423 Ton					
-	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	174,53	UNK	6.339.580.342,00

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan	2,5 Persen	3,60	Sangat Rendah	92,60	Sangat Tinggi	185.700.714,01
		Persentase Unit Usaha Peternakan yang Terlayani Pengajuan Permohonan Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	25 Persen					
	- PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penganggulangan bencana	53 Persen	103,77	UNK	91,94	Sangat Tinggi	71.341.900,00
	- PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah tenaga penyuluh dan petani yang meningkat kompetensinya	734 Orang	100,00	Sangat Tinggi	112,77	UNK	1.069.840.800,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	80,51	Tinggi	14.262.097.461,00
	UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet							257.135.699,00
	- PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 Persen					0,00
	- PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan	2,5 Persen	36,00	Sangat Rendah	107,69	UNK	64.722.267,00
		Persentase Unit Usaha Peternakan yang Terlayani Pengajuan Permohonan Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	25 Persen	400,00	UNK			
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	46,15	Sangat Rendah	192.413.432,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**118,76**		**157,90**		
10	**Dinas Lingkungan Hidup**							**11.420.957.887,00**

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Instrumen Lingkungan Yang ditetapkan	75 Persen	100,00	Sangat Tinggi	82,89	Tinggi	981.832.241,00
	- PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik	90 Persen	111,11	UNK	97,08	Sangat Tinggi	1.103.171.056,00
		Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi	55 Persen	39,22	Sangat Rendah			
		Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2	14 Persen	63,71	Rendah			
		Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2	4 Persen	45,75	Sangat Rendah			
	- PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Luasan Taman Keanekaragaman hayati (KEHATI)	25 Persen			71,81	Sedang	69.765.537,00
	- PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	78 Persen			95,54	Sangat Tinggi	623.101.206,00
	- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha dan/Kegiatan kegiatan yang taat atas Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	60 Persen	63,33	Rendah	70,33	Sedang	476.649.566,00
	- PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase orang/masyarakat/lembaga yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup	5 Persen	100,00	Sangat Tinggi	63,01	Rendah	151.856.431,00
	- PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/Lembaga/Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang	14 Persen	100,00	Sangat Tinggi	39,89	Sangat Rendah	74.926.423,00

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
		mendapat penghargaan dibidang Lingkungan Hidup						
	- PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	62,86	Rendah	87.996.622,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang dikelola	84 Persen	82,14	Tinggi	37,55	Sangat Rendah	251.637.374,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	100,00	Sangat Tinggi	92,78	Sangat Tinggi	7.600.021.431,00
	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup							890.048.584,00
	- PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik	90 persen	111,11	UNK	95,93	Sangat Tinggi	102.642.364,00
		Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2	3 persen	61,00	Rendah			
		Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2	14 persen	63,71	Rendah			
		Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi	55 persen	39,15	Sangat Rendah			
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100 persen	100,00	Sangat Tinggi	78,66	Tinggi	787.406.220,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**80,02**		**74,03**		
11	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							**10.323.868.526,00**
	- PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah penduduk yang memiliki KIA	134296 Orang	97,73	Sangat Tinggi			814.320.198,00

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
		Jumlah penduduk yang memiliki KTP-El	487096 Orang	106,05	UNK	99,05	Sangat Tinggi	
	- PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan untuk anak usia 0-18 tahun	99 Persen	98,22	Sangat Tinggi	99,50	Sangat Tinggi	766.795.500,00
		Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi			
		Persentase penduduk yang memiliki akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi			
		Persentase penduduk yang memiliki buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi			
	- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tingkat Pemanfaatan data kependudukan	18 Persen	185,17	UNK	99,27	Sangat Tinggi	441.851.195,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tingkat Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	96,95	Sangat Tinggi	82.308.700,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	97,74	Sangat Tinggi	8.218.592.933,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**109,69**		**98,50**		
12	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							**13.449.689.093,00**
	- PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kabupaten yang melakukan peningkatan Kerjasama Desa	75 %	100,00	Sangat Tinggi	95,00	Sangat Tinggi	85.815.000,00
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			100,00	Sangat Tinggi	279,15	UNK	1.043.566.052,00

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyarakatan dibina	100 %	100,00	Sangat Tinggi	137,14	UNK	4.820.804.846,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00	Sangat Tinggi	101,07	UNK	7.499.503.195,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**100,00**		**153,09**		
13	**Dinas Perhubungan**							**39.477.884.223,00**
	- PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana & Prasarana Angkutan Jalan yang Beroperasi	75 Persen	100,00	Sangat Tinggi	99,35	Sangat Tinggi	1.807.010.244,00
		Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang Tersedia	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	99,35	Sangat Tinggi	
	- PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase fasilitas keselamatan pelayaran yang tersedia	33 Persen	96,97	Sangat Tinggi	82,04	Tinggi	20.236.198.993,00
		persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi;	57,58 Persen	95,52	Sangat Tinggi	82,04	Tinggi	
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	94,04	Sangat Tinggi	17.434.674.987,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**98,50**		**91,36**		
14	**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**							**41.025.078.505,00**
	- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program	70 Persen	142,86	UNK	95,38	Sangat Tinggi	22.825.077.740,00

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
		prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi						
	- PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	85 Persen	117,65	UNK	95,18	Sangat Tinggi	6.121.739.286,00
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	95,12 Persen					
	- PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral	96 Persen	104,17	UNK	75,46	Tinggi	646.339.233,00
	- PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	60 Persen	85,53	Tinggi	92,66	Sangat Tinggi	1.140.741.743,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	86,50	Tinggi	10.291.180.503,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**110,04**		**89,04**		
15	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**							**13.813.467.485,00**
	- PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha	100 Persen	70,00	Sedang	113,99	UNK	941.005.735,00
	- PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah peminat investasi	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	122,86	UNK	2.910.642.695,00
	- PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan	91,5 Persen	97,83	Sangat Tinggi	156,45	UNK	849.125.214,00

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN	85 Persen	100,00	Sangat Tinggi	110,66	UNK	811.248.637,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	170,14	UNK	85.072.205,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	96,00	Sangat Tinggi	102,80	UNK	8.216.372.999,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**93,97**		**129,48**		
16	**Dinas Pemuda dan Olahraga**							**57.595.026.255,00**
	- PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	150 Orang	166,67	UNK	933,75	UNK	3.268.129.795,00
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	750 Orang	6,67	Sangat Rendah	68,09	Sedang	
		Jumlah pengelolaan organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	5 Organisasi	160,00	UNK	502,79	UNK	
	- PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Prestasi yang Tersedia	5 Unit	20,00	Sangat Rendah	96,07	Sangat Tinggi	43.272.798.918,00
		Jumlah Atlet berprestasi yang dibina	20 Orang	95,00	Sangat Tinggi			
		Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Berdaya Saing	5 Organisasi	100,00	Sangat Tinggi			

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
		Persentase Atlet berprestasi yang dibina	15 Persen	100,00	Sangat Tinggi			
	- PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah pemudah yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	250 orang	100,00	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi	900.000.000,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat Nilai Sakip	75 Poin	100,75	Sangat Tinggi	89,91	Tinggi	10.154.097.542,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**94,34**		**298,43**		
17	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**							11.567.812.439,00
	- PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	67 Indeks	99,60	Sangat Tinggi	419,54	UNK	2.894.801.644,00
	- PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	67,5 Nilai	107,85	UNK	85,94	Tinggi	150.397.236,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional, Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	12 Persen	722,67	UNK	366,41	UNK	384.733.600,00
	- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	12 Persen					0,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	102,39	UNK	135,02	UNK	8.137.879.959,00

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**258,13**		**251,73**		
18	**Dinas Kelautan dan Perikanan**							**34.924.388.613,00**
	- PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luasan Pengelolaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	46,38 Persen	97,26	Sangat Tinggi	96,17	Sangat Tinggi	3.353.802.205,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	50000 Ton	87,21	Tinggi	121,23	UNK	5.153.280.487,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	633230 Ton	117,90	UNK	146,81	UNK	2.346.848.258,00
	- PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Yang di Awasi	63 %	111,94	UNK	100,75	Sangat Tinggi	4.908.104.872,00
	- PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Ragam Produk Olahan Hasil Perikanan dan Pemasarannya	22 Produk	100,00	Sangat Tinggi	85,86	Tinggi	552.308.491,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	100,75	Sangat Tinggi	18.610.044.300,00
	UPTD Pelabuhan Tengkayu I							3.607.175.956,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Indeks Kepuasan Masyarakay Terhadap Pelayanan Pelabuhan	100 Persen	83,60	Tinggi	83,60	Tinggi	41.800.000,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	95,97	Sangat Tinggi	3.565.375.956,00
	UPTD Pelabuhan Tengkayu II							0,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Pendapatan asli daerah dari layanan pelabuhan perikanan	2300000000 Rupiah	91,09	Sangat Tinggi			0,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi			0,00

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau							0,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	633230 Ton	68,38	Sedang			0,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 persen	100,00	Sangat Tinggi			0,00
	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan							0,00
	- PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Ragam Produk Olahan Hasil Perikanan dan Pemasarannya	22 Produk	100,00	Sangat Tinggi			0,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi			0,00
	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan							3.054.538.732,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup Dinas Perhubungan	0 Persen					0,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**96,96**		**103,89**		
19	**Dinas Pariwisata**							**23.149.358.670,00**
	- PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	peningkatan daya tarik destinasi yang dikembangkan	8 DTW	100,00	Sangat Tinggi	75,72	Tinggi	3.958.368.874,00
	- PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Pemasaran Pariwisata	50 Kali	100,00	Sangat Tinggi	89,50	Tinggi	8.458.884.609,00

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah produk usaha ekonomi kreatif	50 Usaha	100,00	Sangat Tinggi	93,93	Sangat Tinggi	904.530.763,00
	- PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM pariwisata dan ekraf yang ahli	500 Orang	60,00	Rendah	93,75	Sangat Tinggi	976.424.022,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	90,65	Sangat Tinggi	8.851.150.402,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**92,00**		**88,71**		
20	**Dinas Kehutanan**							**70.340.607.573,00**
	- PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	100,00	Sangat Tinggi	64,46	Rendah	24.980.429.302,00
	- PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kawasan yang dikelola	10 Persen	100,00	Sangat Tinggi	39,98	Sangat Rendah	466.106.700,00
	- PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	39 Izin	50,00	Rendah	62,63	Rendah	3.888.376.534,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS yang dipulihkan	100 Ha	100,00	Sangat Tinggi	68,19	Sedang	61.920.000,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	87,78	Tinggi	40.943.775.037,00
	UPT KPH Kabupaten Nunukan							9.955.414.461,00

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	N Persentase peningkatan produtivitas hasil hutan	10 Persen	100,00	Sangat Tinggi	183,87	UNK	7.332.365.083,00
	- PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	1 Izin	100,00	Sangat Tinggi	223,21	UNK	1.785.712.791,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	105,21	UNK	837.336.587,00
	UPT KPH Kota Tarakan							10.991.461.102,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil Hutan	10 Persentase	100,00	Sangat Tinggi	207,26	UNK	9.272.375.347,00
	- PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah Ijin Perhutanan Sosial yang Diterbitkan (7 Unit s/d Desember 2020)	11 Izin	63,64	Rendah	114,65	UNK	1.031.845.416,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persentase	100,00	Sangat Tinggi	167,62	UNK	687.240.339,00
	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung							10.429.603.222,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	90,00	Sangat Tinggi	94,25	Sangat Tinggi	8.276.975.299,00
	- PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah Ijin PS yang Diterbitkan	2 Ijin	100,00	Sangat Tinggi	87,91	Tinggi	1.538.667.513,00

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	90,06	Sangat Tinggi	613.960.410,00
	UPT KPH Kabupaten Malinau							9.604.105.143,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	100,00	Sangat Tinggi	192,52	UNK	7.604.610.999,00
	- PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah ijin PS yang diterbitkan (58 Unit Tahun 2020)	2 izin	100,00	Sangat Tinggi	215,71	UNK	1.499.156.133,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	62,18	Rendah	500.338.011,00
	UPT KPH Kabupaten Bulungan							17.238.546.104,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	100,00	Sangat Tinggi	94,12	Sangat Tinggi	14.177.886.693,00
	- PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah Ijin PS yang Diterbitkan	4 Ijin	100,00	Sangat Tinggi	86,69	Tinggi	2.089.240.051,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	94,72	Sangat Tinggi	971.419.360,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**95,18**		**114,33**		
21	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**							**16.738.269.991,00**

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Percentase Izin Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan aturan	68,18 Persen	88,00	Tinggi	557,56	UNK	1.087.238.429,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	IUP Taat aturan	26 Jumlah IUP	107,69	UNK	386,21	UNK	772.425.657,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Kapasitas Pembangkit EBT	213,65 TOE	105,12	UNK	31,85	Sangat Rendah	3.688.526.409,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik	202212 KK	118,22	UNK	40,97	Sangat Rendah	2.609.619.277,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	57,21	Rendah	8.580.460.219,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**103,81**		**214,76**		
22	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**							**49.423.149.140,00**
	- PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT	26,89 Persen	50,73	Rendah	35,14	Sangat Rendah	112.456.487,00
	- PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus/pengawas yang menyampaikan RAT	61 Persen	100,00	Sangat Tinggi	61,74	Rendah	216.611.800,00
	- PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM Yang mengakses KUR	58,67 Persen	29,88	Sangat Rendah	92,04	Sangat Tinggi	919.172.577,00
	- PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM	6,5 Persen	32,31	Sangat Rendah	67,47	Sedang	2.731.281.893,00

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun	95 Persen	97,89	Sangat Tinggi	99,77	Sangat Tinggi	99.842.239,00
	- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan Yang Terbangun	25 Persen	100,00	Sangat Tinggi	97,46	Sangat Tinggi	23.394.233.245,00
	- PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu	6 Persen	90,00	Sangat Tinggi	90,60	Sangat Tinggi	2.032.556.678,00
	- PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimanan Utara	5 Persen	78,40	Tinggi	50,05	Rendah	929.285.808,00
	- PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar	4 Persen	100,00	Sangat Tinggi	98,16	Sangat Tinggi	786.976.420,00
	- PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga	85 Persen	100,00	Sangat Tinggi	74,57	Sedang	374.045.893,00
	- PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana	50 Persen	66,00	Sedang	106,01	UNK	5.092.013.196,00
	- PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin	60 Persen	50,72	Rendah	72,74	Sedang	63.911.456,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	76,55	Tinggi	115.532.993,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	96,77	Sangat Tinggi	12.555.228.455,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**78,28**		**79,93**		
23	**Sekretariat Daerah**							**147.218.314.227,00**

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	147,65	UNK	2.092.937.463,00
	- PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Yang Ditindaklanjuti dan Persentase Dokumen Persyaratan Pemekaran Daerah Yang Di Verifikasi	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	91,50	Sangat Tinggi	4.133.139.950,00
	- PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Layanan Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	32,65	Sangat Rendah	889.933.938,00
	- PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen	111,11	UNK	94,53	Sangat Tinggi	2.157.109.898,00
		Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Perekonomian Dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	90 Persen	111,11	UNK	139,39	UNK	
	- PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	225,47	UNK	2.275.010.141,00
	- PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentasi Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	90 Persen	105,20	UNK	102,53	UNK	1.117.528.970,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	152,79	UNK	134.552.653.867,00
	Biro Kesejahteraan Rakyat							62.152.096.051,00
	- PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	92,32	Sangat Tinggi	60.637.496.140,00

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	75,24	Tinggi	1.514.599.911,00
	Biro Administrasi Pembangunan							0,00
	- PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentasi Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	90 Persen	111,11	UNK	0,00		0,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Program Penunjang Urusan Unit Kerja yang tercapai	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	0,00		0,00
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah							0,00
	- PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup pemerintahan dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	0,00		0,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persentase	100,00	Sangat Tinggi	0,00		0,00
	Biro Hukum							0,00
	- PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	PERSENTASE PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM YANG TERCAPAI	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	0,00		0,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	0,00		0,00
	Biro Organisasi							0,00
	- PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase perangkat daerah yang ditata organisasinya	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	0,00		0,00

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	0,00		0,00
	Biro Umum							0,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	0,00		0,00
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa							0,00
	- PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 persen	100,00	Sangat Tinggi	0,00		0,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persen	100,00	Sangat Tinggi	0,00		0,00
	Biro Administrasi Pimpinan							0,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	0,00		0,00
	Biro Perekonomian							3.381.338.159,00
	- PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen	100,00	Sangat Tinggi	94,53	Sangat Tinggi	2.157.109.898,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	94,67	Sangat Tinggi	1.224.228.261,00

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**101,61**		**55,97**		
24	**Sekretariat DPRD**							**105.498.159.317,00**
	- PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	90 Persen	100,00	Sangat Tinggi	123,67	UNK	57.628.362.749,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100,00	Sangat Tinggi	113,24	UNK	47.869.796.568,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**100,00**		**118,45**		
25	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan**							**26.452.897.771,00**
	- PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	90 Persen	100,00	Sangat Tinggi	19,85	Sangat Rendah	3.007.460.950,00
	- PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan program perangkat daerah	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	35,30	Sangat Rendah	4.769.969.390,00
	- PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan	90 Persen	80,78	Tinggi	112,17	UNK	3.792.630.890,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	82 Persen	121,95	UNK	28,22	Sangat Rendah	14.882.836.541,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**100,68**		**48,89**		

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
26	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**							**600.197.984.140,00**
	- PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	92,96	Sangat Tinggi	75,87	Tinggi	541.239.391.378,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	42,51	Sangat Rendah	2.527.069.002,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	90,07	Sangat Tinggi	56.431.523.760,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**97,65**		**69,48**		
27	**Badan Pendapatan Daerah**							**44.858.775.460,00**
	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	90,00	Sangat Tinggi	108,66	UNK	3.368.362.096,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	100,00	Sangat Tinggi	89,03	Tinggi	41.490.413.364,00
	UPT Bapenda Tana Tidung							1.494.137.198,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	100,00	Sangat Tinggi	35,73	Sangat Rendah	131.165.345,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	100,00	Sangat Tinggi	66,75	Sedang	1.362.971.853,00
	UPT Bapenda Tarakan							3.260.247.690,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	100,00	Sangat Tinggi	37,00	Sangat Rendah	162.804.797,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	100,00	Sangat Tinggi	84,33	Tinggi	3.097.442.893,00

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	UPT Bapenda Bulungan							2.873.707.418,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	100,00	Sangat Tinggi	85,48	Tinggi	406.031.800,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	100,00	Sangat Tinggi	79,07	Tinggi	2.467.675.618,00
	UPT Bapenda Malinau							1.856.625.170,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	99,00	Sangat Tinggi	7,46	Sangat Rendah	147.846.100,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	100,00	Sangat Tinggi	348,30	UNK	1.708.779.070,00
	UPT Bapenda Nunukan							1.996.054.675,00
	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	98,00	Sangat Tinggi			0,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	100,00	Sangat Tinggi	70,18	Sedang	1.996.054.675,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**98,92**		**92,00**		
28	**Badan Kepegawaian Daerah**							**14.856.340.055,90**
	- PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan ASN	72,37 %	74,01	Sedang	155,89	UNK	4.172.313.911,00
		Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Keseahatan)	20,68 %	118,91	UNK			
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	86,2 %	98,60	Sangat Tinggi			

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
		Persentase PNS yang Memperoleh Predikat Baik dan Sangat Baik	97,8 %	83,55	Tinggi			
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai dan Predikat SAKIP	78 nilai	107,69	UNK	157,49	UNK	10.684.026.144,90
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**96,55**		**156,69**		
29	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**							**16.279.969.288,00**
	- PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi dan ber-STTPL (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	80 Persen	100,00	Sangat Tinggi			7.041.246.322,00
		Persentase Jabatan Struktural bersertifikat Kompetensi dan ber-STTPL	80 Persen	100,00	Sangat Tinggi	86,40	Tinggi	
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat Sakip dan RB	75 Predikat	100,00	Sangat Tinggi	92,17	Sangat Tinggi	9.238.722.966,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**100,00**		**89,28**		
30	**Badan Penghubung**							**12.917.984.047,00**
	- PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan badan penghubung	85 %	116,62	UNK	100,00	Sangat Tinggi	3.488.377.905,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	174,05	UNK	9.429.606.142,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**108,31**		**137,03**		

No.	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
31	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**							**8.403.636.546,00**
	- PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Capaian Pembangunan Perbatasan Berdasarkan Rencana Induk	60 %	66,67	Sedang	98,58	Sangat Tinggi	2.379.996.898,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	98,62	Sangat Tinggi	92,78	Sangat Tinggi	6.023.639.648,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**82,64**		**95,68**		
32	**Inspektorat**							**26.114.633.246,00**
	- PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang Menjadi Obyek Pengawasan Berbasis Resiko	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	113,45	UNK	5.009.441.286,00
	- PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang Menerapkan SPIP	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	96,57	Sangat Tinggi	5.141.523.128,00
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	presentase APIP yang bersertifikat teknis bidang pengawasan	100 persen	100,00	Sangat Tinggi	108,60	UNK	15.963.668.832,00
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**100,00**		**106,21**		
33	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**							**109.065.810.533,00**
	- PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	76,00	Tinggi	1.778.286.125,00
	- PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada/Pilpres/ Pilleg	82 Persen	100,00	Sangat Tinggi	99,67	Sangat Tinggi	95.378.596.725,00

No.	Perangkat Daerah / Program		Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
					Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
		POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							
	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Dibina dan Diawasi	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	91,45	Sangat Tinggi	2.486.830.971,00
	-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	86,50	Tinggi	222.645.281,00
	-	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Tingkat Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat	100 Persen	100,00	Sangat Tinggi	99,08	Sangat Tinggi	2.528.063.585,00
	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai dan Predikat SAKIP	100 Peringkat	100,00	Sangat Tinggi	89,63	Tinggi	6.671.387.846,00
		RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			**100,00**		**90,39**		

Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024, 2025

Dalam pelaksanaan rencana pembangunan, pemerintah daerah seringkali menemui hal-hal yang mendorong maupun menghambat pencapaian target pembangunan. Faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja pembangunan daerah pada tahun 2024 berhasil diidentifikasi oleh beberapa perangkat daerah. Hasil identifikasi tersebut dimuat pada tabel berikut:

Tabel 2.114
Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Paktor Penghambat dan Pendorong
1	Dinas Pendidikan	**Faktor Pendorong:**
		1. Dukungan Anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; 2. Kerjasama yang baik dan kekompakan antar personel unit organisasi 3. Komitmen Pimpinan dan seluruh stakeholder lingkungan Cabdisdikbud Wil. Tarakan terhadap tugas dan tanggung jawab pekerjaan 4. Penyusunan perencanaan dan penganggaran mempedomani peraturan yang berlaku.
		Faktor Penghambat:
		1. Keterbatasan tim ahli cagar budaya dan jupel 2. Belum tersedianya anggaran untuk pengembangan kompetensi ASN guna menunjang kualitas Sumber daya aparatur dalam menjalankan TUSI nya
2	Dinas Sosial	**Faktor Pendorong:**
		1. Kualitas SDM yang memahami pekerjaan dan peraturan perundang-undangan.
		2. Komitmen PPTK untuk mencapai realisasi fisik dan keuangan yang direncanakan pada IV.
		Faktor Penghambat:
		1. Jumlah bantuan sosial yang tidak sebanding dengan jumlah PPKS yang ada. 2. Lokasi dan Transportasi yang masih susah dijangkau.
3	Disnakertrans	**Faktor Pendorong (Tenaga Kerja):**
		1. Adanya komitmen pemerintah dalam merumuskan upaya strategis pembangunan ketenagakerjaan 2. adanya perubahan demograsi dan teknologi dan partisipasi stakeholder dalam merumuskan perencanaan tenaga kerja. 3. Kebutuhan pasar kerja dan peningkatan kewirausahaan 4. Adanya dukungan pemerintah 5. Perkembangan teknologi serta kerjasama DUDI semakin baik. 4. Pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja 5. Dukungan pelatihan ketenagakerjaan semakin baik 6. Partisipasi aktif serikat pekerja dan kerjasama tripartit 7. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan 8. Semakin banyaknya kegiatan dialog sosial ketenagakerjaan
		Faktor Penghambat (Tenaga Kerja):

No.	Perangkat Daerah	Paktor Penghambat dan Pendorong
		1. Keterbatasan sumber daya (anggaran, SDM maupun sarana dan prasarana pelatihan) 2. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelatihan 3. Belum optimalnya kerjasama lembaga pelatihan dengan perusahaan/pemberi kerja. 4. Tingginya persaingan kerja 5. Kurangnya partisipasi perusahaan 6. Belum meratanya ketersediaan lowongan dan informasi pasar kerja antar wilayah 7. Keterbatasan petugas penyusun RTKD 8. Keterbatasan data dan informasi serta anggaran penyusunan RTKD. 9. Kurangnya komitmen para pemberi kerja/perusahaan dalam menerapkan peraturan ketenagakerjaan dan k3 10. Kurangnya sumber daya serta penerapan budaya kerja belum optimal.
		Faktor Pendorong (Transmigrasi):
		1. Masih luasnya potensi perkembangan kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara 2. Adanya dukungan lintas sektor serta program transmigrasi didorong untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan penurunan kemiskinan. 3. Adanya koordinasi dan sinergi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
		Faktor Penghambat (Transmigrasi):
		1. Kurangnya sumber daya 2. Ketidaksesuaian kondisi alam 3. Kekurangan infrastruktur 4. Potensi konflik sosial
4	DP3AP2KB	**Faktor Pendorong:**
		Kasus meningkat karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan dilaporkan melalui fasilitas online maupun offline
5	DPMPTSP	**Faktor Pendorong:**
		1. Telah dilaksanakannya koordinasi persamaan persepsi terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi, kegiatan persiapan penyusunan draf Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahaan Investasi bersama dengan OPD teknis terkait dan *stakeholders* serta melakukan koordinasi tindaklanjut terkait pembahasan draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2. Untuk mengoptimalkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi Kaltara, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara melakukan kegiatan temu pelaku usaha pada Kaltara Investment Forum di Jakarta, promosi digital dan media online/cetak, serta ikut dalam kegiatan event promosi nasional dan internasional serta fasilitasi penanadatangan MoU calon investor LNG Plant sebagai tindak lanjut dari pertemuan ASPRINDO dengan Bapak Gubernur/Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Tim Teknis yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2024. 3. Dukungan sarana dan prasarana layanan perizinan dan non perizinan yang memadai 4. Peningkatan beberapa fitur aplikasi PESONA (aplikasi pendamping OSS) seperti tanda tangan elektronik dan beberapa modul aplikasi untuk mempermudah proses layanan perizinan 5. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan penanaman modal melalui koordinasi yang terintegrasi dan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah serta OPD teknis terkait. 6. Telah diilakukannya beberapa penyesuaian khususnya data izin pelaku usaha yang memiliki NIB secara otomatis

No.	Perangkat Daerah	Paktor Penghambat dan Pendorong
		akan masuk kedalam sistem Sipla-PM pada menu perusahaan investasi. 7. Dukungan anggaran yang memadai untuk proses pelayanan administasi dan kepegawaian, monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala.
		Faktor Penghambat:
		1. Pembahasan RANPERDA Penanaman Modal masih menunggu proses pembahasan bersama legislatif dan Peraturan Gubernur terkait pemberian fasilitas dan insentif kepada pelaku usaha masih dalam proses penetapan. 2. Kondisi infrastruktur dasar kaltara yang masih terbatas dan belum mampu mendukung kegiatan industri seperti ketersediaan listrik yang cukup, air bersih yang masih skala kecil dan biaya transportasi yang tergolong tinggi. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh investor sehingga perlu atensi khusus dari pemerintah pusat dan daerah kedepan 3. Pelayanan perizinan berusaha yang menggunakan sistem OSS-RBA sampai saat ini masih sering mengalami kendala seperti error pada sistem dalam integrasi data dan permasalahan-permasalahan teknis aplikasi dari pusat 4. Kurangnya pemahaman OPD Teknis terkait proses verifikasi perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan. 5. Perlunya penyesuaian pada subsistem pengawasan OSS-RBA seperti sebagaimana juknis Perka BKPM No 5 Tahun 2021, pengawasan oleh perangkat daerah dilakukan dengan pengusulan proyek (long list dan short list) namun penerapannya dalam dua tahun terakhir terkait short list pengawasan/inspeksi lapangan diberikan langsung oleh OSS/BKPM. Berkenaan dengan hal tersebut, sebaiknya long list dan short list pengawasan dapat dikelola secara mandiri dimana daerah lebih memahami terkait kondisi/permasalahan kegiatan pelaku usaha 6. Masih terdapat beberapa fitur dalam aplikasi sipla-pm yang belum terintegrasi dengan sistem BKPM-RI dan perlunya pengembangan maps/peta lokasi serta layanan informasi peluang dan potensi investasi di Provinsi Kalimantan Utara
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	**Faktor Pendorong:**
		1. Capaian produksi budidaya didukung oleh produksi komoditas unggulan yaitu Rumput laut Eucheuma cottonii, dengan produksi sebesar 731.247 ton (97,94% dari total produksi perikanan budidaya). Kabupaten Nunukan menjadi kontributor utama (81,58%), diikuti oleh Kota Tarakan (18,41%). 2. Peningkatan sarana dan prasarana di kawasan konservasi yang telah di tetapkan yaitu Kawasan konservasi perairan wilayah binusan dan Sinelak dan kawasan konservasi perairan wilayah tanjung palas timur. 3. Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan pada 2024 mencapai 70,52%, meningkat 2,92% dari 2023. Meski positif, peningkatan ini juga dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah pemeriksaan dari 998 usaha (2023) menjadi 117 usaha (2024), seiring fokus pengawasan pada perikanan budidaya yang berisiko lebih tinggi terhadap pelanggaran. 4. Secara berkala dilakukan pembinaan dan fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan kelayakan perikanan. 5. Adanya pelaksanaan kegiatan Gemarikan (Gerakan memasyarakatkan makan ikan) untuk meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat guna mendukung gizi yang baik, mencegah stunting, serta mendorong pertumbuhan ekonomi sektor perikanan.
		Faktor Penghambat:

No.	Perangkat Daerah	Paktor Penghambat dan Pendorong
		1. Menurunnya produksi perikanan tangkap diantaranya kurangnya ketersediaan stok BBM (Bahan Bakar Minyak) di Kab. Nunukan 2. Masih adanya penggunaan alat tangkap yang merusak, serta perubahan iklim (fenomena La Niña) yang menyebabkan peningkatan curah hujan sehingga mengubah salinitas dan perubahan suhu permukaan laut sehingga mempengaruhi ekosistem laut dan ketersediaan ikan. 3. Perubahan muatan teknis perairan pesisir Provinsi Kaltara belum teritegrasi kedalam RTRW Provinsi. 4. Masih ditemukannya pelanggaran perikanan seperti Destrutive Fishing, Illegal Fishing dan budidaya rumput laut tidak sesuai zona. 5. Masih banyaknya pelaku usaha perikanan yang belum memiliki izin PKKPRL (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) di pesisir. 6. Berlimpahnya hasil produksi Rumput laut ini diikuti dengan resiko terjadinya penurunan harga pasar dan masalah lingkungan seperti konflik lahan budidaya rumput laut yang tidak sesuai zona. Keterbatasan diversifikasi produk budidaya ikan air tawar seperti nila,lele dan patin membuat pembudidaya ikan air tawar merugi karena tidak dapat menjual hasil produksi ikan air tawarnya, serta penurunan harga jual komoditas udang 7. Ketidakstabilan harga pasar berdampak pada menurunnya daya saing sektor perikanan.
7	Dinas Pariwisata	**Faktor Pendorong:**
		Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai di Dinas Pariwisata
		Faktor Penghambat:
		Masih terbatasnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten
8	Dinas Kehutanan	**Faktor Pendorong:**
		1. Perencanaan kegiatan berjalan sesuai dengan Time Line yang telah dibuat 2. Adanya SDM Fungsional kehutanan atara lain : penyuluh kehutanan, polisi kehutanan, dan pengendali ekosistem hutan 3. Banyaknya kelompok PS, KTH yang ada disetitar kawasan hutan 4. Perencanaan kegiatan berjalan sesuai dengan Time Line yang telah dibuat
		Faktor Penghambat:
		1. Perencanaan Anggaran yang masih kurang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sehingga banyak terdapat SILPA 2. Usulan penetapan hutan adat dan persetujuan perhutanan sosial yang diajukan ke Kmenterian Kehutanan masih menunggu verifikasi teknis lapangan dari Kementerian Kehutanan dan dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan/ BPSKL 3. Potensi kelola hutan sosial yang dicadangkan sebagai areal perhutanan sosial masih banyak belum clear and clean dari konflik tenurial 4. Perencanaan Anggaran yang masih kurang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sehingga banyak terdapat SILPA
9	Sekretariat Daerah	**Faktor Pendorong:**
		Perencanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah dibuat
		Faktor Penghambat:

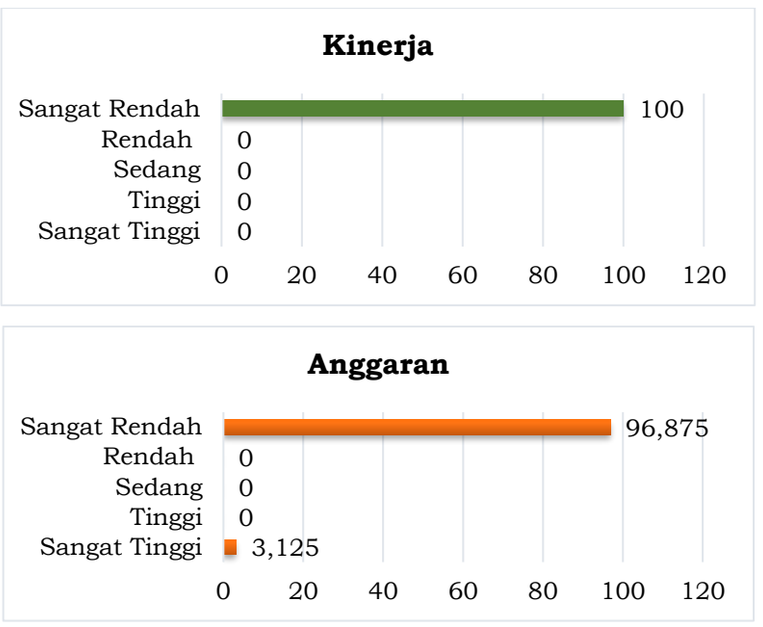
No.	Perangkat Daerah	Paktor Penghambat dan Pendorong
		Perencanaan Anggaran yang masih kurang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sehingga serapan anggaran masih kurang optimal
10	Bappeda dan Litbang	**Faktor Pendorong:**
		Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Kepemimpinan 2. Komunikasi yang efektif (internal) 2. Dukungan Sumber daya aparatur 3. Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana 4. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi berkala
		Faktor Penghambat:
		1. Rendahnya minat mitra penyelenggara penelitian pengembangan di daerah; 2. waktu pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan didaerah terbatas sehingga tidak optimal; 3. koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat (K/L) tidak optimal sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan.
11	BPKD	**Faktor Pendorong:**
		Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
		Faktor Penghambat:
		1. Perubahan Peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pemerintah Pusat; 2. Adanya kebijakan Pj. Kepala Daerah terkait pelaksanaan kegiatan 3. Masih banyak OPD yang melakukan pencairan di bulan mendekati akhir tahun anggaran
12	Badan Perbatasan	**Faktor Pendorong:**
		1. Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Utara yang sebagian besar merupakan wilayah perbatasan, sehingga terdapat lokasi program/kegiatan pada beberapa OPD di Kawasan perbatasan 2. Dikeluarkannya Instruksi Gubernur Kalimantan Utara Nomor 060/2744/BO/GUB Tahun 2021 tentang Koordinasi Kegiatan di Kawasan Perbatasan Negara di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 3. Dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara Tanggal 17 Oktober 2023 Nomor:400.1.6.7/355/2023 Tentang Pelaporan Program dan Kegiatan di Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara 4. Sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kinerja
		Faktor Penghambat:
		1. Update dan konfirmasi data realisasi dari OPD yang sering lambat 2. Ketidakmaksimalan melakukan monev ke lapangan karena keterbatasan anggaran untuk melakukan kunjungan lapangan 3. Keterbatasan anggaran untuk melakukan rapat kerja monitoring dan evaluasi dengan mengundang semua Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki program/kegiatan di Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara 4. Penentuan jumlah target pada renja perubahan pada sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang masih kurang tepat sehingga capaian kinerja jauh melebihi target 5. Minimnya anggaran pada beberapa sub kegiatan seperti pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sehingga tidak bisa mengakomodir semua BMD yang harus dipelihara setiap tahunnya berdasarkan target renja yang telah ditetapkan 6. Target pada penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tidak bisa terpenuhi dikarenakan terdapat 3 posisi jabatan struktural yang masih kosong hingga berakhirnya tahun anggaran

No.	Perangkat Daerah	Paktor Penghambat dan Pendorong
13	Inspektorat	**Faktor Pendorong:**
		1. Komitmen yang kuat dari Kepala Daerah dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang *Good governance*. 2. Komitmen dari Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan pencapaian target sasaran kinerja yang telah ditetapkan 3. Selalu berkoordinasi terhadap instansi terkait, khususnya BPKP, BPK RI, Itjen dan Pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan tersebut. 4. Tingginya kepedulian aparat dan stakeholder untuk melaksanakan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel.
		Faktor Penghambat:
		1. belum meratanya kopetensi SDM. 2. implementasi manajemen risiko dalam pelaksanaan pengawasan yang kurang optimal

Sumber: Evaluasi Hasil Renja PD Tahun 2024

b. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025

Guna mengetahui dan mengukur pelaksanaan sub kegiatan, maka perangkat daerah melakukan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan I, yang selanjutnya menjadi input bagi Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025. Melalui evaluasi tersebut, dapat diketahui capaian kinerja sub kegiatan baik capaian kinerja maupun anggaran sampai dengan triwulan I (Januari-Maret) 2025.



Gambar 2.64.
Predikat Tingkat Capaian Program
Provinsi Kalimantan Utara Triwulan I Tahun 2025
Sumber: Hasil Evaluasi RKPD TW I Tahun 2025, Bappelitbang

Hasil evaluasi pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan I 2025 menunjukkan 100 persen tingkat capaian kinerja sub kegiatan memiliki predikat Sangat Rendah (≤ 50%). Sementara tingkat capaian anggaran sub kegiatan yang memiliki predikat Sangat Rendah sebanyak 96,875 persen dan sisanya 3,125 persen berpredikat Sangat Tinggi.

Berdasarkan rata-rata tingkat capaian sub kegiatan berdasarkan perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan I Tahun 2025 dapat disimpulkan:

a. Rata-rata tingkat capaian kinerja sub kegiatan seluruh perangkat daerah mencapai 8,21 persen, dan tingkat capaian anggaran sebesar 19,14 persen.
b. Lima perangkat daerah dengan tingkat capaian kinerja tertinggi yaitu Dinas Perhubungan (29,17%), Badan Penghubung (28,58%), Sekretariat DPRD (19,65%), Sekretariat Daerah (17,88%), dan Badan Pendapatan Daerah (16,88%).
c. Seluruh perangkat daerah memiliki tingkat capaian kinerja dengan kriteria Sangat Rendah (SR). Lima perangkat dengan tingkat capaian kinerja terendah meliputi Dinas Pariwisata (1,73%), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (1,61%), Dinas Kesehatan (1,34%), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (1,09%), dan Dinas Lingkungan Hidup (0,89%).
d. Lima perangkat daerah dengan tingkat capaian realisasi anggaran tertinggi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (351,43%), Dinas Perhubungan (48,15%), Dinas Sosial (23,11%), Dinas Lingkungan Hidup (19,89%), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (19,31%).
e. Seluruh perangkat daerah memiliki tingkat capaian anggaran dengan kriteria Sangat Rendah (SR). Lima perangkat dengan tingkat capaian anggaran terendah meliputi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2,31%), Dinas Kelautan dan Perikanan (1,98%), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (1,96%), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (1,95%), dan Dinas Pemuda dan Olahraga (1,33%).

Rekapitulasi rata-rata tingkat capaian sub kegiatan yang menyajikan capaian kinerja dan anggaran pada triwulan I tahun 2025 pada masing-masing perangkat daerah disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.115
Rata-Rata Tingkat Capaian Sub Kegiatan Berdasarkan Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Utara pada Triwulan I Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN (%)	
		KINERJA	ANGGARAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9,15	19,31
2	Dinas Kesehatan	1,34	8,60
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,92	4,52
4	Satuan Polisi Pamong Praja	6,28	351,43
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9,65	5,50
6	Dinas Sosial	10,00	23,11
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2,37	2,31
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2,67	4,52
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1,61	4,26
10	Dinas Lingkungan Hidup	0,89	19,89
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,09	4,42
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5,80	1,95
13	Dinas Perhubungan	29,17	48,15
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8,27	12,54
15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	8,75	5,89
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	4,41	1,33
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4,82	6,98
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	3,95	1,98
19	Dinas Pariwisata	1,73	7,01
20	Dinas Kehutanan	6,38	7,49
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4,25	4,67
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	7,98	2,35
23	Sekretariat Daerah	17,88	8,80
24	Sekretariat DPRD	19,65	14,92
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	3,83	3,49
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	14,47	8,95
26	Badan Pendapatan Daerah	16,88	9,93
27	Badan Kepegawaian Daerah	11,28	6,48
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,64	6,25
29	Badan Penghubung	28,58	11,76
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	10,63	4,75
31	Inspektorat	8,37	6,27
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,17	1,96
	Rata-Rata	**8,21**	**19,14**

Sumber: Hasil Evaluasi RKPD TW I Tahun 2025

Rata-rata tingkat capaian sub kegiatan pada program perangkat daerah di triwulan I 2025 secara rinci dimuat pada tabel berikut:

Tabel 2.116
Rata-Rata Tingkat Capaian Sub Kegiatan pada Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Triwulan I Tahun 2025

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
1	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja			6,28	SR	351,43	UNK	2.772.234.037
	- PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti	95 Skala	1,67	SR	22,81	SR	25.122.400
	- PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja	100 Persen	17,18	SR	1031,48	UNK	2.747.111.637
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			4,84	SR	83,79	T	95.907.713.023
	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus	100 %	6,29	SR	0,81	SR	14.144.606.720
		Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus	100 %					
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 %					
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	100 %					
		Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten	44,27 %					
		Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten (TIKP)	42,49 %					

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
		Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B	100 %					
		Persentase lulusan SMK yang besertifikasi DUDI	57 %					
		Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya (Malinau-KTT)	60 %					
		Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional (Nunukan)	95 %					
		Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	69,27 %					
		Persentase Sekolah yang Mengaplikasikan Kebijakan Nasional (Tarakan)	60,2 %					
		Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	60,2 %					
	- PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah dan khusus	22,26 %	0,00	SR	16,67	SR	235.189.400
	- PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kekayaan dan Keragaman Budaya Daerah yang Direvitalisasi	64,7 %	0,00	SR	1,44	SR	27.460.000
		Presentase Kekayaan dan Keragaman Budaya Daerah yang Direvitalisasi (Taman Budaya)	100 %					
	- PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Direvitalisasi	46 %	0,00	SR	2,25	SR	24.958.680
	- PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal Provinsi yang direvitalisasi	46 %	0,00	SR	0,00	SR	0

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi	50 %	0,00	SR	640,19	UNK	2.580.000
	- PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum yang direvitalisasi	34 %	0,00	SR	0,57	SR	5.772.717
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Malinau-KTT)	100 %	32,42	SR	8,41	SR	81.467.145.506
		Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %					
		Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Nunukan)	100 %					
		Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan Fungsi (Taman Budaya)	100 %					
		Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan Fungsi (TIKP)	100 %					
		Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Nunukan)	100 %					
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tarakan)	100 %					
3	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan			33,33	SR	45,72	SR	308.440.748
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
4	UPTD Pelabuhan Tengkayu I			25,00	SR	50,59	R	556.591.170

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
5	Dinas Sosial			4,79	SR	40,99	SR	2.244.406.878
	- PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang mengikuti pelatihan kompetensinya	180 Orang	10,40	SR	36,31	SR	56.769.300
	- PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi kepulangannya ke daerah asal	20 Orang	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	20 Orang	1,11	SR	33,43	SR	36.771.000
		Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	500 Orang					
		Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	15 Orang					
		Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	15 Orang					
	- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah keluarga miskin yang terlayani	800 KPM (kelompok penerima manfaat)	0,00	SR	166,94	UNK	61.589.300
	- PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang ditangani	100 KPM	0,00	SR	3,73	SR	16.786.200
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja,pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	17,24	SR	5,52	SR	2.072.491.078

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
6	Biro Pengadaan Barang dan Jasa			31,56	SR	13,67	SR	291.950.914
	- PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
7	Biro Umum			22,39	SR	22,26	SR	20.866.886.020
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
8	UPT Bapenda Bulungan			21,68	SR	19,94	SR	694.399.338
	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
9	Badan Penghubung			28,58	SR	11,76	SR	1.920.884.117
	- PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan badan penghubung	90 %	31,11	SR	14,29	SR	553.528.754
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	90 Persen	26,06	SR	9,23	SR	1.367.355.363
10	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup			0,00	SR	37,77	SR	66.784.257
	- PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
11	Biro Hukum			32,36	SR	5,09	SR	215.956.418
	- PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM							
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
12	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			27,98	SR	6,88	SR	366.780.601
	- PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
13	Sekretariat DPRD			19,65	SR	14,92	SR	22.952.442.053
	- PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	92 Persen	20,07	SR	11,37	SR	10.487.286.861
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	19,23	SR	18,46	SR	12.465.155.192
14	Biro Administrasi Pimpinan			19,77	SR	11,85	SR	930.405.240
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
15	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan			16,79	SR	12,05	SR	236.317.198

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
16	Badan Pendapatan Daerah			17,91	SR	9,30	SR	6.388.761.744
	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	25,00	SR	14,41	SR	425.523.860
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
17	UPT KPH Kabupaten Nunukan			8,51	SR	16,54	SR	717.626.608
	- PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							
	- PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN							
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
18	UPT Bapenda Malinau			18,19	SR	5,53	SR	349.536.892
	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah			14,47	SR	8,95	SR	74.508.781.789

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	10,98	SR	5,96	SR	65.754.448.609
	- PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 Persen	0,00	SR	6,74	SR	479.226.267
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	32,43	SR	14,17	SR	8.275.106.913
20	UPT Bapenda Tana Tidung			15,57	SR	7,55	SR	206.302.523
	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
21	Biro Perekonomian			11,26	SR	11,78	SR	259.165.208
	- PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
22	UPT Bapenda Nunukan			15,40	SR	7,39	SR	378.022.451
	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
23	UPT Bapenda Tarakan			12,54	SR	9,87	SR	906.086.847
	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
24	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			8,27	SR	12,54	SR	3.043.527.387
	- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	75 Persen	9,76	SR	25,17	SR	811.666.544
	- PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	95,12 Persen	19,25	SR	14,44	SR	164.740.459
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	90 Persen					
	- PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							
	- PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	60 Persen	0,00	SR	9,10	SR	24.232.148
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	12,33	SR	13,97	SR	2.042.888.236
25	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu			15,21	SR	5,24	SR	414.061.699
	- PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
26	Biro Kesejahteraan Rakyat			18,32	SR	1,38	SR	704.687.036
	- PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT							
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
27	Badan Kepegawaian Daerah			11,28	SR	6,48	SR	1.331.865.354
	- PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat pemenuhan kebutuhan ASN	76,7 %	9,35	SR	5,13	SR	111.154.400
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	86,75 %					
		Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Keseahatan)	21,45 %					
		Persentase PNS yang Memperoleh Predikat Baik dan Sangat Baik	98 %					
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai dan Predikat SAKIP	79 nilai	13,20	SR	7,82	SR	1.220.710.954
28	Dinas Perhubungan			12,80	SR	4,07	SR	2.987.632.411
	- PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;	46 Persen	15,91	SR	0,59	SR	35.305.000
		persentase sarana dan prasarana angkutan jalan yang beroperasi;	25 Persen					
	- PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase fasilitas keselamatan pelayaran yang tersedia	38 Persen	6,43	SR	5,07	SR	105.108.301

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
		persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi;	57,58 Persen					
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pelabuhan (UPTD Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan)	82,1 Nilai					
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pelabuhan (UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan)	82,1 Nilai					
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	16,06	SR	6,56	SR	2.847.219.110
29	Cabang Dinas KTT-Malinau			11,95	SR	4,90	SR	172.318.338
	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
30	UPT KPH Kota Tarakan			9,81	SR	6,87	SR	574.007.691
	- PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							
	- PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN							
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
31	UPT Taman Budaya			12,17	SR	3,98	SR	117.652.129

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
32	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK			2,69	SR	12,90	SR	73.715.508.138
	- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
33	Badan Pengelola Perbatasan Daerah			10,63	SR	4,75	SR	1.143.530.388
	- PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Capaian Pembangunan Perbatasan Berdasarkan Rencana Induk	65 %	0,00	SR	0,22	SR	3.454.200
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	21,26	SR	9,28	SR	1.140.076.188
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			9,65	SR	5,50	SR	2.292.737.213
	- PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Pra Bencana	60 Persen	0,00	SR	1,95	SR	61.881.083
		Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	80 Persen					
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 Persen					

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	19,29	SR	9,04	SR	2.230.856.130
35	Inspektorat			8,37	SR	6,27	SR	3.907.710.063
	- PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang Menjadi Obyek Pengawasan Berbasis Resiko	39 Persen	4,69	SR	7,00	SR	317.528.673
	- PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang Menerapkan SPIP	40 Persen	0,00	SR	3,25	SR	174.239.051
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
36	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			8,75	SR	5,89	SR	1.888.256.049
	- PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha	100 Persen	0,00	SR	6,73	SR	14.411.200
	- PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah peminat investasi	100 Persen	0,00	SR	13,42	SR	12.605.865
	- PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan	92 Persen	19,77	SR	0,62	SR	1.602.100
	- PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN	85 Persen	12,78	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	100 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	19,93	SR	14,56	SR	1.859.636.884
37	UPT KPH Kabupaten Malinau			6,05	SR	7,72	SR	461.634.431
	- PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							
	- PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN							
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
38	Dinas Kehutanan			8,71	SR	4,89	SR	11.048.938.834
	- PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	2,20	SR	2,71	SR	561.023.800
	- PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kawasan yang dikelola	10 Persen	0,00	SR	4,33	SR	43.999.000
	- PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	4 Izin	26,49	SR	7,19	SR	1.342.209.115
	- PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS yang dipulihkan	100 Ha	0,00	SR	0,00	SR	0

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	14,88	SR	10,22	SR	9.101.706.919
39	Biro Organisasi			4,37	SR	8,78	SR	243.232.201
	- PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase perangkat daerah yang ditata organisasinya	100 Persen	0,00	SR	9,54	SR	149.893.884
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			4,82	SR	6,98	SR	1.439.169.473
	- PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	68 Indeks	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	68 Nilai	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional, Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	13 Persen	13,62	SR	27,64	SR	28.125.600
	- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	13 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	10,48	SR	7,24	SR	1.411.043.873
41	Biro Administrasi Pembangunan			6,24	SR	5,47	SR	144.279.526

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
42	Cabang Dinas Tarakan			4,46	SR	5,95	SR	115.721.246
	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
43	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM			7,98	SR	2,35	SR	2.383.215.272
	- PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT	31,52 Persen	8,00	SR	1,97	SR	7.291.200
	- PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus/pengawas yang menyampaikan RAT	66 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM Yang mengakses KUR	60,67 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM	8 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun	97 Persen	0,00	SR	1,00	SR	3.740.200

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan Yang Terbangun	0 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu	6 Persen	97,22	ST	25,10	SR	304.448.000
	- PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimanan Utara	7 Persen	0,00	SR	0,66	SR	7.166.600
	- PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar	0,5 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga	90 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana	67 Persen	0,00	SR	0,97	SR	28.310.597
	- PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin	80 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana	100 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	6,53	SR	3,20	SR	2.032.258.675
44	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak			4,95	SR	5,24	SR	303.087.002

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
	- PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
45	Cabang Dinas Nunukan			4,69	SR	5,22	SR	114.029.283
	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
46	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			3,64	SR	6,25	SR	1.913.475.588
	- PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Jabatan Struktural bersertifikat Kompetensi dan ber-STTPL	90 Persen	1,12	SR	2,90	SR	121.507.780
		Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi dan ber-STTPL (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	90 Persen					
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
47	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung			3,08	SR	6,16	SR	499.611.128
	- PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							
	- PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,							

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN							
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
48	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			4,25	SR	4,67	SR	576.762.765
	- PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Percentase Izin Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan aturan	84,85 Persen	0,00	SR	5,13	SR	35.865.200
	- PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	IUP Taat aturan	27 Jumlah IUP	2,60	SR	5,75	SR	47.037.400
	- PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Kapasitas Pembangkit EBT (TOE/Milyar Rupiah)	201,73 TOE/Milyar Rupiah	0,00	SR	1,10	SR	42.324.200
	- PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik	203,37 KK	2,78	SR	8,50	SR	109.005.300
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	15,85	SR	2,87	SR	342.530.665
49	Dinas Pariwisata			1,73	SR	7,01	SR	1.493.943.914
	- PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	peningkatan daya tarik destinasi yang dikembangkan	8 DTW	0,95	SR	2,46	SR	23.751.880
	- PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Pemasaran Pariwisata	50 Kali	0,00	SR	24,35	SR	40.764.038
	- PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah produk usaha ekonomi kreatif	50 Usaha	0,00	SR	0,00	SR	0

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM pariwisata dan ekraf yang ahli	500 Orang	1,50	SR	5,06	SR	14.833.880
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	6,21	SR	3,18	SR	1.414.594.116
50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			3,21	SR	5,27	SR	2.754.265.216
	- PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan skor pph	85,7 Point	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan	7 Persen	0,00	SR	17,58	SR	4.185.400
	- PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan kemanan pangan	100 Persen	0,00	SR	10,86	SR	4.394.800
	- PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	73872 Ton	16,67	SR	4,36	SR	68.390.465
		Jumlah Produksi Peternakan	10567 Ton					
		Jumlah Produksi Perkebunan	576155 Ton					
		Jumlah Produksi Hortikultura	140519 Ton					
	- PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 Persen	0,00	SR	0,73	SR	5.770.000
	- PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Unit Usaha Peternakan yang Terlayani Pengajuan Permohonan Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	25 Persen	0,00	SR	0,97	SR	4.165.000
		Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan	3,5 Persen					

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penganggulangan bencana	56 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah tenaga penyuluh dan petani yang meningkat kompetensinya	734 Orang	0,00	SR	2,17	SR	24.689.000
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	12,25	SR	10,74	SR	2.642.670.551
51	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			5,80	SR	1,95	SR	1.587.752.983
	- PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kabupaten yang melakukan peningkatan Kerjasama Desa	100 %	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
	- PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyarakatan dibina	100 %	0,00	SR	1,02	SR	10.015.700
		Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyarakatan dibina	100 Persen					
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
52	UPTD Pelabuhan Tengkayu II			4,93	SR	2,80	SR	294.351.013
	- PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	jumlah pendapatan asli daerah dari layanan pelabuhan periikanan dan pemasarannya	2170000000	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	9,87	SR	5,60	SR	294.351.013

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
53	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan			5,42	SR	2,17	SR	27.469.872
	- PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	jumlah ragam produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya	23 produk	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melakukan tugas dan fungsi pokok	100 %	10,83	SR	4,34	SR	27.469.872
54	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan			3,83	SR	3,49	SR	2.359.498.666
	- PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	95 Persen	4,55	SR	3,40	SR	149.872.714
	- PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan program perangkat daerah	100 Persen	0,00	SR	6,66	SR	232.507.587
	- PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan	95 Persen	0,00	SR	0,37	SR	12.294.750
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	83 Persen	10,79	SR	3,55	SR	1.964.823.615
55	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			1,92	SR	4,52	SR	7.584.443.608
	- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	24 Persen	0,00	SR	4,99	SR	114.355.346

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	22 Persen					
	- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	0 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang memerlukan pelayanan persampahan	0 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rasio Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Domestik Regional	25 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Presentase Infrastruktur dasar yang terbangun pada Kawasan Permukiman Strategis Daerah Provinsi	66 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Jumlah Bangunan Gedung yang refresentatif untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	31 Persen	0,00	SR	0,14	SR	639.867.354
	- PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi sedang	5,15 Persen	0,00	SR	3,65	SR	1.603.548.958
		Persentase jalan dalam kondisi baik	16,49 Persen					
	- PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang telah dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	130 Orang	0,00	SR	1,02	SR	59.760.048
	- PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kegiatan penataan ruang yang dilaksanakan	20 Persen	0,00	SR	1,46	SR	94.199.984

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi atau warga negara korban bencana yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	20 Persen	0,00	SR	0,15	SR	3.131.717
	- PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	5,75 Persen	0,00	SR	0,31	SR	12.154.088
	- PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	20 Persen	0,00	SR	1,49	SR	104.097.703
	- PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase keberhasilan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	100 Persen	0,00	SR	40,55	SR	106.057.410
	- PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase program penyelesian sengketa tanah garapan yang di kab/kota 1 daerah provinsi	100 Persen	0,00	SR	12,85	SR	59.760.048
	- PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Meningkatnya kualitas penataan akses dalam pemanfataan tanah	100 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	30,65	SR	5,73	SR	4.787.510.952
56	Dinas Pemuda dan Olahraga			4,41	SR	1,33	SR	2.149.298.759
	- PROGRAM PENGEMBANGAN	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	150 Orang	7,65	SR	2,26	SR	203.812.800

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pengelolaan organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	5 Organisasi					
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	750 Orang					
	- PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Berdaya Saing	5 Organisasi	0,42	SR	1,16	SR	394.529.629
		Jumlah Atlet berprestasi yang dibina	20 Orang					
		Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Prestasi yang Tersedia	5 Unit					
		Persentase Atlet berprestasi yang dibina	17,5 Persen					
		Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Prestasi yang Tersedia	1 Prasarana					
	- PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
57	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			1,09	SR	4,42	SR	1.559.455.168
	- PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah penduduk yang memiliki KTP-El	496837 Orang	0,00	SR	2,80	SR	34.757.273
		Jumlah penduduk yang memiliki KIA	136982 Orang					

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100 Persen	0,00	SR	2,29	SR	39.915.976
		Persentase penduduk yang memiliki akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100 Persen					
		Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	100 Persen					
		Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan untuk anak usia 0-18 tahun	99,5 Persen					
	- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tingkat Pemanfaatan data kependudukan	21 Persen	0,00	SR	3,34	SR	23.380.600
	- PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tingkat Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	100 Persen	0,00	SR	4,81	SR	14.436.000
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	5,43	SR	8,88	SR	1.446.965.319
58	Sekretariat Daerah			4,52	SR	0,81	SR	181.218.195
	- PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Dokumen Persyaratan Pemekaran Daerah Yang Di Verifikasi	100 Persen	29,17	SR	5,64	SR	181.218.195
		Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Yang Ditindaklanjuti	100 Persen					

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Layanan Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	100 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Perekonomian Dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	95 Persen	2,50	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentasi Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	90 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
59	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			3,17	SR	1,96	SR	1.215.358.976
	- PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	100 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada/Pilpres/Pilleg	84 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Dibina dan Diawasi	100 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	ORGANISASI KEMASYARAKATAN							
	- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	100 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Tingkat Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat	100 Persen	15,00	SR	7,25	SR	27.270.334
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	4,04	SR	4,52	SR	1.188.088.642
60	UPT KPH Kabupaten Bulungan			2,08	SR	2,76	SR	604.112.209
	- PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							
	- PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN							
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
61	Dinas Kelautan dan Perikanan			3,23	SR	1,56	SR	3.333.355.805
	- PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luasan Pengelolaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	47,04 Persen	0,00	SR	0,54	SR	6.636.200

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	35241,25 Ton	0,00	SR	1,12	SR	23.338.127
	- PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	686572,15 Ton	0,00	SR	0,93	SR	19.303.600
	- PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Yang di Awasi	64 %	2,80	SR	1,90	SR	17.370.500
	- PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Ragam Produk Olahan Hasil Perikanan dan Pemasarannya	24 Produk	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 Persen	16,59	SR	4,84	SR	3.266.707.378
62	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			2,37	SR	2,31	SR	1.536.186.312
	- PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2,75 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	47,73 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	14,57 Persen	0,00	SR	3,38	SR	3.152.100

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
		Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)	78 Persen					
	- PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	14,36 Persen	0,00	SR	4,53	SR	14.376.800
		Persentase perusahaan yang melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online	46 Persen					
	- PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Telah Dipetakan	0 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Dibangun Sarana dan Prasarana Dasar	0 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Satuan Permukiman yang dikembangkan sosial ekonominya	67 Persen	0,00	SR	5,36	SR	17.403.200
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	21,37	SR	7,53	SR	1.501.254.212
63	Dinas Kesehatan			0,00	SR	4,31	SR	3.923.236.653
	- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100 Persen	0,00	SR	3,33	SR	489.348.504
		Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	97 Persen					
		Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100 Persen					
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi	100 Persen					

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
		Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	4 Unit					
		Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	0,29 Persen					
		Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	90 Persen					
	- PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Pemenuhan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	85 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
		Persentase puskesmas di kabupaten/kota yang 9 jenis tenaga kesehatannya sesuai standar	90 Persen					
	- PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perijinan Berusaha	100 Persen	0,00	SR	3,42	SR	10.166.600
	- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang mendapatkan advokasi kesehatan, pemberdayaan dan penggalangan kemitraan	100 Persen	0,00	SR	5,82	SR	75.391.756
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	0,00	SR	8,97	SR	3.348.329.793
		Jumlah Layanan Administrasi Perangkat Daerah	12 Bulan					
		Jumlah Layanan Umum Administrasi Daerah	12 Bulan					
		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	32 Unit					
		Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	12 Bulan					

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
		Jumlah BMD yang Diadakan	6 Unit					
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	6 Dokumen					
64	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			0,40	SR	3,81	SR	1.854.734.969
	- PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	2,7 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per Seratus Ribu penduduk Perempuan)	41 Indeks	1,43	SR	16,78	SR	55.454.298
	- PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK Perempuan	47,72 Persen	0,00	SR	10,28	SR	30.015.800
	- PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang dimutakhirkan (jumlah data gender dan anak yang dimutakhirkan dibagi jumlah data gender dan anak keseluruhan X 100%)	80 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kab/Kota Layak Anak (KLA)	60 Persen	1,60	SR	0,59	SR	2.640.000
	- PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	67 Indeks	0,00	SR	4,56	SR	33.395.200
	- PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,1 Indeks	0,00	SR	0,00	SR	0

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentse pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	58,7 Persen	0,00	SR	2,45	SR	6.739.000
	- PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Ketentraman	71,1 Indeks	0,00	SR	0,73	SR	7.644.200
		Indeks Kemandirian	63,1 Indeks					
		Indeks Kebahagiaan	65,6 Indeks					
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
65	Dinas Lingkungan Hidup			1,79	SR	2,01	SR	1.453.283.489
	- PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Instrumen Lingkungan Yang ditetapkan	80 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2	5 Persen	0,00	SR	0,38	SR	12.415.000
		Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2	15 Persen					
		Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi	57 Persen					
		Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik	90 Persen					
	- PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Luasan Taman Keanekaragaman hayati (KEHATI)	27 Persen	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	86 Persen	0,00	SR	2,69	SR	29.630.724

Rangking	Perangkat Daerah / Program	Indikator Outcome Program	Target Kinerja	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
				Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
	- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha dan/Kegiatan kegiatan yang taat atas Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	65 Persen	0,00	SR	1,66	SR	32.462.860
	- PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase orang/masyarakat/lembaga yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup	5 Persen	0,00	SR	0,69	SR	2.481.474
	- PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/Lembaga/Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapat penghargaan dibidang Lingkungan Hidup	16 Persen	0,00	SR	3,38	SR	5.064.200
	- PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100 Persen	0,00	SR	4,56	SR	19.142.480
	- PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang dikelola	92 Persen	0,00	SR	1,07	SR	10.863.764
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	90 Persen	17,88	SR	5,66	SR	1.341.222.987
66	UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau			2,21	SR	1,38	SR	15.132.904
	- PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	jumlah produksi perikanan budidaya	686572,15626010	0,00	SR	0,00	SR	0
	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	persentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	100 %	4,42	SR	2,76	SR	15.132.904

Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I 2025

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Secara keseluruhan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD 2025 Triwulan I memiliki realisasinya yang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efesiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dengan adanya Inpres tersebut, maka beberapa alokasi belanja dilakukan pengurangan seperti Belanja Perjalanan Dinas, Belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar/FGD. Dalam melaksanakan kebijakan ini, maka Pemda melakukan pergeseran APBD 2025.
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025. Keputusan ini dilatarbelakangi oleh upaya efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Berdasarkan SK ini, dana DAK fisik untuk Provinsi Kalimantan Utara sebagian besar dihilangkan, sehingga daerah perlu melakukan pergeseran APBD.
c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dengan adanya SE ini, maka Pemerintah Daerah Kalimantan Utara melakukan percepatan Perubahan RKPD 2025. Percepatan ini dilaksanakan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan dengan visi, misi dan program gubernur dan wakil gubernur terpilih Tahun 2025-2029 dan untuk mendukung progran Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Aspek Geografi dan Demografi

A. Potensi Sumber Daya Alam

1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumber Daya Hutan

Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh kondisi tutupan lahan berupa kawasan hutan. Akan tetapi sumber daya hutan tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan

masyarakat terutama bagi masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan. Potensi sumber daya alam hutan terbagi menjadi kayu, non kayu dan jasa lingkungan. Sementara itu data informasi potensi kawasan hutan masih terbatas dan belum tersusunnya Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang dapat menjadi pedoman pemanfaatan sumber daya hutan.

Dokumen Folu NetSink Provinsi Kalimantan Utara 2022 menyebutkan bahwa terdapat perubahan kebijakan dari arah pengelolaan hutan produksi menuju pengelolaan berdasarkan ekosistem sumber daya alam, sehingga perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan terutama hasil hutan non kayu (antara lain getah, tanaman obat, madu, buah-buahan hutan) dan hasil hutan jasa lingkungan (antara lain wisata alam berbasis masyarakat, perdagangan karbon dan micro hidro untuk energi). Sumber daya hutan di hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi belum dapat dirasakan oleh masyarakat maupun sekitar kawasan hutan.

Pengelolaan perhutanan sosial sebagai program prioritas nasional dilakukan dalam skema kelola kawasan, kelola lembaga dan kelola usaha untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari. Kinerja kelola kawasan di Kalimantan Utara belum optimal yang ditunjukkan dengan areal indikatif persetujuan perhutanan sosial (31,05%), terdapat kinerja kelola lembaga yang belum diberikan akses legal (7,22%) dari yang teregistrasi. Kelola sosial ekonomi masyarakat ditunjukkan dengan sarana prasarana peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang terbatas dan kurangnya pendampingan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pemanfaatan hutan sesuai peraturan yang berlaku merupakan hambatan utama bagi masyarakat untuk dapat mengelola hasil sumber daya hutan secara optimal.

Selain itu, pemanfaatan kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) untuk kesejahteraan masyarakat belum dimanfaatkan dengan baik, khususnya kelembagaan masyarakat dan kegiatan promosi wisata alam terbatas dan budaya. Dalam konteks ini pemanfaatan kawasan TNKM dilakukan dalam kerangka mewujudkan konservasi yang humanis.

2. Terjadinya Deforestasi Hutan

Deforestasi hutan masih berlangsung pada berbagai tipe hutan termasuk perubahan fungsi tutupan mangrove primer dan sekunder menjadi lahan tambak sebesar 66,39%. Total luasan tutupan lahan mangrove seluas 262.318 hektare menjadi kawasan tambak sebesar 83,136 hektare pada kawasan mangrove dalam hutan dan 91.034 hektare pada luar kawasan hutan. Hal ini menyebabkan fungsi kawasan mangrove sebagai penyerab karbon dan penahan abrasi yang akan berkurang.

Berdasarkan dokumen Folu NetSink Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022, luas deforestasi terbesar pada tahun 2019-2020 juga terjadi pada kawasan hutan produksi. Hutan produksi memiliki fungsi sebagai penghasil sumber daya hutan baik kayu, non kayu, maupun jasa lingkungan yang besar mengingat luasan hutan produksi di kawasan hutan merupakan yang terbesar di Provinsi Kalimantan Utara. Adanya deforestasi akan mempengaruhi kondisi produktivitas dan kualitas hasil sumber daya hutan tersebut baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

3. Belum Optimalnya Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi untuk Pembangunan Hutan Tanaman

Menurunnya hasil hutan kayu dalam hutan produksi dari tahun 2018 sebesar 16,07 persen di tahun 2021 mengindikasikan belum optimalnya hasil hutan kayu dalam pemanfaatan kawasan hutan produksi. Hal ini akan berpengaruh pada pemenuhan dalam kebutuhan produksi. Kemudian, dari segi perizinan, dari 31 Ijin Usaha Pengolahan Hasil Hutan yang terdaftar, hanya 7 ijin usaha yang saat ini aktif.

4. Kegiatan Penambangan yang Masih Menyebabkan Kerusakan Lingkungan

Pertambangan merupakan sektor lapangan usaha penyumbang PDRB terbesar di Provinsi Kalimantan Utara yang berpengaruh pada peningkatan PAD. Komoditas produksi pertambangan di provinsi ini meliputi batubara, emas, dan mineral bukan logam dan batuan. Kegiatan pertambangan memiliki tren yang meningkat terhadap produksi batubara. Sehingga, sektor pertambangan masih menjadi sektor potensial yang menjadi tumpuan pendapatan daerah. Akan tetapi,

penambangan terutama batubara menimbulkan indikasi permasalahan terkait kerusakan lingkungan yang juga berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia. Aktivitas pertambangan terutama pada sekitar area sungai dapat meningkatan sedimentasi yang menimbulkan pendangkalan sungai dan pencemaran sungai. Pada area bekas penambangan banyak perusahaan yang tidak melakukan reklamasi pasca pertambangan sehingga terdapat genangan air yang menjadi sumber penyebaran nyamuk malaria. Belum ditemukan data terkait kegiatan penambangan dan dampaknya akibat minimnya informasi dan keterbatasan wewenang pengelolaan pertambangan.

5. Belum Optimal Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan

Sumber daya perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor potensial yang dapat mendorong perekonomian maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara. Potensi kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Utara yang mencakup perikanan tangkap, dan perikanan budidaya, serta hilirisasi produk kelautan dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambahnya. Namun, potensi yang besar tersebut belum dapat menjadi prime mover (penggerak utama) bagi pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara, hal ini disebabkan pembangunan yang belum terfokus pada potensi kelautan dan perikanan. Potensi lestari perikanan tangkap di Wilayah Pengolahan Perikanan atau WPP-716 adalah cukup besar (476.432,00 ton/tahun) dan Provinsi Kalimantan Utara baru dapat memanfaatkan sekitar 6 persen saja. Hal ini menyebabkan kontribusi perikanan dan kelautan masih tertinggal jauh terhadap kontribusi pertambangan dan penggalian. Permasalahan utama dalam pengembangan perikanan tangkap adalah belum adanya pelabuhan perikanan yang memadai (minimnya Pelabuhan Perikanan Nusantara/PPN). Hal ini menyebabkan tidak adanya kapal motor penangkapan ikan yang berukutan besar (>30GT), kurang berkembangnya SDM/nelayan yang mumpuni, dan pada akhirnya aktivitas penangkapan ikan hanya dapat dilakukan di perairan pantai saja (<4 mil).

B. Kebencanaan dan Ancaman Perubahan Iklim

1. Masih Tingginya Risiko Bencana

Indeks risiko bencana mencakup kondisi bahaya, kerentanan, dan kapasitas suatu daerah dalam menghadapi kejadian bencana. Indeks risiko bencana di Kalimantan Utara mengalami kenaikan pada 3 tahun terakhir, namun pada tahun 2023 dan 2024 Indeks risiko bencana dapat menurun. Meski terjadi penurunan di tahun 2024, namun Indeks risiko bencana pada tahun 2024 masih tergolong cukup tinggi. Selain itu, dari segi kapasitas penanggulangan bencana terkait kelembangaan terutama dalam upaya mitigasi non strukturtal yang belum karena terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya apartur dan sarana prasarana penanggulangan bencana. Selain itu, rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana juga masih menjadi hambatan dalam meningkatkan kapasitas daerah. Hal ini disebabkan keterbatasan jaringan informasi yang efektif dan penyebaran kebencanaan terhadap masyarakat, belum terintegrasinya upaya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif, serta belum adanya koordinasi yang efektif antar pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Potensi bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan di konsesi budidaya lahan gambut sangat dipengaruhi keberadaan jaringan kanal yang mengakibatkan hilangnya air sehingga lahan gambut berpotensi menjadi kering dan mudah terbakar, infrastruktur yang ada di atasnya seperti jalan dan lainnya juga akan terbakar. Peraturan tentang kewajiban pemegang konsesi di ekosistem gambut untuk melakukan pemulihan ekosistem gambut berdasar analisis jaringan kanal pada dokumen RPPEG Kalimantan Utara. Jaringan kanal telah dibuat di beberapa wilayah perusahaan baik komoditas hutan, tanaman perkebunan dan pertambangan batubara. Oleh karena itu dibutuhkan ketaatan konsesi dalam program, target dan pemanfaatan budidaya di ekosistem gambut. Kanalisasi pada ekosistem gambut jangan sampai menyebabkan muka air tanah turun di bawah 0,40 m karena akan menyebabkan lahan gambut yang kering menjadi lebih luas akibat kehilangan air.

Kerusakan lahan gambut juga menyebabkan perubahan iklim dalam skala nasional dan global karena kebakaran lahan gambut adalah

penyimpan emisi karbon yang besar dan menyebabkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang besar. Oleh karena itu, lahan gambut seharusnya dikelola secara benar dengan aspek pemanfaatan yang minimal karena menyimpan emisi karbon yang besar.

C. Kondisi Lingkungan Hidup

1. Kondisi Kualitas Air yang Tercemar

Kondisi kualitas air menjadi hal yang penting dalam pemenuhan air bersih maupun air minum mempengaruhi kebutuhan hidup masyarakat dan berpengaruh pada kualitas kesehatan. Terjadinya penurunan terhadap kondisi kualitas air yang disebabkan oleh pencemaran sungai akibat adanya pembuangan sampah atau limbah rumah tangga ke sungai terutama pada kawasan perkotaan di Kota Tarakan.

2. Kondisi Kerusakan Ekosistem Gambut

Kondisi kualitas ekosisten gambut mengalami penurunan yang disebabkan oleh aktivitas pembangunan di atas lahan gambut yang menjadikan tutupan lahan berubah. Konversi tutupan lahan terjadi pada fungsi lindung dan fungsi budidaya. Hal ini juga disebabkan oleh adanya ijin/konsesi aktivitas produktif seperti perkebunan, hutan tanaman, ekstrasi hasil hutan alam, dan aktivitas pertambangan yang diterbitkan untuk sebagian besar area gambut. Berdasarkan analisis spasial yang tercantum dalam RPPEG Provinsi Kalimantan Utara (2023) terdapat indikasi ketidaksesuaian antara perizinan yang telah diterbitkan dengan fungsi ekosistem gambut. Selain itu juga terdapat ketidaksesuaian antara fungsi ekosistem gambut dengan peruntukan wilayah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sehingga akan menimbulkan konflik tenurial di masa depan.

Kerusakan ekosistem gambut tersebut akan berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim skala nasional dan global, terutama ketika di dalam ekosisten gambut tersebut terdapat hutan mangrove. Data RPPEG Provinsi Kalimantan Utara (2023) menyebutkan ekosistem gambut merupakan ekosistem yang unik dimana vegetasi yang tumbuh adalah tumbuhan mangrove dengan jenis tanah adalah tanah gambut. Kerusakan pada gambut akan menyebabkan kerusakan hutan mangrove. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

menyebutkan simpanan karbon pada hutan mangrove ini terbesar (188,3 ton karbon/ha) dibandingkan tipe tutupan lahan yang lain. Selain itu kerusakan gambut di Kalimantan Utara juga akan mengancam kelestarian jenis ikan yang dilindungi yaitu Argusianus argus (VU, II dan D), dan Tringa guttifer (ENJ dan D). Oleh karena itu kerusakan ekosistem gambut ini akan menjadi ancaman besar bagi kelestarian lingkungan hidup.

2.3.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti telah berada pada kondisi yang makmur, sehat, dan damai, yang salah satunya dapat dilihat dari besaran pendapatan individu dan daya beli masyarakat. Hal tersebut merupakan konsep kesejahteraan dalam pengertian sempit, karena hanya melihat pendapatan sebagai indkator kesejahteraan ekonomi. Namun hingga saat ini berdasarkan data kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan ekonomi, masih terdapat beberapa permasalahan pokok yang harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah untuk lima tahun mendatang, yaitu:

1. Belum Optimalnya Penghidupan yang Berkelanjutan

Relatif tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara disebabkan oleh belum optimalnya akses pada sumber-sumber ekonomi dan belum optimalnya akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Pertama, belum optimalnya akses pada sumber ekonomi disebabkan karena belum optimalnya penyerapan tenaga kerja. Masih relatif tingginya jumlah pengangguran di provinsi ini juga disebabkan karena belum optimalnya kualitas tenaga kerja itu sendiri, karena tidak dibekali dengan peningkatan ketrampilan dan keahlian yang dapat meningkatkan produktivitas kinerja.

Kedua, belum optimalnya akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar disebabkan karena belum optimalnya akses terhadap jaminan dan perlindungan sosial, serta belum optimalnya penyediaan layanan infrastruktur dasar dan wilayah. Belum optimalnya akses terhadap jaminan dan perlindungan sosial tersebut setidaknya disebabkan oleh tiga faktor, yakni belum optimalnya penyediaan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua, belum optimalnya akses pada layanan

kesehatan, dan belum optimalnya pemberdayaan ekonomi. Adapun pemberdayaan ekonomi yang dimaksud meliputi pelatihan ketrampilan, bantuan modal usaha, pembentukan koperasi, akses ke pasar dan peluang kerja, serta dukungan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selanjutnya, belum optimalnya penyediaan layanan infrastruktur dasar dan wilayah terkait dengan belum optimalnya penyediaan layanan jalan, air bersih, sanitasi, energi, serta akses telekomunikasi.

2. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sektor pendidikan dan kesehatan menjadi pondasi yang penting di dalamnya. Belum optimalnya kualitas penyediaan pendidikan dan pelayanan kesehatan akan menghambat pembangunan SDM yang berkualitas. Belum meratanya sekolah utamanya sekolah menengah serta sarana prasaranan pendukungnya, belum tercukupinya jumlah guru, serta masyarakat yang masih mengesampingkan pendidikan menjadi beberapa sebab permasalahan pendidikan di Kalimantan Utara. Dari segi pelayanan kesehatan, belum meratanya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang masih terbatas menjadikan pelayanan kesehatan menjadi belum optimal. Ditambah dengan masih menyebarnya penyakit menular seperti TB dan malaria menajdikan masyarakat belum mencapai kondisi kesehatan yang optimal.

B. Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan sosial budaya merupakan cerminan kondisi masyarakat dari kesehatan, kualitas keluarga, perlindungan anak, perempuan, pemuda, dan kebudayaan. Hingga saat ini terdapat beberapa permasalahan pokok yang perlu menjadi perhatian utama untuk lima tahun mendatang, yaitu:

1. Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu pondasi dasar dalam membangun kesejahteraan sosial. Belum optimalnya pelayanan kesehatan di Kalimantan Utara ditandai dengan meningkatnya angka kematian ibu dan bayi, belum optimalnya penurunan Prevalensi Stunting serta meningkatnya kasus penyakit menular. AKI dan AKB

Kalimantan Utara pada tahun 2024 tercatat sebesar 58,48 per 100.000 kelahiran hidup dan 11,40 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara itu Prevalensi Stunting pada tahun 2024 masih diangka 9,40. Selanjutnya untuk penyebaran penyakit menular di Kalimantan Utara mengalami peningkatan untuk penyakit TB dan malaria. Penemuan TB pada tahun 2023 sebesar 68,30%. Sedangkan penyakit malaria dilihat dari angka kejadiannya pada tahun 2023 sebesar 0,2 kasus per 100.000 penduduk. Penyebab dari permasalahan kesehatan tidak terlepas dari keberadaan fasilitas kesehatan yang belum tercukupi serta akses menuju fasilitas kesehatan yang masih buruk. Permasalahan lain seperti jumlah tenaga kesehatan yang belum mencukupi serta kesadaran hidup sehat yang masih rendah di tengah masyarakat juga masih ditemukan di Kalimantan Utara.

2. Belum Optimalnya Kebijakan Pengarustamaan Gender

Kebijakan pengarustamaan gender merupakan kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan untuk mencapai kesetaraan gender dalam berbagai dimensi kehidupan serta kebijakan ini berfokus pada gender yang dijadikan sebagai faktor utama dalam merencanakan, mengimplementasikan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Akan tetapi, kebijakan pengarustamaan gender belum dilakukan dengan optimal dalam rangka mencapai tingkat efektivitas untuk mewujudkan kesetaraan gender. Adanya permasalahan tersebut, menyebabkan pemberdayaan gender dan ketimpangan gender yang belum optimal. Hal tersebut dibuktikkan dengan, tren indeks pemberdayaan gender bersifat fluktuatif dan selalu berada di bawah rata-rata nasional. Begitu pula dengan Indeks ketimpangan gender Provinsi Kalimantan Utara flukuatif dan selalu berada di bawah rata-rata nasional, kebijakan pengarustamaan gender belum ditindaklanjuti dengan intervensi.

Selain itu, Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah yang terletak di perbatasan negara, menghadapi berbagai tantangan dalam hal kesenjangan gender. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada perempuan, tetapi juga berdampak pada kelompok rentan lainnya. Akses terhadap sumber daya dan layanan publik merupakan faktor utama yang mempengaruhi kesenjangan gender karena perempuan sering kali mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya.

3. Belum Optimalnya Usia Pendewasaan Perkawinan dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga

Belum optimalnya usia pendewasaan perkawinan dan penyiapan kehidupan berkeluarga dapat mempengaruhi praktek perlindungan anak serta permasalahan ini dapat menghambat dalam mewujudkan inklusi sosial. Belum optimalnya usia pendewasaan perkawinan dan penyiapan kehidupan juga berpangaruh terhadap indeks perlindungan anak. Hal tersebut dibuktikan dengan capaian indeks perlindungan anak Provinsi Kalimantan Utara bersifat cukup fluktuatif. Capaian terendah indeks perlindungan anak yakni di tahun 2020 sebesar 60,21 persen, angka tersebut jauh dari rata-rata nasional. Rata-rata nasional indeks perlindungan anak tahun 2020 sebesar 66,86 persen. Namun, indeks capaian perlindungan anak mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2023 yaitu sebesar 63,35 persen, capaian tersebut hampir sama dengan nilai rata-rata nasional yaitu sebesar 63,30 persen. Tren bersifat fluktuatif dan cenderung menurun di tahun 2020 dan 2021 ini disebabkan karena masih banyaknya pernikahan dini dan pengasuhan anak, hal ini dipengaruhi oleh belum optimalnya penyiapan kehidupan berkeluarga.

4. Belum Optimalnya Pembangunan Pemuda

Dalam membentuk pemuda yang berkualitas diperlukan upaya peningkatan aspek kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, keaktifan pemuda, dan gender. Kelima aspek tersebut menyumbang dengan proporsi yang berbeda dalam pembangunan pemuda. Sehingga pembangunan pemuda tidak dipandang aspek yang berdiri sendiri tetapi merupakan komposit dari berbagai hal. Oleh karena itu, upaya dalam perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, gender, dan aspek lainnya penting dilakukan untuk membentuk pemuda yang unggul dan berdaya saing.

Saat ini, kondisi kesehatan pemuda masih belum optimal. Secara spesifik aspek kesehatan bagi pemuda di Kalimantan Utara dalam indeks tersebut menunjukkan masih tingginya kehamilan remaja putri yang sebesar 28,77% pada tahun 2022, serta pemuda yang mengalami kesakitan dan persentase pemuda yang merokok. Sedangkan, aspek partisipasi dan kepemimpinan pemuda erat kaitannya dengan pengembangan minat pemuda dalam berorganisasi dan berkegiatan

sosial. Pemuda di Kalimantan Utara cukup aktif dalam melakukan kegiatan sosial (43,23% tahun 2022). Akan tetapi, dari aspek keaktifan berorganisasi masih cukup rendah (3,28%). Jika dilihat dari pendidikan, masyarakat belum menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap pembangunan pemuda yang mengalami hambatan, oleh karena pembangunan pemuda membutuhkan kecakapan yang diperoleh melalui pendidikan. Jumlah lapangan kerja yang terbatas, minat berwirausaha yang rendah, pendidikan yang relatif belum memadai, dan kesehatan yang kurang baik mengakibatkan pemuda di provinsi ini belum memiliki daya saing secara ekonomi. Sementara itu dilihat dari aspek gender, pengarustamaan gender belum berjalan secara optimal. Hal tersebut mengakibatkan masih adanya ketimpangan antara kualitas pemuda dan pemudi.

Berkembangnya teknologi informasi yang semakin meluas dan tidak dapat dihindari membawa berbagai perubahan sosial dalam pola berpikir dan perilaku yang mengakibatkan dampak negatif bagi kalangan pemuda. Dampak negatif tersebut antara lain berupa konten dan aplikasi negatif yang mengakibatkan antara lain penurunan kemampuan berpikir, menurunkan minat belajar, rentan terhadap pelecehan dan intimidasi online, merusak moral, ketidakseimbangan emosi, meningkatkan risiko gangguan mental seperti depresi dan lain sebagainya. Kondisi tersebut akan mengakibatkan menurunnya kualitas pemuda dan selanjutnya akan menjadi penghambat upaya pembangunan pemuda. Pembangunan pemuda yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemuda merupakan salah satu investasi peningkatan sumber daya manusia. Hal ini menjadi penting mengingat dua puluh tahun ke depan akan mengalami bonus demografi, jika tidak dipersiapkan dengan baik maka kualitas SDM di provinsi tidak akan siap sebagai pelaku pembangunan dalam menghadapi tantangan ke depan dan mengelola potensi daerah yang dimiliki.

Permasalahan lainnya yaitu belum optimalnya Indeks Pembangunan Pemuda yang masih berada di angka 56,33 pada tahun 2023, disamping itu selama kurun waktu tiga tahun terakhir Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Utara selalu berada di bawah Indeks Pembangunan Pemuda nasional.

5. Belum Optimalnya Pembangunan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan identitas dan ciri khas masyarakat. Pembangunan kebudayaan bertujuan untuk melestarikan dan membumikan kebudayaan di tengah masyarakat di era disrupsi. Dalam upaya pembangunan kebudayaan komponen-komponen berikut perlu menjadi pertimbangan di antaranya ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial, gender, warisan budaya, literasi, serta pengekspresian budaya. Namun, jika difokuskan pada bagian budaya sebagai suatu identitas dan kekhasan maka aspek ekonomi budaya, warisan budaya, dan ekspresi budaya adalah yang paling mewakili. Ketiga aspek tersebut menunjukkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian budaya, rendahnya cagar budaya yang berhasil terdaftar, dan belum optimalnya pemanfaatan budaya sebagai pendukung ekonomi masyarakat. Ketiga komponen pembentuk indeks pembangunan kebudayaan tersebut mengisyaratkan bahwa kekayaan budaya yang ada belum mampu menggerakkan kegiatan pariwisata yang dapat menjadi sumber perekonomian daerah.

Berkaca pada daerah lain yang mampu memanfaatkan budaya sebagai salah satu sumber perekonomian, Kalimantan Utara memiliki peluang menjadikan budaya sebagai salah satu aspek untuk mengembangkan pariwisata, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Keragaman budaya yang ada serta sejarah yang membangunnya mampu menjadi potensi pariwisata.

Sementara itu, perlu diwaspadai akan munculnya pengaruh budaya luar yang dibawa oleh para pendatang baik dari dalam negeri maupun luar negeri sebagai dampak pesatnya pembangunan khususnya di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI Tanah Kuning). Kehadiran para migran pendatang tersebut akan membawa perubahan sosial dan perilaku yang akan berpengaruh terhadap kebudayaan lokal yang selama ini menjadi identitas masyarakat Kalimantan Utara.

2.3.3. Aspek Daya Saing

A. Daya Saing Ekonomi Daerah

Sumberdaya alam merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam upaya peningkatan daya saing ekonomi daerah, pemerintah daerah perlu mendorong sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya untuk dikembangkan, juga memperkuat peran inovasi. Berdasarkan capaian kinerja lima tahun ke belakang, setidaknya terdapat permasalahan utama yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Belum Optimalnya Kinerja Sektor Perekonomian Daerah

Hingga saat ini, sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi tulang punggung (backbone) perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2024, terjadi penurunan kontribusi dan penurunan laju pertumbuhan yang cukup signifikan. Penurunan kontribusi sektor ini dipengaruhi oleh menurunnya kontribusi sub sektor pertambangan minyak, gas, dan panas bumi, serta pertambangan bijih logam, yang terjadi dalam lima tahun terakhir. Selain itu, terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan berdampak pada menurunnya produksi sektor pertambangan dan penggalian, yang kemudian dapat menyebabkan menurunnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah. Meskipun demikian, belum ada sektor lain yang cukup kuat untuk dapat menggeser posisi sektor pertanian dan pertambangan sebagai kontributor utama dalam struktur perekonomian daerah. Namun, dengan kecenderungannya yang menurun, pemerintah dan para pengambil keputusan perlu mengembangkan diversifikasi ekonomi lainnya untuk menguatkan struktur perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara.

Selanjutnya, peranan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan kecenderungan yang menurun dalam lima tahun terakhir, meskipun pada tahun 2024 sektor ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 10,01. Sektor yang menjadi salah satu sektor unggulan di Provinsi Kalimantan Utara ini menunjukkan menunjukkan pergeseran negatif yang paling besar diantara sektor lainnya. Salah satu hal yang

menyebabkan terjadinya kondisi tersebut adalah banyaknya daerah yang mengalami alih fungsi lahan pertanian, penurunan luas areal tanam dan panen, sarana dan prasarana pertanian yang belum optimal, penerapan inovasi dan teknologi yang belum optimal, kapasitas dan kualitas SDM pertanian yang belum memadai. Hal tersebut menyebabkan produksi dan produktivitas pertanian cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Menurunnya produktivitas pertanian yang salah satunya ditunjukan oleh menurunnya produksi beras yang terjadi akibat adanya alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan sawit pada Provinsi Kalimantan Utara terjadi sebesar 4.955 hektar atau 19,56 persen pada rentang tahun 2012-2017 (Harini dkk., 2019). Selain itu, terjadi juga penurunan jumlah petani aktif. Beberapa tahun terakhir ini, banyak petani yang beralih profesi menjadi pembudidaya rumput laut. Ketersediaan prasarana untuk kebutuhan pertanian seperti jaringan irigasi juga belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut ditunjukan dengan adanya penurunan terhadap jumlah jaringan irigasi dalam kondisi baik pada rentang tahun 2021-2023 sebesar 63,86 persen. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya anggaran operasi dan pemeliharaan juga menyebabkan menurunnya persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik.

Sektor lainnya yang menunjukkan pergeseran negatif terbesar kedua dalam struktur perekonomian daerah adalah sektor industri pengolahan. Adapun penyebab dari permasalahan menurunnya kinerja industri pengolahan di provinsi ini antara lain pengembangan kawasan industri yang belum optimal, termasuk pada investasi industri pengolahan yang berfluktuatif.

Selanjutnya, Provinsi Kalimantan Utara memiliki Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning, di mana proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha ini memiliki sifat strategi untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Hingga saat ini, penyediaan infrastruktur pendukung di kawasan tersebut belum terbangun dengan optimal, seperti jaringan jalan, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, dan beberapa infrastruktur lainnya.

Sektor lainnya yang mengalami penurunan yaitu sektor Kelautan dan Perikanan, dimana pada tahun 2024 sektor ini mengalami penurunan hingga menjadi 6,14 persen atau turun dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 6,52 persen.

2. Regulasi Terkait Kegiatan Ekspor yang Belum Memenuhi Standar

Kegiatan ekspor mencerminkan tingkat keterbukaan ekonomi suatu wilayah. Regulasi terkait kegiatan ekspor yang belum memenuhi standarisasi menyebabkan permasalahan kegiatan perdagangan di Provinsi Kalimantan Utara. Ekspor bersih perdagangan menunjukkan tren yang berfluktuatif dan menurun tajam sebesar 94 persen pada tahun 2022 dan 2023. Indikator lainnya yang mencerminkan kegiatan perdagangan internasional adalah indeks keterbukaan ekonomi. Indeks keterbukaan ekonomi atau rasio ekspor-impor terhadap PDRB. Semakin indeks keterbukaan ekonomi mendekati nilai 0 maka semakin terbatasnya kegiatan ekspor dan impor yang terjadi di wilayah tersebut. Rentang indeks keterbukaan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara sebesar 0,0001 dan nilai indeks tersebut tergolong kecil. Hal tersebut diakibatkan oleh penurunan secara total ekspor Indonesia pada sektor migas akibat penurunan harga minyak sawit mentah dan batu-bara. Selain itu, fluktuasi ekspor bersih perdagangan dipengaruhi masih banyak pelaku usaha yang belum familiar dengan prosedur ekspor-impor, regulasi internasional, dan standar kualitas yang harus dipenuhi. Di tengah semua ini, semakin masifnya lalu lintas perdagangan ilegal turut menyebabkan semakin banyak peredaran barang tanpa izin edar. Perdagangan ilegal ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan bea, tetapi juga membahayakan konsumen karena barang yang beredar tidak melalui proses pengawasan kualitas yang ketat.

B. Daya Saing SDM

1. Menurunnya Literasi Masyarakat

Literasi merupakan bagian penting dalam membentuk masyarakat yang berdaya pikir kritis dan adaptif terhadap berbagai kondisi. Dengan berkembangnya teknologi, kemampuan literasi saat ini tidak hanya digunakan untuk media yang bersifat fisik atau cetak tetapi

juga untuk media digital. Penurunan literasi masyarakat ditandai dengan menurunnya nilai IPLM pada tahun 2023, menurunnya nilai indeks literasi digital pada tahun 2022, serta nilai yang menurun pada angka literasi berdasarkan budaya literasi IPK 2022.

Penurunan literasi masyarakat pada IPLM dipengaruhi oleh beberapa kondisi yakni, perpustakaan yang tidak memenuhi standar seperti pemerataan layanan dan jumlah koleksi buku serta tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan yang rendah. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi tersebut, kunjungan masyarakat ke perpustakaan menjadi komponen yang paling rendah nilainya dengan nilai 0,0621 dari 1,0000. Kunjungan ke perpustakaan masih tergolong rendah sehingga perlu ada upaya untuk menarik perhatian masyarakat supaya mau berkunjung ke perpustakaan. Rendahnya kunjungan ke perpustakaan sangat mungkin dipengaruhi oleh penggunaan smartphone dan didukung oleh internet yang lebih mudah dan praktis.

Indeks literasi digital juga mengalami penurunan pada tahun 2022. Dari keempat pilar penyusun indeks literasi digital, digital safety menjadi pilar dengan nilai terendah yaitu 2,75 dari 5. Rendahnya nilai tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan data pribadi ketika menggunakan internet dan layanan digital lainnya.

Angka literasi yang didasarkan pada domain budaya literasi IPK menunjukkan masih rendahnya minat membaca dan minat berkunjung ke perpustakaan dengan masing-masing memiliki nilai 48,9/70 dan 1,91/25 pada tahun 2022. Hal ini berkorelasi dengan IPLM yang telah dibahas di atas. Sehingga perlu upaya dua arah baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat. Pemerintah menyediakan fasilitas yang memudahkan masyarakat dalam mengakses sumber-sumber literasi seperti perpustakaan keliling atau pemutakhiran perpustakaan online dan masyarakat memanfaatkan apa yang ada sebagai sumber- sumber literasi alternatif seperti membuat pojok baca, dsb.

Selain itu literasi akan sangat berhubungan dengan kualitas pendidikan di masyarakat. Semakin tinggi APK (angka partisipasi kasar) diharapkan literasi akan semakin baik. Rasio guru dan murid yang semakin baik, diharapkan literasi masyarakat semakin baik. Demikian pula semakin banyak masyarakat yang terlayani dan memperoleh

pendidikan yang semakin tinggi maka diharapkan tingkat literasi masyarakat akan semakin baik pula. Semakin tinggi pendidikan masyarakat maka kemampuan masyarakat dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara dan warga dunia untuk berkontribusi secara produktif akan semakin baik.

C. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Daerah

Infrastruktur daerah menjadi katalis pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui infrastruktur daerah yang menunjang aktivitas masyarakat sehingga dapat menggerakan roda perekonomian dan memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya ketersediaan prasarana jalan sangat penting untuk mendukung hilirisasi produk pertanian, perkebunan dan perikanan. Berdasarkan capaian kinerja lima tahun ke belakang, setidaknya terdapat permasalahan yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Penyediaan Prasarana Jalan Mantap

Berdasarkan data tahun 2020-2024, jaringan jalan di Provinsi Kalimantan Utara masih cukup banyak (lebih dari 80%) yang kondisinya rusak dan rusak berat. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kewenangan provinsi dan alokasi anggaran pemeliharaan jalan, terutama pada masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 ditetapkan target nasional untuk tingkat provinsi terhadap ketersediaan jalan dengan kondisi mantap (jalan dengan kondisi baik dan sedang) sebesar 90%. Untuk mencapai target tersebut, perlu dilakukan upaya yang signifikan karena saat ini hanya terdapat kurang dari 15% jalan dengan kondisi mantap, sangat jauh dari target nasional. Penyediaan jalan dengan kualitas yang baik sangat penting untuk meningkatkan konektivitas serta keterjangkauan pelayanan dasar di Provinsi Kalimantan Utara.

2. Konektivitas Antar Wilayah

Selain kondisi kualitas jalan, masih terdapat permasalahan terkait keterhubungan jaringan jalan. Beberapa ruas jalan belum terbangun sehingga belum semua jaringan jalan terkoneksi. Jaringan jalan di kabupaten satu dengan kabupaten lainnya belum terkoneksi

terutama di bagian barat. Masih terdapat permasalahan konektivitas antar kabupaten terutama di daerah perbatasan.

Selain itu, peningkatan jumlah penduduk tidak diiringi dengan penambahan panjang jalan sehingga proporsi jalan dengan jumlah penduduk terus menurun. Apabila tren ini berlanjut dan tidak dilakukan intervensi, maka dikhawatirkan akan terjadi kemacetan lalu lintas terutama di daerah perkotaan. Selain itu, rendahnya proporsi jalan dengan jumlah penduduk juga dapat berimplikasi pada rendahnya konektivitas antar wilayah di Provinsi Kalimantan Utara.

Penyediaan infrastruktur konektivitas (perhubungan) baik dari sisi pelayaran maupun lalu lintas dan angkutan jalan terutama di daerah perbatasan dan pedalaman juga menjadi salah satu permasalahan utama. Hal ini berimplikasi pada terhambatnya distribusi barang maupun mobilitas masyarakat serta tingginya biaya transportasi yang kemudian berpengaruh juga terhadap tingginya harga barang. Keterbatasan konektivitas transportasi juga menyebabkan sulitnya akses terhadap pelayanan dasar. Sebagai contoh, infrastruktur di Pelabuhan Tengkayu tidak seimbang dengan jumlah penumpang dan belum terpisah antara angkutan manusia dan barang. Di perkotaan juga masih terdapat beberapa permasalahan terkait prasarana angkutan, seperti terbatasnya penyediaan trayek angkutan umum massal perkotaan. Padahal pada masa kini dan masa depan, dibutuhkan pelayanan angkutan umum masal perkotaan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.

Selain itu juga diperlukan perumusan kebijakan daerah terkait transportasi hijau dan berwawasan lingkungan yang mempertimbangkan kondisi ekosistem setempat terutama pembangunan di ekosistem gambut yang merupakan ekosistem yang rentan. Pembangunan prasarana jalan di ekosistem gambut perlu mempertimbangkan jenis konstruksinya. Sudah banyak program pembangunan sarana dan prasarana yang akhirnya tidak terpakai karena amblas/miring.

3. Belum Tercapainya Target 100 Persen Akses Pelayanan Dasar Air Minum dan Sanitasi

Air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi bagi seluruh penduduk di suatu wilayah. Namun, kondisi

akses air minum di Provinsi Kalimantan Utara belum menjangkau seluruh penduduk termasuk di kota Tarakan. Pada tahun 2023, cakupan layanan jaringan air minum sebesar 90,19% dan menurun pada tahun 2024 menjadi hanya 89,42%. Cakupan layanan jaringan sanitasi juga belum menjangkau seluruh penduduk. Pada tahun 2023, cakupan layanan jaringan sanitasi hanya sebesar 84,22%.

4. Belum Meratanya Layanan Jaringan Kelistrikan dan Telekomunikasi

Ketersediaan jaringan listrik dibutuhkan sebagai sumber energi untuk mempermudah aktivitas masyarakat sehari-hari. Ketersediaan jaringan kelistrikan belum menjangkau seluruh penduduk yang disebabkan oleh terbatasnya akses jaringan distribusi prasarana ketenagalistrikan yang dapat menjangkau daerah-daerah pedalaman. Hal ini ditunjukan dari nilai rasio elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Utara yang hanya mencapai 95,08 persen di tahun 2024 sedangkan target nilai rasio elektrifikasi nasional pada tahun 2024 adala 100 persen. Dengan kondisi akses distribusi yang sulit akibat faktor geografi, perlunya upaya optimalisasi pengadaan pembangkit listrik dengan memanfaatkan potensi energi sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang tersedia pada wilayah tersebut.

Masalah utama dari infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Kalimantan Utara adalah belum meratanya layanan jaringan telepon dan internet. Hal ini ditunjukan oleh cakupan layanan jaringan telekomunikasi sebesar 97,51 persen di tahun 2023. Berdasarkan Dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045, masih terdapatnya 12 desa yang masih berada pada area blankspot pada tahun 2023 yang tersebar di seluruh kabupaten kecuali Kota Tarakan yang seluruh wilayahnya sudah terjangkau oleh layanan telekomunikasi. Padahal pada era digital seperti sekarang ini, layanan telekomunikasi menjadi salah satu kebutuhan utama untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah tidak hanya di daerah perkotaan tetapi juga di daerah pedesaan. Ketersediaan jaringan telekomunikasi terutama jaringan internet juga sangat penting untuk mendukung perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kondisi geografis yang didominasi oleh tutupan lahan hutan dan wilayah kepulauan

merupakan tantangan utama dalam pemerataan layanan jaringan telekomunikasi.

D. Daya Saing Iklim Investasi

Daya saing iklim investasi menggambarkan situasi kegiatan penanaman modal yang didukung oleh situasi politik, ketentraman dan ketertiban, serta daya saing daerah. Daya saing investasi bertujuan untuk peningkatan peluang investasi di daerah yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian provinsi. Sebuah iklim investasi yang kondusif dapat mendorong masuknya modal asing dan domestik, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan produktivitas dan inovasi di berbagai sektor. Namun, hingga saat ini, berdasarkan data kinerja pada daya saing iklim investasi, masih terdapat beberapa permasalahan pokok yang harus menjadi perhatian utama pemerintah provinsi untuk lima tahun mendatang. Salah satu masalah utama adalah belum optimalnya iklim penanaman modal yang diakibatkan oleh regulasi dan insentif yang kurang mendukung. Banyak calon investor yang merasa kesulitan dalam memahami dan memenuhi berbagai regulasi yang ada, yang sering kali dianggap terlalu birokratis dan rumit. Selain itu, insentif dan kemudahan berusaha yang dijanjikan sering kali tidak terlaksana dengan baik, sehingga menurunkan minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Selain masalah regulasi dan insentif, sistem Online Single Submission (OSS) yang belum stabil juga menjadi kendala signifikan. Sistem OSS yang seharusnya mempermudah proses perizinan dan pelaporan investasi sering kali mengalami gangguan dan belum terintegrasi dengan baik. Terjadinya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah mengakibatkan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tidak sesuai dengan kondisi terkini. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi investor, karena mereka tidak mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru tentang kondisi investasi di daerah.

2.3.4. Aspek Pelayanan Umum

2.3.4.1. Layanan Urusan Wajib

A. Pendidikan

1. Relatif Terbatasnya Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan

Terbatasnya kualitas dan pelayanan pendidikan dilatarbelakangi banyak hal di antaranya distribusi guru yang tidak merata, fasilitas pendidikan yang kurang mendukung, dan lingkungan masyarakat yang belum optimal dalam mendukung pendidikan. Partisipasi sekolah di Provinsi Kalimantan Utara masih termasuk kategori rendah apabila didasarkan pada SPM pendidikan dengan nilai sebesar 77,03% pada tahun 2023. Hal ini menandakan minat untuk mengenyam pendidikan formal khususnya pendidikan menengah masih rendah. Salah satu faktor yang menjadikan rendahnya minat bersekolah formal tersebut adalah pola pikir masyarakat yang belum memprioritaskan pendidikan bagi anak dan lebih memilih anak untuk membantu bekerja ketika anak sudah memasuki usia remaja akhir.

Sementara itu, guru sebagai SDM penting dalam membangun pendidikan mengalami beberapa kendala, yakni distribusi yang tidak merata, fasilitas untuk penunjang produktivitas guru belum optimal, dan kesadaran guru dalam mengajar dengan kurikulum merdeka, sebagai kurikulum baru, yang masih rendah. Rasio guru dan murid untuk pendidikan menengah pada tingkat provinsi relatif baik. Namun, jika dilihat secara kewilayahan masih banyak sekolah yang memiliki guru yang terbatas terutama untuk daerah perbatasan dan pedalaman. Sulitnya akses ke wilayah tersebut serta fasilitas pendukung yang kurang memadai mengakibatkan para guru mengajukan pindah tugas ke wilayah lain. Sedangkan dari sisi pengajaran, kurikulum merdeka yang saat ini diterapkan mensyaratkan keaktifan guru dalam mengajar dengan berbagai metode pembelajaran. Sebenarnya, bahan dan materi untuk mengajar sudah tersedia. Namun, fasilitas penunjang seperti internet yang masih terbatas, kemampuan guru dalam menerapkan materi yang kurang sesuai, keaktifan dalam mengolah materi yang rendah menjadikan pelaksanaan kurikulum merdeka belum optimal mengakibatkan kurikulum merdeka belum dapat berjalan dengan baik.

2. Belum Optimalnya Inklusivitas Pendidikan

Sekolah sebagai tempat belajar hendaknya memiliki lingkungan yang terbuka dan inklusif bagi semua orang. Hal tersebut dicantumkan dalam SPM Pendidikan yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek dalam Permendikburistek Nomor 32 tahun 2022. Dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif di dalam lingkungan sekolah, disusun beberapa indikator yang dapat mengukurnya seperti indeks inklusivitas dan indeks kebinekaan. Selain, mengukur tingkat inklusivitas di dalam lingkungan sekolah, SPM tersebut juga mengukur partisipasi sekolah bagi teman-teman difabel sebagai wujud mendukung pendidikan yang inklusif.

Partisipasi penyandang disabilitas masih termasuk kategori rendah dengan nilai 73,93% pada tahun 2023. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya Sekolah Luar Biasa (SLB). SLB hanya dapat ditemui di pusat-pusat kabupaten/kota sehingga penyandang disabilitas di luar daerah tersebut akan kesulitan mengakses SLB. Cara mengatasinya dapat dilakukan dengan menambah jumlah SLB atau menyediakan asrama untuk SLB yang ada sehingga siswa yang merantau memiliki tempat tinggal yang memadai.

Keterbatasan jumlah SLB seharusnya tidak menjadikan angka partisipasi sekolahnya rendah karena sekolah-sekolah biasa juga masih dapat mendidik peserta disabilitas. Meskipun di sekolah biasa fasilitas dan tenaga pendidik kurang memadai dibandingkan dengan SLB. Oleh karena itu, disusun indeks inkusivitas dan kebinekaan. Akan tetapi, jika melihat nilai indeks inklusivitas dan kebinekaan di provinsi ini yang masih pada tingkat merintis dengan nilai 50%-60% untuk indeks inklusivitas dan 60-70% untuk indek kebinekaan pada tahun 2023 mengindikasikan inklusivitas pendidikan di berbagai sekolah masih belum optimal.

3. Belum Optimalnya Serapan Lulusan SMK terhadap Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja

SMK sebagai sekolah vokasi memfokuskan kepada pembentukan SDM yang ideal untuk dunia usaha dan industri. Dengan SDM yang ideal, dunia usaha dan industri dapat berkembang lebih baik dan maju. Akan tetapi, di Provinsi Kalimantan Utara lulusan SMK masih belum memuaskan bagi dunia usaha dan dunia industri kerja. Berdasarkan

tingkat penyerapan lulusan SMK seharusnya tidak menjadi masalah karena nilainya sudah cukup tinggi dengan nilai 86,65% pada tahun 2024. Akan tetapi, jika dilihat dari tingkat kepuasan dunia kerja nilainya masih cukup rendah dengan nilai 70,34%. Penyebab belum optimalnya tersebut karena fasilitas pendukung untuk pendidikan vokasi yang belum memadai. Selain itu, perlunya penerapan budaya kerja yang mendukung untuk membentuk SDM sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Pengoptimalan serapan lulusan SMK juga dapat berjalan melalui kerjasama dengan Balai Latihan Kerja yang lebih bersifat aplikatif dan membentuk bursa pekerja.

B. Kesehatan

1. Belum optimalnya penurunan Stunting

Prevalensi Stunting sejak tahun 2021 sampai 2024 terus mengalami penurunan hingga diangka 9,40 persen pada tahun 2024. Meski terjadi penurunan masih perlu upaya dan program strategis untuk menurunkan prevalensinya. Penuntasan stunting dimulai dari peningkatan kesehatan keluarga terutama untuk ibu dan anak seperti asupan gizi yang mencukupi bagi ibu hamil, pemeriksaan secara berkala, pemenuhan gizi ibu dan anak yang telah lahir sampai 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK).

2. Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Permasalahan pelayanan kualitas kesehatan ibu dan anak ditandai dengan masih tingginya AKB dan AKI yang selaras dengan cenderung menurunnya cakupan kunjungan ibu hamil dan bayi, belum tercapainya 100% cakupan imunisasi dasar serta menurunnya cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan, Permasalahan lain yang menyebabkan penurunan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak adalah adanya keterbatasan akses sarana prasarana fasilitas kesehatan serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan (misalnya percaya dukun beranak dan persalinan di rumah).

3. Meningkatnya Kasus Penyakit Menular

Penemuan kasus TB dan kematian akibat TB relatif meningkat setiap tahunnya. Selain, TB penyakit malarian juga mengalami

peningkatan baik dari angka kejadian maupun kematian. Provinsi Kalimantan Utara juga belum mendapatkan status eliminasi malaria karena masih adanya 2 kabupaten yang belum berstatus eliminasi malaria. Penyebaran malaria dapat dicegah dengan memastikan tidak adanya tempat nyamuk berkembang biak dalam hal ini genangan air terbuk atau sejenisnya. Selain itu, upaya pengecekan kesehatan baik dari dan dalam daerah yang belum mendapatkan status tersebut perlu ditingkatkan.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Belum Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih

Berdasarkan FGD Dinas PUPR-Perkim Provinsi Kalimantan Utara, kondisi air bersih di Provinsi Kalimantan Utara masih memiliki kendala dalam pemenuhannya terutama di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan.

2. Meningkatnya Luasan Area Kawasan Kumuh

Kondisi kawasan kumuh Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan terhadap luasannya. Hal tersebut ditunjukan dari meningkatnya persentase area kawasan kumuh sebesar 7,6 persen pada rentang tahun 2021-2023. Hal ini terjadi pada kawasan perkotaan terutama pada area kawasan pesisir yang merupakan kampung nelayan. Selain itu, peningkatan area kawasan kumuh juga terjadi bersamaan dengan meningkatnya luasan permukiman kumuh. Kawasan dengan kategori kumuh tersebut disebabkan kompleksitas permasalahan didalamnya yang mencakup aspek kesehatan, ekonomi, legalitas, sosial, tata ruang, dan infrastruktur.

3. Pemanfaatan Ruang yang Tidak Sesuai dengan Peruntukan Ruang

Berdasarkan Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan Dinas PUPR-Perkim Provinsi Kalimantan Utara, kondisi pemanfaatan ruang di Provinsi Kalimantan Utara masih terdapat ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang. Hal ini memiliki pengaruh yang besar karena banyaknya aktivitas produktif yang terjadi di peruntukan fungsi budidaya dan terutama fungsi lindung yang dapat mempengaruhi kondisi lingkungan dan ekosistem didalamnya. Ketidaksesuaian

pemanfaatan ruang pada fungsi budidaya salah satunya ditunjukan oleh adanya budidaya rumput laut yang menganggu pelayaran di Kabupaten Nunukan. Kemudian, pada fungsi lindung ditunjukan adanya perambahan hutan lindung di Pulau Nunukan dan Kota Tarakan serta adanya pemanfaatan ruang permukiman di kawasan lindung ekosistem mangrove di Kota Tarakan. Hal tersebut dapat mengakibatkan terganggunya fungsi ruang dan aktivitas peruntukan ruang diatasnya.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Masih Terdapatnya Rumah yang Tidak Layak Huni

Nilai indikator rasio rumah layak huni pada tahun 2023 sebesar 0,616 atau 61,6 persen, yang mana hal tersebut mengindikasikan masih adanya rumah yang belum layak huni. Berdasarkan RPJMN 2020-2024 terkait implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia, target rumah layak huni yaitu sebesar 70 persen. Hal tersebut juga menunjukan bahwa kondisi rumah layak huni masih belum mencapai target nasional untuk tahun 2024.

2. Meningkatnya Permukiman Kumuh Terutama pada Kawasan Perkotaan

Kondisi permukiman kumuh pada kawasan perkotaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal tersebut ditunjukan oleh nilai persentase lingkungan permukiman kumuh yang semakin meningkat di setiap tahunnya. Pada kawasan perkotaan mengalami kenaikan persentase luasan permukiman kumuh yang mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 4,67 persen. Berdasarkan implementasi pada program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang menjadi program nasional dengan target 0 persen permukiman kumuh, menunjukan bahwa kondisi permukiman kumuh pada Provinsi Kalimantan Utara masih perlu menjadi prioritas penanganan. Hal tersebut penting mengingat kondisi permukiman kumuh akan sangat berdampak terhadap kualitas hidup kehidupan masyarakat didalamnya.

Lokasi permukiman kumuh pada kawasan perkotaan terjadi pada Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan terutama pada permukiman pesisir. Kenaikan tersebut perlu menjadi perhatian karena kondisi perkotaan memiliki keterbatasan lahan terhadap

pertumbuhannya dan dapat menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya, terutama pada aspek kesehatan dan sosial.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia dalam Memberikan Pelayanan K3

Belum optimalnya pelayananan K3 disebabkan karena beberapa hal seperti masih terbatasnya petugas K3 baik dari Linmas maupun dari satgas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Selain itu, permasalahan ini juga disebabkan karena kurangnya kapasitas atau kemampuan sumber daya manusia dalam memberikan layanan K3 serta kurangnya dukungan operasional berupa sarana prasarana dalam melakukan penindakan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat baik dari penindakan yusitisi maupun non-yustisi.

2. Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah

Belum optimalnya penegakan peraturan daerah disebabkan karena belum optimalnya sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Permasalahan ini juga disebabkan adanya ketidaktersedianya pedoman atau acuan berupa SOP penegakan Perda dan Perkada yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 terkait Standar Opersional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja dan kode etik Polisi Pamong Praja serta permasalahan ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antar perangkat daerah.

3. Belum Optimalnya Manajemen Penanggulan Banjir di Area Perbatasan

Permasalahan mengenai belum optimalnya manajemen penanggulangan banjir di area perbatasan dapat disebabkan adanya ketidakmampuan dalam mengatasi serta pengelolaan bencana banjir belum berjalan dengan efektif. Sementara hulu sungai di wilayah perbatasan sudah menjadi area perkebunan sawit. Hal ini mengakibatkan area resapan air semakin berkurang, dan sungai di hulu rata-rata kecil. Hampir semua kecamatan terdampak banjir kiriman dengan durasi cukup lama sekitar 21 hari. Permasalahan tersebut

antara lain disebabkan adanya kurangnya koordinasi antar pemerintah daerah serta kekurangan infrastruktur yang belum memadai.

4. Belum Optimalnya Pengelolaan Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibnas) di Provinsi Kalimantan Utara. Akan tetapi, pengelolaan mitigasi bencana di Provinsi Kalimantan Utara belum optimal dikarenakan perencanaan yang kurang matang, kurangnya sumber daya serta kurangnya infrastruktur yang memadai. Belum optimalnya pengelolaan mitigasi bencana juga dapat disebabkan kurangnya koordinasi antar beberapa lembaga terkait. Kurangnya infrastruktur yang memadai dapat menyebabkan kesulitan dalam melakukan sosialisasi. Akibatnya, masyarakat tetap rentan terhadap ancaman bencana. Selain itu, permasalahan ini juga mempengaruhi perempuan dan penyandang disabilitas, hal disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidaksetaraan gender dalam penanganan bencana, yang mana hal ini menjadi salah satu penyebab utama permasalahan kamtibnas terkait mitigasi bencana bagi perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan sering tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait mitigasi bencana. Sehingga hal ini menyebabkan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan spesifik perempuan selama dan setelah bencana terjadi.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi permasalahan ini terhadap perempuan dan penyandang disabilitas yaitu kurangnya infrastruktur yang ramah disabilitas, masih banyak tempat evakuasi yang tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan fisik penyandang disabilitas, seperti aksesibilitas bangunan serta transportasi yang memadai. Hal ini dapat mengakibatkan penyandang disabilitas kesulitas untuk mencapatkan bantuan saat terjadi bencan. Selanjutnya, kurangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai mitigasi bencana. Banyak masyarakat, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan yang cukup tentang langkah-langkah mitigasi yang harus diambil sebelum, selama, dan setelah bencana terjadi. Selain itu, faktor yang mempengaruhi permasalahan ini yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk program mitigasi bencana, apabila sumber daya terbatas, maka sulit untuk melaksanakan

program pelatihan atau infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana.

5. Masih Rendahnya Capaian Indeks Ketahanan Nasional

Masih rendahnya capaian indeks ketahanan nasional menunjukkan bahwa ada banyak aspek yang perlu untuk ditingkatkan dalam mencapai ketahanan yang lebih baik di berbagai sektor. Dalam hal ini, menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam, menjaga wilayah perbatasan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya capaian indeks ketahanan nasional dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya infrastruktur yang memadai, akses yang terbatas, dan kurangnya koordinasi antar lembaga.

6. Belum Optimalnya Rasa Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan

Belum optimalnya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan di Kalimantan Urara merupakan permasalahan yang cukup serius dikarenakan provinsi ini berbatasan langsung dengan negara lain. Belum optimalnya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan dapat disebabkan beberapa faktor seperti minimnya akses pendidikan yang berkualitas, kurangnya program penguatan identias nasional, serta pengaruh budaya asing yang masih kuat. Selain itu, pemicu permasalahan ini juga disebabkan adanya konflik sosial yang disebabkan karena isu SARA, yang mana Kalimantan Utara terdiri dari banyak suku.

7. Human Trafficking

Kasus human trafficking di Provinsi Kalimantan Utara menjadi permasalahan yang serius dalam beberapa tahun terakhir. Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, sehingga dengan adanya letaknya yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadi titik rawan adanya perdagangan manusia. Perdagangan manusia ini dilakukan dengan tujuan untuk ekploitasi manusia dan kerja paksa. Permasalahan ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengawasan di daerah perbatasan dan keterbatasan sumber daya dalam menangani kasus serta perlindungan terhadap korban perdagangan manusia.

F. Sosial

1. Belum Optimalnya Penanganan dan Pelayanan Sosial

Jumlah sarana pelayanan sosial saat ini masih terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya. Belum adanya panti sosial untuk jenis golongan tertentu menjadikan pelayanan sosial terhadap golongan tersebut belum optimal. WKSBM juga masih sangat sedikit dan hanya terdapat di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan. Idealnya WKSBM ada satu di tiap desa/kelurahan tetapi saat ini hanya ada 16 WKSBM di seluruh Provinsi Kalimantan Utara. WKSBM yang mencukupi akan membantu dalam penanganan permasalahan sosial di masyarakat. Jenis pelayanan dasar SPM bidang sosial yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan provinsi meliputi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti sosial, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti sosial, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti sosial, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

Selain itu, kerja sama antara dinas-dinas terkait dalam penanganan sosial perlu diperhatikan sehingga penanganan sosial dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran. Instansi pemerintah seperti Dinas Sosial, Dinas PPPA, dan Dinas Tenaga Kerja perlu bekerja sama untuk mewujudkan terbentuknya penanganan sosial yang komprehensif.

2.3.4.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

A. Tenaga Kerja

1. Belum Optimalnya Penyerapan Tenaga Kerja

Kapasitas dan keterampilan tenaga kerja masih perlu ditingkatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan dan persyaratan pasar tenaga kerja di sektor formal, khususnya di sektor industri pengolahan. Peningkatan kapasitas ini sangat penting mengingat persaingan yang semakin ketat dan tuntutan kualitas kerja yang semakin tinggi. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah banyaknya miss and match yang terjadi di pasar tenaga kerja. Hal tersebut ditandai oleh fakta pendidikan formal yang belum memenuhi standar persyaratan kerja. Sebagian besar tenaga kerja masih sebatas lulusan pendidikan dasar. Pendidikan vokasi yang telah dilaksanakan juga tidak sesuai dengan permintaan dari

perusahaan ditambah terbatasnya Balai Latihan Kerja (BLK). Ketidakcukupan pendidikan dan pelatihan ini membuat tenaga kerja kurang memiliki keterampilan teknis dan keahlian yang dibutuhkan oleh industri pengolahan yang semakin berkembang.

Di sisi perusahaan, masih banyak ditemukan perusahaan yang mengabaikan standar K3, berakibat pada potensi tingginya angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Standar pengupahan pekerja juga sering tidak dipatuhi yang berpotensi menyebabkan ketidakpuasan dan rendahnya motivasi di kalangan pekerja. Selain itu, masih banyak perusahaan yang belum memberikan kesempatan yang sama kepada tenaga kerja difabel, baik karena kurangnya kesadaran akan pentingnya inklusivitas maupun karena kurangnya fasilitas yang mendukung. Permasalahan dari kedua sisi tersebut menimbulkan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Utara.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum Optimalnya Perwujudan Kesetaraan Gender

Belum optimalnya perwujudan kesetaraan gender di Provinsi Kalimantan Utara dibuktikan dengan indikator indeks pemberdayaan gender yang masih berada dibawah capaian nasional dalam 5 tahun terakhir. Selain itu, belum optimalnya perwujudan kesetaraan gender disebabkan adanya belum optimalnya kebijakan pengarustamaan gender serta partisipasi perempuan di sektor politik maupun swasta masih rendah. Selain itu, belum optimalnya perwujudan kesetaraan gender juga disebabkan beberapa faktor diantaranya yaitu infrastruktur yang kurang terbatas, yang mana masih banyak daerah di Kalimantan Utara memiliki infrastruktur yang kurang memadai, sehingga dapat menghambat akses perempuan ke layanan dasar. Faktor selanjutnya yaitu keterbatasan sumber daya manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPA) dalam menjangkau seluruh populasi perempuan, terutaman di daerah terpencil.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi ketidaksetaraan gender di provinsi Kalimantan Utara yaitu kurangnya representasi perempuan dalam struktur pemerintahan lokal maupun desa serta jumlah perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan masih sangat sedikit. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi belum optimalnya

kesetaraan gender yaitu keterbatasan pelatihan dan pendidikan karena masih banyak perempuan yang tidak mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik maupun sosial serta kurangnya koordinasi antara Dinas PPA dengan pemerintah desa serta PKK, hal ini dapat menyebabkan program pemberdayaan perempuan masih mengalami kendala untuk mencapai kelompok sasaran khususnya di daerah perbatasan.

2. Belum Optimalnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Belum optimalnya partisipasi perempuan di politik disebabkan karena kurangnya pembinaan partai pilitik ke masyarakat dalam melakukan perekrutan perempuan di politik serta belum optimalnya kaderisasi partai politik bagi perempuan. Selain itu, belum optimalnya partisipasi perempuan di lembaga swasta dibuktikan dengan adanya partisipasi perempuan di lembaga swasta mengalami penurunan dari 8,07 persen di tahun 2021 menjadi 4,86 persen di tahun 2023.

3. Belum Adanya Fasilitas Layanan Rehabilitasi Sosial dan Tempat Rehabilitasi yang Representatif

Belum adanya fasilitas layanan rehabilitasi sosial dan tempat rehabilitasi yang representatif, permasalahan ini dapat menyebabkan ketidakterjangkauan masyarakat dalam menerima dukungan untuk pemulihan dan reintegrasi dari permasalahan kekerasan maupun kesehatan. Fasilitas layanan rehabilitasi dan tempat rehabilitasi yang representatif sangat penting untuk mendukung pemulihan dan reintergrasi korban kekerasan maupun kesehatan.

C. Pangan

1. Kurangnya Diversifikasi Pangan untuk Ketahanan Pangan Masyarakat

Permasalahan diversifikasi pangan sangat penting bagi ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki kondisi geografis dan topografi tanah yang beragam sehingga memiliki tantangan besar dalam mencapai ketersediaan pangan utama melalui produksi pangan domestik. Provinsi Kalimantan Utara memiliki angka ketersediaan pangan utama yang masih dibawah dengan capaian rata-

rata nasional dan sebagian besar pemenuhan kebutuhan pangan utama masih bergantung pada wilayah lain, yaitu Sulawesi dan Jawa Timur. Rendahnya ketersediaan pangan utama di Provinsi Kalimantan Utara disebabkan oleh penurunan luas areal tanam, sarana dan prasarana pertanian yang belum optimal, penerapan inovasi dan teknologi yang belum optimal, kapasitas dan kualitas SDM pertanian yang belum memadai. Trend penurunan ketersediaan pangan utama selama 5 tahun terakhir di provinsi Kalimantan Utara perlu menjadi perhatian khusus karena dapat berimplikasi terhadap adanya potensi meningkatnya kerawanan pangan. Produksi pangan domestik yang rendah perlu diimbangi dengan penyediaan stok cadangan pangan yang tinggi guna meningkatkan pilar ketersediaan pangan dan menekan angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment). Salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Tana Tidung selama 3 tahun terakhir menunjukkan trend penurunan pilar ketersediaan. Hal ini didukung dengan tingginya angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten tersebut yang diatas rata-rata nasional. Hal ini menandakan bahwa adanya potensi daerah rawan pangan di Provinsi Kalimantan Utara sehingga penduduk yang mengkonsumsi jumlah makanan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energi untuk hidup normal, aktif dan sehat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya optimalisasi lahan dan teknologi tepat guna yang sesuai dengan karakteristik wilayah di Kalimantan Utara yang tidak hanya digunakan untuk memenuhi ketersediaan pangan utama melalui peningkatan produksi pangan domestik tetapi juga untuk meningkatkan diversifikasi pangan. Peningkatan keragaman/diversifikasi pangan sangat penting dalam mencapai ketahanan pangan untuk menjamin agar setiap individu di Provinsi Kalimantan Utara memperoleh pangan yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman sehingga dapat hidup sehat, aktif dan produktif.

D. Lingkungan Hidup

1. Pencemaran Sampah Plastik di Laut Akibat Budidaya Pertanian Rumput Laut

Penggunaan botol plastik pada budidaya rumput laut sebagai pelampung rumput laut menyebabkan banyaknya sampah plastik yang

ada di perairan laut. Hal ini terjadi karena banyaknya botol plastik yang seringkali terlepas dari jaring-jaring dan hanyut. Kurangnya kesadaran pelaku budidaya rumput laut terhadap dampak lingkungan dalam penggunaan botol plastik. Limbah plastik yang hanyut tersebut dapat menyebabkan pencemaran pada laut Provinsi Kalimantan Utara. Pembudidayaan pertanian rumput laut yang kurang memperhatikan lingkungan akan berdampak pada kondisi iklim investasi rumput laut terutama bagi investor yang akan datang karena hal tersebut akan menimbulkan permasalahan lingkungan dan menurunnya kualitas lingkungan pada area disekitar wilayah tersebut.

2. Kerusakan Kawasan Mangrove

Berdasarkan paparan overview percepatan rehabilitasi mangrove Wilayah Kalimantan Papua, perubahan fungsi lahan pada kawasan mangrove disebabkan oleh adanya motivasi ekonomi seperti konversi mangrove menjadi kawasan permukiman, area tambak, kebun sawit, serta adanya eksploitasi berlebihan terhadap hasil hutan mangrove. Hal tersebut akan menyebabkan terganggunya fungsi ekosistem mangrove yang sangat penting dalam pelindung erosi dan abrasi serta sebagai penyerap dan penyimpan karbon.

Berdasarkan FGD oleh Dinas Kehutanan, kawasan mangrove di Provinsi Kalimantan Utara terancam dengan adanya pembukaan tambak baru. Produktivitas tambak yang rendah juga berpotensi untuk menambah luas deforestasi mangrove. Adanya tambak serta pembukaan area tambak baru yang berpengaruh pada menurunnya kualitas ekosistem mangrove. Selain itu, terjadinya eksploitasi terhadap hasil hutan mangrove berlebihan untuk kebutuhan kayu pancang. Kayu tersebut digunakan masyarakat sekitar sebagai bahan bangunan.

3. Pemanfaatan Lahan Gambut yang Tidak Sesuai dengan Tata Kelola

Pemanfaatan gambut yang tidak sesuai dengan tata kelola akan merusak fungsi lahan gambut dan berpengaruh pada kondisi kualitas dan kuantitas air. Hal ini disebabkan oleh adanya kawasan konsesi dalam fungsi ekosistem gambut dan adanya pembangunan kanal yang tidak sesuai aturan yang berlaku sehingga menimbulkan kekeringan gambut dan meningkatkan risiko kebakaran lahan gambut. Pengawasan terhadap pelaku usaha yang belum kuat terkait penaatan aturan dan

kewajiban pelaku usaha di ekosistem gambut juga disebabkan oleh kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut belum menjadi konsern dari OPD terkait.

4. Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah

Berdasarkan FGD dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, pengelolaan sampah belum dilakukan secara optimal karena belum adanya pengelolaan sampah secara terpadu atau sampah yang diangkut langsung dibuang ke TPA tanpa adanya kegiatan pengolahan. Idealnya, pada setiap kabupaten memiliki pengelolaan terpadu tetapi secara volume sampah yang dihasilkan belum memenuhi kapasitas yang diperlukan. Pengelolaan sampah regional belum dapat terlaksana karena adanya faktor jarak yang menyebabkan mahalnya ongkos angkut. Sehingga pengelolaan sampah belum dapat dilakukan baik pada kawasan perkotaan maupun perdesaan. Pengelolaan sampah di kawasan perkotaan dilakukan dengan adanya bank sampah. Namun, adanya hambatan dalam pengelolaannya akibat mahalnya ongkos jual sampah serta biaya operasional yang kurang menjadikan bank sampah tersebut belum dapat dikelola secara optimal. Kemudian terkait sampah laut akibat kegiatan pertanian budidaya rumput laut belum dapat diketahui datanya. Minimnya perhatian dan informasi terkait sampah plastik dari budidaya rumput laut menjadikan kurang optimalnya upaya pengentasan permasalahan tersebut Keberadaan sampah plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan yang tercemar dan menurunkan kualitas lingkungan.

E. Pertanahan

1. Adanya Sengketa Kepemilikan Tanah

Sengketa kepemilikan tanah di Provinsi Kalimantan Utara mayoritas terjadi pada kawasan perhutanan terutama untuk Hutan Adat. Pemanfaatan Hutan Adat oleh Masyarakat Hutan Adat (MHA) yaitu digunakan sebagai area produktif seperti lahan pertanian. Sengketa kepemilikan tanah terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan kepemilikan lahan pertanian di kawasan hutan sehingga menyebabkan status kawasan hutan pada RTRW tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya

sosialisasi dan penyebarluasan terkait batas kawasan hutan serta kurangnya penegakan hukum yang juga turut memicu adanya konflik lahan. Perlunya sosialisasi dalam penyebarluasan informasi dan pelatihan terhadap penggunaan layanan interaktif yang disediakan oleh pemerintah.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Belum Optimalnya Akses Jaringan di Daerah Perbatasan dan Terpencil

Adanya blank spot di beberapa wilayah dapat menghambat proses administrasi dan pelayanan publik karena blank spot mengacu pada jaringan, telekomunikasi, dan internet. Selain itu, daerah terpencil maupun terbatas juga untuk sulit dijangkau dikarenakan beberapa hal seperti konidisi geografis, yang mana kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara berpulau-pulau, sehingga daerah tersebut susah untuk dijangkau melalui transportasi darat maupun sungai. Permasalahan ini menyebabkan terjadinya tidak terwujudnya good governance, yang mana good governance merupakan capaian tingkat integritas dan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Adanya blank spot, dapat mempengaruhi reformasi birokrasi dalam mewujudukan good governance.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Menguasai IT dan Jaringan

Belum optimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai IT dan jaringan mengacu pada keterbatasan jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan maupun keterampilan di bidang teknologi informasi dan jaringan. Adanya hal tersebut dapat mempengaruhi permasalahan seperti, belum optimalnya sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, berdasarkan hal tersebut data mengenai rasio perekaman KTP elektronik, kartu keluarga, dan penerbitan KIA mengalami penurunan. Selain itu, permasalahan ini juga dapat mempengaruhi proses digitalisasi dan layanan umum. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh ketersediaan sarana prasarana yang belum memadai.

Permasalahan mengenai keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai IT dan jaringan didukung adanya data mengenai jumlah penduduk yang tidak bekerja lulusan SMK teknik dan informasi cukup besar yaitu sebesar 19,31 persen dari penduduk yang tidak bekerja. Hal ini berarti bahwa perlu peningkatan penyerapan penduduk yang bekerja dari lulusan IT. Peningkatan ini dapat dilakukan dari sisi kompetensi dengan mengadakan program magang serta keterbukaan informasi pekerja di bidang IT.

3. Masih Banyak Masyarakat yang Belum Memiliki KTP dan Akta Kelahiran

Masih banyak masyarakat yang belum memiliki KTP dan akta kelahiran di Provinsi Kalimantan Utara dibuktikan adanya cakupan penerbitan KTP dan akta kelahiran masih belum mencapai target nasional, yang mana target nasional sebesar 100%, sedangkan cakupan akta kelahiran baru mencapai di angka 65,93 persen pada tahun 2023 serta capaian cakupan KTP Provinsi Kalimantan Utara sebesar 99,87 persen di tahun 2024. Hal ini juga dapat disebabkan adanya pemahaman masyarakat yang masih minim terkait pembuatan dokumen.

4. Belum Optimalnya Pelayanan Jemput Bola

Pelayanan jemput bola yang belum optimal dikarenakan keterbatasan sarana prasarana, khususnya kendaraan yang digunakan untuk pelayanan jemput bola hanya tersedia satu dan jumlah printer yang terbatas. Selain itu, belum optimalnya pelayanan jemput bola juga disebabkan adanya kondisi geografis Provinsi Kalimantan serta dalam melakukan pelayanan jemput bola di daerah perbatasan membutuhkan anggaran yang besar, sedangkan dalam hal ini juga disebabkan karena keterbatasan anggaran.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat di Berbagai Aspek Pembangunan Khususnya dalam Menunjang Pendapatan Keluarga

Permasalahan mengenai belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek pembangunan khususnya menunjung

pendapatan keluarga menjadi isu yang sangat penting dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Permasalahan ini terjadi karena masih banyak implementasi program yang belum optimal, hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi dari masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya infrastruktur yang memadai.

2. Belum Optimalnya Pemberdayaan LPM

Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018 mengenai pembentukan lembaga dan lembaga tersebut harus diberdayakan. Pada kenyataannya, lembaga tersebut hanya dibentuk, tetapi tidak diberdayakan. Sementara itu, dalam implementasinya, tidak semua desa mengimplementasikan peraturan tersebut dan hanya beberapa desa memanfaatkan lembaga yang sudah dibentuk (LPM) yaitu sekitar 10 persen. Selain itu, faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemberdayaan LPM yaitu masih terkendalanya anggaran karena masing-masing kabupaten memiliki prioritas tersendiri.

3. Belum Optimalnya Partisipasi, Keswadayaan dan Kegotongroyongan Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan

Permasalahan mengenai belum optimalnya partisipasi, keswadyaan, dan kegotongroyongan masyarakat dalam membangun desa atau kelurahan menjadi sebuah kendala atau tantangan dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena masih kurangnya partisipasi masyarakat, belum optimalnya kualitas sumber daya manusia, dan keterbatasan akses informasi.

4. Belum Optimalnya Fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam Manajemen Pemerintahan Desa

Belum optimalnya fasilitasi kepada pemerintah desa dalam hal manajemen pemerintahan desa dapat menghambat efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, kantor desa dengan kondisi baik di Provinsi Kalimantan utara sebanyak 317 desa dari 447 desa, hal ini berarti bahwa belum optimalnya pemerataan pembangunan kantor desa dan infrastruktur di semua desa.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Belum Optimalnya Pelayanan KB

Pelayanan KB yang baik akan berdampak pada peningkatan jumlah pengguna KB. Pelayanan KB salah satunya dinilai dari unmet need yang masih cukup tinggi dengan nilai 14,60% pada tahun 2024. Belum optimalnya pelayanan KB pada akhirnya secara langsung maupun tidak akan mempengaruhi terlaksananya program-program pengendalian penduduk dan kesuksesan program KB yang direncanakan.

2. Relatif Tingginya Pernikahan Dini Khususnya di Wilayah Perbatasan

Angka pernikahan dini didekati dengan data ASFR remaja usia 15-19 tahun. Pada tahun 2024, nilai ASFR tersebut sebesar 26,10. Tingginya angka pernikahan dini tersebut antara lain disebabkan oleh budaya masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman, di mana pendidikan belum menjadi prioritas, anak setelah remaja diharapkan orang tua untuk bekerja membantu orang tua meringankan beban ekonomi keluarga. Remaja perempuan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi cenderung akan menikah secara dini. Relatif masih tingginya kejadian pernikahan dini tersebut tentu akan mempengaruhi berbagai hal seperti kesehatan ibu dan anak baik yang terukur dari AKI, AKB, serta prevalensi stunting. Secara psikologis remaja usia 15-19 tahun belum memiliki kesiapan untuk menjadi orang tua. Ketidaksiapan tersebut akan mempengaruhi pola pengasuhan kepada anak dan pembentukan lingkungan untuk anak.

3. Belum Adanya Grand Design Kependudukan

Kependudukan memiliki peran penting dalam kehidupan. Penduduk menjadi subjek dan objek dalam berbagai kegiatan dan program. Peran penting penduduk tersebut menjadikan grand design kependudukan sebagai salah satu komponen penting dalam berbagai perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar pembangunan. Pembangunan akan berhasil jika kualitas dan kuantitas penduduknya baik dan berkualitas, tidak hanya dari jumlah, struktur akan tetapi juga sebaran. Data kependudukan yang tidak memadai dan

kurang valid akan mengakibatkan perencanaan pembangunan menjadi tidak tepat sasaran. Dokumen grand design kependudukan berisi rencana kependudukan selama 25 tahun dan dijabarkan dalam periode lima tahunan. Belum adanya grand design kependudukan di Provinsi Kalimantan Utara disebabkan data kependudukan yang masih belum tertata dengan baik, kemampuan daerah dalam membuat dokumen tersebut juga masih terbatas.

I. Perhubungan

1. Belum Optimalnya Penyediaan dan Pelayanan Angkutan Darat dalam Perkotaan

Layanan angkutan darat yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Utara yaitu AKDP (Angkutan Dalam Kota dalam Provinsi) atau angkutan umum perkotaan. Kondisi penyediaan dan pelayanan angkutan perkotaan masih kurang optimal karena terbatasnya penyediaan trayek angkutan umum massal perkotaan. Selain itu, hal tersebut juga berdampak perubahan orientasi pengguna transportasi dari angkutan umum menjadi kendaraan pribadi sehingga menyebabkan permintaan penumpang angkutan yang menurun.

Kondisi penyediaan trayek angkutan umum perkotaan yang terbatas disebabkan tidak adanya Surat Keputusan terkait trayek yang beroperasi untuk angkutan umum di perkotaan. Hal tersebut menyebabkan mobilitas angkutan umum terutama di Kota Tarakan tidak sesuai dengan trayek yang berpengaruh pada minimnya kesadaran dalam pengurusan izin trayek bagi supir angkutan. Kurangnya informasi dan kesadaran supir angkutan terhadap pengurusan izin trayek disebabkan tidak adanya informasi terkait SK trayek.

2. Belum Optimalnya Penyediaan Sarana Transportasi Penumpang dan Barang Antar Wilayah

Berdasarkah hasil FGD dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, belum tersedianya terminal penumpang angkutan jalan atau terminal tipe-B dan terminal barang yang terbatas menyebabkan kurang optimalnya mobilitas darat dan barang antar daerah melalui darat. Belum tersedianya terminal tipe-B akan menyebabkan mobilitas antar wilayah yang belum optimal. Dalam

distribusi barang melalui darat, belum adanya terminal barang, pergudangan, dan jembatan timbang menyebabkan aktivitas logistik sulit diawasi dan dilakukan secara terpusat.

3. Belum Optimalnya Penyediaan Sarana Prasarana dan Kualitas Pelayanan Transportasi Laut

Kondisi transportasi air terutama sungai dan laut merupakan salah satu transportasi utama di Provinsi Kalimantan Utara. Akan tetapi, penyediaan sarana prasarana dan pelayanan untuk transportasi air belum optimal sehingga menyebabkan terhambatnya distribusi barang maupun mobilitas masyarakat. Berdasarkan FGD dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara dan UPTD Pelabuhan Tengkayu 1 sebagai salah satu pelabuhan utama di Kota Tarakan, adanya permasalahan terkait kondisi infrastruktur transportasi air yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah penumpang dan beban pelabuhan. Selain itu, kondisi pelabuhan yang belum terpisah antara angkutan penumpang dan barang sehingga bongkat muat barang terjadi bersamaan dengan pengangkutan penumpang. Hal ini menyebabkan pelayanan pelabuhan yang tidak sesuai standar keamanan dan kurang nyaman bagi penumpang. Kemudian dari segi biaya, untuk bongkar muat barang terkena biaya transportasi yang cukup tinggi yang mana hal ini akan mempengaruhi kecenderungan distribusi barang serta stabilitas harga barang yang terganggu.

Selain itu, dari segi kemanan pelayanan transportasi air, masih belum optimalnya pengendalian dan pengawasan keselamatan angkutan serta pelaksanaan regulasi dan bidang pelayaran menyebabkan tingginya angka kecelakaan dan fatalitas permasalahan transportasi. Kondisi transportasi air sebagai salah satu transportasi utama perlu menjadi perhatian khusus karena memiliki peran penting bagi pergerakan konektivitas antar wilayah dan aktivitas masyarakat yang berdampak langsung pada kondisi dan kegiatan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara.

J. Komunikasi dan Informatika

1. Kondisi Ketersediaan dan Kualitas Layanan Jaringan Telekomunikasi yang Belum Memadai

Kondisi ketersediaan prasarana jaringan telekomunikasi yang belum merata di seluruh Provinsi Kalimantan Utara, salah satunya yaitu menara pemancar atau menara BTS, menyebabkan belum optimalnya kondisi kualitas jaringan layanan telekomunikasi. Terdapat 186 desa yang belum memiliki menara BTS yang menyebabkan kondisi kualitas sinyal telepon dan akses internet yang belum memadai. Terdapat 109 desa dengan warga desa yang belum terakses oleh layanan internet. Selain itu, radius menara pemancar terhadap masyarakat serta adanya halangan terhadap kondisi geografis seperti kondisi berbukit maupun pegunungan juga sangat berpengaruh pada kualitas layanan sinyal yang didapatkan. Pada Provinsi Kalimantan Utara masih terdapat 187 desa dengan kualitas sinyal telepon seluler yang lemah dan 26 desa yang tidak terdapat sinyal telepon seluler. Keterjangkauan layanan jaringan telekomunikasi baik telepon seluler dan internet menjadi hal yang vital pada saat ini terutama untuk kemudahan akses informasi di era digital. Terlebih, setelah adanya Covid-19, banyak aktivitas pekerjaan yang mengalami perubahan orientasi menjadi pekerjaan remote. Hal ini sangat penting kedepannya dalam terutama dalam pemanfaatan perkembangan teknologi untuk produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlunya penguatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur jaringan telekomunikasi dalam mengikuti tren perkembangan teknologi dunia.

K. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Belum Optimalnya Inovasi dan Transformasi Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah)

Salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi daerah adalah inovasi dan transformasi koperasi. Namun, saat ini permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Utara adalah terbatasnya ruang tumbuh koperasi. Hal tersebut ditandai oleh masih kurangnya koperasi yang melayani skala provinsi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (SP). Saat ini, koperasi Simpan Pinjam hanya tersedia 2 (dua) pada Provinsi Kalimantan Utara. Keterbatasan ruang tumbuh koperasi juga

disebabkan oleh banyaknya koperasi yang masih menerapkan manajemen konvensional, tanpa penerapan teknologi dan inovasi terbaru yang bisa meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka. Hal tersebut didukung oleh kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya pelatihan/sertifikasi kemampuan manajerial dalam tingkat koperasi. Keterbatasan ini menghambat kemampuan koperasi untuk beradaptasi dengan dinamika pasar yang semakin kompleks dan cepat berubah. Lain halnya dengan usaha kecil dan menengah, Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh perkembangan usaha UMKM yang berbasis usaha makanan dan minuman.

Permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah terbatasnya pelayanan penunjang dan bisnis UMKM. Keterbatasan ini mencakup mesin produksi yang modern dan efisien, kemasan (packaging) yang menarik dan sesuai standar, desain produk yang inovatif, jaringan pemasaran yang luas dan efektif, serta program pengembangan kewirausahaan yang komprehensif. Selain itu, jaringan pemasaran yang belum luas membatasi jangkauan produk UMKM, sehingga banyak produk berkualitas yang hanya terjual dalam skala lokal dan tidak mampu menembus pasar yang lebih luas. Permasalahan lainnya adalah masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk mengelola bisnis mereka secara efektif. Program pelatihan dan pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan teknis para pelaku UMKM.

L. Kepemudaan dan Olahraga

1. Belum Adanya Desain Pengembangan Olah Raga Daerah

Olahraga dapat menjadi suatu prestige bagi daerah apalagi dengan diselenggarakannya berbagai event olahraga di tingkat nasional dan internasional. Desain pengembangan olahraga daerah cukup penting sebagai patokan untuk mengetahui potensi olahraga yang dapat mendulang prestasi bagi daerah. Termasuk ke dalam pengembangan olahraga daerah adalah jumlah atlet yang akan dibina beserta cabang olahraganya, jumlah pelatih yang bersertifikasi, tenaga kepelatihan yang sesuai standar, serta infrastruktu keolahragaan yang sesuai standar nasional maupun internasional. Selain itu, desain olahraga daerah juga

menjadi pendukung dalam mewujudkan desain pengembangan olahraga nasional.

2. Belum Optimalnya Kewirausahaan di Kalangan Pemuda

Belum optimalnya kewirausahaan diukur dengan angka Rasio Kewirausahaan yang mengalami fluktuasi dan cenderung menurun sejak tahun 2020 sampai 2024. Selain itu, di kalangan pemuda terlihat dari nilai rasio wirausaha muda yang hanya sebesar 1,1% dari semua pemuda di provinsi ini pada tahun 2023. Kewirausahaan di kalangan pemuda dipengaruhi oleh minat pemuda dalam berwirausaha. Untuk membangun minat berwirausaha maka ekosistem berwirausaha perlu dibangun. Bukan hanya dengan bantuan finansial dan pelatihan tetapi dengan pembinaan dan pendanaan serta penyiapan pasar. Saat ini pelatihan dan pembinaan kewirausahaan masih belum optimal. Pembentukan dasar-dasar kewirausahaan yang tepat akan mampu menciptakan SDM berkualitas dalam bidang tersebut. Selain pelatihan dan pembinaan, diperlukan juga pendanaan yang mencukupi bagi para wirausaha muda. Namun, untuk mendapatkan pendanaan yang memadai diperlukan ide-ide yang inovatif dan solutif serta bernilai jual. Ide tersebut tidak hanya bermodal ide tetapi memiliki roadmap pengembangan yang jelas sehingga investor dapat tertarik dan yakin untuk mendanai. Oleh karena itu, pengetahuan dasar tentang problem solving penting dimiliki.

3. Masih Terbatasnya Keaktifan Pemuda dalam Berorganisasi

Organisasi merupakan wadah untuk para pemuda mengembangkan skillnya terutama softskill seperti problem solving, kerjasama, dan kepemimpinan. Aktifnya pemuda dalam berorganisasi menunjukkan kesadaran para pemuda dalam mengembangkan softskillnya dan memperluas jaringannya. Permasalahan di Provinsi Kalimantan Utara saat ini adalah organisasi pemuda yang aktif masih sedikit dengan nilai 15,52% pada tahun 2023. Hal ini ditambah dengan pemuda yang aktif dalam berorganisasi hanya sebesar 3,28% pada tahun 2022. Penyebab masih rendahnya keaktifan pemuda dalam berorganisasi ini mungkin berkaitan dengan kondisi pendidikan yang masih terbatas sehingga organisasi yang juga bertindak sebagai ruang-

ruang diskusi tidak berjalan optimal. Selain itu dimungkinkan pula karena berorganisasi belum menjadi kebutuhan ataupun aktivitas yang menarik yang dapat memberikan keuntungan bagi para pemuda.

M. Statistik

1. Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Permasalahan belum optimalnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dapat disebabkan beberapa hal seperti belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dalam bidang statistik, belum optimalnya infrastruktur dan teknologi, serta belum optimalnya penerapan proses bisnis statistika. Selain itu, faktor yang mempengaruhi permasalahan ini adalah belum optimalnya penerapan perencanaan data yang meliputi proses desain statistik dan proses penyiapan instrumen, belum optimalnya verifikasi data yang meliputi proses pengolahan data dan proses analisa data, dan belum optimalnya pengumpulan data oleh setiap produsen data.

N. Persandian

1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Permasalahan mengenai belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi ini dapat disebabkan karena belum optimalnya keamanan siber (cyber security). Selain itu, permasalahan ini juga dapat disebabkan adanya penerapan tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah provinsi masih belum berjalan dengan optimal serta terbatasnya sumber daya manusia serta kapasitas pengelolaa keamanan informasi. Kemudian, penyebab permasalahan ini juga disebabkan oleh belum termitigasinya pengelolaan risiko, keterbatasan sarana dan prasarana teknologi keamanan infromasi, belum optimalnya tugas dan fungsi tim CSIRT pemerintah daerah provinsi, dan belum optimalnya penerapan alat kontra penginderaan.

O. Kebudayaan

1. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dan Karya Budaya

Cagar budaya merupakan tempat yang diakui sebagai salah satu warisan kebudayaan yang memiliki nilai dan harus dilestarikan. Sebagai salah satu warisan kebudayaan, cagar budaya memiliki berbagai potensi pengembangan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pelestarian cagar budaya akan memberikan kontribusi positif bagi suatu wilayah. Di Provinsi Kalimantan Utara, pengelolaan dan pelestarian cagar budaya dan karya budaya masih belum optimal. Pengelolaan yang belum optimal tersebut terlihat dari masih kecilnya persentase cagar budaya yang lolos setelah pendaftaran cagar budaya, hanya sebesar 0,57% pada tahun 2022. Penyebab masih belum optimalnya pengelolaan cagar budaya salah satunya karena tenaga ahli untuk cagar budaya untuk kabupaten/kota masih belum ada. Sedangkan, tenaga pengelola saat ini yang ada masih belum memiliki pengetahuan serta pengalaman yang mumpuni. Pengelolaan yang belum optimal juga disebabkan karena secara kelembagaan Provinsi Kalimantan Utara masih tergabung dalam balai pelestarian kebudayaan Provinsi Kalimantan timur.

P. Perpustakaan

1. Minimnya Sarana dan Prasarana Penunjang Literasi

Minimnya sarana dan prasarana penunjang literasi ini disebabkan oleh kondisi gedung perpustakaan yang belum respresentatif dan kurang strategis. Kondisi ini dapat menghambat upaya untuk meningkatkan minat baca dan kualitas literasi masyarakat karena bangunan dan fasilitas yang kurang memadai, kondisi tersebut juga mengakibatkan lingkungan belajar yang kurang kondusif.

2. Belum Optimalnya Pelatihan Bagi Pustakawan

Permasalahan belum optimalnya pelatihan bagi pustakawan disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya program pelatihan yang bersifat berkelanjutan, minimnya akses terhadap informasi yang dapat menghambat pengembangan potensi pustakawan. Akibat dari belum optimalnya pelatihan bagi pustakawan menyebabkan kemampuan atau potensi pustakawan dalam memberikan layanan kurang optimal.

Q. Kearsipan

1. Belum Optimalnya Pengelolaan Dokumen Negara dan Penyimpanan Kearsipan

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan dokumen negara dan penyimpanan kearsiapan yaitu masih minimnya sarana dan prasarana pengelolaan dokumen negara, yang mana di Provinsi Kalimantan Utara belum terdapat depo arsip yang digunakan untuk penyimpanan dokumen negara. Selain itu, faktor yang menyebabkan permasalahan ini yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) arsiparis, yang mana jumlah SDM arsiparis hanya berjumlah dua orang. Sumber daya arsiparis sangat penting dan dibutuhkan karena untuk menjembatani antara lembaga arsip daerah dengan perangkat daerah.

2. Belum Optimalnya Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti belum optimalnya tupoksi pengelolaan arsip. Sehingga, Sumber Daya Manusia (SDM) belum memahami mengenai jobdesc dan alur yang harus dilakukan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu belum optimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dam kurangnya pelatihan terhadap perangkat daerah dalam mengelola arsip secara baku.

2.3.4.3. Layanan Urusan Pilihan

A. Pariwisata

1. Kurangnya Infrastruktur dan Manajemen yang Mendukung Pariwisata Keberlanjutan

Potensi pariwisata yang dimiliki oleh berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Utara masih belum dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh pengelolaan yang kurang berkelanjutan menjadi kendala utama, termasuk pada infrastruktur maupun pengelolaan manajemen. Permasalahan terkait daya manajemen pariwisata yang masih rendah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola destinasi pariwisata secara berkelanjutan, sehingga potensi jangka panjang dari destinasi tersebut

belum bisa terwujud. Tentunya, pemasaran destinasi pariwisata potensial juga masih sangat terbatas. Ini mencakup penggunaan media digital dan sosial yang masih kurang optimal, serta minimnya partisipasi dalam pameran dan event pariwisata internasional.

Selain itu, terkait akomodasi dan sarana prasarana pendukung kepariwisataan juga masih belum memadai. Banyak destinasi wisata yang masih kekurangan fasilitas dasar seperti jalan yang baik, transportasi umum yang memadai, dan fasilitas penunjang pariwisata lainnya yang bisa diandalkan. Kurangnya akomodasi yang berkualitas juga menjadi penghambat bagi wisatawan yang ingin tinggal lebih lama di daerah tersebut. Permasalahan tersebut juga didukung oleh permasalahan banyaknya pelaku usaha belum memenuhi standar usaha sesuai peraturan yang berlaku. Ini mencakup aspek keamanan, kenyamanan, dan pelayanan yang seharusnya bisa diandalkan oleh wisatawan.

B. Pertanian

1. Masih Rendahnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Kecuali Sawit dan Karet)

Permasalahan yang menyebabkan rendahnya produksi dan produktivitas perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura sebagian besar merupakan permasalahan alih fungsi lahan dan alih fungsi profesi. Sebagian besar alih fungsi lahan terjadi pada tanaman pangan menjadi perkebunan sawit, serta alih profesi dari petani tanaman pangan dan hortikultura menjadi petani rumput laut. Faktor ini berdampak pada menurunnya luas areal tanam dan panen serta sarana dan prasarana pertanian yang belum optimal, penerapan inovasi dan teknologi yang belum optimal, kapasitas dan kualitas SDM pertanian yang belum memadai berdampak besar terhadap rendahnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

2. Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyuluh dan Petani

Terbatasnya sumber daya manusia dalam sebagai pengelola maupun pembinaan menjadi salah satu permasalahan terkait pertanian yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Utara. Hal tersebut didukung

oleh kurangnya infrastruktur yang menyokong pertanian serta rendahnya kemampuan petani dalam mengadopsi teknologi pertanian.

3. Rendahnya Ketersediaan serta Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian

Permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya keefektifan, ketersediaan dan kesesuaian sarana dan prasarana pertanian. Infrastruktur penunjang pertanian sangat penting bagi distribusi sarana produksi dan hasil pertanian, meningkatkan akses petani terhadap pasar dan informasi pertanian, dan berkontribusi terhadap stabilisasi pasokan dan harga komoditas pertanian. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana didukung oleh minimnya cakupan balai penyuluhan pertanian belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, yaitu satu balai satu kecamatan. Hal ini penting untuk meningkatkan kapasitas kualitas petani dan SDM pertanian di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

4. Masih Rendahnya Upaya Hilirisasi Industri dan Diversifikasi Produk Turunan Sektor Perkebunan

Sektor perkebunan merupakan salah satu sumber potensi penyumbang yang kian meningkat setiap tahunnya pada sisi Penerimaan Domestik Regional Bruto (PDRB). Rendahnya upaya peningkatan nilai tambah komoditas pertanian khususnya sektor perkebunan (sawit) melalui hilirisasi industri dan diversifikasi produk turunan menyebabkan kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB menjadi menurun. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya industri hilirisasi pengolahan sektor perkebunan yang sebagian besar masih dalam bentuk raw material dan masih rendahnya diversifikasi produk turunan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dan membangkitkan ekonomi produktif berbasis industri pengolahan guna mengoptimalkan serapan produksi sektor perkebunan yang tinggi di Provinsi Kalimantan Utara.

C. Kehutanan

1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dalam Taman Nasional Kayan Mentarang

Taman Nasional Kayan Mentarang yang merupakan hutan konservasi dengan luas 1.272.000 hektare memiliki beragam potensi di dalamnya khususnya untuk kesejahteraan masyarakat, pariwisata minat khusus, serta pengendalian emisi GRK. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal khususnya melalui skema karbon/NetSink. Skema karbon mengaruskan aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kehutanan melalui aktivitas yang minim pelepasan karbon. Hal ini dilakukan mengingat kemampuan hutan yang tinggi dalam menyerap karbon dari atmosfer yang berkontribusi pada siklus karbon global dan mitigasi perubahan iklim sehingga perlu optimalisasi peran dari Taman Nasional Kayan Mentarang sebagai kawasan konservasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutannya.

2. Permasalahan Tenurial dalam Hutan Produksi dan Lindung

Belum terpenuhinya target resolusi permasalahan tenurial dalam kawasan hutan produksi dan lindung melalui program Perhutanan Sosial (hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan hutan desa). Pada tahun 2023 memiliki target indikatif sebesar 522.418 hektare tetapi hanya terealisasi sebesar 162.185 hektare.

D. Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Belum Optimalnya Ketersediaan dan Kebutuhan Listrik

Berdasarkan FGD dengan Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi Kalimantan Utara, kondisi kelistrikan mengalami keterbatasan baik dari pasokan maupun distribusi. Kurangnya pasokan energi kelistrikan dari kebutuhan terutama pada kawasan perkotaan menyebabkan seringnya terjadi pemadaman. Pemadaman juga terjadi apabila pembangkit listrik mengalami kendala. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat yang juga dapat menghambat produktivitas.

Selain itu, keterbatasan dalam distribusi listrik juga belum dapat optimal karena terbatasnya ketersediaan akses jalan terhadap suatu

kawasan sehingga jaringan listrik dari PLN tidak bisa mencapai kawasan tersebut. Oleh karena itu, keterbatasan tersebut menjadi salah satu penyebab rasio elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Utara masih sebesar 91,19 persen dan belum mencapai target nasional yaitu 100 persen. Hal tersebut terjadi pada kawasan-kawasan perdesaan yang memiliki kondisi geografis yang berupa sungai maupun bukit. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber alam sebagai energi alternatif untuk menghasilkan listrik perlu dioptimalkan. Namun, dalam pelaksanaannya, banyaknya pembangkit listrik dengan tenaga alternatif seperti PLTA dan PLTMh seringkali terkendala dalam perawatan operasional yang disebabkan kurangnya SDM yang ahli dalam perawatan pembangkit tersebut.

2. Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha Pertambangan dalam Mengurus Perizinan

Banyaknya PETI (Pertambangan Tanpa Ijin) banyak terjadi karena minimnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus perizinan. Usaha pertambangan yang tidak berizin tersebut juha disebabkan minimnya pengawasan dari pihak berwenang. Kegiatan penambangan terutama pertambangan liar memiliki dampak buruk terhadap lingkungan dan menyebabkan terjadinya bencana. Kegiatan yang tidak bertanggung jawab tersebut menimbulkan pencemaran lingkungan, banjir, dan bahkan dapat memakan korban jiwa. Selain itu, kegiatan penambangan akan menyebabkan pembukaan lahan, limbah B3, dan masalah kesehatan lainnya.

3. Belum Optimalnya Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT)

Pengembangan potensi EBT yang belum optimal disebabkan oleh dua faktor yaitu regulasi dan sumber daya. Berdasarkan FGD dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara, pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada Provinsi Kalimantan Utara belum dapat dilakukan secara optimal yang disebabkan belum adanya regulasi yang mendukung kegiatan tersebut. Potensi EBT yang besar memerlukan pengelolaan yang terencana sehingga perlunya pengendalian dan dukungan dari sistem regulasi. Terdapat potensi hydropower yang besar juga belum dapat terjadi karena birokrasi perizinan yang panjang serta memakan waktu yang lama.

Dukungan regulasi perlu dilakukan untuk mempermudah pengelolaan dan pengembangan potensi EBT di Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, kondisi pembangkit dari EBT eksisting memiliki kondisi yang tidak optimal karena terjadi kerusakan. Minimnya SDM yang berkualitas dalam sektor EBT juga menjadi hambatan dalam pengembangan EBT.

4. Belum Adanya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah

Berdasarkan FGD dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara, penggunaan air tanah pada Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan pengguna yang tidak berizin. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas air tanah.

E. Perdagangan

1. Ketidakmampuan Infrastruktur dalam Mendukung Perdagangan Daerah

Perdagangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Utara masih terkendala oleh keterbatasan sarana penunjang yang menyebabkan biaya transportasi tinggi. Kurangnya pemenuhan infrastruktur penunjang logistik dalam memenuhi barang kebutuhan pokok memperparah situasi ini. Hal ini tidak hanya menghambat aliran barang dari satu daerah ke daerah lain, tetapi juga meningkatkan biaya operasional bagi para pelaku usaha yang pada akhirnya berdampak pada harga barang di pasar. Hal tersebut berkaitan dengan ketidaktersediaan pusat distribusi dan pergudangan di daerah juga menjadi masalah signifikan yang perlu segera diatasi. Tanpa pusat distribusi yang efisien, barang-barang kebutuhan pokok sulit untuk disimpan dan didistribusikan dengan baik. Pergudangan yang memadai sangat penting untuk menjaga kualitas barang selama proses penyimpanan sebelum didistribusikan ke pasar. Ketidaktersediaan fasilitas ini menyebabkan penumpukan barang di satu tempat dan kekurangan barang di tempat lain, sehingga menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan konsumen dan produsen. Selain itu, masih banyak ditemukan perdagangan illegal pada kawasan perbatasan. Barang-barang ilegal ini sering kali dijual dengan harga yang lebih murah, sehingga menekan harga pasar dan merugikan pelaku usaha yang beroperasi secara legal.

F. Perindustrian

1. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jangka Panjang Masih Belum Optimal

Permasalahan industri yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara terlihat dari berbagai proyek yang seharusnya menjadi tulang punggung industri masa depan yang belum siap beroperasi. Salah satu contoh konkret adalah Kawasan Industri Hijau Indonesia di Kalimantan Utara yang berlokasi di Tanah Kuning. Meski sudah direncanakan, kawasan ini belum sepenuhnya siap untuk beroperasi, yang mengindikasikan adanya keterlambatan dalam implementasi rencana pembangunan tersebut. Permasalahan tersebut didukung oleh sarana prasarana penunjang di berbagai kawasan industri juga masih kurang memadai. Kurangnya infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih menghambat pengembangan industri. Kondisi ini diperparah dengan lambatnya perkembangan hilirisasi produk-produk berbasis sumber daya alam yang masih belum signifikan. Selain itu, industri berbasis perikanan juga mengalami tantangan besar dengan penurunan ketersediaan bahan baku utama. Hal ini menyebabkan banyak industri perikanan yang beroperasi di bawah kapasitas optimal. Di sisi lain, pemasaran produk unggulan yang dihasilkan di daerah perbatasan dan pedalaman terkendala oleh biaya transportasi yang tinggi.

Permasalahan tersebut tentunya didukung oleh sisi manajerial industri yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara. Lemahnya pengawasan dan pembinaan industri besar juga menjadi masalah serius. Kewenangan perizinan penanaman modal asing yang berada di pusat membuat pemerintah provinsi kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Ditambah lagi, banyak pelaku industri yang belum memahami tata cara atau mekanisme pelaporan dan pengawasan operasional perusahaan yang pada akhirnya menghambat upaya pembinaan oleh pemerintah provinsi. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam penerapan standar operasional dan kinerja industri.

G. Transmigrasi

1. Terbatasnya Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi

Terbatasnya aksesibilitas dan ketersediaan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi menjadi salah satu hambatan utama dalam

upaya pengembangan daerah tersebut. Keterbatasan ini mencakup infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan, yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat. Akibat dari keterbatasan ini, aktivitas ekonomi dan sosial di kawasan transmigrasi berjalan dengan lambat, sehingga tujuan utama dari program transmigrasi, yaitu pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, belum dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah dan pihak terkait untuk memperbaiki aksesibilitas serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung perkembangan kawasan transmigrasi.

H. Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya yang Masih Belum Optimal

Permasalahan utama dalam pengembangan perikanan tangkap adalah belum adanya pelabuhan perikanan yang memadai, seperti minimnya Pelabuhan Perikanan Nusantara/PPN. Selain itu, permasalahan dalam budidaya perikanan di Provinsi Kalimantan Utara antara lain meliputi permasalahan lahan budidaya/tambak, kurang tersedianya bibit rumput laut, bibit ikan dan bibit/benur udang, pakan ikan, penyakit dan teknologi budidaya yang ramah lingkungan. Disamping itu, hilirisasi produk kelautan dan perikanan khususnya rumput laut belum berjalan akibat belum adanya investasi terkait pengolahan rumput laut akibat terkendala diantaranya adalah masalah ketersediaan air bersih dan listrik. Hal ini menyebabkan produk rumput laut dihasilkan di Provinsi Kalimantan Utara semuanya dijual dalam bentuk bahan mentah (raw material) ke Surabaya dan Makasar. Belum ada aktivitas hilirisasi ini menyebabkan tidak terciptanya nilai tambah dan tidak terciptanya peluang kerja baru bagi masnyarakat.

2.3.4.4. Penunjang Urusan

A. Perencanaan Pembangunan

Urusan perencanaan pembangunan yang diukur dengan indikator ketersediaan dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, dokume perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan

PERDA menunjukkan telah tersedia. Sementara data penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD, penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD dan kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW belum tersedia. Hal ini mengisyaratkan bahwa kemungkinan program RPJMD belum dijabarkan ke dalam RKPD secara konsisten. Program RKPD belum dijabarkan secara konsisten ke dalam APBD dan rencana pembangunan belum didasarkan pada RTRW.

B. Keuangan

1. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah

Hingga saat ini, tingkat kemampuan keuangan Provinsi Kalimantan Utara tercatat masih rendah meskipun capaiannya menunjukkan kecenderungan meningkat (membaik). Capaian tersebut mengindikasikan bahwa posisi tingkat kemampuan daerah di provinsi ini berada pada pola hubungan konsultatif, di mana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi, karena daerah telah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Meskipun demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Utara sendiri belum mempunyai kemampuan yang optimal dalam membiayai pembangunan daerahnya. Hal tersebut terjadi karena besaran PAD provinsi ini masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah, dengan kata lain pemerintah provinsi masih cukup bergantung dengan sumber keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahannya. Oleh karena itu, dalam hal untuk mengurangi tingginya ketergantungan pada penerimaan dari pemerintah pusat tersebut, pemerintah provinsi masih perlu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada, salah satunya dengan menggali sumber- sumber PAD secara lebih maksimal lagi.

C. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1. Belum Adanya Desain dan Sistem Manajemen Talenta ASN

Permasalahan mengenai belum adanya desain dan sisten manajemen talenta ASN menjadi sebuah tantangan dalam melakukan peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

serta efisiensi pelayanan publik. Selain itu, belum optimalnya sistem manajemen dapat mempengaruhi profesionalisme ASN, yang mana di Provinsi Kalimantan Utara, indeks profesionalitas ASN belum optimal, hal ini dibuktikan dengan indeks profesionalitas ASN masih di angka 80,09 persen pada tahun 2024. Sistem manajemen talenta juga digunakan untuk melakukan penempatan ASN sesuai dengan potensi dan kompetensi masing-masing ASN. Apabila sistem manajemen talenta ASN belum optimal, dapat mempengaruhi kinerja dan kapabilitas ASN dalam menjalankan tanggung jawabnya.

2. Belum Tersedianya Guidance Badan Penilai Kinerja

Guidance badan penilai kinerja merupakan panduan yang telah disusun untuk membantu dalam mengukur kinerja ASN secara objektif, transparan, dan adil. Selain itu, fungsi guidance badan penilai kinerja yaitu untuk memberikan kerangka kerja dan standar dalam melakukan penilaian kinerja ASN, sehingga penilaian tersebut menjadi dasar dalam pegembangan karir, pelatihan, dan penghargaan bagi ASN. Namun, ketidakstersediaan guidance badan penilai kinerja menjadi sebuah tantangan dalam proses evaluasi dan pengembangan kinerja ASN, karena tanpa adanya panduan dan standar penilaian dapat mempersulit untuk melakukan penilaian kinerja ASN dan dapat menghambat peningkatan kualitas serta kompetensi sumber daya manusia.

3. Belum Adanya Profil Pegawai

Profil pegawai merupakan cakupan data mengenai informasi pegawai, data tersebut meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, kompetensi, prestasi, serta kinerja pegawai. Profil pegawai digunakan untuk memberikan gambar mengenai individu tersebut serta digunakan untuk dasar dalam pengembangan karir, penempatan posisi, dan pemberian reward. Profil pegawai juga digunakan untuk mendukung manajemen sumber daya manusia yang efektif. Tanpa adanya profil pegawai, dapat mempengaruhi dan menghambat penilaian terhadap kompetensi, kinerja, dan potensi pegawai. Selain itu, belum adanya profil pegawai dapat menghambaat strategi pola pengembangan karir, sehingga profil pegawai dan pola

pengembangan karir sangat dibutukan untuk menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan bidang dari masing-masing pegawai.

4. Belum Ada Sarana Prasarana dan SDM yang Mendukung dalam Pemberlakuan Sistem Merit

Permasalahan mengenai belum adanya sarana prasarana dan SDM yang mendukung dalam pemberlakuan sistem merit, sarana prasarana ini tidak berfungsi secara maksimal karena bangunan yang digunakan untuk melakukan sistem merit tidak memenuhi standar pelaksanaan pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan peningkatan ASN. Permasalahan ini dapat berdampak pada pengembangan kualitas ASN karena tanpa adanya fasilitas dan infrastruktur yang memadai dapat mempersulit pelaksananaan sistem merit yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas ASN. Hal ini juga dapat berdampak efektivitas sistem merit seperti dapat menghambat proses rekrutmen, pegembangan, dan penilaian kinerja ASN.

D. Penelitian dan Pengembangan

Pada urusan penelitian dan pengembangan tidak data yang tersedia dari sembilan indikator yang disyaratkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017, sehingga urusan perencanaan pembangunan belum dapat dianalisis.

E. Pengawasan

1. Belum Optimalnya Pencegahan dan Penyelesaian Kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Permasalahan mengenai belum optimalnya pencegahan dan penyelesaian kasus korupsi, kolusi, dan KKN dibuktikan dengan masih tingginya penemuan BPK pada tahun 2022 yang berjumlah 57 temuan. Permasalahan ini menjadi tantangan dalam upaya untuk menciptakan good governance. Ketidakefektifan strategi dan mekanisme pengawasan yang dapat menyebabkan kasus KKN dapat mengakibatkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

F. Sekretariat Dewan

1. Belum Optimalnya Program DRPD dalam Melakukan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda, dan Anggaran

Permasalahan mengenai belum optimalnya program DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan anggaran dibuktikan dengan adanya penurunan program dari rahun 2020 hingga tahun 2023. Permasalahan ini juga dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas pemerintahan karena kurangnya fungsi pengawasan yang dapat mengakibatkan kurang efektifnya pemantauan terhadap implementasi kebijakan dan program pemerintah daerah.

2.4. Isu Strategis Daerah

Identifikasi isu strategis memainkan peran penting yang menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan serta tantangan yang dihadapi pada suatu daerah. Proses penyusunan isu strategis daerah dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara isu-isu strategis di tingkat global, nasional, dan regional. Selain itu, perumusan isu strategis juga mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta memperhitungkan konteks lokal, potensi daerah, dan berbagai tantangan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Utara. Langkah ini bertujuan untuk menghasilkan arah pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Adapun isu-isu strategis pembangunan Kalimantan Utara, meliputi:

1. Produktivitas Ekonomi Daerah yang Inklusif, Bernilai Tambah dan Berkelanjutan

Provinsi Kalimantan Utara memiliki sumber daya yang berlimpah dan telah dikenal dengan berbagai produk unggulan daerah. Potensi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara meliputi sumber daya perikanan dan kelautan, ekosistem mangrove dan gambut, juga kekayaan alam lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan energi baru terbarukan. Meskipun kekayaan alam yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara berlimpah, pemanfaatan sumber daya alam tersebut masih terbatas pada sektor primer dengan nilai tambah yang rendah. Kondisi tersebut dapat dilihat dari tingginya kontribusi sektor primer terhadap

perekonomian Provinsi Kalimantan Utara yang mencapai 43,51 persen pada tahun 2024, dimana 28,72 persen disumbang oleh sektor pertambangan dan penggalian.

Besarnya potensi alam yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara juga memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaannya. Perekonomian daerah yang bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian yang identik dengan sumber daya alam tidak terbarukan membawa persoalan terkait keberlanjutan dan resiliensi perekonomian daerah ke depan. Oleh karena itu, perekonomian daerah perlu diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam terbarukan yang dikelola dengan prinsip berkelanjutan. Peningkatan nilai tambah produk melalui proses pengolahan perlu didorong dengan berbagai kebijakan ekonomi yang mendukung masuk dan berkembangnya industri di berbagai bidang, baik industri kecil dan menengah maupun industri besar.

Pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara juga wajib menjamin inklusivitas bagi seluruh kelompok masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam agenda pembangunan melalui aktivitas produksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi masih perlu diperkuat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan IKM perlu didorong lebih kuat mengingat pertumbuhan UMKM selama periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi. Berdasarkan potensi dan masalah yang teridentifikasi maka isu produktivitas ekonomi daerah yang inklusif, bernilai tambah, dan berkelanjutan perlu untuk diangkat sebagai isu strategis daerah.

2. Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru dan Penyediaan Energi Baru Terbarukan

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi besar untuk mengembangkan transformasi ekonomi hijau yang berkelanjutan. Provinsi Kalimantan Utara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, provinsi ini dapat mendorong sektor-sektor ramah lingkungan, seperti pertanian, perikanan, kehutanan lestari, pariwisata berbasis alam dan industri hijau. Upaya ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap industri ekstraktif yang berisiko merusak lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Pengembangan ekonomi biru juga menjadi fokus strategis bagi Provinsi Kalimantan Utara. Letak Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan laut memberikan peluang besar dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pengelolaan yang tepat dan penerapan teknologi ramah lingkungan di sektor ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut.

Penyediaan energi baru dan terbarukan (EBT) merupakan bagian penting dari transformasi ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara. Potensi energi surya, air, dan bioenergi di wilayah ini sangat menjanjikan untuk dikembangkan sebagai alternatif energi yang bersih dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur EBT tidak hanya menunjang kebutuhan energi lokal, tetapi juga membuka peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja hijau.

Integrasi antara pembangunan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pengembangan energi terbarukan di Provinsi Kalimantan Utara menjadi kesempatan besar bagi Provinsi Kalimantan Utara untuk menjadi model pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan ramah lingkungan.

3. SDM Berkualitas dan Kohesivitas Masyarakat

Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan Indonesia menghadapi tantangan pembangunan diantaranya peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan penguatan kohesivitas masyarakat. Dalam peningkatan kualitas SDM, Provinsi Kalimantan Utara masih menghadapi beberapa permasalahan seperti belum meratanya akses dan kualitas pendidikan, kurangnya tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan yang memadai, kurangnya akses pelatihan vokasional, serta ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri lokal. Peningkatan SDM yang berkualitas menjadi hal mendesak mengingat kebutuhan tenaga kerja terampil disektor unggulan seperti industri, pertanian, dan pariwisata. Adapun strategi yang perlu diperhatikan dalam pembangunan kedepan diantaranya peningkatan kualitas pendidikan dasar hingga menengah, pengembangan pusat pelatihan vokasional, serta peningkatan kerjasama

antara pemerintah daerah, industri, dan lembaga pendidikan untuk program magang dan penempatan kerja.

Pengembangan SDM yang berkualitas dilakukan sejalan dengan penguatan kohesivitas masyarakat. Kohesivitas masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial ditengah kemajemukan etnis, budaya, dan agama di Kalimantan Utara. Keargaman ini menjadi potensi sekaligus tantangan yang harus dijaga agar tidak menimbulkan gesekan/konflik sosial. Perlu upaya sistematis dalam membangun dialog antar komunitas, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu, pelaksanaan forum lintas budaya perlu dilakukan secara rutin. Pelibatan tokoh adat, pemuda, perempuan dan stakeholder lainnya dalam seluruh proses pembangunan, serta mendorong kegiatan sosial bersama seperti gotong royong dan festival budaya. Dengan demikian, peningkatan SDM yang berkualitas dan kohesivitas masyarakat memerlukan sinergi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, sehingga dapat terwujud pembangunan yang lebih inklusif, harmonis, dan berdaya saing.

Dengan demikian, peningkatan SDM yang berkualitas dan kohesivitas masyarakat memerlukan sinergi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, sehingga dapat terwujud pembangunan yang lebih inklusif, harmonis, dan berdaya saing. Selain itu, untuk menjawab tantangan strategis terkait rendahnya kualitas SDM, akses pendidikan dan kesehatan yang masih terbatas, serta ketimpangan pelayanan antar wilayah, maka pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama. Upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar, menengah, dan vokasional harus terus diperkuat terutama di wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan. Hal ini meliputi perluasan jangkauan layanan, penyediaan tenaga pendidik yang berkualitas, serta penguatan sarana dan prasarana pendidikan.

Demikian pula dalam sektor kesehatan, perlu dilakukan percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya pelayanan ibu dan anak, imunisasi, gizi, dan penanganan penyakit menular. Penguatan sistem layanan kesehatan dasar, penyediaan tenaga medis yang merata, serta fasilitas kesehatan yang memadai di seluruh wilayah akan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan

masyarakat. Dengan pendidikan yang lebih merata dan layanan kesehatan yang lebih inklusif, Kalimantan Utara dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

4. Konektivitas Wilayah dan Aksesibilitas Layanan Dasar yang Merata dan Berkeadilan

Upaya mewujudkan konektivitas wilayah dan aksesibilitas layanan dasar yang merata dan berkeadilan menjadi isu strategis bagi Provinsi Kalimantan Utara yang perlu untuk segera direspon. Beberapa wilayah di Kalimantan Utara terutama pedalaman dan perbatasan seperti Krayan, belum terhubung dengan jaringan jalan nasional dan provinsi secara memadai. Ruas jalan antar kabupaten dan penghubung ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sering kali dalam kondisi rusak atau belum terbangun. Proporsi jalan kewenangan provinsi dengan permukaan tanah mencapai lebih dari 70 persen selama 2020-2024. Di sisi lain, penambahan jalan dengan permukaan aspal dan beton juga berjalan sangat lambat.

Minimnya jalan dan jembatan penghubung di atas sungai besar mengakibatkan transportasi air menjadi alternatif bagi masyarakat. Akses ke daerah-daerah seperti Krayan, Lumbis, dan sebagian wilayah Malinau hanya dapat ditempuh melalui jalur udara atau sungai. Terbatasnya prasarana transportasi yang memadai dan integrasi antar sarana transportasi darat, laut, dan udara masih belum berjalan optimal menjadikan biaya logistik menjadi mahal. Di masa mendatang pengembangan transportasi juga perlu untuk memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, ketahanan terhadap bencana, dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi berbasis digital. Lebih dari itu, akses internet dan jaringan seluler masih terbatas memperparah keterisolasian dan menghambat pendidikan, ekonomi digital, dan pelayanan publik.

Peningkatan konektivitas wilayah dan aksesibilitas layanan dasar dan merata menjadi agenda penting dalam pembangunan selama lima tahun ke depan. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, memperkuat integrasi wilayah, serta memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan agar dapat mengakses pelayanan publik secara setara. Pemerataan pembangunan infrastruktur akan tetap

diarahkan secara kontekstual dan adaptif, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat berjalan secara berkeadilan dan berdampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan ketersediaan aset (stok infrastruktur) yang terbangun untuk meningkatkan akses; menurunkan biaya produksi, biaya transportasi dan biaya logistik; menguatkan konektivitas dan rantai nilai komoditas; serta mengembangkan pariwisata. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memberikan dampak yang baik ke berbagai sektor pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.

5. Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Perbatasan yang Berkualitas

Kalimantan Utara sebagai salah satu provinsi baru di Indonesia yang dimekarkan pada tahun 2013 ini memiliki tantangan sekaligus peluang besar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Kualitas birokrasi yang adaptif, akuntabel, dan transparan serta inovatif menjadi fondasi utama untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, reformasi birokrasi perlu terus didorong melalui peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi layanan publik, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan terjangkau.

Kalimantan Utara secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia. Tata kelola perbatasan menjadi isu strategis yang harus dikelola secara serius, karena menyangkut aspek kedaulatan, keamanan, serta potensi ekonomi lintas negara. Penguatan infrastruktur perbatasan, peningkatan koordinasi antar-instansi, dan pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru menjadi prioritas penting. Dengan pengelolaan yang tepat, wilayah perbatasan dapat menjadi gerbang kemajuan, bukan zona terluar yang terabaikan.

Kualitas tata kelola pemerintahan dan perbatasan yang baik juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berbasis data, serta penguatan peran desa dalam pembangunan wilayah perbatasan, akan memperkuat ketahanan sosial

dan ekonomi daerah. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, Kalimantan Utara dapat memanfaatkan posisinya secara strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

Gambaran proses perumusan isu strategis pembangunan Kalimantan Utara disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.117
Isu Strategis Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
▪ Potensi bonus demografi ▪ Sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya perikanan dan kelautan ▪ Keberadaan ekosistem mangrove dan gambut ▪ Potensi parawisata alam dan budaya ▪ Potensi pengembangan EBT	▪ Kemiskinan dan kesenjangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/ kota	▪ Belum optimalnya penciptaan nilai tambah sektor sektor ekonomi basis/unggulan	▪ Konstelasi Perdagangan Global ▪ Tata Kelola Keuangan Global ▪ Pertumbuhan Kelas Menengah ▪ Geopolitik dan Geoekonomi	▪ Pergeseran struktur kelas masyarakat ▪ Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif ▪ Geopolitik dan geoekonomi	▪ Ketergantungan perekonomian daerah sektor hulu disertai lambatnya proses hilirisasi dan diversifikasi industri ▪ Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan, transmigrasi, dan perbatasan negara ▪ Kurangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan	▪ Produktivitas ekonomi daerah yang inklusif, bernilai tambah dan berkelanjutan ▪ Transformasi ekonomi hijau, ekonomi biru dan penyediaan energi baru terbarukan
	▪ Jangkauan dan mutu pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masih perlu dioptimalkan	▪ Peningkatan kualitas dan cakupan layanan dasar	▪ Demografi Global	▪ Rendahnya kualitas sumber daya manusia	▪ Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan	▪ SDM berkualitas dan kohesivitas masyarakat
	▪ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	▪ Belum optimalnya implementasi kebijakan dan	▪ Perubahan Iklim ▪ Persaingan Sumber Daya Alam	▪ Krisis lingkungan	▪ Tingginya konversi hutan menjadi lahan tidak produktif	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	yang belum optimal	aturan berbasis ekologis				
	▪ Belum meratanya infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian	▪ Peningkatan kualitas dan cakupan layanan dasar ▪ Pengelolaan kawasan perbatasan yang belum optimal	▪ Perkembangan Teknologi ▪ Urbanisasi Dunia	▪ Rendahnya produktivitas	▪ Minimnya ketersediaan sarana dan prasaran layanan dasar yang memenuhi SPM	▪ Konektivitas wilayah dan aksesibilitas layanan dasar yang merata dan berkeadilan
	▪ Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	▪ Potensi segregasi dan konflik sosial		▪ Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah		▪ Tata kelola pemerintahan dan tata kelola perbatasan yang berkualitas

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional dan Prospek Ekonomi Tahun 2026

Kinerja ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan ketahanan yang kuat dalam mengatasi dampak rambatan global. Pertumbuhan ekonomi hingga triwulan III 2024 cukup baik, dengan permintaan domestik menjadi pendorong utama pertumbuhan Indonesia sejalan investasi yang tetap membaik, terutama di sektor bangunan seiring dengan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Konsumsi rumah tangga, khususnya dari kelompok menengah ke atas, tetap baik, dan ekspor nonmigas mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dan 2025 diprakirakan berada dalam kisaran 4,7–5,5%, dan diprakirakan akan meningkat pada 2026 dalam kisaran 4,8–5,6%. Proyeksi pertumbuhan yang lebih tinggi ini didorong oleh berbagai upaya, baik dari sisi permintaan maupun penawaran.

Pertumbuhan ekonomi global pada 2024 diprakirakan melambat menjadi 3,2% dari 3,3% pada 2023 dan diproyeksikan tetap 3,2% pada 2025, serta melambat lebih lanjut menjadi 3,1% pada 2026. Divergensi pola pertumbuhan antarnegara juga berlanjut seiring dengan meningkatnya fragmentasi ekonomi dan perdagangan global. Ekonomi AS diprakirakan tetap kuat pada 2024 dan 2025 disertai dengan risiko pemanasan ekonomi yang berasal dari pembengkakan defisit fiskal. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan Kawasan Eropa diprakirakan akan melanjutkan perlambatan seiring dengan lemahnya permintaan domestik dan dampak dari kebijakan tarif dagang yang diterapkan oleh Pemerintah AS. Di sisi lain, prospek pertumbuhan ekonomi India, Indonesia, serta sejumlah negara Emerging Market Economies (EMEs) diprakirakan masih tetap positif, didorong oleh permintaan domestik, meskipun menghadapi potensi perlambatan ekspor akibat penurunan pertumbuhan ekonomi global dan fragmentasi perdagangan dunia.

Inflasi selama tahun 2024 menurun dan berada dalam rentang sasaran 2,5±1% didukung kebijakan moneter Bank Indonesia yang konsisten serta koordinasi yang erat dengan Pemerintah. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2024 tetap terjaga sebesar 1,57% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi inti yang terkendali pada level 2,26% (yoy) sejalan dengan konsistensi kebijakan suku bunga

Bank Indonesia untuk mengarahkan ekspektasi inflasi. Sementara itu, kelompok volatile food (VF) mencatat inflasi rendah 0,12% (yoy), didukung oleh terjaganya pasokan pangan, sinergi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), serta pengaruh efek dasar harga pangan.

Kebijakan transformasi ekonomi nasional perlu dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi peningkatan modal, penciptaan tenaga kerja, maupun peningkatan produktivitas. Ini penting untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penciptaan lapangan kerja sehingga dapat berlangsung secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan nilai investasi dan rasio modal terhadap PDB, kebijakan transformasi dimaksud perlu diarahkan pada perbaikan iklim investasi, percepatan realisasi investasi, dan dorongan investasi di sektor padat modal. Untuk penciptaan lapangan kerja dan sekaligus mendorong konsumsi masyarakat, perlu ditempuh program-program untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, jumlah dan kualitas pendidikan vokasi, termasuk memperluas sertifikasi keterampilan dan profesional, serta investasi dan pertumbuhan di sektor padat karya. Sementara untuk meningkatkan produktivitas perekonomian, berbagai kebijakan perlu ditempuh, yaitu akselerasi pembangunan infrastruktur konektivitas fisik dan digital, termasuk memperkuat rantai pasok (supply chains) nasional ke global, mendorong digitalisasi ekonomi, sistem pembayaran, dan digital financial and intermediary services, serta meningkatkan kemampuan *Research and Development* (R&D) baik di universitas maupun perusahaan besar. Ketiga sumber peningkatan kapasitas perekonomian nasional perlu secara bersama dan saling mendukung untuk terus ditingkatkan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Penguatan sinergi kebijakan transformasi ekonomi nasional yang mendukung implementasi berbagai program strategis yang telah dirancang oleh Pemerintah diproyeksikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

dari 4,7–5,5% pada 2025 menjadi 4,8–5,6% pada 2026 dan terus meningkat hingga 6,7–7,5% pada 2030. Stabilitas harga juga diprakirakan tetap terjaga dengan inflasi yang terkendali pada kisaran 2,5±1%, disertai dengan defisit transaksi berjalan yang terjaga rendah sekitar 1,1–1,9% dari PDB pada tahun 2030. Sejalan dengan itu, kredit/pembiayaan dari perbankan akan tumbuh optimal dengan rata rata 11–13% sampai 2030 dan defisit fiskal tetap terjaga dibawah 3% dari PDB pada 2030.

3.1.2. Kondisi Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara dan Prospek Ekonomi Tahun 2026

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan pertumbuhan yang positif. PDRB ADHK Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 73 triliun rupiah pada tahun 2024. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren yang sejalan dengan nasional yakni sama-sama terkontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 lalu kembali tumbuh positif seiring dengan pemulihan ekonomi daerah dan nasional. Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,55 persen per tahun lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,40 persen per tahun pada periode 2020-2024.

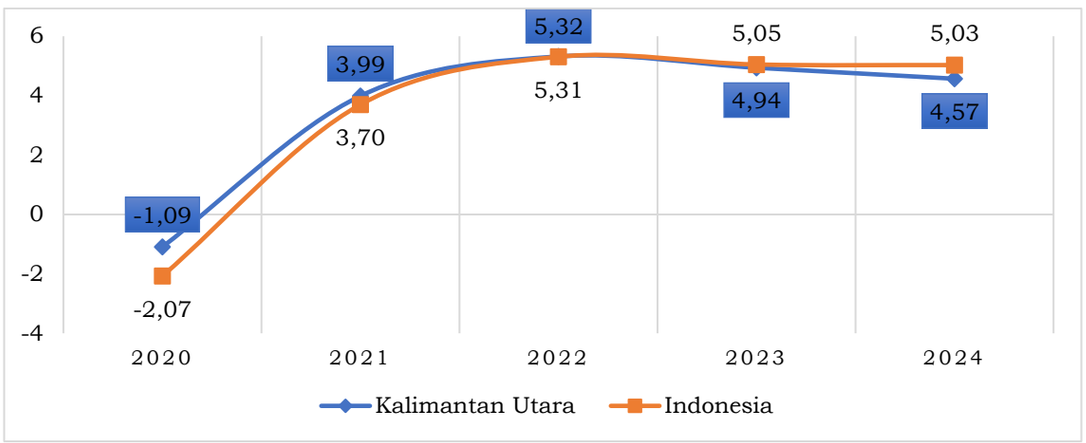
Tabel 3.1
PDRB ADHK Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.925,64	11.301,51	11.719,33	12.229,93	12.444,24	3,51
B	Pertambangan dan Penggalian	15.664,22	16.710,77	17.913,47	18.561,42	18.613,78	2,20
C	Industri Pengolahan	5.413,47	5.548,87	5.768,31	5.864,74	6.062,09	1,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	44,35	46,81	50,13	59,44	59,45	8,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	42,94	43,79	45,96	48,70	52,28	5,20
F	Konstruksi	7.905,16	7.858,10	7.680,74	8.351,57	9.349,77	3,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran;	6.799,64	7.282,83	7.949,28	8.453,70	9.282,15	6,57

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor						
H	Transportasi dan Pergudangan	3.820,95	3.826,14	4.223,34	4.457,13	4.702,90	3,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	858,32	881,96	978,42	1.059,04	1.184,75	5,89
J	Informasi dan Komunikasi	1.937,71	2.090,22	2.267,20	2.414,32	2.538,04	6,91
K	Jasa Keuangan	696,33	746,25	814,49	915,36	974,00	7,12
L	Real Estate	575,23	587,53	615,49	637,72	666,00	3,14
M,N	Jasa Perusahaan	145,89	149,04	158,57	164,13	169,25	2,88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.163,83	3.171,73	3.268,51	3.370,89	3.518,10	2,37
P	Jasa Pendidikan	1.597,21	1.670,88	1.782,71	1.875,54	1.977,96	5,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	753,50	817,90	828,81	848,77	874,51	5,07
R,S,T, U	Jasa Lainnya	401,82	428,66	469,62	504,39	538,72	8,08
PDRB Migas		**60.746,21**	**63.162,97**	**66.534,39**	**69.816,76**	**73.007,99**	**3,55**
PDRB Tanpa Migas		**58.852,05**	**61.213,74**	**64.571,38**	**67.933,56**	**71.318,95**	**3,76**

Sumber: Kaltara dalam angka 2025

Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan selisih nilai PDRB ADHK tahun tertentu (t) terhadap tahun sebelumnya (t-1). Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi mengindikasikan aktivitas ekonomi yang semakin menguat.

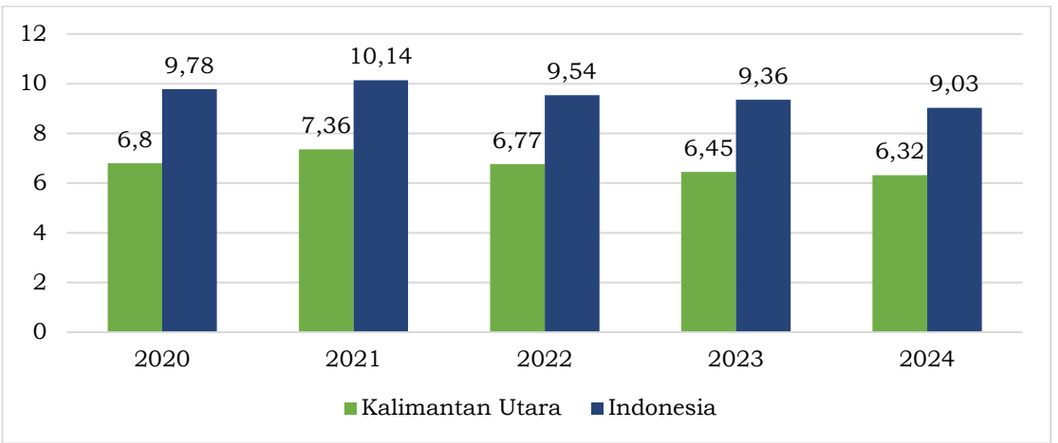


Gambar 3.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024 (%)
Sumber: diolah dari BPS, 2025

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara didorong oleh kinerja positif seluruh lapangan usaha, khususnya sektor perdagangan besar dan eceran; pertanian, kehutanan dan perikanan; dan pertambangan dan penggalian. Kinerja ketiga sektor tersebut menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian daerah pada tahun 2020-2024. Pada saat pandemi COVID-19 terjadi, kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tetap tumbuh positif yakni sebesar 4,3 persen menjadi penyelamat perekonomian daerah dari kontraksi yang jauh lebih dalam. Komoditas udang, ikan, rumput laut, dan kelapa sawit menjadi komoditas unggulan daerah yang mendorong PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus mengalami kenaikan.

b. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan penurunan sebesar 1,63 persen per tahun selama periode 2020-2024. Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 6,32 persen pada 2024. Angka tersebut menunjukkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Posisi tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara cenderung lebih rendah dibandingkan dengan 27 provinsi lainnya di Indonesia. Namun, jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di wilayah Pulau Kalimantan, tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara merupakan yang tertinggi pada tahun 2024.



Gambar 3.2.
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024 (%)
Sumber: BPS, 2025

c. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Utara merupakan ketiga tertinggi setelah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Timur. Tingginya PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara didorong oleh karakteristik perekonomian yang sama yakni ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian, khususnya komoditas batu bara. PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta merupakan yang tertinggi mencapai 344,35 juta rupiah. Berbeda dengan Provinsi Kalimantan Utara, perekonomian DKI Jakarta ditopang oleh sektor jasa sehingga nilai tambah yang dihasilkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang masih bergantung pada sektor primer.

Tabel 3.2
PDRB ADHB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

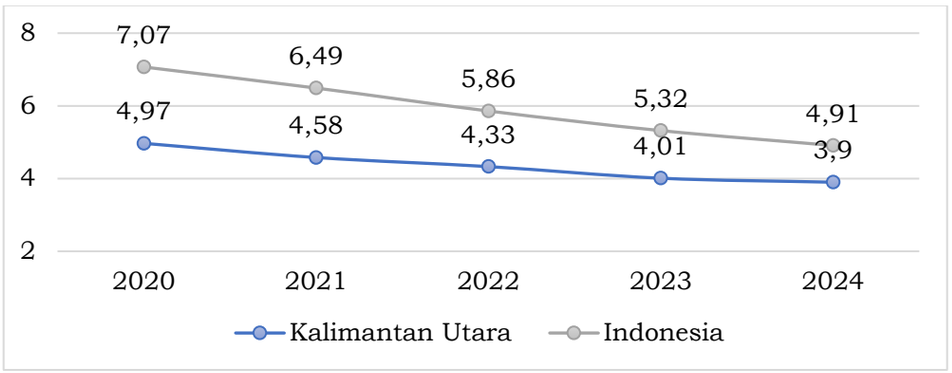
Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Malinau	135,57	154,01	211,91	218,89	210,43
Bulungan	123,79	131,81	156,18	162,24	160,71
Tana Tidung	231,65	258,11	330,50	337,03	330,15
Nunukan	132,69	147,67	195,65	204,64	192,21
Tarakan	156,96	170,70	190,21	208,19	221,39
Kalimantan Utara	143,53	157,09	192,59	201,75	198,43

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2025

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pembangunan ekonomi yang inklusif diharapkan dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan sehingga setiap penduduk dapat menghasilkan nilai tambah terhadap perekonomian daerah yang kemudian berdampak pada tingkat kesejahteraan. Tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tenaga kerja di suatu wilayah.

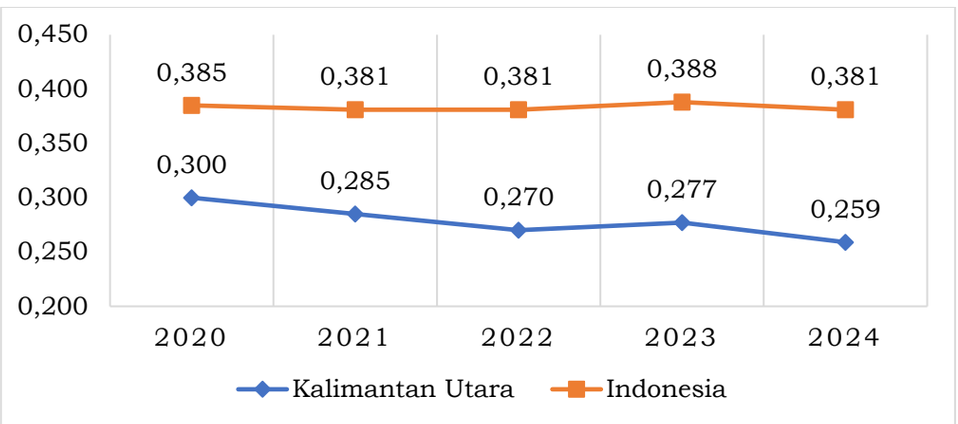
Tingkat pengangguran Provinsi Kalimantan Utara lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional. Pada periode 2020-2024, TPT Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan penurunan sebesar 5,86 persen per tahun mendorong tingkat pengangguran daerah ke angka 3,9 persen pada tahun 2024.



Gambar 3.3.
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024
Sumber: BPS, 2025

e. Indeks Gini

Indeks Gini baik di Provinsi Kalimantan Utara maupun nasional menunjukkan kondisi yang semakin membaik, yang ditunjukkan dengan menurunnya nilai Indeks Gini sebesar 3,54 persen per tahun pada periode 2020-2024. Dalam rentang waktu yang sama, capaian Indeks Gini di provinsi ini menunjukkan kondisi yang lebih baik apabila dibandingkan dengan capaian nasional, di mana dalam kurun waktu tersebut kondisi ketimpangan di provinsi ini berada dalam kategori ketimpangan rendah atau di bawah 0,3.



Gambar 3.4.
Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2020-2024
Sumber: BPS, 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2925 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, ditetapkan sasaran pembangunan setiap provinsi. Masing-masing sasaran pembangunan dilengkapi dengan target tahun 2025 dan 2029. Sasaran untuk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 menjadi panduan bagi penyusunan RPJMD dan RKPD. Adapun target masing-masing indikator sasaran disajikan pada gambar di bawah.



Gambar 3.5.
Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara
Sumber: Lampiran IV RPJMN Tahun 2025-2029

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pelaksanaan APBD dapat dianalisis dari aspek pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

A. Pendapatan

Pada periode tahun 2020-2024 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara meningkat konsisten dari Rp2,44 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp3,44 triliun pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,03% per tahun. Kenaikan ini mencerminkan penguatan kapasitas fiskal daerah yang ditopang oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatnya transfer dari pemerintah pusat, meskipun terdapat fluktuasi signifikan pada komponen pendapatan lain-lain yang sah.

Pendapatan Asli Daerah tumbuh pesat dari Rp557,65 miliar (2020) menjadi Rp1,02 triliun (2024), dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 16,43%. Pertumbuhan ini jauh di atas rata-rata total pendapatan daerah, sehingga peran PAD dalam struktur pendapatan semakin menguat. Pendapatan Transfer merupakan sumber dominan, naik dari Rp1,85 triliun

(2020) menjadi Rp2,42 triliun (2024), dengan rata-rata pertumbuhan 7,11%. Hampir seluruhnya berasal dari pemerintah pusat. Sementara komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah bersifat fluktuatif dan cenderung menurun drastis. Lain-lain Pendapatan yang Sah pada tahun 2020 senilai Rp31,20 miliar menjadi hanya Rp1,77 miliar (2024), dengan rata-rata pertumbuhan negatif (-34,07%).

Pendapatan Daerah Kalimantan Utara 2020–2024 tumbuh sehat dengan ditopang oleh peningkatan PAD dan Transfer Pusat. Komposisi 2024 memperlihatkan PAD semakin signifikan (29,6%) meski transfer pusat tetap mendominasi (70,4%). Tantangan utama adalah menjaga keberlanjutan pertumbuhan PAD, meminimalisasi ketergantungan pada transfer, serta mengoptimalkan pengelolaan DBH, DAU, dan DAK agar lebih produktif.

Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Kode Rek	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
4	**PENDAPATAN**	**2.435.451.724.804**	**2.609.501.844.014**	**2.731.491.817.452**	**3.091.012.760.999**	**3.435.173.229.897**	**9,03**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**557.646.133.462**	**677.803.723.305**	**815.664.188.997**	**980.136.675.968**	**1.016.124.517.294**	**16,43**
4.1.01	Pajak Daerah	348.949.836.778	392.686.405.543	596.780.850.288	717.253.715.401	761.218.800.067	22,71
4.1.02	Retribusi Daerah	4.856.242.203	6.212.686.828	7.053.749.676	17.404.890.968	10.768.808.538	37,52
4.1.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	7.455.831.910	8.205.702.460	9.088.203.219	10.114.672.311	11.371.469.794	11,13
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	196.384.222.572	270.698.928.474	202.741.385.813	235.363.397.288	232.765.438.895	6,93
4.2	**Pendapatan transfer**	**1.846.607.658.007**	**1.890.949.863.341**	**1.908.970.208.199**	**2.104.954.266.065**	**2.417.275.881.907**	**7,11**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.846.607.658.007	1.890.949.863.341	1.908.970.208.199	2.104.954.266.065	2.417.275.881.907	7,11
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1,79913E+12	1,81865E+12	1,87515E+12	2.080.287.939.065	2.404.627.387.907	7,68
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	3,42779E+11	3,84525E+11	5,66514E+11	689.779.609.710	1.006.246.935.000	31,79
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.082.389.409.000	1.077.878.230.685	1.080.588.578.315	1.117.056.619.340	1.153.992.670.001	1,63
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	373.956.768.758	356.250.599.693	228.046.665.188	273.451.710.015	244.387.782.906	
4.2.01.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	47.482.275.000	72.296.373.000	33.821.037.000	24.666.327.000	0	-32,01
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	47.482.275.000	72.296.373.000	33.821.037.000	24.666.327.000	0	-32,01
4.2.01.06	Insentif Fiskal					12.648.494.000	
4.2.01.06	Insentif Fiskal					12.648.494.000	
4.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**31.197.933.335**	**40.748.257.368**	**6.857.420.256**	**5.921.818.966**	**1.772.830.696**	**-34,07**
4.3.01	Pendapatan hibah	31.197.933.335	315.000.000	5.776.633.300	5.546.233.000	379.620.000	384,43
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya		40.433.257.368	1.080.786.956	375.585.966	1.393.210.696	

Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 sampai 2024

B. Belanja Daerah

Secara agregat, realisasi belanja daerah meningkat dari Rp2,68 triliun pada 2020 menjadi Rp3,54 triliun pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 8,06% per tahun. Pola tahunan menunjukkan perlambatan pada 2021, diikuti pemulihan yang kuat pada 2022–2024 hingga menembus Rp3,24 triliun (2023) dan Rp3,54 triliun (2024). Perkembangan ini mengindikasikan kapasitas fiskal belanja yang cenderung ekspansif dan adaptif terhadap siklus pemulihan ekonomi pascapandemi.

Selama periode tahun 2020 sampai 2024, kenaikan total belanja ±Rp857,67 miliar terutama bersumber dari Belanja Operasi (±Rp575,39 miliar) dan Belanja Transfer (±Rp236,58 miliar), sedangkan Belanja Modal hanya bertambah ±Rp38,43 miliar. Di dalam Belanja Operasi, lonjakan belanja Barang & Jasa (±Rp454,83 miliar) dan Pegawai (±Rp297,31 miliar) menjadi motor utama; pada Belanja Modal, satu-satunya pos yang meningkat besar ialah Jalan, Irigasi, dan Jaringan (±Rp140,74 miliar). Komposisi perubahan ini mempertegas dominasi kebutuhan operasional dan konektivitas jaringan, dengan ruang peningkatan untuk kapitalisasi aset layanan.

Struktur belanja Provinsi Kalimantan Utara selama periode tahun 2020–2024 menunjukkan ekspansi belanja yang sehat dengan dominasi Belanja Operasi dan penguatan Belanja Transfer, sementara porsi Belanja Modal mengecil relatif terhadap total. Fokus internal belanja modal bergeser ke konektivitas (jalan/irigasi/jaringan), yang strategis bagi penurunan biaya logistik dan integrasi wilayah.

Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020-2024 secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Kode Rek	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
5	**BELANJA**	**2.680.321.696.569**	**2.372.645.890.287**	**2.553.577.991.131**	**3.242.315.178.036**	**3.537.995.918.025**	**8,06**
5.1	**Belanja Operasi**	**1.727.405.179.222**	**1.647.219.558.627**	**1.629.460.884.904**	**2.042.445.525.499**	**2.302.793.344.612**	**8,09**
5.1.01	Belanja pegawai	567.086.139.980	638.555.013.259	714.859.072.319	767.029.049.418	864.391.833.545	11,14
5.1.02	Belanja barang dan jasa	738.461.268.649	787.157.711.061	837.011.356.497	1.097.028.389.769	1.193.288.127.010	13,19
5.1.03	Balanja bunga						
5.1.04	Belanja subsidi	21.188.660.226	21.167.303.205	13.973.868.842	16.513.140.465	19.787.303.700	0,98
5.1.05	Belanja hibah	392.994.966.649	199.114.237.682	63.154.227.474	161.141.184.381	222.096.876.570	18,84
5.1.06	Belanja bantuan sosial	7.674.143.719	1.225.293.420	462.359.772	733.761.466	3.229.203.787	63,12
5.2	**Belanja Modal**	**665.170.894.025**	**390.900.388.868**	**496.619.274.367**	**651.639.401.736**	**703.597.740.636**	**6,25**
5.2.01	Belanja tanah	57.360.558.808	23.338.573.244	51.978.879.050	30.379.184.731	36.362.332.622	10,39
5.2.02	Belanja peralatan dan mesin	177.052.283.093	95.562.120.412	134.331.790.579	118.377.089.281	162.386.608.538	4,96
5.2.03	Belanja gedung dan bangunan	264.776.690.041	173.436.399.485	239.046.835.735	345.002.801.783	208.341.017.057	2,01
5.2.04	Belanja jalan, irigasi, dan jaringan	151.910.691.099	76.752.834.826	67.684.064.690	155.513.502.679	292.653.376.604	39,16
5.2.05	Belanja aset tetap lainnya	7.129.830.595	21.810.460.901	3.577.704.313	1.904.007.132	743.850.360	3,65
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6.940.840.389			462.816.130	3.110.555.455	
5.3	**Belanja Tak Terduga**	**0**	**11.924.306.413**	**923.172.706**	**9.451.453.256**	**7.277.240.648**	
5.3.01	Belanja Tak Terduga		11.924.306.413	923.172.706	9.451.453.256	7.277.240.648	
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**287.745.623.322**	**322.601.636.378**	**426.574.659.154**	**538.778.797.545**	**524.327.592.129**	**16,99**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	223.698.123.322	250.853.386.378	244.301.809.158	368.800.299.772	336.426.911.141	12,93
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	64.047.500.000	71.748.250.000	182.272.849.996	169.978.497.773	187.900.680.988	42,47

Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 sampai 2024

C. Pembiayaan

Pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, terkait dengan surplus atau defisit belanja daerah, digunakan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan pembiayaan di masa depan guna menghitung kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan pada periode tahun 2021-2023 terjadi kenaikan sebesar 87,91 persen diantaranya komponen penerimaan pembiayaan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 90,86 persen. Gambaran pembiayaan periode tahun 2020-2024 dapat dirinci sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 3.5
Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024

Kode Rek	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
6	**PEMBIAYAAN**	**341.973.119.415**	**26.254.756.068**	**231.200.110.391**	**301.046.143.553**	**129.743.726.516**	**-56,9**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**343.473.119.415**	**47.254.756.068**	**246.200.110.391**	**316.046.143.553**	**149.743.726.516**	**-52,6**
6.1.01	Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	343.473.119.415	47.254.756.068	246.200.110.391	316.046.143.553	149.743.726.516	-52,6
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**1.500.000.000**	**21.000.000.000**	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**	**20.000.000.000**	**33,3**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	21.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	20.000.000.000	33,3

Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 sampai 2024

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2026

Arah kebijakan keuangan daerah memaparkan kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pengeluaran pembiayaan untuk masa mendatang, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam alokasi dana pembangunan daerah.

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah tahun 2026, yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan upaya pengelolaan BUMD secara efektif dan efisien.
2) Melakukan *Participating Interest* (PI) 10% melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
3) Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dantara lain dengan mengembangkan kerjasama operasi/investasi melalui pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari sisi produksi dan pemasaran serta pengembangan secara maksimal PAD dari segala unsur.
4) Mendongkrak perolehan pajak kendaraan bermotor dengan memberikan program pembebasan denda, bea balik nama (BBN), dan pemberian keringan pokok pajak.
5) Optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta optimalisasi PAD pajak sarang burung walet.
6) Meningkatkan kembali efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur misalnya dengan penagihan dipermudah dengan cara jemput bola serta sistem pembayaran pajak secara online.
7) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah untuk meminimalisir kebocoran anggaran.
8) Mendorong iklim investasi dengan menyederhanakan proses perizinan, mendekatkan akses pelayanan perizinan dan intensifikasi potensial produk unggulan daerah menjadi layak jual.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan pengelolaan belanja daerah adalah mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah pada periode 2026 diarahkan pada:

1) Menitikberatkan pada urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar dan urusan pilihan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 (program prioritas Kepala Daerah).
2) Memprioritaskan pada belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal.
3) Pemenuhan *mandatory spending* yang terdiri dari pemenuhan belanja fungsi pendidikan minumal 20% dari total belanja, pemenuhan belanja fungsi kesehatan, dan pemenuhan belanja fungsi infrastruktur minumal 40% dari belanja daerah diluar belanja transfer.
4) Pemenuhan belanja prioritas daerah yang terdiri dari anggaran penyelenggaraan pemilu dan pilkada, pencegahan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem serta bantuan keuangan untuk penyuluh perikanan, penyuluh pertanian, pendidik dan tenaga kependidikan.
5) Pemenuhan belanja mengikat lainnya antara lain belanja pegawai yaitu paling tinggi 30% dari belanja APBD di luar gaji guru melalui TKD, APIP untuk pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat antara 0,30-0,90%, Pengembangan kompetensi ASN sebesar 0,30%

dan bagi hasil pajak daerah dengan memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah.

6) Melakukan efisiensi belanja.

7) Memberikan bantuan-bantuan khususnya keuangan dalam bentuk subsidi, hibah dan bantuan sosial.

Dalam perhitungan kerangka pendanaan, Pemerintah Daerah melakukan perhitungan rencana belanja periodik yang wajib dan mengikat yang merupakan pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya. Komponen belanja wajib dan mengikat ini terdiri dari belanja operasi yang mencakup belanja pegawai dan lainnya serta pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang dan penyertaan modal dengan uraian sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai diperuntukan untuk belanja gaji dan tunjangan termasuk gaji dan tunjangan ketiga belas dan ke empat belas, belanja tambahan penghasilan PNS, insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, belanja operasional KDH/WKDH dan Pimpinan DPRD, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan keselamatan kerja, tunjangan DPRD, tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD non sertifikasi termasuk Belanja Pegawai lainnya yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang sebelumnya menjadi bagian dari Belanja Langsung. Disamping itu juga akan dialokasikan pembayaran gaji ketiga belas dan ke empat belas serta pengangkatan CPNSD maupun PPPK.

2) Perhitungan belanja insentif pemungutan pajak daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Alokasi anggaran paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta

PNSD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013.

4) Penganggaran tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD disesuaikan dengan alokasi penerimaan dari Pemerintah Pusat.
5) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada : (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
6) Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, merupakan satu kesatuan jenis belanja, pengalokasiannya pada pos Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun dalam pos Sekretariat Daerah berpedoman pada PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7) Pemberian honorarium bagi PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan, dan kewajaran penerimaan penghasilan.

Berdasarkan proyeksi tahun 2026, Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara diproyeksikan mencapai Rp2,95 triliun, sedikit menurun dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp3,44 triliun. Secara keseluruhan, proyeksi ini menunjukkan tren stagnasi dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -0,34%, menandakan

adanya penyesuaian fiskal yang lebih konservatif dibanding periode sebelumnya.

Komponen PAD diproyeksikan sebesar Rp1,03 triliun, tumbuh 3,27% dibanding 2024. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh Pajak Daerah yang mencapai Rp758,16 miliar (naik 10,29%), sedangkan Retribusi Daerah relatif stagnan pada Rp12,52 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperkirakan tetap stabil pada kisaran Rp11,37 miliar, meskipun dengan fluktuasi kecil. Sementara itu, Lain-Lain PAD yang Sah diproyeksikan Rp249,95 miliar, namun dengan tren pertumbuhan negatif (-13,80%) yang mengindikasikan adanya keterbatasan sumber alternatif di luar pajak dan retribusi.

Sumber terbesar tetap berasal dari Pendapatan Transfer, yakni Rp1,92 triliun atau sekitar dua pertiga dari total pendapatan, meski turun dibanding realisasi 2024 (Rp2,42 triliun). Transfer pusat diproyeksikan mengalami perlambatan dengan pertumbuhan rata-rata hanya 1,07%, sehingga menegaskan ketergantungan fiskal Kalimantan Utara terhadap pemerintah pusat tetap tinggi.

Sementara itu, Lain-Lain Pendapatan yang Sah diperkirakan hanya Rp350 juta, merosot tajam dari Rp1,77 miliar pada 2024. Penurunan hampir 99% ini menandakan kontribusi pos tersebut semakin tidak signifikan, sekaligus menunjukkan bahwa pendapatan daerah semakin bergantung pada PAD dan transfer pusat.

Dengan struktur tersebut, pendapatan daerah tahun 2026 masih menunjukkan dominasi transfer pusat, meskipun ada peningkatan peran PAD, khususnya Pajak Daerah. Tantangan utama ke depan adalah mengurangi ketergantungan terhadap transfer melalui optimalisasi potensi lokal dan diversifikasi sumber pendapatan.

Adapun proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2026

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi anggaran (%)	2025			2026	Rata-Rata Pertumbuhan Proyeksi (%)
		2023	2024		APBD	PAPBD	Bertambah/ Berkurang	Proyeksi	
4	**PENDAPATAN**	**3.091.012.760.999**	**3.435.173.229.897**	**11,1**	**2.947.123.399.085**	**2.962.767.585.544**	**15.644.186.459**	**2.952.735.541.854**	**-0,34**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**980.136.675.968**	**1.016.124.517.294**	**3,7**	**1.026.394.628.085**	**999.350.336.210**	**(27.044.291.875)**	**1.032.006.770.854**	**3,27**
4.1.01	Pajak Daerah	717.253.715.401	761.218.800.067	6,1	752.547.239.356	687.402.239.356	(65.145.000.000)	758.159.382.125	10,29
4.1.02	Retribusi Daerah	17.404.890.968	10.768.808.538	-38,1	12.522.785.602	12.522.785.602	-	12.522.785.602	0,00
4.1.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	10.114.672.311	11.371.469.794	12,4	11.371.469.794	9.472.177.919	(1.899.291.875)	11.371.469.794	20,05
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	235.363.397.288	232.765.438.895	-1,1	249.953.133.333	289.953.133.333	40.000.000.000	249.953.133.333	-13,80
4.2	**Pendapatan transfer**	**2.104.954.266.065**	**2.417.275.881.907**	**14,8**	**1.920.378.771.000**	**1.899.987.154.000**	**(20.391.617.000)**	**1.920.378.771.000**	**1,07**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.104.954.266.065	2.417.275.881.907	14,8	1.920.378.771.000	1.899.987.154.000	(20.391.617.000)	1.920.378.771.000	1,07
4.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**5.921.818.966**	**1.772.830.696**	**-70,1**	**350.000.000**	**63.430.095.334**	**63.080.095.334**	**350.000.000**	**-99,45**
4.3.01	Pendapatan hibah	5.546.233.000	379.620.000	-93,2	350.000.000	63.430.095.334	63.080.095.334	350.000.000	-99,45
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya	375.585.966	1.393.210.696	270,9	-	-	-	-	-

Sumber : LRA 2023-2024 & APBD 2025, diproyeksikan

B. Belanja Daerah

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan pengelolaan belanja daerah adalah mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dapat dibiayai oleh APBD.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah pada periode 2026 diarahkan pada:

1) Menitikberatkan pada urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar dan urusan pilihan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 (program prioritas Kepala Daerah).
2) Memprioritaskan pada belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal.
3) Pemenuhan *mandatory spending* yang terdiri dari pemenuhan belanja fungsi pendidikan minimal 20% dari total belanja, pemenuhan belanja fungsi kesehatan, dan pemenuhan belanja fungsi infrastruktur minumal 40% dari belanja daerah diluar belanja transfer.
4) Pemenuhan belanja prioritas daerah yang terdiri dari anggaran penyelenggaraan pemilu dan pilkada, pencegahan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem serta bantuan keuangan untuk penyuluh perikanan, penyuluh pertanian, pendidik dan tenaga kependidikan.
5) Pemenuhan belanja mengikat lainnya antara lain belanja pegawai yaitu paling tinggi 30% dari belanja APBD di luar gaji guru melalui TKD, APIP untuk pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat antara 0,30-0,90%, Pengembangan kompetensi ASN sebesar 0,30%

dan bagi hasil pajak daerah dengan memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah.

6) Melakukan efisiensi belanja.
7) Memberikan bantuan-bantuan khususnya keuangan dalam bentuk subsidi, hibah dan bantuan sosial.

Dalam perhitungan kerangka pendanaan, pemerintah daerah melakukan perhitungan rencana belanja periodik yang wajib dan mengikat yang merupakan pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya. Komponen belanja wajib dan mengikat ini terdiri dari belanja operasi yang mencakup belanja pegawai dan lainnya serta pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang dan penyertaan modal dengan uraian sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai diperuntukan untuk belanja gaji dan tunjangan termasuk gaji dan tunjangan ketiga belas dan ke empat belas, belanja tambahan penghasilan PNS, insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, belanja operasional KDH/WKDH dan Pimpinan DPRD, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan keselamatan kerja, tunjangan DPRD, tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD non sertifikasi termasuk Belanja Pegawai lainnya yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang sebelumnya menjadi bagian dari Belanja Langsung. Disamping itu juga akan dialokasikan pembayaran gaji ketiga belas dan ke empat belas serta pengangkatan CPNSD maupun PPPK.
2) Perhitungan belanja insentif pemungutan pajak daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Alokasi anggaran paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta

PNSD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013.

4) Penganggaran tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD disesuaikan dengan alokasi penerimaan dari Pemerintah Pusat.
5) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
6) Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, merupakan satu kesatuan jenis belanja, pengalokasiannya pada pos Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun dalam pos Sekretariat Daerah berpedoman pada PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7) Pemberian honorarium bagi PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan, dan kewajaran penerimaan penghasilan.

Berdasarkan proyeksi tahun 2026, total Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara diperkirakan mencapai Rp3,19 triliun, relatif stabil dibanding APBD 2025 namun lebih rendah dibanding realisasi 2024 yang mencapai Rp3,54 triliun. Struktur belanja ini mengalami pergeseran penting dari sisi komposisi maupun arah pertumbuhan.

Komponen Belanja terbesar tetap Belanja Operasi yakni sebesar Rp2,12 triliun atau lebih dari 65% total Belanja, dengan pertumbuhan rata-rata 3,96%. Di dalamnya, Belanja Pegawai mencapai Rp992,97 miliar, relatif stagnan dibanding tahun sebelumnya (-0,28%), sementara Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1,07 triliun tumbuh cukup kuat (9,11%), sehingga tetap menjadi pendorong utama belanja rutin daerah. Belanja Hibah turun signifikan (-11,97%), sedangkan Belanja Subsidi walaupun kecil nilainya, diproyeksikan meningkat tajam secara persentase.

Sementara itu, Belanja Modal diproyeksikan hanya Rp388,57 miliar, turun cukup besar dibanding 2024. Pos belanja jalan, irigasi, dan jaringan yang sebelumnya melonjak pada 2024, turun tajam pada 2026. Hanya beberapa sub-pos seperti belanja gedung/bangunan dan aset lainnya yang masih menunjukkan pertumbuhan positif. Hal ini mengindikasikan keterbatasan ruang fiskal untuk investasi infrastruktur baru, dengan kecenderungan fokus pada pemeliharaan dan penyelesaian proyek berjalan.

Untuk belanja tak terduga (BTT), proyeksi 2026 sebesar Rp25 miliar, jauh lebih tinggi dibanding realisasi 2024 (Rp7,27 miliar), namun secara tren turun dibanding Perubahan APBD 2025. Alokasi BTT yang cukup besar mencerminkan kesiapan daerah menghadapi risiko darurat dan kontinjensi, meskipun penggunaannya tetap perlu diawasi ketat.

Di sisi lain, belanja transfer ke kabupaten/kota mencapai Rp659,31 miliar, naik cukup signifikan (8,69%). Komponen ini memperkuat fungsi provinsi dalam mendukung pemerataan pembangunan lintas wilayah, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada mekanisme berbasis kinerja dan sinergi perencanaan antartingkatan pemerintahan.

Secara keseluruhan, proyeksi belanja 2026 menunjukkan pola pengetatan fiskal dengan penurunan alokasi belanja modal, sementara belanja operasi tetap dominan. Meskipun total belanja relatif stabil, arah kebijakan belanja cenderung defensif: menjaga layanan dasar, menekan

belanja hibah, dan memperkuat transfer ke daerah. Tantangan utamanya ialah memastikan bahwa meski ruang belanja modal menyempit, investasi publik yang strategis tetap berjalan agar tidak menghambat percepatan pembangunan jangka menengah.

Adapun proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2026

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi anggaran (%)	2025			2026	Rata-Rata Pertumbuhan Proyeksi (%)
		2023	2024		APBD	PAPBD	Bertambah/ Berkurang	Proyeksi	
5	**BELANJA**	**3.242.315.178.036**	**3.537.995.918.025**	**9,1**	**3.191.861.242.086**	**2.990.338.927.718**	**(201.522.314.367)**	**3.197.473.384.854**	**6,93**
5.1	**Belanja Operasi**	**2.042.445.525.499**	**2.302.793.344.612**	**12,7**	**2.118.978.767.788**	**2.043.594.981.044**	**(75.383.786.743)**	**2.124.590.910.556**	**3,96**
5.1.01	Belanja pegawai	767.029.049.418	864.391.833.545	12,7	987.362.422.224	995.756.968.881	8.394.546.657	992.974.564.992	-0,28
5.1.02	Belanja barang dan jasa	1.097.028.389.769	1.193.288.127.010	8,8	1.069.745.900.466	980.438.079.421	(89.307.821.045)	1.069.745.900.466	9,11
5.1.04	Belanja subsidi	16.513.140.465	19.787.303.700	19,8	3.951.474.387	630.912.032	(3.320.562.355)	3.951.474.387	526,31
5.1.05	Belanja hibah	161.141.184.381	222.096.876.570	37,8	54.967.470.711	62.445.070.711	7.477.600.000	54.967.470.711	-11,97
5.1.06	Belanja bantuan sosial	733.761.466	3.229.203.787	340,1	2.951.500.000	4.323.950.000	1.372.450.000	2.951.500.000	-31,74
5.2	**Belanja Modal**	**651.639.401.736**	**703.597.740.636**	**8,0**	**388.573.820.210**	**283.407.046.572**	**(105.166.773.638)**	**388.573.820.210**	**37,11**
5.2.01	Belanja tanah	30.379.184.731	36.362.332.622	19,7	7.363.881.580	-	(7.363.881.580)	7.363.881.580	#DIV/0!
5.2.02	Belanja peralatan dan mesin	118.377.089.281	162.386.608.538	37,2	64.919.788.838	76.142.712.249	11.222.923.411	64.919.788.838	-14,74
5.2.03	Belanja gedung dan bangunan	345.002.801.783	208.341.017.057	-39,6	166.883.798.987	136.239.310.694	(30.644.488.293)	166.883.798.987	22,49
5.2.04	Belanja jalan, irigasi, dan jaringan	155.513.502.679	292.653.376.604	88,2	144.932.241.237	66.484.739.061	(78.447.502.176)	144.932.241.237	117,99
5.2.05	Belanja aset tetap lainnya	1.904.007.132	743.850.360	-60,9	3.884.109.568	4.200.284.568	316.175.000	3.884.109.568	-7,53
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	462.816.130	3.110.555.455	572,1	590.000.000	340.000.000	(250.000.000)	590.000.000	73,53
5.3	**Belanja Tak Terduga**	**9.451.453.256**	**7.277.240.648**	**-23,0**	**25.000.000.000**	**56.756.762.568**	**31.756.762.568**	**25.000.000.000**	**-55,95**
5.3.01	Belanja Tak Terduga	9.451.453.256	7.277.240.648	-23,0	25.000.000.000	56.756.762.568	31.756.762.568	25.000.000.000	-55,95
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**538.778.797.545**	**524.327.592.129**	**-2,7**	**659.308.654.088**	**606.580.137.534**	**(52.728.516.554)**	**659.308.654.088**	**8,69**

Sumber : LRA 2023-2024 & APBD 2025, diproyeksikan

C. Arah Kebijakan Pembiayaan

Berdasarkan data proyeksi pembiayaan tahun 2026, kondisi fiskal Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan pola yang relatif terkendali dengan fokus pada pemanfaatan saldo anggaran sebelumnya. Total pembiayaan diperkirakan mencapai Rp244,74 miliar, meningkat tajam dibanding realisasi tahun 2024 sebesar Rp124,74 miliar. Penerimaan pembiayaan sepenuhnya bersumber dari penggunaan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun anggaran sebelumnya, yang pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp269,74 miliar, atau tumbuh lebih dari 400% dibanding 2024. Kenaikan ini mencerminkan strategi pemerintah daerah untuk memanfaatkan cadangan kas guna menutup potensi defisit dan mendukung kesinambungan program prioritas.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan diperkirakan stabil pada Rp25 miliar, sama seperti tahun 2024 maupun APBD 2025, dengan seluruhnya dialokasikan untuk penyertaan modal daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan investasi pemerintah daerah melalui penyertaan modal tidak mengalami peningkatan signifikan, melainkan dipertahankan pada level moderat untuk menjaga keseimbangan fiskal.

Secara struktural, pembiayaan tahun 2026 berperan sebagai instrumen penyeimbang dalam APBD, karena penerimaan pembiayaan (SiLPA) jauh lebih besar dibanding pengeluaran, sehingga berkontribusi positif terhadap penutupan gap antara pendapatan dan belanja. Jika dibandingkan dengan 2024, terdapat lonjakan signifikan dalam pemanfaatan SiLPA, yang menandakan adanya strategi konsolidasi fiskal dan pemanfaatan cadangan untuk menopang kebutuhan anggaran di tengah potensi perlambatan pertumbuhan pendapatan. Dengan demikian, pembiayaan tahun 2026 di Kalimantan Utara diposisikan bukan sebagai ekspansi baru, melainkan sebagai mekanisme stabilisasi fiskal agar APBD tetap berimbang dan program pembangunan tetap berjalan.

Untuk memperkecil nilai SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), pemerintah daerah akan menempuh beberapa kebijakan

yang berorientasi pada optimalisasi perencanaan, penyerapan anggaran, dan kualitas belanja, yaitu:

1. Peningkatan akurasi perencanaan anggaran.
2. Percepatan proses pengadaan barang/jasa.
3. Penguatan kapasitas perangkat daerah.
4. Monitoring dan evaluasi berkala.
5. Peningkatan kualitas belanja.
6. Pengendalian belanja yang tidak prioritas.
7. Pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2026

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi anggaran (%)	2025			Proyeksi	Rata-Rata Pertumbuhan Proyeksi (%)
		2023	2024		APBD	PAPBD	Bertambah/ Berkurang	2026	
6	**PEMBIAYAAN**	**301.046.143.553**	**124.743.726.516**	**-58,6**	**244.737.843.000**	**27.571.341.541**	**(217.166.501.459)**	**244.737.843.000**	**787,65**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**316.046.143.553**	**149.743.726.516**	**-52,6**	**269.737.843.000**	**52.571.341.541**	**(217.166.501.459)**	**269.737.843.000**	**413,09**
6.1.01	Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	316.046.143.553	149.743.726.516	-52,6	269.737.843.000	52.571.341.541	(217.166.501.459)	269.737.843.000	413,09
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**15.000.000.000**	**25.000.000.000**	**66,7**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**	**-**	**25.000.000.000**	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000	25.000.000.000	66,7	25.000.000.000	25.000.000.000	-	25.000.000.000	**0,00**

Sumber : LRA 2023-2024 & APBD 2025, diproyeksikan

3.2.3. Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2026

Sesui dengan perkembangan kondisi perekonomian nasional dan Kalimantan Utara yang telah dijelaskan pada subbab arah kebijakan ekonomi daerah, proyeksi Penerimaan daerah serta pengeluaran daerah diproyeksikan terjadi peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,87 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran diproyeksikan terjadi kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,87 persen.

Proyeksi tahun 2026 menunjukkan kondisi relatif stabil dengan pendapatan Rp2,95 triliun, belanja Rp3,19 triliun, dan penerimaan pembiayaan dari SiLPA sebesar Rp269,7 miliar sebagai penutup defisit. Dari sisi proporsi terhadap APBD 2026, struktur Pendapatan Daerah masih didominasi Pendapatan Transfer (sekitar 65–66% dari total pendapatan), sementara PAD menyumbang sekitar 34% dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sangat kecil (<1%). Dibandingkan dengan tahun 2024, PAD mengalami sedikit peningkatan (dari Rp1,02 triliun menjadi Rp1,03 triliun), namun Pendapatan Transfer justru menurun, sehingga proporsi PAD terhadap APBD sedikit naik meski secara nominal tidak signifikan.

Belanja Daerah tahun 2026 diproyeksikan relatif menurun jika dibandingkan dengan realisasi 2024, terutama pada pos Belanja Modal yang turun drastis. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan ruang fiskal untuk investasi baru. Pada Belanja Daerah, komponen Belanja Operasi tetap mendominasi dengan lebih dari 65% dari total, Belanja Modal sekitar 12%, Belanja Transfer ±20%, dan Belanja Tidak Terduga relatif kecil tetapi meningkat.

Sementara itu, Penerimaan Pembiayaan berperan lebih besar dalam APBD 2026 dibanding 2024, menutup gap antara pendapatan dan belanja. Hal ini mencerminkan strategi pengelolaan defisit melalui pemanfaatan saldo anggaran (SiLPA). Secara keseluruhan, dibandingkan realisasi 2024 yang ekspansif, proyeksi 2026 menunjukkan pola anggaran yang lebih hati-hati dan terkendali, dengan ketergantungan tinggi pada

transfer pusat dan pembiayaan sebagai penyeimbang. Perubahan pada APBD 2025 menjadi titik balik penting karena menandai penurunan asumsi pendapatan, sehingga arah kebijakan fiskal 2026 lebih menekankan konsolidasi ketimbang ekspansi.

Gambaran realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah tahun 2023 dan 2024 yang menjadi pertimbangan untuk proyeksi tahun 2025 dan 2026 dirinci pada tabel di bawah.

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Pada Tahun 2023-2026

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Aanggaran (%)	2025			2026	Rata-Rata Pertumbuhan Proyeksi (%)
		2023	2024		APBD	PAPBD	Bertambah/ Berkurang	Proyeksi	
4	**PENDAPATAN**	**3.091.012.760.999**	**3.435.173.229.897**	**11,1**	**2.947.123.399.085**	**2.962.767.585.544**	**15.644.186.459**	**2.952.735.541.854**	**-0,34**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**980.136.675.968**	**1.016.124.517.294**	**3,7**	**1.026.394.628.085**	**999.350.336.210**	**-27.044.291.875**	**1.032.006.770.854**	**3,27**
4.1.01	Pajak Daerah	717.253.715.401	761.218.800.067	6,1	752.547.239.356	687.402.239.356	-65.145.000.000	758.159.382.125	10,29
4.1.02	Retribusi Daerah	17.404.890.968	10.768.808.538	-38,1	12.522.785.602	12.522.785.602	0	12.522.785.602	0,00
4.1.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	10.114.672.311	11.371.469.794	12,4	11.371.469.794	9.472.177.919	-1.899.291.875	11.371.469.794	20,05
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	235.363.397.288	232.765.438.895	-1,1	249.953.133.333	289.953.133.333	40.000.000.000	249.953.133.333	-13,80
4.2	**Pendapatan transfer**	**2.104.954.266.065**	**2.417.275.881.907**	**14,8**	**1.920.378.771.000**	**1.899.987.154.000**	**-20.391.617.000**	**1.920.378.771.000**	**1,07**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.104.954.266.065	2.417.275.881.907	14,8	1.920.378.771.000	1.899.987.154.000	-20.391.617.000	1.920.378.771.000	1,07
4.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**5.921.818.966**	**1.772.830.696**	**-70,1**	**350.000.000**	**63.430.095.334**	**63.080.095.334**	**350.000.000**	**-99,45**
4.3.01	Pendapatan hibah	5.546.233.000	379.620.000	-93,2	350.000.000	63.430.095.334	63.080.095.334	350.000.000	-99,45
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya	375.585.966	1.393.210.696	270,9	-	-	-	-	-
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**316.046.143.553**	**149.743.726.516**	**-52,6**	**269.737.843.000**	**52.571.341.541**	**-217.166.501.459**	**269.737.843.000**	**413,09**
6.1.01	Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	316.046.143.553	149.743.726.516	-52,6	269.737.843.000	52.571.341.541	-217.166.501.459	269.737.843.000	413,09

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Aanggaran (%)	2025			2026	Rata-Rata Pertumbuhan Proyeksi (%)
		2023	2024		APBD	PAPBD	Bertambah/ Berkurang	Proyeksi	
	TOTAL PENERIMAAN	**3.407.058.904.552**	**3.584.916.956.414**	**5,2**	**3.216.861.242.085**	**3.015.338.927.085**	**-201.522.315.000**	**3.222.473.384.854**	**6,87**
5	**BELANJA**	**3.242.315.178.036**	**3.537.995.918.025**	**9,1**	**3.191.861.242.086**	**2.990.338.927.718**	**-201.522.314.367**	**3.197.473.384.854**	**6,93**
5.1	**Belanja Operasi**	**2.042.445.525.499**	**2.302.793.344.612**	**12,7**	**2.118.978.767.788**	**2.043.594.981.044**	**-75.383.786.743**	**2.124.590.910.556**	**3,96**
5.1.01	Belanja pegawai	767.029.049.418	864.391.833.545	12,7	987.362.422.224	995.756.968.881	8.394.546.657	992.974.564.992	-0,28
5.1.02	Belanja barang dan jasa	1.097.028.389.769	1.193.288.127.010	8,8	1.069.745.900.466	980.438.079.421	-89.307.821.045	1.069.745.900.466	9,11
5.1.03	Balanja bunga	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!
5.1.04	Belanja subsidi	16.513.140.465	19.787.303.700	19,8	3.951.474.387	630.912.032	-3.320.562.355	3.951.474.387	526,31
5.1.05	Belanja hibah	161.141.184.381	222.096.876.570	37,8	54.967.470.711	62.445.070.711	7.477.600.000	54.967.470.711	-11,97
5.1.06	Belanja bantuan sosial	733.761.466	3.229.203.787	340,1	2.951.500.000	4.323.950.000	1.372.450.000	2.951.500.000	-31,74
5.2	**Belanja Modal**	**651.639.401.736**	**703.597.740.636**	**8,0**	**388.573.820.210**	**283.407.046.572**	**-105.166.773.638**	**388.573.820.210**	**37,11**
5.2.01	Belanja tanah	30.379.184.731	36.362.332.622	19,7	7.363.881.580	0	-7.363.881.580	7.363.881.580	#DIV/0!
5.2.02	Belanja peralatan dan mesin	118.377.089.281	162.386.608.538	37,2	64.919.788.838	76.142.712.249	11.222.923.411	64.919.788.838	-14,74
5.2.03	Belanja gedung dan bangunan	345.002.801.783	208.341.017.057	-39,6	166.883.798.987	136.239.310.694	-30.644.488.293	166.883.798.987	22,49
5.2.04	Belanja jalan, irigasi, dan jaringan	155.513.502.679	292.653.376.604	88,2	144.932.241.237	66.484.739.061	-78.447.502.176	144.932.241.237	117,99
5.2.05	Belanja aset tetap lainnya	1.904.007.132	743.850.360	-60,9	3.884.109.568	4.200.284.568	316.175.000	3.884.109.568	-7,53
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	462.816.130	3.110.555.455	572,1	590.000.000	340.000.000	-250.000.000	590.000.000	73,53
5.3	**Belanja Tak Terduga**	**9.451.453.256**	**7.277.240.648**	**-23,0**	**25.000.000.000**	**56.756.762.568**	**31.756.762.568**	**25.000.000.000**	**-55,95**
5.3.01	Belanja Tak Terduga	9.451.453.256	7.277.240.648	-23,0	25.000.000.000	56.756.762.568	31.756.762.568	25.000.000.000	-55,95
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**538.778.797.545**	**524.327.592.129**	**-2,7**	**659.308.654.088**	**606.580.137.534**	**-52.728.516.554**	**659.308.654.088**	**8,69**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	368.800.299.772	336.426.911.141	-8,8	436.789.137.534	-	-436.789.137.534	436.789.137.534	-

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Aanggaran (%)	2025			2026	Rata-Rata Pertumbuhan Proyeksi (%)
		2023	2024		APBD	PAPBD	Bertambah/ Berkurang	Proyeksi	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	169.978.497.773	187.900.680.988	10,5	222.519.516.554	-	-222.519.516.554	222.519.516.554	-
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**15.000.000.000**	**25.000.000.000**	**66,7**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**	**-**	**25.000.000.000**	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000	25.000.000.000	66,7	25.000.000.000	25.000.000.000	-	25.000.000.000	0,00
	TOTAL PENGELUARAN	**3.257.315.178.036**	**3.562.995.918.025**	**9,4**	**3.216.861.242.086**	**3.015.338.927.718**	**-201.522.314.367**	**3.222.473.384.854**	**6,87**

Sumber : LRA 2023-2024 & APBD 2025, diproyeksikan

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Telaahan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 menjadi pedoman pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun mendatang. Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**". Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*.



Gambar 4.1.
Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029
Sumber: Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada pencapaian sasaran pembangunan nasional, sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 4.1
Sasaran Pembangunan Nasional

No.	Uraian
1	**Meningkatkan Pendapatan per Kapita Menuju Setara Negara Maju**
	a) Penumbuhan ekonomi dan 5,05 (2024) menjadi 5,3 (2025) dan menuju 8% (2029) b) GNI per kapita meningkat dari 4.879 USD (2023) menjadi 5.410 USD (2025) dan 8.000 USD (2029) c) Kontribusi PDB Maritim meningkat dari 7,9% (2022) menjadi 8,1% (2025) dan 9,1% (2029) d) Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari 18,67% (2023) meniadi 20,8% (2025) dan 21,9% (2029)
2	**Kepemimpinan dan Pengaruh Indonesia di Dunia Internasional Meningkat**
	Global Power Index meningkat dari peringkat 34 (2023) menjadi peringkat 33 (2025) dan perangkat 29 (2029)
3	**Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang**
	Tingkat Kemiskinan turun dari 9,03% (Mar 2024) menjadi 7,0-8% (2025) dan 4,5-5,0% (2029) serta kemiskinan ekstrem (2,15 PPP) hingga <0,5 (2026)
4	**Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat**
	Indeks Modal Manusia (lMM) meningkat dari 0,54 (2020) menjadi 0,56 (2025) dan 0,59 (2029)
5	**Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission**
	Penurunan intensitas emisi GRK dari 34,09% (2022) menjadi 35,53% (2025) dan 45,17% (2029) Indeks Kualitas Lingkunqan Hidup meningkat dari 72,54 (2023) menjadi 76,49 (2025) dan 77,20 (2029)

Sumber: Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025–2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025–2045. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025–2045. Dalam RPJPN Tahun 2025–2045 telah dirumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan. Misi pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan.

4.1.2. Telaahan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur bertransformasi menjadi visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029. Perumusan visi juga mempertimbangkan keterkaitannya dengan visi RPJPD dan visi RPJMN. Perlunya keterkaitan tersebut dalam rangka membangun keselarasan antar perencanaan berjangka panjang dan menengah, serta keselarasan antara perencanaan pusat dan daerah. Visi pembangunan jangka menengah akan mengarahkan berbagai agenda pembangunan agar mencapai kondisi yang telah ditetapkan selama lima tahun mendatang. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029 yaitu:

Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

- *Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan*

Visi RPJMD tersebut selaras dengan visi pembangunan jangka panjang daerah. Visi tersebut mempertegas posisi pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 sebagai bagian dari periode pertama pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 yang memasuki pentahapan pembangunan berupa memperkokoh fondasi transformasi. Visi RPJMD tidak kalah penting juga memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi RPJMN, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”. Penjelasan kata kunci/kondisi di dalam visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara yaitu:

- **Fondasi Transformasi yang Kokoh:** merupakan arah kebijakan periode pertama dalam rangkaian periode pembangunan jangka

panjang tahun 2025-2045. Perwujudan fondasi transformasi dicapai melalui pelayanan dasar yang merata dan berkualitas, pengembangan ekonomi yang bernilai tambah dan berkelanjutan, serta ditopang tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan stabilitas wilayah yang terjaga.

- **Beranda Depan NKRI:** merupakan letak geografis Provinsi Kalimantan Utara yang berada di wilayah terdepan NKRI dan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia maupun kawasan Asia Tenggara pada umumnya. Letak geografis ini sekaligus menjadi potensi dan tantangan geopolitik dan geoekonomi yang perlu dikelola dengan baik melalui tata kelola perbatasan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- **Maju:** kondisi pembangunan yang diharapkan tercapai yaitu kemajuan di segala bidang. Kemajuan memiliki arti bahwa kinerja pembangunan semakin baik atau progresif dari tahun ke tahun, sehingga masyarakat semakin menikmati manfaat nyata dari pembangunan. Maju juga diarahkan untuk tercapainya daerah yang berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil.
- **Makmur:** kondisi yang tercipta melalui kinerja pembangunan yang semakin baik sehingga mencapai kondisi masyarakat yang tercukupi kebutuhan ekonomi dan sosial-budayanya. Makmur menandakan masyarakat yang semakin sejahtera atau lepas dari garis kemiskinan, serta tidak kalah penting masyarakat yang bahagia lahir dan batin. Kemakmuran merupakan hasil kolaborasi seluruh bidang pembangunan, yaitu ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat, pembangunan SDM dan sosial agar menghasilkan SDM yang unggul serta terpenuhi jaminan dan perlindungan sosialnya, serta tata kelola yang baik untuk menopang efektivitas kinerja berbagai bidang pembangunan untuk menuju kemakmuran.
- **Berkelanjutan:** kondisi yang tercipta sebagai bentuk komitmen Provinsi Kalimantan Utara untuk mencapai tujuan pembangunan

berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Berkelanjutan merupakan kondisi dari keselarasan pembangunan antara orientasi ekonomi, sosial dan lingkungan yang ditopang dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil pembangunan tidak hanya untuk generasi saat ini, sekaligus untuk generasi masa depan. Berbagai agenda pembangunan untuk mendukung pencapaian kondisi berkelanjutan, antara lain melalui pengembangan ekonomi hijau.

Perwujudan visi RPJMD dicapai melalui pelaksanaan misi pembangunan. Misi merupakan rumusan umum tentang upaya mencapai visi. Misi RPJMD juga transformasi dari misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang secara substansi selaras dengan misi pembangunan jangka panjang daerah. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- **Misi 1 Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan**

  Misi transformasi sosial yang inklusif dan berkeadilan bertujuan untuk membangun masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera dalam mencapai kemajuan dan kemakmuran yang berkelanjutan. Transformasi sosial merupakan bagian dari pembangunan beranda depan negara dengan pendekatan *human security* dan *soft border*. *Human security* berfokus pada upaya kesejahteraan dan keselamatan manusia sebagai individu, sedangkan *soft border* berfokus pada pengelolaan perbatasan secara flexible untuk mempermudah hubungan lintas batas tanpa mengorbankan keamanan.

  Prinsip inklusif dan berkeadilan menjadi dasar dalam penyelenggaraan transformasi sosial. Prinsip tersebut merujuk pada perlakuan yang adil dan setara pada semua kelompok masyarakat termasuk perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal serta seluruh wilayah yang ada di Provinsi Kalimantan

Utara untuk mendapatkan akses terhadap peluang, sumber daya, dan pengambilan keputusan. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan besar transformasi sosial yakni mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan dalam masyarakat.

Secara operasional, upaya transformasi sosial diwujudkan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial yang adaptif. Upaya peningkatan layanan pendidikan diantaranya peningkatan partisipasi pendidikan, peningkatan kualitas satuan pendidikan, peningkatan jumlah dan kompetensi pendidik, serta pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas. Upaya peningkatan layanan kesehatan diantaranya perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, pemenuhan tenaga kesehatan, serta peningkatan fasilitas kesehatan yang bermutu. Sedangkan upaya perlindungan sosial adaptif diantaranya pengentasan kemiskinan terutama pada daerah 3TP, perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, disabilitas, dan sebagainya, serta peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

- **Misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan**

  Misi transformasi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi besar untuk mengembangkan perekonomian daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah serta posisi geografis yang strategis. Dalam proses ini, indikator laju pertumbuhan ekonomi menjadi acuan utama dalam mengukur keberhasilan transformasi, dengan tetap menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh

karena itu, pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru perlu diutamakan demi menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi sumber daya alam.

Langkah nyata yang dapat dilakukan meliputi penguatan sektor-sektor unggulan seperti pertanian berkelanjutan, perikanan tangkap dan budidaya ramah lingkungan, serta pariwisata alam berbasis komunitas. Selain itu, pengembangan kawasan industri berbasis energi terbarukan seperti tenaga air dan surya harus didorong sebagai bagian dari implementasi ekonomi hijau. Di wilayah pesisir dan kepulauan, konsep ekonomi biru dapat diterapkan melalui pengelolaan laut secara berkelanjutan, peningkatan produktivitas sektor kelautan, dan pelestarian ekosistem laut. Transformasi ini harus diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga untuk menciptakan struktur ekonomi yang adil dan tidak eksploitatif.

Pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara harus menekankan pentingnya pemerataan pendapatan sebagai indikator keberhasilan sosial. Ketimpangan ekonomi antara daerah pedalaman dan perkotaan harus ditekan melalui pemerataan infrastruktur, akses pendidikan, serta pelibatan aktif masyarakat lokal dalam rantai nilai ekonomi. Pemerintah daerah perlu menggandeng sektor swasta yang berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, sekaligus menyediakan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Dengan cara ini, transformasi ekonomi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan angka, tetapi juga berdampak nyata pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Partisipasi masyarakat menjadi pilar penting dalam memastikan transformasi ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. Pelibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan,

dan evaluasi kebijakan ekonomi akan memperkuat akuntabilitas dan mendorong rasa kepemilikan terhadap proses pembangunan. Dengan kolaborasi antarsektor dan dukungan pada prinsip pembangunan hijau, biru, serta keadilan sosial, Provinsi Kalimantan Utara berpeluang besar menjadi contoh sukses dalam mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan, tangguh, dan berkeadilan di Indonesia.

- **Misi 3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif**

  Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi tata kelola yang dimaksud mencakup perubahan mendasar dalam cara pemerintah daerah bekerja, mulai dari penguatan sistem birokrasi yang transparan hingga penerapan prinsip *good governance* dalam setiap lini pelayanan publik. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mampu menjadi fasilitator pembangunan yang profesional, bersih, dan akuntabel.

  Kolaborasi menjadi kunci utama dalam menjalankan transformasi ini. Pemerintah daerah tidak lagi bekerja secara eksklusif, melainkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, maupun lembaga internasional. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan untuk membangun sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berdampak luas. Dalam konteks ini, partisipasi publik juga akan diperkuat agar pembangunan benar-benar menjawab aspirasi masyarakat.

  Inovasi menjadi elemen strategis yang melengkapi transformasi tata kelola tersebut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong pemanfaatan teknologi digital dan sistem kerja

baru untuk meningkatkan kualitas layanan publik mengingat kondisi geografi yang cukup sulit diakses. Inovasi ini juga mencakup cara-cara baru dalam menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks. Dengan mengedepankan kolaborasi dan inovasi, Kalimantan Utara dalam tata kelola pemerintahan diharapkan mampu mewujudkan visi jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur dan berkelanjutan. Selain itu, juga sejalan dengan arah pembangunan nasional.

- **Misi 4 Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI**

  Misi memantapkan supremasi hukum dan stabilitas daerah sebagai beranda depan NKRI merupakan salah satu kunci dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi yang berada di kawasan perbatasan negara. Misi ini berfokus pada memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi di tingkat regional Asia Tenggara dan membangun kekuatan pertahanan di kawasan perbatasan. Misi ini menjadi landasan transformasi untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Landasan transformasi tersebut dibentuk melalui perwujudan supremasi hukum, stabilitas ekonomi daerah, kohesivitas sosial dan keamanan, serta demokrasi lokal yang semakin substantif untuk mengawal pembangunan agar berorientasi pada kemakmuran. Landasan tersebut sekaligus sebagai perwujudan beranda depan NKRI yang memiliki stabilitas wilayah terjaga untuk menopang ketahanan nasional.

  Provinsi Kalimantan Utara sebagai beranda depan NKRI memberikan dukungan dan fasilitasi tata kelola perbatasan berbasis *soft border* yang kolaboratif. Hal tersebut mendorong perlunya peningkatan kemitraan strategis di dalam dan luar negeri,

stabilitas ekonomi daerah, serta peningkatan stabilitas wilayah dan demokrasi lokal berbasis supremasi hukum. Kolaborasi antarpihak dan pemangku kepentingan pada tingkat nasional dan provinsi diperlukan untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sebagai beranda depan NKRI.

- **Misi 5 Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**

  Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu provinsi di perbatasan utara Indonesia memiliki peran vital dalam menjaga integrasi nasional serta mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi menjadi pilar penting untuk memastikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berakar pada kearifan lokal.

  Misi memantapkan ketahanan sosial budaya diarahkan pada penguatan identitas lokal dan harmoni sosial di tengah masyarakat yang multietnis dan multikultural. Pelestarian adat istiadat, bahasa daerah, dan nilai-nilai kearifan lokal menjadi fondasi dalam memperkuat karakter daerah dan memperkuat jati diri masyarakat Kalimantan Utara. Pemerintah daerah dapat mendorong revitalisasi budaya lokal melalui pendidikan, pengembangan komunitas budaya, serta dukungan terhadap lembaga adat dan kesenian tradisional. Pada sisi lain, pembangunan sosial juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kohesi sosial melalui pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk kelompok rentan. Hal ini dilandasi oleh prinsip partisipatif dan kolaboratif untuk mendorong pembangunan yang menyatu dengan kebutuhan dan potensi sosial masyarakat setempat.

  Ketahanan ekologi menjadi elemen krusial mengingat Provinsi Kalimantan Utara merupakan wilayah dengan kekayaan

biodiversitas tinggi serta hutan tropis yang luas. Oleh karena itu, pembangunan ke depan menekankan pada perlindungan kawasan hutan, konservasi lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari. Upaya penguatan ketahanan ekologi difokuskan pada pembangunan berbasis ekoregion, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengendalian kerusakan lingkungan, serta penguatan tata kelola sumber daya alam yang transparan dan akuntabel. Pemanfaatan potensi ekonomi berbasis ekowisata dan kehutanan sosial juga akan ditingkatkan untuk memperkuat ekonomi lokal sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi di Kalimantan Utara harus diletakkan dalam kerangka pembangunan yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis wilayah. Sinergi antar sektor dan antar pelaku pembangunan menjadi kunci, di mana perencanaan pembangunan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekologis secara seimbang. Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan, informasi, dan teknologi yang relevan juga menjadi prasyarat agar transformasi pembangunan berjalan adil dan berkelanjutan.

- **Misi 6 Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan**

  Misi memantapkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan menjadi fondasi yang sangat penting dalam mendorong terwujudnya transformasi sosial, ekonomi maupun tata kelola. Dalam konteks ini, semangat pembangunan wilayah harus dilaksanakan secara inklusif dan berkualitas di seluruh penjuru Provinsi Kalimantan Utara, tanpa terkecuali meliputi wilayah daratan, daerah perbatasan antarnegara dan antardaerah, serta kawasan kepulauan dan ruang laut yang selama ini cenderung terpinggirkan.

  Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah menjadi faktor pengungkit yang sangat krusial dalam mendukung

pembangunan wilayah yang semakin merata dan berkeadilan. Konektivitas yang baik, baik dalam bentuk jaringan transportasi darat, laut, maupun udara, menjadi prasyarat penting untuk membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas barang dan jasa, serta mempercepat arus informasi dan inovasi. Aksesibilitas yang meningkat memungkinkan wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan, seperti daerah perbatasan, kawasan pedalaman, dan wilayah kepulauan, untuk terhubung secara lebih efektif dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan layanan publik.

Pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan juga diarahkan untuk memperkuat keterkaitan dan sinergi antara kawasan pedesaan dan perkotaan, sehingga tercipta integrasi wilayah yang saling mendukung dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berfokus pada pusat-pusat pertumbuhan saja, melainkan juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

- **Misi 7 Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan.**

  Dalam implementasinya, pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan juga perlu disertai dengan pembangunan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi penopang keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Karena, ketersediaan sarana prasarana yang memadai menjadi prasyarat dasar, dapat dikatakan pembangunan benar-benar merata dan berkeadilan. Selain itu, misi ini juga menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan implementasi dari transformasi pembangunan.

  Pembangunan sarana dan prasarana yang hanya berorientasi pada kuantitas tanpa memperhatikan kualitas akan

rentan terhadap kerusakan, ketidakefisienan, bahkan membebani anggaran daerah untuk pemeliharaan di masa mendatang. Oleh karena itu, upaya memantapkan sarana dan prasarana harus diarahkan pada pencapaian standar mutu yang tinggi, maupun fungsionalitasnya bagi masyarakat luas. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan juga harus berorientasi pada kelestarian lingkungan, menjadi semakin relevan. Kondisi tersebut dengan mempertimbangkan tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang semakin mengancam. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, maka pembangunan yang dilakukan diharapkan akan mampu memberikan manfaat jangka panjang, memperkuat daya saing daerah, serta mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik tanpa mengorbankan sumber daya generasi mendatang.

- **Misi 8 Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas**

  Misi ini memastikan bahwa pembangunan Kalimantan Utara berlangsung secara berkelanjutan, terpadu, dan selaras dengan visi misi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dengan menjamin adanya kesinambungan berbagai program pembangunan lintas sektor yang tidak hanya menekankan pencapaian internal semata, tetapi juga berdampak terhadap pembangunan nasional. Misi ini mendorong integrasi antara pembangunan provinsi dengan Pembangunan di tingkat kabupaten/kota dan nasional yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan hidup, agar Kalimantan Utara dapat menjadi provinsi yang kokoh sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur dan berkelanjutan.

Misi RPJMD sebagai agenda besar pembangunan harus mendukung pelaksanaan misi RPJMN. Misi RPJMN yang disebut sebagai

Asta Cita sekaligus merupakan prioritas nasional pembangunan jangka menengah. Keterkaitan antara misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dengan Asta Cita sebagai berikut:

Tabel 4.2
Keterkaitan Asta Cita RPJMN dan Misi RPJMD

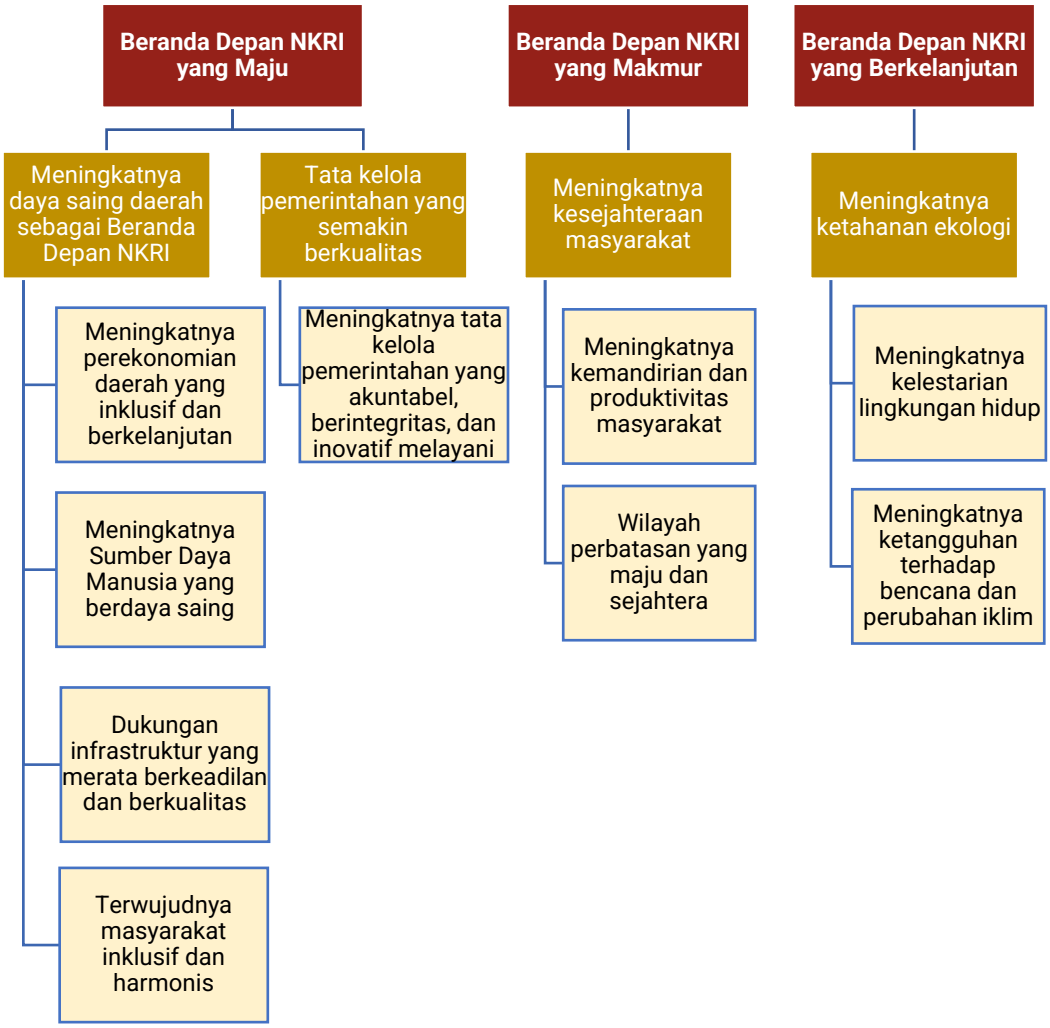
Asta Cita (Misi RPJMN Tahun 2025-2029)	Misi RPJMD Tahun 2025-2029
Asta Cita 1: Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	**Misi 4** Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI
Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.	**Misi 4** Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI **Misi 2** Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan
Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	**Misi 2** Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan **Misi 7** Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan
Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.	**Misi 1** Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan
Asta Cita 5: Melanjutakan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	**Misi 2** Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan
Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	**Misi 2** Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan **Misi 6** Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan
Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.	**Misi 3** Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif **Misi 4** Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI **Misi 8** Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas

Asta Cita (Misi RPJMN Tahun 2025-2029)	Misi RPJMD Tahun 2025-2029
Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	**Misi 5** Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalinantan Utara Tahun 2025-2029

Keterkaitan antara Asta Cita atau Prioritas Nasional di dalam RPJMN dengan misi RPJMD merupakan langkah penting untuk membangun keselarasan agenda pembangunan antara pusat dan daerah dalam periode pembangunan jangka menengah. Keselarasan tersebut untuk kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan, strategi dan program pembangunan yang juga merujuk pada arah kebijakan RPJMN dan mendukung kegiatan prioritas utama RPJMN.

Visi sebagai rumusan umum yang akan dicapai memerlukan berbagai prakondisi untuk mencapainya. Kondisi sebagai prasyarat untuk mencapai visi dirumuskan dalam bentuk tujuan dan sasaran. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama lima tahun, sedangkan sasaran merupakan rangkaian kinerja dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang diturunkan dari tujuan. Rumusan tujuan dan sasaran RPJMD bersifat *ultimate outcome,* makro, lintas sektor dan memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan pencapaian kondisi tujuan dan sasaran. Indikator kinerja tujuan dan sasaran akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah. Tujuan dan sasaran dirumuskan menggunakan mekanisme *cascading* berbasis kata kunci visi dan menggunakan rumusan misi sebagai acuan substantif untuk merumuskan kalimat tujuan dan sasaran.



Gambar 4.2.
***Cascading* Kinerja Visi, Tujuan, dan Sasaran**
Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

4.1.3. Tujuan dan Sasaran RKPD Tahun 2026

Tujuan dan Sasaran RKPD Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahuh 2025-2029. Tujuan RPJMD adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sementara Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan daerah berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. RKPD Tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Periode Tahun 2025-2029, yang

merupakan awal dari pelaksanaan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah.

Penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2029 kedalam tujuan dan sasaran untuk tahun 2026 dimuat dalam tabel di bawah. Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur.

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalinantan Utara Tahun 2026

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target	
						2025	2026
Visi: **TERWUJUDNYA FONDASI TRANSFORMASI KALIMANTAN UTARA YANG KOKOH SEBAGAI BERANDA DEPAN NKRI YANG MAJU, MAKMUR DAN BERKELANJUTAN** **Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan** **Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan** **Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif** **Misi 4: Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI**	**Meningkatnya daya saing daerah sebagai Beranda Depan NKRI**		**Indeks Daya Saing Daerah**	**Angka**	**3,26**	**3,34**	**3,38**
		Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	71,31*	70,47	71,78
			Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,57	4,80	5,35
			Indeks Ekonomi Biru	Angka	35,36	36,59	37,82
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Indeks Modal Manusia	Angka	N/A	0,56	0,57
		Dukungan infrastruktur yang merata, berkeadilan dan berkualitas	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	38,25	40,58	43,13
		Terwujudnya masyarakat inklusif dan harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	78,94	79,24	79,62
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	56,57*	57,87	58,40
			Indeks Pembangunan Gender	Angka	88,77	89	89,36

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target	
						2025	2026
Misi 5: Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi **Misi 6: Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan** **Misi 7: Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan** **Misi 8: Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas**	**Tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Angka**	**82,86**	**83**	**83,4**
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan inovatif melayani	Nilai SAKIP	Angka	71,05	72,52	72,64
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	74,997	74,997	75,997
			Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,22	4,25	4,3
			Nilai LPPD	Angka	2,67*	2,80	2,90
			Indeks Inovasi Daerah	Angka	53,35	58,45	60,01
			Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	Angka	66,42	70	73
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		**Indeks Kesejahteraan Sosial**	**Angka**	**N/A**	**51,25**	**52,25**
		Meningkatnya kemandirian dan produktivitas masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,9	3,69	3,49
			Tingkat kemiskinan	Persen	5,38	5,07	5,00
			Indeks Gini	Angka	0,264	0,256	0,253
		Wilayah perbatasan yang maju dan sejahtera	Persentase desa wilayah perbatasan yang berstatus maju dan mandiri	Persen	N/A	22,06	23,04
	Meningkatnya ketahanan ekologi		**Penurunan Intensitas emisi GRK**	**Persen**	**N/A**	**46,96**	**60,27**

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target	
						2025	2026
		Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	79,95	77,77	77,97
		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	Angka	131,84	157,62	154,00

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2026

4.2.1. Prioritas Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mcncapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. Prioritas Nasional dalam RPJMN dilaksanakan dalam RKP Tahun 2026. Dengan demikian **Prioritas Nasional (PN)** dalam RKP Tahun 2026 meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Mantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong mandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air; ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*). Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta Proyek Strategis Nasional.

Adapun 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat (*quick wins*) termuat dalam tabel di bawah.



Gambar 4.3.
8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*)
Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu

strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik.



Gambar 4.4.
Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026
Sumber: Rancangan RKP Tahun 2026

Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu: 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2). PDRB per kapita (juta); 3). Kontribusi PDRB Provinsi; 4). Tingkat Kemiskinan; 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6). Indeks Rasio Gini; 7). Indeks Modal Manusia; 8). Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan 9). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Masing-masing sasaran makro pembangunan nasional tersebut dijabarkan ke dalam masing-masing provinsi yang menjadi

acuan pemerintah daerah provinsi dalam menetapkan target sasaran makro pembangunan nasional dalam penyusunan RKPD Tahun 2026.

Berbagai kebijakan nasional sebagaimana diuraikan di atas, dalam pelaksanaannya akan didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan PN dimuat pada Bab 6 dokumen RKPD. Sementara penetapan target untuk setiap indikator makro Provinsi Kalimantan dimuat dalam Bab 7 dokumen RKPD.

4.2.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026

Tema merupakan gambaran utama yang memberi semangat bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Rumusan tema pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 adalah:

Tema RKPD Kaltara Tahun 2026:

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Optimalisasi Potensi Daerah

Tema "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Optimalisasi Potensi Daerah" memiliki makna bahwa pembangunan Kaimantan Utara tahun 2026 akan diarahkan untuk penguatan dan akselerasi perekonomian dengan mengembangkan sektor unggulan dan potensi wilayah yang akan menarik investasi dan menyerap tenaga kerja.

4.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara

Pencapaian tujuan dan sasaran RKPD sebagaimana dimuat pada subbab di atas, perlu dilaksanakan dengan pilihan strategis dan arah kebijakan yang tepat. Dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi

Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 telah ditetapkan strategis dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Strategi memuat penahapan pembangunan dan lokus pembangunan kewilayahan, diperkuat dengan arah kebijakan pada setiap misi RPJMD. Selanjutnya, Arah kebijakan merupakan rincian agenda pembangunan dari setiap misi. Arah kebijakan disusun berbasis pada pemetaan masalah, rumusan strategi dan keselarasan dengan arah kebijakan nasional. Stratgei dan Arah Kebijakan berdasarkan Misi untuk pembangunan Tahun 2026, sebagai berikut:

Tabel 4.4
Arah Kebijakan Setiap Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	• Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perlikau hidup sehat. • Kolaborasi peningkatan cakupan *Universal Health Coverage* (UHC). • Pengendalian penyakit serta intensifikasi penemuan kasus dan pengobatan penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, Malaria), antara lain melalui penyediaan layanan survei dan pengendalian faktor risiko. • Dukungan pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, termasuk tenaga kesehatan spesialis yang disertai peningkatan kesejahteraan. • Dukungan pemerataan akses dan kualitas pelayana kesehatan primer, dan peningkatan kualitas pelayanan RSUD. • Dukungan Percepatan penurunan *stunting* melalui penguatan intervensi sensitif dan sensitif. Penguatan intervensi sensitif *stunting*, dengan *output* pengembangan infrastruktur air minum berbasis masyarakat. • Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi peserta didik, dengan *output* penyediaan bantuan pengembangan peningkatan mutu UKS. • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat. • Penguatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. • Dukungan peningkatan sarana dan prasarana olahraga prestasi dan rekreasi/kebugaran.

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		• Peningkatan pembinaan atlet dan cabang olahraga.
	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan	• Kolaborasi percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). • Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan. • Peningkatan kompetensi pendidik yang adaptif terhadap perkembangan kondisi aktual. • Dukungan peningkatan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan yang disertai peningkatan kesejahteraan. • Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi daerah. • Pelatihan vokasi di sektor strategis, dengan *output*: pelatihan berbasis kompetensi di Provinsi Kalimantan Utara. • Dukungan peningkatan akses dan pengembangan Perguruan Tinggi. • Peningkatan kualitas infrastruktur sosial, dengan *output* pengembangan gedung perguruan tinggi vokasi yang direvitalisasi di Kabupaten Nunukan. • Penyediaan afirmasi akses pendidikan berupa bantuan/beasiswa pendidikan, serta bagi daerah yang masih belum terjangkau melalui pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka. • Dukungan peserta didik penerima bantuan operasional satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan *output* penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada siswa Raudlatul Athfal (RA). • Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan. • Dukungan peningkatan literasi masyarakat melalui pengembangan perpustakaan dan literasi digital.
	Perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara kolaboratif dan terpadu.	• Dukungan peningkatan kualitas data kemiskinan yang terpadu, akurat dan akuntabel. • Pengelolaan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		miskin ekstrem, miskin dan marginal/rentan yang tepat sasaran. • Perlindungan sosial yang adaptif terhadap kerentanan masyarakat, antara lain petani dan nelayan yang terdampak perubahan iklim. • Penyaluran bantuan sosial yang adaptif, dengan *output* siswa SMTK/SMAK penerima PIP, gerakan pangan murah yang dilaksanakan. • Peningkatan akses rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan. • Memadukan perlindungan sosial dengan pemberdayaan masyarakat, antara lain melalui penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif bagi masyarakat miskin dan rentan.
Misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan	Pengembangan sektor unggulan pangan dan agribisnis berkelanjutan	• Peningkatan diversifikasi pangan lokal. • Peningkatan produksi pangan lokal. • Penjaminan mutu dan kualitas pangan lokal. • Pengembangan pertanian organik. • Pembangunan sentra produksi pertanian, tanaman pangan, peternakan, hortikultura dan perkebunan. • Pengembangan budidaya komoditas unggulan daerah. • Peningkatan produk unggulan daerah, antara lain sawit dan rumput laut. • Integrasi produksi sektor agro dengan rantai pasok regional, nasional dan global. • Penguatan pasca panen pangan nabati, dengan *output* pengembangan sarana pascapanen tanaman pangan dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan. • Sertifikasi dan peredaran benih nabati, dengan *output* penyaluran benih padi. • Jaminan ketersediaan bahan baku bioindustri agro, dengan *output* penyediaan bahan tanam komoditi perkebunan. • Adopsi teknologi pertanian, dengan *output* penerapan teknologi pertanian. • Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, termasuk peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi).

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
	Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan dan pedesaan.	• Peningkatan akses permodalan, kualitas produk, pengembangan usaha dan pemasaran produk UMKM dan IKM. • Pengembangan riset dan inovasi pendukung pengembangan produk unggulan daerah dan diversifikasi produk. • Pengembangan ekonomi digital dan akses inklusi keuangan. • Dukungan pembentukan dan pengembangan koperasi desa/kelurahan Merah Putih. • Peningkatan kerjasama antara investor besar dengan IKM, UMKM, dan Koperasi. • Dukugan revitalisasi dan pengembangan usaha BUMDes dan BUMDesMa. • Pengembangan kawasan ekonomi pedesaan berbasis optimalisasi potensi dan aset desa, serta peningkatan kerjasama desa dengan *stakeholders*. • Dukungan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan logistik.
	Pengembangan ekonomi biru dan hijau.	• Dukungan pengembangan kawasan industri hijau. • Pengembangan *blue economy,* revitalisasi pelabuhan perikanan, dan pengembangan pelabuhan logistik. • Konservasi komoditas pertanian dan praktik pertanian berkelanjutan, melalui perlindungan lahan pertanian, untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. • Penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. • Pengembangan ekonomi sirkuler. • Akselerasi industri SDA berkelanjutan. • Optimalisasi kawasan pesisir dan kepulauan. • Pengembangan energi baru dan terbarukan berbasis bioenergi. • Swasembada energi serta penguatan konektivitas dan transisi energi berbasis energi baru terbarukan.
	Penguatan daya saing pariwisata berbasis potensi daerah.	• Pengembangan *ecotourism* destinasi wisata mangrove dan wisata kawasan pesisir dan perairan, dan *Heart of Borneo*. • Pengembangan daerah tujuan wisata dan kawasan strategis pariwisata provinsi. • Integrasi kawasan strategis pariwisata provinsi ke dalam

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		kawasan strategis pariwisata nasional. • Pengembangan destinasi, promosi dan pemasaran dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif.
	Peningkatan iklim investasi dan lapangan pekerjaan.	• Mendorong tata kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) secara kolaboratif dan berbasis manajemen risiko. • Peningkatan iklim investasi berbasis dukungan kebijakan, infrastruktur berkualitas dan stabilitas wilayah. • Peningkatan iklim investasi padat karya dan penerapan standar berkelanjutan. • Peningkatan kualias pelayanan perizinan • Dukungan peningkatan kompetensi angkatan kerja berbasis potensi daerah dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. • Advokasi dan peningkatan kompetensi kerja penyandang disabilitas. • Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan. • Peningkatan sistem pengawasan ketenagakerjaan dan pengembangan hubungan industrial yang berkualitas. • Dukungan peningkatan dan daya saing wirausaha muda melalui fasilitasi akses permodalan, pengembangan produk, dan pemasaran.
Misi 3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan	• Akselerasi reformasi birokrasi general dan tematik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. • Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja. • Peningkatan kualitas manajemen data pembangunan dan statistik sektoral. • Peningkatan penganggaran berbasis kinerja dan kualitas belanja daerah. • Peningkatan kapasitas PAD berbasis optimalisasi pajak dan retribusi daerah. • Peningkatan kapasitas dan kontribusi BUMD dalam pelayanan publik dan peningkatan pendapatan daerah.

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		• Pengembangan Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta *Public Private Partnership* sebagai bagian pembiayaan pembangunan inovatif. • Peningkatan kualitas manajemen aset dan optimalisasi aset daerah untuk peningkatan PAD. • Peningkatan profesionalitas ASN berbasis sistem merit. • Peningkatan kualitas tata kelola arsip secara baku.
	Peningkatan inovasi dan digitalisasi yang mendorong kualitas pelayanan publik	• Pengembangan sistem pemerintahan digital yang terintegrasi dan inklusif. • Peningkatan ketercukupan infrastruktur digital. • Penguatan layanan publik yang mudah dijangkau dan berbasis TIK. • Penerapan standar pelayanan, SOP dan proses binsis pelayanan publik yang efektif dan efisien. • Pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah secara kolaboratif yang mendukung akselerasi pembangunan daerah.
	Penguatan sistem pengendalian intern dan integritas	• Transformasi APIP sebagai GRC (*Governance, Risk and Compliance*) dan *quality assurance* dalam mendukung pembangunan daerah. • Penguatan manajemen risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. • Pengembangan zona integritas. • Peningkatan ketangguhan sistem pencegahan korupsi.
	Peningkatan kualitas kebijakan yang partisipatif dan transparan untuk akselerasi pembangunan daerah.	• Perumusan kebijakan berbasis riset dan bukti. • Peningkatan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembangunan dan perumusan kebijakan. • Peningkatan tranparansi pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan laporan kinerja pembangunan. • Peningkatan kualitas tata kelola perbatasan negara secara kolaboratif antara pemerintah kabupaten, provinsi dan nasional dengan menngedepankan pendekatan *soft border*. • Dukungan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) untuk akselerasi pembangunan daerah dan pelayanan publik. • Peningkatan kualitas kebijakan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		pembinaan pemerintah kabupaten/kota. • Peningkatan koloborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta pemerintah provinsi dengan pusat dan berbagai pemangku kepentingan pembangunan.
Misi 4 Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah sebagai Beranda Depan NKRI	Penguatan stabilitas wilayah dan perlindungan hukum	• Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas • Penyelesaian permasalahan *Outstanding Boundary Problems* (OBP) di kawasan perbatasan, antara lain perdagangan narkotika dan manusia. • Penguatan ketangguhan diplomasi lintas batas yang kolaboratif. • Perlindungan dan bantuan hukum bagi Masyarakat.
	Penguatan stabilitas ekonomi	• Pengendalian inflasi secara kolaboratif. • Peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk mendukung stabilitas pembangunan. • Penguatan pembiayaan pembangunan yang kreatif, antara lain melalui KPBU dan CSR.
Misi 5 Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Pemajuan kebudayaan dan menjaga harmoni sosial	• Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat. • Penyelenggaraan festival budaya sebagai sarana pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah. • Pemajuan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah dan pelestarian cagar budaya. • Peningkatan forum harmoni dan kolaborasi antar suku dan agama. • Peningkatan forum harmoni dan kolaborasi antar organisasi masyarakat. • Pemningkatan peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat. • Deteksi dini potensi konflik, serta pencegahan dan penanganan konflik secara kolaboratif. • Pengembangan karakter masyarakat berbasis nilai Pancasila, Agama dan Budaya, termasuk melalui dukungan pengembangan sarana dan prasarana.
	Peningkatan kesetaraan gender, ketahanan keluarga dan pemenuhan hak anak.	• Dukungan peningkatan akses pelayanan perlindungan perempuan. • Peningkatan kebijakan pengarusutamaan gender di semua sektor dan peningkatan anggaran responsif gender. • Dukungan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		sosial bagi perempuan rentan/miskin ekstrem. • Pemenuhan hak anak, termasuk pembangunan fasilitas publik yang ramah anak. • Peningkatan ketahanan keluarga dan pencegahan pernikahan anak.
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	• Peningkatan kualitas lingkungan hidup, melalui pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berimbang. • Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. • Dukungan dan fasilitasi rehabilitasi hutan (termasuk reboisasi hutan) dan pengendalian reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi. • Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan (termasuk lahan gambut) dan bakau. • Mempertahankan luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (*home range*) dan konektivitas spesies yang dilindungi. • Penataan aset reforma agraria, melalui penguatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan. • Dukungan reformasi pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
	Penguatan mitigasi bencana dan perubahan iklim	• Penguatan mitigasi bencana struktural dan non struktural. • Penguatan respon atas bencana lintas batas negara. • Penguatan adaptasi perubahan iklim bagi sektor dan masyarakat yang terdampak. • Pengembangan ekonomi rendah emisi dan berkelanjutan.
Misi 6 Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan	Membangun kawasan perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan yang sejahtera	• Penuntasan rencana umum dan rencana rinci tata ruang, termasuk kewenangan tata ruang laut serta penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang. • Kolaborasi pemenuhan layanan dasar pada kawasan pedalaman, perbatasan dan kepulauan. • Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung perekonomian yang berkualitas di kawasan perbatasan, pedalaman dan kepulauan. • Pengembangan infrastruktur yang inklusif, terutama terhadap

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		masyarakat rentan, termasuk penyandang disabilitas. • Peningkatan infrastruktur telekomunikasi dan digital. • Pengembangan desa dan kawasan pedesaan di wilayah pedalaman dan perbatasan negara. • Memperkuat kerjasama antar daerah untuk peningkatan kelancaran rantai pasok. • Optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan pengembangan potensi ekonomi di sekitarnya. • Pengembangan PLBN sebagai kawasan pertumbuhan baru. • Fasilitasi pembentukan DOB untuk akselerasi pembangunan kawasan perbatasan. • Menyusun regulasi daerah khusus untuk pembangunan kawasan perbatasan dan pesisir. • Mengalokasikan pembiayaan pembangunan secara berimbang untuk pembangunan kawasan perbatasan dan pesisir. • Dukungan pembangunan jaringan distribusi dan listrik pedesaan, dengan *output* pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga yang belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T.
Misi 7 Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Pengembangan infrastrukur yang berkelanjutan	• Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman • Penanganan permukiman kumuh secara komprehensif dan inklusif. • Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif. • Pengembangan sistem persampahan berbasis masyarakat melalui fasilitasi pengelolaan sampah berbasis 3R dan Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). • Dukungan peningkatan kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan, dengan *output* pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Nunukan, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG). • Dukungan pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk.
	Akselerasi konektivitas inter dan antar wilayah	• Dorongan dan fasilitasi peningkatan konektivitas wilayah. • Pengembangan transportasi multi moda untuk mendukung

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		pengembangan ekonomi superhub IKN. • Dukungan dan fasilitasi pembangunan dan pengembangan bandara yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah • Fasilitasi pengembangan jalan Trans Kalimantan • Pembangunan serta peningkatan kualitas jalan dan jembatan. • Peningkatan kualitas layanan perhubungan yang inklusif. • Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi. • Pengembangan transportasi perkotaan yang andal, sesuai, dan modern. • Dukungan penguatan infrastruktur konektivitas penunjang logistik, dengan *output*: pengembangan Jalan Koridor Logistik–Sekatak Buji–Malinau, Jalan Akses Simpul Transportasi Lingkar Pulau Sebatik, serta Pengembangan Bandar Udara Long Apung Tahap III. • Penanganan konektivitas jalan/jembatan non lintas utama, dengan *output*: pengembangan jalan koridor logistik serta pembangunan jembatan koridor logistik (*backbone*).
Misi 8 Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas	Penguatan kesinambungan pembangunan	• Memperkuat sinkronisasi dan integrasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan. • Memperkuat sistem pengawasan untuk menjaga kesinambungan pembangunan. • Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi sebagai bahan penyusunan perencanaan periode pembangunan jangka menengah berikutnya. • Memperkuat penerapan manajemen risiko pembangunan daerah melalui identifikasi dan pengelolaan risiko. • Optimalisasi potensi pembiayaan pembangunan alternatif dan inovatif, antara lain KPBU, *Public Private Partnership* dan CSR. • Penguatan peran GWPP untuk kesinambungan pembangunan kabupaten/kota dan provinsi, serta keselarasannya dengan nasional.

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah kebijakan pembangunan bagi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara merupakan bentuk sinergi perencanaan pembangunan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan provinsi, maka pada subbab ini dimuat rekomendasi target indikator makro daerah dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan.

5.1. Indikator Makro Kabupaten/Kota

Indikator makro daerah merupakan gambaran pelaksanaan pembangunan secara umum. Dalam mencapai sasaran pembangunan makro Provinsi Kalimantan Utara, maka diperlukan dukungan dari seluruh kabupaten/kota. Untuk itu, pada subbab ini memuat indikator makro kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Indikator kinerja makro untuk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, meliputi: a. Laju Pertumbuhan Ekonomi, b. Persentase Penduduk Miskin, c. Tingkat Pengangguran Terbuka, d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan e. Indeks Gini.

Penentuan target indikator kinerja makro kabupaten/kota mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: capaian indikator makro kabupaten/kota pada tahun sebelumnya; karakteristik dan potensi daerah serta isu strategis daerah; kemampuan keuangan daerah; dan dukungan terhadap pencapaian target indikator makro provinsi.

Adapun target masing-masing indikator makro berdasarkan kabupaten/kota dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 5.1
Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026

No	Uraian	Realisasi	Target	
		2024	2025	2026
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (%)				
1.1	Kabupaten Malinau	3,55	2,99	2,52
1.2	Kabupaten Bulungan	3,92	3,44	3,02
1.3	Kabupaten Tana Tidung	3,57	2,93	2,40
1.4	Kabupaten Nunukan	4,03	3,54	3,12
1.5	Kota Tarakan	5,71	5,78	5,84
	Kalimantan Utara	**4,57**	**4,80**	**5,35**
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)				
2.1	Kabupaten Malinau	6,94	6,91	6,87
2.2	Kabupaten Bulungan	8,76	8,49	8,23
2.3	Kabupaten Tana Tidung	4,47	4,48	4,44
2.4	Kabupaten Nunukan	5,73	5,55	5,38
2.5	Kota Tarakan	5,56	5,23	4,91
	Kalimantan Utara	**5,38**	**5,07**	**5,00**
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)				
3.1	Kabupaten Malinau	3,1	3,00	2,91
3.2	Kabupaten Bulungan	4,33	4,02	3,73
3.3	Kabupaten Tana Tidung	3,67	3,65	3,63
3.4	Kabupaten Nunukan	2,71	2,70	2,68
3.5	Kota Tarakan	5,11	4,82	4,54
	Kalimantan Utara	**3,9**	**3,69**	**3,49**
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)				
4.1	Kabupaten Malinau	74,72	75,31	75,91
4.2	Kabupaten Bulungan	73,83	74,47	75,12
4.3	Kabupaten Tana Tidung	70,95	71,71	72,48
4.4	Kabupaten Nunukan	69,27	69,98	70,69
4.5	Kota Tarakan	78,03	78,68	79,33
	Kalimantan Utara	**73,41**	**74,02**	**74,63**
INDEKS GINI				
5.1	Kabupaten Malinau	0,283	0,280	0,277
5.2	Kabupaten Bulungan	0,274	0,271	0,269
5.3	Kabupaten Tana Tidung	0,28	0,277	0,274
5.4	Kabupaten Nunukan	0,27	0,267	0,264
5.5	Kota Tarakan	0,232	0,220	0,208
	Kalimantan Utara	**0,259**	**0,256**	**0,253**

Sumber: hasil proyeksi, 2025

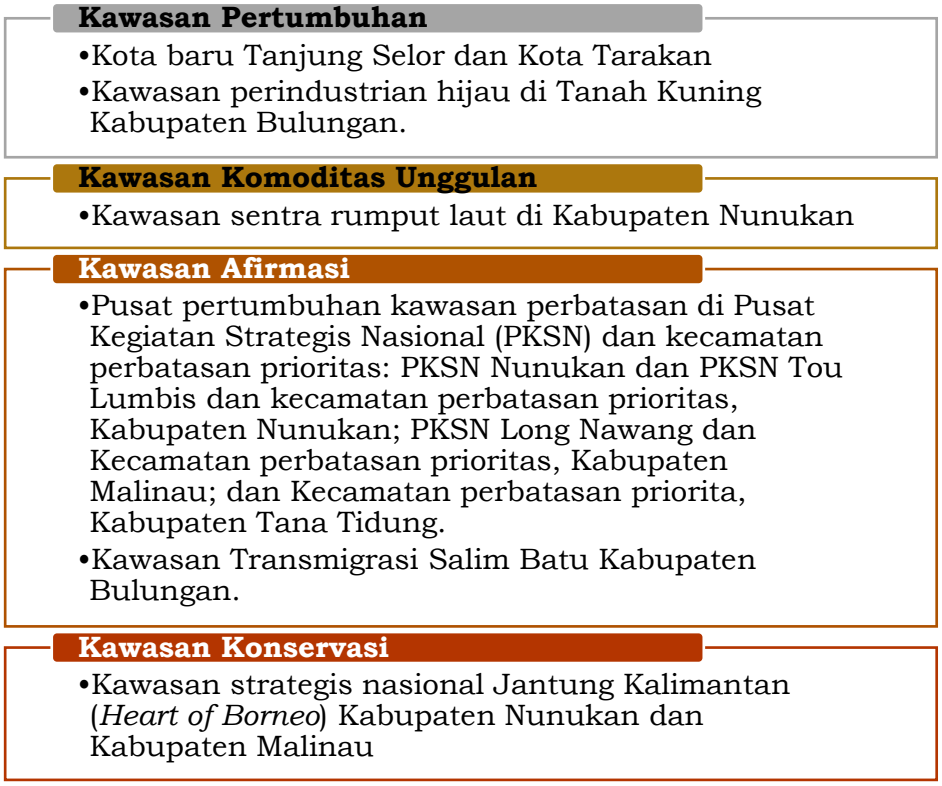
Berdasarkan proyeksi indikator kinerja makro kabupaten/kota pada tabel di atas, terlihat dinamika capaian dan target pembangunan 2024–2026, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi secara agregat provinsi pada 2024 tercatat 4,57% dan ditargetkan naik menjadi 4,80% pada 2025 serta 5,35% pada 2026. Hampir seluruh kabupaten menunjukkan tren perlambatan dibanding 2024, yaitu Malinau, Tana Tidung, dan Nunukan. Sebaliknya, Kota Tarakan mencatat kinerja positif dengan tren pertumbuhan meningkat, yang sekaligus menjadi penopang utama laju ekonomi provinsi.
b. Tingkat kemiskinan di provinsi menurun dari 5,38% (2024) diproyeksikan menjadi 5,07% (2025) dan 5,00% (2026). Seluruh wilayah diproyeksikan penurunan dengan Kota Tarakan menjadi daerah dengan perbaikan paling signifikan, diikuti Bulungan dan Nunukan dengan penurunan konsisten.
c. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) provinsi juga menunjukkan tren positif, dari 3,9% (2024) diproyeksikan turun menjadi 3,69% (2025) dan 3,49% (2026). Seluruh kabupaten/kota juga diproyeksikan menurun, namun untuk Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan perlu menerapkan kebijakan yang tepat untuk menjawab tantangan khusus dalam penyediaan lapangan kerja di wilayah tersebut. Hal ini mengingat kondisi TPT pada tahun-tahun sebelumnya yang cenderung fluktuatif.
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara provinsi diproyeksikan meningkat stabil dari 73,41 (2024) ke 74,02 (2025) dan 74,63 (2026). Peningkatan serupa terlihat di seluruh kabupaten/kota, dengan Kota Tarakan mencatat skor tertinggi. Nunukan masih memiliki IPM terendah, menunjukkan kebutuhan peningkatan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan daya beli.
e. Indeks Gini sebagai ukuran ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan bertahap. Indikator ini di tingkat provinsi diproyeksikan dari 0,259 (2024) turun menjadi 0,256 (2025) dan 0,253 (2026). Perbaikan paling signifikan terjadi di Kota Tarakan, sementara kabupaten lain memperlihatkan tren perbaikan yang relatif moderat. Hal ini menandakan arah pembangunan ekonomi yang lebih inklusif meskipun disparitas antarwilayah masih perlu dikurangi.

5.2. Arah Pengembangan Kewilayahan

Arah pengembangan kewilayahan menjadi pijakan dalam melakukan perencanaan berbasis spasial dan tematik, sehingga dapat terwujud perencanaan yang terintegrasi dan holistik di Provinsi Kalimantan Utara. Arah pengembangan kewilayahan Provinsi Kalimantan Utara dirumuskan berdasarkan karakteristik wilayah, yaitu kawasan perbatasan, kawasan pesisir dan perairan, dan kawasan daratan. Dalam arah pengembangan kewilayahan ini telah mengintegrasikan arah pengembangan kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Strategi pembangunan kewilayahan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara perlu selaras dengan arah pembangunan kewilayahan yang terdapat di dalam RPJMN tahun 2025-2029. Arah pembangunan kewilayahan Provinsi Kalimantan Utara yang terdapat di dalam RPJMN yaitu:



Gambar 5.1.
Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Utara
Sumber: Rancangan RKP Tahun 2026

Highlight indikasi intervensi pada setiap kawasan prioritas tersebut dan intervensi kebijakan untuk seluruh Provinsi Kalimantan Utara yang terdapat di Rancangan RKP, yaitu:

Tabel 5.2
***Highlight* Indikasi Intervensi di Provinsi Kalimantan Utara**

Kode	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
	Provinsi Kalimantan Utara	Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: – Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis. – Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional. – Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). – Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha. – Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. – Meningkatkan pelatihan petugas penjamah makanan.
	Provinsi Kalimantan Utara	Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan, dengan output Pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama.
	Provinsi Kalimantan Utara	Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi, dengan *output Platform* Digital Pendidikan.
		Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan *output*: – Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. – SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. – SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. – SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. – SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. – SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran.

Kode	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
	Provinsi Kalimantan Utara	Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan output: – Peningkatan kapasitas usaha koperasi. – Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. *Keterangan: Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia.*
	Provinsi Kalimantan Utara	Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: – Pelatihan pertanian bagi Non Aparatur. – Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan. – Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. – Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH). – Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih. – Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan. – Kartu Prakerja. – Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha. – Alat dan mesin pertanian pra panen. – Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya. – Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan. – Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan. – Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat. – Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya. – Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan. – Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN).

Kode	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
	Provinsi Kalimantan Utara	Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output: – Bantuan PBI JKN. – Kartu Indonesia Pintar. – Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat. – Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako. – Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah. – Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan. – Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran. – Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik. – Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana. – Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial. – Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya.
A1 A2	Kota Baru Tanjung Selor dan Kota Tarakan – A1: Kota Tarakan – A2: Kabupaten Bulungan	Pengembangan Kota Baru Tanjung Selor dan Kota Tarakan, dengan output:
		– Pembangunan TPST dan penataan TPA Bumi Rahayu di Kabupaten Bulungan.
		– Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala kota (iplt).
		– Pembangunan embung atau tampungan air skala kecil lainnya.
		– Pengembangan sentra perikanan tangkap yang ditingkatkan fasilitasnya.
		– Penyediaan bantuan sarana produksi pertanian di satuan permukiman dan pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP).
		– Pengembangan Bandar Udara Juwata.
		– Pengembangan angkutan udara.
		– Pengembangan angkutan udara perintis penumpang, layanan angkutan laut perintis prioritas nasional. – Angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan udara perintis penumpang.
		– Pengembangan kawasan konservasi mangrove dan bekantan termasuk pengembangan sarana dan prasarana serta dukungan promosi di Kota Tarakan.
A3	Kawasan Perindustrian Hijau Tanah Kuning	Pengembangan Kawasan Perindustrian Hijau Tanah Kuning, termasuk Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia, dengan output:

Kode	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
	– A3: Kabupaten Bulungan	– Pembentukan Eco Industrial Park (KI berwawasan lingkungan). – Investment Project Ready to Offer (IPRO) bidang jasa dan kawasan. – Peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan pada bidang jasa dan kawasan.
		– Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang mendapatkan fasilitasi perluasan akses pasar. – Pengawasan dan pengendalian konsumsi listrik per kapita. – Rumusan kebijakan pembinaan bumn dalam pembangunan infrastruktur energi IKN
		– Pengembangan pembangunan PLTA Kayan terintegrasi.
		– Penambahan penerbangan umum dan perintis.
		– Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang besar yang ada di KI/KEK prioritas.
B1	Kawasan Sentra Rumput Laut – A1: Kabupaten Nunukan	Pengembangan Kawasan dan Sentra Rumput Laut, dengan output:
		– Peningkatan kapasitas produksi rumput laut kering. – Promosi produk rumput laut skala internasional.
		– Pengembangan skema penjualan petani ke pabrik pengolahan melalui Platform digital yang meningkatkan harga jual di tingkat petani.
		– Fasilitasi pembiayaan dan investasi.
		– Penelitian dan pengembangan budidaya rumput spesies baru serta inovasi teknologi untuk diversifikasi produk rumput laut (karagenan, agar-agar, biostimulan, nutraseutikal, pakan ternak).
		– Sarana Sistem rantai dingin (cold chain) pada hasil tangkap perikanan (KP).
D1 D2 D3	Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas – D1: PKSN Nunukan, PKSN Tou Lumbis, dan Kecamatan Perbatasan	Pembangunan kawasan perbatasan di PKSN Nunukan, PKSN Tou Lumbis, PKSN Long Nawang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, dengan output:

Kode	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
	Prioritas (Kec. Krayan Selatan, Kec. Krayan, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Sei Menggaris, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, dan Kec. Krayan Barat), Kabupaten Nunukan – D2: PKSN Long Nawang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Kayan Hilir dan Kec. Bahau Hulu), Kabupaten Malinau. – D3: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Tana Lia), Kab. Tana Tidung.	– Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T. – Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet. – Pembangunan Jalan Daerah Tertinggal dan Perbatasan di Ruas Jalan Long Nawang - Pos Lintas Batas Negara. – Pembangunan Jalan Perbatasan dan Akses Kawasan Pos Lintas Batas Negara di Ruas Jalan Long Boh - Metulang - Long Nawang. – Pembangunan Jalan Daerah Tertinggal dan Perbatasan di Ruas Jalan Malinau - Long Semamu. – Pembangunan Jalan Daerah Tertinggal dan Perbatasan di Ruas Jalan Akses Pos Lintas Batas Negara Long Nawang. – Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Sungai Nyamuk di Kab. Nunukan. – Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara
D4	Kawasan Transmigrasi (KT), Salim Batu – D4: Kabupaten Nunukan	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Salim Batu di Kabupaten Bulungan, dengan output: – Pembangunan dan pengembangan jalan di kawasan transmigrasi. – Perpindahan dan penempatan transmigran disertai pembangunan sarana permukiman. – Pemberian bantuan sarana produksi pertanian dan bantuan peralatan pascapanen. – Pengembangan infras permukiman dan aksesibilitas logistik. – Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi. – Redistriusi aset (tanah) transmigrasi. – Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil.
E1 E2	Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan – E1: Kabupaten Nunukan – E2: Kabupaten Malinau	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem termasuk Heart of Borneo di Wilayah Kalimantan Utara, dengan *output:*
		– Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi.
		– Penyusunan rekomendasi perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau.
		– Penguatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

Kode	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
		– Peningkatan produktivitas hasil kehutanan. – Pengembangan produk melalui agroforestri. – Pengembangan kapasitas pengelola kawasan. – Perlindungan serta pengamanan hutan
	Provinsi Kalimantan Utara	Penguatan pengembangan pangan nabati, hilirisasi komoditas pertanian strategis/unggulan serta modernisasi dan digitalisasi pertanian yang adaptif dan inklusif, dengan output:
		– Penguatan pascapanen pangan nabati.
		– Percontohan teknologi pertanian.
		– Sarana pascapanen tanaman pangan.
	Provinsi Kalimantan Utara	Pengembangan sentra perikanan tangkap dan budidaya, dengan output:
		– Benih udang yang disalurkan ke masyarakat.
	Provinsi Kalimantan Utara	Peningkatan produktivitas UMKM dan Koperasi, dengan output:
		– Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi.
		– Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif.
		– Pengembangan kewirausahaan.
		– Peningkatan produktivitas UMKM dan Koperasi.
		– Sertifikasi dengan pemeriksanaan dan/atau pengujian.
		– Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha.
		– Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM.
		– Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal.
		– Akreditasi lembaga halal.
		– MoU kemitaan jaminan produk halal.
	Provinsi Kalimantan Utara	Penguatan konektivitas (konektivitas jalan dan udara) dan pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah 3TP, dengan output:
		– Pembangunan Jalan Long Nawang – Pos PLBN, BTS Kab. Malinau – Binuang, – Jalan Akses PLBN Long Nawang, Malinau – Long Semamu, Long Boh – Metulang – Long Nawang.
		– Pengembangan jalan koridor logistik serta pembangunan jembatan koridor logistik (backbone).
		– Penyediaan infrastruktur pencarian dan pertolongan.
	Provinsi Kalimantan Utara	Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk penyediaan air minum, layanan sanitasi dan persampahan, dengan output:
		– Pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat dan pembangunan SPAM.

Kode	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
		– Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Penataan TPA Tanjung Harapan di Kabupaten Nunukan.
		– Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
		– Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) bidang perumahan.
	Provinsi Kalimantan Utara	Swasembada energi serta penguatan konektivitas dan transisi energi listrik, dengan output:
		– Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Nunukan – Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG). – Percepatan konversi BBM ke BBG. – Pembangunan infrastruktur jaringan gas untuk industri dan rumah tangga. – Pembangunan PLTMH. – Perluasan DAK bidang infrastruktrur energi terbarukan.
		– Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga yang belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T.
		– Infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan.
	Provinsi Kalimantan Utara	Peningkatan infrastruktur digital dan TIK dengan output:
		– Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat.
		– Pengembangan SDM digital dan digitalisasi masyarakat.
		– Perluasan layanan penyiaran digital.
	Provinsi Kalimantan Utara	Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan Stunting serta perbaikan gizi lainnya, pengendalian penyakit menular (TBC dan malaria), dengan output:
		– Penyediaan bantuan pengembangan peningkatan mutu UKS.
		– Pengembangan infrastruktur air minum berbasis masyarakat
		– Penyediaan layanan survei faktor risiko penyakit TB di Kota Tarakan. – Menyediakan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT). – Menanggulangi TB di tempat kerja. – Memberikan bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh. – Mendampingi lembaga dalam uji klinis vaksin TBC. – Melakukan penemuan aktif dan skrining mobile. – Mendorong pelaporan kasus TB oleh fasyankes swasta. – Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC. – Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat.

Kode	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
		– Penyediaan layanan survei faktor risiko penyakit HIV/AIDS di Kota Tarakan.
		– Penyediaan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria di Kota Tarakan.
	Provinsi Kalimantan Utara	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis, dengan output: – Menyediakan BMHP untuk skrining kesehatan. – Melakukan pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir. – Melakukan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA. – Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis. – Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis. – Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis. – Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis. – Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis.
	Provinsi Kalimantan Utara	Pembangunan Rumah Sakit lengkap berkualitas, dengan output: – Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah. – Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak. – Meningkatkan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D. – Memberikan pembinaan kualitas mutu pelayanan. – Memberikan bantuan operasional RS Kapal. – Memberikan pembinaan BLU RS Pemerintah yang mandiri.
	Provinsi Kalimantan Utara	Penguatan kualitas pendidikan dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah, dengan output:
		– Pelatihan vokasi di sektor strategis.
		– Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada siswa Raudlatul Athfal (RA).
		– Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan.
		– Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Kode	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
	Provinsi Kalimantan Utara	Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi (Iptekin) dalam Pembangunan Nasional, dengan output: – Melakukan peningkatan kapasitas SDM Iptekin. – Melakukan penguatan infrastruktur Iptekin strategis. – Melakukan penguatan proses bisnis, skema insentif, serta kerjasama pemanfaatan dan komersialisasi hasil Iptekin. – Melakukan penguatan kapasitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). – Melakukan penguatan kapasitas Science Techno Park (STP). – Mengembangkan pilot project hub ekosistem Iptekin di daerah. – Mengembangkan pilot project hub ekosistem Iptekin di K/L pengampu bidang prioritas. – Mengembangkan pilot project hub prioritas tematik Iptekin di BRIN. – Melakukan optimalisasi pemanfaatan Iptekin secara masif khususnya dalam mendukung bidang-bidang prioritas.
	Provinsi Kalimantan Utara	Pengentasan kemiskinan terutama di daerah afirmasi 3T, dengan output:
		– Penggunaan satu basis data tunggal sebagai dasar pensasaran target program bantuan pemerintah.
		– Verifikasi validasi data dan meningkatkan cakupan penerima program PIP khususnya pada tingkat SMTK/SMAK.
		– Penyediaan beasiswa/bantuan Paket C untuk masyarakat miskin dan rentan agar dapat memiliki ijazah SMA.
		– Pembangunan pusat distribusi pangan murah di kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tinggi.
		– Pemenuhan layanan dasar infrastruktur desa.
	Provinsi Kalimantan Utara	Penguatan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan, dengan output:
		– Penyediaan bantuan pengembangan peningkatan mutu Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M).
		– Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat.
		– Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat.
	Provinsi Kalimantan Utara	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan output: – Pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana. – Simulasi penanggulangan bencana. – Vegetasi pantai yang ditanam untuk mitigasi bencana. – Peta kawasan rawan bencana.

Kode	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
		– Penilaian indeks risiko dan ketahanan daerah terhadap bencana. – Pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana. – Penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi. – Penyediaan peta dasar skala besar 1:5.000 wilayah darat.
	Provinsi Kalimantan Utara	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas, dengan output: – Merevitalisasi bangunan Satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan. – Membangun unit sekolah baru satuan PAUD. – Merevitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan. – Membangun unit sekolah baru SD. – Merevitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan. – Membangun unit sekolah baru SMP. – Merevitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan. – Membangun unit sekolah baru SMA. – Menyediakan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran.
	Provinsi Kalimantan Utara	Percepatan pelaksanaan reforma agraria, dengan output: – Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. – Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2026

Arah pembangunan wilayah memiliki peran penting untuk memandu arah pembangunan kabupaten/kota agar terpadu dan kolaboratif dengan pembangunan provinsi. Strategi pembangunan kewilayahan Provinsi Kalimantan Utara dimuat pada tabel di bawah:

Tabel 5.3
Arah Kebijakan Kewilayahan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026

Kabupaten/Kota	Strategi Pembangunan
Kabupaten Nunukan	1. Peningkatan konektivitas kawasan perbatasan 2. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur perhubungan bandara dan pelabuhan 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pemukiman. 4. Pembangunan fasilitas ketenagalistrikan. 5. Dukungan optimalisasi PLBN dan pengembangan pusat pertumbuhan di kawasan sekitarnya. 6. Akselerasi peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. 7. Fasilitasi pengembangan ruang pertahanan dan keamanan. 8. Penguatan dan konsistensi kerjasama pengelolaan kawasan perbatasan dengan pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri. 9. Pengembangan kawasan pariwisata berbasis ekowisata dan budaya. 10. Pengembangan kawasan pedesaan dan peningkatan kemandirian desa. 11. Pelestarian fungsi lingkungan kawasan mangrove. 12. Pengembangan kawasan kampung nelayan. 13. Pengembangan kawasan pengolahan hasil perikanan dan kelautan. 14. Optimalisasi potensi ekonomi perairan. 15. Optimalisasi pemanfaatan poros maritim ALKI II sebagai jalur perdagangan internasional. 16. Pengembangan Kawasan Sentra Rumput Laut dan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan PKSN Nunukan 17. Pengelolaan wilayah Heart of Borneo 18. Fasilitasi pembentukan DOB Kabupaten Krayan, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), Kota Sebatik 19. Perlindungan ekosistem Kawasan Hidrologi Gambut
Kabupaten Malinau	1. Peningkatan konektivitas di kawasan perbatasan. 2. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman. 3. Pembangunan fasilitas ketenagalistrikan. 4. Akselerasi peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan sesuai standar. 5. Optimalisasi kawasan PLBN dengan pengembangan fasilitas ekonomi. 6. Pembangunan permukiman terintegrasi yang adaptif terhadap budaya. 7. Pelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai 8. Fasilitasi pembentukan DOB Kabupaten Apau Kayan 9. Pengelolaan wilayah Heart of Borneo 10. Perlindungan sosial dampak PSN 11. Perlindungan ekosistem Kawasan Hidrologi Gambut
Kabupaten Tana Tidung	1. Akselerasi kualitas pelayanan dasar 2. Pengembangan pusat kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan tambak.

Kabupaten/Kota	Strategi Pembangunan
	3. Pengembangan Pelabuhan logistik 4. Pelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai. 5. Pengembangan kawasan kampung nelayan. 6. Penataan permukiman yang layak huni 7. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan afirmasi (Kecamatan Tana Lia) 8. Pengelolaan Kawasan HGU secara berkelanjutan 9. Perlindungan ekosistem Kawasan Hidrologi Gambut
Kabupaten Bulungan	1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar 2. Pembangunan pelabuhan internasional sebagai hub perekonomian 3. Pembangunan pelabuhan logistik dan infrastruktur pendukung 4. Pengembangan kawasan pengolahan hasil perikanan dan kelautan. 5. Pelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai 6. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa. 7. Pengembangan kawasan industri hijau Indonesia berbasis tata Kelola pemerintahan setempat 8. Pengembangan pusat kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan tambak. 9. Pengembangan kawasan perkotaan 10. Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman. 11. Penataan kawasan permukiman yang layak huni. 12. Peningkatan konektivitas wilayah 13. Pengembangan kawasan *green economy* berbasis tata Kelola pemerintahan setempat 14. Pengembangan kawasan perdesaan. 15. Fasilitasi pembentukan DOB Kota Tanjung Selor 16. Peningkatan tata kelola PSN secara kolaboratif berbasis manajemen risiko 17. Kebijakan perizinan usaha berbasis risiko 18. Perlindungan sosial dampak PSN
Kota Tarakan	1. Akselerasi kualitas pelayanan dasar 2. Dukungan dan fasilitasi pengembangan pelabuhan internasional sebagai hub perekonomian. 3. Pengembangan kawasan pengolahan hasil perikanan dan kelautan. 4. Pengembangan kawasan industri hilirisasi SDA 5. Pelestarian fungsi lingkungan kawasan mangrove 6. Pengembangan kawasan kampung nelayan 7. Penataan permukiman layak huni 8. Optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi perairan 9. Optimalisasi pemanfaatan poros maritim ALKI II sebagai jalur perdagangan internasional 10. Dukungan penanggulangan bencana banjir 11. Dukungan pengelolaan persampahan 12. Pelestarian cagar budaya 13. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2026 akan dilaksanakan secara operasional melalui rencana kerja. Rencana Kerja memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana kerja pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 disusun dengan memedomani visi, misi, dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2029 serta selaras dengan Asta Cita (prioritas nasional).

6.1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

6.1.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Dalam mendanai pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dibutuhkan pendanaan pembangunan. Pendanaan rencana pembangunan daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber pendanaan termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah.

Dengan demikian, program, kegiatan, sub kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan pembangunan daerah tahun 2026 disusun antara lain berdasarkan:

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif serta standar biaya kebutuhan pelayanan.
c. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM).
d. Penerapan Reformasi Birokrasi Tematik antara lain kemiskinan, pengendalian inflasi, dan stunting.
e. Urusan pemerintahan daerah lainnya berpedoman pada Nspk sesuai dengan kondisi derah dan kebutuhan masyarakat.
f. Prioritas daerah dan selaras dengan prioritas nasional.
g. Pelaksanaan program strategis nasional sesuai kewenangan provinsi.
h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Implementasi program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2026 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, membutuhkan dukungan pendanaan. Berdasarkan penghitungan maka dapat diproyeksikan kemampuan keuangan daerah untuk mencanai pembangunan 2026 sebagaimana dimuat pada Bab 3 dokumen ini. Adapun rekapitulasi alokasi pagu anggaran berdasarkan perangkat daerah dan program perangkat daerah disajikan pada tabel di bawah. Lebih rinci mengenai rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2026 dimuat dalam LAMPIRAN.

Tabel 6.1
Rancangan Alokasi Pagu Anggaran Berdasarkan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**689.997.212.973,00**	
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**680.270.462.973,00**	
1	**01**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**680.270.462.973,00**	
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	500.513.390.873,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	178.857.072.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**9.726.750.000,00**	
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**9.726.750.000,00**	
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	6.026.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	625.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.575.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Cabang Dinas Tarakan		
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.500.000.000,00**	
1	**01**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.500.000.000,00**	
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	996.000.000,00	CABANG DINAS TARAKAN, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	504.000.000,00	CABANG DINAS TARAKAN, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Cabang Dinas Nunukan		
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.499.998.294,00**	

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	**01**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.499.998.294,00**	
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	790.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	709.998.294,00	CABANG DINAS NUNUKAN, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Cabang Dinas KTT-Malinau		
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.499.985.182,00**	
1	**01**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.499.985.182,00**	
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	851.985.182,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	648.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			UPT Taman Budaya		
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.124.940.000,00**	
1	**01**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.124.940.000,00**	
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.124.940.000,00	UPT TAMAN BUDAYA, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.716.175.207,00**	
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**1.716.175.207,00**	
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.716.175.207,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan		
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.500.000.000,00**	
1	**01**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.500.000.000,00**	
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	767.600.000,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	732.400.000,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Dinas Kesehatan		
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**65.195.000.000,00**	
1	**02**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**65.195.000.000,00**	
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.289.245.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	39.155.755.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK		
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**352.875.391.259,00**	
1	**02**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**352.875.391.259,00**	
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	322.765.391.259,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK, DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	19.110.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK, DINAS KESEHATAN
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	11.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK, DINAS KESEHATAN
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**360.272.048.000,00**	

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	**03**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**347.272.048.000,00**	
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.006.647.400,00	DINAS PUPRPKP
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	30.000.000.000,00	DINAS PUPRPKP
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	39.300.000.000,00	DINAS PUPRPKP
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	14.416.960.000,00	DINAS PUPRPKP
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.025.000.000,00	DINAS PUPRPKP
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	10.000.000.000,00	DINAS PUPRPKP
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	16.258.000.000,00	DINAS PUPRPKP
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	88.584.081.349,00	DINAS PUPRPKP
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	4.688.006.651,00	DINAS PUPRPKP
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	100.000.000.000,00	DINAS PUPRPKP
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	5.993.352.600,00	DINAS PUPRPKP
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	5.000.000.000,00	DINAS PUPRPKP
1	**04**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**13.000.000.000,00**	
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.000.000.000,00	DINAS PUPRPKP
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.400.000.000,00	DINAS PUPRPKP
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.600.000.000,00	DINAS PUPRPKP
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**5.000.000.000,00**	
2	**10**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**5.000.000.000,00**	
2	10	03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	250.000.000,00	DINAS PUPRPKP
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	400.000.000,00	DINAS PUPRPKP
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	3.200.000.000,00	DINAS PUPRPKP

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	1.150.000.000,00	DINAS PUPRPKP
			Kantor Satuan Polisi Pamongpraja		
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**17.054.715.802,00**	
1	**05**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**17.054.715.802,00**	
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.054.715.802,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**13.989.026.067,00**	
1	**05**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**13.989.026.067,00**	
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.694.026.067,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.295.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Dinas Sosial	**14.103.836.307,00**	
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**14.083.836.307,00**	
1	**06**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**14.083.836.307,00**	
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.691.787.344,00	DINAS SOSIAL
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	238.694.905,00	DINAS SOSIAL

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	3.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	270.171.319,00	DINAS SOSIAL
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	531.187.809,00	DINAS SOSIAL
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	348.994.930,00	DINAS SOSIAL
X			**NON URUSAN**	**20.000.000,00**	
X	**XX**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
			UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu		
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**3.098.719.701,00**	
1	**06**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**3.098.719.701,00**	
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.168.340.361,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.930.379.340,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**9.319.607.238,00**	
2	**07**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**9.319.607.238,00**	
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.279.063.442,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	284.900.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	230.371.898,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	275.271.355,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	240.000.543,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**515.271.594,00**	
3	**32**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**515.271.594,00**	
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	135.455.594,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	379.816.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**15.963.756.827,00**	
2	**08**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**14.763.756.827,00**	
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.263.756.827,00	DP3AP2KB
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	950.000.000,00	DP3AP2KB
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	500.000.000,00	DP3AP2KB
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	200.000.000,00	DP3AP2KB
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	550.000.000,00	DP3AP2KB
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	750.000.000,00	DP3AP2KB
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	550.000.000,00	DP3AP2KB
2	**14**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**1.200.000.000,00**	
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	500.000.000,00	DP3AP2KB
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	350.000.000,00	DP3AP2KB
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	350.000.000,00	DP3AP2KB
			UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak		

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**2.248.500.000,00**	
2	**08**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**2.248.500.000,00**	
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.348.500.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	440.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	460.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
			Dinas Lingkungan Hidup	**13.990.855.056,00**	
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**13.990.855.056,00**	
2	**11**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**13.990.855.056,00**	
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.180.855.056,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	760.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	410.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	190.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	730.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup		
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**418.001.707,00**	
2	**11**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**418.001.707,00**	
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	393.001.707,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	25.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**9.865.477.909,00**	
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**9.865.477.909,00**	
2	**12**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**9.865.477.909,00**	
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.463.477.909,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.170.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.332.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**11.694.695.933,00**	
2	**13**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**11.694.695.933,00**	
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.244.202.093,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	117.769.650,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	573.109.944,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.759.614.246,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Dinas Perhubungan	**23.177.903.809,00**	
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**23.177.903.809,00**	
2	**15**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**23.177.903.809,00**	
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.555.767.948,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.486.076.402,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3.136.059.459,00	DINAS PERHUBUNGAN
			UPTD Pelabuhan Tengkayu I		
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**3.600.304.984,00**	
2	**15**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**3.600.304.984,00**	
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.600.304.984,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
			UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	**3.139.304.985,00**	
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
2	**15**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**3.139.304.985,00**	

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.139.304.985,00	UPTD PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN
			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	**20.987.197.079,00**	
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**20.987.197.079,00**	
2	**16**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**19.767.197.079,00**	
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.191.886.879,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	6.750.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.825.310.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**20**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**350.000.000,00**	
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	**21**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**870.000.000,00**	
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	870.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**8.629.452.290,00**	
2	**18**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	8.629.452.290,00	
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.629.452.290,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
			Dinas Pemuda dan Olahraga		
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**38.900.809.800,00**	
2	**19**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**38.900.809.800,00**	
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.517.541.094,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.850.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	21.933.268.706,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.600.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	**7.495.427.528,00**	
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**7.495.427.528,00**	
2	**23**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**7.312.427.528,00**	
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.914.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	397.927.528,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**24**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**183.000.000,00**	
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	183.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Dinas Kelautan dan Perikanan	**22.211.221.474,00**	
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**22.211.221.474,00**	

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	**25**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**22.211.221.474,00**	
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.212.394.948,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	430.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	750.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	328.826.526,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	290.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			UPTD Pelabuhan Tengkayu II		
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**2.509.385.684,00**	
3	**25**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**2.509.385.684,00**	
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.305.525.684,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	203.860.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
			UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau		
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**300.484.263,00**	
3	**25**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**300.484.263,00**	
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	239.486.263,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	60.998.000,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
			UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan		
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**299.816.887,00**	
3	**25**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**299.816.887,00**	
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	266.816.887,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	33.000.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Dinas Pariwisata		
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**9.470.139.037,00**	
3	**26**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**9.470.139.037,00**	
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.875.639.037,00	DINAS PARIWISATA
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.234.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	507.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	313.500.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	540.000.000,00	DINAS PARIWISATA
			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	**34.823.243.022,00**	
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**34.823.243.022,00**	
2	**09**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**1.254.000.000,00**	
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	214.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	365.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	228.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		
3	**27**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**33.569.243.022,00**	
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.479.243.022,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	11.870.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	730.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	457.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	228.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet		
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**299.651.294,00**	
3	**27**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**299.651.294,00**	
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	141.651.293,99	UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.000.000,00	
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	100.000.000,00	
			Dinas Kehutanan	**80.160.946.914,00**	
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		
3	**28**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**	**79.710.946.914,00**	
3	28	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47.724.700.000,00	DINAS KEHUTANAN
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	19.986.246.914,00	DINAS KEHUTANAN
3	28	04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1.600.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	8.400.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
3	28	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	2.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
X			**NON URUSAN**		
X	**XX**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**	**450.000.000,00**	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	450.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			UPT KPH Kabupaten Bulungan		
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**10.076.000.000,00**	
3	**28**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**	**10.076.000.000,00**	
3	28	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.627.260.000,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	6.998.740.000,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.450.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
			UPT KPH Kota Tarakan		
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**10.999.999.731,00**	
3	**28**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**	**10.999.999.731,00**	
3	28	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.067.600.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	8.482.399.731,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.450.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
			UPT KPH Kabupaten Nunukan		
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**10.000.000.000,00**	
3	**28**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**	**10.000.000.000,00**	
3	28	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.717.800.000,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	6.520.200.000,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.762.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
			UPT KPH Kabupaten Malinau		
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**9.999.999.594,00**	
3	**28**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**	**9.999.999.594,00**	
3	28	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	608.269.155,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	7.636.730.439,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.755.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
			UPT KPH Kabupaten Tana Tidung		
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**11.399.999.990,00**	
3	**28**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**	**11.399.999.990,00**	
3	28	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.239.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	7.860.999.990,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.300.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	**17.877.270.700,00**	
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		
3	**29**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**17.877.270.700,00**	
3	29	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.377.270.700,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	350.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	425.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	75.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	**22.241.012.355,00**	
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
2	**17**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**15.876.238.443,00**	

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.021.238.443,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	130.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.075.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		
3	**30**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**4.950.000.000,00**	
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.425.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	1.300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.050.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	225.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
3	**31**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**1.225.000.000,00**	
3	31	02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	825.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
X			**NON URUSAN**	**189.773.912,00**	
X	**XX**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	189.773.912,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
			Biro Administrasi Pembangunan		
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2.098.719.347,00**	
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**	**2.098.719.347,00**	
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.189.219.347,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	909.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**3.625.435.765,00**	
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**	**3.625.435.765,00**	
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.475.435.765,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	01	03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.150.000.000,00	
			Biro Hukum		
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**3.897.622.315,00**	
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**		
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.656.879.745,00	BIRO HUKUM
4	01	05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.240.742.570,00	BIRO HUKUM
			Biro Kesejahteraan Rakyat		
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**39.064.382.569,00**	
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**	**39.064.382.569,00**	
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.714.452.998,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	37.349.929.571,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Biro Organisasi	**2.098.694.228,00**	
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2.098.694.228,00**	
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**	**2.098.694.228,00**	
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	633.039.228,00	BIRO ORGANISASI
4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.465.655.000,00	BIRO ORGANISASI
			Biro Umum		
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**120.453.360.787,00**	
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**		
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	120.453.360.787,00	BIRO UMUM
			Biro Pengadaan Barang dan Jasa	**1.798.902.308,00**	
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**1.798.902.308,00**	
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**	**1.798.902.308,00**	
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	783.167.808,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.015.734.500,00	
			Biro Administrasi Pimpinan	**7.495.427.459,00**	

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**7.495.427.459,00**	
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**	**7.495.427.459,00**	
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.495.427.459,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
			Biro Perekonomian	**2.398.536.809,00**	
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2.398.536.809,00**	
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**	**2.398.536.809,00**	
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	780.019.361,00	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.618.517.448,00	BIRO PEREKONOMIAN
			Sekretariat DPRD		
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**113.293.301.349,00**	
4	**02**		**SEKRETARIAT DPRD**	**113.293.301.349,00**	
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	56.093.301.349,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	57.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan		
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**26.983.539.001,00**	
5	**01**		**PERENCANAAN**		
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.210.260.943,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.189.200.712,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.284.090.471,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
5	**05**		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**		

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	662.366.875,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
5	05	03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	637.620.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
			Badan Pendapatan Daerah		
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**50.252.814.608,00**	
5	**02**		**KEUANGAN**	**50.252.814.608,00**	
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47.752.814.608,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			UPT Bapenda Bulungan		
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**3.799.999.998,00**	
5	**02**		**KEUANGAN**		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.139.999.998,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	660.000.000,00	
			UPT Bapenda Tarakan	**3.899.999.953,00**	
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		
5	**02**		**KEUANGAN**	**3.899.999.953,00**	
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.650.899.953,00	UPT BAPENDA TARAKAN
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	249.100.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
			UPT Bapenda Nunukan	**3.349.999.947,00**	
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		
5	**02**		**KEUANGAN**	**3.349.999.947,00**	
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.379.999.947,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	970.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
			UPT Bapenda Malinau		
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2.221.917.371,00**	
5	**02**		**KEUANGAN**	**2.221.917.371,00**	
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.991.917.371,00	UPT BAPENDA MALINAU

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	230.000.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
X			**NON URUSAN**	**20.000.000,00**	
X	**XX**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.000.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
			UPT Bapenda Tana Tidung		UPT BAPENDA MALINAU
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**1.999.999.954,00**	
5	**02**		**KEUANGAN**		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.772.999.954,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	227.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
			Badan Keuangan dan Aset Daerah	**772.458.048.372,00**	
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		
5	**02**		**KEUANGAN**	**772.458.048.372,00**	
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	60.633.515.770,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	705.174.532.602,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.650.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Badan Kepegawaian Daerah		
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**11.393.962.276,00**	
5	**03**		**KEPEGAWAIAN**		
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.094.936.496,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.299.025.780,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**10.193.781.438,00**	
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**10.193.781.438,00**	
5	**04**		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**10.193.781.438,00**	
5	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.446.051.481,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.747.729.957,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Badan Pengelola Perbatasan Daerah	**7.495.613.585,00**	
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**7.495.613.585,00**	
5	**06**		**PENGELOLAAN PERBATASAN**	**7.495.613.585,00**	
5	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.545.613.585,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	06	03	PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA	950.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
			Badan Penghubung	**12.483.597.687,00**	
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**12.483.597.687,00**	
5	**07**		**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**12.483.597.687,00**	
5	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.018.755.687,00	BADAN PENGHUBUNG
5	07	02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.464.842.000,00	
			Inspektorat	**41.159.351.311,00**	
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**41.159.351.311,00**	
6	**01**		**INSPEKTORAT DAERAH**	**41.159.351.311,00**	
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.692.964.906,00	INSPEKTORAT
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7.480.766.540,00	
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	5.985.619.865,00	
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**10.493.589.941,00**	
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**10.493.589.941,00**	
8	**01**		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**10.493.589.941,00**	
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.877.092.941,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	110.509.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	125.492.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	380.495.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sumber: hasil proyeksi, 2025

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncakan untuk dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2026, sebagian ditujukan untuk melaksanakan kebijakan nasional. Daftar sub kegiatan yang mendukung untuk penghapusan kemiskinan, penuntasan stunting, pengendalian inflasi, dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimuat pada **Lampiran** dokumen RKPD.

6.1.2. Program Prioritas

Program prioritas memiliki sifat lintas sektor/*cross-cutting*, sehingga pelaksanaannya tidak hanya dijalankan oleh satu Perangkat Daerah. Perangkat Daerah yang menjadi penanggungjawab program prioritas memiliki peran sebagai koordinator dan tetap menjaga kolaborasi dengan perangkat daerah atau pemangku kepentingan lain. Program prioritas dirumuskan menggunakan metode *cascading* mulai dari tujuan, sasaran dan outcome. Dalam rangka membangun sinergi antara pendekatan politik dan teknokratik, program prioritas juga berupaya mengkerangkai program janji politik Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah dengan rumusan kinerja. Rumusan program prioritas RPJMD yang akan dilaksanakan dalam pembangunan tahun 2026 dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 6.2
Program Prioritas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh Sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan Misi 1 Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan Misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan Misi 3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang	**Meningkatnya Daya Saing Daerah sebagai Beranda Depan NKRI**			**Indeks Daya Saing Daerah**	
		Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan		**Indeks Ekonomi Hijau;** **Laju Pertumbuhan Ekonomi** **Ekonomi Biru**	
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi
			Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Pertumbuhan Wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan UMKM
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan skor pph	Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase cadangan pangan	Program Pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
Kolaboratif dan Inovatif Misi 4 Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI Misi 5 Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Misi 6 Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan Misi 7			Meningkatnya pengelolaan pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan dan sesuai dengan zonasi yang ditetapkan	Nilai Evaluasi, efektivitas, pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA) Jumlah luasan wilayah laut yang dikelola	Program Pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan perikanan tangkap
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan perikanan budidaya
			Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
			Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Program Perencanaan dan pembangunan industri

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan Misi 8 Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas			Meningkatnya Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah produk hasil perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
			Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat sebagai sumber pangan bergizi, sehat dan berkelanjutan	Angka Konsumsi Ikan	
				Jumlah unit pengolahan ikan (UPI) aktif dan tersertifikasi	
			Meningkatnya iklim investasi	Persentase kebijakan daerah terkait penanaman modal yang ditetapkan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Meningkatnya daya tarik investasi	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal
			Menurunnya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Sumber Air Yang Memenuhi Baku Mutu	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
				Persentase Parameter Udara Yang Memenuhi Baku Mutu	
				Persentase kampung Di Lahan Kritis Yang Terbina	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Program Keanekaragaman hayati

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya pelaku Usaha dan/Kegiatan kewenangan provinsi yang dilakukan pengawasan	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/Kegiatan kewenangan provinsi yang dilakukan pengawasan	Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH
			Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang dikelola.	Program Pengelolaan persampahan
			Meningkatnya Penanganan Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
			Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai Kinerja Pengaturan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterjangkauan Terhadap Penggunaan Energi Listrik dan EBT	Jumlah pasokan energi yang bersumber dari EBT	Program Pengelolaan energi baru dan terbarukan
			Meningkatnya kelestarian dan fungsi DAS	Persentase tutupan lahan pada sempadan sungai	Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
			Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Produksi hasil hutan kayu	Program Pengelolaan Hutan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang kehutanan
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Program Penanggulangan bencana
			Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	Persentase penanganan pasca bencana	
			Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	
			Meningkatnya Kualitas Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Program peningkatan daya tarik pariwisata
			Meningkatnya Jangkauan	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Program pemasaran pariwisata

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Pemasaran Pariwisata		
			Meningkatnya Kualitas Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tervalidasi	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase tradisi budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	Program pengembangan kebudayaan
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		**Indeks Modal Manusia**	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
			Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)	Program Perlindungan perempuan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Nilai Kota Layak Anak (KLA)	Program Pemenuhan hak anak
			Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase tradisi budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	Program Pengembangan kebudayaan
			Meningkatnya kualitas Lulusan	Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi	Program Pengelolaan pendidikan
				Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI	
				Persentase lulusan SLB yang mandiri	
			Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase PTK Profesional	
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Penyandang Disabilitas	
			Meningkatnya Tata Kelola Satuan Pendidikan	Persentase sekolah terakreditasi minimal B	
			Meningkatnya kualitas PTK	Indeks Pemerataan Guru	Program Pendidikan dan tenaga pendidikan
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
				Persentase Kab/Kota yang mencapai SPM Bidang Kesehatan Jenis Pelayanan Dasar Kesehatan Keluarga	
				Persentase Kab/Kota yang mencapai SPM Bidang Kesehatan Jenis Pelayanan Dasar Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	
				Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria. (Kab/Kota)	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Persentase Laboratorium Kesmas Tingkat 2-3 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya	
				Proporsi fasilitas kesehatan dengan perbekalan Kesehatan sesuai standar	
				Proporsi kab/kota dengan fasilitas Kesehatan sesuai standar	
				Persentase Puskesmas dan RS Pemerintah yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar	
				Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja	
				Persentase Kab/Kota STBM	
			Meningkatnya kuantitas, kualitas	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap populasi	Program Peningkatan kapasitas sumber

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			dan pemerataan SDMK	Persentase Faskes (Puskesmas dan RS Pemerintah) Yang Memiliki Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Sesuai Standard	daya manusia kesehatan
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai Standar Perpustakaan Nasional	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan
		Dukungan infrastruktur yang merata berkeadilan dan berkualitas		**Indeks Infrastruktur Daerah**	
			Meningkatnya kemantapan jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Program Penyelenggaraan jalan
			Meningkatnya Layanan Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
				Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	
			Meningkatnya Layanan Transportasi Perairan	Rasio Konektivitas Angkutan Perairan	Program Pengelolaan pelayaran
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterjangkauan Terhadap Penggunaan Energi Listrik dan EBT	Capaian rumah tangga berlistrik (Rumah Tangga)	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
			Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterjangkauan Terhadap Penggunaan Energi Listrik dan EBT	Jumlah pasokan energi yang bersumber dari EBT (TOE)	Program pengelolaan Energi baru Terbarukan
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		Terwujudnya masyarakat inklusif dan harmonis		**Indeks Kerukunan Umat Beragama;**	
				Indeks Pembangunan Kebudayaan;	
				Indeks Pembangunan Gender;	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
			Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per	Program Perlindungan perempuan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				100.00 penduduk perempuan)	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Nilai Kota Layak Anak (KLA)	Program Pemenuhan hak anak
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase tradisi budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	Program Pengembangan kebudayaan
			Meningkatnya Kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar kebijakan	Program Kesejahteraan rakyat
	Tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas			**Indeks Reformasi Birokrasi;**	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan inovatif melayani		**Nilai SAKIP** **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;** **Indeks Pelayanan Publik;** **Indeks Inovasi Daerah ;** **Nilai LPPD;** **SPI KPK**	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				secara online dan terintegrasi	
			Peningkatan Kepatuhan terhadap Peraturan	Persentase TLHP yang diselesaikan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standar Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel	Persentase PD yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pelaporan keuangan	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	Program Pengelolaan keuangan daerah
			Meningkatnya Capaian PAD Melalui Upaya Intensifikasi Dan Eksetensifikasi	Capaian Realisasi PAD Perangkat Daerah (Rp)	Program Pengelolaan pendapatan daerah
			Meningkatnya Tata Kelola Inovasi di daerah	Tingkat kematangan Inovasi daerah	Program Riset dan Inovasi
			Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat capaian program pembangunan daerah	Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan provinsi dengan nasional bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
				Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan provinsi dengan nasional bidang Perekonomian dan SDA	
				Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan provinsi dengan nasional bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	Program penataan organisasi
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Program penyelenggaraan statistik sektoral

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	
			Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	Persentase SDM Aparatur yang meningkatkan kapasitasnya	Program kepegawaian daerah
			Meningkatnya kualitas manajemen talenta ASN	Persentase tingkat kesesuaian kompetensi PNS dengan kompetensi jabatan	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Program pengembangan sumber daya manusia
			Meningkatnya layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, managerial dan fungsional	
			Meningkatnya kualitas corpu	Nilai Strategi Penerapan Corpu	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase anak usia 0-6 tahun yang memiliki akta kelahiran	Program pencatatan sipil

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal	
				Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	
				Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai	
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP	Program pendaftaran penduduk
				Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Adminduk	
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat			**Indeks Kesejahteraan Sosial**	
		Meningkatnya kemandirian dan produktivitas masyarakat		**Tingkat Pengangguran Terbuka; Tingkat kemiskinan; Indeks Gini**	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Program Penempatan tenaga kerja
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi
			Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Pertumbuhan Wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan UMKM
			Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase fasilitasi kerjasama desa	Program peningkatan kerjasama desa
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum	Persentase fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Adat dalam Pembangunan	Persentase fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	masyarakat hukum adat
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Program perlindungan dan jaminan sosial
				Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	
		Wilayah perbatasan yang maju dan sejahtera		**Persentase desa wilayah perbatasan yang berstatus maju dan mandiri**	
			Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pengelolaan kawasan perbatasan dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Rencana Induk yang Diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah	Program Pengelolaan perbatasan negara

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya koordinasi pengelolaan kawasan perbatasan	Persentase Kegiatan Rencana Aksi Berdasarkan Rencana Induk yang Direalisasikan oleh Perangkat Daerah Pengampu	
			Meningkatnya kualitas monev terhadap pelaksanaan pengelolaan kawasan perbatasan	Persentase rekomendasi hasil monev yang dikeluarkan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan rencana aksi tahunan	
			Meningkatnya kualitas Lulusan	Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi	Program Pengelolaan pendidikan
				Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI	
				Persentase lulusan SLB yang mandiri	
			Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase PTK Profesional	
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya Tata Kelola Satuan Pendidikan	Persentase sekolah terakreditasi minimal B	
			Meningkatnya kualitas PTK	Indeks Pemerataan Guru	Program Pendidikan dan tenaga pendidikan
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
				Persentase Kab/Kota yang mencapai SPM Bidang Kesehatan Jenis Pelayanan Dasar Kesehatan Keluarga	
				Persentase Kab/Kota yang mencapai SPM Bidang Kesehatan Jenis Pelayanan Dasar Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	
				Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria. (Kab/Kota)	
				Persentase Laboratorium Kesmas Tingkat 2-3 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Proporsi fasilitas kesehatan dengan perbekalan Kesehatan sesuai standar	
				Proporsi kab/kota dengan fasilitas Kesehatan sesuai standar	
				Persentase Puskesmas dan RS Pemerintah yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar	
				Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja	
				Persentase Kab/Kota STBM	
			Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDMK	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap populasi	Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
				Persentase Faskes (Puskesmas dan RS Pemerintah) Yang Memiliki Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Sesuai Standard	
			Meningkatnya kemantapan jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Program Penyelenggaraan jalan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	
			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	Program Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Program Perlindungan dan jaminan sosial

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan skor PPH	Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
			Meningkatnya Layanan Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
				Presentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	
			Meningkatnya Layanan Transportasi Perairan	Rasio Konektivitas Angkutan Perairan	Program Pengelolaan pelayaran
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Program Pengelolaan aplikasi informatika
			Meningkatnya pengelolaan pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan dan sesuai dengan	Nilai Evaluasi, efektivitas, pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA)	Program Pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil
				Jumlah luasan wilayah laut yang dikelola	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			zonasi yang ditetapkan		
			Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
			Meningkatnya penyediaan dan pegembangan prasrana pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Program Pemerintahan dan otonomi daerah
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1. Persentase aparatur desa dan anggota BPD yg ditingkatkan kapasitasnya 2. Persentase fasilitasi tata kelola desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyrakat hukum adat dalam pembangunan	1. Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa 2. Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
	Meningkatnya ketahanan ekologi			**Penurunan Intensitas Emisi GRK**	
		Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	
			Meningkatnya Status Mutu Air Sungai, Udara dan Air Laut	Persentase pemenuhan Status mutu Air Sungai dengan Kategori Baik	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
				Persentase Parameter Status Mutu Udara tidak melampaui Baku Mutu	
				Persentase Status mutu Air laut Kategori Baik berdasarkan Baku Mutu Air laut	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Program Keanekaragaman hayati
			Meningkatnya pelaku Usaha dan/Kegiatan kewenangan provinsi yang dilakukan pengawasan	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/Kegiatan kewenangan provinsi yang dilakukan pengawasan	Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH
			Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang dikelola.	Program Pengelolaan persampahan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya Penanganan Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Nilai kinerja pengaturan penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterjangkauan Terhadap Penggunaan Energi Listrik dan EBT	Jumlah pasokan energi yang bersumber dari EBT (TOE)	Program Pengelolaan energi baru dan terbarukan
			Meningkatnya pengelolaan air tanah yang sesuai dengan ketentuan	Persentase izin pemanfaatan air tanah sesuai dengan kaidah konservasi air tanah (%)	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
			Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Provinsi yang dikelola	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
			Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase tutupan lahan pada sempadan sungai	Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Program Penanggulangan bencana
			Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	Persentase penanganan pasca bencana	
			Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	
		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim		**Indeks Risiko Bencana**	
			Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase tutupan lahan pada sempadan sungai	Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Program Penanggulangan bencana

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
			Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	Persentase penanganan pasca bencana	
			Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Nilai kinerja pengaturan penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

6.1.3. Program Unggulan Daerah

Program unggulan daerah merupakan program strategis daerah yang berdampak langsung terhadap pencapaian kinerja pembangunan Provinsi Kalimantan Utara selama 5 tahun ke depan. Perumusan program unggulan deerah berasal dari telaahan terhadap program prioritas nasional, program politik Gubernur dan Wakil Gubernur, dan permasalahan atau isu strategis daerah. Dengan kata lain, program unggulan daerah merupakan program terpilih yang diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan atau isu strategis secara cepat dan tepat sasaran.

Adapun 8 (delapan) program unggulan daerah, yaitu sebagai berikut.



Gambar 6.1.
Delapan Program Unggulan Daerah

Delapan program unggulan daerah di atas masing-masing memiliki fokus dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah. Fokus ini bertujuan untuk memperjelas arah dari program unggulan daerah. Adapun fokus masing-masing program unggulan daerah yang mendukung kinerja tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3
Keterkaitan Kinerja dengan Program Unggulan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Unggulan Kepala Daerah
Meningkatnya daya saing daerah		Indeks Daya Saing Daerah;	
	Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan	1. Indeks Ekonomi Hijau;	**Program Unggulan 4. Pengembangan Sektor Unggulan Pangan dan agribisnis yang berkelanjutan**, meliputi :
		2. Laju Pertumbuhan Ekonomi 3. Indeks Ekonomi Biru	1. Pembangunan Sentra Produksi Pertanian, Tanaman Pangan, Peternakan, Hortikultura dan Perkebunan; 2. Pengembangan Budidaya Komoditi Unggulan Daerah; 3. Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan Berkelanjutan 4. Pengembangan (Diversifikasi) Produk Pangan Lokal; 5. Peningkatan Produksi Pangan Lokal 6. Penjaminan Mutu dan Kualitas Pangan Lokal. 7. Perluasan pemasaran produk unggulan daerah
			Program Unggulan 5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan, meliputi; 1. Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon; 2. Akselerasi Hilirisasi Industri SDA Berkelanjutan. 3. Optimalisasi potensi kawasan pesisir dan kepulauan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Unggulan Kepala Daerah
			Program Unggulan 6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara, meliputi; 1. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata; 2. Penyelenggaraan Festival Budaya; 3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif.
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Indeks Modal Manusia	**Program Unggulan 1. SDM sehat, cerdas, dan setara gender,** meliputi: 1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia; 2. Peningkatan Pelayanan dan Akses Kesehatan; 3. Peningkatan Akses Pendidikan yang berkualitas dan inklusif; 4. Ketersediaan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Berkualitas 5. Penguatan Literasi Digital. 6. Peningkatan kompetensi vokasional berbasis potensi daerah
	Dukungan infrastruktur yang merata berkeadilan dan berkualitas	Indeks Infrastruktur Daerah	**Program Unggulan 7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara,** meliputi ; 1. Pembangunan Jalan dan Jembatan; 2. Pembangunan Pelabuhan, Dermaga, Terminal

Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Unggulan Kepala Daerah
			dan Bantuan Transportasi Udara (SOA Barang dan Penumpang); 3. Peningkatan kualitas layanan perhubungan yang inklusif 4. Pembangunan Jaringan Telekomunikasi (Keterjangkauan Telekomunikasi Digital).
	Terwujudnya masyarakat inklusif dan harmonis	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama;	**Program Unggulan 1, SDM sehat, cerdas, dan setara gender**, meliputi ;
		2. Indeks Pembangunan Kebudayaan;	1. Peningkatan Peran Gender dalam semua Sektor Pembangunan;
		3. Indeks Pembangunan Gender;	2. Meningkatkan Ketahanan Keluarga serta peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
			3. Peningkatan Peran dan Kualitas Kelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG)
			4. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal
Tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi;	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan inovatif melayani	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Indeks Pelayanan Publik; 4. Indeks Inovasi Daerah ;	**Program Unggulan 8**, Peningkatan tata kelola kolaboratif dan inovatif, meliputi: 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 2. Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Unggulan Kepala Daerah
		5. Nilai LPPD; 6. Survei Penilain Integritas (SPI) KPK	3. Peningkatan kualitas perencanan dan penganggaran berbasis kinerja; 4. Digitalisasi pelayanan publik; 5. Optimalisasi PAD 6. Peningkatan kualitas Penyelengaraan Pemerintahan Daerah dan penguatan *quality assurance.*
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		Indeks Kesejahteraan Sosial	
	Meningkatnya keberdayaan dan produktivitas masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka; Tingkat Kemiskinan Indeks Gini	**Program Unggulan 3. Produktivitas ekonomi kerakyatan dan pedesaan,** meliputi ; 1. Pemberdayaan wirausaha muda 2. Peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja 3. Pembentukan dan pengembangan koperasi merah putih 4. Fasilitasi Permodalan UMKM 5. Pelatihan dan Pembinaan Pelaku Usaha
			6. Peningkatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan ekonomi pedesaan 7. Peningkatan perlindungan sosial adaptif
	Wilayah perbatasan yang maju dan sejahtera	Persentase desa wilayah perbatasan yang berstatus maju dan mandiri	**Program Unggulan 2. Membangun kawasan perbatasan yang sejahtera**, meliputi ;

Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Unggulan Kepala Daerah
			1. Menyusun regulasi tingkat daerah khusus untuk pembangunan kawasan perbatasan dan kawasan Pesisir;
			2. Mengalokasikan pembiayaan pembangunan secara berimbang untuk pembangunan kawasan perbatasan dan kawasan Pesisir;
			3. Pengembangan potensi unggulan kawasan perbatasan dan kawasan Pesisir
			4. Peningkatan akses dan kualitas layanan dasar
			5. Fasilitasi Pembentukan DOB
Meningkatnya ketahanan ekologi		Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	
	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**Program Unggulan 5. Pembangunan ekonomi hijau dan biru yang berkelanjutan**, meliputi;
			1. Pengendalian kualitas lingkungan hidup
			2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
			3. Mitigasi Perubahan Iklim.
			4. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca;
	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	5. Pengembangan Energi Terbarukan.

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

6.2. Dukungan Terhadap Prioritas Nasional

Pemerintan Daerah Provinsi Kalimantan Utara mendukung penuh pelaksanaan dan pencapaian agenda pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum di dalam RPJMN, RKP, maupun kebijakan Pemerintah yang lain. Sinkronisasi perencanaan tersebut dilakukan untuk menjamin sinergi antara pusat dan daerah. Gambaran sinergi antara lain dapat dilihat pada rencana dukungan terhadap Prioritas Nasional sebagaimana dimuat dalam tabel di bawah. Dukungan tidak terbatas hanya yang termuat dalam tabel tersebut, namun dapat disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah.

Tabel 6.4
***Outcome* Prioritas, Program, dan Subkegiatan dalam Mendukung Asta Cita (PN)**
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
							1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
							1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
							1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
							1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
							1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit
							1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
							1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
							1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
					1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
							1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
					1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian						1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
					1.03.12		1.03.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
							1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
					1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.1.01.0008	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
							1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman
5	Memperkokoh ideologi Pancasila,	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Terwujudnya manajemen bencana yang	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).		KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar			1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
							1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
					1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01.0018	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
							1.05.04.1.02.0007	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
							1.06.02.1.02.0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
							1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
7	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.			tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja			2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
					2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
8	Memperkuat pembangunan sumber daya	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	2.08.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Perempuan, dan Perlindungan Anak		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02.0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
					2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan tehadap anak kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi
							2.08.07.1.02.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
9	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
							2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi
					2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi
10	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
							2.10.06.1.01.0005	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
11	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
							2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0011	Pengelolaan sampah Regional
							2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
							2.12.02.3.01.0006	Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
					2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
							2.12.03.3.02.0006	Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
14	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
							2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
							2.14.04.1.02.0011	Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
15	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
							2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)
	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,				2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.						2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
16	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
							2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.						2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
							2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
					2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
							2.16.03.1.02.0031	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
							2.16.03.1.02.0032	Penyediaan Akses Internet
							2.16.03.1.02.0036	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01.0004	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
							2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
							2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
18	Melanjutkan hilirisasi dan	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN	Pencapaian Target realisasi	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		BIDANG PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal		PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
19	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
							2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda
					2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah
							2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
20	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.1.01.0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
							2.20.02.1.01.0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dan penyelundupan.							
21	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.						2.21.02.1.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
22	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN	Peningkatan Indeks Pemajuan	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		BIDANG KEBUDAYAAN	Kebudayaan (IPK)			2.22.02.1.01.0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya
							2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya
							2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
23	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur						2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi
					2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
							2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi
							2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
25	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
							3.25.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir
							3.25.02.1.01.0011	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam
					3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
							3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi
							3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi
							3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
							3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
							3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi
							3.26.02.1.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi
							3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
							3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
							3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi
					3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar
							3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
							3.26.04.1.02.0012	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
							3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							3.26.04.1.02.0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
							3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
27	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
							3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
							3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
					3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
							3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
							3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
28	Memantapkan sistem pertahanan keamanan	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Meningkatkan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi			3.28.03.1.06.0006	Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar
					3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
							3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
29	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Pencapaian Ketahanan Energi	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
							3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi
					3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
							3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
30	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.			Domestik dan Global		DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
					3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional
							3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor
31	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
							3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
					3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission RiskBase Approach (OSS RBA)
32	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.1.01.0009	Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota
							3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi
					3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
33	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat berbagai indikator kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 sesuai kewenangan provinsi. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Adapun pengertian dari masing-masing kinerja yang menggambarkan penjenjangan yang selaras, yaitu:

a. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
b. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
c. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.

Tabel 7.1
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun	
			2024	2025	2026
Indikator Tujuan					
1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,26	3,34	3,38
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	82,86	83,00	83,40
3	Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	N/A	51,25	52,25
4	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	N/A	46,96	60,27
Indikator Sasaran					
1	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	72,09*	70,47	71,78
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,57	4,80	5,35
3	Indeks Ekonomi Biru	Angka	35,36	36,59	37,82
4	Indeks Modal Manusia	Angka	N/A	0,56	0,57
5	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	38,25	40,58	43,13
6	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	78,94	79,24	79,62
7	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	56,57*	57,87	58,40
8	Indeks Pembangunan Gender	Angka	88,77	89,00	89,36
9	Nilai SAKIP	Angka	71,05	72,52	72,64
10	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	74,997	74,997	75,997
11	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,22	4,25	4,3
12	Nilai LPPD	Angka	2,67*	2,80	2,90
13	Indeks Inovasi Daerah	Angka	53,35	58,45	60,01
14	Survei Penilaian Integritas KPK	Angka	66,42	70	73
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,9	3,69	3,49
16	Tingkat kemiskinan	%	5,38	5,07	5,00
17	Indeks Gini	Angka	0,264	0,256	0,253
18	Persentase desa wilayah perbatasan yang berstatus maju dan mandiri	%	N/A	22,06	23,04
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	79,95	77,77	77,97
20	Indeks Risiko Bencana	Angka	131,84	157,62	154,00

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029
*Ket: * angka sementara*

7.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Indikator kinerja makro akan mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum, dengan menggunakan berbagai indikator makro antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan. Indikator-indikator tersebut dapat diperbandingkan dengan nasional maupun dengan provinsi lain di Indonesia serta kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 7.2
Target Indikator Kinerja Makro Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2026

No.	Indikator	Target 2026
1	Indeks Modal Manusia	0,57
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,35
3	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	251,15
4	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,7
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,49
6	Tingkat Kemiskinan (%)	5,00
7	Indeks Gini	0,253
8	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	60,27
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,97

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Target indikator IKD tahun 2026 direncanakan dengan mempertimbangkan capaian pembangunan tahun 2024, target 2025 serta

Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun target IKD yang memuat indikator makro dan IKK tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 7.3
Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target 2026
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**		
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	78,26
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	13,16
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/ kapita	2.020,3
4	Intensitas Energi Primer	SBM/ Rp Miliar	118,1
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	77,97
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	51,55
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	7
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	32,25
9	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	93,25
10	Persentase Penurunan Emisi GRK		
	a. Kumulatif	%	35,01
	b. Tahunan	%	51,17
11	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	60,27
12	Indeks Risiko Bencana	Indeks	125,11
13	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,58
14	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	7,32
15	Kepadatan Penduduk	Orang/ km^2	10,22
16	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Angka	0,437
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,35
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,00
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	251,15
4	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0,7
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,49
6	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	52,53
7	Indeks Gini	Angka	0,253
8	Indeks Modal Manusia	Angka	0,57
9	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,16
10	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	109
11	Angka Kematian Balita	Angka	13,8
12	Cakupan Imunisasi Bayi lengkap	%	88
13	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	35
14	Prevalensi Stunting	%	14,5
15	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):		

No	Indikator	Satuan	Target 2026
	a. Cakupan Penemuan Kasus TBC (Notifikasi kasus TBC)	%	90
	b. Angka keberhasilan pengobatan TBC (TB success rate)	%	90
16	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,7
17	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	i) Literasi Membaca	%	30
	ii) Numerasi	%	25
18	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	i) Literasi Membaca	%	46,17
	ii) Numerasi	%	33,18
19	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,83
20	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,38
21	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	69
22	Indeks Literasi Digital	Angka	63,52
23	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	59,23
24	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	79,62
25	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	58,40
26	Indeks Perlindungan Anak	Angka	65,31
27	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	78,15
28	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,43
29	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	58,5
30	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	15,19
31	Persentase desa wilayah perbatasan yang berstatus maju dan mandiri	%	23,04
32	Indeks Pencapaian SPM	Angka	99, 30 % (Tuntas Utama)
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**		
1	Angka Ketergantungan	%	42,37
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	9.11
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,88
4	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	18,473
5	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,06
6	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	%	1,97
7	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	%	99,06
8	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,52
9	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0.41
10	Return on Aset (ROA) BUMD	%	1,13
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	72,54
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	54,98
13	Indeks Inovasi Daerah	Angka	60,01
14	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	71,78
15	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Angka	37,82

No	Indikator	Satuan	Target 2026
16	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	29,6
17	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	6,63
18	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Angka	8,27
19	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	27
20	Ekspor Barang dan Jasa	%	20,96
21	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	43,13
22	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	76,42
23	Persentase Desa Mandiri	%	18,12
24	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,72
25	Tingkat Inflasi	%	2,5
26	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	77,97
27	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	42,5
28	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	22,81
29	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	0,48
30	Nilai Transaksi Saham per Kapita Per Provinsi	Rupiah	5.235.330,10
31	Total Kredit/PDRB	%	15,58
32	Inklusi Keuangan	%	97,65
33	Jumlah Kerjasama Provinsi	Angka	19
34	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,53
35	Aset Perbankan Syariah/PDRB	%	1,66
36	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	5.696
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**		
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	97,4
2	Indeks Pemdi (Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Angka	3,8
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4.30
4	Indeks Integritas Nasional	Angka	75,99
5	Persentase Penegakan Perda	%	96
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	93
7	Indeks Demokrasi Indonesia	%	80,25
8	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,38
9	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	69,25
10	Indeks Ketahanan Nasional	Angka	2,65
11	Nilai LPPD	Angka	2,90 (sedang)
V.	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**		
A	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**		
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**		
1	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	%	80,17
2	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%	76,11
3	Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	74,01

No	Indikator	Satuan	Target 2026
4	Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	63,52
5	Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	72,14
6	Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	63,01
7	Rata-rata kompetensi literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	83,59
8	Rata-rata kompetensi numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	75,37
9	Rata-rata kompetensi literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	81,98
10	Rata-rata kompetensi numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	79,45
11	Rata-rata kompetensi literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	80,90
12	Rata-rata kompetensi numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	72,07
13	Tingkat penyerapan lulusan SMK	%	87,74
14	Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	80,08
15	Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMA	Nilai	83,17
16	Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMK	Nilai	72,78
17	Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SDLB	Nilai	72,67
18	Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMPLB	Nilai	84,4
19	Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMALB	Nilai	81,1
20	Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMA	Nilai	74,65
21	Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMK	Nilai	74,75
22	Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SDLB	Nilai	75,67
23	Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMPLB	Nilai	84,6
24	Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMALB	Nilai	81,5
25	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMA	Nilai	62,09
26	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMK	Nilai	61,78
27	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SDLB	Nilai	69,93
28	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMPLB	Nilai	85,3
29	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMALB	Nilai	83,7
2	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**		
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	109
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	14,5

No	Indikator	Satuan	Target 2026
3	Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	%	100
4	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100
5	Persentase pelayanan kesehatan pengurangan risiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB	%	100
6	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	%	100
3	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Provinsi	%	37
2	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan Provinsi	%	60
3	Persentase Kondisi irigasi kewenangan Provinsi	%	33,37
4	Persentase kabupaten/kota yang dibina penyelenggaraan SPAM	%	100
5	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	87,17
6	Persentase kabupaten/kota yang dibina dalam sistem pengelolaan air limbah domestik	%	100
7	Persentase kabupaten/kota yang dibina sistem pengelolaan persampahan	%	100
8	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	%	17,69
9	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi	%	90
10	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	80
4	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**		
1	Persentase warga negara korban bencana provinsi yang memperoleh rumah layak huni	%	3,5
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	11,11
4	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	20

No	Indikator	Satuan	Target 2026
5	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**		
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	96
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	orang	4
4	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan masyarakat	%	87
6	Persentase Pegawai anggota Satpol PP yang ditingkatkan menjadi pejabat fungsional	%	25
7	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	10
8	Persentase Dokumen Layanan Pencegahan Kebakaran	%	20
9	Persentase Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang sah dan legal	%	20
10	Persentase Aparatur pemadam kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	%	20
11	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang ditingkatkan untuk mengisi jabatan fungsional	%	0
12	Persentase Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang telah dilakukan pembinaan	%	20
13	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang sesuai dengan standar	%	20
14	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100
15	persentase penanganan pra bencana	%	60
16	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100
17	Persentase penanganan pasca bencana	%	100
18	Persentase Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	20
6	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**		
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100

No	Indikator	Satuan	Target 2026
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan /atau gelandangan dan pengemis di dalam panti yang layak dan sesuai standar	%	100
6	Persentase Pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan /atau gelandangan dan pengemis sesuai standar kompetensi dan/atau layanan	%	100
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	100
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana yang disediakan sesuai standar	%	100
9	Persentase pekerja sosial /tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100
10	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100
11	Persentase sarana prasarana bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang disediakan secara layak dan sesuai standar	%	100
12	Persentase Pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	%	100
13	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100
14	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	100
B.	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**		
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**		
1	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	%	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	3,92
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Org	197.071.773
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	4,98

No	Indikator	Satuan	Target 2026
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	%	55,2
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	3,01
2	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,36
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG	Indeks	0,41
3	Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD	%	3,50
4	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Rasio	100
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Rasio	100
3	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**		
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	%	100
2	Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Skor 0-100	86,8
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	15
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	88,5
4	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**		
1	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	40,06
2	Persentase Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	%	33,33
3	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu kota atau kabupaten lengkap secara berkualitas	%	60
4	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	97,56
5	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diselesaikan tepat waktu	%	50
6	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Provinsi	%	58.54
7	Persentase jumlah kab/kota yang telah memanfaatkan Peta Nilai Tanah dalam pelayanan BPHTB	%	100

No	Indikator	Satuan	Target 2026
8	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	%	99.86
5	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Indeks	77,97
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	77,00
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi	%	51,00
6	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	65,5
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	63
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	63
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	97
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	55
6	Jumlah Data Profile Kependudukan yang disusun	%	100
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	20
7	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**		
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	5,19
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	5,37
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	30
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	6,01
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	2,82
8	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	%	2,24
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	69,20
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	11,52
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	25,25
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks (skala 0-100)	68,55

No	Indikator	Satuan	Target 2026
9	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**		
1	Konektivitas Provinsi	Rasio	0,27
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan daerah	%	59,98
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	100
4	Persentase Jumlah Kendaraan Bermotor yang laik jalan	%	75,50
10	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**		
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	61,15
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	90
11	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**		
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	18,54
2	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	1,1
3	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	0.72
4	Pertumbuhan Wirausaha	%	2,72
12	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**		
1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	%	14
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100
13	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**		
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi	Indeks	58,5
2	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	%	0,15
14	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**		
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,77
15	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**		
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintahan daerah	%	50,11
16	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**		
1	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	0,41
2	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	%	0,36
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi di bidang kebudayaan	%	0,53

No	Indikator	Satuan	Target 2026
17	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**		
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	78
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	69
18	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**		
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	60
C	**Urusan Pemerintahan Pilihan**		
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**		
1	Persentase Kawasan konservasi daerah yang operasional	%	38,5
2	Produksi Perikanan Tangkap	%	88
3	Produksi Perikanan Budi Daya	%	82
4	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	%	71
2	**Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata**		
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	1,88
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang)	%	10
3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,06
4	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	4,00
3	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**		
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	2,00
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	1,00
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	2,00
4	**Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan**		
1	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	100
2	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB daerah	%	3,35
3	Persentase Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarkatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan	%	100
5	**Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**		
1	Persentase cekungan air tanah dalam provinsi yang telah di tetapkan	%	0,00
2	Penerimaan Nilai perolehan air tanah telah ditetapkan melalui perda/pergub	ada/tidak ada	ada
3	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan	%	63
6	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**		
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah per provinsi	Nilai	4,0

No	Indikator	Satuan	Target 2026
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen per Provinsi	%	100
3	Nilai Ekspor Barang Per Provinsi	Miliar Rupiah	93,62
7	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**		
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi:		
	1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	%	3,60
	2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi	%	9,11
	3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	Ribu	35.000
	4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	USD Milyar	0,70
	5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	Rp Triliun	16,00
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	19,50
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan	%	25
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	%	85
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	85
8	**Urusan Transmigrasi**		
1	Nilai Rata-rata Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans)	Nilai	65,49
2	Pendapatan Perkapita di Wilayah Transmigrasi	Rp	3.125.694,20
D	**Urusan Penunjang Pemerintahan**		
1	**Perencanaan**		
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100
2	**Keuangan**		
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	29,02
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	31,00
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	92,32
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	6,05
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	40,15

No	Indikator	Satuan	Target 2026
6	Persentase Penurunan SILPA	%	-88,75
3	**Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**		
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	75
4	**Penelitian dan Pengembangan**		
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	Persen	50
2	Persentase Jumlah Inovasi Daerah yang dilaporkan dalam Innovative government award	Persen	60
5	**Pengawasan**		
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori/Opini	WTP
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai (1-5)	3,20
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai (2-5)	3,20
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai (1-5)	3,10
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	80
6	**Fungsi Pengadaan**		
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	poin	19,3
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	poin	30
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	poin	40
7	**Hubungan dengan Perwakilan Daerah**		
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	80
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	80
8	**Pelayanan Publik**		
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	92,94

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun pertama RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029. Rencana pembangunan yang disusun pada tahun 2026 diharapkan menjadi awal bagi pemantapan fondasi pembangunan jangka menengah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan pada tahun 2026 diharapkan dapat mewujudkan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 yaitu **"Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh Sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan"**.

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RKPD Tahun 2026 memiliki peran yang penting sebab menjadi pedoman pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Untuk memastikan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 diimplementasikan sesuai dengan perencanaan, maka perlu diperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Setiap kepala perangkat daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan berpedoman pada visi dan misi serta program prioritas kepala daerah periode 2025-2029 dan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026.
b. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026 dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 untuk penyelarasan prioritas pembangunan

kabupaten/kota dengan prioritas provinsi serta mendukung pencapaian Asta Cita dan prioritas nasional tahun 2026.

c. Gubernur menyusun KUA dan PPAS Tahun 2026 berdasarkan RKPD Tahun 2026 dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama.
d. Setiap kepala perangkat daerah melakukan evaluasi hasil Renja-PD Tahun 2026 setiap triwulan pada tahun 2026. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja perangkat daerah. Hasil evaluasi dilaporkan ke Bappeda dan Litbang. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja perangkat daerah.
e. Bappeda dan Litbang melakukan evaluasi hasil RKPD Tahun 2026 setiap triwulan pada tahun 2026 berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah.
f. Pemerintah daerah melakukan manajemen risiko untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran pembangunan.
g. Pemerintah daerah mengupayakan sumber-sumber pembiayaan potensial selain APBD provinsi.
h. Pemerintah daerah mendukung dan melaksanakan Program Strategis Nasional sesuai dengan kewenangan dan arahan Pemerintah Pusat.
i. Dalam hal RKP Tahun 2026 dan/atau pemutakhiran RKP Tahun 2026 telah ditetapkan serta terdapat pemutakhiran Program Strategis Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara melakukan penambahan program/kegiatan/sub kegiatan baru yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur mengenai perubahan RKPD Tahun 2026.

8.2. Perubahan RKPD

Beberapa tatacara dalam melakukan perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025, yaitu:

a. Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat dilakukan dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukan:
   1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan/atau
   2) keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026.
b. Perumusan perubahan RKPD Tahun 2026 memperhatikan visi, misi, dan Program Kepala Daerah, serta hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.
c. Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026 ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						**689.997.212.973,00**							**765.056.888.481,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**680.270.462.973,00**							**748.248.888.481,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**680.270.462.973,00**							**748.248.888.481,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**500.513.390.873,00**						**-**	**531.440.034.253,00**	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah]	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**500.513.390.873,00**	-	-	-	-	-	-	**531.440.034.253,00**	-
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	3.600.536.703,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara	-	2.973.984.160,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1.676.552.543,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				220 Dokumen	1.923.984.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		1.923.984.160,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	477.326.902.619,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara	-	507.619.370.690,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28294 Orang/ Bulan	473.267.550.178,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		503.154.083.005,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	4.059.352.441,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		4.465.287.685,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	626.686.088,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara	-	459.354.697,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	476.686.088,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		359.354.697,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	4.704.814.304,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara	-	7.334.247.751,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	235.927.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		235.927.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Paket	930.588.059,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		1.023.646.865,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	985.416.970,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		2.444.589.776,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan Paket	241.723.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		537.809.751,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	14.400.856,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		15.840.942,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				331 Laporan	2.296.757.379,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		3.076.433.117,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	6.880.747.862,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara	-	7.437.449.690,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	138.897.146,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		152.786.861,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	3.510.850.716,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		3.510.850.716,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.231.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		3.773.812.113,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara*	-			100 %	4.968.974.980,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara	-	5.615.627.265,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				9 Unit	248.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		563.917.970,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	208.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		539.814.315,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	1.448.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		1.448.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	3.063.814.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		3.063.814.980,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase BLUD yang dibina*	-			100 %	2.404.728.317,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	SMK BLUD	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				13 Unit Kerja	2.404.728.317,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	SMK BLUD		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**178.857.072.100,00**						**-**	**216.051.533.821,00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18** **Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas**	**80.47** **82.74**	**73.93** **78.89**	**75.02** **79.53**	**76.11** **80.17**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Persentase sekolah yang memiliki fasilitas dasar yang baik* *Persentase PTK yang memiliki sertifikat kompetensi yang relevan dengan bidang tugasnya* *Tingkat implementasi hasil pembinaan manajemen dan kelembagaan di sekolah* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki MOU dengan DUDI dan PT* *Persentase peserta didik yang mendapat bantuan pendidikan*	-			71,8 % undefined % 100 % 100 % 43,5 %	99.646.522.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Atas	-	117.661.140.633,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1.500.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Atas		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Betayau, Kujau	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Atas		4.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Pura Sajau Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sekaduyan Taka	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menengah Atas		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Pura Sajau	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menengah Atas		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Malinau Seberang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Atas		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sekaduyan Taka	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menengah Atas		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu Kab. Malinau, Mentarang, Lidung Kemenci Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Sekaduyan Taka Kab. Tana Tidung, Betayau, Kujau	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Atas		3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Karang Agung Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Nunukan Tengah	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menengah Atas		1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Padaidi	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menengah Atas		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Mansapa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menengah Atas		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Malinau Hulu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menengah Atas		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjung Selor Hilir	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menengah Atas		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2.000.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Pura Sajau Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Sekaduyan Taka Kab. Tana Tidung, Betayau, Kujau	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Atas		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2000 Paket	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Atas		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				1 Unit	800.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap Hilir, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Atas		1.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Pura Sajau Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sekaduyan Taka Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kujau	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menengah Atas		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				20500 Peserta didik	13.256.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Atas		13.276.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya kualitas Lulusan]	**Persentase lulusan SLB yang mandiri** **Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi** **Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI**	**44.75** **86,81** **89.89**	**18.98** **44,45** **86.66**	**18.98** **69,27** **87.20**	**22.22** **78,31** **87.74**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				500 Peserta Didik	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Atas		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan]	**Persentase PTK Profesional**	**68.28**	**58.28**	**44.27**	**60.28**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1115 Orang	20.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Atas		29.158.227.284,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				66 Orang	834.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Atas		221.083.637,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Tata Kelola Satuan Pendidikan]	**Persentase sekolah terakreditasi minimal B**	**100.00**	**91.23**	**92.00**	**93.00**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				73 Satuan Pendidikan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Atas		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18** **Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas**	**80.47** **82.74**	**73.93** **78.89**	**75.02** **79.53**	**76.11** **80.17**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				73 Satuan Pendidikan	40.755.772.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Atas		42.370.785.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Tata Kelola Satuan Pendidikan]	**Persentase sekolah terakreditasi minimal B**	**100.00**	**91.23**	**92.00**	**93.00**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				3 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Atas		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas Lulusan]	**Persentase lulusan SLB yang mandiri** **Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi** **Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI**	**44.75** **86,81** **89.89**	**18.98** **44,45** **86.66**	**18.98** **69,27** **87.20**	**22.22** **78,31** **87.74**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				3 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Atas		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Tata Kelola Satuan Pendidikan]	**Persentase sekolah terakreditasi minimal B**	**100.00**	**91.23**	**92.00**	**93.00**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Atas		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18** **Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas**	**80.47** **82.74**	**73.93** **78.89**	**75.02** **79.53**	**76.11** **80.17**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjung Palas Tengah	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menengah Atas		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kuala Lapang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menengah Atas		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Mansalong Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Pembeliangan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menengah Atas		1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Karang Agung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menengah Atas		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				10 Ruang	8.800.000.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Sekaduyan Taka Kab. Tana Tidung, Betayau, Kujau Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Atas		3.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan]	**Persentase PTK Profesional**	**68.28**	**58.28**	**44.27**	**60.28**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				20 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menengah Atas		184.294.712,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya kualitas Lulusan]	**Persentase lulusan SLB yang mandiri** **Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi** **Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI**	**44.75** **86,81** **89.89**	**18.98** **44,45** **86.66**	**18.98** **69,27** **87.20**	**22.22** **78,31** **87.74**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				73 Satuan Pendidikan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Atas		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Persentase peserta didik yang mendapat bantuan pendidikan* *Persentase sekolah yang memiliki fasilitas dasar yang baik* *Tingkat implementasi hasil pembinaan manajemen dan kelembagaan di sekolah* *Persentase PTK yang memiliki sertifikat kompetensi yang relevan dengan bidang tugasnya* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki MOU dengan DUDI dan PT*	-			85,27 % 100 % 69,27 % 75,16 % 89,27 %	58.752.331.100,00			-	-	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	-	74.753.679.584,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18** **Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas**	**80.47** **82.74**	**73.93** **78.89**	**75.02** **79.53**	**76.11** **80.17**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Panca Agung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		1.887.254.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa														
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				1 Ruang	2.120.796.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		2.120.796.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Pa' Kemut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		791.306.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		709.364.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		686.670.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		1.145.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0009	Pembangunan Asrama Sekolah														
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				6 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Bumi Rahayu Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Liang Bunyu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		807.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0011	Pembangunan Fasilitas Parkir														
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				2 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Panca Agung Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		750.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0012	Pembangunan Kantin Sekolah														
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		325.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				3 Ruang	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Bumi Rahayu Kab. Tana Tidung, Sesayap Hilir, Sesayap Selor Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		875.425.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	0,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Pa' Kemut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		439.902.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		191.162.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				3 Paket	758.450.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kab. Nunukan, Sembakung, Pelaju Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		758.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1000 Paket	657.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		657.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				1 Unit	1.500.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Laut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				4 Paket	1.875.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Timur, Mangkupadi Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				11250 Peserta didik	6.390.225.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		6.455.625.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya kualitas Lulusan]	**Persentase lulusan SLB yang mandiri** **Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi** **Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI**	**44.75** **86,81** **89.89**	**18.98** **44,45** **86.66**	**18.98** **69,27** **87.20**	**22.22** **78,31** **87.74**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				350 Peserta Didik	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		2.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan]	**Persentase PTK Profesional**	**68.28**	**58.28**	**44.27**	**60.28**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				4176 Orang	15.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		18.973.015.584,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				36 Orang	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		820.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Tata Kelola Satuan Pendidikan]	**Persentase sekolah terakreditasi minimal B**	**100.00**	**91.23**	**92.00**	**93.00**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				34 Satuan Pendidikan	430.745.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		430.745.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18** **Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas**	**80.47** **82.74**	**73.93** **78.89**	**75.02** **79.53**	**76.11** **80.17**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				33 Satuan Pendidikan	20.385.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		20.485.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Tata Kelola Satuan Pendidikan]	**Persentase sekolah terakreditasi minimal B**	**100.00**	**91.23**	**92.00**	**93.00**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				34 Dokumen	425.215.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		425.215.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya kualitas Lulusan]	**Persentase lulusan SLB yang mandiri** **Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi** **Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI**	**44.75** **86,81** **89.89**	**18.98** **44,45** **86.66**	**18.98** **69,27** **87.20**	**22.22** **78,31** **87.74**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				34 Dokumen	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan]	**Persentase PTK Profesional**	**68.28**	**58.28**	**44.27**	**60.28**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02.0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK														
			Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi				30 Orang	345.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		345.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				34 Komunitas	197.850.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		197.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Tata Kelola Satuan Pendidikan]	**Persentase sekolah terakreditasi minimal B**	**100.00**	**91.23**	**92.00**	**93.00**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				3 Kegiatan	175.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		175.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya kualitas Lulusan]	**Persentase lulusan SLB yang mandiri** **Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi** **Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI**	**44.75** **86,81** **89.89**	**18.98** **44,45** **86.66**	**18.98** **69,27** **87.20**	**22.22** **78,31** **87.74**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik														
			Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi				500 Orang	285.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		285.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18** **Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas**	**80.47** **82.74**	**73.93** **78.89**	**75.02** **79.53**	**76.11** **80.17**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kab. Tana Tidung, Sesayap Hilir, Sesayap Selor	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		347.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik														
			Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	657.500.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		657.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				12 Ruang	4.000.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		9.511.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya kualitas Lulusan]	**Persentase lulusan SLB yang mandiri** **Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi** **Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI**	**44.75** **86,81** **89.89**	**18.98** **44,45** **86.66**	**18.98** **69,27** **87.20**	**22.22** **78,31** **87.74**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				34 Satuan Pendidikan	311.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		311.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan]	**Persentase PTK Profesional**	**68.28**	**58.28**	**44.27**	**60.28**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				34 Orang	261.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		261.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18** **Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas**	**80.47** **82.74**	**73.93** **78.89**	**75.02** **79.53**	**76.11** **80.17**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik* *Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional* *Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik* *Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90%* *Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum (Nunukan)* *Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum* *Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum (Tarakan)* *Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/rehabiltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya* *Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum* *Persentase SLB yang menjadi sekolah penggerak* *Persentase Pendidikan Khusus yang mendapatkan layanan pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) (TIKP)* *Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1* *Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik* *Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak* *Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah* *Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik* *Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik (Malinau-KTT)*	-			100 % 70,00 % 45,16 % 100 % 63 % 30,10 % 63 % 99,29 % 63,00 % 28,75 % 100 % 100 % 100 % 23,94 % 100 % 95,00 % 85 %	20.458.218.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Khusus	-	23.636.713.604,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	5.000.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Timur, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Khusus		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Khusus		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	500.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Khusus		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0007	Pembangunan Asrama Sekolah														
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Khusus		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Sesayap, Sebidai Kota Tarakan, Tarakan Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Khusus		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah														
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Khusus		650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0013	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Khusus		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)														
			Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Sebidai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Khusus		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Sebidai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Khusus		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)														
			Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	Kota Tarakan, Tarakan Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Khusus		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	Kota Tarakan, Tarakan Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Khusus		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				5 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Khusus		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				350 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Khusus		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				1 Unit	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Khusus		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				10 Paket	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Khusus		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus														
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				690 Peserta Didik	1.381.068.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Khusus		1.425.512.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas Lulusan]	**Persentase lulusan SLB yang mandiri** **Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi** **Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI**	**44.75** **86,81** **89.89**	**18.98** **44,45** **86.66**	**18.98** **69,27** **87.20**	**22.22** **78,31** **87.74**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				130 Peserta Didik	1.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Khusus		1.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan]	**Persentase PTK Profesional**	**68.28**	**58.28**	**44.27**	**60.28**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				876 Orang	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Khusus		4.239.297.878,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				7 Orang	620.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Khusus		536.725.726,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Tata Kelola Satuan Pendidikan]	**Persentase sekolah terakreditasi minimal B**	**100.00**	**91.23**	**92.00**	**93.00**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				7 Satuan Pendidikan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Khusus		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18** **Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas**	**80.47** **82.74**	**73.93** **78.89**	**75.02** **79.53**	**76.11** **80.17**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				7 Satuan Pendidikan	3.412.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Khusus		3.585.178.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Tata Kelola Satuan Pendidikan]	**Persentase sekolah terakreditasi minimal B**	**100.00**	**91.23**	**92.00**	**93.00**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				7 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Khusus		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya kualitas Lulusan]	**Persentase lulusan SLB yang mandiri** **Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi** **Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI**	**44.75** **86,81** **89.89**	**18.98** **44,45** **86.66**	**18.98** **69,27** **87.20**	**22.22** **78,31** **87.74**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				7 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Khusus		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18** **Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas**	**80.47** **82.74**	**73.93** **78.89**	**75.02** **79.53**	**76.11** **80.17**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjung Selor Hilir	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Khusus		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Bunyu Barat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Khusus		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas Lulusan]	**Persentase lulusan SLB yang mandiri** **Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi** **Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI**	**44.75** **86,81** **89.89**	**18.98** **44,45** **86.66**	**18.98** **69,27** **87.20**	**22.22** **78,31** **87.74**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				7 Satuan Pendidikan	215.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Khusus		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan]	**Persentase PTK Profesional**	**68.28**	**58.28**	**44.27**	**60.28**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	380.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Khusus		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18** **Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas**	**80.47** **82.74**	**73.93** **78.89**	**75.02** **79.53**	**76.11** **80.17**	**178.857.072.100,00**	-	-	-	-	-	-	**216.051.533.821,00**	-
	1.01.02.1.03.0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Ruang	0,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Satuan Pendidikan Khusus		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0078	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Khusus		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat				3 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Khusus		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**900.000.000,00**						**-**	**757.320.407,00**	
		[Meningkatnya kualitas PTK]	**Indeks Pemerataan Guru**	**4.14**	**0.17**	**0.83**	**1.49**	**900.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**757.320.407,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	*Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan* *Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan sesuai kompetensi*	-			47,89 % 95,78 %	900.000.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada SMA/SMK/SLB	-	757.320.407,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				77 Dokumen	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada SMA/SMK/SLB		662.655.356,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				5 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada SMA/SMK/SLB		94.665.051,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.726.750.000,00**							**16.808.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**9.726.750.000,00**							**16.808.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**6.026.750.000,00**						**-**	**12.053.500.000,00**	
		[Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan]	**Persentase tradisi budaya yang dilestarikan dan dikembangkan**	**100.00**	**16.00**	**16.00**	**20.00**	**6.026.750.000,00**	-	-	-	-	-	-	**12.053.500.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan*	-			55 %	1.201.750.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara	-	3.403.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				40 Orang	225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi				10 Objek	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0012	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota														
			Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.026.750.000,00**	-	-	-	-	-	-	**12.053.500.000,00**	-
	2.22.02.1.01.0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan				0 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan]	**Persentase tradisi budaya yang dilestarikan dan dikembangkan**	**100.00**	**16.00**	**16.00**	**20.00**	**6.026.750.000,00**	-	-	-	-	-	-	**12.053.500.000,00**	-
	2.22.02.1.01.0014	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina				50 Orang	151.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		303.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi				5 Laporan	225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	*Persentase Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan*	-			55 %	725.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara	-	3.950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				20 Objek	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				5 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				10 Sertifikat	225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya undefined*	-			1 Lembaga undefined undefined undefined undefined	4.100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara	-	4.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				2 0	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat														
			0				20 0	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				5 Unit	3.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**						**800.000.000,00**						**-**	**1.500.000.000,00**	
		[Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional]	**Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan**	**19,05**	**13,44**	**14,52**	**15,05**	**800.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.500.000.000,00**	-
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase sanggar seni yang mendapat pembinaan Tata Kelola Manajemen Pesentase Pelaku Seni dan Tenaga Kebudayaan yang di Sertifikasi*	-			50 % 50 %	800.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara	-	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				25 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				20 Sertifikat	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				25 Lembaga	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**						**625.000.000,00**						**-**	**1.400.000.000,00**	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah]	**Persentase sejarah lokal yang dilestarikan**	**100.00**	**0.00**	**10.00**	**20.00**	**625.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.400.000.000,00**	-
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	*Persentase Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang diberdayakan/dibina* *Jumlah Aplikasi/Portal Sejarah Provinsi Kalimantan Utara yang dibuat*	-			50 % 1 %	625.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara	-	1.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				50 Orang	225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat				5 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penulisan Sejarah Lokal *Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal*				5 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**1.575.000.000,00**						**-**	**1.050.000.000,00**	
		[Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan]	**Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan**	**0.61**	**0.31**	**0.36**	**0.41**	**1.575.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.050.000.000,00**	-
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	*Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan* *Jumlah Cagar Budaya yang diperingkatkan provinsi*	-			15 Objek 5 Objek	325.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				15 Objek	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				5 Objek	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	*Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya* *Jumlah Cagar Budaya peringkat provinsi yang dilindungi* *Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikembangkan*	-			25 Orang 11 Objek 50 Objek	1.250.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara	-	1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi				5 Objek	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				15 Objek	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				0 Objek	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				50 Orang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**						**700.000.000,00**						**-**	**804.500.000,00**	
		[Meningkatnya pelestarian museum daerah]	**Persentase museum yang dilestarikan**	**100.00**	**28.57**	**28.57**	**42.86**	**700.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**804.500.000,00**	-
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	*Tersusunnya Naskah Akademis Pendirian UPTD Museum Provinsi* *Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Museum* *Jumlah Tenaga Permuseuman yang terlatih*	-			1 Dokumen 1 Paket 50 Orang	700.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara	-	804.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan				30 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				50 Orang	300.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Tengah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		404.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				1 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Tanjung Palas Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		CABANG DINAS TARAKAN						**1.500.000.000,00**							**2.050.290.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.500.000.000,00**							**2.050.290.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.500.000.000,00**							**2.050.290.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**996.000.000,00**						**-**	**963.790.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**996.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**963.790.000,00**	-
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang yang Sesuai Regulasi*	-			100 %	122.400.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan	-	130.100.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	122.400.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan		130.100.000,00	CABANG DINAS TARAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Sesuai Standar Peraturan yang berlaku*	-			100 %	6.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan	-	50.000.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	6.500.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan		50.000.000,00	CABANG DINAS TARAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	493.311.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan	-	532.800.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	113.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan		145.300.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	89.311.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan		95.500.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	11.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan		17.000.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan		275.000.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Sesuai Standar Regulasi*	-			100 %	154.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan	-	44.800.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	94.500.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan		0,00	CABANG DINAS TARAKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**996.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**963.790.000,00**	-
	1.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	31.500.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan		0,00	CABANG DINAS TARAKAN
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**996.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**963.790.000,00**	-
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	28.500.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan		44.800.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang*	-			100 %	155.274.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan	-	122.090.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.300.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan		4.300.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	45.974.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan		47.500.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	105.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan		70.290.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang Terpelihara*	-			100 %	64.015.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	BMD pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan	-	84.000.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	BMD pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan		13.000.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	39.625.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	BMD pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan		43.000.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	24.390.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	BMD pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan		28.000.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**504.000.000,00**						**-**	**1.086.500.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Lulusan Satuan Pendidikan]	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18** **Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas** **Persentase lulusan SLB yang mandiri** **Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi** **Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI** **Persentase sekolah terakreditasi minimal B**	**45** **63.50** **80** **86** **87.14** **96**	**30** **53.18** **74** **75** **80** **82.64**	**31** **54.78** **75** **76** **81** **83.14**	**32** **56.42** **76** **78** **81** **83.74**	**504.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.086.500.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak* *Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik* *Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1* *Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak* *Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah* *Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik* *Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum (Tarakan)* *Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum* *Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional* *Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90%*	-			23,94 % 95,00 % 100 % 28,75 % 100 % 45,16 % 63 % 30,10 % 70,00 % 100 %	252.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tarakan dan Pulau Bunyu	-	446.500.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				458 Peserta Didik	181.700.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tarakan dan Pulau Bunyu		210.000.000,00	CABANG DINAS TARAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				14 Satuan Pendidikan	20.300.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tarakan dan Pulau Bunyu		75.300.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				15 Dokumen	50.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tarakan dan Pulau Bunyu		45.500.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tarakan dan Pulau Bunyu		80.700.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tarakan dan Pulau Bunyu		35.000.000,00	CABANG DINAS TARAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)* *Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1* *Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik* *Persentase siswa SMK besertifikasi sekolah* *Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik* *Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90%* *Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum* *Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah* *Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum (Tarakan)* *Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional*	-			14,10 % 100 % 95,00 % 100 % 45,16 % 100 % 30,10 % 100 % 63 % 70,00 %	252.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan di Kota Tarakan dan Pulau Bunyu	-	345.000.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				250 Peserta Didik	200.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan di Kota Tarakan dan Pulau Bunyu		200.000.000,00	CABANG DINAS TARAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				9 Satuan Pendidikan	40.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan di Kota Tarakan dan Pulau Bunyu		60.000.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				9 Dokumen	12.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan di Kota Tarakan dan Pulau Bunyu		30.000.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan di Kota Tarakan dan Pulau Bunyu		25.000.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan di Kota Tarakan dan Pulau Bunyu		30.000.000,00	CABANG DINAS TARAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik* *Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90%* *Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik* *Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)* *Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum* *Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional* *Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah* *Persentase siswa SMK besertifikasi sekolah* *Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1* *Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum*	-			95 % 10 % 45 % 14 % 63 % 70 % 10 % 10 % 10 % 30 %	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Khusus di Kota Tarakan dan Pulau Bunyu	-	295.000.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Khusus di Kota Tarakan dan Pulau Bunyu		165.000.000,00	CABANG DINAS TARAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Khusus di Kota Tarakan dan Pulau Bunyu		40.000.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Khusus di Kota Tarakan dan Pulau Bunyu		40.000.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Khusus di Kota Tarakan dan Pulau Bunyu		50.000.000,00	CABANG DINAS TARAKAN
		CABANG DINAS NUNUKAN						**1.499.998.294,00**							**2.165.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.499.998.294,00**							**2.165.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.499.998.294,00**							**2.165.000.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**790.000.000,00**						**-**	**953.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**790.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**953.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi*	-			100 %	90.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Seluruh ASN di Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Nunukan	-	90.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Seluruh ASN di Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Nunukan		90.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku*	-			100 %	6.500.000,00			-	-	-	-	6.500.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	6.500.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		6.500.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nunukan) meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah*	-			100 % 100 %	410.500.000,00			-	-	Seluruh ASN di Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Nunukan	-	526.500.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	50.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Seluruh ASN di Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Nunukan		70.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	50.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Seluruh ASN di Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Nunukan		94.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	7.500.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Seluruh ASN di Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Nunukan		9.500.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Seluruh ASN di Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Nunukan		3.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	300.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Seluruh ASN di Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Nunukan		350.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**790.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**953.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Tarakan)* *Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan (Nunukan)* *Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah (Malinau-KTT)*	-			1 Unit 90 % 100 %	70.000.000,00			-	-	Meningkatnya Mutu Pendidikan	-	110.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Meningkatnya Mutu Pendidikan		90.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
		[Meningkatnya Kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**790.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**953.000.000,00**	-
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	20.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Meningkatnya Mutu Pendidikan		20.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang*	-			100 %	135.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Nunukan	-	135.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Nunukan		3.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	38.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Nunukan		38.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	94.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Nunukan		94.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**790.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**953.000.000,00**	-
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*BMD yang terpelihara Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Nunukan)*	-			17 Unit 90 %	78.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Seluruh BMD Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Nunukan	-	85.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	20.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Seluruh BMD Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Nunukan		20.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
		[Meningkatnya Kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**790.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**953.000.000,00**	-
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	8.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Seluruh BMD Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Nunukan		15.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Seluruh BMD Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Nunukan		50.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**709.998.294,00**						**-**	**1.212.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Lulusan Satuan Pendidikan]	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18** **Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas** **Persentase lulusan SLB yang mandiri** **Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi** **Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI** **Persentase sekolah terakreditasi minimal B**	**30** **43,09** **73** **77,58** **92**	**21** **40,09** **63** **75,06** **88**	**22** **40,09** **63** **75,06** **88**	**23** **24** **40.69** **65** **75,9** **89**	**709.998.294,00**	-	-	-	-	-	-	**1.212.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* *Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan* *Meningkatnya Kualitas Manajemen Layanan Pendidikan dan Kompetensi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas* *Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* *Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional*	-			400 Siswa 1 Kegiatan 4 Kegiatan 18 Satuan Pendidikan 18 Satuan Pendidikan 18 Dokumen 70,00 %	324.999.147,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	siswa sekolah menegah atas yang ada di kabupaten nunukan	-	560.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				400 Peserta Didik	174.999.147,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	siswa sekolah menegah atas yang ada di kabupaten nunukan		250.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				18 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	siswa sekolah menegah atas yang ada di kabupaten nunukan		70.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				18 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	siswa sekolah menegah atas yang ada di kabupaten nunukan		90.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	siswa sekolah menegah atas yang ada di kabupaten nunukan		150.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional*	-			70,00 %	324.999.147,00			-	-	siswa sekolah menegah Kejuruan yang ada di kabupaten nunukan	-	567.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				400 Peserta Didik	174.999.147,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	siswa sekolah menegah Kejuruan yang ada di kabupaten nunukan		300.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				11 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	siswa sekolah menegah Kejuruan yang ada di kabupaten nunukan		45.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				25 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	siswa sekolah menegah Kejuruan yang ada di kabupaten nunukan		72.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	siswa sekolah menegah Kejuruan yang ada di kabupaten nunukan		150.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional*	-			70,00 %	60.000.000,00			-	-	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	85.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				20 Peserta Didik	40.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik		60.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				1 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik		10.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik		15.000.000,00	CABANG DINAS NUNUKAN
		CABANG DINAS KTT-MALINAU						**1.499.985.182,00**							**1.644.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.499.985.182,00**							**1.644.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.499.985.182,00**							**1.644.000.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**851.985.182,00**						**-**	**1.009.000.000,00**	
		[Terwujudnya Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang optimal]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**851.985.182,00**	-	-	-	-	-	-	**1.009.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	5.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN Cabang Dinas Wilayah Malinau dan Tana Tudung	-	32.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN Cabang Dinas Wilayah Malinau dan Tana Tudung		10.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	0,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN Cabang Dinas Wilayah Malinau dan Tana Tudung		12.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN Cabang Dinas Wilayah Malinau dan Tana Tudung		10.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Malinau-KTT)* *Persentase Penyediaan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 % 100 %	97.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN dilingkungan Cabang Dinas Wilayah Malinau dan Tana Tudung	-	110.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	97.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN dilingkungan Cabang Dinas Wilayah Malinau dan Tana Tudung		100.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN dilingkungan Cabang Dinas Wilayah Malinau dan Tana Tudung		10.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	45.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	45.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	45.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		45.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Malinau-KTT)*	-			100 % 100 %	450.168.081,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	502.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	20.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		60.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	99.168.081,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		72.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	20.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		20.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	311.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		350.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah (Malinau-KTT)*	-			100 %	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN dilingkungan Cabang Dinas Wilayah Malinau dan Tana Tudung	-	37.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN dilingkungan Cabang Dinas Wilayah Malinau dan Tana Tudung		27.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN dilingkungan Cabang Dinas Wilayah Malinau dan Tana Tudung		10.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Malinau-KTT)* *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 % 100 %	127.817.101,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN dilingkungan Cabang Dinas Wilayah Malinau dan Tana Tudung	-	141.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.817.101,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN dilingkungan Cabang Dinas Wilayah Malinau dan Tana Tudung		6.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN dilingkungan Cabang Dinas Wilayah Malinau dan Tana Tudung		25.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	102.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN dilingkungan Cabang Dinas Wilayah Malinau dan Tana Tudung		110.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara* *Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Malinau-KTT)*	-			100 % 100 %	127.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN dan Satuan Pendidikan dilingkungan Cabang Dinas Wilayah Malinau dan Tana Tudung	-	142.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN dan Satuan Pendidikan dilingkungan Cabang Dinas Wilayah Malinau dan Tana Tudung		22.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	12.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN dan Satuan Pendidikan dilingkungan Cabang Dinas Wilayah Malinau dan Tana Tudung		20.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	95.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN dan Satuan Pendidikan dilingkungan Cabang Dinas Wilayah Malinau dan Tana Tudung		100.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**648.000.000,00**						**-**	**635.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Lulusan Satuan Pendidikan]	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18** **Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas** **Persentase lulusan SLB yang mandiri** **Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi** **Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI** **Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi** **Persentase sekolah terakreditasi minimal B**	**40** **42.34** **62** **80** **82** **87** **90**	**0** **30** **50** **73** **80** **82**	**31** **36.34** **52** **74** **82** **83**	**33** **37.82** **55** **75** **76** **83** **84**	**648.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**635.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah* *Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik* *Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1* *Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum* *Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional* *Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90%* *Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak* *Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum*	-			100 % 95,00 % 100 % 30,10 % 70,00 % 100 % 28,75 % 63,00 %	355.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menegah Atas Wilayah Malinau dan Tana Tidung	-	310.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				175 Peserta Didik	180.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menegah Atas Wilayah Malinau dan Tana Tidung		90.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				23 Orang	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menegah Atas Wilayah Malinau dan Tana Tidung		35.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				23 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menegah Atas Wilayah Malinau dan Tana Tidung		90.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				16 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menegah Atas Wilayah Malinau dan Tana Tidung		30.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menegah Atas Wilayah Malinau dan Tana Tidung		10.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	30.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menegah Atas Wilayah Malinau dan Tana Tidung		35.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				23 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menegah Atas Wilayah Malinau dan Tana Tidung		20.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Persentase siswa SMK besertifikasi sekolah* *Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum* *Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)* *Persentase SMK yang memperoleh status BLUD* *Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90%* *Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik (Malinau-KTT)* *Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional* *Persentase Sekolah Menengah Kejuruan yang mendapatkan layanan pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) (TIKP)*	-			65 % 63,00 % 14,10 % 20,35 % 100 % 75 % 70,00 % 100 %	176.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menegah Kejuruan Wilayah Malinau dan Tana Tidung	-	205.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				45 Peserta Didik	80.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menegah Kejuruan Wilayah Malinau dan Tana Tidung		60.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				15 Orang	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menegah Kejuruan Wilayah Malinau dan Tana Tidung		20.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				6 Satuan Pendidikan	70.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menegah Kejuruan Wilayah Malinau dan Tana Tidung		45.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				6 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menegah Kejuruan Wilayah Malinau dan Tana Tidung		17.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menegah Kejuruan Wilayah Malinau dan Tana Tidung		10.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	16.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menegah Kejuruan Wilayah Malinau dan Tana Tidung		26.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				6 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Menegah Kejuruan Wilayah Malinau dan Tana Tidung		27.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum* *Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum* *Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90%* *Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional* *Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah* *Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik* *Persentase SLB yang menjadi sekolah penggerak* *Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik*	-			30,10 % 63,00 % 100 % 70,00 % 100 % 45,16 % 28,75 % 95,00 %	117.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Khusus Wilayah Malinau dan Tana Tidung	-	120.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				60 Peserta Didik	70.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Khusus Wilayah Malinau dan Tana Tidung		45.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				10 Orang	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Khusus Wilayah Malinau dan Tana Tidung		15.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				2 Satuan Pendidikan	25.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Khusus Wilayah Malinau dan Tana Tidung		25.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				6 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Khusus Wilayah Malinau dan Tana Tidung		8.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			0				0 0	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Khusus Wilayah Malinau dan Tana Tidung		6.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	12.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Khusus Wilayah Malinau dan Tana Tidung		15.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				2 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Satuan Pendidikan Khusus Wilayah Malinau dan Tana Tidung		6.000.000,00	CABANG DINAS KTT-MALINAU
		UPT TAMAN BUDAYA						**2.841.115.207,00**							**3.410.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.124.940.000,00**							**1.410.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.124.940.000,00**							**1.410.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.124.940.000,00**						**-**	**1.410.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang UPT Taman Budaya]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.124.940.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.410.000.000,00**	-
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Taman Budaya)*	-			100 %	88.440.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT Taman Budaya	-	105.000.000,00	UPT TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	88.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT Taman Budaya		105.000.000,00	UPT TAMAN BUDAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Taman Budaya)*	-			100 %	15.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT Taman Budaya	-	50.000.000,00	UPT TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT Taman Budaya		50.000.000,00	UPT TAMAN BUDAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	713.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT Taman Budaya	-	833.000.000,00	UPT TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT Taman Budaya		173.000.000,00	UPT TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	153.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT Taman Budaya		250.000.000,00	UPT TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT Taman Budaya		10.000.000,00	UPT TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT Taman Budaya		400.000.000,00	UPT TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	155.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT Taman Budaya	-	185.000.000,00	UPT TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT Taman Budaya		5.000.000,00	UPT TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT Taman Budaya		35.000.000,00	UPT TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT Taman Budaya		145.000.000,00	UPT TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara*	-			100 %	153.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT Taman Budaya	-	237.000.000,00	UPT TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT Taman Budaya		2.000.000,00	UPT TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT Taman Budaya		85.000.000,00	UPT TAMAN BUDAYA
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	77.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT Taman Budaya		150.000.000,00	UPT TAMAN BUDAYA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.716.175.207,00**							**2.000.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.716.175.207,00**							**2.000.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**1.716.175.207,00**						**-**	**2.000.000.000,00**	
		[Meningkatnya Peran serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan]	**Persentase pelaku seni budaya yang terfasilitasi**	**90**	**45**	**50**	**55**	**1.716.175.207,00**	-	-	-	-	-	-	**2.000.000.000,00**	-
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase Pelaku Seni Budaya Yang Terfasilitasi*	-			100 %	1.716.175.207,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Seniman dan Budayawan Kalimantan Utara	-	2.000.000.000,00	UPT TAMAN BUDAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				100 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Seniman dan Budayawan Kalimantan Utara		350.000.000,00	UPT TAMAN BUDAYA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.716.175.207,00**	-	-	-	-	-	-	**2.000.000.000,00**	-
	2.22.02.1.01.0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi				4 Objek	1.466.175.207,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Seniman dan Budayawan Kalimantan Utara		1.650.000.000,00	UPT TAMAN BUDAYA
		UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN						**1.500.000.000,00**							**2.894.420.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.500.000.000,00**							**2.894.420.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.500.000.000,00**							**2.894.420.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**767.600.000,00**						**-**	**1.652.420.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi]	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**767.600.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.652.420.000,00**	-
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	-			12 Dokumen	81.960.000,00			-	-	ASN UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara	-	81.960.000,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	81.960.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	ASN UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara		81.960.000,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	-			5 Orang	31.000.000,00			-	-	ASN UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	31.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	ASN UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	-			5 Paket	280.621.594,00			-	-	ASN UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara	-	815.000.000,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	114.984.126,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	ASN UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara		500.000.000,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	11.287.468,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	ASN UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara		50.000.000,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	4.350.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	ASN UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara		15.000.000,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	ASN UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara		250.000.000,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	28.000.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	-	-	50.000.000,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	-		50.000.000,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	-			5 Paket	143.833.406,00			-	-	ASN dan PTT UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara	-	485.460.000,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.500.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	ASN dan PTT UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	35.460.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	ASN dan PTT UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara		35.460.000,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	103.873.406,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	ASN dan PTT UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara		450.000.000,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**767.600.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.652.420.000,00**	-
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	-			1 Unit	202.185.000,00			-	-	ASN dan PTT UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara	-	220.000.000,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	19.185.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	ASN dan PTT UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara		40.000.000,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
		[Meningkatnya pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi]	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**767.600.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.652.420.000,00**	-
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	3.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	ASN dan PTT UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	180.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	ASN dan PTT UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara		180.000.000,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**732.400.000,00**						**-**	**1.242.000.000,00**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Satuan Pendidikan]	**Persentase sekolah terakreditasi minimal B**	**100**	**91,23**	**91,23**	**93**	**732.400.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.242.000.000,00**	-
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan*	-			5 Konten Digital	338.320.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Guru dan Tenaga Pendidik Jenjang Sekolah Menengah Atas	-	720.000.000,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				250 Orang	139.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Guru dan Tenaga Pendidik Jenjang Sekolah Menengah Atas		360.000.000,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	139.260.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Guru dan Tenaga Pendidik Jenjang Sekolah Menengah Atas		0,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	60.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Guru dan Tenaga Pendidik Jenjang Sekolah Menengah Atas		360.000.000,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan*	-			5 Konten Digital	266.520.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Guru dan Tenaga Pendidik Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan	-	522.000.000,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				250 Orang	133.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Guru dan Tenaga Pendidik Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan		312.000.000,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	133.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Guru dan Tenaga Pendidik Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan		210.000.000,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan*	-			5 Konten Digital	127.560.000,00			-	-	Guru dan Tenaga Pendidik Jenjang Pendidikan Khusus / Sekolah Luar Biasa	-	0,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	127.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Guru dan Tenaga Pendidik Jenjang Pendidikan Khusus / Sekolah Luar Biasa		0,00	UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN						**65.195.000.000,00**							**143.072.863.986,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**65.195.000.000,00**							**143.072.863.986,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**65.195.000.000,00**							**143.072.863.986,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**24.289.245.000,00**						**-**	**57.358.074.550,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**0** **100**	**0** **100**	**100**	**24.289.245.000,00**	-	-	-	-	-	-	**57.358.074.550,00**	-
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun*	-			6 Dokumen	680.000.000,00			-	-	OPD Dinas Kesehatan	-	1.660.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Dinas Kesehatan		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Dinas Kesehatan		330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Dinas Kesehatan		330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.289.245.000,00**	-	-	-	-	-	-	**57.358.074.550,00**	-
	1.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	OPD Dinas Kesehatan		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**0** **100**	**0** **100**	**100**	**24.289.245.000,00**	-	-	-	-	-	-	**57.358.074.550,00**	-
	1.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Dinas Kesehatan		230.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu														
			Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu				3 Substansi	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Dinas Kesehatan		320.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	15.987.482.830,00			-	-	Aparatur Dinkes	-	14.998.074.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/ Bulan	14.425.722.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Aparatur Dinkes		12.998.074.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				750 Dokumen	1.561.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinkes		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	75.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian*	-			12 Bulan	550.000.000,00			-	-	Aparatur Dinas Kesehatan	-	1.010.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinas Kesehatan		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinas Kesehatan		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinas Kesehatan		650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinas Kesehatan		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	2.323.750.370,00			-	-	Aparatur Dinkes	-	3.140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				35 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinkes		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinkes		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	1.420.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinkes		1.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	178.750.370,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinkes		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinkes		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinkes		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah BMD yang diadakan*	-			7 Jenis	500.000.000,00			-	-	Gedung Kantor Dinkes	-	28.950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Gedung Kantor Dinkes		5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	100.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Gedung Kantor Dinkes		5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Gedung Kantor Dinkes		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Gedung Kantor Dinkes		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Gedung Kantor Dinkes		15.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	150.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Gedung Kantor Dinkes		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	150.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Gedung Kantor Dinkes		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah yang disediakan*	-			12 Bulan	2.878.011.800,00			-	-	OPD Dinkes	-	5.325.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Dinkes		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.275.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Dinkes		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Dinkes		275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.478.011.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Dinkes		3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya*	-			32 Item	1.320.000.000,00			-	-	Kendaraan Dinas dan Operasional Dinas	-	2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				32 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kendaraan Dinas dan Operasional Dinas		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	470.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kendaraan Dinas dan Operasional Dinas		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kendaraan Dinas dan Operasional Dinas		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kendaraan Dinas dan Operasional Dinas		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kendaraan Dinas dan Operasional Dinas		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kendaraan Dinas dan Operasional Dinas		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**39.155.755.000,00**						**-**	**82.959.789.436,00**	
		[Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatanyang berkualitas baik, adil, dan terjangkau]	**Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.** **Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi**	**100** **1.4** **23.4**	**-** **.** **0**	**1** **100** **12.4**	**1** **100** **11.4**	**39.155.755.000,00**	-	-	-	-	-	-	**82.959.789.436,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			malaria. **Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan** **Penemuan Kasus TBC** **Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis** **Persentase Kab/Kota STBM** **Persentase kab/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar** **Persentase kab/kota yang mencapai target kekebalan kelompok** **Persentase Laboratorium Kesmas Tingkat 2-3 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya** **Persentase lansia mandiri** **Persentase Puskesmas dan RS Pemerintah yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar** **Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja** **Presentase Kab/Kota yang mencapai SPM Bidang Kesehatan Jenis Pelayanan Dasar Kesehatan Keluarga** **Presentase Kab/Kota yang mencapai SPM Bidang Kesehatan Jenis Pelayanan Dasar Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular** **Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun** **Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun** **Prevalensi obesitas pada penduduk umur ?18 tahun.** **Proporsi fasilitas kesehatan dengan perbekalan Kesehatan**	**3** **5** **65** **70** **7.4** **75** **80** **85** **90** **95**	**100** **12.9** **3** **60** **6.3**	**1.4** **20** **23.4** **25** **3** **30** **36** **50** **75** **80** **83** **85** **90**	**1.4** **1423.43** **30** **35** **38** **4** **46** **55** **70** **77** **80** **86** **87** **90**								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			sesuai standar **Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional** **Proporsi kab/kot dengan fasilitas Kesehatan sesuai standar**													
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun* *Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan* *Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan* *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar* *Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000* *Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas* *Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan* *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan*	-			1 Unit 20 Layanan 3 Jenis 2 Unit 1 Unit 3 Unit 5 Dokumen 70 Unit	9.281.305.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Fasilitas Kesehatan	-	44.239.789.436,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Fasilitas Kesehatan		15.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	5.777.505.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Fasilitas Kesehatan		13.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Fasilitas Kesehatan		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)														
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan				20 Layanan	1.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Fasilitas Kesehatan		3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				4 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Fasilitas Kesehatan		1.587.044.436,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				3 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Fasilitas Kesehatan		6.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				5 Dokumen	703.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Fasilitas Kesehatan		809.370.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Fasilitas Kesehatan		2.843.375.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat* *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* *Jumlah Public Safety Center*	-			1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 1 Unit 1 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen	29.024.450.000,00			-	-	Masyarakat, Tenaga Kesehatan	-	37.870.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) *Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas* *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak* *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif* *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan* *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)* *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* *Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* *Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis* *Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan* *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji* *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut* *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1000 Jiwa 5 Paket undefined Jiwa 1 Dokumen 414 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				1000 Orang	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				5 Dokumen	850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				5 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				4 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				5 Dokumen	785.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	2.054.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		3.770.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				414 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				1 Dokumen	235.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		440.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis				100 Orang	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		1.260.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	20.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		25.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				2 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				5 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				5 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan*	-			40 Unit	850.000.000,00			-	-	Fasilitas Kesehatan	-	850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				40 Unit	850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Fasilitas Kesehatan		850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**550.000.000,00**						**-**	**630.000.000,00**	
		[Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDMK]	**Persentase Faskes (Puskesmas dan RS Pemerintah) Yang Memiliki Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Sesuai Standard** **Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar** **Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap populasi**	**48** **50** **5.5**	**-** **.**	**12** **41** **5.3**	**158** **42** **5.3**	**550.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**630.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan* *Jumlah Kab / Kota Yang Mendapatkan Peningkatkan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan*	-			5 Kabupaten/ Kota 5 Kab / Kota	550.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	SDM Kesehatan	-	630.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				25 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	SDM Kesehatan		360.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				20 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	SDM Kesehatan		270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**150.000.000,00**						**-**	**275.000.000,00**	
		[Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar]	**Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan** **Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah** **Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu**	**100** **90** **.** **100**	**100** **75**	**100** **80**	**150.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**275.000.000,00**	-
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	*Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan*	-			3 Unit	150.000.000,00			-	-	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	-	275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK														
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan				3 Sarana	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		275.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.050.000.000,00**						**-**	**1.850.000.000,00**	
		[Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat]	**Persentase kabupaten/kota yang membudayakan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)**	**90**	**.**	**40**	**50**	**1.050.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.850.000.000,00**	-
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase kab/kota yang memiliki minimal 5 Perjanjian Kerjasama (PKS) bidang Kesehatan*	-			20 Persen	400.000.000,00			-	-	Dunia Usaha	-	600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				5 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Dunia Usaha		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase kab/kota yang melaksanakan kampanye kesehatan (Germas)*	-			50 Persen	350.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				5 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Masyarakat		550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Kab / Kota Yang difasilitasi dalam Peningkatan Kualitas Posyandu*	-			5 Kab/Kota	300.000.000,00			-	-	Posyandu	-	700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				5 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	Posyandu		700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK						**352.875.391.259,00**							**414.436.772.242,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**352.875.391.259,00**							**414.436.772.242,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**352.875.391.259,00**							**414.436.772.242,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**322.765.391.259,00**						**-**	**357.086.772.242,00**	
		[Terwujudnya program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang Eketif dan Efisien]	**CAPAIAN NILAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL**	**98**	**85**	**86**	**87**	**322.765.391.259,00**	-	-	-	-	-	-	**357.086.772.242,00**	-
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	140.000.000,00			-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara	-	240.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**322.765.391.259,00**	-	-	-	-	-	-	**357.086.772.242,00**	-
	1.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		20.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		20.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
		[Terwujudnya program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang Eketif dan Efisien]	**CAPAIAN NILAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL**	**98**	**85**	**86**	**87**	**322.765.391.259,00**	-	-	-	-	-	-	**357.086.772.242,00**	-
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah*	-			1 Dokumen	119.149.772.242,00			-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara	-	119.159.772.242,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				689 Orang/ Bulan	118.449.772.242,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		118.449.772.242,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		60.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersusunnya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*	-			1 Dokumen	40.000.000,00			-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara	-	40.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		20.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		20.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya laporan administrasi pendapatan perangkat daerah*	-			1 Laporann	60.000.000,00			-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara	-	75.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		25.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		25.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		25.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			1 Dokumen	2.340.000.000,00			-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara	-	5.050.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				5 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		350.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		25.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		25.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**322.765.391.259,00**	-	-	-	-	-	-	**357.086.772.242,00**	-
	1.02.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun														
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				11 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN														
			Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan				3 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
		[Terwujudnya program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang Eketif dan Efisien]	**CAPAIAN NILAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL**	**98**	**85**	**86**	**87**	**322.765.391.259,00**	-	-	-	-	-	-	**357.086.772.242,00**	-
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				250 Orang	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		3.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		1.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersusunnya dokumen administrasi umum perangkat daerah*	-			1 Dokumen	870.000.000,00			-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara	-	1.100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah yang sesuai kebutuhan*	-			8 Unit	500.000.000,00			-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara	-	2.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		1.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		1.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**322.765.391.259,00**	-	-	-	-	-	-	**357.086.772.242,00**	-
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
		[Terwujudnya program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang Eketif dan Efisien]	**CAPAIAN NILAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL**	**98**	**85**	**86**	**87**	**322.765.391.259,00**	-	-	-	-	-	-	**357.086.772.242,00**	-
	1.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			2 Laporan	13.665.619.017,00			-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara	-	18.922.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	8.665.619.017,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		11.922.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		7.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah*	-			7 Unit	6.000.000.000,00			-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara	-	10.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		5.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		5.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Tersusunnya Dokumen Peningkatan Pelayanan Kinerja BLUD*	-			1 Dokumen	180.000.000.000,00			-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara	-	200.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	180.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		200.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**19.110.000.000,00**						**-**	**41.350.000.000,00**	
		[Terwujudnya Pemenuhan Upaya Kesehatan UKM dan UKP yang Efektif dan Efisien]	**CAPAIAN NILAI AKREDITASI**	**90**	**84**	**85**	**86**	**19.110.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**41.350.000.000,00**	-
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi*	-			76 Unit	17.000.000.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Penduduk Kalimantan Utara dan Sekitarnya	-	38.800.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				70 Unit	15.000.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Penduduk Kalimantan Utara dan Sekitarnya		30.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				3 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Penduduk Kalimantan Utara dan Sekitarnya		6.800.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				3 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Penduduk Kalimantan Utara dan Sekitarnya		2.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi*	-			12 Bulan	1.010.000.000,00			-	-	-	-	1.050.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	460.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.110.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**41.350.000.000,00**	-
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi*	-			1 Dokumen	0,00			-	-	Penduduk Kalimantan Utara dan Sekitarnya	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Penduduk Kalimantan Utara dan Sekitarnya		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
		[Terwujudnya Pemenuhan Upaya Kesehatan UKM dan UKP yang Efektif dan Efisien]	**CAPAIAN NILAI AKREDITASI**	**90**	**84**	**85**	**86**	**19.110.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**41.350.000.000,00**	-
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi*	-			2 Dokumen	1.100.000.000,00			-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara	-	1.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				1 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD dr H Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara		1.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**11.000.000.000,00**						**-**	**16.000.000.000,00**	
		[Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan yang sesuai Standar]	**CAPAIAN NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT**	**87.12**	**82.00**	**83.68**	**84.44**	**11.000.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**16.000.000.000,00**	-
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	*Terselenggaranya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi*	-			45 Orang	5.000.000.000,00			-	-	Tenaga Kesehatan RSUD dr H Jusuf SK	-	8.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				45 Orang	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tenaga Kesehatan RSUD dr H Jusuf SK		8.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat*	-			370 Orang	6.000.000.000,00			-	-	-	-	8.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				370 Orang	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR H JUSUF SK
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**365.272.048.000,00**							**35.563.219.652,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**360.272.048.000,00**							**35.563.219.652,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**347.272.048.000,00**							**6.113.219.652,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**30.006.647.400,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Pelayanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM]	**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM**	**100**	**100**	**100**	**100**	**30.006.647.400,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			3 Dokumen	165.000.000,00			-	-	ASN PUPRPERKIM	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN PUPRPERKIM		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN PUPRPERKIM		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.006.647.400,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN PUPRPERKIM		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		[Meningkatnya Pelayanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM]	**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM**	**100**	**100**	**100**	**100**	**30.006.647.400,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	23.771.647.400,00			-	-	ASN PUPRPERKIM	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				197 Orang/ Bulan	20.006.647.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN PUPRPERKIM		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				40 Dokumen	3.765.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN PUPRPERKIM		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	100.000.000,00			-	-	ASN PUPRPERKIM	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN PUPRPERKIM		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	1.730.000.000,00			-	-	ASN PUPRPERKIM	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN PUPRPERKIM		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN PUPRPERKIM		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN PUPRPERKIM		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN PUPRPERKIM		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN PUPRPERKIM		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN PUPRPERKIM		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN PUPRPERKIM		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			12 Bulan	1.440.000.000,00			-	-	ASN PUPRPERKIM	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN PUPRPERKIM		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	1.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN PUPRPERKIM		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya*	-			99 Unit	2.800.000.000,00			-	-	ASN PUPRPERKIM	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN PUPRPERKIM		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN PUPRPERKIM		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.006.647.400,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN PUPRPERKIM		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		[Meningkatnya Pelayanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM]	**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM**	**100**	**100**	**100**	**100**	**30.006.647.400,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				47 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN PUPRPERKIM		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN PUPRPERKIM		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.006.647.400,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN PUPRPERKIM		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**30.000.000.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air]	**Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi** **Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi** **Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob di Wilayah Kewenangan Provinsi** **Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir Kewenangan Provinsi**	**0** **45** **51.59** **64**	**0** **27.9** **33.11** **58.35**	**0** **28.81** **35** **59**	**0** **33.37** **37** **60**	**30.000.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan provinsi (ha)*	-			960 Ha	26.800.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0019	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)														
			Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun				1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1,25 KM	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				5 Dokumen	280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0089	Pembangunan Polder/Kolam Retensi														
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun				1 Unit	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan				1 Lembaga	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0097	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				1,5 KM	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0098	Pembangunan Kanal Banjir														
			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun				0,5 KM	7.875.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi														
			0				1 0	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				3 Dokumen	1.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0123	Pembangunan Unit Air Baku														
			Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun				1 Unit	4.195.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang jaringan irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi baik*	-			36.624 Meter	3.200.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa														
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun				0,8 KM	1.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa														
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 KM	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**39.300.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	**Persentase masyarakat yang mendapatkan air minum layak**	**100**	**89.42**	**91.18**	**92.94**	**39.300.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	*Persentase dokumen pendukung sistem penyediaan air minum yang tersusun* *Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota*	-			undefined % %	39.300.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				5 Kabupaten/ Kota	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun				50 Liter/Detik	35.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara				1 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39.300.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				5 Kabupaten/ Kota	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	**Persentase masyarakat yang mendapatkan air minum layak**	**100**	**89.42**	**91.18**	**92.94**	**39.300.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun				1 Dokumen	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**						**14.416.960.000,00**						**-**	**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.416.960.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	*Jumlah infrastruktur persampahan yang terbangun*	-			undefined Unit	14.416.960.000,00			-	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.04.1.01.0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan				2 Kabupaten/ Kota	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		[Meningkatnya layanan persampahan regional]	**Persentase Infrastruktur persampahan regional terbangun**	**100**	**0**	**0**	**0**	**14.416.960.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.03.04.1.01.0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun				100 Ton/hari	1.901.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				1 Dokumen	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.04.1.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA														
			Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan				5 Unit	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.04.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota				5 Kabupaten/ Kota	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**3.025.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]	**Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang layak**	**91.17**	**85.17**	**86.17**	**87.17**	**3.025.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	*Jumlah rumah tangga yang terlayani sistem air limbah regional*	-			undefined Unit	3.025.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.025.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.03.05.1.01.0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				5 kabupaten/ kota	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]	**Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang layak**	**91.17**	**85.17**	**86.17**	**87.17**	**3.025.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.03.05.1.01.0022	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				5 Kabupaten/ Kota	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**10.000.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya sistem drainase perkotaan]	**Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik dan berfungsi**	**20**	**0**	**0**	**20**	**10.000.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	*Persentase sistem jaringan drainase lingkungan yang terbangun*	-			undefined %	10.000.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.1.01.0007	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				5 Sistem Drainase Perkotaan	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**						**16.258.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman]	**Persentase Infrastruktur Dasar yang terbangun pada kawasan permukiman strategis daerah Provinsi**	**100**	**0**	**0**	**8**	**16.258.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	*Jumlah infrastruktur dasar yang terbangun pada kawasan permukiman strategis daerah provinsi*	-			undefined Unit	16.258.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.07.1.01.0026	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun				10 Liter/Detik	9.980.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.07.1.01.0029	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun				1 Unit	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.258.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.03.07.1.01.0040	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun				50 Ton/hari	4.277.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**88.584.081.349,00**						**-**	**0,00**	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	*Jumlah bangunan gedung yang terbangun*	-			5 Unit	88.584.081.349,00			-	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan				1 Bangunan Gedung	5.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara				5 Kabupaten/ Kota	525.169.237,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		[Meningkatnya kualitas bangunan gedung]	**Persentase Bangunan Gedung Strategis terbangun**	**44**	**17**	**26**	**32**	**88.584.081.349,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				9 Dokumen	82.858.912.112,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**4.688.006.651,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata]	**Persentase lahan kawasan strategis daerah yang tuntas pematangan lahannya**	**4.73**	**3.99**	**-**	**4.36**	**4.688.006.651,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah luasan pematangan lahan kawasan strategis daerah provinsi*	-			1,53 ha	4.688.006.651,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.1.01.0019	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				1 Kawasan	4.688.006.651,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**100.000.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya kemantapan jalan]	**Persentase jalan yang dibangun, direhabilitasi, direkonstruksi, dan dipelihara**	**95.168**	**-**	**-**	**95.043**	**100.000.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	*Panjang jalan/jembatan yang dibangun, direhabilitasi, direkonstruksi, dan dipelihara*	-			undefined undefined	100.000.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				2.5 KM	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				0.05 KM	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				4 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				851.877 KM	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin				33.33 KM	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0052	Rehabilitasi Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi				15 Meter	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0053	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi														
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi				16.75 KM	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan														
			Panjang jembatan yang dibangun				15 Meter	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala				4 KM	15.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				13 Meter	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				6.17 KM	46.150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
11.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**5.993.352.600,00**						**-**	**6.113.219.652,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih di Kalimantan Utara]	**Persentase pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan** **Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi** **Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di Provinsi Kalimantan Utara dibuktikan dengan sertifikat pelatihan**	**15.14** **80** **90**	**-** **4.32** **88.46**	**6.12** **80** **90**	**7.93** **80** **90**	**5.993.352.600,00**	-	-	-	-	-	-	**6.113.219.652,00**	-
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	*Jumlah masyarakat jasa konstruksi yang mendapatkan pemberdayaan pembinaan Jasa konstruksi*	-			- Orang	4.069.291.714,00			-	-	Masyarakat	-	4.150.677.548,28	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi														
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				24 Orang	679.664.540,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		693.257.830,80	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				1 Dokumen	304.508.312,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		310.598.478,24	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih				150 Orang	1.013.320.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		1.033.587.318,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga	652.439.170,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		665.487.953,40	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi				140 Orang	1.102.532.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		1.124.583.558,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya				50 Orang	316.825.892,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		323.162.409,84	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	*Persentase jenis data termutakhir yang tersedia di SIPJAKI*	-			undefined undefined	899.060.886,00			-	-	Masyarakat	-	917.042.103,72	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				12 Layanan Informasi	270.924.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		276.342.480,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan				1 Dokumen	474.462.360,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		483.951.607,20	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI														
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				16 Orang	153.674.526,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		156.748.016,52	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	*Persentase unit/lembaga/ativitas penyelenggaraan jasa konsruksi yang masuk kategori tertib*	-			undefined %	1.025.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	1.045.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				30 Paket Pekerjaan	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		280.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk				30 Bangunan Konstruksi	275.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		280.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				6 Lembaga	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		204.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				30 Badan Usaha	275.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		280.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**5.000.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Nilai Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang]	**Nilai Kinerja Pengaturan Penataan Ruang**	**82**	**61.67**	**6167**	**75.72**	**5.000.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	*Jumlah laporan rencana tata ruang wilayah yang disusun dan disosialisasikan*	-			7 Laporan	1.000.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi														
			Jumlah Perda RTRW Provinsi				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				125 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	*Nilai Kinerja Pengaturan, Pembinaan, Perencanaan Tata Ruang*	-			undefined undefined	1.500.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.02.0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang														
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				5 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota				5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.02.0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota														
			Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota														
			Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota				1 Berita Acara	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.02.0012	Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	*Nilai Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang*	-			undefined undefined	650.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.03.0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha														
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				1 Layanan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.03.0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha														
			Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				1 Layanan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	*Nikai Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang*	-			undefined undefined	1.850.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				1 Kasus	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				2 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat														
			Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.04.0008	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				1 Kasus	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				2 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK														
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				5 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				1 Berita Acara	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**13.000.000.000,00**							**29.450.000.000,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**1.000.000.000,00**						**-**	**1.000.000.000,00**	
		[Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Relokasi Program Provinsi]	**Persentase Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni** **Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni**	**20**	**20**	**0**	**20**	**1.000.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.000.000.000,00**	-
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	*Jumlah dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi*	-			4 Dokumen	600.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														
			Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				2 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani														
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	*Jumlah unit rumah korban dan relokasi program provinsi yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi*	-			2 Unit	400.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun				2 Unit Rumah	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**5.400.000.000,00**						**-**	**8.250.000.000,00**	
		[Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani]	**Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani**	**11.14**	**2.53**	**0**	**11.11**	**5.400.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**8.250.000.000,00**	-
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	*Jumlah dokumen laporan penataan kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha*	-			1 Dokumen	950.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				40 Orang	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	*Jumlah luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani*	-			6.23 hektar	4.450.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat	-	7.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki				40 Unit Rumah	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				2 Unit Rumah	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar				5 Ha	3.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		6.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**6.600.000.000,00**						**-**	**20.200.000.000,00**	
		[Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)]	**Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)**	**20**	**20**	**20**	**20**	**6.600.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**20.200.000.000,00**	-
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	*Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU*	-			8 Permukiman	6.600.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat	-	20.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0008	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman														
			Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan				8 Lokasi	3.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman														
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				8 Lokasi	3.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.000.000.000,00**							**0,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**5.000.000.000,00**							**0,00**	
1.	**2.10.03**	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**						**250.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum]	**Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu**	**100**	**0**	**50**	**50**	**250.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	*Jumlah dokumen pengadaan tanah yang tersusun*	-			2 Dokumen	250.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.03.1.01.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum														
			Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.03.1.01.0004	Pengumuman Hasil Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum														
			Jumlah Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum				2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.03.1.01.0005	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum														
			Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan				20 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.03.1.01.0006	Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum														
			Jumlah Laporan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				2 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**						**400.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan]	**Persentase fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**20**	**0**	**20**	**20**	**400.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah dokumen laporan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan*	-			15 Dokumen	400.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.04.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				2 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.04.1.01.0006	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				2 Berita Acara	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**						**3.200.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan]	**Persentase ganti kerugian dan santunan yang telah dibayarkan terhadap total yang harus dibayarkan**	**20**	**0**	**20**	**20**	**3.200.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	*Jumlah berita acara penyerahan hasil penyelesaian pengadaan tanah*	-			2 Berita Acara	3.200.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.05.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				4 Dokumen	3.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**						**1.150.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah objek reforma agraria (TORA)]	**Persentase fasilitasi pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agraria**	**20**	**0**	**20**	**20**	**1.150.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah dokumen usulan redistribusi tanah yang tersusun*	-			4 Dokumen	800.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.				1 Berita Acara	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.06.1.01.0004	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi														
			Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.06.1.01.0005	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria				1 Berita Acara	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.06.1.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah laporan hasil inventarisasi dan koordinasi penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee*	-			2 Laporan	350.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.06.1.02.0001	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.06.1.02.0003	Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA						**17.054.715.802,00**							**21.785.519.025,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**17.054.715.802,00**							**21.785.519.025,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**17.054.715.802,00**							**21.785.519.025,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**17.054.715.802,00**						**-**	**18.547.013.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**17.054.715.802,00**	-	-	-	-	-	-	**18.547.013.500,00**	-
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Cakupan Layanan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	0,00			-	-	ASN Satpol PP	-	141.341.050,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satpol PP		46.341.050,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satpol PP		55.000.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				38 Data	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satpol PP		40.000.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	17.054.715.802,00			-	-	ASN Satpol PP	-	15.147.004.284,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				192 Orang/ Bulan	17.054.715.802,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satpol PP		14.861.944.284,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satpol PP		285.060.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	0,00			-	-	ASN Satpol PP	-	310.000.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				147 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satpol PP		60.000.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				41 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satpol PP		250.000.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	0,00			-	-	ASN Satpol PP	-	1.357.999.914,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				81 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satpol PP		7.063.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satpol PP		311.400.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				44 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satpol PP		26.642.731,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satpol PP		207.433.110,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satpol PP		89.261.073,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satpol PP		10.000.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satpol PP		706.200.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	0,00			-	-	ASN Satpol PP	-	355.000.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				63 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satpol PP		355.000.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satpol PP		0,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	0,00			-	-	ASN Satpol PP	-	385.460.761,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satpol PP		7.500.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satpol PP		197.960.761,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.054.715.802,00**	-	-	-	-	-	-	**18.547.013.500,00**	-
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satpol PP		180.000.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**17.054.715.802,00**	-	-	-	-	-	-	**18.547.013.500,00**	-
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	0,00			-	-	ASN Satpol PP	-	850.207.491,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				49 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satpol PP		378.262.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satpol PP		29.390.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Satpol PP		442.555.491,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**						**-**	**3.076.345.345,00**	
		[Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum]	**Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas**	**100**	**0** **100**	**100**	**100**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**3.076.345.345,00**	-
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah operasi penanganan gangguan Trantibum lintas daerah yang dilaksanakan*	-			8 Kegiatan	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Masyarakat Kalimantan Utara	-	2.078.776.645,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Masyarakat Kalimantan Utara		249.950.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Masyarakat Kalimantan Utara		13.096.325,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.1.01.0020	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				4 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Masyarakat Kalimantan Utara		143.750.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan				4 laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Masyarakat Kalimantan Utara		793.850.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
		[Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat]	**Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat**	**100** **90**	**0** **45**	**100** **45.8**	**100** **60**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**3.076.345.345,00**	-
	1.05.02.1.01.0022	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat														
			Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Masyarakat Kalimantan Utara		93.863.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
		[Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum]	**Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas**	**100**	**0** **100**	**100**	**100**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**3.076.345.345,00**	-
	1.05.02.1.01.0024	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas				60 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Masyarakat Kalimantan Utara		116.430.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.1.01.0025	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat														
			Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Masyarakat Kalimantan Utara		50.000.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.1.01.0029	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				20 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Masyarakat Kalimantan Utara		327.990.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
		[Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat]	**Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat**	**100** **90**	**0** **45**	**100** **45.8**	**100** **60**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**3.076.345.345,00**	-
	1.05.02.1.01.0030	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat														
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya				120 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Masyarakat Kalimantan Utara		289.847.320,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
		[Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada]	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**100**	**94**	**100** **95**	**100** **96**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**3.076.345.345,00**	-
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	*Jumlah kegiatan penegakan yang dilaksanakan*	-			3 Kegiatan	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Masyarakat Kalimantan Utara	-	523.853.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.1.02.0010	Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah				8 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Masyarakat Kalimantan Utara		170.599.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP				8 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Masyarakat Kalimantan Utara		353.254.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
		[Meningkatnya kapasitas SDM PPNS]	**Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya**	**100** **90**	**0**	**0** **100**	**100** **50**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**3.076.345.345,00**	-
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	*Jumlah PPNS Provinsi yang mendapatkan pembinaan*	-			42 Orang	0,00			-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Masyarakat Kalimantan Utara	-	473.715.700,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				3 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Masyarakat Kalimantan Utara		273.130.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.1.03.0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Masyarakat Kalimantan Utara		159.210.700,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.1.03.0008	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum														
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Masyarakat Kalimantan Utara		41.375.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**0,00**						**-**	**162.160.180,00**	
		[Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran]	**Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran**	**0** **100**	**0** **20**	**100**	**100**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**162.160.180,00**	-
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	*Jumlah peta kawasan rawan kebakaran yang dihasilkan*	-			1 Dokumen	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat Kalimantan Utara	-	50.000.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat Kalimantan Utara		0,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.04.1.01.0018	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat Kalimantan Utara		0,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.04.1.01.0021	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				1 laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat Kalimantan Utara		50.000.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.04.1.01.0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat Kalimantan Utara		0,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
		[Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran]	**Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**100**	**0** **100**	**100**	**100**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**162.160.180,00**	-
	1.05.04.1.01.0026	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
			Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat Kalimantan Utara		0,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait				60 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat Kalimantan Utara		0,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	*Jumlah Pembinaan Dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran yang Dilaksanakan*	-			5 Kegiatan	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat Kalimantan Utara	-	112.160.180,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.04.1.02.0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat Kalimantan Utara		62.160.180,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.04.1.02.0007	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat Kalimantan Utara		50.000.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**13.989.026.067,00**							**22.670.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.989.026.067,00**							**22.655.000.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**13.989.026.067,00**							**22.655.000.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**11.694.026.067,00**						**-**	**15.440.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**99**	**99**	**99**	**99**	**11.694.026.067,00**	-	-	-	-	-	-	**15.440.000.000,00**	-
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Sesuai Standar Regulasi*	-			1 Dokumen	180.000.000,00			-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.694.026.067,00**	-	-	-	-	-	-	**15.440.000.000,00**	-
	1.05.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**99**	**99**	**99**	**99**	**11.694.026.067,00**	-	-	-	-	-	-	**15.440.000.000,00**	-
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai Regulasi*	-			12 Dokumen	8.800.000.000,00			-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	9.400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/ Bulan	8.500.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		9.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai Standar Peraturan yang berlaku*	-			100 Persen	90.000.000,00			-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.384.026.067,00			-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	1.670.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	439.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	200.026.067,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		950.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai Standar Regulasi*	-			0 Unit	0,00			-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	1.100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang*	-			25 Laporan	280.000.000,00			-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	820.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	175.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*BMD yang terpelihara*	-			47 Unit	960.000.000,00			-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	1.400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				14 Unit	200.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	300.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	60.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	400.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**2.295.000.000,00**						**100 Persen 100 Persen 70 Persen 100 Persen 100 Persen 70 Persen 100 Persen 70 Persen 100 Persen**	**7.215.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana]	**Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana**	**20**	**0**	**0**	**20**	**2.295.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**7.215.000.000,00**	-
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	*Persentase Kecamatan Yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana*	-			20 Persen	500.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara	-	300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Jumlah Kab/kota yang terfasilitasi dalam Penanganan Pra Bencana*	-			5 Kab/Kota	510.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara	-	1.765.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana														
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				0 Kawasan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0022	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi														
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani				0 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana														
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana				10 Keluarga	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				150 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat]	**Persentase penanganan tanggap bencana darurat**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2.295.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**7.215.000.000,00**	-
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Jumlah Kabupaten/Kota Yang Terfasilitasi Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana*	-			5 Kab/Kota	620.000.000,00			-	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara	-	3.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas														
			Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0009	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi														
			Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi														
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				10 Orang	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0027	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				50 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				12 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana]	**Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana**	**20**	**0**	**0**	**20**	**2.295.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**7.215.000.000,00**	-
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Jumlah Kab/kota yang terfasilitasi dalam Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*	-			5 Kab/Kota	665.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara	-	1.650.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0 Keluarga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana]	**Persentase Penanganan Pasca Bencana**	**100**	**0**	**100**	**100**	**2.295.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**7.215.000.000,00**	-
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana]	**Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana**	**20**	**0**	**0**	**20**	**2.295.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**7.215.000.000,00**	-
	1.05.03.1.04.0008	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana]	**Persentase Penanganan Pasca Bencana**	**100**	**0**	**100**	**100**	**2.295.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**7.215.000.000,00**	-
	1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi														
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal				1 Lembaga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0011	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi				1 Laporan	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi														
			Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				8 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana]	**Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana**	**20**	**0**	**0**	**20**	**2.295.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**7.215.000.000,00**	-
	1.05.03.1.04.0014	Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah														
			Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang dilegalkan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun				5 kabupaten/ kota	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0024	Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor														
			Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	OPD dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	**NON URUSAN**						**0,00**							**15.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**0,00**							**15.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**0,00**						**-**	**15.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**15.000.000,00**	-
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai Standar Regulasi*	-			0 Unit	0,00			-	-	-	-	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL						**14.103.836.307,00**							**10.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.083.836.307,00**							**10.000.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**14.083.836.307,00**							**10.000.000,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**12.691.787.344,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**12.691.787.344,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi*	-			100 %	30.000.000,00			-	-	Sekretariat dan Bidang-bidang di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Sekretariat dan Bidang-bidang di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Sekretariat dan Bidang-bidang di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	11.178.088.036,00			-	-	ASN Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74 Orang/ Bulan	10.529.418.036,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	648.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			30 Orang	10.000.000,00			-	-	Pegawai ASN Dinas Sosial	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pegawai ASN Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah*	-			12 Bulan	156.293.793,00			-	-	Sekretariat Dinas Sosial	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.941.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Sekretariat Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Sekretariat Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Sekretariat Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	64.849.939,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Sekretariat Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	39.542.514,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Sekretariat Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Sekretariat Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	1.179.678.627,00			-	-	Sekretariat Dinas Sosial	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Sekretariat Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2.235.022,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Sekretariat Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.170.043.605,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Sekretariat Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah*	-			12 Bulan	137.726.888,00			-	-	Sekretariat Dinas Sosial	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	44.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Sekretariat Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	75.852.888,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Sekretariat Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	16.914.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Sekretariat Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**238.694.905,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Pemberdayaan Sosial]	**Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial** **Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar** **Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial** **Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA** **Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial**	**100**	**0**	**100**	**100**	**238.694.905,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang*	-			5 Dokumen	42.500.000,00			-	-	Masyarakat dan Penyelenggara UGB dan PUB	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				5 Dokumen	42.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Masyarakat dan Penyelenggara UGB dan PUB		0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	*Jumlah PSKS Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi* *Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan* *Jumlah PSKS Kelembagaan yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi* *Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya*	-			15 Keluarga 20 Badan Usaha 25 Lembaga 50 Orang	196.194.905,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				15 Keluarga	23.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				25 Lembaga	33.825.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**238.694.905,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.02.1.02.0006	Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan				20 Lembaga	18.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial		0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Pemberdayaan Sosial]	**Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial** **Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar** **Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial** **Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA** **Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial**	**100**	**0**	**100**	**100**	**238.694.905,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.02.1.02.0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	46.319.905,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial				100 Orang	38.650.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0013	Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi				20 Orang	18.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan														
			Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan				20 Badan Usaha	18.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**						**3.000.000,00**						**-**	**10.000.000,00**	
		[Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan]	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**10.000.000,00**	-
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	*Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 Orang	3.000.000,00			-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.1.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota				1 Orang	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**270.171.319,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Rehabilitasi Sosial]	**Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti** **Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya** **Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti** **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti** **Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti**	**100**	**100**	**100**	**100**	**270.171.319,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	*Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti*	-			20 Orang	45.000.000,00			-	-	Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				20 Orang	15.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	*Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti*	-			140 Orang	172.171.319,00			-	-	Anak Terlantar di Dalam Panti/LKS	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Anak Terlantar di Dalam Panti/LKS		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Anak Terlantar di Dalam Panti/LKS		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Anak Terlantar di Dalam Panti/LKS		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Anak Terlantar di Dalam Panti/LKS		0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Anak Terlantar di Dalam Panti/LKS		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				140 Orang	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Anak Terlantar di Dalam Panti/LKS		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				1 Dokumen	67.171.319,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Anak Terlantar di Dalam Panti/LKS		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	*Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti*	-			8 Orang	23.000.000,00			-	-	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti/LKS	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				8 Orang	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti/LKS		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti/LKS		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti/LKS		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti/LKS		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti/LKS		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti/LKS		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti/LKS		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	*Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatklan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti*	-			10 Orang	30.000.000,00			-	-	Orang terlantar, Gelandangan dan Pengemis	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi				10 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Orang terlantar, Gelandangan dan Pengemis		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Orang terlantar, Gelandangan dan Pengemis		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	*Jumlah PPKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatklan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti*	-			1 Dokumen	0,00			-	-	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA		0,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**531.187.809,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial]	**Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin** **Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan** **Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi** **Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar**	**100**	**100**	**100**	**100**	**531.187.809,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	*Jumlah penerima layanan (COTA/COTA Tunggal) yang memperoleh akses layanan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal*	-			2 Keluarga/Individu	30.000.000,00			-	-	Masyarakat yang mengajukan izin pengangkatan anak	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				2 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Masyarakat yang mengajukan izin pengangkatan anak		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai* *Tersedianya sistem informasi data fakir miskin yang terintegrasi di tingkat provinsi.* *Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi* *Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin*	-			1 Dokumen 100 % 280 Orang 100 %	501.187.809,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi				30 Orang	132.190.912,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kalimantan Utara		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				250 Orang	130.496.897,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Masyarakat Kalimantan Utara		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin				5 Kab/Kota	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kalimantan Utara		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0009	Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial														
			Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kalimantan Utara		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0010	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai				1 Dokumen	89.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kalimantan Utara		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0012	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin														
			Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi				10 Orang	44.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kalimantan Utara		0,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**348.994.930,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya perlindungan sosial koorban bencana]	**Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana** **Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial** **Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya**	**100**	**100**	**100**	**100**	**348.994.930,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi* *Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana* *Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan* *Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas*	-			100 Orang 60 Orang 50 Orang 30 Orang	348.994.930,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	TAGANA, PORDAM, Korban Bencana Alam dan Sosial	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	TAGANA, PORDAM, Korban Bencana Alam dan Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	TAGANA, PORDAM, Korban Bencana Alam dan Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				100 Orang	123.264.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	TAGANA, PORDAM, Korban Bencana Alam dan Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0011	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	TAGANA, PORDAM, Korban Bencana Alam dan Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	TAGANA, PORDAM, Korban Bencana Alam dan Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0018	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah														
			Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana				60 Orang	20.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	TAGANA, PORDAM, Korban Bencana Alam dan Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0019	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan				50 Orang	40.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	TAGANA, PORDAM, Korban Bencana Alam dan Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0022	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam														
			Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas				30 Orang	165.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	TAGANA, PORDAM, Korban Bencana Alam dan Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	X	**NON URUSAN**						**20.000.000,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**20.000.000,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**20.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi*	-			100 %	20.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	X.XX.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
		UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU						**3.098.719.701,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.098.719.701,00**							**0,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**3.098.719.701,00**							**0,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.168.340.361,00**						**-**	**0,00**	
		[Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.168.340.361,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan*	-			100 %	241.102.608,00			-	-	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu	-	0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	241.102.608,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu		0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan*	-			100 %	0,00			-	-	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu	-	0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu		0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu		0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan*	-			100 %	92.341.197,00			-	-	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu	-	0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu		0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu		0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	33.613.248,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu		0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	55.227.949,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu		0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu		0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan*	-			100 %	0,00			-	-	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu	-	0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu		0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				41 Paket	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu		0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan*	-			100 %	678.446.556,00			-	-	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu	-	0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu		0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	168.764.668,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu		0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	13.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu		0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	495.681.888,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu		0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan*	-			100 %	156.450.000,00			-	-	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu	-	0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	56.450.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu		0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu		0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu		0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu		0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**1.930.379.340,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Rehabilitasi Sosial]	**Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.930.379.340,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	*Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti*	-			50 Orang	1.930.379.340,00			-	-	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	-	0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				50 Orang	1.541.760.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				50 Orang	48.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				14 Orang	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				50 Orang	226.769.340,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				50 Orang	102.750.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				3 Orang	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan														
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				10 Orang	11.100.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		0,00	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						**9.834.878.832,00**							**31.668.796.350,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.319.607.238,00**							**31.196.258.350,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**9.319.607.238,00**							**31.196.258.350,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**8.279.063.442,00**						**-**	**14.801.852.839,00**	
		[Meningkatnya Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Perangkat daerah]	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi** **Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**8.279.063.442,00**	-	-	-	-	-	-	**14.801.852.839,00**	-
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi*	-			10 Dokumen	208.972.027,00			-	-	Disnakertrans	-	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Disnakertrans		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	158.972.027,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Disnakertrans		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah aspek administrasi keuangan perangkat daerah yang dijalankan sesuai standar regulasi*	-			12 Laporan	7.146.891.988,00			-	-	ASN Disnakertrans	-	12.467.852.839,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/ Bulan	6.881.691.988,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Disnakertrans		12.121.599.239,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	265.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Disnakertrans		346.253.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian sesuai standar*	-			100 Persen	75.000.000,00			-	-	ASN Disnakertrans	-	25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	75.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Disnakertrans		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi*	-			100 Persen	648.190.683,00			-	-	ASN Disnakertrans	-	1.840.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Disnakertrans		5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Disnakertrans		180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	34.907.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Disnakertrans		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	93.560.942,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Disnakertrans		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	13.122.441,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Disnakertrans		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				360 Dokumen	3.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Disnakertrans		5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	485.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Disnakertrans		1.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi*	-			100 Persen	88.013.744,00			-	-	ASN Disnakertrans	-	89.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Disnakertrans		5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	83.013.744,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Disnakertrans		84.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dalam kondisi baik*	-			92,67 Persen	111.995.000,00			-	-	ASN Disnakertrans	-	180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				26 Unit	101.995.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Disnakertrans		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Disnakertrans		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**						**10.000.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja]	**Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja** **Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja sesuai standar**	**100**	**1**	**0**	**100**	**10.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Jumlah RTKD Provinsi dan Kabupaten Yang Disusun*	-			6 Buku	10.000.000,00			-	-	Disnakertrans Kab/Kota se Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro				10 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Disnakertrans Kab/Kota se Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**284.900.000,00**						**-**	**3.498.793.195,00**	
		[Meningkatnya Produktivitas Kenaga Kerja]	**Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya**	**5.10**	**3.2**	**3.2**	**3.92**	**284.900.000,00**	-	-	-	-	-	-	**3.498.793.195,00**	-
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kompetensi*	-			16 Orang	254.900.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Pencari Kerja	-	3.048.980.873,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				16 Orang	234.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Pencari Kerja		2.943.980.873,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja				1 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Pencari Kerja		105.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	*Jumlah LPK yang terakreditasi*	-			1 LPK	10.000.000,00			-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Lembaga Pelatihan Kerja	-	127.418.172,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi				1 LPK	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Lembaga Pelatihan Kerja		127.418.172,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	*Jumlah Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan*	-			1 Perusahaan	10.000.000,00			-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Perusahaan	-	141.142.075,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah														
			Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas				1 Perusahaan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Perusahaan		141.142.075,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah pekerja dan perusahaan yang diukur produktivitasnya*	-			1 Orang	10.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Perusahaan dan Pekerja	-	181.252.075,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Perusahaan dan Pekerja		181.252.075,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**230.371.898,00**						**-**	**744.650.348,00**	
		[Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja]	**Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri**	**63.20**	**49.73**	**49.73**	**55.20**	**230.371.898,00**	-	-	-	-	-	-	**744.650.348,00**	-
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelayanan antar kerja lintas daerah Kab/Kota*	-			5 Kab/Kota	85.000.000,00			-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Perusahaan dan Pekerja	-	397.921.188,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD				10 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Perusahaan dan Pekerja		74.550.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL				2 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Perusahaan dan Pekerja		49.954.422,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
			Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD				5 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Perusahaan dan Pekerja		273.416.766,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Jumlah pengelolaan informasi pasar kerja yang tersedia*	-			2 Media	100.371.898,00			-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Perusahaan dan Pekerja	-	182.867.454,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				16 Orang	100.371.898,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Perusahaan dan Pekerja		182.867.454,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	*Jumlah CPMI yang meningkat kompetensinya*	-			1 Orang	5.000.000,00			-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Perusahaan dan Pekerja	-	58.336.706,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				1 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Perusahaan dan Pekerja		58.336.706,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah RPTKA Yang Disahkan Oleh Provinsi*	-			5 RPTKA	40.000.000,00			-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Perusahaan dan Tenaga Kerja Asing	-	105.525.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA				5 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Perusahaan dan Tenaga Kerja Asing		105.525.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**275.271.355,00**						**-**	**11.871.011.968,00**	
		[Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi]	**Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial**	**19059**	**18059**	**18059**	**18259**	**275.271.355,00**	-	-	-	-	-	-	**11.871.011.968,00**	-
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah kasus hubungan industrial yang ditangani*	-			10 Kasus	134.940.000,00			-	-	Perusahaan dan Pekerja	-	591.970.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				10 Perkara	58.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perusahaan dan Pekerja		212.120.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perusahaan dan Pekerja		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi														
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				2 Lembaga	56.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perusahaan dan Pekerja		304.850.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	*Jumlah SK Kepala Daerah tentang Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota*	-			6 Surat Keputusan	140.331.355,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Perusahaan dan Pekerja	-	11.279.041.968,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penetapan UMP				1 Surat Keputusan	100.870.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Perusahaan dan Pekerja		70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				10 Orang	39.461.265,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Perusahaan dan Pekerja		11.209.041.968,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
6.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**						**240.000.543,00**						**-**	**279.950.000,00**	
		[Terlindungi Hak-Hak Pekerja]	**Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya**	**35163**	**26707**	**26707**	**28660**	**240.000.543,00**	-	-	-	-	-	-	**279.950.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	*Jumlah Perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan*	-			100 Perusahaan	240.000.543,00			-	-	Perusahaan dan Pekerja	-	279.950.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				100 Perusahaan	240.000.543,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perusahaan dan Pekerja		279.950.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**515.271.594,00**							**472.538.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**515.271.594,00**							**472.538.000,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**135.455.594,00**						**-**	**117.444.000,00**	
		[Mengingkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi]	**Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang**	**100**	**0**	**100**	**100**	**135.455.594,00**	-	-	-	-	-	-	**117.444.000,00**	-
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Penataan Persebaran Penduduk Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*	-			12525 Kepala Keluarga	135.455.594,00			-	-	Warga Transmigrasi	-	117.444.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	74.497.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Warga Transmigrasi		66.497.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi														
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi				2 Lokasi	60.958.594,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Warga Transmigrasi		50.947.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**379.816.000,00**						**-**	**355.094.000,00**	
		[Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi]	**Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan**	**74**	**50**	**74**	**74**	**379.816.000,00**	-	-	-	-	-	-	**355.094.000,00**	-
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	*Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam tahap pemantapan*	-			3 Satuan Permukiman	379.816.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Warga Transmigrasi	-	355.094.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman														
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				50 Kepala Keluarga	73.572.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Warga Transmigrasi		71.347.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman														
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				1 Satuan Permukiman	306.244.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Warga Transmigrasi		283.747.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**15.963.756.827,00**							**15.000.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.963.756.827,00**							**15.000.000.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**14.763.756.827,00**							**12.750.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**11.263.756.827,00**						**-**	**10.250.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**11.263.756.827,00**	-	-	-	-	-	-	**10.250.000.000,00**	-
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai regulasi*	-			12 Bulan	9.250.000.000,00			-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB	-	10.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/ Bulan	9.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB		10.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	-			12 Bulan 1 Dokumen	200.000.000,00			-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				54 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	933.756.827,00			-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB	-	240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				40 Paket	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.263.756.827,00**	-	-	-	-	-	-	**10.250.000.000,00**	-
	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**11.263.756.827,00**	-	-	-	-	-	-	**10.250.000.000,00**	-
	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	775.756.827,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan barang yang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi*	-			7 Unit	150.000.000,00			-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	100.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa penunjang*	-			12 Bulan	405.000.000,00			-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB	-	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah BMD yang terpelihara*	-			10 Unit	325.000.000,00			-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan DP3AP2KB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**950.000.000,00**						**-**	**1.350.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**950.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.350.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	*Jumlah dokumen penunjang pelembagaan PUG termasuk PPRG*	-			1 Dokumen	300.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat.	-	600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														
			Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi				1 Kebijakan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat.		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaran PUG dan peran perempuan dalam pembangunan]	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)**	**4.50**	**3.21**	**3.29**	**3.50**	**950.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.350.000.000,00**	-
	2.08.02.1.01.0010	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek				40 orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat.		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**950.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.350.000.000,00**	-
	2.08.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														
			jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan				50 Lembaga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat.		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaran PUG dan peran perempuan dalam pembangunan]	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)**	**4.50**	**3.21**	**3.29**	**3.50**	**950.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.350.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	*Jumlah Kader Parpol/Organisasi Perempuan yang dibina*	-			45 Orang	400.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Organisasi Perempuan, Kelompok Masyarakat Perempuan, Kader Politik Perempuan	-	750.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0005	Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi														
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi				2 Lembaga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Organisasi Perempuan, Kelompok Masyarakat Perempuan, Kader Politik Perempuan		600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0008	sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				40 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Organisasi Perempuan, Kelompok Masyarakat Perempuan, Kader Politik Perempuan		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi														
			jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan				40 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Organisasi Perempuan, Kelompok Masyarakat Perempuan, Kader Politik Perempuan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**950.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.350.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	*Jumlah Lembaga PUG yang dibina*	-			1 Lembaga	250.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Organisasi Perempuan, Kelompok Masyarakat Perempuan, Tokoh Perempuan	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi														
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi				5 laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Organisasi Perempuan, Kelompok Masyarakat Perempuan, Tokoh Perempuan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaran PUG dan peran perempuan dalam pembangunan]	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)**	**4.50**	**3.21**	**3.29**	**3.50**	**950.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.350.000.000,00**	-
	2.08.02.1.03.0008	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek				40 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Organisasi Perempuan, Kelompok Masyarakat Perempuan, Tokoh Perempuan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**950.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.350.000.000,00**	-
	2.08.02.1.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				5 Lembaga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Organisasi Perempuan, Kelompok Masyarakat Perempuan, Tokoh Perempuan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**500.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan]	**rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)**	**52:52**	**57:57**	**57:57**	**56:56**	**500.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kasus kekerasan perempuan*	-			20 Kasus	350.000.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Masayarakat, Perempuan yang mendapatkan kekerasan dan TPPPO	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.01.0003	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Masayarakat, Perempuan yang mendapatkan kekerasan dan TPPPO		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.01.0005	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi														
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				1 laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Masayarakat, Perempuan yang mendapatkan kekerasan dan TPPPO		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				2 Kegiatan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Masayarakat, Perempuan yang mendapatkan kekerasan dan TPPPO		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan*	-			100 Persen	0,00			-	-	Perempuan yang mendapatkan kekerasan, Masyarakat, Organisasi Perempuan, TPPO	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.02.0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5 orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perempuan yang mendapatkan kekerasan, Masyarakat, Organisasi Perempuan, TPPO		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.02.0006	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perempuan yang mendapatkan kekerasan, Masyarakat, Organisasi Perempuan, TPPO		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.02.0007	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perempuan yang mendapatkan kekerasan, Masyarakat, Organisasi Perempuan, TPPO		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perempuan yang mendapatkan kekerasan, Masyarakat, Organisasi Perempuan, TPPO		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.02.0010	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perempuan yang mendapatkan kekerasan, Masyarakat, Organisasi Perempuan, TPPO		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan]	**rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)**	**52:52**	**57:57**	**57:57**	**56:56**	**500.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang diberikan penguatan dan pendampingan*	-			1 Lembaga	150.000.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Perempuan yang mendapatkan kekerasan, Masyarakat, Organisasi Perempuan, TPPO	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														
			jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek				35 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Perempuan yang mendapatkan kekerasan, Masyarakat, Organisasi Perempuan, TPPO		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**200.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan]	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan**	**57.00**	**52.14**	**53.60**	**54.20**	**200.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Keluarga yang mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas keluarga*	-			20 Keluarga	200.000.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Masyarakat, Organisasi Perempuan, Perempuan Kepala Keluarga	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.03.0005	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				30 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Masyarakat, Organisasi Perempuan, Perempuan Kepala Keluarga		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**						**550.000.000,00**						**-**	**650.000.000,00**	
		[Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak]	**Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**550.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**650.000.000,00**	-
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah dokumen yang berisi data gender dan anak*	-			1 Dokumen	550.000.000,00			-	-	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat.	-	650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.1.01.0003	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA														
			Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat.		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	2.08.05.1.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak														
			Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak				5 Lembaga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat.		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.1.01.0005	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi														
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat.		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**750.000.000,00**						**-**	**300.000.000,00**	
		[Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif]	**Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)** **Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)**	**60.80** **825**	**500** **59.53**	**580** **59.53**	**59.78** **600**	**750.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**300.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	*Jumlah lembaga PHA*	-			2 LEMBAGA	500.000.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Anak	-	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi														
			Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi				1 Kebijakan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Anak		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0006	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi														
			jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				40 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Anak		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0008	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi														
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Anak		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak*	-			1 Lembaga	250.000.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Masyarakat, Organisasi Anak, Forum Anak Daerah, OPD Terkait	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak														
			Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak				1 Kegiatan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Masyarakat, Organisasi Anak, Forum Anak Daerah, OPD Terkait		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi														
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimtek				50 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Masyarakat, Organisasi Anak, Forum Anak Daerah, OPD Terkait		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**550.000.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak]	**Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak**	**52:52**	**57:57**	**57:57**	**56:56**	**550.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**200.000.000,00**	-
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Rasio kekerasan terhadap anak*	-			3,90 Rasio	350.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Anak yang mendapatkan kekerasan, Masyarakat, Organisasi Anak dan Organisasi Masyarakat	-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.01.0006	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi														
			Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi				30 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Anak yang mendapatkan kekerasan, Masyarakat, Organisasi Anak dan Organisasi Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.01.0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Anak yang mendapatkan kekerasan, Masyarakat, Organisasi Anak dan Organisasi Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.01.0010	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi														
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Anak yang mendapatkan kekerasan, Masyarakat, Organisasi Anak dan Organisasi Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**550.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**200.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase jumlah anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus*	-			95 %	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Anak yang mendapatkan kekerasan, Masyarakat, Organisasi Masyarakat	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.02.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Anak yang mendapatkan kekerasan, Masyarakat, Organisasi Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.02.0009	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Anak yang mendapatkan kekerasan, Masyarakat, Organisasi Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.02.0010	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Anak yang mendapatkan kekerasan, Masyarakat, Organisasi Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.02.0011	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Anak yang mendapatkan kekerasan, Masyarakat, Organisasi Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.02.0012	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Anak yang mendapatkan kekerasan, Masyarakat, Organisasi Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.02.0013	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Anak yang mendapatkan kekerasan, Masyarakat, Organisasi Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak]	**Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak**	**52:52**	**57:57**	**57:57**	**56:56**	**550.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**200.000.000,00**	-
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga layanan bagi anak yang diberikan penguatan dan pengembangan*	-			20 Lembaga	200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Anak yang mendapatkan kekerasan, Masyarakat, Organisasi Anak dan Organisasi Masyarakat	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Anak yang mendapatkan kekerasan, Masyarakat, Organisasi Anak dan Organisasi Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0009	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Anak yang mendapatkan kekerasan, Masyarakat, Organisasi Anak dan Organisasi Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**1.200.000.000,00**							**2.250.000.000,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**500.000.000,00**						**-**	**800.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terkendalinya angka kelahiran total]	**TFR (Angka Kelahiran Total)**	**2.10** **2.18**	**2.27**	**2.25**	**2.22** **2.24**	**500.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**800.000.000,00**	-
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah pertemuan untuk Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk*	-			3 Pertemuan	500.000.000,00			-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Organisasi Masyarakat	-	800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0022	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi														
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				1 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Organisasi Masyarakat		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0024	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain														
			Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain				3 Daerah	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Organisasi Masyarakat		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**350.000.000,00**						**-**	**700.000.000,00**	
		[Meningkatnya akseptor KB]	**Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR**	**61.00** **72.00**	**56.80** **67.00**	**57.50** **68.00**	**58.00** **69.20**	**350.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**700.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Loka*	-			1 Dokumen	200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat.	-	600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat.		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0009	Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan				1 Daerah	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat.		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*umlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)*	-			5 Organisasi	150.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat, Kampung KB, Organisasi Masyarakat	-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				5 Organisasi	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masayarakat, Kampung KB, Organisasi Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**350.000.000,00**						**-**	**750.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera]	**Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)**	**21.50-21.50 23.40-23.40**	**26.10-26.10**	**24.40-24.40 25.67-25.67**	**23.85-23.85 25.25-25.25**	**350.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**750.000.000,00**	-
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Daerah Pembangunan Ketahan Keluarga yang dibina*	-			5 Kabupaten/ Kota	150.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Organisasi Masyarakat	-	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0028	Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Organisasi Masyarakat		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Kualitas Keluarga Sejahtera*	-			20 Keluarga	200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	-	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02.0011	Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK						**2.248.500.000,00**							**3.900.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.248.500.000,00**							**3.900.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**2.248.500.000,00**							**3.900.000.000,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.348.500.000,00**						**-**	**2.600.000.000,00**	
		[Nilai SAKIP]	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah** **Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100** **86.12**	**100** **81.51**	**100** **82.13**	**100** **82.45**	**1.348.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.600.000.000,00**	-
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Laporan	150.000.000,00			-	-	Seluruh ASN di Lingkungan UPTD PPA Prov. Kaltara	-	200.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN di Lingkungan UPTD PPA Prov. Kaltara		200.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			1 Laporan	50.000.000,00			-	-	Seluruh ASN di Lingkungan UPTD PPA Prov. Kaltara	-	150.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN di Lingkungan UPTD PPA Prov. Kaltara		150.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			1 Laporan	512.500.000,00			-	-	Seluruh ASN di Lingkungan UPTD PPA Prov. Kaltara	-	810.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN di Lingkungan UPTD PPA Prov. Kaltara		10.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	120.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN di Lingkungan UPTD PPA Prov. Kaltara		150.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN di Lingkungan UPTD PPA Prov. Kaltara		50.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	132.500.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN di Lingkungan UPTD PPA Prov. Kaltara		200.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN di Lingkungan UPTD PPA Prov. Kaltara		100.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN di Lingkungan UPTD PPA Prov. Kaltara		300.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			1 Laporan	50.000.000,00			-	-	Seluruh ASN di Lingkungan UPTD PPA Prov. Kaltara	-	580.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN di Lingkungan UPTD PPA Prov. Kaltara		450.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN di Lingkungan UPTD PPA Prov. Kaltara		50.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN di Lingkungan UPTD PPA Prov. Kaltara		80.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			1 Laporan	316.000.000,00			-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan UPTD PPA Prov. Kaltara	-	480.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan UPTD PPA Prov. Kaltara		10.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan UPTD PPA Prov. Kaltara		70.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	250.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan UPTD PPA Prov. Kaltara		400.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			1 Laporan	270.000.000,00			-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan UPTD PPA Prov. Kaltara	-	380.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	110.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan UPTD PPA Prov. Kaltara		150.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan UPTD PPA Prov. Kaltara		20.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	20.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan UPTD PPA Prov. Kaltara		30.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	140.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh ASN dan PTT di Lingkungan UPTD PPA Prov. Kaltara		180.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**440.000.000,00**						**-**	**600.000.000,00**	
		[Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (Per 100.000 penduduk perempuan)]	**rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)**	**52:52**	**57:57**	**57:57**	**56:56**	**440.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**600.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang memperoleh Layanan Rujukan Lanjutan*	-			90 %	440.000.000,00			-	-	Perempuan di Provinsi Kalimantan Utara yang mengalami kekerasan	-	600.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0003	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				15 orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perempuan di Provinsi Kalimantan Utara yang mengalami kekerasan		70.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0004	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				15 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perempuan di Provinsi Kalimantan Utara yang mengalami kekerasan		100.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				15 orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perempuan di Provinsi Kalimantan Utara yang mengalami kekerasan		100.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0006	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				15 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perempuan di Provinsi Kalimantan Utara yang mengalami kekerasan		50.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0007	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				15 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perempuan di Provinsi Kalimantan Utara yang mengalami kekerasan		50.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				15 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perempuan di Provinsi Kalimantan Utara yang mengalami kekerasan		130.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0009	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				15 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perempuan di Provinsi Kalimantan Utara yang mengalami kekerasan		50.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0010	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				15 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Perempuan di Provinsi Kalimantan Utara yang mengalami kekerasan		50.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
3.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**460.000.000,00**						**-**	**700.000.000,00**	
		[INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA)]	**Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak**	**7:7**	**10.7:10.7**	**10:10**	**9.5:9.5**	**460.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**700.000.000,00**	-
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Jumlah Anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus*	-			90 %	460.000.000,00			-	-	Anak di Provinsi Kalimantan Utara yang mengalami kekerasan	-	700.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				25 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Anak di Provinsi Kalimantan Utara yang mengalami kekerasan		100.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0009	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				25 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Anak di Provinsi Kalimantan Utara yang mengalami kekerasan		50.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0010	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				25 Orang	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Anak di Provinsi Kalimantan Utara yang mengalami kekerasan		200.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0011	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				25 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Anak di Provinsi Kalimantan Utara yang mengalami kekerasan		100.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0012	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				25 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Anak di Provinsi Kalimantan Utara yang mengalami kekerasan		100.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0013	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&														
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				20 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Anak di Provinsi Kalimantan Utara yang mengalami kekerasan		50.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0014	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				20 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Anak di Provinsi Kalimantan Utara yang mengalami kekerasan		50.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.02.0015	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				25 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Anak di Provinsi Kalimantan Utara yang mengalami kekerasan		50.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**13.990.855.056,00**							**264.050.200.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.990.855.056,00**							**264.050.200.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**13.990.855.056,00**							**264.050.200.000,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**9.180.855.056,00**						**-**	**9.520.000.000,00**	
		[Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah** **Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**9.180.855.056,00**	-	-	-	-	-	-	**9.520.000.000,00**	-
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai standar regulasi yang disusun*	-			6 Dokumen	190.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan 5 Kab/Kota	-	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan 5 Kab/Kota		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	60.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan 5 Kab/Kota		80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.180.855.056,00**	-	-	-	-	-	-	**9.520.000.000,00**	-
	2.11.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				46 Data	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan 5 Kab/Kota		70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		[Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah** **Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**9.180.855.056,00**	-	-	-	-	-	-	**9.520.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi*	-			4 Laporan	7.010.855.056,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	ASN DLH Kaltara	-	7.150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/ Bulan	6.510.855.056,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	ASN DLH Kaltara		6.600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	ASN DLH Kaltara		550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku*	-			2 Laporan	230.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	ASN DLH Kaltara	-	260.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	ASN DLH Kaltara		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	ASN DLH Kaltara		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah*	-			11 Paket	1.355.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	DLH Kaltara	-	1.395.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	DLH Kaltara		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	190.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	DLH Kaltara		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	25.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	DLH Kaltara		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	840.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	DLH Kaltara		900.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah kebutuhan jasa penunjang yang dipenuhi*	-			5 Paket	125.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	DLH Kaltara	-	155.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	DLH Kaltara		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	60.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	DLH Kaltara		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	35.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	DLH Kaltara		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara*	-			22 Unit	270.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	DLH Kaltara	-	310.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				17 Unit	100.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	DLH Kaltara		85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	170.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	DLH Kaltara		225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**						**760.000.000,00**						**-**	**250.000.000,00**	
		[Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi dampak resiko KRP]	**Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Yang Ditindaklanjuti**	**100.00** **45.00**	**-**	**100.00** **23.00**	**100.00** **25.00**	**760.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**250.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	*Jumlah Dokumen Pendukung RPPLH yang disusun*	-			1 Dokumen	620.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.01.0003	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH														
			Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan				1 Dokumen	620.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	*Jumlah Dokumen KLHS yang disusun/Divalidasi/Dibina*	-			5 Dokumen	140.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota	-	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0009	Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota				5 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**1.180.000.000,00**						**-**	**251.300.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Status Mutu Air Sungai, Udara dan Air Laut]	**Persentase Parameter Status Mutu Udara tidak melampaui Baku Mutu** **Persentase Parameter Status Mutu Udara yang Memenuhi Baku Mutu** **Persentase pemenuhan Status mutu Air Sungai dengan Kategori Baik** **Persentase Status mutu Air laut Kategori Baik berdasarkan Baku Mutu Air laut**	**100.00** **28.50** **29.00** **73** **85.00**	**-** **100.00** **21.57**	**100.00** **23.00** **60** **65.00**	**100.00** **24.50** **25.00** **63** **70.00**	**1.180.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**251.300.000.000,00**	-
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	*Jumlah Laporan Pencegahan Pencemaran dan/Kerusakan Lingkungan Hidup*	-			1 Laporan	1.080.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota	-	251.150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi														
			Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0007	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0008	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut														
			Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun				1 laporan	310.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota		450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				3 Lokasi	200.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota		250.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK														
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0014	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan				1 Unit	300.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5 Kab/Kota		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.180.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**251.300.000.000,00**	-
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	*Jumlah Laporan Pemulihan Pencemaran dan/Kerusakan Lingkungan Hidup*	-			1 Laporan	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota	-	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**1.200.000.000,00**						**-**	**700.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman hayati]	**Persentase RTH**	**0.0291** **0.0505**	**-** **0.0285**	**0.0286** **0.0500**	**0.0287** **0.0501**	**1.200.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**700.000.000,00**	-
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	*Jumlah Laporan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi*	-			1 Laporan	1.200.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5 Kab/Kota	-	700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1.100.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5 Kab/Kota		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				50 Orang	100.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**						**150.000.000,00**						**-**	**300.000.000,00**	
		[Meningkatnya Penanganan Limbah B3]	**Persentase Limbah B3 yang Terkelola.**	**97.00** **97.50**	**95.01**	**95.30**	**95.50** **95.80**	**150.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**300.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase Limbah B3 yang yang dikelola oleh Pengumpul dan Penghasil Limba B3*	-			95,50 %	150.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota	-	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.1.01.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5 Kab/Kota		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**410.000.000,00**						**-**	**550.000.000,00**	
		[Meningkatnya Ketaatan pelaku Usaha dan/Kegiatan kewenangan provinsi yang diawasi]	**Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/Kegiatan kewenangan provinsi yang dilakukan pengawasan** **Persentase pelaku usaha dan/atau Kegiatan Kewenangan Provinsi yang dilakukan pembinaan dan pengawasan**	**60.00** **84.00**	**50.00** **75.00**	**55.00** **77.00**	**56.00** **78.00**	**410.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**550.000.000,00**	-
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	*Jumlah Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Kewenangan Provinsi yang dilakukan pembinaan dan pengawasan*	-			25 Badan Usaha	410.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota	-	550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan				5 Dokumen	130.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				20 Usaha/Kegiatan	280.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**190.000.000,00**						**-**	**350.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup]	**Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya.**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**190.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**350.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Kegiatan penyuluhan dan peningkatan Kapasitas Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan*	-			5 Kegiatan	190.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota	-	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat				100 Orang	110.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0007	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan				2 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**80.000.000,00**						**-**	**200.000,00**	
		[Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup]	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**30.00** **35.00**	**-**	**10.00** **14.00**	**15.00** **17.00**	**80.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**200.000,00**	-
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah masyarakat/Lembaga /Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapat penghargaan di tingkat provinsi*	-			4 Lembaga	80.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota	-	200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				4 Entitas	80.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota		200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**						**110.000.000,00**						**-**	**180.000.000,00**	
		[Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup]	**Persentase Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**110.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**180.000.000,00**	-
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	*Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani/ditindaklanjuti*	-			100 Persen	110.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota	-	180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani				6 Pengaduan	110.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota		180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**730.000.000,00**						**-**	**900.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pengelolaan Persampahan]	**Persentase Sampah yang dikelola.**	**90.00** **97.00**	**68.60** **94.10**	**73.00** **94.50**	**75.00** **95.00**	**730.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**900.000.000,00**	-
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	*Persentase Penanganan Sampah* *Persentase Pengurangan Sampah*	-			74 % 13 %	730.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota	-	900.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	430.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota														
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	5 Kab/Kota		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP						**418.001.707,00**							**2.067.286.249,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**418.001.707,00**							**2.067.286.249,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**418.001.707,00**							**2.067.286.249,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**393.001.707,00**						**-**	**1.483.286.249,00**	
		[Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]	**Persentase Pemenuhan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**393.001.707,00**	-	-	-	-	-	-	**1.483.286.249,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi*	-			4 Laporan	5.000.000,00			-	-	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	-	161.550.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup		161.550.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**393.001.707,00**	-	-	-	-	-	-	**1.483.286.249,00**	-
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi pendapatan Daerah Yang disediakan*	-			1 Dokumen	0,00			-	-	Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		0,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
		[Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]	**Persentase Pemenuhan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**393.001.707,00**	-	-	-	-	-	-	**1.483.286.249,00**	-
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku*	-			2 Laporan	22.000.000,00			-	-	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	-	200.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup		200.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah*	-			4 Paket	21.104.347,00			-	-	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	-	286.500.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup		50.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup		224.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	604.347,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup		11.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup		1.500.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan*	-			1 Unit	1.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah kebutuhan jasa penunjang yang dipenuhi*	-			4 Paket	317.397.360,00			-	-	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	-	554.236.249,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	112.355.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup		123.590.500,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup		220.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	195.042.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup		210.645.749,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara*	-			7 Unit	26.500.000,00			-	-	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	-	181.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup		1.500.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup		79.500.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**393.001.707,00**	-	-	-	-	-	-	**1.483.286.249,00**	-
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup		100.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**25.000.000,00**						**-**	**584.000.000,00**	
		[Menurunnya Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup]	**Indeks Kualitas Air** **Indeks Kualitas Air Laut** **Indeks Kualitas Udara**	**73.55** **75.60** **84.95**	**70.53** **72.58** **84.65**	**72.05** **74.60** **84.70**	**72.35** **74.80** **84.75**	**25.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**584.000.000,00**	-
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	*Jumlah Laporan Pencegahan dan/Kerusakan Lingkungan Hidup*	-			1 Laporan	25.000.000,00			-	-	Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara	-	584.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan														
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		144.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				3 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		440.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**9.865.477.909,00**							**8.763.383.200,65**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.865.477.909,00**							**8.763.383.200,65**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**9.865.477.909,00**							**8.763.383.200,65**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**6.463.477.909,00**						**-**	**7.283.383.200,65**	
		[Terpenuhinya layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah lingkup Dinas Dukcapil]	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**6.463.477.909,00**	-	-	-	-	-	-	**7.283.383.200,65**	-
	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			1 Dokumen	56.000.000,00			-	-	Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara	-	55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	56.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.463.477.909,00**	-	-	-	-	-	-	**7.283.383.200,65**	-
	2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Terpenuhinya layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah lingkup Dinas Dukcapil]	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**6.463.477.909,00**	-	-	-	-	-	-	**7.283.383.200,65**	-
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Bulan Penyediaan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	5.765.516.409,00			-	-	Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara	-	6.898.919.700,65	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/ Bulan	5.176.516.409,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara		6.302.566.425,65	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	589.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara		596.353.275,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Bulan Penyediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	50.000.000,00			-	-	Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara	-	70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara		70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Bulan Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	229.277.500,00			-	-	Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara	-	227.944.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara		50.539.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara		22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	141.277.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara		155.405.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				365 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah BMD yang diadakan*	-			4 Unit	40.000.000,00			-	-	Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			12 Bulan	182.008.000,00			-	-	OPD di Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	OPD di Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	44.608.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	OPD di Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	122.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	OPD di Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya*	-			35 Unit	140.676.000,00			-	-	Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara	-	31.518.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	50.676.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara		31.518.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**1.170.000.000,00**						**-**	**930.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk]	**Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)** **Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak** **Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP** **Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Adminduk**	**-** **60** **75**	**-** **3.89** **66.28**	**10** **30** **67** **70**	**-** **20** **55**	**1.170.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**930.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	*Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dalam pelayanan pendaftaran penduduk*	-			5 Kabupaten/ Kota	95.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Disdukcapil Kabupaten/Kota	-	80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Disdukcapil Kabupaten/Kota		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Disdukcapil Kabupaten/Kota		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Disdukcapil Kabupaten/Kota		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Disdukcapil Kabupaten/Kota		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	*Jumlah kabupaten/kota penyelenggara pendaftaran penduduk*	-			5 Kabupaten/ Kota	755.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat	-	580.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		475.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	*Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan*	-			5 Kabupaten/ Kota	320.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	270.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Masyarakat		70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**1.332.000.000,00**						**-**	**550.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil]	**Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran** **Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun** **Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal** **Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai** **Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah**	**100** **67** **67.5** **99.9**	**100** **70.67** **72.48** **98.16** **98.82**	**62** **65** **96** **99**	**100** **63** **65.5** **97**	**1.332.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	**550.000.000,00**	-
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi dalam pelayanan pencatatan sipil*	-			5 Kabupaten/ Kota	550.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat	-	550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0003	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota				1 Laporan	525.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		525.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	*Jumlah Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pencatatan sipil*	-			5 Kabupaten/ Kota	365.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.332.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**550.000.000,00**	-
	2.12.03.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil]	**Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran** **Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun** **Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal** **Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai** **Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah**	**100** **67** **67.5** **99.9**	**100** **70.67** **72.48** **98.16** **98.82**	**62** **65** **96** **99**	**100** **63** **65.5** **97**	**1.332.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**550.000.000,00**	-
	2.12.03.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pencatatan sipil sesuai SOP*	-			5 Kabupaten/ Kota	417.000.000,00			-	-	Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	142.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA	-	-	Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA	-	-	Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**800.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**800.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.12.04.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah peraturan terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan*	-			1 Peraturan	0,00			-	-	OPD di Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.01.0002	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA	-	-	OPD di Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan]	**Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan**	**100**	**-**	**100**	**100**	**800.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	*Jumlah pelaporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi*	-			2 Laporan	600.000.000,00			-	-	OPD di Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA	-	-	OPD di Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA	-	-	OPD di Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**800.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.12.04.1.02.0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA	-	-	OPD di Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan]	**Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan**	**100**	**-**	**100**	**100**	**800.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA	-	-	OPD di Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**800.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.12.04.1.02.0006	Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi														
			Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA	-	-	OPD di Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan]	**Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan**	**100**	**-**	**100**	**100**	**800.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	*Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi*	-			5 Kabupaten/ Kota	200.000.000,00			-	-	OPD di Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA	-	-	OPD di Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	*Jumlah Profil Kependudukan*	-			1 Buku	100.000.000,00			-	-	OPD di Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi														
			Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA	-	-	OPD di Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Meningkatnya kualitas profil kependudukan]	**Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA BELANJA LAINNYA	-	-	OPD di Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**11.694.695.933,00**							**16.838.732.223,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.694.695.933,00**							**16.838.732.223,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**11.694.695.933,00**							**16.838.732.223,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**7.244.202.093,00**						**-**	**11.773.732.223,00**	
		[Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi]	**Persentase Pemenuhan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**7.244.202.093,00**	-	-	-	-	-	-	**11.773.732.223,00**	-
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	5.524.954.598,00			-	-	Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara	-	8.396.218.040,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/ Bulan	5.224.954.598,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara		8.046.218.040,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			0				0 0	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			0 Bulan	0,00			-	-	Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara	-	400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	1.433.137.829,00			-	-	Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara	-	1.877.514.183,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	348.233.622,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara		372.609.976,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	74.904.207,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara		74.904.207,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara		1.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			12 Bulan	116.268.184,00			-	-	Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara	-	600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	60.268.184,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	36.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jasa Pemeliharaannya*	-			20 Unit	169.841.482,00			-	-	Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara	-	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	169.841.482,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**						**117.769.650,00**						**-**	**250.000.000,00**	
		[Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa]	**Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa**	**70**	**0**	**20**	**30**	**117.769.650,00**	-	-	-	-	-	-	**250.000.000,00**	-
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	*Jumlah Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam meningkatkan Perekonomian Desa*	-			2 Dokumen	117.769.650,00			-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Pengurus BUM Desa/ BUMDesa Bersama dan Aparatur Desa	-	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan				1 Dokumen	58.884.825,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Pengurus BUM Desa/ BUMDesa Bersama dan Aparatur Desa		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														
			jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	58.884.825,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Pengurus BUM Desa/ BUMDesa Bersama dan Aparatur Desa		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**573.109.944,00**						**-**	**885.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa]	**Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya** **Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa**	**25.73** **30.20**	**0**	**10.07** **1.44**	**13.42** **3.36**	**573.109.944,00**	-	-	-	-	-	-	**885.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	*Jumlah pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan*	-			180 Orang	573.109.944,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Desa dan Pengurus BUM Desa/ BUMDesa Bersama	-	885.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Desa dan Pengurus BUM Desa/ BUMDesa Bersama		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Desa dan Pengurus BUM Desa/ BUMDesa Bersama		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa														
			Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Desa dan Pengurus BUM Desa/ BUMDesa Bersama		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa														
			jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa				1 Dokumen	168.624.727,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Desa dan Pengurus BUM Desa/ BUMDesa Bersama		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	31.092.198,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Desa dan Pengurus BUM Desa/ BUMDesa Bersama		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa														
			jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina				30 Orang	114.508.194,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Desa dan Pengurus BUM Desa/ BUMDesa Bersama		135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	58.884.825,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Aparatur Desa dan Pengurus BUM Desa/ BUMDesa Bersama		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**3.759.614.246,00**						**-**	**3.930.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan]	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat** **Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**	**18.04** **8.47**	**0**	**1.41** **3.01**	**2.82** **6.01**	**3.759.614.246,00**	-	-	-	-	-	-	**3.930.000.000,00**	-
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan*	-			305 Lembaga	3.759.614.246,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Pengurus LKD dan LAD, Pengurus BUM Desa, Pengurus Posyantek	-	3.930.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	217.411.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Pengurus LKD dan LAD, Pengurus BUM Desa, Pengurus Posyantek		169.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya				30 Lembaga	196.923.873,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Pengurus LKD dan LAD, Pengurus BUM Desa, Pengurus Posyantek		211.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	176.654.476,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Pengurus LKD dan LAD, Pengurus BUM Desa, Pengurus Posyantek		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	168.624.727,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Pengurus LKD dan LAD, Pengurus BUM Desa, Pengurus Posyantek		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Laporan	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Pengurus LKD dan LAD, Pengurus BUM Desa, Pengurus Posyantek		3.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN						**23.177.903.809,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**23.177.903.809,00**							**0,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**23.177.903.809,00**							**0,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**16.555.767.948,00**						**-**	**0,00**	
		[Menigkatnya Pemenuhan Layanan Administrasi Peyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Lingkup Dinas Perhubungan]	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas Perhubungan** **Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**16.555.767.948,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun dan di Evaluasi*	-			6 Dokumen	605.963.019,00			-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	96.479.645,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	310.951.450,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				12 Data	42.785.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.555.767.948,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.15.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2 Dokumen	36.646.924,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Menigkatnya Pemenuhan Layanan Administrasi Peyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Lingkup Dinas Perhubungan]	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas Perhubungan** **Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**16.555.767.948,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.15.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan														
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				1 Berita Acara	119.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah (UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan)* *Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah (UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan)* *Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	13.772.080.165,00			-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				169 Orang/ Bulan	13.342.284.693,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	429.795.472,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung)* *Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (UPTD Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan)*	-			12 Laporan 12 Bulan 12 Laporan	80.005.000,00			-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	80.005.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan)* *Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan)* *Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			12 orang 12 Bulan 8 Orang	241.000.000,00			-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	85.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	156.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan)* *Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pelabuhan Liem hie Djung Nunukan)* *Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			15 Bulan 12 Paket 12 Paket	1.175.616.768,00			-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	8.268.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	14.300.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	165.639.380,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	101.209.388,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.555.767.948,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Menigkatnya Pemenuhan Layanan Administrasi Peyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Lingkup Dinas Perhubungan]	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas Perhubungan** **Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**16.555.767.948,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	825.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.555.767.948,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.15.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Menigkatnya Pemenuhan Layanan Administrasi Peyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Lingkup Dinas Perhubungan]	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas Perhubungan** **Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**16.555.767.948,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan* *Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan (UPTD Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan)* *Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan (UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan)*	-			8 Unit 12 Bulan 12 Unit	281.150.000,00			-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Paket	133.650.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	147.500.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahn (UPTD Pelabuhan Liem Djung Nunukan)* *Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahn (UPTD Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan)*	-			12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	89.768.000,00			-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	13.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	76.768.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya* *Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya (UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan)* *Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya (UPTD Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan)*	-			50 Unit 11 Unit 23 Unit	310.184.996,00			-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				24 Unit	147.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	89.845.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				17 Unit	13.500.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	28.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	31.069.996,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**3.486.076.402,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Layanan Transportasi Darat]	**Presentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal** **Rasio Konektivitas Angkutan Jalan**	**0.5:0.5** **49**	**0.6:0.6** **42**	**0.8:0.8** **40**	**0.8:0.8** **42**	**3.486.076.402,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	*Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi yang ditetapkan* *Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ* *Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi yang ditetapkan Jumlah layanan administrasi keuan*	-			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0,00			-	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi														
			Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	*Jumlah perlengkapan jalan provinsi yang diadakan/disediakan*	-			59600 Unit	2.002.912.102,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				59600 Unit	1.727.912.102,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				4 Unit	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	*Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang dikelola* *Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang Dikelola* *umlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan B*	-			1 Unit 1 Unit 0 Unit	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	*Jumlah ruas jalan provinsi yang telah ditata/direkayasa Lalu Lintasnya* *Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan*	-			3 Ruas Jalan 3 ruas jalan	375.444.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi														
			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Laporan	120.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Laporan	255.194.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	*Jumlah Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Provinsi yang mendapatkan rekomendasi Jumlah Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Provinsi yang mendapatkan rekomendasi Jumlah Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Provinsi yang mendapatkan rekomendasi*	-			4 Laporan 4 Dokumen 7 Laporan	83.617.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	83.617.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*undefined*	-			undefined undefined	71.717.600,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				1 Laporan	71.717.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang tersedia*	-			2 Unit	473.817.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi														
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi				1 Laporan	166.767.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				8 Unit	307.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan* *Jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah/Kabupaten Kota yang Ditetapkan* *Jumlah dokumen perencanaan yang disusun* *Jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun*	-			2 Kawasan 0 Dokumen 1 Dokumen	478.567.600,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	128.567.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan* *Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan* *Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diterbitkan*	-			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan				3 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**3.136.059.459,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Layanan Transportasi Perairan]	**Persentase kecelakaan Angkutan perairan** **Rasio Konektivitas Angkutan Perairan**	**0.1** **0.76:0.76**	**0.1** **0.70:0.70**	**0.1** **0.76:0.76**	**0.1** **0.76:0.76**	**3.136.059.459,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	-	-			-	54.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi				12 Laporan	54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	-	-			-	107.500.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan				3 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi				12 Laporan	82.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan* *Jumlah Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi* *Jumlah Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan*	-			12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	256.022.864,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.05.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				18 Dokumen	106.022.864,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				30 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	*Jumlah Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas yang diterbitkan rekomendasi teknisnya Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas*	-			12 Dokumen 15 Dokumen	93.300.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				10 Dokumen	49.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				3 Laporan	44.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.07	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	-			-	35.999.999,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	35.999.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	*Jumlah Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang ditetapkan* *Jumlah Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang ditetapkan* *Jumlah Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang ditetapkan*	-			1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.08.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	*Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dioperasikan dan dipelihara (UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan)* *Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun/diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian* *Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun/diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian* *Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun/diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian* *Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dioperasikan dan dipelihara (UPTD Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan)*	-			1 Unit 1 Dokumen 1 Pelabuhan 1 Pelabuhan 1 Unit	1.280.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun				1 Unit	420.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional														
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				2 Unit	810.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				6 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*undefined* *jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dibangun/diterb itkan rekomendasi izinnya* *Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dibangun/diterbitkan rekomendasi ljinnya* *jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dibangun/diterbitkan rekomendasi izinnya*	-			undefined undefined 4 Pelabuhan 4 Pelabuhan 4 Unit	76.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10.0006	Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi				2 Orang	36.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10.0007	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan														
			Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi				5 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.12	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-			-	1.233.236.596,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.1.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				2 Dokumen	1.233.236.596,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPTD PELABUHAN TENGKAYU I						**3.600.304.984,00**							**5.490.328.171,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.600.304.984,00**							**5.490.328.171,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**3.600.304.984,00**							**5.490.328.171,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**3.600.304.984,00**						**-**	**5.490.328.171,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkup UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.600.304.984,00**	-	-	-	-	-	-	**5.490.328.171,00**	-
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.850.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	-	-	35.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	10.850.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	-		35.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			12 Bulan	1.889.220.984,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	SDM Pelabuhan Tengkayu I Tarakan	-	2.321.604.771,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1.889.220.984,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	SDM Pelabuhan Tengkayu I Tarakan		2.321.604.771,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
	2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*	-			12 Laporan	15.100.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Uptd Pelabuhan Tengkayu I	-	40.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
	2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	15.100.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Uptd Pelabuhan Tengkayu I		40.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	50.000.000,00			-	-	SDM Pelabuhan Tengkayu I Tarakan	-	100.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				105 Paket	0,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SDM Pelabuhan Tengkayu I Tarakan		0,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	50.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	SDM Pelabuhan Tengkayu I Tarakan		100.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	580.800.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Uptd Pelabuhan Tengkayu I	-	1.106.650.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	15.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Uptd Pelabuhan Tengkayu I		100.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	122.340.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Uptd Pelabuhan Tengkayu I		175.550.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
	2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	52.800.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Uptd Pelabuhan Tengkayu I		105.545.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	127.800.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Uptd Pelabuhan Tengkayu I		100.555.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	111.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Uptd Pelabuhan Tengkayu I		220.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.860.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Uptd Pelabuhan Tengkayu I		5.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	150.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Uptd Pelabuhan Tengkayu I		400.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan*	-			12 Bulan	205.100.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Uptd Pelabuhan Tengkayu I	-	305.552.350,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
	2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	35.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Uptd Pelabuhan Tengkayu I		50.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	89.100.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Uptd Pelabuhan Tengkayu I		150.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	81.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Uptd Pelabuhan Tengkayu I		105.552.350,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	274.444.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Uptd Pelabuhan Tengkayu I	-	350.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.500.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Uptd Pelabuhan Tengkayu I		5.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	270.944.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Uptd Pelabuhan Tengkayu I		345.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya*	-			23 Unit	574.790.000,00			-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Uptd Pelabuhan Tengkayu I	-	1.231.521.050,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	397.760.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Uptd Pelabuhan Tengkayu I		635.575.250,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	77.030.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Uptd Pelabuhan Tengkayu I		105.555.500,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Uptd Pelabuhan Tengkayu I		95.135.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.600.304.984,00**	-	-	-	-	-	-	**5.490.328.171,00**	-
	2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara	Uptd Pelabuhan Tengkayu I		395.255.300,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU I
		UPTD PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN						**3.139.304.985,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.139.304.985,00**							**0,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**3.139.304.985,00**							**0,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**3.139.304.985,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatkan Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup UPTD Liem Hie Djung Nunukan]	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup UPTD Pelabuha Liem Hie Djung Nunukan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.139.304.985,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah (UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan)* *Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah* *Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah (UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan)*	-			12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	1.137.503.376,00			-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	UPTD PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN
	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1.137.503.376,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	UPTD PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* *Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan)* *Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan)*	-			8 Orang 12 orang 12 Bulan	161.800.000,00			-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	UPTD PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				76 Paket	41.800.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	UPTD PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	120.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	UPTD PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan)* *Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah* *Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pelabuhan Liem hie Djung Nunukan)*	-			15 Bulan 12 Paket 12 Paket	787.080.618,00			-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	UPTD PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	18.313.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	UPTD PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	89.560.778,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	UPTD PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	79.206.340,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	UPTD PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	600.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	UPTD PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan (UPTD Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan)* *Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan* *Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan (UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan)*	-			12 Bulan 8 Unit 12 Unit	371.200.000,00			-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	UPTD PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	100.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	UPTD PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				31 Unit	271.200.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	UPTD PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahn (UPTD Pelabuhan Liem Djung Nunukan)* *Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahn (UPTD Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan)* *Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	455.740.347,00			-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	UPTD PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.700.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	UPTD PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	454.040.347,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	UPTD PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya (UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan)* *Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya (UPTD Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan)* *Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya*	-			11 Unit 23 Unit 50 Unit	225.980.644,00			-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	UPTD PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	16.320.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	UPTD PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16.800.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	UPTD PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.139.304.985,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	192.860.644,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	UPTD PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN						**20.987.197.079,00**							**53.869.538.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**20.987.197.079,00**							**53.869.538.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**19.767.197.079,00**							**50.129.538.000,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**9.191.886.879,00**						**-**	**14.587.928.000,00**	
		[Terlaksananya Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi]	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**9.191.886.879,00**	-	-	-	-	-	-	**14.587.928.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	8.616.886.879,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara	-	12.447.128.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/ Bulan	7.616.886.879,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		10.747.128.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		1.700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			0 Bulan	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara	-	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			0 Bulan	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara	-	305.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		225.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	235.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara	-	610.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah BMD yang diadakan*	-			0 Unit	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara	-	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			12 Bulan	135.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara	-	880.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		85.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		750.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya*	-			36 Unit	205.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara	-	295.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		130.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**6.750.000.000,00**						**-**	**25.931.610.000,00**	
		[Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah]	**Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** **Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah**	**84**	**0** **66.53**	**69** **80**	**72** **81**	**6.750.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**25.931.610.000,00**	-
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	*Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dimensi Input*	-			75 Nilai	6.750.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara	-	25.931.610.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.1.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Konten Informasi Publik				5 Konten	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		2.400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				5 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik														
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik				80 Persentase	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				80 Persentase	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		17.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik														
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik														
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				1 Laporan	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		1.800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				5 Komunitas	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				2 Permohonan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				2 Rekomendasi	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				30 Media	3.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		1.831.610.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**3.825.310.200,00**						**-**	**9.610.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika]	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** **Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	**100** **4**	**100** **3.79**	**100** **3.8**	**100** **3.84**	**3.825.310.200,00**	-	-	-	-	-	-	**9.610.000.000,00**	-
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	*Indeks Domain Layanan SPBE*	-			4,5 Nilai	110.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara	-	250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah				12 Dokumen	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	*Indeks Domain Kebijakan SPBE* *Indeks Domain Manajemen SPBE* *Indeks Domain Tata Kelola SPBE*	-			5 Nilai 1,5 Nilai 3,6 Nilai	3.715.310.200,00			-	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara	-	9.360.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0013	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi														
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				1 Dokumen	13.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				0 kabupaten/ kota	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		130.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional														
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				10 Aplikasi	61.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		425.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi														
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				2 Layanan	77.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				2 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0024	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				1 Dokumen	50.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				0 perangkat daerah	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.1.02.0031	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas														
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas				1 Dokumen	167.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0032	Penyediaan Akses Internet														
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				82 Perangkat Daerah	2.596.935.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		5.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0033	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				1 Aplikasi	141.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0034	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				2 Dokumen	166.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE														
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				1 Laporan	211.425.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0036	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan														
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				20 Aplikasi	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.1.02.0037	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
			Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		675.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**350.000.000,00**							**640.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**350.000.000,00**						**-**	**640.000.000,00**	
		[Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)]	**Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah** **Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**350.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**640.000.000,00**	-
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	*Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD*	-			70,98 %	350.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara	-	640.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.1.01.0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				10 %	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.1.01.0017	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				100 %	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.1.01.0018	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral				100 %	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.1.01.0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				100 %	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.1.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				50 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.1.01.0021	Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral														
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**870.000.000,00**							**3.100.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**870.000.000,00**						**-**	**3.100.000.000,00**	
		[Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah]	**Nilai Indeks KAMI (Keamanan Informasi)**	**651**	**331**	**395**	**459**	**870.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**3.100.000.000,00**	-
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	*Tingkat Kematangan Aspek Tata Kelola Keamanan Informasi*	-			96 Nilai	870.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara	-	2.950.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.1.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				3 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		1.400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.1.01.0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				42 Perangkat Daerah	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.1.01.0007	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				2 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.1.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN di Lingkungan DKISP Prov. Kaltara		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	*Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi*	-			0 %	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara	-	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.1.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.				0 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN dan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP						**8.629.452.290,00**							**21.072.706.574,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.629.452.290,00**							**21.072.706.574,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**8.629.452.290,00**							**21.072.706.574,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**8.629.452.290,00**						**-**	**10.554.858.894,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**96**	**100**	**100**	**8.629.452.290,00**	-	-	-	-	-	-	**10.554.858.894,00**	-
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Daerah*	-			0 persen	0,00			-	-	ASN DPMPTSP Prov Kaltara	-	9.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DPMPTSP Prov Kaltara		9.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Laporan Realisasi Pengelolaan Keuangan*	-			100 persen	8.629.452.290,00			-	-	ASN DPMPTSP Prov Kaltara	-	9.021.376.686,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/ Bulan	8.629.452.290,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN DPMPTSP Prov Kaltara		8.811.256.686,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DPMPTSP Prov Kaltara		210.120.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Terpenuhinya Atribut dan Pegawai yang Terlatih*	-			0 persen	0,00			-	-	ASN DPMPTSP Prov Kaltara	-	159.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DPMPTSP Prov Kaltara		44.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DPMPTSP Prov Kaltara		115.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Kantor dan Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan*	-			0 persen	0,00			-	-	ASN DPMPTSP Prov Kaltara	-	707.434.376,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DPMPTSP Prov Kaltara		138.563.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DPMPTSP Prov Kaltara		43.911.376,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DPMPTSP Prov Kaltara		5.160.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DPMPTSP Prov Kaltara		11.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DPMPTSP Prov Kaltara		508.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perkantoran*	-			0 persen	0,00			-	-	ASN DPMPTSP Prov Kaltara	-	195.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DPMPTSP Prov Kaltara		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DPMPTSP Prov Kaltara		120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DPMPTSP Prov Kaltara		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perkantoran*	-			0 persen	0,00			-	-	ASN DPMPTSP Prov Kaltara	-	329.502.832,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DPMPTSP Prov Kaltara		8.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DPMPTSP Prov Kaltara		27.740.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DPMPTSP Prov Kaltara		293.762.832,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara*	-			0 persen	0,00			-	-	ASN DPMPTSP Prov Kaltara	-	133.145.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DPMPTSP Prov Kaltara		113.345.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DPMPTSP Prov Kaltara		19.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**0,00**						**-**	**1.600.000.000,00**	
		[Meningkatnya daya tarik investasi]	**Persentase kebijakan daerah terkait penanaman modal yang ditetapkan**	**100**	**-**	**100**	**100**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**1.600.000.000,00**	-
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah Penetapan Dokumen Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*	-			0 dokumen	0,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pelaku Usaha	-	350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pelaku Usaha		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.1.01.0004	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pelaku Usaha		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	*Persentase Dokumen Penyusunan Strategi Promosi Investasi*	-			0 persen	0,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pelaku Usaha	-	1.250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi														
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pelaku Usaha		1.250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**0,00**						**-**	**3.550.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah Letter of Intent Persentase Investor yang Terjaring*	-			0 dokumen 0 persen	0,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pelaku Usaha	-	3.550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pelaku Usaha		3.350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pelaku Usaha		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**0,00**						**-**	**3.338.000.000,00**	
		[Meningkatnya pelaku usaha yang memiliki izin usaha]	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**	**95**	**85**	**87**	**87**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**3.338.000.000,00**	-
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan yang ditindaklanjuti*	-			0 persen	0,00			-	-	Pelaku Usaha	-	3.338.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha		1.459.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				0 Pelaku Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha		480.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				0 Pelaku Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha		880.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha				0 Kegiatan Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha		519.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**0,00**						**-**	**1.300.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pembinaan kegiatan penanaman modal]	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha** **Persentase proyek pelaku usaha lapor LKPM tepat waktu**	**100** **35**	**100** **25**	**100** **25**	**100** **25**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**1.300.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Persentase Proyek Pelaku Usaha yang Dilakukan Penilaian Kepatuhan Teknis dan Administrasi*	-			0 persen	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pelaku Usaha	-	1.300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				0 Kegiatan usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pelaku Usaha		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				0 Kegiatan usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pelaku Usaha		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				0 Pelaku Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pelaku Usaha		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**0,00**						**-**	**729.847.680,00**	
		[Meningkatnya kualitas sistem aplikasi pelayanan penanaman modal]	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**729.847.680,00**	-
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Peningkatan Fitur Aplikasi Pelayanan Penanaman Modal di Daerah* *Persentase Informasi Layanan yang Tersedia*	-			0 persen 0 persen	0,00			-	-	Pelaku Usaha	-	729.847.680,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha		729.847.680,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA						**38.900.809.800,00**							**3.040.596.903,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**38.900.809.800,00**							**3.040.596.903,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**38.900.809.800,00**							**3.040.596.903,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**12.517.541.094,00**						**-**	**2.565.000.000,00**	
		[Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, efesien, dan efektif]	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**80.00**	**0**	**65.45**	**68.90**	**12.517.541.094,00**	-	-	-	-	-	-	**2.565.000.000,00**	-
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			8 Dokumen	125.000.000,00			-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara	-	15.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		15.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			12 Bulan	10.022.926.095,00			-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/ Bulan	7.801.776.095,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	2.196.150.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah layanan administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah*	-			12 Bulan	30.000.000,00			-	-	BMD Dinas Pemuda dan Olahraga	-	10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BMD Dinas Pemuda dan Olahraga		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BMD Dinas Pemuda dan Olahraga		5.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BMD Dinas Pemuda dan Olahraga		5.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BMD Dinas Pemuda dan Olahraga		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BMD Dinas Pemuda dan Olahraga		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			12 Bulan	480.000.000,00			-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara	-	185.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		35.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah*	-			12 Bulan	675.000.000,00			-	-	ASN dan non ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara	-	515.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan non ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan non ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan non ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	185.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan non ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan non ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan non ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan non ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan non ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan non ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		15.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan non ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah BMD yang diadakan*	-			1 Paket	100.000.000,00			-	-	ASN dan non ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara	-	650.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				9 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan non ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan non ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		550.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan non ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan non ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan non ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah layanan jasa penunjang ursan pemerintah daerah yang disediakan*	-			12 Bulan	805.000.000,00			-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara	-	830.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		35.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	750.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		750.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya*	-			1 Paket	279.614.999,00			-	-	BMD Dinas Pemuda dan Olahraga	-	360.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				15 Unit	219.615.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BMD Dinas Pemuda dan Olahraga		300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	20.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BMD Dinas Pemuda dan Olahraga		20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BMD Dinas Pemuda dan Olahraga		10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BMD Dinas Pemuda dan Olahraga		20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BMD Dinas Pemuda dan Olahraga		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9.999.999,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BMD Dinas Pemuda dan Olahraga		10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**2.850.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan]	**Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan**	**51.00**	**14.95**	**50.05**	**50.25**	**2.850.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	*Jumlah Pemuda yang mengikuti Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan*	-			500 Orang	2.450.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Pemuda Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				500 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Pemuda Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pemuda Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda														
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				10 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemuda Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pemuda Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi														
			Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda				20 Persentase	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pemuda Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				250 Orang	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Pemuda Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				250 Orang	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Pemuda Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Organisasi yang dibina*	-			10 Organisasi	400.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Organisasi Kepemudaan Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda														
			Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda				20 Persentase	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Organisasi Kepemudaan Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				5 Organisasi	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Organisasi Kepemudaan Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**21.933.268.706,00**						**-**	**475.596.903,00**	
		[Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan]	**Peningkatan Prestasi Olahraga**	**100**	**100**	**100**	**100**	**21.933.268.706,00**	-	-	-	-	-	-	**475.596.903,00**	-
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah Atlet yang Dibina melalui pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi*	-			350 Orang	1.338.824.346,00			-	-	Cabang olahraga pendidikan wewenang Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus				1 Dokumen	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Cabang olahraga pendidikan wewenang Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi														
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia				5 Unit	1.338.824.346,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Gunung Seriang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Cabang olahraga pendidikan wewenang Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	*Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga*	-			200 Orang	10.273.648.350,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Masyarakat Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				500 Orang	3.613.876.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Masyarakat Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.933.268.706,00**	-	-	-	-	-	-	**475.596.903,00**	-
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				1 Kegiatan	612.521.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Masyarakat Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		[Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan]	**Peningkatan Prestasi Olahraga**	**100**	**100**	**100**	**100**	**21.933.268.706,00**	-	-	-	-	-	-	**475.596.903,00**	-
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi														
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara				3 Kegiatan	6.047.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Masyarakat Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	*Jumlah Atlet Pelajar Cabang Olahraga Prestasi yang Dibina Melalui PPLP/PPLPD*	-			20 Atlet	1.870.796.010,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Atlet usia pelajar	-	475.596.903,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah														
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				150 Orang	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Atlet usia pelajar		475.596.903,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				10 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Atlet usia pelajar		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)														
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				1 Pelatda	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Atlet usia pelajar		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Atlet usia pelajar		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi														
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				20 Orang	1.310.796.010,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Atlet usia pelajar		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Jumlah Organisasi Olahraga / Cabang Olahraga yang dibina*	-			10 Organisasi Keolahragaan / Cabor	8.450.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Organisasi Olahraga Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				5 Dokumen	8.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Organisasi Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi														
			Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi				1 Dokumen	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Organisasi Olahraga Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						**1.600.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya kapasitas kepramukaan]	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan**	**100**	**0**	**100**	**100**	**1.600.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan*	-			1 Pembinaan	1.600.000.000,00			-	-	Anggota pramuka Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anggota pramuka Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi														
			Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas				0 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anggota pramuka Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan														
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				0 Organiasasi	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anggota pramuka Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**7.495.427.528,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.495.427.528,00**							**0,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**7.312.427.528,00**							**0,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**6.914.500.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**97.27**	**100**	**100**	**6.914.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia*	-			100 Persen	45.000.000,00			-	-	Pegawai DPK Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DPK Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.914.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.23.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				50 Data	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DPK Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**97.27**	**100**	**100**	**6.914.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	5.780.000.000,00			-	-	Pegawai DPK Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/ Bulan	5.560.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DPK Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DPK Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	203.500.000,00			-	-	Pegawai DPK & Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DPK & Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DPK & Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DPK & Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DPK & Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DPK & Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DPK & Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DPK & Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DPK & Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	569.000.000,00			-	-	Pegawai DPK Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DPK Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DPK Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	365.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DPK Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	317.000.000,00			-	-	Pegawai DPK & Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	59.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DPK & Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	178.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DPK & Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DPK & Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DPK & Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai DPK & Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**397.927.528,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai Standar Perpustakaan Nasional]	**Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat**	**80.00**	**72.80**	**73.50**	**78.00**	**397.927.528,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Penambahan Keberadaan Perpustakaan di Wilayah yang menjadi Kewenangan Provinsi*	-			2 Perpustakaan	291.927.528,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Perpustakaan Daerah Kaltara Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				6 Perpustakaan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Perpustakaan Daerah Kaltara Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				2 Perpustakaan	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Perpustakaan Daerah Kaltara Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				40 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Perpustakaan Daerah Kaltara Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi				1 Layanan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Perpustakaan Daerah Kaltara Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				24926 Eksemplar	12.927.528,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Perpustakaan Daerah Kaltara Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat														
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				1 Dokumen	76.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perpustakaan Daerah Kaltara Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Perpustakaan Daerah Kaltara Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi														
			Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan				2 Perpustakaan	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Perpustakaan Daerah Kaltara Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Kunjungan Pemustaka*	-			8000 Orang	106.000.000,00			-	-	Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Lokus	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				3 Orang	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	23.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya				1 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**183.000.000,00**							**0,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**183.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis]	**Tingkat ketersediaan arsip**	**85**	**79,27**	**80**	**81**	**183.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	*Persentase arsip aktif dan inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip*	-			100 Persen	104.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Lembaga Kearsipan & Unit Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis				15 Arsip	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Lembaga Kearsipan & Unit Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi														
			Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis				2 Instansi	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Lembaga Kearsipan & Unit Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0011	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan				5 Laporan	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Lembaga Kearsipan & Unit Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan				11 Lembaga	48.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Lembaga Kearsipan & Unit Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	*Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik*	-			100 Persen	35.000.000,00			-	-	Lembaga Kearsipan & Unit Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi				35 Arsip	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Lembaga Kearsipan & Unit Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	*Persentase Arsip Statis yang dimiliki yang dimasukkan ke dalam SIKN JIKN*	-			100 Persen	44.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Lembaga Kearsipan & Unit Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				100 Pengguna	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Lembaga Kearsipan & Unit Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				5 Laporan	32.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Lembaga Kearsipan & Unit Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						**22.211.221.474,00**							**39.400.322.884,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**22.211.221.474,00**							**39.400.322.884,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**22.211.221.474,00**							**39.400.322.884,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**20.212.394.948,00**						**-**	**21.690.322.884,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**20.212.394.948,00**	-	-	-	-	-	-	**21.690.322.884,00**	-
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			0	150.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	215.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Dinas Kelautan dan Perikanan		165.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	50.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Dinas Kelautan dan Perikanan		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi Keuangan*	-			100 %	18.342.725.907,00			-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	18.598.711.105,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1932 Orang/ Bulan	18.058.565.907,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		18.314.551.105,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	284.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		284.160.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi kepegawaian*	-			100 %	75.000.000,00			-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum*	-			100 %	584.927.145,00			-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	1.120.443.148,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		15.866.240,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		164.959.777,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		50.516.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	100.263.121,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		113.540.731,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	28.664.024,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		65.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		10.560.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	435.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase barang hasil pengadaan yang digunakan sesuai fungsinya*	-			100 %	26.000.000,00			-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	413.041.215,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Paket	26.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		22.041.215,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		21.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan jasa penunjang perangkat daerah*	-			100 %	543.891.896,00			-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	470.577.816,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	11.700.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		18.300.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	93.849.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		105.418.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	438.342.896,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		346.859.016,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat daerah*	-			100 %	489.850.000,00			-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	762.549.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				17 Unit	17.700.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		25.056.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	438.350.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		584.093.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	33.800.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		53.400.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**430.000.000,00**						**-**	**2.500.000.000,00**	
		[Meningkatnya pengelolaan pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan dan sesuai dengan zonasi yang ditetapkan]	**Jumlah luasan wilayah laut yang dikelola** **Nilai Evaluasi, efektivitas, pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA)**	**356121.58** **50**	**29** **292084.4**	**304581.08** **32**	**310797.02** **35**	**430.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.500.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-			0	430.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	kelompok Masyarakat Pesisir dan Kawasan Konservasi	-	2.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				2057,65 Ha	430.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	kelompok Masyarakat Pesisir dan Kawasan Konservasi		1.300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	kelompok Masyarakat Pesisir dan Kawasan Konservasi		350.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	kelompok Masyarakat Pesisir dan Kawasan Konservasi		350.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-			-	0,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	-	-	300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-			0	0,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	kelompok Masyarakat Pesisir dan Kawasan Konservasi	-	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				0 Kelompok	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	kelompok Masyarakat Pesisir dan Kawasan Konservasi		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**750.000.000,00**						**-**	**4.000.000.000,00**	
		[Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap]	**Produksi Perikanan Tangkap**	**40704**	**36867**	**35241.25**	**37604**	**750.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**4.000.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	-			0	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Nelayan	-	1.200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Nelayan		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Nelayan		1.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			0	0,00			-	-	Nelayan	-	400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Nelayan		60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Nelayan		340.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-	-			0	0,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Nelayan	-	160.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil														
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil				0 Persentase	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Nelayan		160.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-	-				750.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pelaku Usaha Perikanan	-	2.200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan														
			Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan				1 Pelabuhan Perikanan	750.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pelaku Usaha Perikanan		1.350.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Bunyu Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pelaku Usaha Perikanan		850.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.10.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)														
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				0 Rekomendasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**200.000.000,00**						**-**	**4.460.000.000,00**	
		[Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya]	**Produksi Perikanan Budidaya**	**926944.24**	**873233.41**	**881955.64**	**890775.20**	**200.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**4.460.000.000,00**	-
	3.25.04.1.03	Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	-	-			-	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pembudidaya Ikan	-	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.03.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				0 Rekomendasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pembudidaya Ikan		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.04.0004	Penerbitan Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil yang Menjadi Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil yang Menjadi Kewenangan Provinsi				0 Rekomendasi	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-	-			0	100.000.000,00			-	-	Pembudidaya Ikan	-	3.550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Timur, Pantai Amal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pembudidaya Ikan		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pembudidaya Ikan		2.700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pembudidaya Ikan		400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Pembudidaya				30 Orang	50.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pembudidaya Ikan		250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pembudidaya Ikan		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-	-			0	100.000.000,00			-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Pembudidaya Ikan	-	800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Bulungan, Sekatak, Liagu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Pembudidaya Ikan		400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	70.000.000,00	Kab. Bulungan, Sekatak, Liagu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Pembudidaya Ikan		400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**328.826.526,00**						**-**	**2.500.000.000,00**	
		[Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan]	**Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku** **Persentase tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelanggaran di wilayah pesisir dan laut**	**85.00** **96.00**	**70.52** **87.30**	**60.00** **88.00**	**65.00** **89.00**	**328.826.526,00**	-	-	-	-	-	-	**2.500.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-			0	298.826.526,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku Usaha Perikanan diwilayah laut sampai dengan 12 Mil	-	2.140.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi														
			Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani				0 Perkara	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku Usaha Perikanan diwilayah laut sampai dengan 12 Mil		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi														
			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani				0 Perkara	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku Usaha Perikanan diwilayah laut sampai dengan 12 Mil		90.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan				22 Hari Operasi	132.826.526,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pelaku Usaha Perikanan diwilayah laut sampai dengan 12 Mil		250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan														
			Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku Usaha Perikanan diwilayah laut sampai dengan 12 Mil		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				10 Pelaku Usaha	56.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pelaku Usaha Perikanan diwilayah laut sampai dengan 12 Mil		280.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				10 Pelaku Usaha	61.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku Usaha Perikanan diwilayah laut sampai dengan 12 Mil		350.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0015	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan														
			Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku Usaha Perikanan diwilayah laut sampai dengan 12 Mil		180.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi														
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				7 Pelaku Usaha	34.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pelaku Usaha Perikanan diwilayah laut sampai dengan 12 Mil		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan				5 Kelompok Masyarakat	15.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pelaku Usaha Perikanan diwilayah laut sampai dengan 12 Mil		400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah														
			Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan				0 Forum	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku Usaha Perikanan diwilayah laut sampai dengan 12 Mil		90.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			0	30.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pelaku Usaha Perikanan diwilayah Perairan Darat	-	360.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				5 Pelaku Usaha	15.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pelaku Usaha Perikanan diwilayah Perairan Darat		180.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi														
			Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				10 Pelaku Usaha	15.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pelaku Usaha Perikanan diwilayah Perairan Darat		180.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**290.000.000,00**						**-**	**4.250.000.000,00**	
		[Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat sebagai sumber pangan bergizi, sehat dan berkelanjutan]	**Angka Konsumsi Ikan** **Jumlah unit pengolahan ikan (UPI) aktif dan tersertifikasi**	**46.20** **69**	**40.69** **57**	**42.14** **57**	**42.97** **61**	**290.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**4.250.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-			0	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku Usaha Pemasar dan Pengolah Hasil Perikanan	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku Usaha Pemasar dan Pengolah Hasil Perikanan		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-	-			0	290.000.000,00			-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Pelaku Usaha Pemasar dan Pengolah Hasil Perikanan	-	4.150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing														
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				3 Kegiatan	290.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Pelaku Usaha Pemasar dan Pengolah Hasil Perikanan		4.150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPTD PELABUHAN TENGKAYU II						**2.509.385.684,00**							**3.461.571.786,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.509.385.684,00**							**3.461.571.786,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**2.509.385.684,00**							**3.461.571.786,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**2.305.525.684,00**						**-**	**2.291.325.786,00**	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**99.61**	**100**	**100**	**2.305.525.684,00**	-	-	-	-	-	-	**2.291.325.786,00**	-
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Keuangan (UPTD. Pelabuhan Perikanan Tengkayu II Tarakan)*	-			100 %	262.720.000,00			-	-	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II	-	206.056.349,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	262.720.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II		206.056.349,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi kepegawaian (UPTD. Pelabuhan Perikanan Tengkayu II Tarakan)*	-			100 %	125.400.000,00			-	-	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II	-	33.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	95.400.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II		0,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II		33.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi umum (UPTD. Pelabuhan Perikanan Tengkayu II Tarakan)*	-			100 %	664.330.209,00			-	-	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II	-	883.718.230,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.275.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II		27.802.500,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	229.625.609,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II		303.528.170,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	78.250.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II		177.275.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	23.329.600,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II		25.662.560,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	42.850.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II		69.410.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85 Laporan	265.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II		280.040.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	120.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	120.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan jasa penunjang pemerintah daerah (UPTD. Pelabuhan Perikanan Tengkayu II Tarakan)*	-			100 %	990.493.475,00			-	-	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II	-	995.981.007,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	5.500.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II		6.050.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	244.335.252,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II		269.302.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	740.658.223,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II		720.629.007,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD. Pelabuhan Perikanan Tengkayu II Tarakan)*	-			100 %	142.582.000,00			-	-	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II	-	172.570.200,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				18 Unit	15.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II		16.500.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	8.700.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II		8.800.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	28.882.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II		31.770.200,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II		82.500.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	40.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II		33.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**203.860.000,00**						**-**	**1.170.246.000,00**	
		[Meningkatnya Layanan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan]	**Jumlah pendapatan retribusi atas pelayanan pelabuhan perikanan**	**2280691809**	**208417847** **2084892847**	**2170000000**	**2191700000**	**203.860.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.170.246.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	*Jumlah Lokasi Pembangunan pelabuhan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi* *Jumlah Pelabuhan Perikanan Yang Ditetapkan Serta Dikelola* *Jumlah Pelabuhan Perikanan Yang Ditetapkan Serta Dikelola (UPTD. Pelabuhan Perikanan Tengkayu II Tarakan)* *Jumlah Peningkatan Sarana dan Perasarana Perikanan Tangkap*	-			100 % 1 Pelabuhan Perikanan 1 Pelabuhan Perikanan 1 Pelabuhan	203.860.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pelaku Usaha Perikanan	-	1.170.246.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				2 Unit	140.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pelaku Usaha Perikanan		1.100.000.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan														
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				2 Layanan	63.860.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Pelaku Usaha Perikanan		70.246.000,00	UPTD PELABUHAN TENGKAYU II
		UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU						**300.484.263,00**							**865.337.352,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**300.484.263,00**							**865.337.352,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**300.484.263,00**							**865.337.352,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**239.486.263,00**						**-**	**585.337.352,00**	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**239.486.263,00**	-	-	-	-	-	-	**585.337.352,00**	-
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi keuangan*	-			100 %	91.480.000,00			-	-	UPTD PBLP Provinsi Kalimantan Utara	-	122.232.000,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	91.480.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PBLP Provinsi Kalimantan Utara		122.232.000,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi kepegawaian*	-			100 %	8.000.000,00			-	-	UPTD PBLP Provinsi Kalimantan Utara	-	39.600.000,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	8.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PBLP Provinsi Kalimantan Utara		39.600.000,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi umum*	-			100 %	50.094.335,00			-	-	UPTD PBLP Provinsi Kalimantan Utara	-	264.137.493,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PBLP Provinsi Kalimantan Utara		41.761.500,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	1.789.500,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PBLP Provinsi Kalimantan Utara		5.331.700,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	5.620.146,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PBLP Provinsi Kalimantan Utara		11.176.213,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	1.684.689,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PBLP Provinsi Kalimantan Utara		7.868.080,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	35.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PBLP Provinsi Kalimantan Utara		198.000.000,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	27.500.000,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.000.000,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.500.000,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan jasa penunjang pemerintah daerah*	-			100 %	87.941.928,00			-	-	UPTD PBLP Provinsi Kalimantan Utara	-	114.267.859,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1.250.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PBLP Provinsi Kalimantan Utara		4.400.000,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	10.969.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PBLP Provinsi Kalimantan Utara		21.049.600,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	75.722.928,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PBLP Provinsi Kalimantan Utara		88.818.259,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat Daerah*	-			100 %	1.970.000,00			-	-	UPTD PBLP Provinsi Kalimantan Utara	-	17.600.000,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	1.970.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PBLP Provinsi Kalimantan Utara		17.600.000,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**239.486.263,00**	-	-	-	-	-	-	**585.337.352,00**	-
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PBLP Provinsi Kalimantan Utara		0,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**60.998.000,00**						**-**	**280.000.000,00**	
		[Meningkatnya Akses dan Pemanfaatan Benih/Bibit Ikan Bermutu]	**Jumlah pendapatan retribusi atas pelayanan bibit/benih ikan**	**20000000**	**9002400**	**50000000**	**16000000**	**60.998.000,00**	-	-	-	-	-	-	**280.000.000,00**	-
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	*Jumlah Peningkatan Sarana dan Perasarana Perikanan*	-			2 Unit	34.998.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan	-	260.000.000,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				2 Unit	34.998.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan		220.000.000,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pembudidaya				0 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan		40.000.000,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 Unit	26.000.000,00			-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan	-	20.000.000,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	26.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan		20.000.000,00	UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU
		UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN						**299.816.887,00**							**8.359.234.322,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**299.816.887,00**							**8.359.234.322,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**299.816.887,00**							**8.359.234.322,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**266.816.887,00**						**-**	**8.079.562.622,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**266.816.887,00**	-	-	-	-	-	-	**8.079.562.622,00**	-
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	81.240.000,00			-	-	UPTD PMHP	-	90.136.200,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	81.240.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PMHP		90.136.200,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian*	-			100 Persen	30.000.000,00			-	-	UPTD PMHP	-	65.000.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PMHP		65.000.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum*	-			100 Persen	104.379.923,00			-	-	UPTD PMHP	-	216.208.599,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	6.500.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PMHP		55.994.400,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	5.301.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PMHP		5.192.097,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	14.779.187,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PMHP		13.514.273,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	3.799.736,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PMHP		4.062.829,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	74.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PMHP		137.445.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	UPTD PMHP	-	7.619.300.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PMHP		350.000.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PMHP		35.000.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PMHP		175.000.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PMHP		2.654.300.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PMHP		3.500.000.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PMHP		905.000.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Layanan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	47.746.964,00			-	-	UPTD PMHP	-	52.917.823,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.500.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PMHP		1.732.500,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	13.185.500,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PMHP		15.229.253,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	33.061.464,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PMHP		35.956.070,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	3.450.000,00			-	-	UPTD PMHP	-	36.000.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PMHP		7.500.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PMHP		3.000.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	3.450.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PMHP		25.500.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD PMHP		0,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
2.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**33.000.000,00**						**-**	**279.671.700,00**	
		[Meningkatnya Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan]	**Jumlah produk hasil perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan**	**10**	**10**	**10**	**10**	**33.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**279.671.700,00**	-
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	*Jumlah unit usaha Pengolahan dan pemasaran Skala menengah dan besar yang terjamin mutu dan keamanannya*	-			10 Kegiatan	33.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Unit Pengolahan Ikan, UMKM dan POKLAHSAR Pelaku Usaha Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	-	279.671.700,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				10 Kegiatan	33.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Unit Pengolahan Ikan, UMKM dan POKLAHSAR Pelaku Usaha Produk Hasil Kelautan dan Perikanan		114.671.700,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar														
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko				0 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Unit Pengolahan Ikan, UMKM dan POKLAHSAR Pelaku Usaha Produk Hasil Kelautan dan Perikanan		165.000.000,00	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA						**9.470.139.037,00**							**25.340.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**9.470.139.037,00**							**25.340.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**9.470.139.037,00**							**25.340.000.000,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**6.875.639.037,00**						**-**	**9.725.000.000,00**	
		[Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah]	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah** **Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**0** **100**	**0** **90**	**0** **100**	**0** **100**	**6.875.639.037,00**	-	-	-	-	-	-	**9.725.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun* *Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			100 persen 13 Dokumen	20.000.000,00			-	-	Dispar Kaltara, Pemerintah Kab/Kota	-	400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dispar Kaltara, Pemerintah Kab/Kota		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dispar Kaltara, Pemerintah Kab/Kota		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				3 Data	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Dispar Kaltara, Pemerintah Kab/Kota		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* *Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 persen 12 Bulan	5.771.224.957,00			-	-	ASN Dispar Kaltara	-	7.270.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/ Bulan	5.535.911.190,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dispar Kaltara		6.820.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	235.313.767,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dispar Kaltara		450.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* *Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 persen 100 Persen	55.000.000,00			-	-	ASN Dispar Kaltara	-	600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dispar Kaltara		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dispar Kaltara		600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah* *Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan 100 persen	288.000.000,00			-	-	ASN dan Non ASN Dispar Kaltara, Pemerintah Kab/Kota	-	1.455.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	30.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan Non ASN Dispar Kaltara, Pemerintah Kab/Kota		85.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan Non ASN Dispar Kaltara, Pemerintah Kab/Kota		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	75.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan Non ASN Dispar Kaltara, Pemerintah Kab/Kota		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	19.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan Non ASN Dispar Kaltara, Pemerintah Kab/Kota		65.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan Non ASN Dispar Kaltara, Pemerintah Kab/Kota		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan Non ASN Dispar Kaltara, Pemerintah Kab/Kota		45.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	154.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan Non ASN Dispar Kaltara, Pemerintah Kab/Kota		900.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			0				0 0	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			100 Persen 12 Bulan	589.407.080,00			-	-	ASN dan Non ASN Dispar Kaltara	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan Non ASN Dispar Kaltara		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	584.407.080,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan Non ASN Dispar Kaltara		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya*	-			100 Persen 32 Unit	152.007.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	140.037.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11.970.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**1.234.000.000,00**						**-**	**12.415.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Daya Tarik Destinasi Pariwisata]	**Persentase Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan**	**13.64**	**81**	**2**	**18.18**	**1.234.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**12.415.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	*Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikelola* *Jumlah DTW yang dikelola*	-			6 Daya Tarik Wisata 6 DTW	350.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Masyarakat , Pokdarwis	-	3.640.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi														
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi				2 Lokasi	350.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Masyarakat , Pokdarwis		3.380.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat , Pokdarwis		130.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi														
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat , Pokdarwis		130.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	*Jumlah Kawasan Strategis yang Dikelola* *Jumlah kawasan strategis yang dikelola*	-			2 Kawasan 2 kawasan	250.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat, Pokdarwis	-	8.425.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi														
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat, Pokdarwis		220.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat, Pokdarwis		8.055.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0008	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat, Pokdarwis		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan				100 Orang	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat, Pokdarwis		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	*Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola* *Jumlah Destinasi pariwisata yang dikelola*	-			1 Destinasi 1 Destinasi	287.000.000,00			-	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Dispar Kab/Kota	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan				50 Orang	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Dispar Kab/Kota		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				1 Laporan	137.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dispar Kab/Kota		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah usaha pariwisata yang yang memiliki tanda daftar usaha* *Jumlah Usaha Pariwisata yang Memilki Tanda Daftar Usaha*	-			150 usaha/jasa 150 Usaha	347.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Masyarakat, Pelaku Usaha, Pemerintah Kab/Kota	-	350.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)				50 Unit Usaha	37.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Masyarakat, Pelaku Usaha, Pemerintah Kab/Kota		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi				1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Masyarakat, Pelaku Usaha, Pemerintah Kab/Kota		350.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0011	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Provinsi				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat, Pelaku Usaha, Pemerintah Kab/Kota		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0012	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)														
			Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi				50 Usaha	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Masyarakat, Pelaku Usaha, Pemerintah Kab/Kota		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0015	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko														
			Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan				250 Pelaku Usaha	150.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Masyarakat, Pelaku Usaha, Pemerintah Kab/Kota		0,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**507.000.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata]	**Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata**	**20**	**0**	**20**	**20**	**507.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	*cakupan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri* *Cakupan Pemasaran Dalam dan Luar Negeri*	-			100 persen 100 Persen	507.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Pelaku Event, Masyarakat, SDM Pariwisata & Ekraf	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Pelaku Event, Masyarakat, SDM Pariwisata & Ekraf		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	57.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Pelaku Event, Masyarakat, SDM Pariwisata & Ekraf		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				31 Kegiatan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Pelaku Event, Masyarakat, SDM Pariwisata & Ekraf		0,00	DINAS PARIWISATA
4.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**						**313.500.000,00**						**-**	**1.100.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Ekosistem Ekonomi Kreatif]	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual**	**30** **4**	**0**	**10** **4**	**20** **4**	**313.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.100.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	*Jumlah sarana dan prasarana kota kreatif yang tersedia* *Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Tersedia*	-			10 Unit 10 Unit	50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat, SDM Pariwisata dan Ekraf	-	750.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat, SDM Pariwisata dan Ekraf		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Masyarakat, SDM Pariwisata dan Ekraf		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik														
			Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat, SDM Pariwisata dan Ekraf		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dibina* *Jumlah pelaku komunitas ekraf yang dibina*	-			50 Komunitas 50 komunitas	263.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat dan Pemerintah Kab/Kota	-	350.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	33.500.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat dan Pemerintah Kab/Kota		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Masyarakat dan Pemerintah Kab/Kota		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat dan Pemerintah Kab/Kota		0,00	DINAS PARIWISATA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**313.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.100.000.000,00**	-
	3.26.04.1.02.0020	Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual														
			Jumlah produk pariwisata dan ekonomi kreatifyang mendapat fasilitasi pelindungan Kekayaan Intelektual				50 Produk	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Masyarakat dan Pemerintah Kab/Kota		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
5.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**540.000.000,00**						**-**	**2.100.000.000,00**	
		[Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif]	**Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi**	**10** **20**	**0**	**5**	**10** **5**	**540.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.100.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	*Cakupan kapasitas SDM pariwisata dan ekraf* *Cakupan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf*	-			90 persen 90 Persen	375.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Pelaku Usaha, Pemerintah Kabupaten/Kota, SDM Pariwisata dan Ekraf	-	1.350.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				50 Orang	90.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Pelaku Usaha, Pemerintah Kabupaten/Kota, SDM Pariwisata dan Ekraf		600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				150 Orang	90.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Pelaku Usaha, Pemerintah Kabupaten/Kota, SDM Pariwisata dan Ekraf		0,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI														
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				100 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Pelaku Usaha, Pemerintah Kabupaten/Kota, SDM Pariwisata dan Ekraf		750.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				50 Orang	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Pelaku Usaha, Pemerintah Kabupaten/Kota, SDM Pariwisata dan Ekraf		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	Pelaku Usaha, Pemerintah Kabupaten/Kota, SDM Pariwisata dan Ekraf		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Cakupan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif* *Cakupan kapasitas pelaku ekraf*	-			350 Orang 350 orang	165.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	SDM Pariwisata dan Ekraf, Pelaku Usaha, Usaha Pariwisata	-	750.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	SDM Pariwisata dan Ekraf, Pelaku Usaha, Usaha Pariwisata		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif				100 Orang	165.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	SDM Pariwisata dan Ekraf, Pelaku Usaha, Usaha Pariwisata		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						**34.823.243.022,00**							**40.390.302.110,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.254.000.000,00**							**1.292.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**1.254.000.000,00**							**1.292.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**						**214.000.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
		[Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan]	**Persentase cadangan pangan**	**100**	**243.07**	**100**	**100**	**214.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**200.000.000,00**	-
	2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah kelompok tani Penerima manfaat*	-			1 Kelompok Tani	214.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Kelompok Tani	-	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya														
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia				1 Unit	214.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Kelompok Tani		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**365.000.000,00**						**-**	**471.000.000,00**	
		[Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat]	**Peningkatan skor pph**	**87**	**82.4**	**83**	**83.4**	**365.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**471.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Jumlah komoditas pangan yang distabilkan*	-			8 komoditi	165.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Masyarakat	-	311.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	45.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Masyarakat		80.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi														
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi														
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Masyarakat		80.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**365.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**471.000.000,00**	-
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0015	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi														
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Masyarakat		11.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	*presentase cadangan pangan pemerintah*	-			100 %	75.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani	-	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				21 Ton	30.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				2 Ton	40.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	*Jumlah promosi konsumsi pangan*	-			3 Kali	125.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Masyarakat	-	60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				1 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**447.000.000,00**						**-**	**416.000.000,00**	
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	*Jumlah Dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi*	-			1 Dokumen	5.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat	-	5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		[Meningkatnya Penanganan Kerawanan pangan]	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**	**5**	**0**	**15**	**13**	**447.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**416.000.000,00**	-
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	*Jumlah desa rentan rawan pangan yang di intervensi*	-			5 Desa	442.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat	-	411.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			0				1 0	200.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**447.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**416.000.000,00**	-
	2.09.04.1.02.0006	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan														
			Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala provinsi yang Ditetapkan				1 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		11.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**228.000.000,00**						**-**	**205.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pengawasan Keamanan pangan]	**Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan kemanan pangan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**228.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**205.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	-			5 Kali	228.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat	-	205.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan														
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Sertifikat	23.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**228.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**205.000.000,00**	-
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**33.569.243.022,00**							**39.098.302.110,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**33.569.243.022,00**							**39.098.302.110,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**14.479.243.022,00**						**-**	**13.533.802.110,00**	
		[Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah]	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**14.479.243.022,00**	-	-	-	-	-	-	**13.533.802.110,00**	-
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*cakupan dokumen perencanaan yang disusun*	-			100 Persen	180.530.021,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi dan Dinas Kab/Kota Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	175.530.021,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi dan Dinas Kab/Kota Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.479.243.022,00**	-	-	-	-	-	-	**13.533.802.110,00**	-
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi dan Dinas Kab/Kota Provinsi Kalimantan Utara		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		[Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah]	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**14.479.243.022,00**	-	-	-	-	-	-	**13.533.802.110,00**	-
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah (UPTD)*	-			12 Bulan	14.124.713.001,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	ASN dan Non ASN	-	13.533.802.110,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				92/12 Orang/ Bulan	14.000.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	ASN dan Non ASN		13.533.802.110,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	124.713.001,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	ASN dan Non ASN		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah bulan layanan administrasi kepagawaian daerah perangkat daerah (UPTD)*	-			12 Bulan	10.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	ASN	-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				120 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	ASN		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bulan layanan administrasi umum daerah perangkat daerah*	-			12 Bulan	125.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	ASN dan Non ASN	-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	ASN dan Non ASN		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	ASN dan Non ASN		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	ASN dan Non ASN		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	ASN dan Non ASN		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	ASN dan Non ASN		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	ASN dan Non ASN		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang disediakan*	-			2 Unit	15.000.000,00			-	-	ASN dan Non ASN	-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan Non ASN		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan Non ASN		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan Non ASN		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah bulan layanan jasa penunjang pemerintahan daerah*	-			12 Bulan	10.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	ASN dan Non ASN	-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	ASN dan Non ASN		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	ASN dan Non ASN		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.479.243.022,00**	-	-	-	-	-	-	**13.533.802.110,00**	-
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah kendaraan dinas yang disediakan jasa pemeliharaannya*	-			25 Unit	14.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	ASN dan Non ASN	-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	ASN dan Non ASN		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	ASN dan Non ASN		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	ASN dan Non ASN		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	ASN dan Non ASN		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**11.870.000.000,00**						**-**	**14.110.000.000,00**	
		[Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian]	**Jumlah Produksi Tanaman Pangan**	**83560**	**74199**	**75682**	**77196**	**11.870.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**14.110.000.000,00**	-
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	*Jumlah Sarana Pertanian yang Digunakan*	-			49 undefined	650.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani	-	1.100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		900.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		-	-	-	-	-	-	**11.870.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**14.110.000.000,00**	-
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	*Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman*	-			5 Kab/Kota	8.560.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Tani	-	10.510.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														
			Jumlah Sertifikat Benih				1 Sertifikat	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Tani		1.100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				5700 Batang	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		2.700.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.02.0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji														
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji				7857 Gram	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang														
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				3857 Batang	2.500.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Ruhui Rahayu Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu Kab. Malinau, Malinau Kota, Tanjung Keranjang Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kota Tarakan, Tarakan Timur, Pantai Amal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		2.700.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				5,6 Ton	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		3.400.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0014	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak				0,4 Ton	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Jumlah kelompok tani yang dikembangkan*	-			15 kelompok	200.000.000,00			-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani	-	300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		[Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian]	**Jumlah Produksi Tanaman Pangan**	**83560**	**74199**	**75682**	**77196**	**11.870.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**14.110.000.000,00**	-
	3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner														
			Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas				1 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.870.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**14.110.000.000,00**	-
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	*Jumlah Bibit , Pakan Ternak dan hijaun pakan ternak yang didistribusikan*	-			142, 3 Ekor, Ton	2.460.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani	-	2.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.07.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				1 Ton	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		[Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian]	**Jumlah Produksi Tanaman Pangan**	**83560**	**74199**	**75682**	**77196**	**11.870.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**14.110.000.000,00**	-
	3.27.02.1.07.0003	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain														
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain				300 Dosis	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain				100 Ekor	2.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		1.700.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**4.000.000.000,00**						**-**	**8.000.000.000,00**	
		[Meningkatnya penyediaan dan pegembangan prasrana pertanian]	**Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.000.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**8.000.000.000,00**	-
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan*	-			100 Persen	4.000.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani	-	8.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**8.000.000.000,00**	-
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		4.800.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		[Meningkatnya penyediaan dan pegembangan prasrana pertanian]	**Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.000.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**8.000.000.000,00**	-
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				1 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		700.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.000.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**8.000.000.000,00**	-
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		1.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				20 Ha	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		400.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0014	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura														
			Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0023	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		[Meningkatnya penyediaan dan pegembangan prasrana pertanian]	**Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.000.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**8.000.000.000,00**	-
	3.27.03.1.01.0024	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan														
			Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**730.000.000,00**						**-**	**504.500.000,00**	
		[MENINGKATNYA PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER]	**Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan**	**4.5**	**1.5**	**2**	**2.5**	**730.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**504.500.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*jumlah hewan dan ternak yang terjamin kesehatannya*	-			3500 Ekor	250.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Tani	-	180.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Tani		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**730.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**504.500.000,00**	-
	3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				5 Wilayah	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Tani		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[MENINGKATNYA PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER]	**Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan**	**4.5**	**1.5**	**2**	**2.5**	**730.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**504.500.000,00**	-
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kelompok Tani		70.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	*Jumlah wilayah yang diawasi*	-			5 Wilayah	200.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Tani	-	71.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM														
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Tani		71.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**730.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**504.500.000,00**	-
	3.27.04.1.02.0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Tani		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		[MENINGKATNYA PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER]	**Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan**	**4.5**	**1.5**	**2**	**2.5**	**730.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**504.500.000,00**	-
	3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Tani		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	*Jumlah Unit Usaha Distrbusi Produk Asal Hewan dan Unit Usaha Sarang Walet yang Mengetahui Sertifikasi NKV*	-			1 Unit Usaha	30.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku Usaha Produk Hewan	-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan														
			Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku Usaha Produk Hewan		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**730.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**504.500.000,00**	-
	3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Jumlah Pelaku Usaha RPH dan RPU*	-			100 Orang	150.000.000,00			-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Pelaku Usaha Produk Hewan	-	88.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.04.0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														
			Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Pelaku Usaha Produk Hewan		55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		[MENINGKATNYA PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER]	**Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan**	**4.5**	**1.5**	**2**	**2.5**	**730.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**504.500.000,00**	-
	3.27.04.1.04.0004	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan														
			Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi				1 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Pelaku Usaha Produk Hewan		33.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	*Cakupan Unit Usaha yang menerapkan kesejahteraan hewan*	-			100 Persen	100.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku Usaha Produk Hewan	-	165.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)														
			Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)				10 Sertifikat	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku Usaha Produk Hewan		165.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**457.000.000,00**						**-**	**360.000.000,00**	
		[MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN]	**Persentase Penanganan Bencana Pertanian**	**78**	**50**	**55**	**60**	**457.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**360.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	*Jumlah wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi*	-			5 Wilayah	457.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Tani	-	360.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				50 Ha	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Tani		120.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				50 Ha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		120.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**457.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**360.000.000,00**	-
	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				1 Laporan	57.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		120.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
6.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**						**228.000.000,00**						**-**	**660.000.000,00**	
		[MENINGKATNYA PERIZINAN USAHA PERTANIAN]	**Persentase jumlah usulan usaha pertanian**	**100**	**80**	**80**	**85**	**228.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**660.000.000,00**	-
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*umlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian*	-			15 pertek	228.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku Usaha Produk Hewan	-	660.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	128.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku Usaha Produk Hewan		330.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		-	-	-	-	-	-	**228.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**660.000.000,00**	-
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Pelaku Usaha Produk Hewan		330.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
7.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**1.805.000.000,00**						**-**	**1.930.000.000,00**	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah tenaga penyuluh pertanian ASN dan swadaya yang meningkat kompetensinya*	-			188 Orang	100.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Penyuluh Pertanian	-	1.020.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian														
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Penyuluh Pertanian		220.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[MENINGKATNYA PENYULUHAN PERTANIAN]	**Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.805.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.930.000.000,00**	-
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				1 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Penyuluh Pertanian		800.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.805.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.930.000.000,00**	-
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian*	-			1 Programa	700.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Penyuluh Pertanian dan Petani	-	580.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Penyuluh Pertanian dan Petani		250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[MENINGKATNYA PENYULUHAN PERTANIAN]	**Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.805.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.930.000.000,00**	-
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				2 Kelompok	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Penyuluh Pertanian dan Petani		330.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.805.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.930.000.000,00**	-
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	*Jumlah kelembagaan petani yang mendapatkan penguatan/pendampingan*	-			1 Lembaga	1.005.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani	-	330.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani														
			Jumlah korporasi petani yang didampingi				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kelompok Tani		110.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani														
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				1 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Tani		220.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET						**299.651.294,00**							**756.200.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**299.651.294,00**							**756.200.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**299.651.294,00**							**756.200.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**194.651.294,00**						**-**	**538.200.000,00**	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah (UPTD)*	-			12 Bulan	141.651.293,99			-	-	ASN dan Non ASN	-	62.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4/12 Orang/ Bulan	24.010.349,99	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan Non ASN		31.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET
		[Meningkatnya pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah]	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**194.651.294,00**	-	-	-	-	-	-	**538.200.000,00**	-
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	117.640.944,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan Non ASN		31.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah bulan layanan administrasi kepagawaian daerah perangkat daerah (UPTD)*	-			12 Bulan	5.000.000,00			-	-	ASN dan Non ASN	-	15.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan Non ASN		15.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bulan layanan administrasi umum daerah perangkat daerah (UPTD)*	-			12 Bulan	21.000.000,01			-	-	ASN	-	101.600.000,00	UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	6.000.000,01	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		6.600.000,00	UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		66.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		17.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN		12.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang disediakan (UPTD)*	-			2 Unit	5.000.000,00			-	-	ASN dan Non ASN	-	50.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan Non ASN		50.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah bulan layanan jasa penunjang pemerintahan daerah (UPTD)*	-			12 Bulan	7.000.000,00			-	-	ASN dan Non ASN	-	146.600.000,00	UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan Non ASN		6.600.000,00	UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan Non ASN		140.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah kendaraan dinas yang disediakan jasa pemeliharaannya*	-			25 Unit	15.000.000,00			-	-	ASN dan Non ASN	-	163.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan Non ASN		71.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan Non ASN		40.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET
	3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan Non ASN		52.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**5.000.000,00**						**-**	**143.000.000,00**	
		[MENINGKATNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN]	**Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**143.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Persentase Prasarana Pertanian yang Dimanfaatkan*	-			100 Persen	5.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Tani	-	143.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Tani		143.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**100.000.000,00**						**-**	**75.000.000,00**	
		[MENINGKATNYA PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER]	**Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan**	**4.5**	**1.5**	**2**	**2.5**	**100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**75.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	*Jumlah sampel penyakit yang diawasi*	-			640 Sampel	100.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku Usaha Produk Hewan	-	75.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner														
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pelaku Usaha Produk Hewan		75.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET
		DINAS KEHUTANAN						**80.160.946.914,00**							**95.349.416.625,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**79.710.946.914,00**							**94.849.416.625,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**79.710.946.914,00**							**94.849.416.625,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**47.724.700.000,00**						**-**	**51.269.416.625,00**	
		[Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi**	**58696226233**	**46180435258**	**46359986095**	**49827700000**	**47.724.700.000,00**	-	-	-	-	-	-	**51.269.416.625,00**	-
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			5 Dokumen	1.485.875.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	1.675.668.750,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	665.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Perangkat Daerah		698.643.750,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		110.250.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		110.250.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	720.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Perangkat Daerah		756.525.000,00	DINAS KEHUTANAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.724.700.000,00**	-	-	-	-	-	-	**51.269.416.625,00**	-
	3.28.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS KEHUTANAN
		[Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi**	**58696226233**	**46180435258**	**46359986095**	**49827700000**	**47.724.700.000,00**	-	-	-	-	-	-	**51.269.416.625,00**	-
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	39.790.000.000,00			-	-	ASN	-	41.779.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				250 Orang/ Bulan	37.900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		39.795.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1.890.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		1.984.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah bulan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	649.000.000,00			-	-	ASN	-	1.102.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				66 Paket	49.000.000,00	-	-	-	-	ASN		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				75 Orang	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	ASN		1.102.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	1.589.175.000,00			-	-	ASN/Perangkat Daerah	-	1.668.633.750,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.075.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN/Perangkat Daerah		12.678.750,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	231.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN/Perangkat Daerah		242.550.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	157.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN/Perangkat Daerah		165.375.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	57.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN/Perangkat Daerah		60.637.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	28.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN/Perangkat Daerah		29.767.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.102.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN/Perangkat Daerah		1.157.625.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Bangunan Milik Daerah yang diadakan*	-			1 Unit	950.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	1.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Perangkat Daerah		500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			12 Bulan	760.650.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	1.543.114.125,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		17.364.375,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	92.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		101.871.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	52.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		57.881.250,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		1.365.997.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya*	-			68 Unit	2.500.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	2.500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				48 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Perangkat Daerah		500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Perangkat Daerah		2.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**19.986.246.914,00**						**-**	**29.030.000.000,00**	
		[Meningkatnya produktivitas hasil hutan]	**Persentase peningkatan produtivitas hasil hutan**	**3**	**8.05**	**3**	**3**	**19.986.246.914,00**	-	-	-	-	-	-	**29.030.000.000,00**	-
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	2.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				10 0	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah unit KPH yang telah memiliki RPHJP yang disahkan*	-			7 Unit	800.000.000,00			-	-	Unit KPH	-	1.500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				3 Dokumen	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Unit KPH		1.500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	*Persentase Unit Manajemen yang dibina*	-			30 %	800.000.000,00			-	-	Unit Manajemen	-	1.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Unit Manajemen		500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				11 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Unit Manajemen		500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Persentase penambahan Luas tutupan lahan*	-			4 %	4.686.246.914,00			-	-	Masyarakat	-	5.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				150 Ha	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	886.246.914,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				5 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat		300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi				100 Ha	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2														
			Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara				60 Ha	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat		300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug														
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				15 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat		400.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan														
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				5 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan*	-			10 %	7.700.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	11.380.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				2 Dokumen	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat		5.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				8 Laporan	3.382.417.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat		5.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.986.246.914,00**	-	-	-	-	-	-	**29.030.000.000,00**	-
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan				3 Operasi	317.582.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat		380.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				700 Ha	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal														
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)				3 Operasi	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
		[Meningkatnya produktivitas hasil hutan]	**Persentase peningkatan produtivitas hasil hutan**	**3**	**8.05**	**3**	**3**	**19.986.246.914,00**	-	-	-	-	-	-	**29.030.000.000,00**	-
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	-			-	600.000.000,00			-	-	-	-	1.250.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0005	Fasilitasi hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah Unit managemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH				2 Unit Managemen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.986.246.914,00**	-	-	-	-	-	-	**29.030.000.000,00**	-
	3.28.03.1.06.0006	Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar														
			Jumlah Unit managemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah beroperasi				5 Unit Managemen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
		[Meningkatnya produktivitas hasil hutan]	**Persentase peningkatan produtivitas hasil hutan**	**3**	**8.05**	**3**	**3**	**19.986.246.914,00**	-	-	-	-	-	-	**29.030.000.000,00**	-
	3.28.03.1.06.0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan				2 Unit Managemen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		550.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	*Persentase Jumlah izin Usaha yang terbina*	-			80 %	900.000.000,00			-	-	Unit Manajemen	-	1.300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				5 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Unit Manajemen		500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif				5 Unit Managemen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Unit Manajemen		300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah				5 Unit Managemen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Unit Manajemen		500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	*Jumlah ketersediaan bibit/benih tanaman kehutanan bersertifikat dan sesuai standar*	-			10000 Batang	4.500.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	5.600.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih														
			Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan				5 Sertifikat	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat		300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit														
			Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar				5 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat		300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0006	Pembangunan Sumber Benih														
			Luas Sumber Benih yang Dibangun				50 Ha	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat		300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan				60000 Batang	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat		4.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0008	Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan														
			Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan dalam setahun				12 Kali	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat		300.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan														
			Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi				10 Unit Usaha	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat		400.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
3.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**						**1.600.000.000,00**						**-**	**1.900.000.000,00**	
		[Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya]	**Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Provinsi yang dikelola secara efektif**	**20**	**10**	**10**	**20**	**1.600.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.900.000.000,00**	-
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	*Jumlah Kawasan ekosistem penting yang dikelola / yang dijaga*	-			1 Kawasan	1.600.000.000,00			-	-	Kawasan Ekosistem penting/Masyarakat	-	1.900.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi														
			Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan				50 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Kawasan Ekosistem penting/Masyarakat		550.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi														
			Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola				9 Ha	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Kawasan Ekosistem penting/Masyarakat		600.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.600.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.900.000.000,00**	-
	3.28.04.1.03.0007	Pengelolaan koridor hidupan liar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas koridor hidupan liar yang dikelola				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Kawasan Ekosistem penting/Masyarakat		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0008	Penetapan koridor hidupan liar														
			dokumen Peta koridor hidupan liar satwa yang disepakati mulitipihak				1 Dokumen	950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Kawasan Ekosistem penting/Masyarakat		750.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
4.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**8.400.000.000,00**						**-**	**9.550.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan]	**Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)**	**3**	**0**	**3**	**3**	**8.400.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**9.550.000.000,00**	-
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya*	-			5 KUPS	8.400.000.000,00			-	-	KUPS/Masyarakat	-	9.550.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				15 Kelompok	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	KUPS/Masyarakat		2.750.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				71 Orang	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	KUPS/Masyarakat		800.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya				30 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	KUPS/Masyarakat		500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				80 Orang	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	KUPS/Masyarakat		3.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				25000 Hektar	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	KUPS/Masyarakat		1.500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				5 Unit	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	KUPS/Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
5.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**						**2.000.000.000,00**						**-**	**3.100.000.000,00**	
		[Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)]	**Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS**	**0.21**	**0**	**0.1**	**0.12**	**2.000.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**3.100.000.000,00**	-
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah DAS yang dikelola*	-			1 DAS	2.000.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	3.100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				75 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS														
			Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS				3 Lembaga	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah														
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat		800.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat		800.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	X	**NON URUSAN**						**450.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**450.000.000,00**							**500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**450.000.000,00**						**-**	**500.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**450.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**500.000.000,00**	-
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya*	-			68 Unit	450.000.000,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
		UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN						**10.076.000.000,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**10.076.000.000,00**							**0,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**10.076.000.000,00**							**0,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.627.260.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi]	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.627.260.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	202.560.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	UPTD KPH Bulungan	-	0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	202.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	UPTD KPH Bulungan		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 Persen	230.500.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	UPTD KPH Bulungan	-	0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	55.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	UPTD KPH Bulungan		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	UPTD KPH Bulungan		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah*	-			100 Persen 100 Persen	435.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	-	0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	-		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan*	-			100 Persen	409.200.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	-	0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	194.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara*	-			100 Persen	350.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	-	-		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	-		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**6.998.740.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan]	**Persentase peningkatan produtivitas hasil hutan**	**3**	**8.05**	**3**	**3**	**6.998.740.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Unit KPH yang diadakan sarana dan prasarananya* *Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan*	-			5 Unit 10 Persen	2.240.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	UPTD KPH Bulungan dan Masyarakat	-	0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	UPTD KPH Bulungan dan Masyarakat		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				2 Unit	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	UPTD KPH Bulungan dan Masyarakat		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor														
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun				1 Unit	1.640.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	UPTD KPH Bulungan dan Masyarakat		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah unit KPH yang telah memiliki RPHJP yang disahkan* *Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan*	-			2 Unit 10 Persen	750.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	UPTD KPH Bulungan	-	0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	UPTD KPH Bulungan		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P														
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	UPTD KPH Bulungan		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	*Persentase Unit Manajemen yang di bina Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan*	-			10 % 10 Persen	400.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	UPTD KPH Bulungan dan Masyarakat	-	0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	UPTD KPH Bulungan dan Masyarakat		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	UPTD KPH Bulungan dan Masyarakat		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Persentase penambahan Luas tutupan lahan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan*	-			2 % 10 Persen	2.438.740.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	UPTD KPH Bulungan dan Masyarakat	-	0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				20 Ha	2.050.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	UPTD KPH Bulungan dan Masyarakat		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				15 Ha	388.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	UPTD KPH Bulungan dan Masyarakat		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan*	-			20 %	1.170.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	UPTD KPH Bulungan dan Masyarakat	-	0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5 Dokumen	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	UPTD KPH Bulungan dan Masyarakat		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				10 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	UPTD KPH Bulungan dan Masyarakat		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				300 Ha	320.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	UPTD KPH Bulungan dan Masyarakat		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**1.450.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Jumlah ijin PS yang diterbitkan]	**Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)**	**4**	**13**	**4**	**4**	**1.450.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya* *Jumlah ijin PS yang diterbitkan*	-			4 Izin 5 Izin	1.450.000.000,00			-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	UPTD KPH Bulungan dan Masyarakat	-	0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	UPTD KPH Bulungan dan Masyarakat		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				13 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	UPTD KPH Bulungan dan Masyarakat		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				20 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	UPTD KPH Bulungan dan Masyarakat		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				500 Hektar	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	UPTD KPH Bulungan dan Masyarakat		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				2 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	UPTD KPH Bulungan dan Masyarakat		0,00	UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN
		UPT KPH KOTA TARAKAN						**10.999.999.731,00**							**37.534.451.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**10.999.999.731,00**							**37.534.451.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**10.999.999.731,00**							**37.534.451.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.067.600.000,00**						**-**	**26.313.000.000,00**	
		[Terlaksananya Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi]	**Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.067.600.000,00**	-	-	-	-	-	-	**26.313.000.000,00**	-
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	204.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN UPTD KPH Tarakan	-	250.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	204.600.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN UPTD KPH Tarakan		250.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	110.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN UPTD KPH Tarakan	-	150.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	30.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN UPTD KPH Tarakan		0,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	80.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN UPTD KPH Tarakan		150.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	258.000.000,00			-	-	KPHP Unit III dan KPHP Unit IV	-	418.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KPHP Unit III dan KPHP Unit IV		10.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KPHP Unit III dan KPHP Unit IV		60.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	8.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KPHP Unit III dan KPHP Unit IV		8.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KPHP Unit III dan KPHP Unit IV		30.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KPHP Unit III dan KPHP Unit IV		60.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KPHP Unit III dan KPHP Unit IV		250.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			0 Unit	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	UPTD KPH Kota Tarakan	-	25.000.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	UPTD KPH Kota Tarakan		25.000.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			12 Bulan	400.000.000,00			-	-	KPHP Unit III dan KPHP Unit IV	-	400.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	35.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KPHP Unit III dan KPHP Unit IV		35.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	135.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KPHP Unit III dan KPHP Unit IV		135.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KPHP Unit III dan KPHP Unit IV		30.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	200.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KPHP Unit III dan KPHP Unit IV		200.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya*	-			77 Unit	95.000.000,00			-	-	KPHP Unit III dan KPHP Unit IV	-	95.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				75 Unit	95.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KPHP Unit III dan KPHP Unit IV		95.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KPHP Unit III dan KPHP Unit IV		0,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**8.482.399.731,00**						**-**	**9.771.451.000,00**	
		[Meningkatnya Produktivitas Hasil Hutan]	**Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB**	**10**	**10**	**10**	**10**	**8.482.399.731,00**	-	-	-	-	-	-	**9.771.451.000,00**	-
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Unit KPH yang telah memiliki RPHJP yang disahkan*	-			2 Unit	4.360.948.731,00			-	-	KPHP Unit III dan KPHP Unit IV	-	5.650.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Kerikil	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	KPHP Unit III dan KPHP Unit IV		100.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	KPHP Unit III dan KPHP Unit IV		50.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				30 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	KPHP Unit III dan KPHP Unit IV		1.500.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH														
			Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH				5 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	KPHP Unit III dan KPHP Unit IV		500.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor														
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun				30 Unit	2.710.948.731,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	KPHP Unit III dan KPHP Unit IV		3.500.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Unit KPH yang telah memiliki RPHJPd yang disahkan*	-			2 Dokumen	900.000.000,00			-	-	KPHP Unit III dan KPHP Unit IV	-	900.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	KPHP Unit III dan KPHP Unit IV		500.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P														
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu Kab. Bulungan, Sekatak, Sekatak Buji Kab. Bulungan, Sekatak, Liagu Kab. Bulungan, Bunyu, Bunyu Timur Kab. Bulungan, Bunyu, Bunyu Barat Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip Kota Tarakan, Tarakan Timur, Pantai Amal Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Kerikil	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	KPHP Unit III dan KPHP Unit IV		200.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.02.0003	Penyusunan Perubahan Peta Tata Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peta Perubahan Tata Hutan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	KPHP Unit III dan KPHP Unit IV		100.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.02.0004	Penyusunan Peta Tata Hutan Rencana Pengelolaan														
			Jumlah Peta				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	KPHP Unit III dan KPHP Unit IV		100.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	*Jumlah unit manajemen yang dibina*	-			20 Persen	300.000.000,00			-	-	Masyarakat di dalam dan luar kawasan Hutan	-	300.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Long Beluah Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu Kab. Bulungan, Peso Hilir, Long Bang Kab. Bulungan, Peso Hilir, Long Lembu	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat di dalam dan luar kawasan Hutan		50.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip Kota Tarakan, Tarakan Timur, Pantai Amal Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Laut Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Kerikil	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat di dalam dan luar kawasan Hutan		50.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat di dalam dan luar kawasan Hutan		100.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip Kota Tarakan, Tarakan Timur, Pantai Amal Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Kerikil Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Laut	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat di dalam dan luar kawasan Hutan		100.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Persentase penambahan Luas tutupan lahan*	-			2 Persen	375.000.000,00			-	-	Masyarakat di dalam dan luar kawasan Hutan	-	375.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				1 Ha	150.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Laut Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Kerikil	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat di dalam dan luar kawasan Hutan		150.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan				1 Ha	100.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip Kota Tarakan, Tarakan Timur, Pantai Amal Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Kerikil Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Laut	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat di dalam dan luar kawasan Hutan		100.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Kerikil	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat di dalam dan luar kawasan Hutan		50.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi				1 Ha	75.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu Kab. Bulungan, Sekatak, Liagu	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat di dalam dan luar kawasan Hutan		75.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Luas lahan yang dilakukan perlindungan dan pengamanan hutan*	-			100 Hektar	1.946.451.000,00			-	-	Masyarakat di dalam dan luar kawasan Hutan	-	1.946.451.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				15 Dokumen	322.550.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat di dalam dan luar kawasan Hutan		322.550.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				60 Laporan	675.971.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu Kab. Bulungan, Sekatak, Liagu Kab. Bulungan, Bunyu, Bunyu Timur Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip Kota Tarakan, Tarakan Timur, Pantai Amal Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Kerikil Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Laut	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat di dalam dan luar kawasan Hutan		675.971.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				3000 Ha	947.930.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu Kab. Bulungan, Sekatak, Liagu Kab. Bulungan, Sekatak, Sekatak Buji Kab. Bulungan, Bunyu, Bunyu Timur Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip Kota Tarakan, Tarakan Timur, Pantai Amal Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Kerikil Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Laut	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat di dalam dan luar kawasan Hutan		947.930.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	*Sumber benih yang terbangun*	-			1 Hektar	600.000.000,00			-	-	-	-	600.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.09.0006	Pembangunan Sumber Benih														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Sumber Benih yang Dibangun				1 Ha	50.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Kerikil	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		50.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan														
			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan				5000 Batang	500.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Kerikil	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		500.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.03.1.09.0009	Pengelolaan Sumber Benih														
			Luas sumber benih yang dikelola				1 Ha	50.000.000,00	Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Kerikil	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		50.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**1.450.000.000,00**						**-**	**1.450.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kehutanan]	**Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)**	**1**	**11**	**11**	**1**	**1.450.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.450.000.000,00**	-
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah KUPS yang Meningkat Kelasnya*	-			2 KUPS	1.450.000.000,00			-	-	Masyarakat di dalam dan luar kawasan Hutan	-	1.450.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				2 Kelompok	300.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu Kab. Bulungan, Sekatak, Liagu Kab. Bulungan, Sekatak, Sekatak Buji Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat di dalam dan luar kawasan Hutan		300.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				15 Orang	200.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu Kab. Bulungan, Sekatak, Liagu Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat di dalam dan luar kawasan Hutan		200.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.05.1.01.0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya				20 Orang	200.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat di dalam dan luar kawasan Hutan		200.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				20 Orang	200.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu Kab. Bulungan, Peso Hilir, Long Lembu Kab. Bulungan, Sekatak, Liagu Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat di dalam dan luar kawasan Hutan		200.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				250 Hektar	250.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Long Beluah Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu Kab. Bulungan, Sekatak, Liagu Kab. Bulungan, Sekatak, Sekatak Buji Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat di dalam dan luar kawasan Hutan		250.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				2 Unit	300.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu Kab. Bulungan, Peso Hilir, Long Tungu Kab. Bulungan, Sekatak, Liagu Kab. Bulungan, Sekatak, Sekatak Buji Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat di dalam dan luar kawasan Hutan		300.000.000,00	UPT KPH KOTA TARAKAN
		UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN						**10.000.000.000,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**10.000.000.000,00**							**0,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**10.000.000.000,00**							**0,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.717.800.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi]	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.717.800.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Dokumen	195.000.000,00			-	-	Aparatur	-	0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	195.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah bulan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			12 Laporan	175.000.000,00			-	-	Aparatur	-	0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	175.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Laporan	487.000.000,00			-	-	Aparatur	-	0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			12 Laporan	785.800.000,00			-	-	Aparatur	-	0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	13.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	33.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	539.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya*	-			39 Unit	75.000.000,00			-	-	Aparatur	-	0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				48 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**6.520.200.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Persentase peningkatan produtivitas hasil hutan]	**Persentase peningkatan produtivitas hasil hutan**	**3**	**10**	**10**	**3**	**6.520.200.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Unit KPH yang diadakan sarana dan prasarananya*	-			1 Unit	1.950.000.000,00			-	-	Aparatur	-	0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				0 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Aparatur		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	450.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Aparatur		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor														
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun				1 Unit	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Aparatur		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah unit KPH yang telah memiliki RPHJP yang disahkan*	-			3 Unit	1.500.000.000,00			-	-	Masyarakat dan Aparatur	-	0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				4 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat dan Aparatur		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P														
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Masyarakat dan Aparatur		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Persentase penambahan Luas tutupan lahan*	-			2 Persen	200.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat	-	0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				10 Ha	200.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara*	-			10 Persen	2.870.200.000,00			-	-	Kawasan Hutan dan Lahan	-	0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	470.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Kawasan Hutan dan Lahan		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Kawasan Hutan dan Lahan		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				30000 Ha	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Kawasan Hutan dan Lahan		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**1.762.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Jumlah ijin PS yang diterbitkan]	**Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)**	**15**	**-**	**2**	**15**	**1.762.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya*	-			1 KUPS	1.762.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dan Penyuluh	-	0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				15 Kelompok	612.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dan Penyuluh		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				13 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dan Penyuluh		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				6 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dan Penyuluh		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Hektar	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dan Penyuluh		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				1 Unit	400.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dan Penyuluh		0,00	UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN
		UPT KPH KABUPATEN MALINAU						**9.999.999.594,00**							**13.837.500.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**9.999.999.594,00**							**13.837.500.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**9.999.999.594,00**							**13.837.500.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**608.269.155,00**						**-**	**887.500.000,00**	
		[Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi]	**Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**608.269.155,00**	-	-	-	-	-	-	**887.500.000,00**	-
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	100.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	UPTD KPH Malinau	-	200.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	UPTD KPH Malinau		200.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah bulan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	80.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	UPTD KPH Malinau	-	100.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	50.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	UPTD KPH Malinau		50.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	UPTD KPH Malinau		50.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah* *Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan 12 Bulan	141.500.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	UPTD KPH Malinau	-	217.500.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	UPTD KPH Malinau		10.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	UPTD KPH Malinau		15.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	UPTD KPH Malinau		20.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.500.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	UPTD KPH Malinau		7.500.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	UPTD KPH Malinau		15.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	UPTD KPH Malinau		150.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			12 Bulan	222.500.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	UPTD KPH Malinau	-	270.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	UPTD KPH Malinau		10.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	UPTD KPH Malinau		50.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	UPTD KPH Malinau		10.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	180.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Sempayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	UPTD KPH Malinau		200.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya*	-			141 Unit	64.269.155,00			-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	UPTD KPH Malinau	-	100.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				54 Unit	45.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	UPTD KPH Malinau		50.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	19.269.155,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	UPTD KPH Malinau		50.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**7.636.730.439,00**						**-**	**10.450.000.000,00**	
		[Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan]	**Persentase peningkatan produtivitas hasil hutan**	**3**	**8.05**	**3**	**3**	**7.636.730.439,00**	-	-	-	-	-	-	**10.450.000.000,00**	-
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Unit KPH yang diadakan sarana dan prasarananya*	-			5 Unit	3.650.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat Sekitar di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan	-	4.650.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	450.000.000,00	Kab. Malinau, Mentarang, Paking Kab. Malinau, Malinau Selatan, Laban Nyarit Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat Sekitar di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan		750.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				54 Unit	700.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Masyarakat Sekitar di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan		700.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun				1 Unit	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Masyarakat Sekitar di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan		3.200.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah unit KPH yang telah memiliki RPHJP yang disahkan*	-			5 Unit	650.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat Sekitar di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan	-	650.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	650.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat Sekitar di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan		650.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Persentase penambahan Luas tutupan lahan*	-			4 %	700.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat Sekitar di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan	-	800.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Long Lake Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Nahakramo Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Long Jalan Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Metut Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Pada	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat Sekitar di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan		300.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				5 Ha	450.000.000,00	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Nahakramo Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Long Jalan Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Metut Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Long Lake Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Pada	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat Sekitar di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan		500.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.636.730.439,00**	-	-	-	-	-	-	**10.450.000.000,00**	-
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan*	-			10 %	2.636.730.439,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat Sekitar di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan	-	4.350.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				4 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat Sekitar di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan		600.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				4 Laporan	1.686.730.439,00	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat Sekitar di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan		3.100.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				15000 Ha	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis, Libang Kab. Tana Tidung, Muruk Rian, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat Sekitar di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan		650.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**1.755.000.000,00**						**-**	**2.500.000.000,00**	
		[Jumlah ijin PS yang diterbitkan]	**Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)**	**20**	**20**	**20**	**20**	**1.755.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.500.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan Usaha*	-			30 Kelompok	1.755.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Masyarakat Sekitar di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan	-	2.500.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				3 Kelompok	650.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Laban Nyarit Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Long Lake	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Masyarakat Sekitar di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan		750.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				11 Orang	305.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Masyarakat Sekitar di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan		350.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				15000 Hektar	350.000.000,00	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Long Pipa Kab. Malinau, Kayan Hilir, Long Sule Kab. Malinau, Sungai Boh, Long Lebusan Kab. Malinau, Kayan Selatan, Sungai Barang Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Gong Solok Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Metut	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat Sekitar di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan		650.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				4 Unit	450.000.000,00	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Laban Nyarit Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Long Jalan Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Pada	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Masyarakat Sekitar di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan		750.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN MALINAU
		UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG						**11.399.999.990,00**							**15.742.250.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**11.399.999.990,00**							**15.742.250.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**11.399.999.990,00**							**15.742.250.000,00**	
1.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.239.000.000,00**						**-**	**1.617.250.000,00**	
		[Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi]	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.239.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.617.250.000,00**	-
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	-			12 Dokumen	160.000.000,00			-	-	Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat	-	210.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	160.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat		210.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	-			4 Orang	163.000.000,00			-	-	Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat	-	200.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	55.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat		0,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	108.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat		200.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*undefined*	-			undefined undefined	496.500.000,00			-	-	Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat	-	597.250.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2.500.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat		7.250.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	52.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat		60.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	5.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat		0,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	75.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat		110.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	47.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat		60.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat		10.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	310.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat		350.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	15.000.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	204.500.000,00			-	-	Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat	-	400.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	12.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat		15.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat		100.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	17.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat		35.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat		250.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	-	UPTD KPH Tana Tidung	-	200.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				53 Unit	50.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD KPH Tana Tidung		50.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD KPH Tana Tidung		150.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**7.860.999.990,00**						**-**	**11.225.000.000,00**	
		[Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan]	**Persentase peningkatan produtivitas hasil hutan**	**2**	**5**	**2**	**2**	**7.860.999.990,00**	-	-	-	-	-	-	**11.225.000.000,00**	-
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok*	-			1 Unit	3.520.000.000,00			-	-	UPTD KPH Tana Tidung dan Masyarakat	-	3.825.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	UPTD KPH Tana Tidung dan Masyarakat		200.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				2 Unit	350.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	UPTD KPH Tana Tidung dan Masyarakat		125.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				54 Unit	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	UPTD KPH Tana Tidung dan Masyarakat		500.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor														
			Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun				1 Unit	2.620.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	UPTD KPH Tana Tidung dan Masyarakat		3.000.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun*	-			2 Dokumen	470.000.000,00			-	-	UPTD KPH Tana Tidung dan Masyarakat	-	800.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	UPTD KPH Tana Tidung dan Masyarakat		300.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P														
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	170.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	UPTD KPH Tana Tidung dan Masyarakat		300.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.03.1.02.0003	Penyusunan Perubahan Peta Tata Hutan														
			Jumlah Peta Perubahan Tata Hutan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	UPTD KPH Tana Tidung dan Masyarakat		200.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara*	-			25 Ha	850.000.000,00			-	-	UPTD KPH Tana Tidung dan Masyarakat	-	1.400.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	UPTD KPH Tana Tidung dan Masyarakat		250.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				0 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	UPTD KPH Tana Tidung dan Masyarakat		450.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				5 Ha	850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	UPTD KPH Tana Tidung dan Masyarakat		700.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah Laporan Pertemuan /Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan*	-			2 Dokumen	2.670.999.990,00			-	-	UPTD KPH Tana Tidung dan Masyarakat	-	4.400.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				2 Dokumen	910.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	UPTD KPH Tana Tidung dan Masyarakat		1.900.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			0				12 0	510.999.990,00	-	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	UPTD KPH Tana Tidung dan Masyarakat		700.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				178.853 Ha	1.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	UPTD KPH Tana Tidung dan Masyarakat		1.800.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	*Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan*	-			1 Sertifikat	350.000.000,00			-	-	UPTD KPH Tana Tidung dan Masyarakat	-	800.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih														
			Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan				2 Sertifikat	150.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	UPTD KPH Tana Tidung dan Masyarakat		300.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.03.1.09.0006	Pembangunan Sumber Benih														
			Luas Sumber Benih yang Dibangun				0 Ha	200.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	UPTD KPH Tana Tidung dan Masyarakat		500.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**2.300.000.000,00**						**-**	**2.900.000.000,00**	
		[Jumlah Ijin PS yang Diterbitkan]	**Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)**	**10**	**10**	**10**	**10**	**2.300.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.900.000.000,00**	-
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-			-	2.300.000.000,00			-	-	Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat	-	2.900.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan														
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				2 Kelompok	850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat		1.100.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				10 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat		350.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan														
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				10 Orang	310.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat		300.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial														
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				100 Hektar	370.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat		450.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial														
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				2 Unit	620.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat		700.000.000,00	UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						**17.877.270.700,00**							**1.750.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**17.877.270.700,00**							**1.750.000.000,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**17.877.270.700,00**							**1.750.000.000,00**	
1.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**15.377.270.700,00**						**-**	**1.750.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah]	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**15.377.270.700,00**	-	-	-	-	-	-	**1.750.000.000,00**	-
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			undefined undefined 2 Dokumen	250.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	9.842.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/ Bulan	9.442.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	650.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	150.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	500.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	2.875.270.700,00			-	-	Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	449.270.700,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	200.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				365 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	170.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.100.000.000,00			-	-	-	-	1.300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			-				-	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			4 Laporan	360.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	11.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	155.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	144.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya*	-			24 Unit	200.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	200.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**						**300.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya pengelolaan air tanah yang sesuai dengan ketentuan]	**Persentase izin pemanfaatan air tanah sesuai dengan kaidah konservasi air tanah**	**87**	**53**	**53**	**60**	**300.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Pergub terkait Zona Konservasi Air Tanah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara*	-			0 %	100.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				3 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Percentase Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan pedoman Nilai Perolehan Air Tanah*	-			100 %	200.000.000,00			-	-	Pelaku usaha pengguna air tanah	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku usaha pengguna air tanah		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku usaha pengguna air tanah		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**						**350.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam melaksanakan kaidah lingkungan dan teknik pertambangan yang baik]	**Persentase IUP dan SIPB MBLB yang memenuhi penyusunan dokumen teknis studi kelayakan dan rencana pengembangan**	**80**	**77.27**	**77.5**	**78**	**350.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-			-	179.000.000,00			-	-	Pelaku usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat				1 Laporan	39.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				16 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.06	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	68.000.000,00			-	-	Pelaku usaha pengguna IUJP	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.06.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				6 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku usaha pengguna IUJP		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	38.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku usaha pengguna IUJP		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-			-	39.000.000,00			-	-	Pelaku usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan				2 Dokumen	39.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam				0 Laporan	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.14	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	-	-			-	64.000.000,00			-	-	Pelaku usaha yang mengajukan SIPB	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.14.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku usaha yang mengajukan SIPB		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.14.0003	Pemberian rekomendasi teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah rekomendasi teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)				6 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku usaha yang mengajukan SIPB		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.19	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.19.0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24.0003	Pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi dan/atau fasilitasi														
			Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis, konsultasi, mediasi dan/atau fasilitasi				6 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.24.0005	Perencanaan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha														
			Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**						**425.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterjangkauan Terhadap Penggunaan Energi Listrik dan EBT]	**Jumlah pasokan energi yang bersumber dari EBT**	**1882939.13**	**2339,.2**	**2436.79**	**2645.66**	**425.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	*Jumlah laporan data potensi Pengembangan Bioenergi*	-			2 Laporan	70.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	pelaku usaha yang mengelola biomassa/biogas	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa														
			jumlah dokumen data potensi biomassa				1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	pelaku usaha yang mengelola biomassa/biogas		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0002	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas														
			Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas				1 Laporan	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	pelaku usaha yang mengelola biomassa/biogas		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0003	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa														
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	pelaku usaha yang mengelola biomassa/biogas		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0004	Perencanaan kegiatan penyediaan biomassa														
			Jumlah rencana kegiatan penyediaan biomassa				1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	pelaku usaha yang mengelola biomassa/biogas		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0005	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa				1 Laporan	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	pelaku usaha yang mengelola biomassa/biogas		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas														
			Jumlah dokumen data potensi biogas				1 Dokumen	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	pelaku usaha yang mengelola biomassa/biogas		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0007	Perencanaan kegiatan penyediaan biogas														
			Jumlah rencana kegiatan penyediaan biogas				1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	pelaku usaha yang mengelola biomassa/biogas		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas														
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas				1 Laporan	0,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	pelaku usaha yang mengelola biomassa/biogas		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	*Kapasitas Bauran Energi Pembangkit Aneka EBT Beroperasi (TOE)*	-			396156,9665 TOE	230.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat di wilayah desa 3T yang belum berlistrik	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0001	Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT														
			Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT				1 laporan	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat di wilayah desa 3T yang belum berlistrik		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah				1 Laporan	230.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat di wilayah desa 3T yang belum berlistrik		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT														
			Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi				1 Unit	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat di wilayah desa 3T yang belum berlistrik		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT														
			Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT				2 Dokumen	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat di wilayah desa 3T yang belum berlistrik		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT														
			Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT				1 unit	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat di wilayah desa 3T yang belum berlistrik		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0009	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT														
			Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara				3 unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat di wilayah desa 3T yang belum berlistrik		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat di wilayah desa 3T yang belum berlistrik		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	*Dokumen Perubahan RUED yang telah dievaluasi*	-			1 Dokumen	50.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.09.0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi														
			Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Perangkat Daerah		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.09.0003	Perencanaan kegiatan konservasi energi														
			Jumlah rencana kegiatan konservasi energi				1 Dokumen	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Perangkat Daerah		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	*Laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi yang tersusun*	-			3 Laporan	75.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10.0001	Bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota														
			0				0 0	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Perangkat Daerah		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**425.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.29.05.1.10.0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota				1 laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Perangkat Daerah		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		[Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterjangkauan Terhadap Penggunaan Energi Listrik dan EBT]	**Jumlah pasokan energi yang bersumber dari EBT**	**1882939.13**	**2339,.2**	**2436.79**	**2645.66**	**425.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.29.05.1.10.0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat														
			Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat				1 laporan	75.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Perangkat Daerah		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10.0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota														
			Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota				1 Laporan	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Perangkat Daerah		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
5.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**						**1.425.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	*Percentase Penatausahaan IUPTL Non BUMN yag dilaksanakan*	-			100 %	75.000.000,00			-	-	Pelaku usaha yang mengajukan IUPTL	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				15 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku usaha yang mengajukan IUPTL		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	*Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Izin operasi ketenagalistrikan yang selesai dilaksanakan Percentase pertimbangan teknis yang tersusun*	-			100 % 100 %	0,00			-	-	Pelaku Usaha yang mengajukan Izin Operasi	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha yang mengajukan Izin Operasi		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				30 Laporan	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Usaha yang mengajukan Izin Operasi		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	-	-			-	75.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri				12 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-			-	1.275.000.000,00			-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Rumah Masyarakat Kurang Mampu yang belum berlistrik di 5 kab/kota se Kaltara	-	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu														
			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1 Dokumen	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Rumah Masyarakat Kurang Mampu yang belum berlistrik di 5 kab/kota se Kaltara		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1 Dokumen	225.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Rumah Masyarakat Kurang Mampu yang belum berlistrik di 5 kab/kota se Kaltara		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Rumah Masyarakat Kurang Mampu yang belum berlistrik di 5 kab/kota se Kaltara		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				380 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Rumah Masyarakat Kurang Mampu yang belum berlistrik di 5 kab/kota se Kaltara		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM						**22.241.012.355,00**							**59.362.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.876.238.443,00**							**18.612.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**15.876.238.443,00**							**18.612.000.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**14.021.238.443,00**						**-**	**14.002.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.021.238.443,00**	-	-	-	-	-	-	**14.002.000.000,00**	-
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			17 dokumen	315.000.000,00			-	-	ASN Disperindagkop	-	485.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disperindagkop		370.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13 Laporan	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disperindagkop		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disperindagkop		65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	10.842.941.504,00			-	-	ASN Disperindagkop	-	10.380.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/ Bulan	9.867.941.504,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disperindagkop		8.750.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1218 Dokumen	950.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disperindagkop		1.600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disperindagkop		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	470.000.000,00			-	-	ASN Disperindagkop	-	420.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				85 Paket	170.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disperindagkop		70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disperindagkop		350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan*	-			12 Bulan	1.913.296.939,00			-	-	ASN Disperindagkop	-	1.814.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	147.796.939,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disperindagkop		70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	13.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disperindagkop		26.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	180.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disperindagkop		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disperindagkop		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				38 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disperindagkop		18.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disperindagkop		1.300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6117 Dokumen	17.500.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disperindagkop		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah BMD yang diadakan*	-			1 Kegiatan	100.000.000,00			-	-	ASN Disperindagkop	-	110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disperindagkop		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	100.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disperindagkop		110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			12 Bulan	200.000.000,00			-	-	ASN Disperindagkop	-	143.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disperindagkop		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				7 Laporan	170.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disperindagkop		110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	15.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disperindagkop		18.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya*	-			12 Bulan	180.000.000,00			-	-	ASN Disperindagkop	-	650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	180.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disperindagkop		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disperindagkop		450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**130.000.000,00**						**-**	**330.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi]	**Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**66.07**	**38.64**	**0**	**44.68**	**130.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**330.000.000,00**	-
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase kepatuhan tata kelola koperasi pasca pemeriksaan*	-			0 persen	0,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Anggota dan Pengurus Koperasi	-	110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				0 Unit Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Anggota dan Pengurus Koperasi		110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase kepatuhan koperasi pasca pemeriksaan*	-			0 persen	130.000.000,00			-	-	Anggota dan Pengurus Koperasi	-	220.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				20 Unit Usaha	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anggota dan Pengurus Koperasi		220.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**						**0,00**						**-**	**55.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi]	**Persentase Koperasi Aktif**	**88.90**	**88.64**	**0**	**88.94**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**55.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase koperasi yang menindaklanjuti hasil penilaian*	-			0 Persen	0,00			-	-	Anggota dan Pengurus Koperasi	-	55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														
			0				0 0	0,00	-	-	-	-	Anggota dan Pengurus Koperasi		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
4.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						**0,00**						**-**	**350.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian]	**Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan**	**92.59**	**56.82**	**0**	**65.22**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**350.000.000,00**	-
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi yang bersertifikat*	-			75 peserta	0,00			-	-	Anggota dan Pengurus Koperasi	-	350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anggota dan Pengurus Koperasi		350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
5.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**						**400.000.000,00**						**-**	**920.000.000,00**	
		[Meningkatnya Produktifitas Koperasi]	**Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**	**46,94**	**13.64**	**0**	**20.30**	**400.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**920.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase koperasi yang mendapatkan pendampingan manajerial, keuangan, atau kelembagaan*	-			0 Persen	400.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Anggota dan Pengurus Koperasi	-	920.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.06.1.01.0004	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi														
			Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan				24 Kelompok Masyarakat	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Anggota dan Pengurus Koperasi		500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.06.1.01.0006	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				0 Unit Usaha	0,00	-	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Anggota dan Pengurus Koperasi		120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.06.1.01.0008	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya				0 Unit Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Anggota dan Pengurus Koperasi		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan				5 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Anggota dan Pengurus Koperasi		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
6.	**2.17.07**	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**1.075.000.000,00**						**-**	**2.135.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri]	**Pertumbuhan Wirausaha**	**7,67**	**1.27**	**0**	**2,55**	**1.075.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.135.000.000,00**	-
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah wirausaha baru yang terdaftar dan aktif menjalankan usaha*	-			0 Wirausaha	1.075.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Pelaku usaha	-	2.135.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				200 Unit Usaha	600.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Pelaku usaha		440.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				220 Orang	150.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Pelaku usaha		440.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.07.1.01.0004	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi				0 Unit Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Pelaku usaha		130.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.07.1.01.0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Pelaku usaha		495.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.07.1.01.0008	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi				3 Unit Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Pelaku usaha		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.07.1.01.0009	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik														
			Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi				5 Unit Usaha	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Pelaku usaha		210.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.07.1.01.0010	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi				0 Unit Usaha	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Pelaku usaha		210.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha														
			Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi				10 Unit Usaha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan	Pelaku usaha		110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
7.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						**250.000.000,00**						**-**	**820.000.000,00**	
		[Meningkatnya Daya Saing UMKM]	**Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor**	**4,61**	**1.11**	**0**	**1,81**	**250.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**820.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	*Jumlah UMKM yang terlibat dalam kemitraan strategis*	-			0 Unit Usaha	250.000.000,00			-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Pelaku usaha	-	820.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				50 Unit Usaha	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Pelaku usaha		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM														
			Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum				100 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Pelaku usaha		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.08.1.01.0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang														
			Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi				0 Lembaga	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Pelaku usaha		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan														
			Wirausaha yang Difasilitasi				0 Orang	0,00	-	-	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Pelaku usaha		220.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	2.17.08.1.01.0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi				0 Unit Usaha	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Pelaku usaha		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**6.175.000.000,00**							**40.700.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**4.950.000.000,00**							**37.100.000.000,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**						**300.000.000,00**						**-**	**250.000.000,00**	
		[Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha]	**Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi**	**90**	**66.67**	**70**	**70**	**300.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**250.000.000,00**	-
	3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	*Jumlah rekomendasi Izin Usaha SIUP-MB*	-			1 dokumen	50.000.000,00			-	-	Pelaku usaha	-	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.02.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku usaha		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	*Jumlah pengawasan pada distributor dan distribusi Perdagangan Bahan Berbahaya*	-			1 Laporan	100.000.000,00			-	-	Pelaku usaha	-	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.02.1.03.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya														
			Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku usaha		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	*Persentase permohonan SKA dan API yang diterbitkan sesuai dengan waktu standar pelayanan Jumlah Penggunaan Form Certificate of Origin (COO)/Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) Tahun*	-			0 persen 3883 Form	150.000.000,00			-	-	Pelaku usaha	-	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				15 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku usaha		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**1.425.000.000,00**						**-**	**1.750.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi yang efisiensi merata dan terintegrasi]	**Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya**	**0**	**25**	**0**	**25**	**1.425.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.750.000.000,00**	-
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	*Jumlah Pembangunan dan pusat distribusi regional dan provinsi yang dikelola Jumlah Pusat Distribusi Regional dan Provinsi yang tersedia dan beroperasi*	-			1 Lokasi undefined Unit	1.425.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Masyarakat	-	1.750.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				1 Unit	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Masyarakat		350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas														
			Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi				20 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.03.1.01.0004	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi														
			Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang				1 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**						**1.300.000.000,00**						**-**	**27.900.000.000,00**	
		[Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	**Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	**3.28**	**4**	**3.7**	**3.43**	**1.300.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**27.900.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah ketersediaan barang pokok dan barang penting* *Persentase ketersediaan barang pokok dan penting*	-			12 Jenis 0 persen	75.000.000,00			-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Masyarakat	-	25.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Masyarakat		25.250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				12 laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	*Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar wilayah* *Jumlah Komoditas Pokok dan Penting yang Dimonitor*	-			6 persen 0 Jenis	1.175.000.000,00			-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Masyarakat	-	2.250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				12 Laporan	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				2 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Masyarakat		2.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	*Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi* *Persentase penurunan kasus penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi*	-			0 persen 0 persen	50.000.000,00			-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Masyarakat	-	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.04.1.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.04.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
4.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**						**1.050.000.000,00**						**-**	**1.750.000.000,00**	
		[Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor]	**Nilai Ekspor Barang di Proviinsi**	**42614**	**40687**	**41071**	**41065**	**1.050.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.750.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	*Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi*	-			54 Pelaku Usaha	1.050.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pelaku usaha	-	1.750.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				20 Pelaku Usaha	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pelaku usaha		1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal				10 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pelaku usaha		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				16 Pelaku Usaha	150.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pelaku usaha		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi				8 Produk	150.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pelaku usaha		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**650.000.000,00**						**-**	**4.850.000.000,00**	
		[Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk]	**Persentase penanganan pengaduan konsumen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**650.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**4.850.000.000,00**	-
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaksanaan perlindungan konsumen di kabupaten/kota*	-			5 Kabupaten/ Kota	200.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen														
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif				2 BPSK	150.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**650.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**4.850.000.000,00**	-
	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen														
			Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif				0 LPKSM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
		[Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk]	**Persentase penanganan pengaduan konsumen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**650.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**4.850.000.000,00**	-
	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen														
			Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani				12 Pengaduan	50.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengujian dan sertifikasi Mutu Produk yang dilaksanakan*	-			7 Persen	200.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	4.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi														
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan				0 Sertifikat	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian														
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan				1 laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		4.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk														
			Jumlah produk potensial yang dipantau				0 Produk	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi														
			Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan				0 Sertifikat	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengawasan yang dilakukan di kabupaten/kota*	-			5 Kabupaten/ Kota	250.000.000,00			-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat	-	500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				5 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.06.1.03.0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus yang Ditangani				5 Kasus	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
6.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**						**225.000.000,00**						**-**	**600.000.000,00**	
		[Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri]	**Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan**	**45**	**0**	**0**	**25**	**225.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**600.000.000,00**	-
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	*Junlah Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri*	-			0 Kali	150.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri				15 UMKM	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Persentase realisasi belanja produk dalam negeri oleh instansi pemerintah*	-			0 persen	75.000.000,00			-	-	Masyarakat	-	250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				15 UMKM	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**225.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**600.000.000,00**	-
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Persentase Kontribusi Produk Lokal yang Dipasarkan di Pasar Rakyat dan Ritel Modern*	-			0 persen	0,00			-	-	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**1.225.000.000,00**							**3.600.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**825.000.000,00**						**-**	**2.800.000.000,00**	
		[Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri]	**Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri**	**29.65**	**18.74**	**19.52**	**20.85**	**825.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.800.000.000,00**	-
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	*Persentase program dan kegiatan sektor industri provinsi yang selaras dengan arah kebijakan RPIP*	-			0 persen	825.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Pelaku Industri	-	2.800.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi														
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Pelaku Industri		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Pelaku Industri		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**825.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.800.000.000,00**	-
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pelaku Industri		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
		[Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri]	**Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri**	**29.65**	**18.74**	**19.52**	**20.85**	**825.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.800.000.000,00**	-
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Pelaku Industri		350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Pelaku Industri		1.800.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Pelaku Industri		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**						**200.000.000,00**						**-**	**400.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian]	**Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan**	**85**	**75**	**76**	**77**	**200.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**400.000.000,00**	-
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	*Tingkat kepatuhan substansi izin terhadap ketentuan teknis dan peraturan*	-			0 persen	200.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pelaku Industri	-	400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi														
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				8 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pelaku Industri		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.				2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pelaku Industri		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**						**200.000.000,00**						**-**	**400.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri]	**Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**400.000.000,00**	-
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	*Jumlah informasi industri yang dikelola dan dipantau*	-			1 Iinformasi	200.000.000,00			-	-	Pelaku Industri	-	400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Industri		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**400.000.000,00**	-
	3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Industri		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri]	**Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**400.000.000,00**	-
	3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				2 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Industri		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	X	**NON URUSAN**						**189.773.912,00**							**50.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**189.773.912,00**							**50.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**189.773.912,00**						**-**	**50.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**189.773.912,00**	-	-	-	-	-	-	**50.000.000,00**	-
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			17 dokumen	189.773.912,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	X.XX.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				175 Data	89.773.912,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	X.XX.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	0,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						**2.098.719.347,00**							**4.611.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.098.719.347,00**							**4.611.500.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.098.719.347,00**							**4.611.500.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.189.219.347,00**						**-**	**2.461.500.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**0**	**100**	**100**	**1.189.219.347,00**	-	-	-	-	-	-	**2.461.500.000,00**	-
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi*	-			12 Dokumen	145.920.000,00			-	-	ASN di Lingkungan Biro Administrasi Pembangunan	-	190.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	145.920.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN di Lingkungan Biro Administrasi Pembangunan		190.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai dengan standar peraturan yang berlaku*	-			12 Laporan	95.000.000,00			-	-	ASN dan PTT di Lingkungan Biro Administrasi Pembangunan	-	175.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan PTT di Lingkungan Biro Administrasi Pembangunan		0,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	95.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan PTT di Lingkungan Biro Administrasi Pembangunan		175.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi*	-			12 Laporan	521.599.347,00			-	-	ASN dan PPT di Lingkungan Biro Administrasi Pembangunan	-	997.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	286.500.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan PPT di Lingkungan Biro Administrasi Pembangunan		360.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	35.099.347,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan PPT di Lingkungan Biro Administrasi Pembangunan		37.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan PPT di Lingkungan Biro Administrasi Pembangunan		600.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi*	-			3 Unit	175.000.000,00			-	-	Barang Milik Daerah yang dikelola Biro Administrasi Pembangunan	-	260.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Barang Milik Daerah yang dikelola Biro Administrasi Pembangunan		0,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	45.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Barang Milik Daerah yang dikelola Biro Administrasi Pembangunan		0,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Barang Milik Daerah yang dikelola Biro Administrasi Pembangunan		160.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Barang Milik Daerah yang dikelola Biro Administrasi Pembangunan		100.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan pemenuhan kebutuhan jasa penunjang*	-			12 Laporan	56.000.000,00			-	-	ASN dan PTT di Lingkungan Biro Administrasi Pembangunan	-	344.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	11.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan PTT di Lingkungan Biro Administrasi Pembangunan		18.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan PTT di Lingkungan Biro Administrasi Pembangunan		6.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	42.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan PTT di Lingkungan Biro Administrasi Pembangunan		320.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit BMD yang terpelihara*	-			38 Unit	195.700.000,00			-	-	Barang Milik Daerah yang dikelola Biro Administrasi Pembangunan	-	495.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				13 Unit	61.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Barang Milik Daerah yang dikelola Biro Administrasi Pembangunan		190.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	120.500.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Barang Milik Daerah yang dikelola Biro Administrasi Pembangunan		180.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	14.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Barang Milik Daerah yang dikelola Biro Administrasi Pembangunan		25.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Barang Milik Daerah yang dikelola Biro Administrasi Pembangunan		100.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.	**4.01.08**	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**						**909.500.000,00**						**-**	**2.150.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kebijakan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Daerah]	**Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Menjadi Dasar Kebijakan**	**100**	**0**	**100**	**100**	**909.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.150.000.000,00**	-
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Rumusan Kebijakan dibidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Dihasilkan*	-			3 Rumusan	525.000.000,00			-	-	Seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Utara	-	1.120.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				1 Laporan	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Utara		380.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				1 Laporan	64.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Utara		250.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				2 Laporan	286.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Utara		490.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Rumusan Kebijakan dibidang Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Dihasilkan*	-			3 Rumusan	384.500.000,00			-	-	Seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Utara	-	1.030.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan				1 Dokumen	103.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Utara		300.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				1 Laporan	164.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Utara		420.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				1 Dokumen	117.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Utara		310.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						**3.625.435.765,00**							**4.008.960.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.625.435.765,00**							**4.008.960.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**3.625.435.765,00**							**4.008.960.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.475.435.765,00**						**-**	**1.463.460.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**-**	**100**	**100**	**1.475.435.765,00**	-	-	-	-	-	-	**1.463.460.000,00**	-
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia*	-			12 Dokumen	216.720.000,00			-	-	ASN Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	248.760.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	216.720.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		248.760.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia*	-			12 Laporan	156.300.000,00			-	-	ASN Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	105.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	66.300.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		0,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	90.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		105.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Laporan	642.083.223,00			-	-	ASN Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	730.500.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	20.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		20.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	90.724.242,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		53.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	11.358.981,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		7.500.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	520.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		650.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia*	-			7 Unit	0,00			-	-	Barang Milik Daerah Penunjang di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	0,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Barang Milik Daerah Penunjang di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		0,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Barang Milik Daerah Penunjang di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		0,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia*	-			12 Laporan	364.882.542,00			-	-	ASN Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	282.500.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		7.500.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		5.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.475.435.765,00**	-	-	-	-	-	-	**1.463.460.000,00**	-
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		0,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**-**	**100**	**100**	**1.475.435.765,00**	-	-	-	-	-	-	**1.463.460.000,00**	-
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	354.382.542,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		270.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*	-			25 Unit	95.450.000,00			-	-	Barang Milik Daerah Penunjang di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	96.700.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	1.500.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Barang Milik Daerah Penunjang di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		700.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	73.150.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Barang Milik Daerah Penunjang di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		76.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	20.800.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Barang Milik Daerah Penunjang di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		20.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**						**2.150.000.000,00**						**-**	**2.545.500.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah]	**Nilai LPPD** **Tingkat keterisian dan capaian SPM** **Tingkat keterisian LPPD**	**100** **3.52** **95**	**-** **100** **95**	**-** **100** **95**	**100** **3.10** **95**	**2.150.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.545.500.000,00**	-
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	*Persentase pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilaksanakan*	-			100 %	300.000.000,00			-	-	Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota di Kalimantan Utara	-	725.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota di Kalimantan Utara		135.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota di Kalimantan Utara		355.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota di Kalimantan Utara		235.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti*	-			100 Persentase	450.000.000,00			-	-	Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota di Kalimantan Utara	-	1.165.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				10 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota di Kalimantan Utara		235.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota di Kalimantan Utara		225.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				2 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota di Kalimantan Utara		235.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02.0004	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				42 Perangkat Daerah	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota di Kalimantan Utara		235.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				42 Perangkat Daerah	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota di Kalimantan Utara		235.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Jumlah Kerjasama Daerah yang difasilitasi*	-			19 Dokumen	1.400.000.000,00			-	-	Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Swasta	-	655.500.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				7 Dokumen	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Swasta		265.500.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta														
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				12 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Swasta		235.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Swasta		155.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
		BIRO HUKUM						**3.897.622.315,00**							**5.399.500.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.897.622.315,00**							**5.399.500.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**3.897.622.315,00**							**5.399.500.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.656.879.745,00**						**-**	**3.029.500.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.656.879.745,00**	-	-	-	-	-	-	**3.029.500.000,00**	-
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai regulasi*	-			12 Dokumen	121.560.000,00			-	-	ASN Biro Hukum	-	160.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	121.560.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Hukum		160.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai standar peraturan yang berlaku*	-			12 Dokumen	320.680.096,00			-	-	ASN Biro Hukum	-	700.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Hukum		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	60.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Hukum		610.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	260.680.096,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Hukum		90.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Laporan	595.491.485,00			-	-	ASN Biro Hukum	-	752.500.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Hukum		20.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4.326.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Hukum		6.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	265.584.363,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Hukum		290.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6.180.789,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Hukum		6.500.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	19.400.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Hukum		30.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	300.000.333,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Hukum		400.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan*	-			4 Unit	38.000.000,00			-	-	ASN Biro Hukum	-	660.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Hukum		0,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Hukum		600.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	38.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Hukum		60.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			12 Laporan	500.125.664,00			-	-	ASN Biro Hukum	-	602.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.500.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Hukum		9.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2.500.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Hukum		13.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	492.125.664,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Hukum		580.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Unit Kerja yang terpelihara*	-			26 Unit	81.022.500,00			-	-	ASN Biro Hukum	-	155.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				13 Unit	40.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Hukum		60.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	23.522.500,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Hukum		50.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	17.500.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Hukum		45.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Hukum		0,00	BIRO HUKUM
2.	**4.01.05**	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**						**2.240.742.570,00**						**-**	**2.370.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas Produk Hukum yang dihasilkan]	**Persentase Capaian Aksi HAM** **Persentase Produk Hukum Yang Dihasilkan Sesuai Standar**	**90** **96**	**90** **91.9**	**90** **92.5**	**90** **93**	**2.240.742.570,00**	-	-	-	-	-	-	**2.370.000.000,00**	-
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	*Jumlah Dokumen fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan*	-			1380 Dokumen	1.610.776.734,00			-	-	ASN/OPD Pemprov.Kaltara	-	1.660.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan														
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				30 Dokumen	595.999.858,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN/OPD Pemprov.Kaltara		610.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan														
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				550 Dokumen	318.270.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN/OPD Pemprov.Kaltara		340.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				650 Dokumen	316.507.232,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN/OPD Pemprov.Kaltara		350.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota														
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				150 Dokumen	379.999.644,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN/OPD Pemprov.Kaltara		360.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah kasus fasilitasi bantuan hukum*	-			9 Kasus	629.965.836,00			-	-	ASN/OPD Pemprov.Kaltara	-	710.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum														
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				3 Kasus	299.995.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN/OPD Pemprov.Kaltara		360.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM														
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				6 Kasus	329.970.586,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN/OPD Pemprov.Kaltara		350.000.000,00	BIRO HUKUM
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT						**39.064.382.569,00**							**67.917.076.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**39.064.382.569,00**							**67.917.076.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**39.064.382.569,00**							**67.917.076.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.714.452.998,00**						**-**	**2.217.076.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Persentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah di lingkup sekretariat daerah provinsi kalimantan utara** **Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.714.452.998,00**	-	-	-	-	-	-	**2.217.076.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Sesuai Regulasi*	-			12 Bulan 12 Dokumen	296.880.000,00			-	-	ASN Biro Kesra	-	350.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	296.880.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Kesra		350.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	104.550.000,00			-	-	ASN Biro Kesra	-	135.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	19.550.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Kesra		40.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Biro Kesra		95.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	584.018.750,00			-	-	Pegawai Biro Kesra	-	570.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket	120.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Biro Kesra		0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	75.405.250,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Biro Kesra		155.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	40.013.500,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Biro Kesra		45.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	348.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Biro Kesra		370.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Yang Diadakan* *Jumlah BMD yang diadakan* *Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia Sesuai Standar Regulasi*	-			22 Unit Unit 13 Unit	146.500.000,00			-	-	Pegawai Biro Kesra	-	150.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Biro Kesra		65.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	81.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Biro Kesra		85.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan 100 Persentase	372.984.248,00			-	-	Pegawai Biro Kesra	-	758.076.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	21.560.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Biro Kesra		32.500.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Biro Kesra		7.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	345.424.248,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Biro Kesra		718.576.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya* *Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			623 Unit 12 Bulan	209.520.000,00			-	-	Pegawai Biro Kesra	-	254.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				11 Unit	120.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Biro Kesra		149.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	77.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Biro Kesra		80.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	12.100.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Biro Kesra		25.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	**4.01.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**37.349.929.571,00**						**-**	**65.700.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat]	**Persentase rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yg menjadi dasar kebijakan**	**100**	**95**	**97**	**100**	**37.349.929.571,00**	-	-	-	-	-	-	**65.700.000.000,00**	-
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	*Persentase Layanan Pembinaan Mental Spiritual yang difasilitasi*	-			100 Persen	19.015.000.000,00			-	-	Organisasi Keagamaan, Rumah Ibadah, ASN dan Masyarkat Kalimantan Utara	-	40.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				50 Unit	1.390.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Organisasi Keagamaan, Rumah Ibadah, ASN dan Masyarkat Kalimantan Utara		16.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				30 Lembaga	17.625.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Organisasi Keagamaan, Rumah Ibadah, ASN dan Masyarkat Kalimantan Utara		24.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	-	-			-	17.194.929.571,00			-	-	Mahasiswa, Organisasi Kesehatan, Masyarakat Kalimantan Utara	-	23.200.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				4 Dokumen	16.614.999.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Mahasiswa, Organisasi Kesehatan, Masyarakat Kalimantan Utara		20.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				6 Dokumen	279.929.741,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Mahasiswa, Organisasi Kesehatan, Masyarakat Kalimantan Utara		2.200.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				4 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Mahasiswa, Organisasi Kesehatan, Masyarakat Kalimantan Utara		1.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	*Persentase Layanan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang difasilitasi*	-			100 Persen	1.140.000.000,00			-	-	Organisasi Masyarakat, Pemuda, Msyarkat Kalimantan Utara	-	2.500.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				4 Dokumen	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Organisasi Masyarakat, Pemuda, Msyarkat Kalimantan Utara		1.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				6 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Organisasi Masyarakat, Pemuda, Msyarkat Kalimantan Utara		1.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				4 Dokumen	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Organisasi Masyarakat, Pemuda, Msyarkat Kalimantan Utara		500.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO ORGANISASI						**2.098.694.228,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.098.694.228,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.098.694.228,00**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**633.039.228,00**						**-**	**0,00**	
		[Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**633.039.228,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	110.000.000,00			-	-	ASN Biro Organisasi	-	0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	ASN Biro Organisasi		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			12 bulan	32.000.000,00			-	-	ASN Biro Organisasi	-	0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	ASN Biro Organisasi		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	ASN Biro Organisasi		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	363.239.228,00			-	-	OPD dan ASN Biro Organisasi	-	0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	95.239.228,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	OPD dan ASN Biro Organisasi		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	OPD dan ASN Biro Organisasi		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	OPD dan ASN Biro Organisasi		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit BMD yang disediakan*	-			1 Unit	25.000.000,00			-	-	ASN Biro Organisasi	-	0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	ASN Biro Organisasi		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintan Daerah yang disediakan*	-			12 bulan	47.500.000,00			-	-	-	-	0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	-		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	45.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	-		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Unit Kerja Yang Dipelihara*	-			25 Unit	55.300.000,00			-	-	ASN Biro Organisasi	-	0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	33.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	ASN Biro Organisasi		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	ASN Biro Organisasi		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	ASN Biro Organisasi		0,00	BIRO ORGANISASI
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**						**1.465.655.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah]	**Indeks Kematangan Organisasi**	**46.10**	**37.40**	**37.40**	**38.90**	**1.465.655.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Persentase Perangkat Daerah yang mendapat fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan Persentase Perangkat Daerah Yang Mendapat Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan*	-			100 Persentase 100 Persen	401.480.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	OPD dan ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan utara	-	0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	96.230.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	OPD dan ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan utara		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	64.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	OPD dan ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan utara		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				39 Dokumen	240.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	OPD dan ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan utara		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	-	-			-	1.064.175.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	OPD dan ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan utara	-	0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				34 Dokumen	170.175.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	OPD dan ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan utara		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				34 Dokumen	277.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	OPD dan ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan utara		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	166.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	OPD dan ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan utara		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				10 Dokumen	172.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	OPD dan ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan utara		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				1 Dokumen	277.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	OPD dan ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan utara		0,00	BIRO ORGANISASI
		BIRO UMUM						**120.453.360.787,00**							**124.992.447.137,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**120.453.360.787,00**							**124.992.447.137,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**120.453.360.787,00**							**124.992.447.137,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**120.453.360.787,00**						**-**	**124.992.447.137,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Internal]	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Umum**	**87.20**	**86.74**	**83**	**86.80**	**120.453.360.787,00**	-	-	-	-	-	-	**124.992.447.137,00**	-
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Regulasi*	-			12 Laporan	54.295.540.690,00			-	-	ASN Sekretariat Daerah	-	56.896.889.920,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				462 Orang/ Bulan	53.048.650.690,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Sekretariat Daerah		55.649.999.920,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1.246.890.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat Daerah		1.246.890.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Terkelola Sesuai Regulasi*	-			12 Laporan	310.000.000,00			-	-	BMD Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan BMD Sekretariat Daerah	-	300.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BMD Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan BMD Sekretariat Daerah		50.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BMD Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan BMD Sekretariat Daerah		50.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BMD Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan BMD Sekretariat Daerah		50.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BMD Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan BMD Sekretariat Daerah		50.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BMD Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan BMD Sekretariat Daerah		50.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BMD Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan BMD Sekretariat Daerah		50.000.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Sesuai Standar Peraturan Yang Berlaku*	-			12 Laporan	805.668.000,00			-	-	ASN Sekretariat Daerah, PTT Biro Umum dan Kepala Perangkat Daerah	-	812.538.900,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	137.418.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat Daerah, PTT Biro Umum dan Kepala Perangkat Daerah		144.288.900,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				26 Orang	446.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat Daerah, PTT Biro Umum dan Kepala Perangkat Daerah		446.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	222.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Sekretariat Daerah, PTT Biro Umum dan Kepala Perangkat Daerah		222.250.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Laporan	17.847.882.589,00			-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ASN Sekretariat Daerah dan PTT Biro Umum Sekretariat Daerah	-	18.459.158.475,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	187.697.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ASN Sekretariat Daerah dan PTT Biro Umum Sekretariat Daerah		187.697.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	164.550.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ASN Sekretariat Daerah dan PTT Biro Umum Sekretariat Daerah		164.550.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	250.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ASN Sekretariat Daerah dan PTT Biro Umum Sekretariat Daerah		250.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	713.584.645,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ASN Sekretariat Daerah dan PTT Biro Umum Sekretariat Daerah		713.584.645,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	203.897.396,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ASN Sekretariat Daerah dan PTT Biro Umum Sekretariat Daerah		203.897.396,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				200 Laporan	1.700.007.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ASN Sekretariat Daerah dan PTT Biro Umum Sekretariat Daerah		1.700.007.500,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	14.578.146.048,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ASN Sekretariat Daerah dan PTT Biro Umum Sekretariat Daerah		15.189.421.934,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ASN Sekretariat Daerah dan PTT Biro Umum Sekretariat Daerah		50.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Dilaksanakan Sesuai Standar Regulasi*	-			12 Unit	3.540.466.644,00			-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan ASN Sekretariat Daerah	-	3.142.056.644,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	532.800.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan ASN Sekretariat Daerah		559.440.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	560.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan ASN Sekretariat Daerah		535.500.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan ASN Sekretariat Daerah		50.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	1.736.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan ASN Sekretariat Daerah		1.335.450.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	661.666.644,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan ASN Sekretariat Daerah		661.666.644,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Laporan	6.372.231.290,00			-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Perangkat Daerah, PTT Biro Umum dan ASN Sekretariat Daerah	-	6.554.669.103,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	200.500.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Perangkat Daerah, PTT Biro Umum dan ASN Sekretariat Daerah		200.500.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2.500.000.123,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Perangkat Daerah, PTT Biro Umum dan ASN Sekretariat Daerah		2.625.000.129,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.148.756.151,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Perangkat Daerah, PTT Biro Umum dan ASN Sekretariat Daerah		1.206.193.958,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.522.975.016,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Perangkat Daerah, PTT Biro Umum dan ASN Sekretariat Daerah		2.522.975.016,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara*	-			317 Unit	14.767.422.590,00			-	-	BMD Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, BMD Sekretariat Daerah dan Masyarakat	-	15.434.861.935,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	1.615.225.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BMD Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, BMD Sekretariat Daerah dan Masyarakat		1.695.986.250,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	8.771.855.540,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BMD Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, BMD Sekretariat Daerah dan Masyarakat		9.210.448.317,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				264 Unit	1.418.635.700,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BMD Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, BMD Sekretariat Daerah dan Masyarakat		1.418.635.700,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2.961.706.350,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BMD Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, BMD Sekretariat Daerah dan Masyarakat		3.109.791.668,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Sesuai Regulasi*	-			12 Laporan	2.951.685.634,00			-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-	2.851.685.642,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	251.879.704,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		251.879.712,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	600.006.088,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		500.006.088,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	500.002.646,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		500.002.646,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/ Bulan	1.599.797.196,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		1.599.797.196,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*	-			12 Laporan	19.562.463.350,00			-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Perangkat Daerah, PTT Biro Umum dan ASN Sekretariat Daerah	-	20.540.586.518,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				250 Paket	6.500.047.410,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Perangkat Daerah, PTT Biro Umum dan ASN Sekretariat Daerah		6.825.049.781,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				200 Paket	6.416.000.145,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Perangkat Daerah, PTT Biro Umum dan ASN Sekretariat Daerah		6.736.800.152,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				250 Paket	6.646.415.795,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Perangkat Daerah, PTT Biro Umum dan ASN Sekretariat Daerah		6.978.736.585,00	BIRO UMUM
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						**1.798.902.308,00**							**4.327.840.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.798.902.308,00**							**4.327.840.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.798.902.308,00**							**4.327.840.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**783.167.808,00**						**-**	**1.709.840.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**86.74**	**100**	**100**	**783.167.808,00**	-	-	-	-	-	-	**1.709.840.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	155.040.000,00			-	-	ASN	-	155.040.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	155.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		155.040.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	90.000.000,00			-	-	ASN	-	241.500.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		69.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		172.500.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	291.627.808,00			-	-	ASN	-	701.500.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	61.627.808,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		80.500.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		46.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		575.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	165.000.000,00			-	-	-	-	264.500.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	80.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		92.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		172.500.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	500.000,00			-	-	ASN	-	169.050.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		2.300.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		17.250.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		149.500.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	81.000.000,00			-	-	-	-	178.250.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				18 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		69.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.250.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				16 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		46.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.	**4.01.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**						**1.015.734.500,00**						**-**	**2.618.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa]	**Tingkat Kematangan UKPBJ** **Tingkat Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ** **Tingkat Pemanfaatan Sistem Pengadaan**	**19.50** **30.00** **40.00**	**19.22** **30.00** **40.00**	**19.22** **30.00** **40.00**	**19.30** **30.00** **40.00**	**1.015.734.500,00**	-	-	-	-	-	-	**2.618.000.000,00**	-
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	359.994.500,00			-	-	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	-	1.121.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				4 Laporan	119.995.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa		385.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa		368.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				4 Laporan	119.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa		368.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-			-	265.700.000,00			-	-	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	-	427.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				5 Laporan	145.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa		220.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				4 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa		207.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	390.040.000,00			-	-	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	-	1.070.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				30 Orang	120.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa		580.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				3 Dokumen	119.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa		220.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				4 Dokumen	149.995.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa		270.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN						**7.495.427.459,00**							**10.098.405.244,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.495.427.459,00**							**10.098.405.244,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**7.495.427.459,00**							**10.098.405.244,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**7.495.427.459,00**						**-**	**10.098.405.244,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Internal]	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pimpinan**	**87.25**	**86.57**	**86.75**	**86.75**	**7.495.427.459,00**	-	-	-	-	-	-	**10.098.405.244,00**	-
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	176.000.000,00			-	-	ASN Di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan	-	238.487.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	176.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan		238.487.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	246.000.000,00			-	-	ASN Di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan	-	246.840.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	246.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan		246.840.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	293.000.000,00			-	-	ASN Di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan	-	414.288.900,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	33.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan		144.288.900,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan		35.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan		235.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	1.939.827.459,00			-	-	ASN di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan	-	2.282.488.936,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan		7.875.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	521.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan		547.968.750,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan		26.250.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	244.227.459,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan		256.101.572,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	133.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan		157.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.009.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan		1.286.793.614,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Yang Diadakan*	-			22 Unit	412.000.000,00			-	-	ASN Di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan	-	885.250.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	207.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan		420.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			-				-	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan		250.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Paket	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan		84.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan		131.250.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Jumlah Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persentase 12 Bulan	1.235.000.000,00			-	-	ASN Di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan-	-	1.637.598.408,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan-		20.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan-		10.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan-		52.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.155.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan-		1.555.098.408,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya*	-			12 Bulan 623 Unit	150.000.000,00			-	-	Barang Milik Daerah yang Di kelola Biro Admnistrasi Pimpinan	-	173.250.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Barang Milik Daerah yang Di kelola Biro Admnistrasi Pimpinan		31.500.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Barang Milik Daerah yang Di kelola Biro Admnistrasi Pimpinan		99.750.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	39.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Barang Milik Daerah yang Di kelola Biro Admnistrasi Pimpinan		42.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan*	-			100 Persen	1.088.600.000,00			-	-	ASN Di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan	-	1.470.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan														
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				12 Dokumen	246.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan		300.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	449.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan		550.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				12 Laporan	392.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan		620.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	*Persentase Fasilitasi Keprotokolan*	-			100 Persen	1.955.000.000,00			-	-	ASN Di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan	-	2.750.202.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				12 Laporan	493.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan		840.315.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Laporan	416.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan		692.937.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				12 Laporan	1.046.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Di Lingkungan Biro Admnistrasi Pimpinan		1.216.950.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
		BIRO PEREKONOMIAN						**2.398.536.809,00**							**4.629.714.214,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.398.536.809,00**							**4.629.714.214,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.398.536.809,00**							**4.629.714.214,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**780.019.361,00**						**-**	**1.387.610.164,00**	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**0**	**100**	**100**	**780.019.361,00**	-	-	-	-	-	-	**1.387.610.164,00**	-
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai regulasi*	-			12 Dokumen	113.400.000,00			-	-	Biro Perekonomian	-	142.560.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	113.400.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Biro Perekonomian		142.560.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku*	-			12 Dokumen	38.083.111,00			-	-	ASN dan PTT Biro Perekonomian	-	262.250.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan PTT Biro Perekonomian		12.250.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	18.083.111,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan PTT Biro Perekonomian		250.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi umum perangkat daerah*	-			12 Laporan	446.128.823,00			-	-	Biro Perekonomian	-	478.421.388,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Biro Perekonomian		0,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	96.950.608,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Biro Perekonomian		181.578.888,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14.178.215,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Biro Perekonomian		20.642.500,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Biro Perekonomian		1.200.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	335.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Biro Perekonomian		275.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah BMD yang diadakan*	-			2 Unit	16.000.000,00			-	-	Biro Perekonomian	-	102.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	16.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Biro Perekonomian		102.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			12 Laporan	84.562.142,00			-	-	ASN dan PTT Biro Perekonomian	-	305.388.776,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	5.232.858,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan PTT Biro Perekonomian		8.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	14.098.340,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan PTT Biro Perekonomian		3.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	65.230.944,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN dan PTT Biro Perekonomian		294.388.776,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jasa Pemeliharaannya*	-			22 Unit	81.845.285,00			-	-	Biro Perekonomian	-	96.990.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				16 Unit	73.935.285,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Biro Perekonomian		85.630.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	7.910.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Biro Perekonomian		11.360.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
2.	**4.01.06**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**1.618.517.448,00**						**-**	**3.242.104.050,00**	
		[Meningkatnya kebijakan di bidang pengelolaan perekonomian]	**Persentase rumusan kebijakan perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan**	**100**	**-**	**-**	**100**	**1.618.517.448,00**	-	-	-	-	-	-	**3.242.104.050,00**	-
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian*	-			8 Dokumen	461.819.511,00			-	-	Kabupaten/Kota	-	923.718.250,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				4 Dokumen	233.346.644,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kabupaten/Kota		644.766.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				4 Dokumen	228.472.867,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kabupaten/Kota		278.952.250,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam*	-			3 Dokumen	601.777.133,00			-	-	Beberapa OPD dan Bagian Perekonomian Kabupaten/Kota	-	798.206.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				1 Dokumen	204.138.291,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Beberapa OPD dan Bagian Perekonomian Kabupaten/Kota		351.845.350,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	196.654.972,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Beberapa OPD dan Bagian Perekonomian Kabupaten/Kota		193.884.550,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				1 Dokumen	200.983.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Beberapa OPD dan Bagian Perekonomian Kabupaten/Kota		252.476.100,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD*	-			5 Dokumen	554.920.804,00			-	-	BUMD dan BLUD	-	1.520.179.800,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				1 Dokumen	104.261.449,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BUMD dan BLUD		414.139.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				1 Dokumen	178.448.074,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BUMD dan BLUD		531.361.550,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				1 Dokumen	93.239.921,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BUMD dan BLUD		154.652.250,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				1 Dokumen	89.114.975,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BUMD dan BLUD		267.165.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD				1 Dokumen	89.856.385,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	BUMD dan BLUD		152.862.000,00	BIRO PEREKONOMIAN
		SEKRETARIAT DPRD						**113.293.301.349,00**							**162.350.547.362,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**113.293.301.349,00**							**162.350.547.362,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**113.293.301.349,00**							**162.350.547.362,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**56.093.301.349,00**						**-**	**74.549.697.612,00**	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**90**	**0** **80**	**80**	**82**	**56.093.301.349,00**	-	-	-	-	-	-	**74.549.697.612,00**	-
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun*	-			3 Dokumen	250.000.000,00			-	-	Sekretariat DPRD	-	350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Laporan	11.900.000.000,00			-	-	Sekretariat DPRD	-	17.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ Bulan	11.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		16.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	650.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				100 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			12 Laporan	200.000.000,00			-	-	Sekretariat DPRD	-	600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Laporan	4.025.000.000,00			-	-	Sekretariat DPRD	-	6.930.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	200.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				95 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Laporan	7.830.000.000,00			-	-	Sekretariat DPRD	-	9.825.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3000 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	3.500.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		4.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		4.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya*	-			43 Unit	3.388.301.349,00			-	-	Sekretariat DPRD	-	8.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				44 Unit	1.388.301.349,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Sekretariat DPRD		2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Sekretariat DPRD		6.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*	-			12 Laporan	27.500.000.000,00			-	-	DPRD	-	30.144.697.612,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				35 Orang/ Bulan	25.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		26.644.697.612,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				150 Paket	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				35 Orang	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	*Jumlah Laporan Layanan Adminstrasi DPRD*	-			12 Laporan	1.000.000.000,00			-	-	DPRD	-	1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	DPRD		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**57.200.000.000,00**						**-**	**87.800.849.750,00**	
		[Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan]	**Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N** **Persentase Penetapan Ranperda Tahun N**	**100** **88**	**0** **100** **30**	**100** **78**	**100** **80**	**57.200.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**87.800.849.750,00**	-
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	*Jumlah Rencana Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*	-			5 Dokumen	12.350.000.000,00			-	-	DPRD	-	19.050.849.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPRD		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				5 Dokumen	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	-	-	DPRD		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				5 Dokumen	1.650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		1.650.849.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPRD		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				10500 Orang	8.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPRD		15.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan]	**Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**88**	**0** **40.48**	**78**	**80**	**57.200.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**87.800.849.750,00**	-
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Jumlah Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran*	-			5 Kegiatan	2.000.000.000,00			-	-	DPRD	-	3.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				5 Dokumen	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		3.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*	-			12 Laporan	1.500.000.000,00			-	-	DPRD	-	3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	-	-	DPRD		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	-	-	DPRD		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD*	-			12 Laporan	6.250.000.000,00			-	-	DPRD	-	8.050.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan]	**Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N** **Persentase Penetapan Ranperda Tahun N**	**100** **88**	**0** **100** **30**	**100** **78**	**100** **80**	**57.200.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**87.800.849.750,00**	-
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				13 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				600 Dokumen	3.350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*	-			12 Laporan	27.000.000.000,00			-	-	DPRD	-	35.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				3000 Laporan	12.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		15.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan]	**Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**88**	**0** **40.48**	**78**	**80**	**57.200.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**87.800.849.750,00**	-
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				105 Dokumen	12.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	DPRD		15.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan]	**Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N** **Persentase Penetapan Ranperda Tahun N**	**100** **88**	**0** **100** **30**	**100** **78**	**100** **80**	**57.200.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**87.800.849.750,00**	-
	4.02.02.1.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				8750 Orang	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPRD		5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD*	-			12 Laporan	8.100.000.000,00			-	-	DPRD	-	19.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				628 Dokumen	7.850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DPRD		18.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				96 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPRD		600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPRD		600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN						**26.983.539.001,00**							**29.040.936.163,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**26.983.539.001,00**							**29.040.936.163,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**25.683.552.126,00**							**27.643.321.163,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**18.210.260.943,00**						**-**	**18.783.751.096,00**	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**18.210.260.943,00**	-	-	-	-	-	-	**18.783.751.096,00**	-
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase cakupan layanan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.059.728.500,00			-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kaltara dan Kabupaten/Kota	-	1.032.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	70.009.500,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kaltara dan Kabupaten/Kota		170.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	140.554.500,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kaltara dan Kabupaten/Kota		262.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	810.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kaltara dan Kabupaten/Kota		550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.210.260.943,00**	-	-	-	-	-	-	**18.783.751.096,00**	-
	5.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	39.164.500,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kaltara dan Kabupaten/Kota		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**18.210.260.943,00**	-	-	-	-	-	-	**18.783.751.096,00**	-
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase cakupan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	13.429.876.712,00			-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kaltara	-	13.544.076.712,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				84 Orang/ Bulan	12.769.076.712,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kaltara		12.769.076.712,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	648.800.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kaltara		645.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kaltara		130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 Persen	446.300.000,00			-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kaltara dan Kabupaten/Kota	-	480.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	42.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kaltara dan Kabupaten/Kota		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	201.600.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kaltara dan Kabupaten/Kota		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	202.700.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kaltara dan Kabupaten/Kota		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase cakupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.443.814.243,00			-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara	-	1.746.610.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.264.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara		15.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	234.800.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara		95.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	45.705.510,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara		85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	284.402.300,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara		260.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	315.610.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara		365.610.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.330.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara		15.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	504.808.433,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara		810.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	51.894.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase cakupan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	50.000.000,00			-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara	-	160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	40.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase cakupan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	1.199.134.528,00			-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara	-	1.164.140.384,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12.400.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara		14.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	102.853.200,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.083.881.328,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara		1.039.440.384,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase cakupan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	581.406.960,00			-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara	-	656.924.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	45.801.600,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara		41.335.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	458.605.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara		530.589.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	5.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara		35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	72.000.360,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kaltara		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**3.189.200.712,00**						**-**	**4.402.238.500,00**	
		[Terlaksananya Kesesuaian Isu strategis dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran, indikator serta target pembangunan daerah]	**Persentase keselarasan Program RKPD dengan RPJMD** **Tingkat capaian program pembangunan daerah**	**100** **93**	**85,83** **90**	**87** **90**	**88** **92**	**3.189.200.712,00**	-	-	-	-	-	-	**4.402.238.500,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu*	-			100 Persen	1.436.240.140,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Kepala Daerah, Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, ASN Provinsi Kaltara dan Masyarakat	-	2.450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	167.728.720,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Kepala Daerah, Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, ASN Provinsi Kaltara dan Masyarakat		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	191.928.720,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Kepala Daerah, Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, ASN Provinsi Kaltara dan Masyarakat		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				1 Berita Acara	176.560.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kepala Daerah, Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, ASN Provinsi Kaltara dan Masyarakat		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	900.021.800,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Kepala Daerah, Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, ASN Provinsi Kaltara dan Masyarakat		1.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
		[Meningkatnya tata kelola data pembangunan daerah]	**Tingkat keterisian daftar data pembangunan daerah**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.189.200.712,00**	-	-	-	-	-	-	**4.402.238.500,00**	-
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*persentase pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah* *Persentase data pembangunan yang diperbarui secara berkala*	-			87 Persen 80 Persen	698.390.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, ASN Provinsi Kalimantan Utara, dan Masyarakat	-	928.390.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				94 Orang	366.820.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, ASN Provinsi Kalimantan Utara, dan Masyarakat		516.820.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				3 Buku	331.570.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, ASN Provinsi Kalimantan Utara, dan Masyarakat		411.570.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
		[Meningkatnya capaian program pembangunan daerah]	**Persentase keselarasan Program RKPD dengan RPJMD** **Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah** **Persentase rekomendasi hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah yang di tindaklanjuti**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.189.200.712,00**	-	-	-	-	-	-	**4.402.238.500,00**	-
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Kabupaten/ Kota terhadap sasaran pembangunan Provinsi* *Persentase rekomendasi hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah yang di tindaklanjuti*	-			100 Persen 100 Persen	1.054.570.572,00			-	-	Perangkat Daerah, Kabupaten/ Kota Lingkup Provinsi Kalimantan Utara	-	1.023.848.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	141.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah, Kabupaten/ Kota Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		131.998.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah														
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				3 Kerja Sama	220.920.072,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah, Kabupaten/ Kota Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		207.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	446.000.500,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Perangkat Daerah, Kabupaten/ Kota Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		508.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				10 Dokumen	246.650.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah, Kabupaten/ Kota Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		176.650.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**4.284.090.471,00**						**-**	**4.457.331.567,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya keselarasan perencanaan provinsi dan nasional]	**Persentase keselarasan perencanaan PD dengan perencanaan pembangunan daerah** **Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan provinsi dengan nasional bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** **Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan provinsi dengan nasional bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** **Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan provinsi dengan nasional bidang Perekonomian dan SDA**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.284.090.471,00**	-	-	-	-	-	-	**4.457.331.567,00**	-
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase keselarasan Subkegiatan Renja dengan Renstra PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	-			100 Persen	1.372.011.280,00			-	-	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara	-	2.140.340.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	54.250.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		68.740.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				2 Laporan	53.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		88.370.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				4 Laporan	87.800.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		687.320.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				2 Laporan	176.800.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	64.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		115.830.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	68.400.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		117.830.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	111.130.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		176.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	756.131.280,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		785.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase keselarasan Subkegiatan Renja dengan Renstra PD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*	-			100 Persen	1.984.587.624,00			-	-	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara	-	989.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	19.928.625,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				2 Laporan	99.996.293,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				4 Laporan	69.999.391,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				2 Laporan	1.114.639.065,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		209.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	90.059.450,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				2 Laporan	100.138.650,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				4 Laporan	90.080.750,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				5 Laporan	399.745.400,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase keselarasan Subkegiatan Renja dengan Renstra PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*	-			100 Persen	927.491.567,00			-	-	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara	-	1.327.491.567,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	19.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		19.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Laporan	35.250.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		35.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	114.250.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		164.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				5 Laporan	493.321.567,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		693.321.567,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	12.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		12.420.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				2 Laporan	12.350.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		12.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				4 Laporan	11.900.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		11.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				2 Laporan	228.500.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		378.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**1.299.986.875,00**							**1.397.615.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						**662.366.875,00**						**-**	**730.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas riset di daerah]	**Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah** **Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah** **Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan**	**-** **88** **91**	**-** **45**	**-** **50** **80**	**60** **80** **85**	**662.366.875,00**	-	-	-	-	-	-	**730.000.000,00**	-
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*persentase kegiatan riset daerah yang berorientasi pada isu-isu strategis lokal bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*	-			100 Persen	83.160.000,00			-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat	-	180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan														
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan				1 Rekomendasi	83.160.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD Prov. Kaltara, Kab/Kota, dan Masyarakat		180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**662.366.875,00**	-	-	-	-	-	-	**730.000.000,00**	-
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*persentase kegiatan riset daerah yang berorientasi pada isu-isu strategis lokal Bidang Ekonomi dan Pembangunan*	-			100 Persen	284.060.000,00			-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kepala Daerah, Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Kabupaten/ Kota, Badan Usaha, UMKM dan Masyarakat	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	144.380.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan	Kepala Daerah, Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Kabupaten/ Kota, Badan Usaha, UMKM dan Masyarakat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	139.680.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Kepala Daerah, Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Kabupaten/ Kota, Badan Usaha, UMKM dan Masyarakat		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
		[Meningkatnya kualitas riset di daerah]	**Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah** **Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah** **Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan**	**-** **88** **91**	**-** **45**	**-** **50** **80**	**60** **80** **85**	**662.366.875,00**	-	-	-	-	-	-	**730.000.000,00**	-
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah Hasil Riset yang didiseminasikan*	-			2 Riset Daerah	295.146.875,00			-	-	Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi, Badan Usaha, NGO dan Masyarakat	-	550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	19.315.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi, Badan Usaha, NGO dan Masyarakat		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	275.831.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi, Badan Usaha, NGO dan Masyarakat		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
2.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**						**637.620.000,00**						**-**	**667.615.000,00**	
		[Meningkatnya tata kelola Inovasi di daerah]	**Persentase jumlah inovasi daerah yang dilaporkan dalam Innovative government award** **Persentase kematangan Inovasi PD** **Tingkat kematangan Inovasi daerah**	**90** **95**	**-** **30** **48**	**50** **75**	**60** **80**	**637.620.000,00**	-	-	-	-	-	-	**667.615.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.03.1.02	Invensi dan Inovasi	*Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan dan pengembangan inovasi daerah* *Jumlah peserta lomba inovasi daerah dari pemerintah, masyarakat, industri, dan badan usaha di daerah*	-			42 Perangkat Daerah 45 Inovasi	637.620.000,00			-	-	Perangkat Daerah, ASN Lingkup Pemerintah Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, UMKM, Badan Usaha dan Masyarakat	-	667.615.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.03.1.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				1 Laporan	488.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah, ASN Lingkup Pemerintah Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, UMKM, Badan Usaha dan Masyarakat		518.060.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.03.1.02.0004	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi														
			Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi				1 Pelatihan	30.500.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah, ASN Lingkup Pemerintah Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, UMKM, Badan Usaha dan Masyarakat		30.495.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.03.1.02.0009	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi														
			Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi				1 Laporan	119.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah, ASN Lingkup Pemerintah Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, UMKM, Badan Usaha dan Masyarakat		119.060.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**50.252.814.608,00**							**80.393.765.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**50.252.814.608,00**							**80.393.765.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**50.252.814.608,00**							**80.393.765.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**47.752.814.608,00**						**-**	**75.793.765.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**0**	**0**	**100**	**47.752.814.608,00**	-	-	-	-	-	-	**75.793.765.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai Standarisasi Regulasi*	-			2 Dokumen	80.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	BAPENDA dan UPTD. BAPENDA	-	700.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	BAPENDA dan UPTD. BAPENDA		350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	BAPENDA dan UPTD. BAPENDA		350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi*	-			12 Dokumen	42.858.814.608,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN dan Non ASN	-	57.723.765.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				215 Orang/ Bulan	42.508.814.608,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN dan Non ASN		57.323.765.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN dan Non ASN		400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*BMD perangkat daerah yang terkelola sesuai regulasi*	-			1 Dokumen	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	BMD	-	100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	BMD		100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya administrasi pelayanan pendapatan retribusi perangkat daerah*	-			2 Dokumen	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	OPD Pemangku Retribusi	-	100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				0 Dokumen	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	OPD Pemangku Retribusi		100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai standarisasi peraturan yang berlaku*	-			12 Dokumen	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN dan Non ASN	-	1.450.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN dan Non ASN		300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN dan Non ASN		400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN dan Non ASN		500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN dan Non ASN		250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	2.521.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	PNS DAN NON PNS	-	3.735.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	5.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	PNS DAN NON PNS		15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	60.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	PNS DAN NON PNS		555.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	PNS DAN NON PNS		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	900.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	PNS DAN NON PNS		950.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	PNS DAN NON PNS		900.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				365 Dokumen	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	PNS DAN NON PNS		15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	750.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	PNS DAN NON PNS		1.300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah BMD yang disediakan*	-			4 Paket	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-	-	6.930.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		550.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		180.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		3.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		2.550.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang*	-			12 Dokumen	1.058.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-	-	1.730.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		850.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		120.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	250.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		750.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*BMD yang terpelihara*	-			33 UNIT	1.235.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-	-	3.325.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	25.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	400.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	10.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				3 Unit	450.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		450.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		1.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	350.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah														
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				0 Ha	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		1.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**2.500.000.000,00**						**-**	**4.600.000.000,00**	
		[Peningkatan Capaian Realisasi PAD Melalui Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi]	**Capaian Realisasi PAD Perangkat Daerah**	**941537745000**	**0**	**0**	**798842816000**	**2.500.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**4.600.000.000,00**	-
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Pengelolaan Penapatan Daerah yang sesuai Regulasi*	-			12 Dokumen	2.500.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	WAJIB PAJAK / WAJIB RETRIBUSI	-	4.600.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	800.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	WAJIB PAJAK / WAJIB RETRIBUSI		1.400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	700.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	WAJIB PAJAK / WAJIB RETRIBUSI		1.200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	1.000.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	WAJIB PAJAK / WAJIB RETRIBUSI		1.750.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		[Peningkatan Transaksi Non Tunai Realisasi PAD]	**Persentase Transaksi Non Tunai Terhadap Realisasi PAD**	**68**	**50**	**55**	**60**	**2.500.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**4.600.000.000,00**	-
	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	WAJIB PAJAK / WAJIB RETRIBUSI		250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT BAPENDA BULUNGAN						**3.799.999.998,00**							**4.725.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.799.999.998,00**							**4.725.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**3.799.999.998,00**							**4.725.000.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**3.139.999.998,00**						**-**	**4.015.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Nilai Survei Kepuasan Masyarakat**	**92.90**	**90**	**90.50**	**90.90**	**3.139.999.998,00**	-	-	-	-	-	-	**4.015.000.000,00**	-
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	-			12 Dokumen	165.000.000,00			-	-	ASN UPTD Bapenda Wilayah Bulungan	-	0,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	165.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN UPTD Bapenda Wilayah Bulungan		0,00	UPT BAPENDA BULUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD Bapenda Wilayah Bulungan	-	50.000.000,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD Bapenda Wilayah Bulungan		50.000.000,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN UPTD Bapenda Wilayah Bulungan		0,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah*	-			100 %	780.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD Bapenda Wilayah Bulungan	-	735.000.000,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	10.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD Bapenda Wilayah Bulungan		0,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	150.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD Bapenda Wilayah Bulungan		60.000.000,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	15.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD Bapenda Wilayah Bulungan		15.000.000,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	150.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD Bapenda Wilayah Bulungan		150.000.000,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	55.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD Bapenda Wilayah Bulungan		60.000.000,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				700 Dokumen	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD Bapenda Wilayah Bulungan		0,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD Bapenda Wilayah Bulungan		450.000.000,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.139.999.998,00**	-	-	-	-	-	-	**4.015.000.000,00**	-
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah BMD yang disediakan*	-			2 Paket	471.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD Bapenda Wilayah Bulungan	-	470.000.000,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
	5.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	450.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD Bapenda Wilayah Bulungan		450.000.000,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Nilai Survei Kepuasan Masyarakat**	**92.90**	**90**	**90.50**	**90.90**	**3.139.999.998,00**	-	-	-	-	-	-	**4.015.000.000,00**	-
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	21.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD Bapenda Wilayah Bulungan		20.000.000,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	-			12 Laporan	824.000.000,00			-	-	ASN UPTD Bapenda Wilayah Bulungan	-	1.660.000.000,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7.500.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN UPTD Bapenda Wilayah Bulungan		0,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	210.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN UPTD Bapenda Wilayah Bulungan		210.000.000,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	606.500.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN UPTD Bapenda Wilayah Bulungan		1.450.000.000,00	UPT BAPENDA BULUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya*	-			69 Unit	799.999.998,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	BMD UPTD Bapenda Wilayah Bulungan	-	1.100.000.000,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	199.999.998,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	BMD UPTD Bapenda Wilayah Bulungan		300.000.000,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	BMD UPTD Bapenda Wilayah Bulungan		40.000.000,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
	5.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	10.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	BMD UPTD Bapenda Wilayah Bulungan		10.000.000,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	300.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	BMD UPTD Bapenda Wilayah Bulungan		150.000.000,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	250.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	BMD UPTD Bapenda Wilayah Bulungan		600.000.000,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**660.000.000,00**						**-**	**710.000.000,00**	
		[Penigkatan Capaian Realisasi PAD Melalui Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi]	**Capaian Realisasi PAD Perangkat Daerah**	**919299500000**	**0**	**0**	**756309975000**	**660.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**710.000.000,00**	-
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Jumlah Bulan Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah*	-			12 Bulan	660.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Wajib Pajak / Masyarakat Kabupaten Bulungan	-	710.000.000,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Wajib Pajak / Masyarakat Kabupaten Bulungan		250.000.000,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1500 Dokumen SSPD	300.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Wajib Pajak / Masyarakat Kabupaten Bulungan		300.000.000,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	160.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Wajib Pajak / Masyarakat Kabupaten Bulungan		160.000.000,00	UPT BAPENDA BULUNGAN
		UPT BAPENDA TARAKAN						**3.899.999.953,00**							**10.170.800.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.899.999.953,00**							**10.170.800.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**3.899.999.953,00**							**10.170.800.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**3.650.899.953,00**						**-**	**9.291.680.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Nilai SKM Perangkat Daerah**	**92.90**	**90.00**	**90.50**	**90.90**	**3.650.899.953,00**	-	-	-	-	-	-	**9.291.680.000,00**	-
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai regulasi*	-			12 Dokumen	141.120.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN	-	288.000.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	141.120.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN		288.000.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Sesuai Standarisasi Peraturan Yang Berlaku*	-			12 Dokumen	53.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN	-	316.800.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	27.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN		18.000.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.650.899.953,00**	-	-	-	-	-	-	**9.291.680.000,00**	-
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN		0,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN		0,00	UPT BAPENDA TARAKAN
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Nilai SKM Perangkat Daerah**	**92.90**	**90.00**	**90.50**	**90.90**	**3.650.899.953,00**	-	-	-	-	-	-	**9.291.680.000,00**	-
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	26.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN		298.800.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	1.473.462.082,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan	-	2.167.200.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	31.992.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan		33.120.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	372.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan		446.400.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	507.139.820,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan		554.400.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	101.330.262,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan		57.600.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	9.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan		17.280.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				238 Laporan	452.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan		1.058.400.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah BMD yang disediakan*	-			12 Bulan	120.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan	-	594.800.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan		350.000.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan		0,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Paket	120.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan		144.000.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan		14.400.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan		72.000.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan		14.400.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			12 Bulan	1.393.787.875,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan	-	4.366.080.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	19.950.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan		31.680.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	230.326.075,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan		360.000.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	199.800.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan		230.400.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	943.711.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan		3.744.000.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.650.899.953,00**	-	-	-	-	-	-	**9.291.680.000,00**	-
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jasa Pemeliharaannya*	-			12 Bulan	469.529.996,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan	-	1.558.800.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan		0,00	UPT BAPENDA TARAKAN
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Nilai SKM Perangkat Daerah**	**92.90**	**90.00**	**90.50**	**90.90**	**3.650.899.953,00**	-	-	-	-	-	-	**9.291.680.000,00**	-
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	275.529.996,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan		1.263.600.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.650.899.953,00**	-	-	-	-	-	-	**9.291.680.000,00**	-
	5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan		0,00	UPT BAPENDA TARAKAN
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Nilai SKM Perangkat Daerah**	**92.90**	**90.00**	**90.50**	**90.90**	**3.650.899.953,00**	-	-	-	-	-	-	**9.291.680.000,00**	-
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan		14.400.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.650.899.953,00**	-	-	-	-	-	-	**9.291.680.000,00**	-
	5.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan		0,00	UPT BAPENDA TARAKAN
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Nilai SKM Perangkat Daerah**	**92.90**	**90.00**	**90.50**	**90.90**	**3.650.899.953,00**	-	-	-	-	-	-	**9.291.680.000,00**	-
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	56.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan		187.200.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	72.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan		14.400.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	66.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	UPTD Bapenda Tarakan		79.200.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**249.100.000,00**						**-**	**879.120.000,00**	
		[MENINGKATNYA CAPAIAN PAD MELALUI UPAYA INTENSIFIKASI DAN EKSETENSIFIKASI]	**Capaian Realisasi PAD Perangkat Daerah**	**919299500000**	**0**	**0**	**756309975000**	**249.100.000,00**	-	-	-	-	-	-	**879.120.000,00**	-
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Pengelolaan Pendapatan Daerah yang sesuai Regulasi*	-			12 Dokumen	249.100.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Wajib Pajak	-	879.120.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				0 Laporan	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Wajib Pajak		270.720.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				0 Dokumen SSPD	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Wajib Pajak		323.280.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	249.100.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Wajib Pajak		285.120.000,00	UPT BAPENDA TARAKAN
		UPT BAPENDA NUNUKAN						**3.349.999.947,00**							**5.480.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.349.999.947,00**							**5.480.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**3.349.999.947,00**							**5.480.000.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**2.379.999.947,00**						**-**	**4.255.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Nilai SKM Perangkat Daerah**	**92.90**	**90.00**	**90.50**	**90.90**	**2.379.999.947,00**	-	-	-	-	-	-	**4.255.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai Regulasi*	-			12 Bulan	170.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan	-	200.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	170.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan		200.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian yang sesuai Standar Peraturan yang berlaku*	-			12 Bulan	70.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan	-	100.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				44 Paket	50.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan		75.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	20.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan		25.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	1.060.100.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan	-	1.191.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				21 Paket	11.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan		12.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	110.500.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan		150.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	45.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan		60.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	160.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan		175.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	30.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan		40.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				365 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan		4.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				140 Laporan	700.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan		750.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai Standar Regulasi*	-			0 Unit	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan	-	170.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan		50.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan		10.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan		10.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan		100.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang*	-			12 Bulan	769.899.947,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan	-	1.989.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan		9.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	180.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan		180.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	31.899.947,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan		50.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	550.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan		1.750.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*BMD yang Terpelihara*	-			18 Unit	310.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan	-	605.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	160.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan		380.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan		5.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan		160.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan		30.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN UPTD. Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan		30.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**970.000.000,00**						**-**	**1.225.000.000,00**	
		[Peningkatan Capaian PAD melalui Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi]	**Capaian Realisasi PAD Perangkat Daerah**	**919299500000**	**0**	**0**	**756309975000**	**970.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.225.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Pengelolaan Pendapatan Daerah yang sesuai Regulasi*	-			12 Dokumen	970.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Wajib Pajak	-	1.225.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Wajib Pajak		200.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1500 Dokumen SSPD	150.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Wajib Pajak		250.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	720.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Wajib Pajak		775.000.000,00	UPT BAPENDA NUNUKAN
		UPT BAPENDA MALINAU						**2.241.917.371,00**							**2.991.200.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.221.917.371,00**							**2.941.200.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**2.221.917.371,00**							**2.941.200.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.991.917.371,00**						**-**	**2.657.250.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Nilai Survei Kepuasan Masyarakat**	**92.90**	**90**	**90.50**	**90.90**	**1.991.917.371,00**	-	-	-	-	-	-	**2.657.250.000,00**	-
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Bulan tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	113.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Provinsi Kalimantan Utara	-	200.000.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	113.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Provinsi Kalimantan Utara		200.000.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	250.000.000,00			-	-	Provinsi Kalimantan Utara	-	17.250.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				9 Orang	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Utara		0,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Utara		0,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Utara		17.250.000,00	UPT BAPENDA MALINAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	651.000.000,00			-	-	Provinsi Kalimantan Utara	-	920.000.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	36.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Utara		60.000.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	37.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Utara		100.000.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Utara		0,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	78.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Utara		100.000.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Utara		60.000.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Utara		0,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				240 Laporan	480.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Utara		600.000.000,00	UPT BAPENDA MALINAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah BMD yang disediakan*	-			2 Unit	255.000.000,00			-	-	Provinsi Kalimantan Utara	-	300.000.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Utara		150.000.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Utara		50.000.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Utara		100.000.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Utara		0,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			12 Bulan	551.500.000,00			-	-	Provinsi Kalimantan Utara	-	1.032.000.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Utara		12.000.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Utara		100.000.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	456.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Utara		920.000.000,00	UPT BAPENDA MALINAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			12 Bulan	171.417.371,00			-	-	Provinsi Kalimantan Utara	-	188.000.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Utara		5.000.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	131.417.371,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Utara		138.000.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Utara		40.000.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Kalimantan Utara		5.000.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**230.000.000,00**						**-**	**283.950.000,00**	
		[PENINGKATAN CAPAIAN REALISASI PAD MELALUI UPAYA INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI]	**Capaian Realisasi PAD Perangkat Daerah**	**919299500000**	**0**	**0**	**756309975000**	**230.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**283.950.000,00**	-
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Pengelolaan Pendapatan Daerah yang sesuai Regulasi*	-			12 Dokumen	230.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Provinsi Kalimantan Utara	-	283.950.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Provinsi Kalimantan Utara		65.500.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1200 Dokumen SSPD	68.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Provinsi Kalimantan Utara		141.450.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	122.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Provinsi Kalimantan Utara		77.000.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
	X	**NON URUSAN**						**20.000.000,00**							**50.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**20.000.000,00**							**50.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**20.000.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**50.000.000,00**	-
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah BMD yang disediakan*	-			2 Unit	20.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	UPT BAPENDA MALINAU
	X.XX.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	UPT BAPENDA MALINAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPT BAPENDA TANA TIDUNG						**1.999.999.954,00**							**2.778.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.999.999.954,00**							**2.778.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.999.999.954,00**							**2.778.000.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.772.999.954,00**						**-**	**2.448.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**92.90**	**90**	**90.50**	**90.90**	**1.772.999.954,00**	-	-	-	-	-	-	**2.448.000.000,00**	-
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD BAPENDA KTT	-	115.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD BAPENDA KTT		115.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	71.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-	-	145.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				21 Paket	21.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		0,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	0,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		0,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		145.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	747.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD BAPENDA KTT	-	890.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD BAPENDA KTT		25.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	45.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD BAPENDA KTT		105.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				34 Paket	60.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD BAPENDA KTT		85.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	31.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD BAPENDA KTT		50.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1095 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD BAPENDA KTT		5.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				298 Laporan	600.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD BAPENDA KTT		620.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah BMD Yang disediakan*	-			2 Unit	270.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD BAPENDA KTT	-	90.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD BAPENDA KTT		0,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	20.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD BAPENDA KTT		90.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	250.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD BAPENDA KTT		0,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Layanan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan*	-			12 Bulan	301.999.954,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD BAPENDA KTT	-	598.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD BAPENDA KTT		8.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	45.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD BAPENDA KTT		50.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	249.999.954,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD BAPENDA KTT		540.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya*	-			52 Unit	283.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD BAPENDA KTT	-	610.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD BAPENDA KTT		80.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	168.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD BAPENDA KTT		300.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	30.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD BAPENDA KTT		30.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN UPTD BAPENDA KTT		200.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**227.000.000,00**						**-**	**330.000.000,00**	
		[Peningkatan Capaian Realisasi PAD Melalui Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi]	**Capaian Realisasi PAD Perangkat Daerah**	**919299500000**	**0**	**0**	**756309975000**	**227.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**330.000.000,00**	-
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Sesuai Regulasi*	-			12 Dokumen	227.000.000,00			-	-	Wajib Pajak Kabupaten Tana Tidung	-	330.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	47.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kabupaten Tana Tidung		92.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1500 Dokumen SSPD	80.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kabupaten Tana Tidung		100.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Wajib Pajak Kabupaten Tana Tidung		138.000.000,00	UPT BAPENDA TANA TIDUNG
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**772.458.048.372,00**							**788.596.763.291,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**772.458.048.372,00**							**788.596.763.291,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**772.458.048.372,00**							**788.596.763.291,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**60.633.515.770,00**						**-**	**70.489.427.500,00**	
		[Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah]	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah** **Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**60.633.515.770,00**	-	-	-	-	-	-	**70.489.427.500,00**	-
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja*	-			11 Dokumen	662.006.500,00			-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara	-	890.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	317.691.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara		278.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	12.119.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara		25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	12.119.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara		25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	138.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	169.702.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara		250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60.633.515.770,00**	-	-	-	-	-	-	**70.489.427.500,00**	-
	5.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara		12.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		[Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah]	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah** **Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**60.633.515.770,00**	-	-	-	-	-	-	**70.489.427.500,00**	-
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			2 Urusan	32.060.884.269,00			-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara	-	44.850.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/ Bulan	29.827.226.751,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara		43.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	2.233.657.518,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara		1.850.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			3 Kegiatan	660.500.000,00			-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara	-	435.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				250 Paket	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	355.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara		135.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Bulan Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	6.639.962.661,00			-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Provinsi Kalimantan Utara	-	4.950.080.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	129.680.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Provinsi Kalimantan Utara		129.680.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	4.656.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Provinsi Kalimantan Utara		3.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	510.190.661,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Provinsi Kalimantan Utara		450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	87.792.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Provinsi Kalimantan Utara		65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	325.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Provinsi Kalimantan Utara		325.400.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52 Laporan	930.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Provinsi Kalimantan Utara		980.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			1 Unit	400.000.000,00			-	-	Semua OPD	-	700.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Semua OPD		700.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			2 Urusan	2.707.005.500,00			-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara	-	2.899.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	49.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara		49.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2.658.005.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara		2.850.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan layanan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara*	-			5 Urusan	17.503.156.840,00			-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara	-	15.765.347.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				16 Unit	184.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	397.847.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara		397.847.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	67.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara		67.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	4.479.222.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara		5.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	12.374.446.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh ASN dan Non ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara		10.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**705.174.532.602,00**						**-**	**711.291.085.791,00**	
		[Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu]	**Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu**	**100**	**100**	**100**	**100**	**705.174.532.602,00**	-	-	-	-	-	-	**711.291.085.791,00**	-
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan*	-			118 Dokumen	4.205.058.000,00			-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara	-	4.205.058.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	441.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		441.400.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	420.856.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		420.856.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	215.805.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		215.805.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	228.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		228.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD														
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	245.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		245.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	232.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		232.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	894.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		894.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	257.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		257.400.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	395.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		395.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				2 Dokumen	187.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		187.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				34 Dokumen	210.897.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		210.897.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				2 Dokumen	251.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		251.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi				66 Orang	225.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		225.900.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam mengelola keuangan daerah*	-			5 Kab/Kota	4.168.894.265,00			-	-	Seluruh Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Utara	-	4.168.894.265,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				5 Laporan	703.456.111,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Utara		703.456.111,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				5 Laporan	542.116.099,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Utara		542.116.099,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				5 Laporan	565.385.077,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Utara		565.385.077,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi				5 Dokumen	1.428.829.044,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Utara		1.428.829.044,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan				3 Laporan	929.107.934,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Utara		929.107.934,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase Capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan*	-			100 %	4.050.000.000,00			-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara	-	4.455.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		1.320.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				264 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		330.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		308.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				48 Dokumen	770.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		847.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				4 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		440.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				9 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				2 Dokumen	380.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		418.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		242.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*	-			100 Persen	4.231.063.785,00			-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara	-	4.442.616.974,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				2 Dokumen	461.846.905,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		484.939.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan	438.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		460.845.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1.432.305.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		1.503.920.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				2 Dokumen	269.272.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		282.736.125,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	139.552.130,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		146.529.736,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		630.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				300 Orang	600.437.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		630.459.113,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi														
			Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina				2 Lembaga	288.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		303.187.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Jumlah Laporan pelaksanaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah*	-			12 Dokumen	687.919.516.552,00			-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara	-	693.019.516.552,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.05.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				5 Laporan	222.519.516.552,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		222.519.516.552,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	15.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		20.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				5 Laporan	450.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		450.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Jumlah kegiatan pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah lingkup keuangan daerah*	-			2 Kegiatan	600.000.000,00			-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara	-	1.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi				240 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**6.650.000.000,00**						**-**	**6.816.250.000,00**	
		[Persentase barang milik daerah yang dikelola]	**Persentase barang milik daerah yang dikelola**	**100**	**100**	**100**	**100**	**6.650.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**6.816.250.000,00**	-
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase dokumen laporan dan pembinaan barang milik daerah yang dilaksanakan*	-			100 Persen	6.650.000.000,00			-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara	-	6.816.250.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	569.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		583.737.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	165.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		169.893.750,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	937.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		961.142.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	608.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		623.763.750,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		922.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	617.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		632.937.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1.119.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		1.146.975.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1.127.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		1.155.277.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	403.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		413.075.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				25 Orang	201.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Seluruh OPD di Lingkup Provinsi Kalimantan Utara		206.947.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						**11.393.962.276,00**							**20.470.449.122,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**11.393.962.276,00**							**20.470.449.122,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**11.393.962.276,00**							**20.470.449.122,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**8.094.936.496,00**						**-**	**15.837.502.792,00**	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**0**	**100**	**100**	**8.094.936.496,00**	-	-	-	-	-	-	**15.837.502.792,00**	-
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			2 dokumen	69.516.090,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara	-	175.074.024,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	69.516.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		123.074.024,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		52.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			3 layanan	6.354.978.736,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Sipil Negara	-	7.353.879.870,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/ Bulan	5.882.011.376,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Sipil Negara		6.614.231.535,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	472.967.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		679.648.335,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Barang Milik Darah Perangkat Daerah	-	217.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Barang Milik Darah Perangkat Daerah		54.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Barang Milik Darah Perangkat Daerah		58.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Barang Milik Darah Perangkat Daerah		53.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Barang Milik Darah Perangkat Daerah		52.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			3 dokumen	236.130.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	126.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	75.130.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi*	-			8 layanan 100 %	1.053.111.220,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara	-	1.741.661.659,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	6.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		9.097.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		392.726.516,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	98.908.127,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		213.006.563,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	109.321.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		78.630.475,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	152.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		270.685.850,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	41.915.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		62.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	617.655.793,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		630.514.755,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	26.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah BMD yang diadakan*	-			4 Unit	122.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara	-	5.750.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		580.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		5.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			3 layanan	17.260.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara	-	37.328.238,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	8.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		15.054.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		7.274.238,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya*	-			28 Unit	241.940.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara	-	562.559.001,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				15 Unit	133.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		98.924.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	46.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		57.126.760,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	12.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		18.874.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.094.936.496,00**	-	-	-	-	-	-	**15.837.502.792,00**	-
	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		287.633.441,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**3.299.025.780,00**						**-**	**4.632.946.330,00**	
		[Meningkatnya kualitas pemenuhan jabatan ASN]	**Persentase Pemenuhan Jabatan ASN berdasarkan Anjab, ABK dan Standar Kompetensi Jabatan**	**80**	**53,56**	**60**	**70**	**3.299.025.780,00**	-	-	-	-	-	-	**4.632.946.330,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persentase layanan manajemen ASN yang berbasis digital* *Persentase Pengelolaan lembaga profesi ASN* *Jumlah Dokumen pengadaan dan pemberhentian*	-			50 % 100 % 3 dokumen	1.294.871.714,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Sipil Negara, masyarakat	-	1.041.393.692,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	43.759.308,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Sipil Negara, masyarakat		52.517.958,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	99.564.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Sipil Negara, masyarakat		425.710.824,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	42.766.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Sipil Negara, masyarakat		62.915.262,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		[Meningkatnya Kinerja, Kesejateraan, dan Disiplin ASN]	**Persentase ASN dengan predikat kinerja "Baik" dan "Sangat Baik"** **Persentase kedisiplinan ASN**	**90** **96**	**80**	**82**	**84**	**3.299.025.780,00**	-	-	-	-	-	-	**4.632.946.330,00**	-
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	672.926.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Sipil Negara, masyarakat		168.325.328,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian dan Layanan Pembinaan Kepegawaian]	**Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan kepegawaian** **Persentase layanan manajemen ASN yang berbasis digital**	**32,60** **90**	**15** **6,68**	**30** **8**	**11,86** **50**	**3.299.025.780,00**	-	-	-	-	-	-	**4.632.946.330,00**	-
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	300.432.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Sipil Negara, masyarakat		183.375.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	135.422.976,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Sipil Negara, masyarakat		148.549.320,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		[Meningkatnya kualitas pemenuhan jabatan ASN]	**Persentase Pemenuhan Jabatan ASN berdasarkan Anjab, ABK dan Standar Kompetensi Jabatan**	**80**	**53,56**	**60**	**70**	**3.299.025.780,00**	-	-	-	-	-	-	**4.632.946.330,00**	-
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah Dokumen manajemen / profil talenta Persentase pemenuhan jabatan manajerial*	-			0 dokumen 88 %	930.995.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Sipil Negara	-	2.221.690.610,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				4 Dokumen	180.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Sipil Negara		243.791.561,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				6 Laporan	181.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Sipil Negara		274.148.433,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		[Terlaksananya Manajemen Talenta PNS]	**Persentase tingkat kesesuaian kompetensi PNS dengan kompetensi jabatan**	**40,10**	**20,58**	**24**	**26,12**	**3.299.025.780,00**	-	-	-	-	-	-	**4.632.946.330,00**	-
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	568.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Sipil Negara		1.703.750.616,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)* *Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)* *Jumlah kegiatan pembinaan kepegawaian* *Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah* *Persentase PNS yang telah dinilai potensi dan kompetensinya*	-			25,47 % 85,5 % 1 kegiatan 87,5 % 45 %	546.688.962,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Sipil Negara	-	652.084.904,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Sipil Negara		145.923.857,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		[Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur]	**Persentase ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal sesuai standar jabatan** **Persentase SDM Aparatur yang meningkatkan kapasitasnya**	**60** **99.40**	**48** **98.5**	**50** **98.62**	**52** **98.82**	**3.299.025.780,00**	-	-	-	-	-	-	**4.632.946.330,00**	-
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				1 Dokumen	236.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Sipil Negara		324.806.814,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian dan Layanan Pembinaan Kepegawaian]	**Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan kepegawaian** **Persentase layanan manajemen ASN yang berbasis digital**	**32,60** **90**	**15** **6,68**	**30** **8**	**11,86** **50**	**3.299.025.780,00**	-	-	-	-	-	-	**4.632.946.330,00**	-
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina				314 Orang	120.538.962,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Sipil Negara		131.354.233,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		[Meningkatnya kualitas pemenuhan jabatan ASN]	**Persentase Pemenuhan Jabatan ASN berdasarkan Anjab, ABK dan Standar Kompetensi Jabatan**	**80**	**53,56**	**60**	**70**	**3.299.025.780,00**	-	-	-	-	-	-	**4.632.946.330,00**	-
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				1 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Sipil Negara		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		[Meningkatnya Kinerja, Kesejateraan, dan Disiplin ASN]	**Persentase ASN dengan predikat kinerja "Baik" dan "Sangat Baik"** **Persentase kedisiplinan ASN**	**90** **96**	**80**	**82**	**84**	**3.299.025.780,00**	-	-	-	-	-	-	**4.632.946.330,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah unit kerja yang telah menginplementasikan seluruh aturan disiplin sesuai peraturan yang berlaku* *Jumlah dokumen pengawasan disiplin* *Jumlah dokumen pengawasan kinerja ASN* *Jumlah ASN yang menerima penghargaan dan tanda jasa*	-			22 Unit 7 dokumen 4497 dokumen 553 orang	526.470.104,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Sipil Negara	-	717.777.124,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				4497 Dokumen	89.791.488,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Sipil Negara		125.886.513,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				12 Orang	81.218.616,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Sipil Negara		78.458.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				541 Orang	126.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Sipil Negara		46.718.846,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				250 Orang	84.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Sipil Negara		226.881.024,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				3 Laporan	80.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Sipil Negara		87.799.807,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				4 Dokumen	64.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Aparatur Sipil Negara		152.032.934,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**10.193.781.438,00**							**7.500.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.193.781.438,00**							**7.500.000,00**	
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**10.193.781.438,00**							**7.500.000,00**	
1.	**5.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**7.446.051.481,00**						**-**	**7.500.000,00**	
		[Nilai Kualitas Tata Kelola Organisasi]	**Nilai kualitas tata kelola organisasi** **Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100** **88**	**-** **0**	**100** **84**	**100** **84**	**7.446.051.481,00**	-	-	-	-	-	-	**7.500.000,00**	-
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			6 Dokumen	289.372.244,00			-	-	ASN	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	100.238.587,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	139.133.657,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.446.051.481,00**	-	-	-	-	-	-	**7.500.000,00**	-
	5.04.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			-				-	20.000.000,00	-	-	-	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Nilai Kualitas Tata Kelola Organisasi]	**Nilai kualitas tata kelola organisasi** **Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100** **88**	**-** **0**	**100** **84**	**100** **84**	**7.446.051.481,00**	-	-	-	-	-	-	**7.500.000,00**	-
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	5.803.778.853,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/ Bulan	5.488.778.853,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	315.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			3 Dokumen	345.471.680,00			-	-	ASN	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	27.471.680,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	112.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	206.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			8 Paket	528.118.704,00			-	-	ASN	-	7.500.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.908.530,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9.195.384,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	83.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	22.029.790,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		7.500.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	37.485.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	332.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket BMD yang diadakan* *Gedung*	-			0 Paket 0 Gedung	10.000.000,00			-	-	ASN	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			3 Laporan	126.000.000,00			-	-	ASN	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	115.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya*	-			381 Unit	343.310.000,00			-	-	ASN	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	43.310.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			0				1 0	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				150 Unit	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**2.747.729.957,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatanya layanan pengembangan kompetensi teknis]	**Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis**	**90**	**-**	**-**	**80**	**2.747.729.957,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Jumlah ASN yang memiliki Kompetensi Teknis*	-			1700 Orang	1.053.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	ASN	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				3933 Orang	1.003.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatnya layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional]	**Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, managerial dan fungsional**	**76**	**-**	**71**	**72**	**2.747.729.957,00**	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Jumlah dokumen laporan tim penjamin mutu* *Jumlah Dokumen Akreditasi yang tersusun*	-			1 Dokumen 2 Akreditasi	1.694.729.957,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	ASN	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				180 Orang	226.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				2 Laporan	174.252.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				15 Dokumen	132.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1500 Orang	1.142.477.557,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				2 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH						**7.495.613.585,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.495.613.585,00**							**0,00**	
	5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**						**7.495.613.585,00**							**0,00**	
1.	**5.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**6.545.613.585,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**0**	**100**	**100**	**6.545.613.585,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia*	-			100 %	0,00			-	-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Utara	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Utara		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.545.613.585,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.06.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				0 Data	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Utara		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.06.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0 Dokumen	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Utara		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah]	**Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah**	**100**	**0**	**100**	**100**	**6.545.613.585,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.06.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Utara		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 %	5.239.946.527,00			-	-	ASN BPPD	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/ Bulan	5.056.226.527,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN BPPD		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	183.720.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	ASN BPPD		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			100 %	32.000.000,00			-	-	ASN BPPD	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	ASN BPPD		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	32.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	ASN BPPD		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	718.979.226,00			-	-	ASN dan Non ASN BPPD	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	42.430.429,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	ASN dan Non ASN BPPD		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	104.328.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	ASN dan Non ASN BPPD		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	18.225.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	ASN dan Non ASN BPPD		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	552.080.847,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	ASN dan Non ASN BPPD		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1.914.950,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	ASN dan Non ASN BPPD		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang diadakan*	-			100 %	3.000.000,00			-	-	ASN dan Non ASN BPPD	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	ASN dan Non ASN BPPD		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	ASN dan Non ASN BPPD		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	ASN dan Non ASN BPPD		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	ASN dan Non ASN BPPD		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia*	-			100 %	287.322.832,00			-	-	ASN dan Non ASN BPPD	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	ASN dan Non ASN BPPD		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8.400.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	ASN dan Non ASN BPPD		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	273.922.832,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	ASN dan Non ASN BPPD		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*	-			100 %	264.365.000,00			-	-	BMD BPPD	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				18 Unit	183.240.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	BMD BPPD		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	67.825.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	BMD BPPD		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	13.300.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	BMD BPPD		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	BMD BPPD		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	BMD BPPD		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
2.	**5.06.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	*Persentase Kegiatan Renduk kedalam Renja PD*	-			0 %	0,00			-	-	Masyarakat di Kawasan Perbatasan	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				0 Dokumen	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Masyarakat di Kawasan Perbatasan		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan														
			Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Masyarakat di Kawasan Perbatasan		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	*Persentase Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Dikoordinasikan*	-			0 %	0,00			-	-	Masyarakat di Kawasan Perbatasan	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.06.02.1.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Masyarakat di Kawasan Perbatasan		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan				0 Dokumen	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Masyarakat di Kawasan Perbatasan		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.02.0003	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara				0 Dokumen	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Masyarakat di Kawasan Perbatasan		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.02.0004	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan														
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan				0 Dokumen	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Masyarakat di Kawasan Perbatasan		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi	*Persentase Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Dimonev*	-			0 %	0,00			-	-	Masyarakat di Kawasan Perbatasan	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan				0 Dokumen	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Masyarakat di Kawasan Perbatasan		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.1.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan				0 Laporan	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	Masyarakat di Kawasan Perbatasan		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
3.	**5.06.03**	**PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA**						**950.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pengelolaan kawasan perbatasan dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah]	**Persentase Kegiatan Rencana Induk yang Diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah Pengampu**	**60** **75**	**0**	**10**	**20** **25**	**950.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.06.03.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	*Persentase Perangkat daerah pengampu rencana induk yang melaksanakan kegiatan di kawasan perbatasan berdasarkan rencana induk*	-			42,86 %	100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Perangkat Daerah Pengampu Renduk	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.03.1.01.0001	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara														
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara yang disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Perangkat Daerah Pengampu Renduk		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
		[Meningkatnya koordinasi pengelolaan kawasan perbatasan]	**Persentase Kegiatan Rencana Aksi Berdasarkan Rencana Induk yang Direalisasikan oleh Perangkat Daerah Pengampu**	**100**	**0**	**100** **75**	**100** **80**	**950.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.06.03.1.02	Pelaksanaan Pembangunan Perbatasan Negara	*Persentase kecamatan perbatasan yang dikoordinasikan atau difasilitasi pengelolaan batas wilayah negaranya* *Persentase kegiatan rencana aksi yang dikoordinasikan pelaksanaannya* *Persentase kecamatan perbatasan yang diidentifikasi pemetaan potensinya*	-			4,34 % 100 % 17,39 %	300.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Perangkat Daerah Pengampu Renduk dan Kecamatan di Kawasan Perbatasan	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.06.03.1.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Perangkat Daerah Pengampu Renduk dan Kecamatan di Kawasan Perbatasan		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.03.1.02.0002	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Perangkat Daerah Pengampu Renduk dan Kecamatan di Kawasan Perbatasan		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.03.1.02.0003	Inventarisasi Potensi dan Pemanfaatan Sumber daya dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan														
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Perangkat Daerah Pengampu Renduk dan Kecamatan di Kawasan Perbatasan		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.03.1.02.0004	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara.														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan Negara				4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Perangkat Daerah Pengampu Renduk dan Kecamatan di Kawasan Perbatasan		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.06.03.1.03	Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Kawasan Perbatasan Negara	*Jumlah kegiatan kerjasama yang dikoordinasikan atau difasilitasi*	-			1 Kegiatan	100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Masyarakat di Kawasan Perbatasan	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.03.1.03.0001	Fasilitasi dan koordinasi kerjasama antar negara														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan koordinasi kerjasama antar negara				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Masyarakat di Kawasan Perbatasan		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.03.1.04	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Perbatasan Negara	*Jumlah kegiatan koordinasi penyelesaian batas wilayah negara yang dilaksanakan*	-			1 Kegiatan	50.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat di Kawasan Perbatasan	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.03.1.04.0001	Koordinasi Penyelesaian Batas Wilayah Negara.														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelesaian Batas Wilayah Negara.				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat di Kawasan Perbatasan		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
		[Meningkatnya kualitas monev terhadap pelaksanaan pengelolaan kawasan perbatasan]	**Persentase rekomendasi hasil monev yang dikeluarkan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan rencana aksi tahunan**	**100**	**0**	**100** **75**	**100** **80**	**950.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.06.03.1.05	Monitoring dan Evaluasi	*Persentase kecamatan perbatasan dengan data lengkap pada sistem informasi monev Persentase program/kegiatan/sub kegiatan rencana aksi yang dimonev*	-			17,39 % 100 %	250.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Perangkat Daerah Pengampu Renduk, Kecamatan di Kawasan Perbatasan, dan Masyarakat di Kawasan Perbatasan	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.03.1.05.0001	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara														
			Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Perangkat Daerah Pengampu Renduk, Kecamatan di Kawasan Perbatasan, dan Masyarakat di Kawasan Perbatasan		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.03.1.05.0002	Fasilitasi dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Provinsi dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas				0 Laporan	0,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Perangkat Daerah Pengampu Renduk, Kecamatan di Kawasan Perbatasan, dan Masyarakat di Kawasan Perbatasan		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.03.1.05.0003	Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Perangkat Daerah Pengampu Renduk, Kecamatan di Kawasan Perbatasan, dan Masyarakat di Kawasan Perbatasan		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
		[Meningkatnya koordinasi pengelolaan kawasan perbatasan]	**Persentase Kegiatan Rencana Aksi Berdasarkan Rencana Induk yang Direalisasikan oleh Perangkat Daerah Pengampu**	**100**	**0**	**100** **75**	**100** **80**	**950.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.06.03.1.06	Fasilitasi Pembinaan Masyarakat Perbatasan Negara	*Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan*	-			1 Kegiatan	150.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat di Kawasan Perbatasan	-	0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan negara dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan negara dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat di Kawasan Perbatasan		0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
		BADAN PENGHUBUNG						**12.483.597.687,00**							**30.199.607.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**12.483.597.687,00**							**21.499.607.000,00**	
	5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**						**12.483.597.687,00**							**21.499.607.000,00**	
1.	**5.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**9.018.755.687,00**						**-**	**17.397.080.000,00**	
		[Terlaksananya dukungan fasilitasi, koordinasi, dan representasi Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien di tingkat nasional]	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah**	**97.5**	**94**	**95**	**95.5**	**9.018.755.687,00**	-	-	-	-	-	-	**17.397.080.000,00**	-
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daeraj* *Indeks Kepuasan*	-			undefined undefined 87 %	57.612.568,00			-	-	-	-	59.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	57.612.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		59.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			12 Bulan	3.212.760.992,00			-	-	-	-	3.550.480.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/ Bulan	2.912.280.992,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	300.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.480.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	1.524.409.327,00			-	-	-	-	2.656.450.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	44.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.450.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	289.187.298,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		310.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	86.391.488,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		96.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.104.380.541,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan*	-			4 Unit	793.387.224,00			-	-	-	-	900.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	793.387.224,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		900.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			12 Bulan	1.826.725.576,00			-	-	-	-	1.903.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	82.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.143.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.183.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	436.725.576,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		460.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			31 Unit	1.603.860.000,00			-	-	-	-	8.328.150.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				45 Unit	928.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.428.150.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	275.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.600.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
2.	**5.07.02**	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**						**3.464.842.000,00**						**-**	**4.102.527.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya efektivitas koordinasi, komunikasi, dan fasilitasi kepentingan Pemerintah Daerah di tingkat pusat.]	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pimpinan**	**90.25** **95**	**85**	**85** **88**	**87.5** **88.25**	**3.464.842.000,00**	-	-	-	-	-	-	**4.102.527.000,00**	-
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	*Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung*	-			undefined undefined	3.464.842.000,00			-	-	Aparatur dan Masyarakat Kalimantan Utara	-	4.102.527.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				4 Laporan	2.097.527.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur dan Masyarakat Kalimantan Utara		2.597.527.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				4 Laporan	1.292.315.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur dan Masyarakat Kalimantan Utara		1.400.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.464.842.000,00**	-	-	-	-	-	-	**4.102.527.000,00**	-
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya														
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				4 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur dan Masyarakat Kalimantan Utara		105.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	X	**NON URUSAN**						**0,00**							**8.700.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**0,00**							**8.700.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**0,00**						**-**	**8.700.000.000,00**	
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan*	-			4 Unit	0,00			-	-	-	-	8.700.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	X.XX.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	X.XX.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
		INSPEKTORAT						**41.159.351.311,00**							**31.200.319.332,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**41.159.351.311,00**							**31.200.319.332,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**41.159.351.311,00**							**31.200.319.332,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**27.692.964.906,00**						**-**	**23.868.319.332,00**	
		[Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dilingkungan Inspektorat]	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**93**	**-**	**80**	**82**	**27.692.964.906,00**	-	-	-	-	-	-	**23.868.319.332,00**	-
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen perencanaan yg dihasilkan*	-			2 Laporan	250.000.000,00			-	-	-	-	98.319.332,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		98.319.332,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan*	-			24 Bulan	13.200.000.000,00			-	-	-	-	13.600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/ Bulan	12.700.000.000,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Bulan Pegawai Non PNS yang dibayarkan*	-			12 Bulan	1.600.000.000,00			-	-	-	-	1.700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	1.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah APIP yg bersertifikasi bidang pengawasan*	-			34 orang	2.900.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	-	-	2.820.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	-		320.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan Administrasi Umum*	-			49 unit	2.112.964.906,00			-	-	-	-	1.950.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	219.404.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	780.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	463.559.986,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	-		400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	-		700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	5.500.000.000,00			-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	-	-	2.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.500.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	-		2.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Ketersediaan penunjang perkantoran*	-			17 Bulan	1.050.000.000,00			-	-	-	-	850.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		850.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.692.964.906,00**	-	-	-	-	-	-	**23.868.319.332,00**	-
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah BMD yang di pelihara*	-			70 unit	1.080.000.000,00			-	-	-	-	850.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				13 Unit	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	INSPEKTORAT
		[Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dilingkungan Inspektorat]	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**93**	**-**	**80**	**82**	**27.692.964.906,00**	-	-	-	-	-	-	**23.868.319.332,00**	-
	6.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	-		50.000.000,00	INSPEKTORAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.692.964.906,00**	-	-	-	-	-	-	**23.868.319.332,00**	-
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT
		[Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dilingkungan Inspektorat]	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**93**	**-**	**80**	**82**	**27.692.964.906,00**	-	-	-	-	-	-	**23.868.319.332,00**	-
	6.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**7.480.766.540,00**						**-**	**3.642.000.000,00**	
		[Peningkatan Kepatuhan terhadap Peraturan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.480.766.540,00**	-	-	-	-	-	-	**3.642.000.000,00**	-
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Temuan yang ditindak lanjuti* *Jumlah Rekomendasi Pemeriksaan Tujuan Tertentu Yang di tindaklanjuti*	-			65 Laporan 4 Laporan	6.480.766.540,00			-	-	-	-	3.192.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				60 Laporan	2.452.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				12 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	-		700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				10 Laporan	330.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				10 Laporan	706.046.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				5 Laporan	760.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		760.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				7 Kesepakatan	782.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		782.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				6 Dokumen	950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		950.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Rekomendasi Pemeriksaan Tujuan Tertentu Yang di tindaklanjuti*	-			4 Rekomendasi	1.000.000.000,00			-	-	-	-	450.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				2 Laporan	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**5.985.619.865,00**						**-**	**3.690.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standar Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.985.619.865,00**	-	-	-	-	-	-	**3.690.000.000,00**	-
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah OPD yang menyusun dokumen RTP dan Manajemen Risiko*	-			85 Dokumen	2.821.664.965,00			-	-	-	-	1.270.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				40 Rekomendasi	1.551.664.965,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				45 Rekomendasi	1.270.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.270.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan*	-			52 Laporan	3.163.954.900,00			-	-	-	-	2.420.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				5 Perangkat Daerah	743.954.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				35 Perangkat Daerah	210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		210.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				8 Perangkat Daerah	210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		210.000.000,00	INSPEKTORAT
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**10.493.589.941,00**							**17.387.500.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**10.493.589.941,00**							**17.387.500.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**10.493.589.941,00**							**17.387.500.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**6.877.092.941,00**						**-**	**8.437.500.000,00**	
		[Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran]	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**6.877.092.941,00**	-	-	-	-	-	-	**8.437.500.000,00**	-
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	6.027.987.778,00			-	-	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	-	6.300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/ Bulan	5.793.507.778,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		6.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	234.480.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 Persen	75.000.000,00			-	-	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	-	450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	371.172.268,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	-	707.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	90.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.363.903,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				9 Dokumen	0,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	270.808.365,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan*	-			100 Persen	231.101.000,00			-	-	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	-	706.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	225.101.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya*	-			100 Persen	171.831.895,00			-	-	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	-	274.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				33 Unit	117.331.895,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	4.500.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		14.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	50.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**0,00**						**-**	**1.600.000.000,00**	
		[Terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa]	**Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**1.600.000.000,00**	-
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Persentase Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan*	-			100 Persen	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Terwujudnya masyarakat Kaltara yang berwawasan dan berkarakter kebangsaan	-	1.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Terwujudnya masyarakat Kaltara yang berwawasan dan berkarakter kebangsaan		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Terwujudnya masyarakat Kaltara yang berwawasan dan berkarakter kebangsaan		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka														
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Terwujudnya masyarakat Kaltara yang berwawasan dan berkarakter kebangsaan		600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**3.000.000.000,00**						**-**	**4.000.000.000,00**	
		[Meningkatnya Peran Parpol dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik]	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada / Pilpres / Pilleg**	**84**	**76**	**78**	**80**	**3.000.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**4.000.000.000,00**	-
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada/Pilpres/Pilleg*	-			86 Persen	3.000.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara melalui politik	-	4.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	3.000.000.000,00	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara melalui politik		3.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara melalui politik		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara melalui politik		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**110.509.000,00**						**-**	**2.100.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas]	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif**	**100**	**100**	**100**	**100**	**110.509.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.100.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Dibina dan Diawasi*	-			100 Persen	110.509.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Terwujudnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan	-	2.100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				50 Orang	73.009.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Terwujudnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan		2.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	37.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Terwujudnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**125.492.500,00**						**-**	**250.000.000,00**	
		[Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya]	**Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**125.492.500,00**	-	-	-	-	-	-	**250.000.000,00**	-
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Persentasi Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan*	-			100 Persen	125.492.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Terwujudnya rasa toleransi antara suku, umat beragama, ras dan golongan agar terciptanya ketahanan ekososbud dan agama	-	250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				50 Orang	65.730.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Terwujudnya rasa toleransi antara suku, umat beragama, ras dan golongan agar terciptanya ketahanan ekososbud dan agama		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				50 Orang	59.762.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Terwujudnya rasa toleransi antara suku, umat beragama, ras dan golongan agar terciptanya ketahanan ekososbud dan agama		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**380.495.500,00**						**-**	**1.000.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial]	**Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**380.495.500,00**	-	-	-	-	-	-	**1.000.000.000,00**	-
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Persentase Tingkat Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat*	-			100 Persen	380.495.500,00			-	-	Terwujudnya rasa tentram dan aman serta nyaman di lingkungan masyarakat	-	1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				50 Orang	50.939.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terwujudnya rasa tentram dan aman serta nyaman di lingkungan masyarakat		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				50 Orang	41.386.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terwujudnya rasa tentram dan aman serta nyaman di lingkungan masyarakat		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				2 Laporan	58.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terwujudnya rasa tentram dan aman serta nyaman di lingkungan masyarakat		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				1 Dokumen	229.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terwujudnya rasa tentram dan aman serta nyaman di lingkungan masyarakat		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**3.197.473.384.854,00**							**3.594.446.957.000,65**	

LAMPIRAN 2.

DUKUNGAN SUB KEGIATAN UNTUK PENGHAPUSAN KEMISKINAN KALTARA TAHUN 2026

Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Strategi	Klasifikasi
1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	5	3.000.000.000,00	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung
1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2000	1.500.000.000,00	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	20500 Peserta didik	13.256.750.000,00	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	73 Satuan Pendidikan	73	40.755.772.500,00	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung
1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Persentase PTK Profesional	Persen	60.28	178.857.072.100,00	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	178.857.072.100,00	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung
1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1000	657.500.000,00	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	11250	6.390.225.100,00	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	33	20.385.750.000,00	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung
1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	-	-	178.857.072.100,00	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung
1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	350	300.000.000,00	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	690	1.381.068.500,00	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	7	3.412.150.000,00	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung
1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	20	1.700.000.000,00	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung

Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Strategi	Klasifikasi
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	650.000.000,00	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	450.000.000,00	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang
1.02.02.1.02.0011	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	**Dokumen**	**1**	2.054.000.000,00	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang
1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	**Orang**	**100**	**450.000.000,00**	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	**Dokumen**	**1**	20.000.000.000,00	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung
1.03.02.1.01.0123	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	Unit	1	4.195.000.000,00	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung
1.03.02.1.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	KM	0,8	1.700.000.000,00	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung
1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	5	1.000.000.000,00	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung
1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	1	500.000.000,00	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang
1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	Liter/Detik	50	35.000.000.000,00	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung
1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	1	1.000.000.000,00	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung
1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten/Kota	5	300.000.000,00	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung
1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	2	400.000.000,00	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang

Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Strategi	Klasifikasi
1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	2	400.000.000,00	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Langsung
1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang	40	450.000.000,00	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung
1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	50	100.000.000,00	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung
1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	100	2.295.000.000,00	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	20	15.000.000,00	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	8	8.000.000,00	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	10	11.100.000,00	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung
1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	30	132.190.912,00	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	100	123.264.930,00	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	16	234.900.000,00	Meningkatkan Pendapatan	Langsung
2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	Orang	2	20.000.000,00	Meningkatkan Pendapatan	Langsung
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	5.000.000,00	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung

Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Strategi	Klasifikasi
2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Dokumen	1	50.000.000,00	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung
2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	1	350.000.000,00	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung
2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	1	150.000.000,00	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung
2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	Dokumen	1	100.000.000,00	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung
2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	-	-	-	58.884.825,00	Meningkatkan Pendapatan	Penunjang
2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	217.411.170,00	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang
2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	176.654.476,00	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang
2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Unit	1	420.000.000,00	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung
2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Unit	2	810.000.000,00	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung
2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	6	50.000.000,00	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang

Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran	Strategi	Klasifikasi
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit	200	600.000.000,00	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	50	250.000.000,00	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Orang	30	50.000.000,00	Meningkatkan Pendapatan	Langsung
3.27.02.1.07.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ton	1	150.000.000,00	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	500.000.000,00	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	2	650.000.000,00	Meningkatkan Pendapatan	Langsung
3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang	50	300.000.000,00	Meningkatkan Pendapatan	Langsung
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	25000	1.500.000.000,00	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung
3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	380	1.000.000.000,00	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung
3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Orang	20	75.000.000,00	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung

LAMPIRAN 3.

DUKUNGAN SUB KEGIATAN UNTUK PENGHAPUSAN STUNTING KALTARA TAHUN 2026

Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	73	40.755.772.500,00
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persentase lulusan SLB yang mandiri	Persen	22,22	178.857.072.100,00
		Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi	Persen	78,31	
		Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI	Persen	87,74	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	3	1.000.000.000,00
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	34	175.000.000,00
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persentase lulusan SLB yang mandiri	Persen	22,22	178.857.072.100,00
		Persentase lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi	Persen	78,31	
		Persentase Lulusan SMK yang diterima DUDI	Persen	87,74	
1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	7	200.000.000,00

Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	650.000.000,00
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	450.000.000,00
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	5	785.000.000,00
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	400.000.000,00
1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	45	5.000.000.000,00
1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	5	400.000.000,00
1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten/Kota	5	1.000.000.000,00
1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	Liter/Detik	50	35.000.000.000,00

Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran
1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	1	1.000.000.000,00
1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten/Kota	5	300.000.000,00
1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				3.025.000.000,00
1.03.05.1.01.0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kabupaten/Kota	5	25.000.000,00
		Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang layak	Persen	87,17	3.025.000.000,00
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	20	15.000.000,00
1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	1	30.000.000,00
1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	1	67.171.319,00

Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	8	8.000.000,00
2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	176.654.476,00
2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	30	3.500.000.000,00
3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	3	290.000.000,00
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	1	50.000.000,00

Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	200.000.000,00
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	10	246.650.000,00

LAMPIRAN 4.

DUKUNGAN SUB KEGIATAN UNTUK PENGENDALIAN INFLASI KALTARA TAHUN 2026

Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran
1.03.02.1.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	KM	0,8	1.700.000.000,00
1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	5	1.000.000.000,00
1.03.10.1.01.0052	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter	15	200.000.000,00
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	2,5	10.000.000.000,00
1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan				
1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Meter	15	10.000.000.000,00
1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	KM	33,33	10.000.000.000,00
1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	KM	4	15.000.000.000,00
1.03.10.1.01.0058	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	6,17	46.150.000.000,00
2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)				
2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				
2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				
2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	Laporan	1	5.000.000,00
2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	Laporan	1	50.000.000,00

Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran
2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Laporan	1	5.000.000,00
2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1	5.000.000,00
2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				
2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				
2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				
2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				
2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0		10	200.000.000,00
2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Laporan	1	100.000.000,00
2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				
2.15.02.1.10.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi				

Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran
2.15.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Laporan	12	82.500.000,00
2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Unit	1	420.000.000,00
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				
3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Dokumen	0	0
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				
3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Unit	0	0
3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				
3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Orang	30	50.000.000,00

Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran
3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	0	0
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	350.000.000,00
3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				
3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang	5700	2.500.000.000,00
3.27.02.1.02.0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Gram	7857	10.000.000,00
3.27.02.1.02.0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang	3857	2.500.000.000,00
3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	5,6	3.000.000.000,00
3.27.02.1.02.0014	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	Ton	0,4	100.000.000,00

Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran
3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				
3.27.02.1.07.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ton	1	150.000.000,00
3.27.02.1.07.0003	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Dosis	300	10.000.000,00
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	500.000.000,00
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	1	1.000.000.000,00
		Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian	Persen	100	4.000.000.000,00
3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan				
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				

Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran
3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Laporan	1	57.000.000,00
3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	1	50.000.000,00
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian				50.000.000,00
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	1	50.000.000,00
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	2	650.000.000,00
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani				
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani				
3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit				300.000.000,00
3.28.03.1.09.0006	Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Ha	50	300.000.000,00
3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	Dokumen	1	0
3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	1	150.000.000,00
3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Orang	20	75.000.000,00
3.30.03.1.01.0004	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang	Kegiatan	1	0

Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran
3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	12	75.000.000,00
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	12	175.000.000,00
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	2	1.000.000.000,00
3.30.04.1.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Laporan	1	50.000.000,00
4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	7	1.100.000.000,00
5.01.02.1.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerjasama	3	220.920.072,00

LAMPIRAN 5.

Dukungan Sub Kegiatan untuk Penerapan SPM Kaltara Tahun 2026

A. Pendidikan

No.	Kelompok Indikator (Provinsi)	Indikator Kinerja Urusan (Indikator Prioritas SPM)	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran
1	Angka Partisipasi Sekolah	1). Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS) 2). Jumlah Anak Usia 4 18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	15 Dokumen	50.000.000,00
			1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	18 Dokumen	50.000.000,00
			1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	16 Dokumen	45.000.000,00
			1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00
			1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	25 Dokumen	50.000.000,00

			1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00
			1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	20500 Peserta didik	13.256.750.000,00
			1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	11250 Peserta didik	6.390.225.100,00
			1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	690 Peserta Didik	1.381.068.500,00
			1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2000 Paket	1.500.000.000,00
			1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1000 Paket	657.500.000,00
			1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	350 Paket	300.000.000,00
			1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1 Unit	1.500.000.000,00
			1.01.02.1.03.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1 Unit	5.000.000.000,00
			1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	1 Ruang	2.120.796.000,00

2	Literasi dan Numerasi	1). Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional 2). Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional 3). Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional 4). Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan	5 Laporan	100.000.000,00
			1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	1115 Orang	20.000.000.000,00
			1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	4176 Orang	15.000.000.000,00
			1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	876 Orang	3.000.000.000,00
			1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	66 Orang	834.000.000,00

			1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	36 Orang	800.000.000,00
			1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		620.000.000,00
			1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	20 Orang	200.000.000,00
			1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	34 Orang	261.500.000,00
			1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	250 Orang	133.260.000,00
			1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	34 Komunitas	197.850.000,00

			1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	5 Konten Digital	133.260.000,00
			1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	5 Konten Digital	127.560.000,00
			1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	4 Paket	1.875.000.000,00
			1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	10 Paket	800.000.000,00
3	Kekhususan SMK	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	50.000.000,00
			1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang	500 Orang	285.000.000,00
			1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	250 Peserta Didik	200.000.000,00
			1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	400 Peserta Didik	174.999.147,00
			1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	45 Peserta Didik	80.000.000,00
			1.01.02.1.02.0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang	30 Orang	345.000.000,00

4	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	1). Iklim keamanan SMA 2). Iklim keamanan SMK 3). Iklim keamanan SDLB 4). Iklim keamanan SMPLB 5). Iklim keamanan SMALB 6). Iklim kebinekaan SMA 7). Iklim kebinekaan SMK 8). Iklim kebinekaan SDLB 9). Iklim kebinekaan SMPLB 10). Iklim kebinekaan SMALB 11). Iklim inklusivitas SMA 12). Iklim inklusivitas SMK 13). Iklim inklusivitas SDLB 14). Iklim inklusivitas SMPLB 15). Iklim inklusivitas SMALB	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	20.300.000,00
			1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	50.000.000,00
			1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	23 Satuan Pendidikan	100.000.000,00
			1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00

			1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1 Kegiatan	30.000.000,00
			1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00
			1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1 Kegiatan	16.000.000,00
			1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2 Kegiatan	12.000.000,00

B. Pekerjaan Umum

No.	Kelompok Indikator (Provinsi)	Indikator Kinerja Urusan (Indikator Prioritas SPM)	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang mendapatkan air minum layak	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	Liter/Detik	50 Liter/Detik	35.000.000.000,00

			1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/ Kota	300.000.000,00
			1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/ Kota	1.000.000.000,00
			1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	1 Unit	1.000.000.000,00
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang layak	1.03.05.1.01.0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kabupaten/Kota	5 kabupaten/ kota	25.000.000,00

C. Perumahan Rakyat

No.	Kelompok Indikator (Provinsi)	Indikator Kinerja Urusan (Indikator Prioritas SPM)	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Persentase Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1.04.02.1.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangan	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00

			1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00
			1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	2 Unit Rumah	400.000.000,00
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.	Persentase Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00

D. Sosial

No.	Kelompok Indikator (Provinsi)	Indikator Kinerja Urusan (Indikator Prioritas SPM)	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Pagu Anggaran
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam pant	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	20 Orang	15.000.000,00
			1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00

			1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	1 Dokumen	67.171.319,00
			1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	8 Orang	8.000.000,00
			1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50 Orang	1.541.760.000,00
			1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50 Orang	48.000.000,00
			1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	10 Orang	11.100.000,00
			1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	10 Orang	30.000.000,00
2	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi		1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	100 Orang	123264930,00